



Pemerintah
Kabupaten Purworejo

ROMANSA
Purworejo
2020



**RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2020**



**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan tahunan daerah, Pemerintah Daerah setiap tahun wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 504);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2020.**

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Purworejo untuk Tahun 2020 dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021.

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : Pendahuluan;
- b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- c. BAB III : Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah;
- d. BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
- e. BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
- f. BAB VI : Kinerja penyelenggaraan pemerintah Daerah;
- g. BAB VII : Penutup.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sebagai:

- a. pedoman bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam penyempurnaan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2020;
- b. pedoman dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2020.

Pasal 5

Dalam hal terdapat program dan kegiatan yang merupakan kebijakan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dianggarkan setelah ditetapkannya Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020, namun belum tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020, program dan kegiatan dimaksud ditetapkan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 31 - 05 - 2019

BUPATI PURWOREJO,



AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 31 - 05 - 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,



SAÏD ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2019 NOMOR 21 SERI E NOMOR 17

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR ISTILAH.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-7
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-10
1.4. Maksud dan Tujuan	I-11
1.5. Sistematika Dokumen RKPD	I-11
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1. Kondisi Umum Daerah.....	II-1
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi.....	II-1
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-16
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum.....	II-35
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah.....	II-66
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD dan Realisasi RPJMD sampai Semester I Tahun 2019	II-78
2.2.1. Misi ke-1: Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai Kabupaten yang Religius dan Demokratis.....	II-78
2.2.2. Misi ke-2: Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai Gerbang Ekonomi Utama Bagian Selatan Provinsi Jawa Tengah yang Berbasis Pertanian, Pariwisata, Industri, dan Perdagangan.....	II-79
2.2.3. Misi ke-3: Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai Daerah Tujuan Wisata Unggulan Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal.....	II-84
2.2.4. Misi ke-4: Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai Kabupaten yang Unggul di Bidang Seni, Budaya, Olahraga.....	II-85

2.2.5. Misi ke-5: Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai Kabupaten yang Unggul di Bidang Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan.....	II-86
2.2.6. Misi ke-6: Mewujudkan Kabupaten Purworejo menjadi Kabupaten yang Memiliki Aparatur Pemerintahan yang Mampu Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Partisipatif yang Berorientasi pada Optimalisasi Pelayanan Publik.....	II-87
2.2.7. Misi ke-7: Mewujudkan Desa di Kabupaten Purworejo sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi melalui Pemberdayaan Masyarakat dalam Berbagai Bidang.....	II-94
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah.....	II-115
2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	II-115
2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah.....	II-115
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN	
DAERAH	III-1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
3.1.1. Arah Kebijakan Ekonomi Nasional.....	III-1
3.1.2. Arah Kebijakan Ekonomi Regional.....	III-4
3.1.3. Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Purworejo.....	III-5
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-8
3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan.....	III-8
3.2.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah....	III-12
3.2.3. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah.....	III-12
3.2.4. Arah Kebijakan Belanja Daerah	III-13
3.2.5. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah.....	III-13
3.2.6. Kebijakan Surplus/Defisit APBD.....	III-40
3.2.7. Kebijakan Anggaran Pembiayaan Daerah.....	III-41

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH....	IV-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-1
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2020....	IV-5
4.2.1. Sasaran Pembangunan Nasional, Provinsi, dan Daerah.....	IV-5
4.2.2. Penyelarasan Prioritas Nasional, Provinsi, dan Daerah.....	IV-6
4.2.3. Isu Strategis Pembangunan Daerah.....	IV-7
4.2.4. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah	IV-12
4.2.5. Arah Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Pokok-Pokok Pikiran DPRD....	IV-14
4.2.6. Penetapan Prioritas Pembangunan Daerah.....	IV-21
4.2.7. Arah Pengembangan Wilayah.....	IV-71
 BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	 V-1
 BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	 VI-1
 BAB VII PENUTUP	 VII-1

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Jumlah Desa dan Luas Kecamatan Kabupaten Purworejo.....	II-2
Tabel 2.2	Perkembangan Curah Hujan Kabupaten Purworejo.....	II-6
Tabel 2.3	Penggunaan Lahan Kabupaten Purworejo.....	II-6
Tabel 2.4	Perkembangan Besarnya Rasio Beban Ketergantungan	II-8
Tabel 2.5	Laju Pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2013-2017	II-16
Tabel 2.6	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dan Indonesia Tahun 2014-2017 (Berdasar PDRB tahun dasar 2010)	II-17
Tabel 2.7	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Purworejo dengan Kabupaten Tetangga Berdasar PDRB ADHK Tahun 2013-2017.....	II-18
Tabel 2.8	Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen) 2013–2017	II-19
Tabel 2.9	PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha (Rupiah), 2013-2017	II-21
Tabel 2.7	Laju Inflasi Kota Purworejo Menurut Kelompok Barang dan Jasa Tahun 2016-2018 (2007=100)	II-19
Tabel 2.10	Kumulatif Inflasi Kabupaten Purworejo dan Jawa Tengah Tahun 2016-2018	II-22
Tabel 2.11	Kumulatif Inflasi Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014-2018	II-23
Tabel 2.12	Jumlah Rumah Tangga Miskin dan Penduduk Miskin menurut Kecamatan di Kabupaten Purworejo 2018	II-26
Tabel 2.13	Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Purworejo dengan Kabupaten Tetangga Tahun 2015.....	II-27
Tabel 2.14	Trend Data Stunting Kabupaten Purworejo.....	II-29
Tabel 2.15	Jumlah Seni dan Budaya, serta Cagar Budaya Yang Dilestraikan Kabupaten Purworejo	

	Halaman
	Tahun 2015-2018 II-34
Tabel 2.16	Jumlah Organisasi, Klub, Wahana dan Kegiatan Olahraga Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2018 II-35
Tabel 2.17	Angka Partisipasi Kasar (APK) dari Tahun 2014 – 2018 II-35
Tabel 2.18	Angka Partisipasi Murni Dari Tahun 2014 – 2018 II-36
Tabel 2.19	Angka Putus Sekolah Tahun 2014 – 2018 II-36
Tabel 2.20	Persentase kelulusan SD/MI, SMP/MTs Tahun 2014 - 2018 II-37
Tabel 2.21	Banyaknya Sekolah TK, SD/MI, SMP/MTs se Kabupaten Purworejo Tahun 2015-2017 II-37
Tabel 2.22	Banyaknya Murid TK, SD/MI, SMP/MTs se Kabupaten Purworejo Tahun 2015-2017 II-37
Tabel 2.23	Banyaknya Guru TK, SD/MI, SMP/MTs se Kabupaten Purworejo Tahun 2015-2017 II-38
Tabel 2.24	Rasio Guru TK, SD/MI, SMP/MTs se Kabupaten Purworejo Tahun 2015-2017 II-38
Tabel 2.25	Capaian Kinerja Bidang Kesehatan Kabupaten Purworejo Tahun 2014-2018 II-38
Tabel 2.26	Sarana dan Tenaga Kesehatan Kabupaten Purworejo tahun 2017 II-39
Tabel 2.27	Kondisi Fisik Jalan Kabupaten Purworejo Tahun 2015-2018 II-39
Tabel 2.28	Kondisi Fisik Jembatan Kabupaten Purworejo Tahun 2015-2018 II-39
Tabel 2.29	Penanganan Penyediaan Akses Air Minum di Kabupaten Purworejo Tahun 2015-2018 II-40
Tabel 2.30	Kinerja Perumahan Rakyat Kabupaten Purworejo Tahun 2015-2018 II-40
Tabel 2.31	Daftar Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Purworejo.. II-41
Tabel 2.32	Data Persentase partisipasi masyarakat dalam PILPRES, PILEG, PILKADA Tahun 2015-2018.. II-42
Tabel 2.33	Pencapaian Persentase Penanggulangan Bencana Tahun 2015-2018 II-42
Tabel 2.34	Perkembangan kapasitas Tramtibuslinmas Kabupaten Purworejo Tahun 2014-2018 II-42
Tabel 2.35	Angka kemiskinan di Kabupaten Purworejo

	Halaman
	Tahun 2015 – 2018 II-43
Tabel 2.36	Data PMKS yang tertangani Tahun 2015 – 2018 II-43
Tabel 2.37	Jumlah Panti Yang Memenuhi Standar di Kab.Purworejo Tahun 2015-2018 II-44
Tabel 2.38	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Purworejo Tahun 2014-2017 II-44
Tabel 2.39	Pencapaian Kinerja Urusan Ketahanan Pangan Dari Tahun 2015-2018 II-45
Tabel 2.40	Sertifikat Tanah di Kabupaten Purworejo Tahun 2018..... II-46
Tabel 2.41	Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Purworejo Dari Tahun 2016 – 2018 II-47
Tabel 2.42	Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purworejo dari Tahun 2016- 2018 II-47
Tabel 2.43	Lokasi Desa Rentan dan Rentan Pangan Kabupaten Purworejo II-48
Tabel 2.44	Persentase Wanita Umur 15-49 Tahun yang Berstatus Kawin menurut Status KB tahun 2015-2017 II-48
Tabel 2.45	Persentase Wanita Umur 15-49 Tahun yang Berstatus Kawin menurut Status KB yang Sedang Digunakan II-49
Tabel 2.46	Cakupan Layanan Cyber City dan Sistem Informasi Pemerintah Daerah kabupaten Purworejo tahun 2015-2017 II-50
Tabel 2.47	Persentase Jumlah Koperasi Sehat Kabupaten Purworejo Tahun 2015-2018 II-50
Tabel 2.48	Jumlah Organisasi, Klub, Wahana dan Kegiatan Olahraga Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2018 II-51
Tabel 2.49	Ketersediaan data statistik Kabupaten Purworejo Tahun 2015-2018 II-52
Tabel 2.50	Capaian Kinerja Urusan Persandian Tahun 2015-2018 II-52
Tabel 2.51	Jumlah Seni dan Budaya, serta Cagar Budaya Yang Dilestraikan Kabupaten Purworejo Tahun 2015-2018 II-53
Tabel 2.52	Pencapaian Kinerja Urusan Perpustakaan

	Halaman
	Tahun 2015-2017 II-53
Tabel 2.53	Prosentase Tertib Administrasi Kearsipan Lembaga Pemerintah Tahun 2015-2018 II-54
Tabel 2.54	Potensi Kelautan dan Perikanan Kabupaten Purworejo..... II-54
Tabel 2.55	Kunjungan Wisata di Kabupaten Purworejo..... II-56
Tabel 2.56	Pencapaian Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2015-2018 II-56
Tabel 2.57	Pencapaian Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2015-2017 II-57
Tabel 2.58	Pencapaian Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2015-2018 II-57
Tabel 2.59	Cakupan Optimalisasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2015-2018 II-59
Tabel 2.60	Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Purworejo II-59
Tabel 2.61	Sistem Informasi Daerah..... II-60
Tabel 2.62	Lomba Kreativitas dan Inovasi (Krenova)..... II-60
Tabel 2.63	Kinerja Keuangan Daerah Dari Tahun 2015- 2018 II-61
Tabel 2.64	Target dan realisasi PAD dari Tahun 2015- 2018 II-61
Tabel 2.65	Komponen PAD dari Tahun 2015-2018 II-62
Tabel 2.66	Ketepatan Waktu Penetapan APBD dari Tahun 2015-2019 II-63
Tabel 2.67	Kondisi Bidang Kepegawaian Tahun 2015- 2018 II-63
Tabel 2.68	Tingkat Pendidikan PNS Kabupaten Purworejo Tahun 2015-2018 II-65
Tabel 2.69	Kinerja Bidang Hukum Kabupaten Purworejo Tahun 2015-2018 II-66
Tabel 2.70	Perkembangan Nilai Tukar Petani Kabupaten Purworejo Tahun 2015-2018 II-67
Tabel 2.71	Perkembangan Nilai Tukar Petani Tahun 2017 Berdasar Bulan dan Sub Sektor Pertanian II-68
Tabel 2.72	Ringkasan Perkembangan Nilai Tukar Petani Tahun 2018 Berdasar Bulan Per Sub Sektor Pertanian..... II-68
Tabel 2.73	Kondisi Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Kabupaten Purworejo Tahun 2015-2018 II-69

		Halaman
Tabel 2.74	Tingkat kriminalitas di Kabupaten Purworejo Tahun 2017	II-60
Tabel 2.75	Komponen IPM Kabupaten Purworejo Tahun 2010-2017.....	II-73
Tabel 2.76	Perbandingan IPM Kabupaten Purworejo dengan Kabupaten Tetangga Tahun 2014-2018.....	II-73
Tabel 2.77	Perbandingan TPT Kabupaten Purworejo dengan Kabupaten Tetangga Tahun 2012-2017.....	II-77
Tabel 2.78	Evaluasi Pelaksanaan Program pada Misi ke-1 Urusan Kesekretariatan Daerah s/d Bulan Mei Tahun Anggaran 2019.....	II-78
Tabel 2.79	Evaluasi Pelaksanaan Program pada Misi ke-2 Urusan Kemiskinan s/d Bulan Mei Tahun Anggaran 2019.....	II-79
Tabel 2.80	Evaluasi Pelaksanaan Program pada Misi ke-2 Urusan Ketenagakerjaan s/d Bulan Mei Tahun Anggaran 2019.....	II-79
Tabel 2.81	Evaluasi Pelaksanaan Program pada Misi ke-2 Urusan Pertanian s/d Bulan Mei Tahun Anggaran 2019.....	II-80
Tabel 2.82	Evaluasi Pelaksanaan Program pada Misi ke-2 Urusan Agribisnis s/d Bulan Mei Tahun Anggaran 2019.....	II-81
Tabel 2.83	Evaluasi Pelaksanaan Program pada Misi ke-2 Urusan Pariwisata s/d Bulan Mei Tahun Anggaran 2019.....	II-81
Tabel 2.84	Evaluasi Pelaksanaan Program pada Misi ke-2 Urusan Industri s/d Bulan Mei Tahun Anggaran 2019.....	II-81
Tabel 2.85	Evaluasi Pelaksanaan Program pada Misi ke-2 Urusan Koperasi dan UKM s/d Bulan Mei Tahun Anggaran 2019.....	II-82
Tabel 2.86	Evaluasi Pelaksanaan Program pada Misi ke-2 Urusan Penanaman Modal s/d Bulan Mei Tahun Anggaran 2019.....	II-82
Tabel 2.87	Evaluasi Pelaksanaan Program pada Misi ke-2 Urusan Perdagangan s/d Bulan Mei Tahun Anggaran 2019.....	II-82

		Halaman
Tabel 2.88	Evaluasi Pelaksanaan Program pada Misi ke-2 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang s/d Bulan Mei Tahun Anggaran 2019.....	II-83
Tabel 2.89	Evaluasi Pelaksanaan Program pada Misi ke-2 Urusan Perhubungan s/d Bulan Mei Tahun Anggaran 2019.....	II-83
Tabel 2.90	Evaluasi Pelaksanaan Program pada Misi ke-2 Urusan Perumahan Rayat, Kawasan Pemukiman dan Petanahan s/d Bulan Mei Tahun Anggaran 2019.....	II-84
Tabel 2.91	Evaluasi Pelaksanaan Program pada Misi ke-2 Urusan Lingkungan Hidup s/d Bulan Mei Tahun Anggaran 2019.....	II-84
Tabel 2.92	Evaluasi Pelaksanaan Program pada Misi ke-3 Urusan Kebudayaan s/d Bulan Mei Tahun Anggaran 2019.....	II-85
Tabel 2.93	Evaluasi Pelaksanaan Program pada Misi ke-4 Urusan Kebudayaan s/d Bulan Mei Tahun Anggaran 2019.....	II-85
Tabel 2.94	Evaluasi Pelaksanaan Program pada Misi ke-4 Urusan Pemuda dan Olahraga s/d Bulan Mei Tahun Anggaran 2019.....	II-86
Tabel 2.95	Evaluasi Pelaksanaan Program pada Misi ke-5 Urusan Pendidikan s/d Bulan Mei Tahun Anggaran 2019.....	II-86
Tabel 2.96	Evaluasi Pelaksanaan Program pada Misi ke-5 Urusan Kesehatan s/d Bulan Mei Tahun Anggaran 2019.....	II-87
Tabel 2.97	Evaluasi Pelaksanaan Program pada Misi ke-6 Urusan Keuangan s/d Bulan Mei Tahun Anggaran 2019.....	II-87
Tabel 2.98	Evaluasi Pelaksanaan Program pada Misi ke-6 Urusan Perencanaan s/d Bulan Mei Tahun Anggaran 2019.....	II-88
Tabel 2.99	Evaluasi Pelaksanaan Program pada Misi ke-6 Urusan Pengawasan s/d Bulan Mei Tahun Anggaran 2019.....	II-88
Tabel 2.100	Evaluasi Pelaksanaan Program pada Misi ke-6 Urusan Penelitian Pengembangan s/d Bulan Mei Tahun Anggaran 2019.....	II-89

	Halaman	
Tabel 2.101	Evaluasi Pelaksanaan Program pada Misi ke-6 Urusan Kepegawaian s/d Bulan Mei Tahun Anggaran 2019.....	II-89
Tabel 2.102	Evaluasi Pelaksanaan Program pada Misi ke-6 Urusan Kesekretariatan Daerah s/d Bulan Mei Tahun Anggaran 2019.....	II-89
Tabel 2.103	Evaluasi Pelaksanaan Program pada Misi ke-6 Urusan Fungsi Penunjang Tugas Camat s/d Bulan Mei Tahun Anggaran 2019.....	II-90
Tabel 2.104	Evaluasi Pelaksanaan Program pada Misi ke-6 Urusan Dukungan Penyelenggaraan Fungsi DPRD s/d Bulan Mei Tahun Anggaran 2019....	II-90
Tabel 2.105	Evaluasi Pelaksanaan Program pada Misi ke-6 Urusan Kominfo s/d Bulan Mei Tahun Anggaran 2019.....	II-90
Tabel 2.106	Evaluasi Pelaksanaan Program pada Misi ke-6 Urusan Admindukcapil s/d Bulan Mei Tahun Anggaran 2019.....	II-91
Tabel 2.107	Evaluasi Pelaksanaan Program pada Misi ke-6 Urusan Pertanahan s/d Bulan Mei Tahun Anggaran 2019.....	II-91
Tabel 2.108	Evaluasi Pelaksanaan Program pada Misi ke-6 Urusan Sosial s/d Bulan Mei Tahun Anggaran 2019.....	II-91
Tabel 2.109	Evaluasi Pelaksanaan Program pada Misi ke-6 Urusan Pengendalian Penduduk dan KB s/d Bulan Mei Tahun Anggaran 2019.....	II-92
Tabel 2.110	Evaluasi Pelaksanaan Program pada Misi ke-6 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak s/d Bulan Mei Tahun Anggaran 2019.....	II-92
Tabel 2.111	Evaluasi Pelaksanaan Program pada Misi ke-6 Urusan Tramtibumlinmas s/d Bulan Mei Tahun Anggaran 2019.....	II-92
Tabel 2.112	Evaluasi Pelaksanaan Program pada Misi ke-6 Urusan Perpustakaan s/d Bulan Mei Tahun Anggaran 2019.....	II-93
Tabel 2.113	Evaluasi Pelaksanaan Program pada Misi ke-6 Urusan Kearsipan s/d Bulan Mei Tahun Anggaran 2019.....	II-93

	Halaman	
Tabel 2.114	Evaluasi Pelaksanaan Program pada Misi ke-6 Urusan Transmigrasi s/d Bulan Mei Tahun Anggaran 2019.....	II-93
Tabel 2.115	Evaluasi Pelaksanaan Program pada Misi ke-6 Urusan ESDM s/d Bulan Mei Tahun Anggaran 2019.....	II-93
Tabel 2.116	Evaluasi Pelaksanaan Program pada Misi ke-6 Urusan Administrasi Umum s/d Bulan Mei Tahun Anggaran 2019.....	II-94
Tabel 2.117	Evaluasi Pelaksanaan Program pada Misi ke-7 Urusan Pemberdayaan Masyarakat s/d Bulan Mei Tahun Anggaran 2019.....	II-94
Tabel 2.118	Realisasi Kinerja Fisik dan Keuangan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo sampai dengan Bulan Mei Tahun 2019.....	II-95
Tabel 3.1	Pertumbuhan PDB Sisi Permintaan.....	II-2
Tabel 3.2	Pertumbuhan PDB Sisi Produksi.....	III-3
Tabel 3.3	Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Jawa Tengah Tahun 2018 dan 2019.....	III-5
Tabel 3.4	PDRB Atas Dasar Harga Konstan dan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2016-2020	III-7
Tabel 3.5	Kontribusi PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha (ADH Konstan) Tahun 2016 -2017	III-8
Tabel 3.6	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan APBD Kabupaten Purworejo TA 2016 – 2020 ...	III-9
Tabel 3.7	Kinerja Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2018	III-10
Tabel 3.8	Perbandingan Proyeksi Pendapatan Daerah dalam RPJMD dan RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2020	III-11
Tabel 3.9	Realisasi, Target dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020	III-39
Tabel 3.10	Perbandingan Belanja Daerah dalam RPJMD dan RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2020..	III-40
Tabel 3.11	Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020	III-45
Tabel 3.12	Perbandingan Proyeksi Pembiayaan Daerah dalam RPJMD dan RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2020	III-46
Tabel 4.1	Hubungan Misi, Tujuan, dan Sasaran	

		Halaman
	Pembangunan.....	IV-1
Tabel 4.2	Sasaran Makro Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten Purworejo Tahun 2020.....	IV-5
Tabel 4.3	Penyelarasan Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi Jawa Tengah, dan Prioritas Kabupaten Purworejo.....	IV-6
Tabel 4.4	Prioritas, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2020....	IV-22
Tabel 4.5	<i>Cascading</i> Misi, Prioritas, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020.....	IV-29
Tabel 5.1	Program Prioritas dan Pagu Indikatif Tahun 2020	V-2
Tabel 5.2	Rencana Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021	V-11
Tabel 6.1	Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2020	VI-1
Tabel 6.2	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pemerintahan Kabupaten Purworejo Tahun 2020	VI-3

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1.1	Tahapan Dan Tata Cara Penyusunan RKPD.	I-4
Gambar 1.2	Hubungan RPJM Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I-6
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kabupaten Purworejo.....	II-1
Gambar 2.2	Prosentase Persebaran Penduduk Kabupaten Purworejo	II-7
Gambar 2.3	Piramida Penduduk Kabupaten Purworejo Tahun 2017	II-8
Gambar 2.4	Perkembangan Ketimpangan Antar Wilayah (Indeks Williamson) di Kab.Purworejo Tahun 2010 s.d 2015	II-12
Gambar 2.5	Tipologi Wilayah Kabupaten Purworejo	II-13
Gambar 2.6	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Purworejo Tahun 2014-2017.....	II-18
Gambar 2.7	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Purworejo dengan Kabupaten Tetangga Berdasar PDRB ADHK Tahun 2013-2017.....	II-19
Gambar 2.8	Inflasi Kabupaten Purworejo.....	II-23
Gambar 2.9	Perbandingan Laju Inflasi Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2014-2018.....	II-24
Gambar 2.10	Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Purworejo Tahun 2012-2018.....	II-24
Gambar 2.11	Rata-rata Kesenjangan Pengeluaran Antar Penduduk Miskin Tahun 2012-2017.....	II-26
Gambar 2.12	Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Purworejo dengan Kabupaten Tetangga.....	II-27
Gambar 2.13	Angka Kesakitan di Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2017.....	II-28
Gambar 2.14	Harapan Lama Sekolah (Tahun) dan Rata- rata Lama Sekolah (Tahun) 2010-2017.....	II-30
Gambar 2.15	Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas menurut Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 2016-2017.....	II-32
Gambar 2.16	Jumlah dan Persentase Penduduk Usia Kerja	

		Halaman
	menurut Jenis Kegiatan Kabupaten Purworejo Tahun 2017.....	II-33
Gambar 2.17	Persentase Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama Kabupaten Purworejo.....	II-33
Gambar 2.18	Data PNS yang Mengikuti Diklatpim, Prajabatan, Teknis, dan Fungsional.....	II-65
Gambar 2.19	Perkembangan IPM Kabupaten Purworejo dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2017.....	II-71
Gambar 2.20	Pertumbuhan IPM Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2017.....	II-72
Gambar 2.21	Pertumbuhan IPM Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2017.....	II-74
Gambar 2.22	Perkembangan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Purworejo Tahun 2012-2017.....	II-74
Gambar 2.23	Perkembangan TPAK Kabupaten Purworejo dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2017.....	II-76
Gambar 2.24	Grafik Perbandingan TPT Kabupaten Purworejo dengan Kabupaten Tetangga Tahun 2012-2017.....	II-77
Gambar 3.1	Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Purworejo.....	III-7
Gambar 4.1	Penyelarasan Tema Pembangunan Nasional Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Purworejo Tahun 2020.....	IV-6

DAFTAR ISTILAH

ADH	: Atas Dasar Harga
APBD	: Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
APK	: Angka Partisipasi Kasar
APK	: Angka Partisipasi Kasar
APM	: Angka Partisipasi Murni
BAPPEDA	: Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
BLUD	: Badan Layanan Umum Daerah
BPS	: Badan Pusat Statistik
DAK	: Dana Alokasi Khusus
DBH	: Dana Bagi Hasil
DBHCHT	: Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
GK	: Garis Kemiskinan
HLS	: Harapan Lama Sekolah
IKK	: Indikator Kinerja Kunci
IKU	: Indikator Kinerja Utama
IPG	: Indeks Pembangunan Gender
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
IW	: Indeks Williamson
JJLS	: Jaringan Jalan Lintas Selatan
KONI	: Komite Olahraga Nasional Indonesia
Korpri	: Korps Pegawai Republik Indonesia
Krenova	: Kreativitas dan Inovasi
KUA	: Kebijakan Umum Anggaran
LNPRT	: Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
NTP	: Nilai Tukar Petani
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
P3K	: Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
PAUD	: Pendidikan Anak Usia Dini
PDB	: Produk Domestik Bruto
PDB	: Produk Domestik Bruto
PDRB	: Pendapatan Domestik Regional Bruto
PILEG	: Pemilihan Legislatif
PILKADA	: Pemilihan Kepala Daerah
PILPRES	: Pemilihan Presiden

PKB	: Pajak Kendaraan Bermotor
PMA	: Penanaman Modal Asing
PMDN	: Penanaman Modal Dalam Negeri
PMI	: Palang Merah Indonesia
PMKS	: Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
PMTB	: Pembentukan Modal Tetap Bruto
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
PNSD	: Pegawai Negeri Sipil Daerah
PPAS	: Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
RAPBD	: Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Renja	: Rencana Kerja
Renja-PD	: Rencana Kerja Perangkat Daerah
Renstra	: Rencana Strategis
Renstra-PD	: Rencana Strategis Perangkat Daerah
RKP	: Rencana Kerja Pemerintah
RKPD	: Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RLS	: Rata-rata Lama Sekolah
RPIJM	: Rencana Pembangunan Infrastruktur Jangka Menengah
RPJM	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJPN	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
RSUD	: Rumah Sakit Umum Daerah
RTLH	: Rumah Tidak Layak Huni
RTRW	: Rencana Tata Ruang Wilayah
SD/MI	: Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah
SDG's	: Sustainable Development Goals
SDLB	: Sekolah Dasar Luar Biasa
SDM	: Sumber Daya Manusia
SMA/MA	: Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah
SMK	: Sekolah Menengah Kejuruan
SMP/MTs	: Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah
SMPLB	: Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa
SPKD	: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
SPM	: Standar Pelayanan Minimal
THR	: Tunjangan Hari Raya
TK	: Taman Kanak-kanak
TOD	: Transit Oriented Development
TPT	: Tingkat Pengangguran Terbuka
Tramtibumlinmas	: Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan

YIA

Masyarakat
: Yogyakarta International Airport

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah secara manajemen ada beberapa fase yang harus dilalui agar terwujud hasil yang signifikan secara publik, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan serta tahap pengendalian monitoring evaluasi dan pelaporan. Ketiga tahapan tersebut memiliki bobot dengan proporsi dan kontribusi yang saling berkaitan. Perencanaan pembangunan yang baik akan mendorong hasil capaian kinerja pembangunan sebagaimana yang ditargetkan dengan dukungan peran pengendalian, monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan sebagai kontrol terhadap pelaksanaan pembangunan yang tepat, efektif dan efisien.

Perencanaan bagian dari fungsi pembangunan daerah memiliki peran penting pada keberhasilan kinerja pembangunan daerah. Terminologi perencanaan pembangunan daerah dimaksudkan sebagai suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal ini perencanaan pembangunan yang berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan baik pada skala nasional dan terutama skala daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Sebagai salah satu dokumen perencanaan daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purworejo Tahun 2020 disusun dengan

memperhatikan kaidah tersebut melalui penyusunan prioritas dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan percepatan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Untuk menjamin keberlanjutan pembangunan daerah, rencana pembangunan daerah dituangkan dalam wujud dokumen perencanaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang meliputi dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang (20 tahun), perencanaan pembangunan jangka menengah (5 tahun) dan perencanaan pembangunan tahunan atau rencana kerja pemerintah. Dokumen perencanaan tersebut memiliki keterkaitan satu dengan yang lain.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purworejo Tahun 2020 adalah dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021 ke dalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah. Penyusunan RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2020 merupakan penjabaran tahun kelima dari RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021. Penyusunan RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2020 ini merupakan salah satu tahapan penting untuk memberikan arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Purworejo dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2020 disusun berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021, dalam hal ini prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021.

RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2020 disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021 dengan melakukan penyesuaian, meliputi:

1. Prioritas dan sasaran pembangunan daerah.
2. Rencana program serta kegiatan prioritas OPD tahun 2020 dengan indikasi rencana program prioritas daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021.

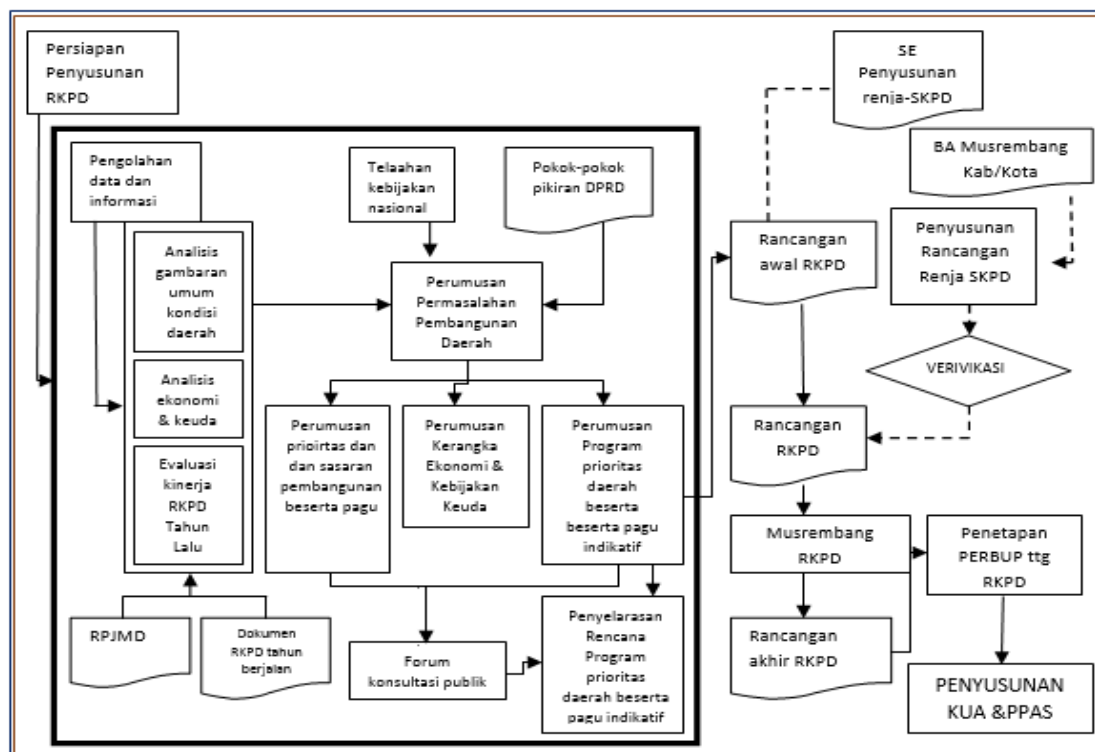
Penyusunan RKPD Kabupaten Purworejo mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dan RPJMN Tahun 2015-2020. Sebagai wujud dari mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 adalah dengan cara melakukan penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah sesuai Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 050.23/0022916 Tanggal 27 Desember 2018 perihal Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan serta Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tahun 2020 serta melakukan penyesuaian dengan Rancangan Akhir RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020. Sedangkan sebagai wujud mengacu pada RPJMN Tahun 2019-2024 melalui penyesuaian tema pembangunan nasional Tahun 2020 **“Peningkatan SDM dalam untuk Pertumbuhan Berkualitas”** dalam Tema Pembangunan RPJMN Tahun 2019-2024 **“Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan”** sebagai bagian dari RPJPN Tahun 2005-2025.

RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2020 mempunyai kedudukan, peran dan fungsi sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini dapat dijelaskan bahwa:

- a. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan perangkat daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
- b. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);

- c. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
- d. Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Purworejo secara keseluruhan tanpa ada yang tertinggal (*no one left behind*).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tahapan dan tata cara penyusunan RKPD sebagai berikut ini.



Gambar 1.1.
Tahapan Dan Tata Cara Penyusunan RKPD
Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

1. Persiapan Penyusunan RKPD

Persiapan Penyusunan RKPD meliputi:

- a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD
- b. orientasi mengenai RKPD
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD

2. Penyusunan Rancangan Awal RKPD

Penyusunan rancangan awal RKPD disusun berpedoman pada RPJMD Kota, rancangan awal RKPD Provinsi, RKP, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD. Perumusan rancangan awal RKPD dilakukan melalui serangkaian kegiatan: (a) analisis gambaran umum kondisi daerah; (b) analisis rancangan kerangka ekonomi daerah; (c) analisis kapasitas riil keuangan daerah; (d) penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah; (e) perumusan permasalahan pembangunan daerah; (f) penelaahan terhadap sasaran RPJMD; (g) penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD; (h) penelaahan terhadap kebijakan pemerintahan pada RKP dan program strategis nasional; (i) penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD; (j) perumusan prioritas pembangunan daerah; dan (k) perumusan rencana kerja program dan pendanaan. Rancangan awal RKPD dibahas bersama dengan kepala Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan.

3. Penyusunan Rancangan RKPD

Pada tahap ini dilakukan penyempurnaan rancangan awal RKPD berdasarkan: (a) masukan dan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) melalui proses integrasi dan harmonisasi program dan kegiatan prioritas; (b) hasil penelaahan terhadap rancangan awal RKPD Provinsi Jawa Tengah, RKP dan program strategis nasional.

4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten

Musrenbang RKPD merupakan rangkaian proses yang dimulai dari Musrenbang Kelurahan, Kecamatan, dan Forum Perangkat Daerah

yang bertujuan untuk membahas rancangan RKPD dalam rangka menyepakati permasalahan pembangunan Daerah; prioritas pembangunan Daerah; program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi; penyesuaian program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi; dan klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan Daerah kabupaten/kota dengan program dan kegiatan desa yang diusulkan berdasarkan hasil Musrenbang kecamatan.

5. Perumusan Rancangan Akhir RKPD

Perumusan rancangan akhir RKPD merupakan proses penyempurnaan rancangan RKPD menjadi rancangan akhir RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD. Rancangan akhir disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas oleh seluruh kepala Perangkat Daerah. bertujuan untuk memastikan program dan kegiatan Perangkat Daerah telah diakomodir dalam rancangan akhir RKPD. Rancangan akhir RKPD yang telah dibahas dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD dan dikirim kepada gubernur melalui kepala BAPPEDA provinsi untuk difasilitasi. Hasil fasilitasi menjadi bahan penyempurnaan rancangan Perkada tentang RKPD.

6. Penetapan RKPD

Rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD yang telah disempurnakan disampaikan oleh kepala BAPPEDA kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk persetujuan untuk penetapan dan pengundangan.

Beberapa inovasi yang telah dilaksanakan untuk lebih meningkatkan kualitas RKPD tahun 2020 antara lain dalam proses penjangkaran aspirasi masyarakat. Selain melalui Musrenbang juga melalui kegiatan *Critical Voice Point* yang membahas isu-isu aktual yang sedang dihadapi atau yang akan dihadapi yang memerlukan penanganan segera atau melalui program/kegiatan yang harus dilaksanakan tahun depan. Hasil rekomendasi dari kegiatan tersebut digunakan sebagai bahan masukan dalam proses penyusunan RKPD. Selain juga dilaksanakan kegiatan sinkronisasi rancangan akhir RKPD

dengan DPRD untuk lebih memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengakomodir usulan berbagai pihak dan mendukung pencapaian target RPJMD Kabupaten Purworejo. Sinkronisasi ini juga bertujuan agar tertib usulan DPRD pada tahap perencanaan dan tidak ada usulan baru dari DPRD yang muncul pada tahap penganggaran di pembahasan Rancangan KUA dan PPAS maupun RAPBD.

Pada perencanaan tahun 2020 ini telah dirintis penggunaan aplikasi SIMDA Integrated dalam proses penyusunan RKPD Tahun 2020. Implementasi aplikasi SIMDA Integrated merupakan wujud perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi sehingga diharapkan perencanaan dan penganggaran yang disusun lebih akurat dan akuntabel.

Berdasarkan proses penyusunannya, maka RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2020 sangat terkait dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah. RKPD yang disusun berdasarkan RPJMD merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan memperhatikan Renstra Perangkat Daerah. Secara substansi dapat dijelaskan bahwa materi berupa program dan kegiatan yang harus disusun dari Rencana Kerja Perangkat Daerah yang bersumber dari Renstra Perangkat Daerah dan berpedoman pada RKPD yang telah diselaraskan dengan RPJMD.

RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2020 menjadi landasan penyusunan Rancangan APBD (RAPBD) Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2020. Proses tersebut menjadikan penganggaran merupakan tahap selanjutnya dari perencanaan yang telah disusun. Konsistensi ini harus dijamin sehingga semua yang dianggarkan harus ada dalam dokumen perencanaan. Untuk menjamin konsistensi perencanaan dan penganggaran maka disusun Pedoman Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2020 serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2020.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2020 adalah:

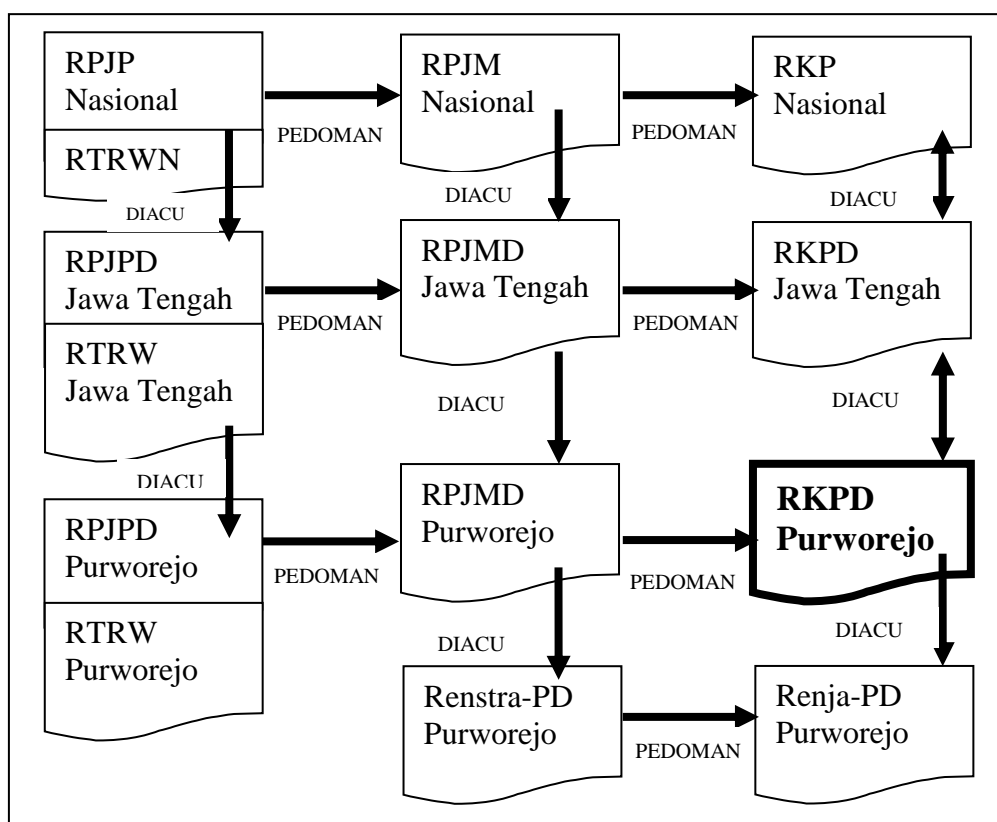
1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

- Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 27);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3).
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 12);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 14).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Perencanaan pembangunan Kabupaten Purworejo merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, yang terdiri atas RPJPD, RPJMD, Renstra-PD, RKPD, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Perencanaan pembangunan daerah yang bersifat sektoral dan kewilayahan serta selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo dan dokumen lainnya seperti Rencana Pembangunan Infrastruktur Jangka Menengah (RPIJM), Rencana Induk Pengembangan Pariwisata, Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD), dan *Sustainable Development Goals* (SDG's) serta Standar Pelayanan Minimal (SPM).



Gambar 1.2.
Hubungan dokumen Perencanaan Pembangunan

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- a. Menjabarkan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021 tahun kelima kedalam rencana program dan kegiatan prioritas Kabupaten Purworejo Tahun 2020.
- b. Menciptakan sinergi program dan kegiatan pembangunan antar wilayah, antar kewenangan urusan pembangunan dan antar tingkat pemerintahan.
- c. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya dalam rangka pembangunan daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- a. Pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Kabupaten Purworejo Tahun 2020.
- b. Pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2020.
- c. Sebagai landasan penyusunan Rancangan APBD (RAPBD) Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2020.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika Dokumen RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2020 sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang gambaran umum penyusunan dokumen RKPD yang terdiri dari latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika dokumen RKPD.

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Berisi tentang gambaran umum kondisi daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD, dan permasalahan

pembangunan daerah.

BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Berisi tentang arah kebijakan ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah.

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Berisi tentang tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas dan sasaran pembangunan Tahun 2020.

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Berisi tentang rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD pada Tahun 2020.

BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Berisi tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada Akhir Tahun 2020.

BAB VII : PENUTUP

Memuat harapan berkenaan dengan pelaksanaan RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2020.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Daerah

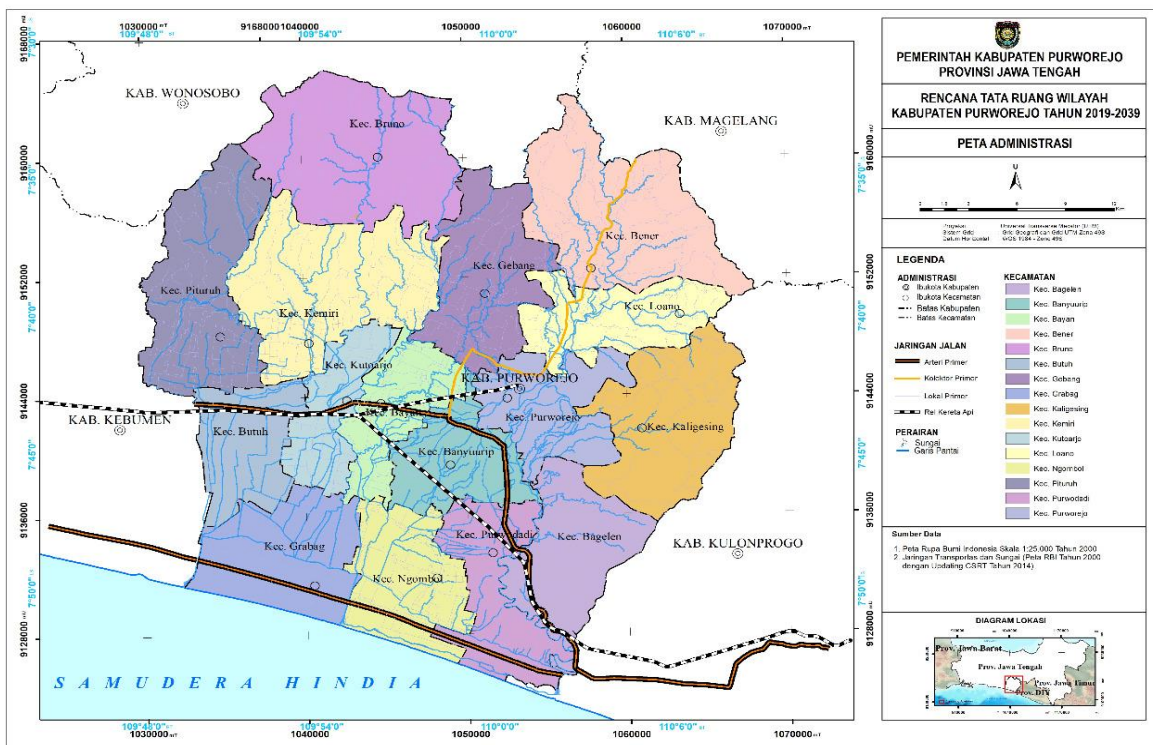
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Luas wilayah Kabupaten Purworejo adalah sebesar 1.034,82 km² atau seluas 3,17% dari total luas Provinsi Jawa Tengah dan terdiri dari $\pm 2/5$ daerah dataran dan $\pm 3/5$ daerah pegunungan. Secara administratif Kabupaten Purworejo terdiri atas 16 kecamatan, 25 kelurahan, dan 469 desa dengan batas-batas wilayah adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Magelang
- Sebelah Timur : Kabupaten Kulon Progo, Provinsi DIY
- Sebelah Selatan : Samudra Indonesia
- Sebelah Barat : Kabupaten Kebumen

Berikut merupakan peta administrasi Kabupaten Purworejo beserta luas masing-masing wilayah kecamatan Kabupaten Purworejo:



Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Purworejo
 Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purworejo 2019-2039

Tabel 2.1
Jumlah Desa dan Luas Kecamatan Kabupaten Purworejo

No.	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)
1	2	3	4
1.	Grabag	32	64,92
2.	Ngombol	57	55,27
3.	Purwodadi	40	53,96
4.	Bagelen	17	63,76
5.	Kaligesing	21	74,73
6.	Purworejo	25	52,72
7.	Banyuurip	27	45,08
8.	Bayan	26	43,21
9.	Kutoarjo	27	37,59
10.	Butuh	41	46,08
11.	Pituruh	49	77,42
12.	Kemiri	40	92,05
13.	Bruno	18	108,43
14.	Gebang	25	71,86
15.	Loano	21	53,65
16.	Bener	28	94,08
	Jumlah	494	1.034,82

Sumber: Kabupaten Purworejo Dalam Angka, BPS, 2018.

2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis Kabupaten Purworejo merupakan bagian dari Provinsi Jawa Tengah dan terletak pada posisi antara 109^o 47' 28" - 110^o 8' 20" Bujur Timur dan 7^o 32' - 7^o 54" Lintang Selatan. Posisi geostrategic dari Kabupaten Purworejo memiliki kedudukan yang cukup strategis karena terletak pada posisi tengah dari jalur selatan Pulau Jawa dan berbatasan langsung dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten Purworejo juga dilewati oleh jalur kereta selatan Pulau Jawa serta dekat dengan Bandara Yogyakarta International Airport yang menjadikan Kabupaten Purworejo sangat potensial untuk dikembangkan sebagai kota transit pada sisi selatan Pulau Jawa.

2.1.1.3. Topografi

Kondisi wilayah Kabupaten Purworejo secara umum terbagi menjadi dua yaitu bagian utara merupakan daerah berbukit-bukit dengan ketinggian antara 25-1.050 meter di atas permukaan laut (dpl). Sedangkan bagian selatan merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 0-25 m dpl. Kondisi kemiringan lereng atau kelerengan Kabupaten Purworejo dapat dibedakan menjadi empat (4) kategori yaitu:

1. Kemiringan 0 – 2% meliputi bagian selatan dan tengah wilayah Kabupaten Purworejo;
2. Kemiringan 2 – 15% meliputi sebagian Kecamatan Kemiri, Bruno, Bener, Loano, dan Bagelen;
3. Kemiringan 15 – 40% meliputi bagian utara dan timur wilayah Kabupaten Purworejo;
4. Kemiringan > 40% meliputi sebagian Kecamatan Bagelen, Kaligesing, Loano, Gebang, Bruno, Kemiri, dan Pituruh;

Posisi ketinggian Kabupaten Purworejo berkisar antara 0 meter sampai dengan 1.064 meter di atas permukaan laut. Kondisi topografi Kabupaten Purworejo secara umum adalah sebagai berikut:

1. Bagian selatan dan barat merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 0 – 25 meter di atas permukaan air laut.
2. Bagian utara dan timur merupakan daerah berbukit-bukit dengan ketinggian antara 25 – 1064 meter di atas permukaan air laut.

2.1.1.4. Geologi

Kondisi geologi di Kabupaten Purworejo dapat dirinci menjadi bahasan mengenai litologi/batuan, stratigrafi dan struktur geologi. Ketiga aspek geologi tersebut penting kaitannya dengan beberapa fenomena alam khususnya kebencanaan seperti longsor, banjir maupun kekeringan. Proporsi litologi batuan Kabupaten Purworejo berupa batuan sedimen dan perselingan batuan gunung api sebesar 60,1% terdapat di bagian utara dan timur wilayah Kabupaten Purworejo pada daerah dengan topografi tinggi dan 39,9% aluvium tersebar pada daerah dengan topografi rendah di bagian selatan dan barat Kabupaten Purworejo. Susunan batuan/stratigrafi yang menyusun wilayah Kabupaten Purworejo mengikuti tata stratigrafi pada Pegunungan Serayu Utara yang berada di bagian utara dan Pegunungan Menoreh yang berada di bagian timur. Kabupaten Purworejo sendiri memiliki empat bentuk lahan asal proses, meliputi bentuk lahan asal proses struktural, bentuk lahan asal proses fluvial, bentuk lahan asal proses maritim dan bentuk lahan asal proses denudasional.

Menurut studi PSBA UGM (2004) dalam RTRW Kabupaten Purworejo 2005-2025, satuan geomorfologi wilayah Kabupaten Purworejo

dapat dibagi menjadi 4 (empat) satuan morfologi, meliputi: satuan perbukitan berelief tinggi, satuan morfologi berelief sedang, satuan morfologi lerengkaki gunungapi, dan satuan morfologi dataran. Agihan satuan morfologi perbukitan berelief tinggi terletak di bagian timur wilayah Kabupaten Purworejo yang merupakan bagian dari perbukitan Progo Barat. Satuan morfologi berelief sedang terletak di bagian utara wilayah sebagai bagian dari Pegunungan Serayu Selatan. Satuan morfologi lereng kaki gunung api berada pada lereng kaki gunung api Sumbing yang posisinya pada bagian timur laut wilayah Kabupaten Purworejo. Pada daerah tengah hingga selatan terdapat satuan morfologi pedataran dan merupakan daerah dataran alluvial dan alluvial pantai.

Secara umum Kabupaten Purworejo terbagi menjadi 3 wilayah dengan jenis tanah yang berbeda yaitu:

1. Jenis tanah alluvial mempunyai agihan sebesar 31,9% di wilayah Kabupaten Purworejo. Untuk keperluan pertanian, jenis tanah ini mempunyai produktifitas rendah sampai dengan tinggi. Disamping untuk budidaya pertanian tanah jenis ini juga dimanfaatkan untuk pengembangan permukiman.
2. Jenis tanah Regosol mempunyai produktifitas rendah sampai dengan tinggi dengan agihan sebesar 5,03%. Tanah jenis ini banyak dimanfaatkan masyarakat Kabupaten Purworejo untuk keperluan pertanian dan perkebunan.
3. Jenis Tanah Latosol mendominasi wilayah Kabupaten Purworejo dengan agihan sebesar 63,07% dengan produktifitas sedang hingga tinggi. Jenis tanah ini merupakan tanah pertanian yang relatif baik.

2.1.1.5. Hidrologi

Kondisi hidrologi yang dapat dilihat dari potensi air tanah dan keberadaan air permukaan satu daerah adalah tidak sama dengan daerah lainnya walaupun keduanya mempunyai curah hujan yang sama. Hal ini disebabkan kondisi lahan (geologi, geomorfologi, dan tanah) setiap daerah berbeda. Perbedaan-perbedaan ini akhirnya membawa keberagaman dalam potensi sumber daya alam dan potensi kebencanaan alam sehingga pengembangan sumber daya alam daerah harus memperhatikan potensi-potensi alam tersebut. Pengembangan sumber

daya alam harus memperhatikan kesinambungan pemanfaatan dan kelestarian lingkungan. Kekeliruan pengembangan sumber daya alam selain berdampak pada degradasi sumber daya alam bersangkutan juga berperan dalam memicu terjadinya bencana alam yang berakibat sangat merugikan.

Kabupaten Purworejo memiliki potensi air yang berasal dari air permukaan. Di Kabupaten ini terdapat beberapa sungai yang mengalir di daerah ini dan bermuara di Samudera Indonesia. Sungai-sungai ini termasuk dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Bogowonto, Cokroyasan dan Wawar. Hulu-hulu sungai tersebut umumnya berada di bagian timur dan utara Kabupaten Purworejo.

2.1.1.6. Klimatologi

Kabupaten Purworejo memiliki iklim tropis basah dengan dua musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau yang datang setiap enam bulan silih berganti. Rata-rata suhu udara antara 190C–280C dengan curah hujan rata-rata pertahun berkisar 620 mm/tahun hingga 3720 mm/tahun, sedangkan kelembaban udara rata-rata antara 70%–90% dengan curah hujan tertinggi pada bulan Desember sebesar 311 mm dan bulan Maret sebesar 289 mm. Kondisi iklim suatu daerah sangat berpengaruh pada potensi daerah bersangkutan, baik dalam potensi sumber daya alam maupun dalam potensi bencana alam.

Berdasarkan perbandingan bulan basah dan bulan kering setiap tahun maka curah hujan di Kabupaten Purworejo termasuk dalam kategori tinggi. Curah hujan yang tinggi tersebut secara langsung dapat mengaki-batkan penjenuhan pada tanah permukaan sehingga mempengaruhi drainase permukaan tanah. Hujan dengan intensitas tinggi merupakan salah satu pemicu (*trigger faktor*) terjadinya bencana yaitu banjir dan longsor lahan di Kabupaten Purworejo.

Tabel 2.1. Perkembangan Curah Hujan Kabupaten Purworejo

Kecamatan	2012	2013	2014	2015
Grabag	2,057	3,449	2,561	2,301
Ngomol	2,032	2,853	2,350	2,563
Purwodadi	1,690	2,748	2,322	2,640
Bagelan	2,078	2,659	2,617	2,248
Kaligesing	2,523	2,596	1.128	1,978
Purworejo	1,864	2,861	2,417	2,318
Banyuurip	2,532	3,016	2,289	2,282
Bayan	1,966	2,687	2,435	2,104
Kutorejo	2,065	3,542	2,880	2,460
Butuh	1,175	2,370	2,462	1,734
Pituruh	2,100	3,383	2,741	2,300
Kemiri	2,181	3,457	2,718	2,838
Bruno	3,477	4,231	4,608	3,704
Gebang	2,739	2,762	3,151	2,567
Loano	1,875	1,864	1,795	1,495
Bener	2,958	2,492	3,386	3,038
Total	34,886	46,970	41,860	38,579
Rata-rata	2,180	2,936	2,616	2,411

Sumber: Kabupaten Purworejo Dalam Angka 2015

2.1.1.7. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan Kabupaten Purworejo dibagi menjadi dua kategori yaitu lahan kering seluas 72.854,80 Ha atau 70,40% dan tanah sawah seluas 30.626,97 Ha atau 29,60%. Lahan kering terdiri dari 10.116,50 Ha berupa tanah bangunan dan halaman sekitarnya, 51.598,14 Ha berupa tegal/kebun/ladang/huma, 6.857,88 Ha berupa hutan negara, dan sisanya berupa padang rumput, tambak, tanah lainnya. Luas sawah beririgasi adalah 27.677,14 Ha, sedangkan sawah tadah hujan seluas 2949,83 Ha. Dinamika penggunaan lahan di Kabupaten Purworejo kurang terkendali. Sebagian besar perubahan yang terjadi berupa alih fungsi lahan dari pertanian ke non-pertanian seperti untuk perumahan dan permukiman. Hal ini menunjukkan semakin sempitnya lahan untuk pertanian sangat berpengaruh terhadap perkembangan jumlah produksi pertanian.

Tabel 2.2. Penggunaan Lahan Kabupaten Purworejo

No	Jenis Penggunaan	2012	2013	2014
1	Lahan Pertanian	83.396	87.126	87.105
1.1	Lahan Sawah	30.573	30.230	30.225
1	Sawah Irigasi	27.659	26.908	26.907
2	Tadah Hujan	2.914	3.229	3.225
3	Pasang Surut	-	93	93
4	Tanah sawah lebak, polder dll	-	-	-
1.2	Lahan Bukan Sawah	52.823	56.896	56.880
1	Tegalan/Kebun	36.286	40.748	40.735

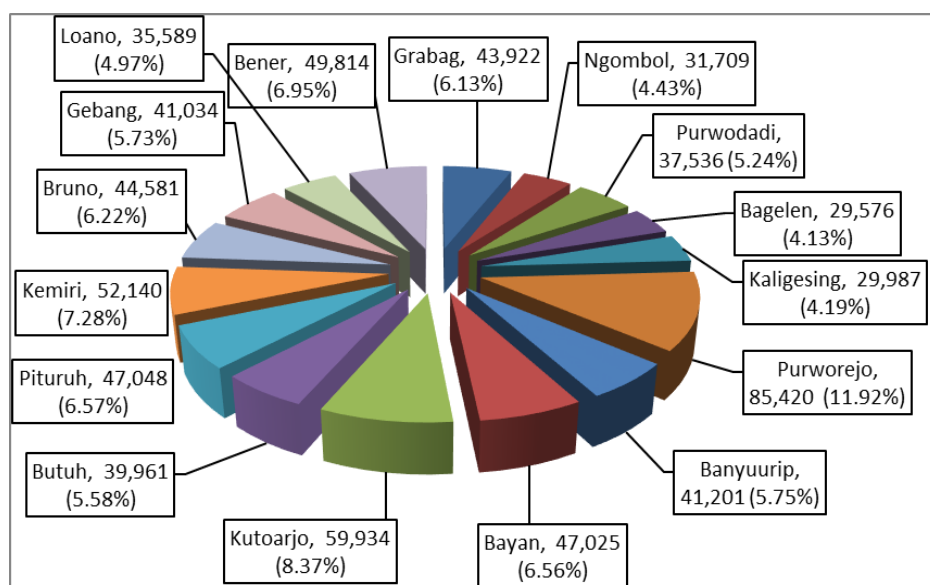
No	Jenis Penggunaan	2012	2013	2014
1	Lahan Pertanian	83.396	87.126	87.105
2	Ladang/Huma	4.505	2.895	2.895
3	Perkebunan	1.580	2.590	2.590
4	Hutan Rakyat	8.949	4.590	4.591
5	Padang Rumput	191	120	120
6	Sementara tidak diusahakan	16	35	36
7	Lainnya	1296	5.918	5.913
2	Lahan Bukan Pertanian	20.085	16.355	16.375
	Jumlah	103.481	103.481	103.481

Sumber: Kabupaten Purworejo Dalam Angka 2016

2.1.1.8. Kondisi Demografi Daerah

a. Jumlah Penduduk

Menurut Kompilasi Statistik Sosial Kabupaten Purworejo 2018 jumlah penduduk Kabupaten Purworejo tahun 2018 sebanyak 716.477 jiwa dengan komposisi 49,31 persen penduduk laki-laki dan 50,69 persen penduduk perempuan. Dilihat dari persebarannya, Kecamatan Purworejo dan Kecamatan Kutoarjo memiliki jumlah penduduk yang paling banyak yaitu 11,92 persen dan 8,36 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Purworejo. Adapun Persentase Persebaran Penduduk Kabupaten Purworejo Tahun 2018 sebagaimana tersaji pada gambar berikut.



Gambar 2.2

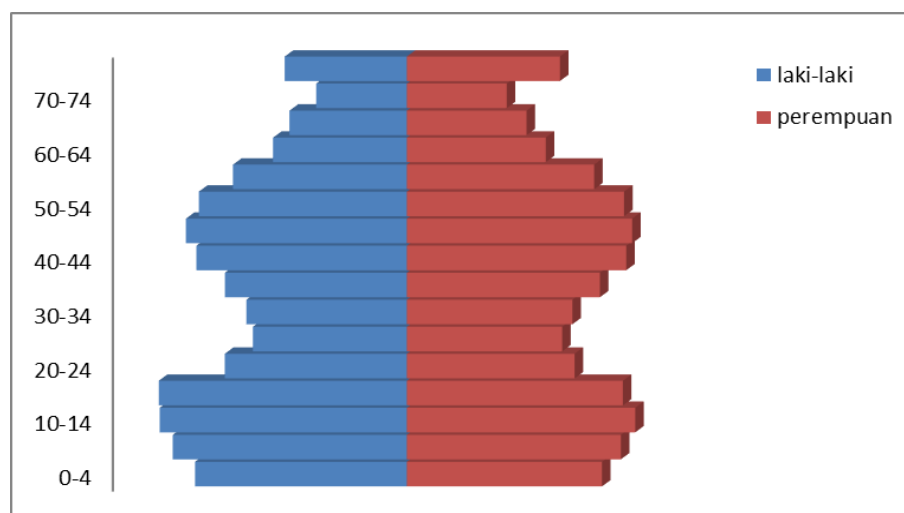
Persentase Persebaran Penduduk Kabupaten Purworejo Tahun 2018

Sumber: Kabupaten Purworejo Dalam Angka, BPS, 2018.

b. Usia

64,90% Penduduk Purworejo berusia antara 15 - 64 Tahun. Rasio beban ketergantungan di Purworejo tahun 2017 adalah 54,08%.

Artinya 100 penduduk usia produktif (15-64) rata-rata menanggung beban 54 penduduk usia tidak produktif (0-14 dan 65 keatas). Piramida Penduduk Kabupaten Purworejo tahun 2017 sebagaimana tersaji pada gambar 2.3.



Gambar 2.3
Piramida Penduduk Kabupaten Purworejo Tahun 2017
Sumber: Kabupaten Purworejo Dalam Angka, BPS, 2018

Tabel 2.4.
Perkembangan Besarnya Rasio Beban Ketergantungan

Kelompok Umur	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
0 s.d. 14	171.615	169.694	167.833	165.964	164.074
15 s.d. 64	455.954	458.479	460.623	462.475	463.760
65 keatas	77.958	79.833	81.930	84.247	86.740
Rasio Beban Ketergantungan (%)	54.74%	54.42%	54.22%	54.10%	54.08%

Sumber: Kabupaten Purworejo Dalam Angka berbagai tahun terbit, diolah

Untuk kabupaten Purworejo tergolong piramida penduduk muda yang berarti angka kelahiran masih lebih besar daripada angka kematian. Rasio Ketergantungan (dependency ratio) adalah perbandingan antara jumlah penduduk berumur 0 -14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun keatas dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun.

Rasio ketergantungan merupakan salah satu indikator demografi yang dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu Negara atau wilayah, apakah tergolong Negara atau wilayah maju atau Negara atau wilayah yang sedang berkembang. Semakin tingginya persentase

menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Berkaitan dengan angka beban ketergantungan Kabupaten Purworejo pada kisaran angka 54-55, menunjukkan kondisi yang hampir seimbang yang berarti jumlah penduduk produktif masih menanggung penduduk non produktif sebesar $\pm 5\%$.

c. **Kepadatan Penduduk**

Besarnya angka kepadatan penduduk kasar Kabupaten Purworejo pada tahun 2017 sebesar 691 orang / km² luas wilayah. Sebagian besar penduduk Purworejo terkonsentrasi di kecamatan Purworejo, Kutoarjo dan Bayan masing masing sebesar 1.616; 1.590 dan 1.085 orang/km² (sumber : Kabupaten Purworejo dalam angka, BPS, 2018). Sedangkan wilayah dengan kepadatan penduduk paling rendah adalah Kecamatan Kaligesing dengan kepadatan penduduk sebesar 400 orang/km² dan Kecamatan Bruno dengan kepadatan penduduk sebesar 410 orang/km². Dua kecamatan tersebut memang merupakan daerah dengan kondisi geografis berupa pegunungan yang sebagian wilayahnya memiliki hutan yang cukup luas.

d. **Laju Pertumbuhan Penduduk**

Laju pertumbuhan penduduk Purworejo dari tahun 2016-2017 sebesar 0,26%. Pertumbuhan penduduk Kecamatan yang di atas rata-rata Kabupaten Purworejo adalah Kecamatan Bayan, Pituruh, Purworejo, Banyuurip, Bagelen dan Kutoarjo (Sumber: Purworejo Dalam Angka, BPS, 2018).

e. **Mata Pencaharian Penduduk**

Pekerjaan menurut lapangan usaha penduduk Purworejo umur 15 tahun ke atas yang bekerja sebagian besar didominasi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (39,66%), kemudian diikuti sektor industri pengolahan (16,95%), perdagangan besar dan eceran (21,00%), jasa Kemasyarakatan (12,38%) dan jasa lainnya (10,02%). (Sumber: Purworejo Dalam Angka, BPS, 2018).

2.1.1.9. Potensi Pengembangan Wilayah

a. Arahan Pengembangan Wilayah

Lokasi Kabupaten Purworejo di wilayah selatan Jawa Tengah dan berbatasan langsung dengan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadikan posisi Kabupaten Purworejo berada pada posisi yang sangat strategis. Posisi tersebut berada pada titik silang transportasi lintas selatan Jawa Tengah yang dilalui jalan arteri selatan Pulau Jawa maupun Jaringan Jalan Lintas Selatan (JJLS), interkoneksi dengan jalur utara-selatan melalui jalan kolektor primer, serta jalur kereta api selatan jawa.

Kondisi demikian menjadikan Kabupaten Purworejo layak dikembangkan wilayahnya melalui konsep-konsep *Transit Oriented Development* didukung dengan berbagai potensi ekonomi pada masing-masing kawasan strategis. Kehadiran Bandara *Yogyakarta International Airport* di sisi lain pada wilayah Kecamatan Temon, Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta diharapkan juga menjadi salah satu pemicu perkembangan wilayah di kawasan perbatasan Kabupaten Purworejo dengan Kabupaten Kulonprogo. Beberapa titik kawasan yang akan dikembangkan melalui pendekatan TOD, antara lain perkotaan Kutoarjo yang didukung keberadaan Stasiun Besar Kutoarjo untuk akses menuju kawasan wisata Candi Borobudur dan Dieng, kawasan perkotaan *Border City* di wilayah Kecamatan Bagelen dan Purwodadi terkait keberadaan Bandara YIA serta stasiun Wojo sebagai pemadu antarmoda transport kereta api, bus dan pesawat udara. Untuk menangkap peluang pelaku perjalanan, maka masing-masing perkotaan transit akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas dan amenities perkotaan untuk memenuhi kebutuhan transit.

Isu strategis lain terkait pengembangan wilayah di Kabupaten Purworejo adalah kehadiran Badan Otorita Borobudur seluas ± 309 Ha termasuk didalamnya kawasan otoritatif seluas ± 50 Ha dalam Peraturan Presiden 46 tahun 2017 merupakan salah satu titik perkembangan baru di wilayah Pegunungan Menoreh di perbatasan tiga Kabupaten, yaitu: Kabupaten Purworejo, Kabupaten Magelang dan Kabupaten Kulon Progo Daerah Isimewa Yogyakarta.

Untuk membuka akses menuju kawasan Badan Otorita Borobudur terdapat empat pintu utama, yaitu: dua dari Kabupaten Purworejo meliputi jalan Kabupaten Purworejo ruas Kalijambe-Cacaban Lor dan ruas Tumbakanyar-Banyuasin, kemudian satu ruas dari Magelang melalui Salaman-Pekacangan-Cacaban Lor, dan satu ruas dari Kabupaten Kulonprogo melalui Pagerharjo menuju Sedayu. Pada tahun 2019 telah direncanakan peningkatan jalan pada ruas-ruas tersebut di wilayah Kabupaten Purworejo menuju akses ke Kabupaten Magelang menuju Candi Borobudur dan akses ke Kabupaten Kulonprogo menuju Bandara YIA melalui jalan Bedah Menoreh.

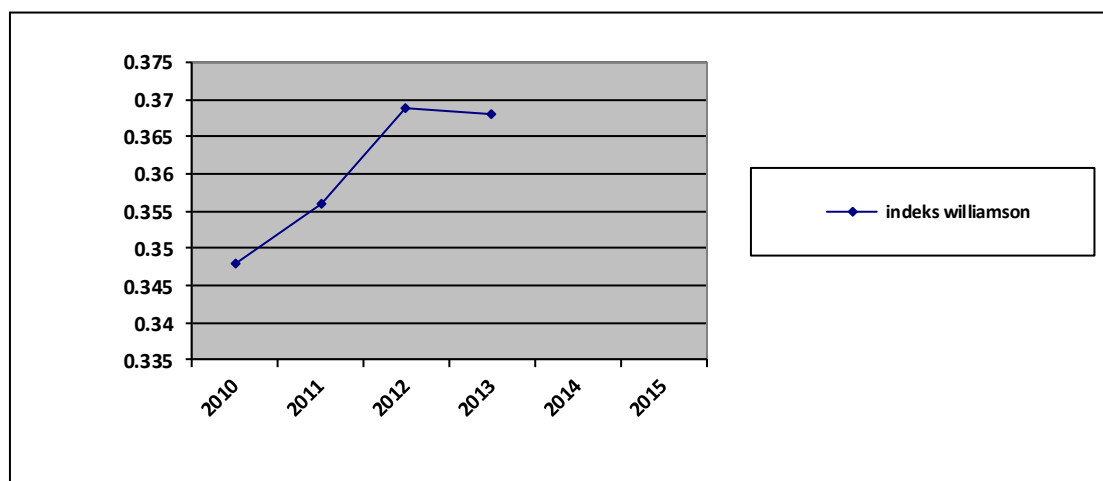
Pada sisi timur perkotaan Purworejo yang dipromosikan orde perkotaannya menjadi pusat kegiatan wilayah dalam rencana tata ruang wilayah, dilengkapi dengan akses jalan lingkar timur, diawali dari jembatan di Sungai Bogowonto Desa Trirejo, Kecamatan Loano yang telah selesai pada tahun 2019.

Di sisi selatan wilayah Kabupaten Purworejo, terkait dengan rencana pembangunan Kawasan Industri Kebumen dalam revisi RTRW Provinsi Jawa Tengah, maka wilayah selatan Kabupaten Purworejo yang berbatasan dengan Kabupaten Kebumen juga direncanakan untuk dikembangkan menjadi kawasan industri yang terwadahi dalam revisi RTRW Kabupaten Purworejo. Dengan demikian terdapat kesesuaian program antar wilayah Kabupaten yang berbatasan serta didukung dengan adanya infrastruktur JJLS ke arah timur yang terkoneksi langsung dengan Bandara YIA dan ke arah utara melalui jalan kolektor menuju stasiun besar Kutoarjo.

b. Ketimpangan Antar Wilayah

Ketimpangan antar wilayah dapat ditunjukkan dengan besaran Indeks Williamson. Angka indeks ini menunjukkan ketimpangan antar wilayah secara umum dengan pendekatan ekonomi. Proses akumulasi dan mobilisasi sumber-sumber berupa akumulasi modal, ketrampilan tenaga kerja dan sumber daya alam yang dimiliki suatu wilayah merupakan pemicu dalam laju pertumbuhan ekonomi wilayah yang bersangkutan. Adanya heterogenitas dan beragam karakteristik, suatu wilayah menyebabkan kecenderungan terjadinya

ketimpangan antar wilayah. Upaya-upaya pembangunan melalui intervensi program dan kegiatan terhadap suatu wilayah diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah sekaligus memperkecil kesenjangan antar wilayah. Perkembangan tingkat ketimpangan antar wilayah di Kabupaten Purworejo selama kurun waktu terakhir ini sebagai berikut:



Gambar 2.4 Perkembangan Ketimpangan Antar Wilayah (Indeks Williamson) di Tahun 2010 s.d 2015

Sumber: Kabupaten Purworejo Dalam 2011-2016, diolah

Pada gambar tersebut tampak bahwa ketimpangan antar wilayah di Kabupaten Purworejo memiliki kecenderungan meningkat terus sampai dengan tahun 2013, namun kemudian turun sedikit pada tahun 2014 menjadi 0,368, dan 0,364 pada tahun 2015. Semakin kecil angka Indeks Williamson (mendekati nol) menunjukkan tingkat ketimpangan yang makin kecil atau dengan kata lain tingkat pembangunan antar wilayah makin merata. Untuk menentukan apakah kesenjangan ada pada kesenjangan level rendah, sedang, atau tinggi. Berikut ini adalah kriterianya:

- Kesenjangan level rendah, jika $IW < 0,35$
- Kesenjangan level sedang, jika $0,35 \leq IW \leq 0,5$
- Kesenjangan level tinggi, jika $IW > 0,5$

Berdasarkan kriteria tersebut, maka Kabupaten Purworejo tergolong Kesenjangan pada level sedang.

Gambar 2.5 berikut ini menunjukkan tipologi wilayah-wilayah di Kabupaten Purworejo yang dikelompokkan berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapitanya, dengan titik

tolak pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita rata-rata di tingkat Kabupaten.

Pertumbuhan Ekonomi (R)	Pendapatan per kapita (Y)	
	Y <	Y >
R <	Maju Dengan Pertumbuhan Cepat (Purworejo, Banyuurip, Kutoarjo)	Berkembang Cepat (Grabag, Bayan)
R >	Maju Tapi Tertekan (Purwodadi)	Kurang Berkembang (Ngombol, Bagelen, Kaligesing, Butuh, Pituruh, Kemiri, Bruno, Gebang, Loano, Bener)

Gambar 2.5. Tipologi Wilayah Kabupaten Purworejo
Sumber data: PDRB Kecamatan, BPS tahun terbit 2016 (diolah)

Terdapat 4 kelompok tipologi wilayah-wilayah di Kabupaten Purworejo, yaitu:

- 1) Maju dengan pertumbuhan cepat, yaitu pendapatan perkapita dan pertumbuhan ekonominya tinggi (diatas rata-rata kabupaten). Termasuk dalam kelompok ini adalah Kecamatan Purworejo, Banyuurip dan Kutoarjo)
- 2) Berkembang cepat, yaitu pendapatan perkapita rendah (dibawah rata-rata kabupaten, namun pertumbuhan ekonominya tinggi (diatas rata-rata kabupaten). Termasuk dalam kelompok ini adalah Kecamatan Grabag dan Bayan
- 3) Maju Tapi Tertekan, yaitu pendapatan perkapita tinggi (diatas rata-rata kabupaten) namun pertumbuhan ekonominya rendah (dibawah rata-rata kabupaten) Termasuk dalam kelompok ini adalah Kecamatan Purwodadi
- 4) Kurang Berkembang, yaitu pendapatan perkapita maupun pertumbuhan ekonomi kedua-duanya rendah (dibawah rata-rata Kabupaten). Termasuk dalam kelompok ini adalah Kecamatan Ngombol, Bagelen, Kaligesing, Butuh, Pituruh, Kemiri, Bruno, Gebang, Loano, Bener.

2.1.1.10. Kawasan Rawan Bencana

Berdasarkan RTRW Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2031 di wilayah Kabupaten Purworejo terdapat 4 (empat) kawasan rawan bencana alam, yaitu kawasan rawan bencana tanah longsor, kawasan rawan bencana banjir, kawasan rawan bencana gelombang pasang, dan kawasan rawan bencana kekeringan.

a. Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor

Kawasan rawan bencana tanah longsor tertutup bagi permukiman, persawahan, pertanian tanaman semusim, kolam ikan, dan kegiatan budidaya lainnya yang berbahaya bagi keselamatan manusia dan lingkungan. Permukiman yang terletak di kawasan ini perlu segera dipindahkan ke tempat lain secara terencana. Perlu diupayakan adanya usaha-usaha untuk mencegah terjadinya tanah longsor. Di Kabupaten Purworejo terdapat banyak lokasi yang rawan tanah longsor. Hal tersebut berkaitan dengan kondisi fisik daerah. Sebaran kawasan yang rawan tanah longsor antara lain di Kecamatan Loano, Kecamatan Bruno, Kecamatan Bener, Kecamatan Kaligesing, Kecamatan Bagelen, Kecamatan Purworejo, Kecamatan Pituruh, dan Kecamatan Kemiri.

b. Kawasan Rawan Bencana Banjir

Lokasi kawasan rawan banjir di Kabupaten Purworejo terletak di bagian selatan, yaitu di Kecamatan Grabag, Kecamatan Butuh, Kecamatan Bagelen, Kecamatan Ngombol, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Bayan, dan Kecamatan Pituruh. Kawasan ini secara rutin mengalami genangan lebih dari enam jam pada saat hujan turun dalam keadaan musim hujan normal.

c. Kawasan Rawan Bencana Gelombang Pasang

Lokasi kawasan rawan gelombang pasang di Kabupaten Purworejo terletak di bagian selatan, yaitu di Kecamatan Grabag, Ngombol, dan Purwodadi. Kawasan rawan bencana gelombang pasang di kecamatan tersebut meliputi kawasan kurang lebih sejauh 1 km dari batas pantai, atau kurang lebih seluas 2.130 hektar. Banjir akibat gelombang pasang terjadi setiap tahunnya dan pada umumnya menggenangi kawasan pertambakan, kawasan pertanian dan permukiman penduduk, menimbulkan kerugian yang cukup besar.

d. Kawasan Rawan Bencana Kekeringan

Kawasan rawan bencana kekeringan di Kabupaten Purworejo ada dua macam, yaitu kekeringan pada daerah irigasi dan pada daerah permukiman penduduk. Kekeringan pada daerah irigasi berdasarkan ketersediaan air irigasi pada waduk dan bendung *control point*. Sedangkan kekeringan pada daerah permukiman penduduk ditetapkan berdasarkan kriteria kesulitan mendapatkan akses air bersih/minum, banyaknya penyakit karena kekurangan air bersih, dan mahal biaya memperoleh air bersih.

Kawasan rawan bencana kekeringan secara umum tersebar merata hampir di seluruh kecamatan. Kawasan sangat kering tersebar di Kecamatan Grabag, Kecamatan Ngombol, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Bagelen, Kecamatan Banyuurip, Kecamatan Kaligesing, Kecamatan Bruno, Kecamatan Pituruh, Kecamatan Kemiri, Kecamatan Gebang, Kecamatan Loano, Kecamatan Purworejo, Kecamatan Kutoarjo, dan Kecamatan Bayan. Kawasan kering tersebar di Kecamatan Grabag, Kecamatan Ngombol, Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Bagelen, Kecamatan Banyuurip, Kecamatan Kaligesing, Kecamatan Bruno, Kecamatan Pituruh, Kecamatan Kemiri, Kecamatan Gebang, Kecamatan Loano, Kecamatan Purworejo, Kecamatan Kutoarjo, dan Kecamatan Bayan. Sementara kawasan dengan tingkat kekeringan sedang berada di Kecamatan Bruno.

e. Kawasan Rawan Bencana Tsunami

Lokasi kawasan rawan bencana tsunami di Kabupaten Purworejo terletak di bagian Selatan, yaitu di Kecamatan Grabag, Kecamatan Ngombol, dan Kecamatan Purwodadi.

f. Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi

Kawasan rawan bencana gempa bumi di Kabupaten Purworejo pada dasarnya meliputi seluruh wilayah kabupaten karena gempa bumi sulit untuk diprediksi pusat gempanya, jangkauan dan kekuatannya. Akan tetapi, berdasarkan kondisi geologi, maka sesar berada di Kecamatan Bruno dan Kecamatan Kemiri, sehingga diduga bila terjadi gempa yang berpusat di Kabupaten Purworejo, maka kerawanan daerah tersebut adalah yang paling tinggi.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

a. Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu bagian dari sistem neraca ekonomi regional yang di dalamnya merekam hasil-hasil dari kegiatan ekonomi di suatu wilayah dalam periode tertentu (satu tahun).

Dalam kurun waktu tahun 2013-2017, PDRB Kabupaten Purworejo atas harga berlaku adalah 11.462.756,67 juta rupiah di tahun 2013, tahun 2014 mencapai 12.660.418,96 juta rupiah, menjadi 13.837.883,62 di tahun 2015; tahun 2016 menjadi 14.966.271,40 juta rupiah, meningkat menjadi 16.105.127,58 juta rupiah pada tahun 2017. Sedangkan untuk PDRB atas dasar harga konstan mencapai 9.870.969,95 juta rupiah di tahun 2013, menjadi 10.312.937,79 juta rupiah di tahun 2014, 10.862.645,98 juta rupiah di tahun 2015, menjadi 11.418.355,22 juta rupiah di tahun 2016 dan menjadi 12.005.095,39 juta rupiah di tahun 2017.

Adapun tabel Laju Pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut lapangan usaha Tahun 2013-2017, yaitu :

Tabel. 2.5
Laju Pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2013-2017

Kategori	Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
1	2	3	4	5	6	7
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7,6	13,33	9,03	8,68	13,54
B	Pertambangan dan Penggalian	10,09	8,35	3,44	8,37	8,62
C	Industri Pengolahan	7,21	11,64	7,01	9,57	8,53
D	Pengadaan Listrik dan Gas	11,04	8,11	8,17	9,71	7,95
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,58	4,23	5,22	5,99	7,54
F	Konstruksi	9,23	10,09	7,25	7,66	7,36
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,03	2,40	2,18	6,73	6,99
H	Transportasi dan Pergudangan	2,95	6,43	5,26	6,18	6,61
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,69	7,01	6,08	6,03	5,75
J	Informasi dan Komunikasi	4,74	4,81	4,17	5,45	5,17

Kategori	Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,88	7,62	5,04	4,91	4,91
L	Real Estate	3,33	3,29	6,53	7,59	4,61
M,N	Jasa Perusahaan	8,35	6,92	7,49	4,27	4,46
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-1,08	3,24	1,58	2,01	3,28
P	Jasa Pendidikan	2,29	0,43	5,23	2,60	2,88
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,87	6,61	1,85	3,38	2,17
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,66	-1,91	4,23	2,67	1,43
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	4,49	4,48	5,33	5,12	5,14

Sumber: PDRB Kabupaten Purworejo Tahun 2018

b. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Purworejo

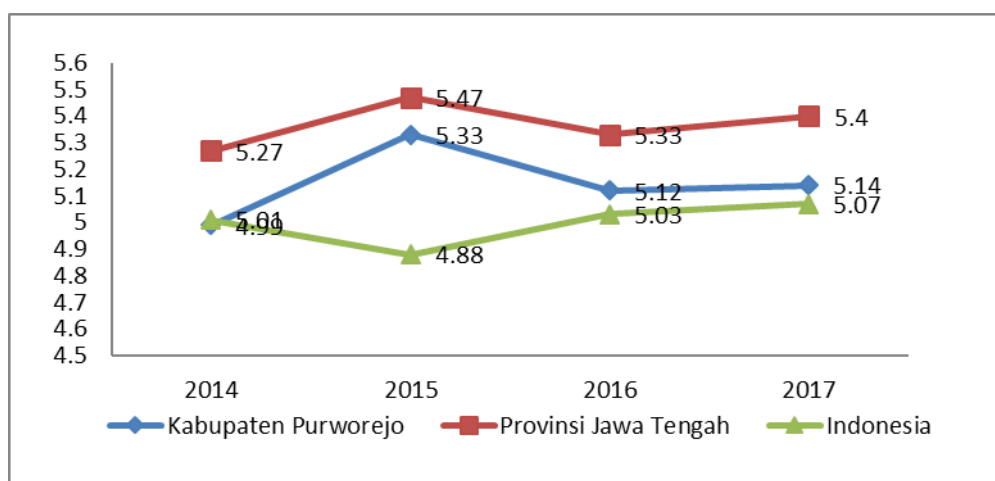
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purworejo tahun 2017 yang ditunjukkan oleh laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2010 lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu 5,14 % (2016 = 5,12%). Kondisi pertumbuhan perekonomian Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2016-2017 cenderung stabil 5,27 persen menjadi 5,27 persen.

Kondisi di tahun 2017 tersebut masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi Propinsi Jawa Tengah yang mencapai 5,27%. Demikian juga jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Nasional yang mencapai 5,01%, Kabupaten Purworejo sudah berada di atas rata-rata Nasional, yang dapat dilihat pada tabel 2.6. dan gambar 2.6.

Tabel 2.6.
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dan Indonesia Tahun 2014-2017 (Berdasar PDRB tahun dasar 2010)

No.	Cakupan Wilayah	2014	2015	2016	2017
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	Kabupaten Purworejo	4,99	5,37	5,12	5,14
2	Provinsi Jawa Tengah	5,27	5,47	5,33	5,40
3	Indonesia	5,01	4,88	5,03	5,07

Sumber: Kompilasi Statistik Ekonomi 2018, Kominfo 2018



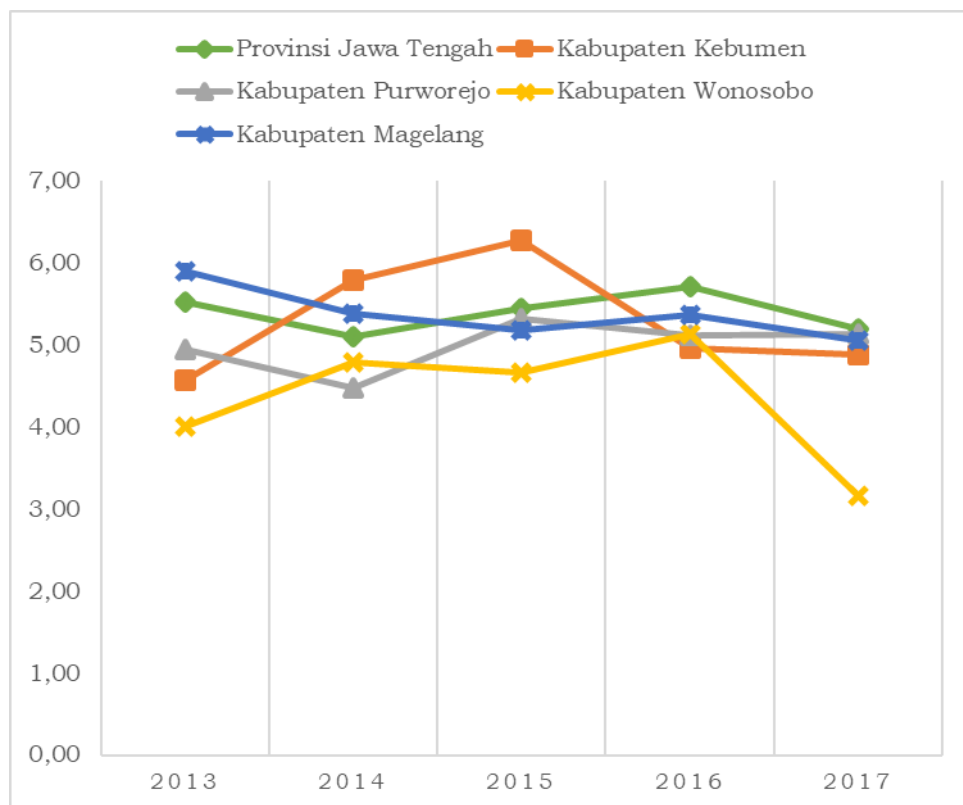
Gambar 2.6
 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Purworejo Tahun 2014-2017
 Sumber: Kompilasi Statistik Ekonomi 2018, Kominfo 2018

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purworejo dari tahun 2013 hingga 2017 apabila disandingkan dengan kabupaten-kabupaten yang terletak di sekitar Kabupaten Purworejo menunjukkan bahwa posisi Kabupaten Purworejo rata-rata masih berada di bawah Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Magelang namun sudah di atas Kabupaten Wonosobo seperti dapat dilihat dalam tabel dan grafik berikut

Tabel 2.7.
 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Purworejo dengan Kabupaten Tetangga Berdasar PDRB ADHK Tahun 2013-2017

No.	Cakupan Wilayah	2013	2014	2015	2016	2017
1	Provinsi Jawa Tengah	5,54	5,10	5,45	5,72	5,19
2	Kabupaten Kebumen	4,57	5,79	6,28	4,97	4,89
3	Kabupaten Purworejo	4,94	4,48	5,33	5,12	5,14
4	Kabupaten Wonosobo	4,00	4,78	4,67	5,13	3,16
5	Kabupaten Magelang	5,91	5,38	5,18	5,37	5,06

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2013-2017



Gambar 2.7.

Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Purworejo dengan Kabupaten Tetangga Berdasar PDRB ADHK Tahun 2013-2017
 Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2013-2017

c. Struktur Ekonomi Kabupaten Purworejo

Sumbangan terbesar pada tahun 2017 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, kemudian lapangan usaha Industri Pengolahan, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Motor, lapangan usaha Konstruksi, lapangan usaha Jasa Pendidikan. Sementara peranan lapangan usaha lainnya di bawah 6 persen.

Tabel 2.8
 Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen) 2013-2017

Kategori	Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
1	2	3	4	5	6	7
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	27.15	25.97	26.08	25.48	24.22
B	Pertambangan dan Penggalian	0.71	0.77	0.82	0.81	0.80
C	Industri Pengolahan	17.42	18.26	18.25	18.49	18.69
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.08	0.07	0.07	0.08	0.08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06
F	Konstruksi	8.29	8.43	8.45	8.47	8.67

Kategori	Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
1	2	3	4	5	6	7
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13.10	12.68	12.47	12.46	12.64
H	Transportasi dan Pergudangan	5.13	5.32	5.41	5.24	5.29
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.03	2.04	2.04	2.10	2.11
J	Informasi dan Komunikasi	4.54	4.60	4.50	4.53	4.90
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3.52	3.45	3.52	3.62	3.63
L	Real Estate	1.93	1.97	2.01	2.01	2.02
M,N	Jasa Perusahaan	0.26	0.26	0.27	0.29	0.30
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.34	4.19	4.16	4.14	4.06
P	Jasa Pendidikan	7.89	8.20	8.17	8.37	8.58
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.45	1.53	1.56	1.60	1.65
R,S,T,U	Jasa lainnya	2.09	2.19	2.14	2.24	2.31
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber: Diolah dari Hasil Sensus, Survei, dan Berbagai Sumber Lainnya

Source: Based on Census, Surveys, and Other Sources

*) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

Struktur lapangan usaha sebagian masyarakat Purworejo mulai bergeser dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan ke lapangan usaha ekonomi lainnya yang terlihat dari penurunan peranan setiap tahunnya pada lapangan usaha tersebut terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Purworejo. Secara keseluruhan, dalam lima tahun terakhir tidak terjadi pergeseran struktur ekonomi yang berarti.

d. PDRB Perkapita

Nilai PDRB perkapita Purworejo atas dasar harga berlaku sejak tahun 2013 hingga 2017 mengalami kenaikan. Pada tahun 2013 PDRB perkapita tercatat sebesar 16,25 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2017 mencapai 22,54 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB perkapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

Tabel 2.9.
PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha (Rupiah), 2013-2017

Kategori	Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
1	2	3	4	5	6	7
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.112.356,37	3.287.375,1	3.616.550,58	3.813.643,18	3.901.274,63
B	Pertambangan dan Penggalian	81.206,30	97.679,08	114.028,19	121.209,01	128.414,86
C	Industri Pengolahan	1.996.467,25	2.312.310,77	2.531.086,01	2.767.320,65	3.010.622,06
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8.962,90	9.212,97	9.8893,35	11.241,41	12.786,79
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.540,97	7.942,27	8.342,61	8.699,61	9.059,61
F	Konstruksi	950.514,96	1.067.489,68	1.172.292,83	1.268.050,03	1.396.243
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.501.689,37	1.605.914,7	1.729.084,68	1.865.515,92	2.035.233,74
H	Transportasi dan Pergudangan	587.967,34	673.368,70	749.595,51	784.822,95	851.995,58
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	232.705,84	258.095,53	283.201,28	314.042,06	340.293,03
J	Informasi dan Komunikasi	520.172,33	582.002,17	623.598,91	678.162,24	789.177,39
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	403.642,20	436.519,96	488.236,45	541.897,77	584.907,42
L	Real Estate	221.326,85	248.979,12	279.223,81	300.418,45	325.233,02
M,N	Jasa Perusahaan	29.780,51	33.321,10	37.961,23	43.185,89	47.862,92
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	496.929,30	530.381,94	576.961,23	620.084,38	653.258,90
P	Jasa Pendidikan	904.941,03	1.038.478,1	1.133.027,6	1.252.829,07	1.381.993,4
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	166.729,50	193.673,01	216.281,39	239.192,37	265.001,23
R,S, T,U	Jasa lainnya	239.823,66	277.647,80	296.277,96	335.956,40	371.769,36
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	11.462.756,67	12.660.418,96	13.865.643,62	14.966.271,40	16.105.127,58

Sumber : BPS, 2018

e. Inflasi

Salah satu indikator makro ekonomi yang sangat penting adalah laju inflasi. Indikator ini menunjukkan tingkat perkembangan harga serta kestabilan perekonomian di suatu wilayah. Angka inflasi yang cenderung rendah menunjukkan tingkat kestabilan harga terpelihara dengan baik, sebaliknya semakin tinggi inflasi menggambarkan gejala harga yang terjadi pada periode tertentu semakin besar.

Pada akhir tahun 2018 tingkat inflasi kumulatif yang terjadi di Kota Purworejo mencapai inflasi sebesar 3,10%. Angka inflasi tersebut lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2017 yang tercatat sebesar 4,29% dan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 2,80%. Secara umum ini menunjukkan bahwa gejolak harga yang terjadi selama periode 2018 relatif lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2018 terjadi kestabilan harga dibandingkan pada tahun 2017.

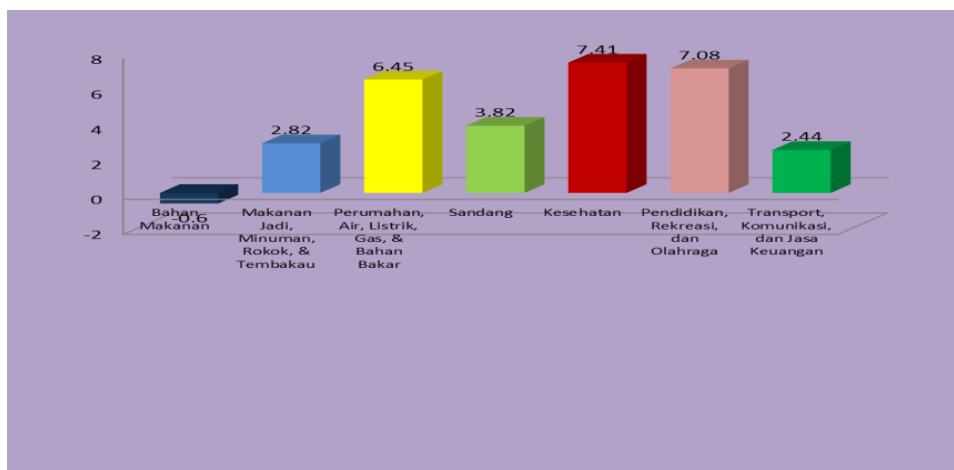
Besarnya inflasi yang terjadi pada tahun 2018 secara umum dipengaruhi oleh adanya kecenderungan kenaikan harga komoditas dari 5 (lima) kelompok barang dan jasa, antara lain: kelompok Bahan Makanan; Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau; Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar; Kesehatan; Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga; kelompok Sandang dan Transportasi.

Besarnya pengaruh inflasi/deflasi dari masing-masing kelompok barang dan jasa di kota Purworejo selama kurun waktu tahun 2016-2018 dapat dilihat pada tabel 2.7 dibawah:

Tabel 2.10.
Laju Inflasi Kota Purworejo Menurut Kelompok Barang dan Jasa
Tahun 2016-2018 (2007=100)

No	Kelompok Barang dan Jasa	Inflasi		
		2016	2017	2018
1	2	3	4	5
1	Bahan Makanan	4,99	5,34	-0,60
2	Makanan Jadi, Minuman, Rokok, & Tembakau	2,83	2,75	2,82
3	Perumahan, Air, Listrik, Gas, & Bahan Bakar	2,90	5,48	6,45
4	Sandang	-0,37	1,63	3,82
5	Kesehatan	0,57	2,48	7,41
6	Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga	2,85	3,26	7,08
7	Transport, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-0,12	4,50	2,44
Umum		2,80	4,29	3,10

Sumber : BPS, 2018



Gambar 2.8. Inflasi Kabupaten Purworejo Tahun 2018
Sumber : BPS, 2018

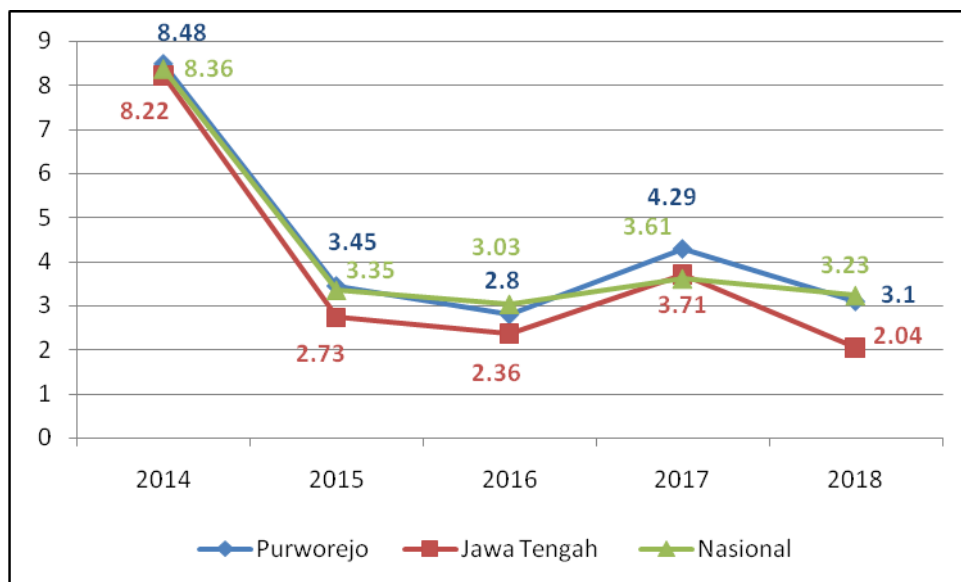
Berdasarkan tabel 2.7 dan gambar 2.7 dapat diamati bahwa selama periode 2018 ketujuh kelompok barang dan jasa yang ada mengalami inflasi. Inflasi tertinggi ditempati oleh kelompok Kesehatan yang tercatat sekitar 7,41%, urutan kedua ditempati oleh kelompok Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga sekitar 7,08%, urutan ketiga kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar sekitar 6,45%, urutan ke empat adalah kelompok Sandang sebesar 3,82%, urutan kelima adalah kelompok Makanan Jadi, Minuman dan Rokok sekitar 2,82%, urutan keenam kelompok Transport, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar 2,44% dan terakhir Kelompok Bahan Makanan sebesar -0,6%.

Jika dibandingkan dengan Propinsi Jawa Tengah, inflasi Kota Purworejo tahun 2018 relatif lebih tinggi namun lebih rendah dari Nasional. Kabupaten Purworejo mengalami inflasi sebesar 3,1 persen sedangkan Jawa Tengah inflasi tahun 2018 tercatat sebesar 2.04 persen, yang berarti masih lebih rendah dibandingkan inflasi Kota Purworejo, sedangkan Nasional 3.25 persen.

Tabel 2.11. Kumulatif Inflasi Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014-2018

No.	Tahun	Purworejo	Jawa Tengah	Nasional
1	2014	8.48	8.22	8.36
2	2015	3.45	2.73	3.35
3	2016	2.80	2.36	3.03
4	2017	4.29	3.71	3.61
5	2018	3.10	2.04	3.23

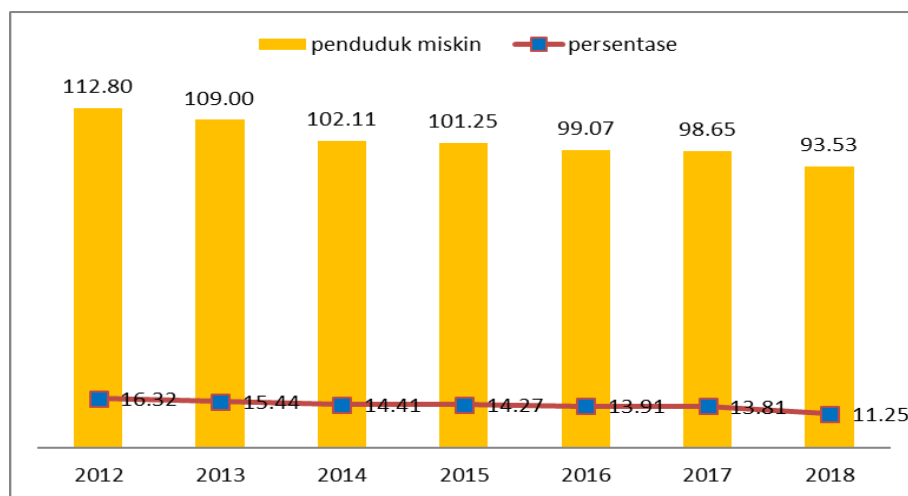
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2014-2018



Gambar 2.9 Perbandingan Laju Inflasi Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014-2018
 Sumber: BPS Tahun 2018

f. Kemiskinan

Perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Purworejo selama kurun waktu 2012-2018 ditunjukkan pada Gambar 2.9 Tingkat kemiskinan mencakup besaran jumlah dan persentase penduduk miskin. Selama kurun waktu tersebut, tingkat kemiskinan di Kabupaten Purworejo terus menunjukkan penurunan.



Gambar 2.10 Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Purworejo Tahun 2012-2018
 Sumber: BPS, 2018

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Purworejo pada Bulan Mei tahun 2018 berjumlah 93,53 ribu jiwa (11,25 persen). Angka ini

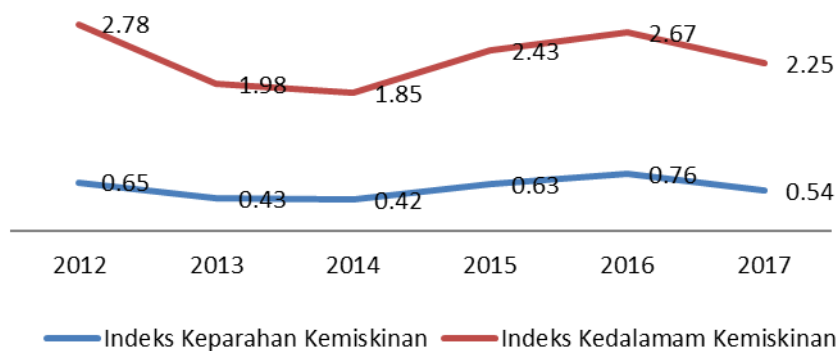
mengalami penurunan sebanyak 2.56 persen jiwa dibandingkan kondisi tahun 2017.

Sementara itu, Garis Kemiskinan (GK) kabupaten Purworejo mempunyai kecenderungan meningkat selama tahun 2012-2017 yaitu dari Rp. 254,310,- per kapita per bulan pada tahun 2012 menjadi Rp. 325,870,- per kapita per bulan pada tahun 2017. Pada tahun 2017 GK kabupaten Purworejo mengalami peningkatan sebesar Rp.11.940,- per kapita per bulan atau sebesar 3.80 persen dibandingkan tahun 2016.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Pada periode tahun 2012-2017, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya kemiskinan (P2) mengalami fluktuatif, keduanya menunjukkan kecenderungan menurun sejak tahun 2012-2014, tetapi meningkat pada tahun 2015 dan meningkat kembali pada tahun 2016, namun pada tahun 2017 mengalami penurunan kembali.

Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya kemiskinan (P2) pada tahun 2017 masing-masing menurun sebesar 0,42 poin dan 0,22 persen dibandingkan tahun 2016. Kondisi ini mengindikasikan kesenjangan rata-rata pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan pada tahun 2017 cenderung semakin kecil dan ketimpangan rata-rata pengeluaran di antara penduduk miskin semakin rendah.



Gambar 2.11

Rata-rata Kesenjangan Pengeluaran Antar Penduduk Miskin Tahun 2012-2017

Sumber : *Kompilasi Statistik Sosial Kab. Purworejo, Kominfo 2018*

Data jumlah rumah tangga miskin dan jumlah penduduk miskin disajikan dalam tabel, Data Badan Pusat Statistik Nasional 2018, tersaji sebagai berikut:

Tabel 2.12 Jumlah Rumah Tangga Miskin dan Penduduk Miskin menurut Kecamatan di Kabupaten Purworejo 2018

No	Kecamatan	Rumah Tangga Miskin	Penduduk Miskin
1	2	3	4
1	Grabag	5.549	17.317
2	Ngombol	3.208	10.001
3	Purwodadi	5.170	15.790
4	Bagelen	3.492	10.973
5	Kaligesing	3.971	12.730
6	Purworejo	7.801	25.298
7	Banyuurip	4.510	14.445
8	Bayan	6.085	20.225
9	Kutoarjo	7.369	23.976
10	Butuh	5.373	17.065
11	Pituruh	6.666	20.633
12	Kemiri	7.888	24.672
13	Bruno	8.437	28.672
14	Gebang	5.848	19.210
15	Loano	4.356	14.121
16	Bener	7.757	25.108
	Total	93.525	299.949

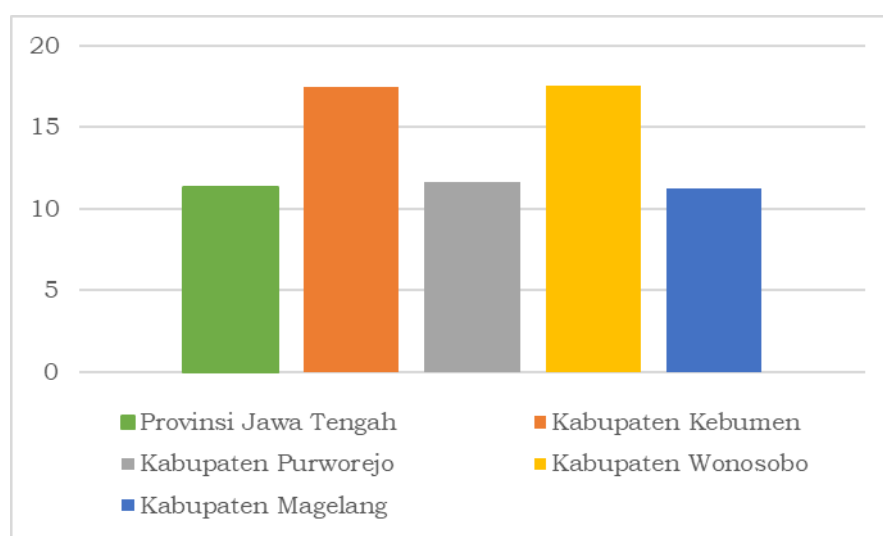
Sumber: *Badan Pusat Statistik, 2018*

Tingkat kemiskinan Kabupaten Purworejo masih berada di atas tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 11,67%. Namun apabila dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten tetangga, posisi relatif Kabupaten Purworejo berada pada peringkat kedua setelah Kabupaten Magelang seperti dapat dilihat dalam tabel dan grafik berikut

Tabel 2.13 Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Purworejo dengan Kabupaten Tetangga Tahun 2015

No	Kabupaten	Tingkat Kemiskinan
1	Provinsi Jawa Tengah	11,32
2	Kabupaten Kebumen	17,47
3	Kabupaten Purworejo	11,67
4	Kabupaten Wonosobo	17,58
5	Kabupaten Magelang	11,23

Sumber: TNP2K, 2015



Gambar 2.12 Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Purworejo dengan Kabupaten Tetangga Tahun 2015

Sumber: TNP2K, 2015

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

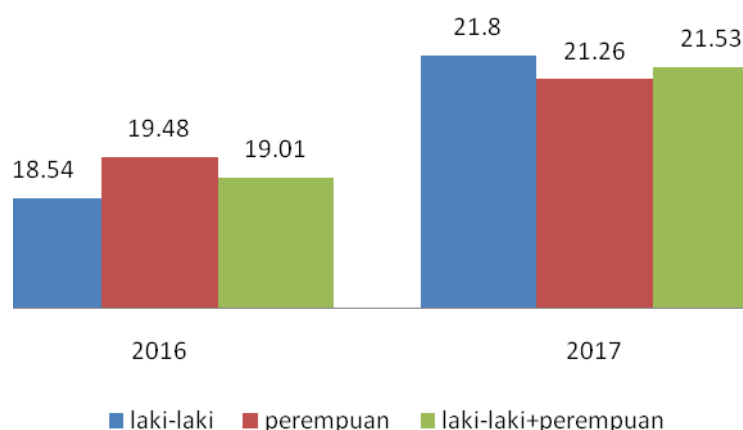
a. Kesehatan

Salah satu indikator penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia suatu wilayah adalah tingkat kualitas kesehatan. Kualitas kesehatan di masyarakat dapat diukur dari derajat kesehatan.

Merujuk pada konsep yang diterapkan BPS dalam Susenas, maka morbiditas (angka kesakitan) menunjukkan gangguan/ keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari baik dalam melakukan pekerjaan, bersekolah, mengurus rumah tangga maupun melakukan aktivitas lainnya.

Hasil Susenas 2017 seperti ditunjukkan pada Gambar 2.11 menunjukkan angka kesakitan penduduk Kabupaten Purworejo mencapai 21,53 persen atau mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 19,01. Peningkatan angka

kesakitan ini terjadi baik pada penduduk laki-laki maupun perempuan. Angka kesakitan penduduk perempuan meningkat pada tahun 2017 menjadi 21,26 persen dari 19,48 persen tahun 2016. Sedangkan pada penduduk laki-laki meningkat pada tahun 2016 adalah 18,54 persen menjadi 21,80 persen pada tahun 2017.



Gambar 2.13
Angka Kesakitan di Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2017
Sumber : BPS, 2018

Sementara itu, lamanya sakit merupakan salah satu indikator yang memberikan gambaran mengenai kondisi keluhan kesehatan yang dirasakan oleh penduduk suatu wilayah. Hasil Susenas tahun 2017 menunjukkan rata-rata lama sakit pada tahun 2017 adalah 5,68 hari. Rata-rata lama sakit untuk perempuan 5,87 hari lebih lama dari laki-laki 5,48 hari.

Indikator kesehatan lainnya adalah penggunaan fasilitas kesehatan oleh penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan ketersediaan jaminan kesehatan untuk berobat jalan. Indikator ini menunjukkan perubahan perilaku masyarakat dan pelaksanaan jaminan kesehatan. Berdasarkan data Susenas 2017 diketahui bahwa 61,26 persen penduduk yang menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat jalan dengan menggunakan jaminan kesehatan. Persentase penduduk yang pernah rawat inap dalam setahun pada tahun 2017 sebanyak 11,85 dengan rata-rata lama rawat inap 5,43 hari. Penduduk Kabupaten Purworejo yang tidak berobat jalan pada tahun 2017 sebesar 38,74 persen.

Akses penduduk dalam memanfaatkan tenaga kesehatan tidak hanya dapat dilihat dari ketersediaan/kemudahan mencapai fasilitas/tempat dan tenaga kesehatan sebagai rujukan penduduk jika mengalami keluhan sakit hingga harus pergi berobat tetapi juga dilihat dari indikator penolong persalinan. Dengan meningkatnya pertolongan persalinan oleh tenaga medis dapat memengaruhi keselamatan ibu dan bayinya. Penolong persalinan yang ideal adalah tenaga medis karena mereka telah menerapkan proses persalinan yang memenuhi standar kesehatan.

Persentase perempuan berumur 15-49 tahun yang pernah melahirkan menurut penolong persalinan, di Kabupaten Purworejo tahun 2017 adalah 100 persen oleh tenaga kesehatan (dokter, bidan, perawat dan tenaga kesehatan lainnya). Ini mengindikasikan bahwa masyarakat di kabupaten Purworejo telah sadar terhadap kesehatan dan keselamatan ibu dan anak.

Kasus shunting di Kabupaten Purworejo pada tahun 2018 mencapai 4.303 kasus. Kondisi ini mengalami penurunan dari tahun 2017 yaitu 4.764 kasus. Untuk penanganan kasus shunting di Kabupaten Purworejo dengan melaksanakan perbaikan gizi pada masyarakat.

Tabel 2.14
Trend Data Stunting Kabupaten Purworejo

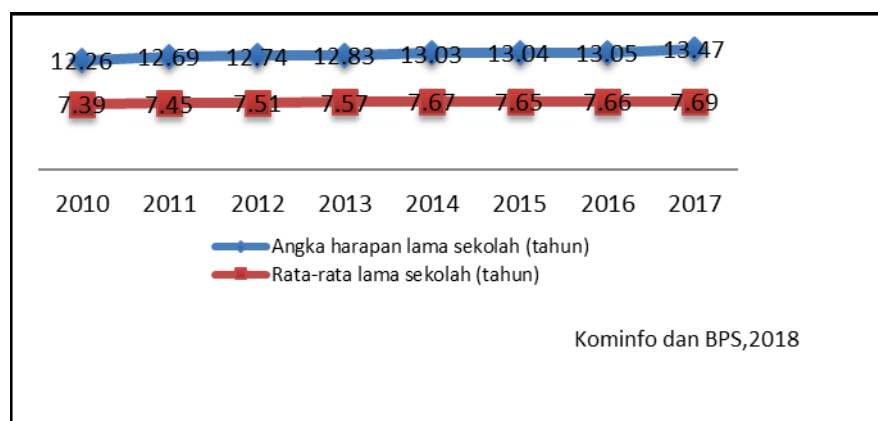
No	Puskesmas	2014	2015	2016	2017	2018
1	Grabag	297	297	217	217	251
2	Ngombol	279	456	392	374	248
3	Bragolan	185	135	178	178	150
4	Bubutan	85	119	85	113	69
5	Bagelen	238	141	128	135	123
6	Dadirejo	190	206	130	141	124
7	Kaligesing	429	371	434	362	340
8	Cangkrep	134	132	120	89	86
9	Mranti	24	22	10	10	23
10	Purworejo	133	96	236	236	320
11	Banyuurip	36	72	68	68	62
12	Seborokrapyak	76	4	56	24	22
13	Bayan	264	156	124	411	314
14	Kutoarjo	86	56	89	158	127
15	Semawung	222	188	189	7	31
16	Wirun	28	11	8	10	26

17	Butuh	180	85	157	161	74
18	Sruworejo	51	6	18	15	6
19	Pituruh	234	193	406	370	269
20	Karanggetas	161	106	147	137	207
21	Kemiri	276	248	211	152	118
22	Winong	159	88	134	184	104
23	Bruno	590	546	678	601	713
24	Gebang	76	65	58	58	76
25	Loano	182	237	197	316	68
26	Banyuasin	186	161	137	137	155
27	Bener	144	116	88	100	197
Jumlah		4.945	4.313	4.695	4.764	4.303

Sumber: Data Dinas Kesehatan, 2014-2018

b. Pendidikan

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Meskipun demikian rata-rata lama sekolah relatif lebih lambat pertumbuhannya dibandingkan angka harapan lama sekolah. Indikator ini merupakan indikator proses pembangunan sebagai ukuran keberhasilan program-program pendidikan jangka pendek. Di sisi lain, rata-rata lama sekolah menggambarkan indikator output pembangunan jangka panjang sehingga perkembangannya relatif lebih lambat. Kedua indikator ini menggambarkan capaian (*stock*) dan penambahan (*flow*) sumber daya manusia berkualitas di suatu wilayah.



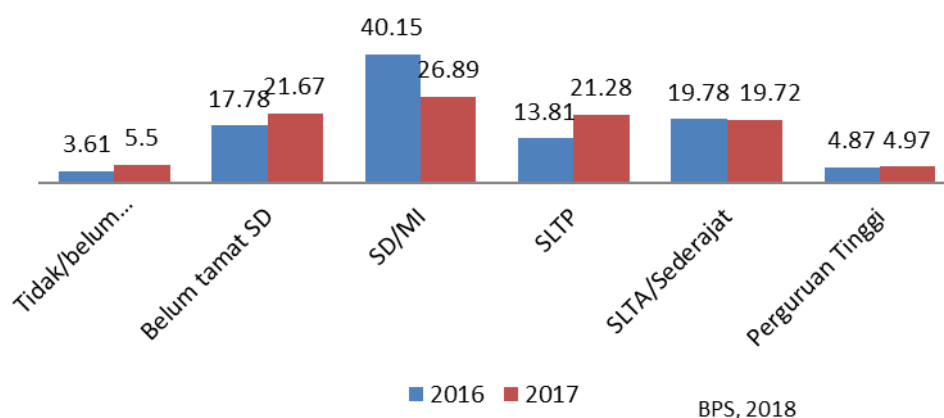
Gambar 2.14 Harapan Lama Sekolah (Tahun) dan Rata-rata Lama Sekolah (Tahun), 2010-2017

Sumber : BPS, 2018

Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Purworejo telah meningkat sebesar 1,21 tahun, sementara Rata-rata Lama Sekolah meningkat 0,3 tahun. Tren angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah di kabupaten Purworejo meningkat dari tahun 2010 hingga 2017. Meningkatnya harapan lama sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Harapan lama sekolah di Kabupaten Purworejo mencapai 13,47, lebih tinggi dari Jawa Tengah sebesar 12,57 tahun, sementara itu, rata-rata lama sekolah di Kabupaten Purworejo 7,69 tahun lebih tinggi dari Jawa Tengah 7,27 tahun.

Selain Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah, Pendidikan tertinggi yang ditamatkan juga merupakan salah satu ukuran kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, maka semakin tinggi tingkat kesejahteraannya. Daya saing sebuah bangsa tidak bisa dipisahkan dari mutu dan kualitas SDM-nya. Kualitas SDM merupakan modal dalam menghadapi persaingan global.

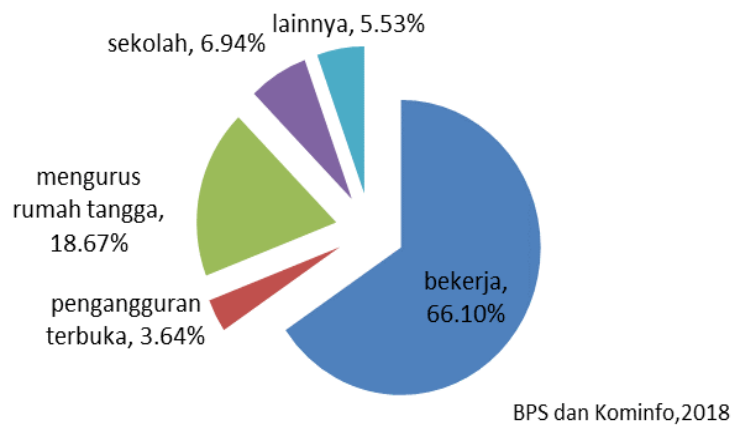
Gambar 2.13 menunjukkan bahwa pada tahun 2017 penduduk usia 10 tahun ke atas yang tamat SD/MI/Paket A menempati urutan pertama dengan persentase sebesar 26,89 persen. Penduduk usia 10 tahun ke atas masih banyak yang bersekolah hanya sampai jenjang pendidikan Sekolah Dasar. Bahkan, penduduk usia 10 tahun ke atas yang menyelesaikan pendidikan SMP/MTS/Paket B hanya sebesar 21,28 persen, lebih rendah dari angka pada jenjang pendidikan SD/MI/Paket A. Hal sebaliknya terjadi untuk jenjang pendidikan menengah. Penduduk usia 10 tahun ke atas yang menamatkan SMA/MA/SMK/Paket C tercatat sebesar 19,72 persen. Sementara itu, penduduk usia 10 tahun yang berhasil menyelesaikan pendidikannya di jenjang Perguruan Tinggi sebesar 4,97 persen.



Gambar 2.15. Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas menurut Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2016-2017
 Sumber : BPS, 2018

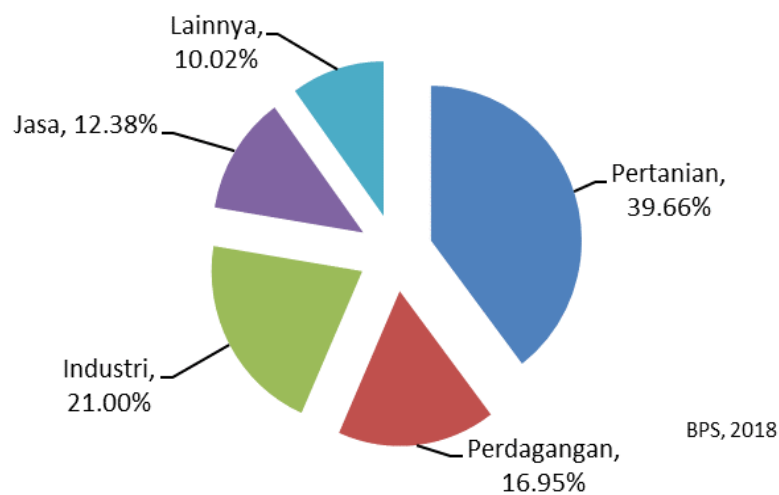
c. Ketenagakerjaan

Data dan informasi ketenagakerjaan sangat penting bagi penyusunan kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan dalam rangka pembangunan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan tersebut. Jumlah angkatan kerja di kabupaten Purworejo tahun 2017 tercatat sebanyak 492.056 orang. Jumlah bukan angkatan kerja 222.518 orang. Penduduk usia kerja di kabupaten Purworejo lebih banyak yang masuk dalam angkatan kerja dibanding bukan angkatan kerja. Persentase penduduk angkatan kerja sekitar 68,86 persen terdiri dari 66,10 persen penduduk bekerja dan 3,64 persen pengangguran terbuka tersebut terdiri dari 6,94 persen penduduk yang sekolah. Sementara itu, persentase penduduk bukan angkatan kerja sekitar 31,14 persen dari jumlah penduduk usia kerja. Penduduk bukan angkatan kerja 18,67 persen penduduk yang mengurus rumah dan 5,53 persen penduduk yang mempunyai kegiatan lainnya.



Gambar 2.16 Jumlah dan Persentase Penduduk Usia Kerja menurut Jenis Kegiatan Kabupaten Purworejo, 2017
 Sumber: BPS, 2017

Sebagian besar tenaga kerja kabupaten Purworejo terserap di sektor pertanian sebesar 39,66 persen pada tahun 2017, disusul sektor perdagangan sebesar 21,00 persen, industri pengolahan sebesar 16,95 persen, jasa kemasyarakatan sebesar 12,38 persen, dan lainnya sebesar 10,02 persen. Sektor pertanian memiliki kesempatan kerja yang lebih luas dibanding sektor yang lain karena sektor tersebut tidak memerlukan keahlian khusus.



Gambar 2.17 Persentase Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama Kabupaten Purworejo, 2017
 Sumber : BPS, 2018

2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

a. Seni Budaya

Kabupaten Purworejo mempunyai beberapa potensi seni dan budaya baik potensi kebudayaannya maupun heritage nya. Potensi budaya meliputi seni tari, seni musik, sastra dan seni rupa, sedangkan potensi heritage misanya bangunan cagar budaya. Potensi-potensi kebudayaan dan heritage yang dimiliki Kabupaten Purworejo tersebut patut untuk dikenalkan, dilestarikan dan dikembangkan sebagai warisan budaya dan peradaban manusia

Tabel. 2.15 Jumlah Seni dan Budaya, serta Cagar Budaya Yang Dilestarikan Kabupaten Purworejo Tahun 2015-2018

No.	Uraian	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6
I	Seni dan Kebudayaan				
1	Jumlah Group Kesenian	800	584	584	649
2	Jumlah Gedung Kesenian	1	1	1	1
3	Museum	1	1	1	1
4	Pusat Kebudayaan	0	0	0	0
5	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	70	54	70	0
II	Cagar Budaya Yang Dilestarikan				
1	Benda Cagar Budaya	193	198	198	1291
2	Bangunan Cagar Budaya	120	120	120	88
3	Situs Cagar Budaya	0	2	2	13
4	Kawasan Cagar Budaya	3	3	3	3

Sumber : SIPD Kabupaten Purworejo Tahun 2018

b. Olahraga

Berbagai upaya telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam mendukung pembangunan bidang keolahragaan. Kabupaten Purworejo telah memiliki gedung olahraga dan kedepan akan dibangun juga *Heroes Park* yang nantinya untuk memwadahi kegiatan kepemudaan dan olahraga yang diharapkan akan dapat meningkatkan prestasi olahraga di Kabupaten Purworejo

Tabel. 2.16 Jumlah Organisasi, Klub, Wahana dan Kegiatan Olahraga Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2018

No.	Uraian	Tahun		
		2016	2017	2018
I	Pemuda dan Olahraga			
1	Jumlah Klub Olahraga	85	85	85
2	Jumlah Gedung Olahraga	16	16	16
5	Organisasi Olahraga	1	1	1
6	Kegiatan Olahraga	12	12	12

Sumber : SIPD Kabupaten Purworejo Tahun 2018

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1. Pendidikan

Angka Partisipasi Kasar (APK) dari Kabupaten Purworejo Tahun 2014-2018, adalah sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.17
Angka Partisipasi Kasar (APK) dari Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1	APK PAUD (4-6th)	68,98%	71,19%	48,85%	48,85%	60,92%
2	APK SD/MI/Paket A	100,58%	101,74%	102,81%	101,54%	107,25%
3	APK SMP/MTs/Paket B	97,01%	98,14%	98,87%	98,46%	102,19%

Sumber Data: Dinas Dindikpora Berbagai Tahun

- a) Berdasarkan data diatas bahwa angka partisipasi kasar (APK) PAUD (4-6 th) tahun 2018 sebesar 60,92% naik dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 48,85%. Hal tersebut menggambarkan peningkatan atau keberhasilan pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini dan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap perlunya pendidikan anak usia dini.
- b) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A tahun 2017 sebesar 101,54% dan tahun 2018 sebesar 107,25%, peningkatan atau keberhasilan pelaksanaan program Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun dan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya pendidikan wajib belajar Sembilan tahun.
- c) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B tahun 2017 sebesar 98,46% dan tahun 2018 sebesar 102,19%, peningkatan atau keberhasilan pelaksanaan program Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun dan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya pendidikan wajib belajar Sembilan tahun.

Tabel 2.18 Angka Partisipasi Murni Dari Tahun 2014 – 2018

Uraian	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Angka Partisipasi Murni (APM)					
APM SD/MI	85,54%	85,93%	90.15%	90,23%	87,10%
APM SMP/MTs	77,91%	77,94%	68.44%	77,67%	78,03%

Sumber Data: Dinas Dindikpora Berbagai Tahun

Angka Partisipasi Murni, menunjukkan capaian sebagai berikut :

- a) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI tahun 2014 tercapai 85,54% dan tahun 2018 sebedar 87,10%, terjadi peningkatan jumlah peserta didik jenjang SD/MI merupakan keberhasilan Pemerintah dalam memberikan pelayanan pendidikan dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dasar dalam kontribusi kesuksesan program penuntasan wajib belajar 9 tahun.
- b) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs tahun 2014 77,91% dan tahun 2018 sebesar 78,03% terjadi peningkatan jumlah peserta didik jenjang SMP merupakan keberhasilan Pemerintah dalam memberikan pelayanan pendidikan dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dasar dalam kontribusi kesuksesan program penuntasan wajib belajar 9 tahun.

Tabel 2.17 Angka Putus Sekolah Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	Realisasi				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1.	Angka putus sekolah					
	Jenjang SD/SDLB	0,03%	0,03%	0.03%	0,00%	0.08%
	Jenjang SMP/SMPLB	0,07%	0,06%	0.05%	0.01%	0,45%

Sumber Data: Dinas Dindikpora Berbagai Tahun

Angka putus sekolah jenjang SD/SDLB tahun 2014 sebesar 0,03% dan tahun 2018 sebesar 0,08% terjadi peningkatan anak putus sekolah. Banyak faktor yang mempengaruhi anak putus sekolah di jenjang SD/SDLB antara lain kurangnya motivasi anak, kecerdasan anak dan jarak tempuh sekolah dengan rumah.

Angka putus sekolah jenjang SMP/SMPLB tahun 2014 sebesar 0,07% dan tahun 2018 sebesar 0,45% terjadi peningkatan anak putus sekolah sebesar 0,38%. Kondisi ini dikarenakan banyak faktor yang berpengaruh. Angka putus sekolah pada jenjang SMP/SMPLB yang meningkat dikarenakan kurangnya motivasi anak dan jarak tempuh antara sekolah dengan tempat tinggal.

Tabel 2.20
Persentase kelulusan SD/MI, SMP/MTs Tahun 2014- 2018

No	Uraian	Realisasi				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase kelulusan SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA					
	Jenjang SD/SDLB	99,54%	100%	100%	100%	99,88%
	Jenjang SMP/SMPLB	95,56%	100%	100%	100%	100%

Sumber Data: Dinas Dindikpora Berbagai Tahun

Persentase kelulusan SD/SLB, tahun 2014 sebesar 99,54% dan tahun 2018 sebesar 99,88% mengalami peningkatan sebesar 0,34%. Hal ini menggambarkan keberhasilan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan di jenjang SD/SDLB, keberhasilan ini didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana SD/SDLB, perpustakaan, alat peraga, buku untuk siswa.

Persentase kelulusan SMP/SMPLB, tahun 2014 sebesar 95,56% dan tahun 2018 sebesar 100% mengalami peningkatan sebesar 0,44%. Hal ini menggambarkan keberhasilan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan di jenjang SMP/SMPLB, keberhasilan ini didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana SMP/SMPLB, perpustakaan, alat peraga, laboratorium, alat-alat laboratorium, dan buku untuk siswa.

Banyaknya sekolah, murid, guru dan rasio guru untuk jenjang TK, SD dan SMP sebagaimana tabel berikut:

Tabel. 2.21 Banyaknya Sekolah TK, SD/MI, SMP/MTs se Kabupaten Purworejo Tahun 2015-2017

No	Uraian	Jumlah Sekolah Tahun		
		2015	2016	2017
1	2	3	4	5
1	TK Negeri/Swasta	404	404	412
2	SD/MI	566	570	571
3	SMP/MTs	106	105	105

Sumber : DDA kabupaten Purworejo Tahun 2018

Tabel. 2.22 Banyaknya Murid TK, SD/MI, SMP/MTs se Kabupaten Purworejo Tahun 2015-2017

No	Uraian	Jumlah Murid Tahun		
		2015	2016	2017
1	2	3	4	5
1	TK Negeri/Swasta	12.454	12.685	12.465
2	SD/MI	72.661	71.334	71.334
3	SMP/MTs	36.100	35.479	35.479

Sumber : DDA kabupaten Purworejo Tahun 2018

Tabel. 2.23 Banyaknya Guru TK, SD/MI, SMP/MTs se Kabupaten Purworejo Tahun 2015-2017

No	Uraian	Jumlah Guru Tahun		
		2015	2016	2017
1	2	3	4	5
1	TK Negeri/Swasta	1.152	1.145	1.125
2	SD/MI	5.401	5.401	5.401
3	SMP/MTs	2.715	2.377	2.377

Sumber : DDA kabupaten Purworejo Tahun 2018

Tabel. 2.24 Rasio Guru TK, SD/MI, SMP/MTs se Kabupaten Purworejo Tahun 2015-2017

No	Uraian	Rasio Guru Tahun		
		2015	2016	2017
1	2	3	4	5
1	TK Negeri/Swasta	10,08	11,08	11,08
2	SD/MI	13,45	13,21	13,21
3	SMP/MTs	13,30	14,93	14,93

Sumber ; DDA kabupaten Purworejo Tahun 2018

2.1.3.2. Kesehatan

Data Capaian Kinerja Bidang Kesehatan di Kabupaten Purworejo pada tahun 2014-2018 sebagaimana tercantum dalam tabel 2.20 berikut:

Tabel 2.25

Capaian Kinerja Bidang Kesehatan Kabupaten Purworejo Tahun 2014-2018

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1.	Angka Kematian Ibu (per 100.000 KH)	53,73	73,36	75,36	184,29	78,80
2.	Angka Kematian Bayi (per 1.000 kelahiran hidup)	13,00	12,16	11,30	11,20	9,45
3.	Prevalensi gizi buruk	0,10%	0,10%	0,10%	0,04%	0,03%
5	Usia Harapan Hidup (tahun)	73,83	74,03	74,14	74,26	*

*Data belum tersedia

Sumber : Data Dasar Pembangunan 2018

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa indikator kinerja urusan kesehatan menunjukkan peningkatan capaian pada indikator kinerja urusan kesehatan. Adapun data Sarana Kesehatan yang mendukung pencapaian indikator bidang kesehatan sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.26
Sarana dan Tenaga Kesehatan Kabupaten Purworejo tahun 2017

No	Sarana Dan Tenaga Kesehatan	Jumlah
	SARANA KESEHATAN	
1	Rumah Sakit	8
2	Puskesmas	27
3	Posyandu	1.614
4	Praktek Bidan	245
5	Poskesdes	248
	Rumah Sakit	
1	Dokter	184
2	Tenaga Medis	458

Sumber Data: Purworejo Dalam Angka 2018

2.1.3.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kondisi infrastruktur prasarana di Kabupaten Purworejo di tahun 2015 sampai dengan 2018 menunjukkan capaian kinerja yang meningkat. Adapun mengenai data panjang jalan pada tahun 2014-2017 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.27
Kondisi Fisik Jalan Kabupaten Purworejo Tahun 2015-2018

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1	Jalan Kondisi Baik-Sedang (km)	544,11	572,14	432,67	555,44	588,15
2	Jalan Kondisi Rusak (km)	114,74	100,09	245,23	111,21	95,5
3	Jalan Kondisi Rusak Berat (km)	88,48	75,1	91,35	102,5	85,6

Sumber: SIPD, 2018

Adapun kondisi fisik jembatan di Kabupaten Purworejo Tahun 2015 sampai dengan akhir 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.28 Kondisi Fisik Jembatan Kabupaten Purworejo Tahun 2015-2018

No	Uraian	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
1	2	6	7	5	6
1	Jembatan Kondisi Baik-Rusak Ringan (m)	3.754,32	3.871,07	3.782,18	3.744,47
2	Jembatan Kondisi Rusak Berat-Runtuh (m)	342,05	225,30	314,19	335
JUMLAH		4.096,37	4.096,37	4.096,37	4.079,47

Sumber Data: SIPD, 2018

Dari tabel diatas terlihat bahwa penanganan kondisi jalan setiap tahunnya semakin meningkat. Untuk penanganan jembatan capaian kinerja mengalami sedikit penurunan dikarenakan adanya kerusakan jembatan yang disebabkan oleh umur jembatan dan bencana alam. Berkurangnya jumlah jembatan karena ada jembatan yang statusnya ikut nasional.

Penanganan penyediaan air minum perkotaan sampai dengan akhir 2015 mencapai 187.645 penduduk (92,39%), adapun untuk pedesaan mencapai 431.537 penduduk (84,14%). Capaian pertahunnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.29 Penanganan Penyediaan Akses Air Minum di Kabupaten Purworejo Tahun 2015-2018

No	Uraian	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6
1	Persentase cakupan layanan air minum				
	a. Pedesaan	92.39%	92.46%	92,46%	96%
	b. Perkotaan	84.14%	86.05%	86,05%	86,4%

Sumber Data: Data Dasar Pembangunan, 2018

2.1.3.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Perumahan rakyat merupakan urusan wajib pelayanan dasar dengan kinerja tahun 2015 sampai dengan 2018 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.30 Kinerja Perumahan Rakyat Kabupaten Purworejo Tahun 2015-2018

No	Uraian	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6
1	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	82,03%	83,63%	86,63%	97,19%
2	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	57,69%	35,50%	22,83%	179,08%

Sumber Data: Data Dasar Pembangunan 2018

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan kenaikan pada cakupan ketersediaan rumah layak huni pada tahun 2015 sejumlah 82,03% menjadi 97,19% pada tahun 2018. Sedangkan cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 mengalami kenaikan dari 57,69% menjadi 179,08%.

Berdasarkan SK Bupati Purworejo Nomor: 188.4/570/2014 Tanggal 20 Oktober 2014 tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman 1 di Kabupaten Purworejo dan kondisi akhir tahun 2018 tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2.31 Daftar Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Purworejo

No	Nama Kawasan	Luas awal SK (Ha)	Pengurangan Kumuh tahun 2018 (Ha)	Kondisi tahun 2018 (Ha)
1	2	3	4	5
1	Kelurahan Pangenrejo Kecamatan Purworejo	9,17	1,27	7,90
2	Kelurahan Mranti Kecamatan Purworejo	4,39	0	4,39
3	Kelurahan Baledono Kecamatan Purworejo	18,41	5,56	12,85
4	Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo	14,06	4,06	30,00
5	Kelurahan Keseneng Kecamatan Purworejo	2,80	0	2,80
6	Kelurahan Pangen Jurutengah Kecamatan Purworejo	39,30	0	39,30
7	Kelurahan Kutoarjo Kecamatan Kutoarjo	56,59	4,92	51,67
8	Kelurahan Bandung Kecamatan Kutoarjo	24,14	24,14	0,00
9	Kelurahan Semawung Daleman Kecamatan Kutoarjo	11,92	11,92	0,00
10	Kelurahan Bayem Kecamatan Kutoarjo	9,23	9,23	0,00
11	Kelurahan Katerban Kecamatan Kutoarjo	7,40	7,40	0,00
TOTAL		197,41		128,91

Sumber : Dinperkimtan, 2018.

2.1.3.5. Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri termasuk urusanyang harus dilaksanakan sampai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kinerja urusan tersebut tahun 2015 sampai dengan 2018 tergambar dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.32 Data Persentase partisipasi masyarakat dalam PILPRES, PILEG, PILKADA Tahun 2015-2018

NO	Uraian	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
1	2	4	5	6	7
1	Persenta setingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu (PILPRES, PILEG, PILKADA)	61,72%	61,72%	61,72%	67,51%

Sumber : Dinperkimtan, 2018.

Di Kabupaten Purworejo dari data tabel diatas terjadi peningkatan patisipasi masyarakat dalam pemilu, dengan melihat tingkat partisipasi pada Pileg dan Pilpres Tahun 2015. Dibandingkan Pilkada pada tahun 2018 mengalami peningkatan tingkat partisipasi dari 61,72% sebelumnya menjadi 67,51%. Selain mendorong partisipasi masyarakat dalam pemilu, daerah juga melakukan upaya-upaya pembinaan kepada LSM, ormas maupun partai politik. Berkaitan dengan Pencapaian Persentase penanggulangan bencana dari Tahun 2015-2018 dapat kami sajikan berikut ini.

Tabel 2.33
Pencapaian Persentase Penanggulangan Bencana Tahun 2015-2018

NO	Uraian	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	7
1	Persentase Penanggulangan Bencana	100%	100%	100%	100%

Upaya untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum perlindungan masyarakat (tramtibumlinmas) adalah sebagai berikut:

Tabel 2.34
Perkembangan kapasitas Tramtibumlinmas Kabupaten Purworejo Tahun 2014-2018

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah polisi pamong praja	78	78	75	77	70
2	Jumlah Linmas	99	99	6163	5925	5929
3	Penegakan perda	209	3446	2293	3437	1669
4	Cakupan patrol petugas satpol	79%	84%	144%	192%	192%
5	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3	100%	100%	234	309	345

Sumber data: Data Dasar Pembangunan Daerah, Satpol PP (2018)

Dalam urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat terdapat pembentukan desa tangguh bencana sebanyak 18 desa pada tahun 2017, 17 desa pada tahun 2018 dan 15 desa pada tahun 2019. Selain itu juga terdapat pengadaan *early warning system (EWS)* berupa 2 EWS

untuk bencana banjir, 4 EWS untuk bencana tsunami, dan 5 EWS untuk bencana longsor. Sedangkan pada tahun 2019 akan diadakan 2 tambahan EWS untuk bencana tsunami.

2.1.3.6. Sosial

Urusan sosial termasuk bagian urusan wajib pelayanan dasar. Kinerja tahun 2015 sampai dengan 2018 tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 2.35
Angka kemiskinan di Kabupaten Purworejo Tahun 2015 – 2018

No	Uraian	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6
1	Angka kemiskinan (%)	14,27	13,91	13,81	11,67

Sumber Data: Bappeda Kabupaten Purworejo, 2018

Angka kemiskinan di Kabupaten Purworejo menurun setiap tahunnya namun masih cukup tinggi, dan persentasenya diatas rata-rata angka kemiskinan Provinsi Jawa Tengah dan nasional.

Program-program dalam rangka mempercepat penurunan kemiskinan telah dilaksanakan, antara lain melalui Propendakin (Program Penanggulangan Kemiskinan) yaitu dengan memberikan bantuan keuangan kepada desa/kelurahan agar digunakan untuk mengentaskan minimal 10 rumah tangga miskin. Pemasangan listrik bagi rumah tangga miskin, penangan RTLH, akses pendidikan untuk siswa miskin, bantuan pangan non tunai dan jaminan sosial jaminan kesehatan daerah (Jamkesda).

Tabel 2.36
Data PMKS yang tertangani Tahun 2015 – 2018

No	Uraian	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6
1	Persentase PMKS yang tertangani	19,57%	29,89%	26,21%	21,00%

Sumber Data: Data Dasar Pembangunan, 2018

Berdasarkan data diatas menunjukkan penurunan Persentase PMKS yang tertangani dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 dari 26,21% menjadi 21,00%.

Sementara itu sarana prasarana yang mendukung penyelesaian permasalahan yang dialami oleh PMKS antara lain adalah melalui

ketersediaan panti-panti sosial yang dikelola oleh pemerintah maupun masyarakat. Sampai dengan tahun 2017 jumlahnya mencapai 13 buah, 5 diantaranya dikelola oleh pemerintah. Perkembangan jumlah panti setiap tahunnya tampak dalam tabel berikut ini.

Tabel. 2.37
Jumlah Panti Yang Memenuhi Standar di Kab.Purworejo Tahun 2015-2018

No	Uraian	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6
1.	Panti yang memenuhi standar	13	13	13	13
	a. Dikelola pemerintah	5	5	5	5
	b. Dikelola swasta	8	8	8	8

Sumber : SIPD Kabupaten Purworejo Tahun 2017

2.1.3.7. Tenaga Kerja

Tingkat Pengangguran Terbuka tergambar dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.38 Tingkat pengangguran Terbuka Kabupaten Purworejo Tahun 2014-2017

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1	Tingkat pengangguran Terbuka (TPT)	5,01	4,01	Tidak ada data	3,64	Belum ada data

Sumber data : BPS dan Kominfo,2018

Dari data diatas menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun jumlah pengangguran di Kabupaten Purworejo mengalami penurunan yang signifikan. Dalam hal hubungan ketenagakerjaan, berdasarkan data yang ada sampai dengan tahun 2018, tidak terdapat sengketa kasus ketenagakerjaan yang belum terselesaikan. Data BPS, 2018 menunjukkan bahwa pada tahun 2018 data pencari pekerjaan adalah 9.197 orang, mempersiapkan usaha 1.108 orang, merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan adalah 995 orang dan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja adalah 1.623 orang.

2.1.3.8. Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak termasuk bagian urusan wajib. Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Purworejo mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yaitu sebesar

94,17 pada tahun 2015 menjadi 95,26 pada tahun 2017 lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Tengah yang hanya 92,21 pada tahun 2015 dan 91,94 pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan keberhasilan pembangunan berwawasan gender, yang meliputi usia harapan hidup, rata-rata lama sekolah, angka melek huruf dan sumbangan pendapatan perempuan.

Capaian kinerja program/kegiatan untuk mewujudkan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo dalam melaksanakan urusan PPPA dapat diwujudkan dalam upaya:

- a) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mewujudkan pelaksanaan PUG, target capaian SPM penanganan korban kekerasan, kualitas hidup perempuan dan anak serta Kabupaten Purworejo Layak Anak.
- b) Masih diperlukan program/kegiatan lanjutan untuk memfasilitasi Kecamatan/Desa/Kelurahan dalam rangka pemenuhan hak anak.

2.1.3.9. Pangan

Ketahanan pangan sangat penting bagi daerah untuk mengetahui cadangan pangan yang tersedia. Regulasi daerah yang berhubungan dengan pangan antara lain Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 11/Permentan/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah, Pergub No. 36 Tahun 2017 tentang Pengembangan Pangan Lokal di Provinsi Jawa Tengah, Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 526/35 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Jejaring Keamanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 12 tahun 2014 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan, Keputusan Bupati Purworejo Nomor: 180.18/207/VI/2017, Tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Daerah. Capaian Kinerja Urusan Ketahanan Pangandari Tahun 2015-2018 sebagai berikut ini.

Tabel 2.39 Pencapaian Kinerja Urusan Ketahanan Pangan
Dari Tahun 2015-2018

No	Uraian	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah desa rawan pangan	45 desa	45 desa	45 desa	45 desa
2	Jumlah Produksi Padi (ton)	307.019	355,227	333,119	336.838

Sumber : DPPKP, 2019.

Kerawanan pangan di tingkat desa tersebut, ditentukan oleh tujuh (7) indikator yang terbagi dalam tiga (3) aspek ketahanan pangan yang meliputi :

- a. Aspek ketersediaan pangan
- b. Indikatornya: jumlah toko/warung kelontong,
- c. Aspek akses terhadap pangan dan penghidupan
- d. Indikatornya: persentase penduduk hidup di bawah garis kemiskinan, jalan utama desa/kelurahan dapat dilalui kendaraan bermotor roda 4 atau lebih, persentase rumah tangga tanpa akses listrik,
- e. Aspek pemanfaatan pangan
- f. Indikatornya: jumlah kematian balita dan ibu saat melahirkan, jumlah penderita gizi buruk, jumlah sarana/fasilitas kesehatan.

2.1.3.10. Pertanian

Sertifikat tanah pada Kabupaten Purworejo terbagi dalam beberapa jenis yaitu sertifikat hak milik tanah, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak guna pakai, dan hak wakaf. Pada semua jenis sertifikat kepemilikan tersebut, kesemuanya mengalami peningkatan jumlah dari tahun 2017 ke 2018. Rincian jumlah sertifikat tanah Kabupaten Purworejo dapat dilihat pada tabel 2.35.

Tabel 2.40 Sertifikat Tanah di Kabupaten Purworejo Tahun 2018

No	Sertifikat Tanah	Jumlah Sertifikat		Keterangan
		2017	2018	
1	Sertifikat Hak Milik Tanah (HM)	305.607	332.519	Bidang
2	Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB)	4.832	4.910	Bidang
3	Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU)	0	0	Bidang
4	Sertifikat Hak Guna Pakai (HGP)	1.464	3.116	Bidang
5	Sertifikat Hak Wakaf (HW)	726	831	Bidang

2.1.3.11. Lingkungan Hidup

Urusan lingkungan hidup termasuk bagian urusan wajib. Kinerja tahun 2016 sampai dengan 2018 tergambar dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.41 Kinerja Urusan Lingkungan Hidup
Kabupaten Purworejo Dari Tahun 2016 – 2018

No	Uraian	Tahun		
		2016	2017	2018
1	2	3	4	5
1.	Persentase terpenuhinya baku mutu kualitas air sungai	83%	65%	50%
2.	Persentase terpenuhinya kualitas udara ambient	72%	83,97%	96,6%
3.	Persentase tingkat tutupan lahan berupa hutan vegetasi terhadap luas wilayah	21%	31%	40%
4.	Persentase rumah tangga yang menerapkan 3R	18%	18%	21,65%
5.	Persentase sampah yang tertangani	100%	100%	100%
6.	Persentase TPA yang memenuhi criteria dan dioperasikan secara layak	40%	40%	44%
7.	Persentase cakupan layanan persampahan	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018

2.1.3.12. Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Urusan kependudukan dan catatan sipil termasuk bagian urusan wajib. Kinerja tahun 2016 sampai dengan 2018 tergambar dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.42 Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Purworejo dari Tahun 2016-2018

No	Uraian	Tahun		
		2016	2017	2018
1	2	3	4	5
1	Persentase kepemilikan Kartu Keluarga	93,13%	94,20%	95,49%
2	Persentase kepemilikan KTP elektronik	94,31%	95,79%	98,36%
3	Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	1,06%	35,51%	42,49%
4	Persentase kepemilikan akta kelahiran yang lahir pada tahun berjalan	85,84%	91,36%	96,71%
5	Persentase penduduk yang memiliki akta kelahiran bagi penduduk usia 0 - 18 tahun	81,86%	83,99%	92,06%
6	Persentase kepemilikan akta kematian	25,23%	41,35%	52,62%
7	Persentase kepemilikan akta perkawinan non muslim	100%	100%	100%

Sumber : Dindukcapil, 2019.

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan pada semua indikator menunjukkan peningkatan, diharapkan kedepan dapat 100% semua sesuai program yang ditetapkan pemerintah.

2.1.3.13. Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Urusan pemberdayaan masyarakat desa merupakan salah satu urusan wajib dengan kinerja tahun 2015 sampai dengan 2018 adalah sebagaimana berikut:

Tabel 2.43
Lokasi Desa Rentan dan Rentan Pangan Kabupaten Purworejo

No	Uraian	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Desa yang berperan aktif dalam pembangunan desa	469	469	469	469
2	Desa/ Kelurahan yang sudah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Desa (RPJMD-Des)	467	469	467	469
3	Jumlah PKK Aktif	494	494	494	494
4	Jumlah Posyandu Aktif	1647	1647	1647	1647

Sumber : Dinpermasdes, 2019.

Berdasarkan data di atas bahwa semua lembaga dan PKK di desa telah aktif berperan dalam pembangunan.

2.1.3.14. Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Angka partisipasi KB (*contraceptive prevalence ratio - CPR*) Kabupaten Purworejo pada tahun 2016 sebesar 52,50 persen, yang berarti satu diantara dua pasangan usia subur (PUS) tahun 2015 sedang ber-KB. Angka partisipasi KB ditunjukkan oleh persentase wanita usia 15-49 tahun yang kawin dan sedang aktif menggunakan alat KB. Angka ini bermanfaat untuk menetapkan kebijakan pengendalian kependudukan.

Tabel 2.44 Persentase Wanita Umur 15-49 Tahun yang Berstatus Kawin menurut Status KB tahun 2015-2017

No	Uraian	Tahun		
		2015	2016	2017
1	2	3	4	5
1	Sedang memakai KB	59,65	52,50	51,31
2	Tidak sedang memakai KB	16,69	15,23	20,43
3	Tidak pernah memakai KB	23,66	32,27	28,26

Sumber :Kompilasi Statistik Sosial Kab. Purworejo,Kominfo 2018

Dilihat dari jenisnya, alat KB yang banyak digunakan oleh peserta KB aktif adalah suntik sebesar 42,39 persen pada tahun 2017, IUD sebesar 16,08 persen, susuk sebesar 14,33 persen. Metode kontrasepsi

untuk pria seperti kondom/karet KB dan metode operasi pria (MOP) ternyata merupakan alat KB yang paling sedikit digunakan oleh peserta KB aktif yaitu hanya 4,75 persen. Metode kontrasepsi untuk pria dimaksudkan agar pria dapat berpartisipasi aktif dalam menyukseskan program KB, selain untuk membantu wanita yang memiliki masalah dalam penggunaan alat kontrasepsi.

Adapun data wanita umur 15-49 tahun yang berstatus kawin menurut status alat kontrasepsi KB yang digunakan, sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel. 2.45 Persentase Wanita Umur 15-49 Tahun yang Berstatus Kawin menurut Status KB yang Sedang Digunakan

No	Uraian	Tahun		
		2015	2016	2017
1	2	3	4	5
1	MOW/Tubektomi	5,30	9,05	6,36
2	MOP/Vasektomi	0,32	-	0,49
3	AKDR/IUD/Spiral	15,49	8,73	16,08
4	Suntik KB	52,80	38,19	42,39
5	Susuk KB	14,02	21,49	14,33
6	Pil KB	9,77	8,57	11,78
7	Kondom/Karet	0,90	2,93	4,26
8	Intravag/Kondom Wanita	-	-	-
9	Tradisional	1,40	1,04	4,30

Sumber: Kompilasi Statistik Sosial Kab Purworejo, Kominfo 2018

2.1.3.15. Perhubungan

Pada tahun 2016 terdapat sekitar 338.282 kendaraan yang masuk terminal Kabupaten Purworejo yang terdiri dari 130.427 Bus Antar Kota Antar Propinsi (AKAP), 121.206 Kopada, dan 86.649 Bus Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP). Jumlah kendaraan wajib uji pada tahun 2015 adalah 5.066 buah, tahun 2016 sejumlah 5.623 buah dan tahun 2017 sejumlah 6.388 buah. (Purworejo Dalam Angka Kabupaten Purworejo Tahun 2018).

2.1.3.16. Komunikasi dan Informasi

Cakupan Layanan *Cyber City* dan Sistem Informasi Pemerintah Daerah kabupaten Purworejo tahun 2015-2017 adalah sebagaimana berikut tabel berikut ini.

Tabel 2.46
Cakupan Layanan *Cyber City* dan Sistem Informasi Pemerintah Daerah kabupaten Purworejo tahun 2015-2017

No	Uraian	Tahun		
		2016	2017	2018
1	2	3	4	5
1	Cakupan layanan cybercity	-	100%	100%
2	Cakupan layanan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah	75%	95%	100%

Sumber :Kompilasi Statistik Sosial KabPurworejo, Kominfo 2018

2.1.3.17. Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah termasuk urusan wajib. Jumlah koperasi sampai tahun 2018 sebanyak 263 dengan rincian: Koperasi aktif 237, Koperasi tidak aktif 20, dan Koperasi beku 6. Kinerja koperasi sehat tahun 2010 sebesar 96, tahun 2011 sebesar 123 dari 125 koperasi yang dinilai, 2012 sebesar 121 dari 125 koperasi yang dinilai, Tahun 2013 sebesar 120 dari 135 koperasi yang dinilai, Tahun 2014 sebesar 125 dari 150 koperasi yang dinilai, Tahun 2015 sebesar 122 dari 150 koperasi yang dinilai kinerja tahun 2015 sampai dengan 2018 tergambar dalam tabel berikut :

Tabel 2.47 Persentase Jumlah Koperasi Sehat Kabupaten Purworejo Tahun 2015-2018

No	Uraian	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
1	Persentase jumlah koperasi sehat	81,33%	81,94%	80,66%	80,66%

Sumber : Data Dasar Pembangunan, 2018

Berdasarkan data tabel diatas menunjukkan penurunan persentase jumlah koperasi sehat, pada tahun 2016 ke tahun 2018, hal ini dikarenakan penilaian kesehatan koperasi belum bisa dinilai apabila belum melaksanakan RAT dan keterbatasan SDM untuk pembinaan koperasi. Upaya untuk meningkatkan kinerja dengan meningkatkan penyelesaian permasalahan pada koperasi yang tidak sehat.

UMKM merupakan bagian dari ekonomi kerakyatan yang pertumbuhannya di Kabupaten Purworejo belum sesuai dengan harapan dan masih perlu didorong untuk dikembangkan termasuk kualitas produk dan daya saing pasar.

2.1.3.18. Penanaman Modal

Banyaknya Penerbitan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Kabupaten Purworejo Tahun 2015 sebesar 601 buah, tahun 2016 sebanyak 299 buah dan tahun 2017 sebanyak 389 buah, artinya bahwa pada tahun 2015 jumlah investor yang masuk ke Kabupaten Purworejo sejumlah 601 investor menurun pada tahun 2016 sejumlah 299 dan meningkat menjadi 389 pada tahun 2017. Peningkatan jumlah investor dari tahun 2016 ke 2017 karena meningkatnya daya tarik dan potensi wilayah yang dikembangkan.

2.1.3.19. Kepemudaan dan Olahraga

Urusan Kepemudaan dan Olahraga termasuk bagian urusan wajib. Jumlah Organisasi, Klub, Wahana dan Kegiatan Olahraga Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2018 tergambar dalam tabel berikut:

Tabel. 2.48 Jumlah Organisasi, Klub, Wahana dan Kegiatan Olahraga Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2018

No	Uraian	Tahun		
		2016	2017	2018
1	2	3	4	5
I	Pemuda dan Olahraga			
1	Jumlah Klub Olahraga	85	85	85
2	Jumlah Gedung Olahraga	16	16	16
3	Organisasi Olahraga	1	1	1
4	Kegiatan Olahraga	12	12	12

Sumber : SIPD Kabupaten Purworejo Tahun 2018

2.1.3.20. Statistik

Persentase ketersediaan dokumen statistic adalah sebagaimana berikut:

Tabel 2.49 Ketersediaan Data Statistik Kabupaten Purworejo Tahun 2015-2018

No	Uraian	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6
1	Persentase ketersediaan data statistik sesuai dengan kebutuhan pembangunan	90%	100%	100%	100%
2	Dokumen statistik kabupaten				
	- Kabupaten dalam angka	100%	100%	100%	100%
	- PDRB Kabupaten	100%	100%	100%	100%
	- PDRB Kecamatan	100%	100%	100%	-
	- Inflasi dan Indeks Harga Konsumen	100%	100%	100%	100%
	- IPM dan Inkesra	100%	100%	100%	-
	- Nilai Tukar Petani	100%	100%	100%	100%
	- Kompilasi Statistik Ekonomi	-	-	-	100%
	- Kompilasi Statistik Sosial	-	-	-	100%
	- Kompilasi Statistik Sektoral	-	-	-	100%

Sumber data : BPS, Kominfo dan Bappeda Kab Purworejo, 2018

Penyediaan data statistik sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Penyelenggaraan pengembangan statistik (kerjasama, dukungan penyelenggaraan statistik dasar, koordinasi statistik antar sektoral, dan jejaring statistik khusus) dengan lembaga/instansi statistik dalam Pengembangan data/ informasi/statistik daerah.

2.1.3.21. Persandian

Capaian kinerja urusan persandian sampai dengan tahun 2018 adalah meliputi pelayanan penerimaan dan penyampaian berita sandi dari pusat dan propinsi. Pengelola persandian juga saat ini memberikan pelayanan telekomunikasi berita telepon/fax antar perangkat daerah di Kabupaten Purworejo, melayani sejumlah 42 perangkat daerah.

Tabel. 2.50
Capaian Kinerja Urusan Persandian Tahun 2015-2018

No	Uraian	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6
1.	Persentase layanan persandian	100%	100%	100%	100%

Sumber : Data Dasar Pembangunan, 2018

Memperhatikan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan urusan persandian meliputi penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah kabupaten dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah kabupaten.

2.1.3.22. Kebudayaan

Urusan Kebudayaan termasuk bagian urusan wajib. Jumlah Seni dan Budaya, serta Cagar Budaya Yang Dilestraikan Kabupaten Purworejo Tahun 2015-2018 tergambar dalam tabel berikut:

Tabel. 2.51 Jumlah Seni dan Budaya, serta Cagar Budaya Yang Dilestraikan Kabupaten Purworejo Tahun 2015-2018

No	Uraian	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6
I	Seni dan Kebudayaan				
1	Jumlah Group Kesenian	800	584	584	649
2	Jumlah Gedung Kesenian	1	1	1	1
3	Museum	1	1	1	1
4	Pusat Kebudayaan	0	0	0	0
5	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	70	54	70	0
II	Cagar Budaya Yang Dilestarikan				
1	Benda Cagar Budaya	193	198	198	1291
2	Bangunan Cagar Budaya	120	120	120	88
3	Situs Cagar Budaya		2	2	13
4	Kawasan Cagar Budaya	3	3	3	3

Sumber : SIPD Kabupaten Purworejo Tahun 2018

2.1.3.23. Perpustakaan

Pada tahun 2017 terdapat 595 perpustakaan yang sebagian besar merupakan perpustakaan sekolah sebanyak 91,66 persen, 6,06 persen Perpustakaan Desa/Kelurahan, selebihnya sekitar 2,28 persen merupakan Perpustakaan Lainnya termasuk Perpustakaan Daerah.

Pada tahun 2017 tercatat sebanyak 205.921 pengunjung di Perpustakaan Daerah yang memiliki 38.920 koleksi buku dan 29.762 judul buku. Pada tahun 2018 terjadi peningkatan jumlah masyarakat yang berkunjung ke perpustakaan daerah 239.702 pengunjung, dengan 39.117 koleksi buku.

Tabel 2.52
Pencapaian Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2015-2017

No	Uraian	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah masyarakat yang berkunjung ke perpustakaan daerah	29.317	15.249	205.921	239.702
3	Jumlah koleksi bahan pustaka	37.670	38.845	38.920	39.117

No	Uraian	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6
4	Jumlah perpustakaan	630	743	595	702

Sumber : Purworejo Dalam Angka Tahun 2018 dan Dinarpusda, 2018

2.1.3.24. Kearsipan

Persentase tertib administrasi kearsipan lembaga pemerintah meningkat setiap tahunnya sebagaimana berikut :

Tabel 2.53 Persentase Tertib Administrasi Kearsipan Lembaga Pemerintah Tahun 2015-2018

No	Uraian	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6
1	Persentase tertib kearsipan lembaga pemerintah daerah	58%	64%	70%	75%

Sumber : Data Dasar Kabupaten Purworejo, 2018

2.1.3.25. Kelautan dan Perikanan

Produksi budidaya ikan di kabupaten Purworejo tahun 2018 mengalami peningkatan dari 978,202 ton menjadi 1.007,71 ton. Produksi pembenihan ikan juga mengalami peningkatan dari 33.668.035 ekor menjadi 35.668.035 ekor. Data kelautan dan perikanan tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 2.54 Potensi Kelautan dan Perikanan Kabupaten Purworejo

NO	URAIAN	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	DATA UMUM PERIKANAN BUDIDAYA					
	a. Potensi					
	- Pembesaran (Ha)	325	325	325	325	325
	- Pembenihan (Ha)	78	78	78	78	78
	- Tambak (Ha)	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210
	b. Pemanfaatan					
	- Pembesaran (Ha)	188.80	188.98	174.88	174.88	175.41
	- Pembenihan (Ha)	15.70	15.73	11.01	11.01	11.24
	- Tambak (Ha)	186.70	190.31	197.74	197.74	202.84
	c. Rumah Tangga Perikanan (RTP)					
	- Pembesaran	14,868	14,678	14,678	14,678	14,890
	- Pembenihan	372	372	224	224	229
	- Tambak	944	950	611	611	624
	- Jumlah Pokdakan	belum ada	belum ada	belum ada	523	523

NO	URAIAN	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		data	data	data		
2	PERIKANAN BUDIDAYA KOLAM					
	a. Produksi Total (Kg)	778,690	939,396	954,876	978,202	1,007,716
	b. Nilai Produksi (Rp. 1.000)	12,431,346	18,060,295	19,601,507	19,753,361	22,461,894
3	PERIKANAN BUDIDAYA TAMBAK					
	a. Produksi (Kg)	2,899,240	2,982,276	2,928,081	3,029,678	3,121,561
	b. Nilai Produksi (Rp. 1.000)	163,410,360	154,672,809	144,067,283	180,075,086	169,319,900
4	BUDIDAYA PEMBENIHAN					
	a. Produksi (Ekor)	29,456,000	33,108,922	33,952,926	35,075,108	35,668,034
	b. Nilai Produksi (Rp. 1.000)	5,408,427	6,497,581	7,484,435	7,604,365	9,628,266
5	PERIKANAN TANGKAP					
	a. Potensi (Kg)					
	- Pantai Purworejo	868.80	868.80	868.80	868.80	868.80
	- Lepas Pantai Purworejo	838.95	838.95	838.95	838.95	838.95
	b. Sarana Perikanan Tangkap					
	- Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	5	5	5	5	5
	- Jumlah Nelayan (Orang)	648	668	776	776	776
	- Jumlah Armada (Unit)	155	155	127	137	153
	- Jumlah KUB	62	64	69	70	70
	c. Produksi (Kg)	52,685.09	54,131.20	52,400.60	40,472.00	65,843.60
	b. Nilai Produksi (Rp. 1.000)	2,171,646	2,165,248	3,144,036	3,237,760	5,267,488

Sumber : DPPKP, 2018

2.1.3.26. Pariwisata

Objek wisata komersial di Kabupaten Purworejo antara lain Kolam Renang Artha Tirta, Museum Tosan Aji, Geger Menjangan, Goa Seplawan, dan Pantai Jatimalang. Data kunjungan wisata tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel 2.55 Kunjungan Wisata di Kabupaten Purworejo

Wisatawan	Tahun			
	2014	2015	2016	2017
Nusantara	124,504	478,176	855,964	1,292,217
Mancanegara	0	0	38	18

Sumber : SIPD, 2018

Kunjungan wisata terjadi peningkatan yang signifikan, hal ini karena peningkatan infrastruktur, sarana dan prasarana serta promosi pariwisata.

2.1.3.27. Pertanian

Urusan pertanian merupakan salah satu urusan pilihan dengan kinerja tahun 2015 sampai dengan 2018 adalah sebagaimana berikut :

Tabel 2.56
Pencapaian Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2015-2018

No	Uraian	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah produksi padi (ton)	343.401	335.469	310.653	400.845
2	Jumlah produksi jagung (ton)	11.315	18.685	22.176	18.290,73
3	Jumlah produksi kedelai (ton)	2.249	105	1.532	2.074,73
4	Jumlah populasi ternak besar (ekor)	16.298	16.288	21.103	22.760
5	Jumlah populasi ternak kecil (ekor)	253.690	252.546	130.179	283.163

Sumber :SIPD Kabupaten Purworejo, 2018

Produksi padi, jagung dan kedelai terjadi fluktuatif. Penurunan produksi padi dari tahun 2016 ke 2017 ini terjadi karena beberapa faktor diantaranya serangan hama wereng dan tikus serta bencana alam banjir yang melanda kecamatan Ngombol, Kaligesing, Kutoarjo dan Butuh seluas 92 ha. Namun pada tahun 2018 produksi padi meningkat hal ini dikarenakan serangan hama menurun, pada tahun 2018 lebih banyak bulan basah sehingga produksi padi meningkat.Sedangkan untuk penurunan komoditas yang lainnya salah satunya disebabkan pada tahun 2014 tercatat pada Badan Pertanahan Nasional seluas 5,82 ha sawah beralih status ke perumahan. Data ini belum termasuk alih fungsi lahan yang tidak mengajukan ijin.

2.1.3.28. Perdagangan

Urusan perdagangan merupakan salah satu urusan pilihan. Kinerja tahun 2015 sampai dengan 2018 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.57
Pencapaian Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2015-2017

No	Uraian	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Jumlah pasar dalam kondisi baik	37%	45%	74%	100%
2	Cakupan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan daerah	100%	100%	100%	100%
3	Cakupan jenis komoditas yang dipromosikan	100%	100%	100%	100%
4	Persentase rata-rata pertumbuhan PDRB	1,19%	1,69%	5,17%	5.17%

Sumber : *Kompilasi Statistik Ekonomidan Data Dasar Pembangunan, 2018*

Persentase pasar dalam kondisi baik 100% mengalami peningkatan dari tahun 2017 yang masih pada kisaran 74%. Hal ini karena pelaksanaan kegiatan revitalisasi/rehabilitasi pasar daerah.

Selama 3 tahun terakhir, jumlah pasar secara keseluruhan di Kabupaten Purworejo terus mengalami peningkatan dari sejumlah 64 pasar pada tahun 2015 meningkat 9,38 persen pada tahun 2016 menjadi 70 pasar. Peningkatan ini disebabkan karena adanya penambahan 6 pasar swalayan padatahun 2016. Pada tahun 2017 jumlah pasar tidak bertambah.

2.1.3.29. Perindustrian

Urusan industri merupakan salah satu urusan pilihan. Kinerja tahun 2015 sampai dengan 2018 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.58
Pencapaian Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2015-2018

No	Uraian	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah KUB yang dibina	72	93	100	114
2	Persentase industri kecil dan menengah yang dibina sistem pengelolaannya	6,52%	8,72%	10,52%	12,60%

Sumber : *Data Dasar Pembangunan, 2018*

Industri di Kabupaten Purworejo perlu didorong pengembangannya dari industri kecil ke industri menengah serta lebih difokuskan pada sub sistem agribisnis hilir.

2.1.3.30. Transmigrasi

Transmigrasi di Kabupaten Purworejo diutamakan bagi keluarga produktif yang miskin. Sesuai Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 maka Kabupaten Purworejo hanya menyelenggarakan layanan informasi dan fasilitasi penyelenggaraan transmigrasi.

2.1.3.31. Fungsi Penunjang Urusan Dukungan Fungsi DPRD

Fungsi DPRD meliputi fungsi legislasi, fungsi pengawasan, fungsi *budgeting*. Sampai dengan tahun 2018 dukungan fungsi DPRD adalah untuk menjamin 3 (tiga) fungsi tersebut tepat waktu tercapai 100%. Jumlah anggota DPRD masa bakti 2014-2019 adalah 45 orang, dengan komposisi 6 orang wanita dan 39 pria.

2.1.3.32. Fungsi Penunjang Urusan Pembinaan Dan Pengawasan

Bahwa untuk membantu Bupati di bidang Pembinaan dan Pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dibentuk Inspektorat. Untuk mengetahui tingkat kematangan penyelenggaraan sistem pengendalian internal pemerintah, menggunakan ukuran tingkat maturitas yang didalamnya meliputi lima (5) unsur yaitu :

- a) Lingkungan pengendalian
- b) Penilaian resiko
- c) Aktivitas pengendalian
- d) Informasi dan komunikasi
- e) Pemantauan pengendalian internal

Tingkat maturitas Kabupaten Purworejo sampai dengan Tahun 2018 berada pada level 3,023.

2.1.3.33. Fungsi Penunjang Urusan Perencanaan

Fungsi penunjang perencanaan dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, mencakup perencanaan dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan.

Tabel 2.59
Cakupan Optimalisasi Sistem Perencanaan
Pembangunan Daerah Tahun 2015-2018

No	Uraian	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6
1.	Cakupan Optimalisasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	80,00%	85,00%	88,53%	100%

Sumber : Data Dasar Pembangunan Kabupaten Purworejo, 2018

Ketersediaan dokumen perencanaan sesuai ketentuan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.60
Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Kabupaten Purworejo

No.	Jenis Dokumen	Tersedia/ Tidak Tersedia	Nama Dokumen
1	RPJPD	Tersedia	Perda No.3 Tahun 2010
2	RPJMD	Tersedia	Perda No.12 Tahun 2016
3	RKPD	Tersedia	Perbup No. 16.1 Tahun 2014 tentang RKPD Kab.Purworejo Tahun 2015
4	RKPD	Tersedia	Perbup No.9 Tahun 2015 tentang RKPD Kab.Purworejo Tahun 2016
5	RKPD	Tersedia	Perbup No.19 Tahun 2016 tentang RKPD Kab.Purworejo Tahun 2017
6	RKPD	Tersedia	Perbup No.42 Tahun 2017 tentang RKPD Kab.Purworejo Tahun 2018
7	RKPD	Tersedia	Perbup No. 42 Tahun 2018 tentang RKPD Kabupaten Tahun 2019

Sumber data: Bappeda Kabupaten Purworejo, 2018

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik perlu didukung dengan perencanaan yang akuntabel dan tepat waktu. Hal tersebut mencakup dua (2) hal yaitu ditingkat Daerah dan di tingkat Perangkat Daerah, ketepatan waktu penyusunan perencanaan ditingkat Kabupaten dan ketepatan waktu penyusunan perencanaan di tingkat Perangkat Daerah.

2.1.3.34. Fungsi Penunjang Penelitian Dan Pengembangan

Fungsi penunjang penelitian dan pengembangan ditunjang oleh Sistem Inovasi Daerah (SIDa). Sampai dengan tahun 2018 pencapaian SIDa pada tahap penguatan kelembagaan yang diharapkan dapat mendorong berkembangnya inovasi di masyarakat maupun di perangkat daerah. Lomba kreativitas dan inovasi (Krenova) untuk menggali RKPD Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020

keaktivitas dan inovasi masyarakat yang dapat diterapkan di daerah guna peningkatan pendapatan masyarakat.

Tabel 2.61
Sistem Informasi Daerah

No	OPD	Integrasi Sistem Informasi		
		Nama Sistem Informasi	Uraian Integrasi	Pengembang/ Developer
1	Din PMPTSP	1. SI IDA dengan SIAK (Dukcapil)	Konfirmasi data kependudukan pemohon perizinan	PT Liso Data
		2. SI IDA dengan SIMTARU (DPUPR)	Mempermudah dalam mengolah izin terkait tata ruang	PT Liso Data
		3. SI IDA dengan KSWP (Pajak Pratama)	Konfirmasi kewajiban pembayaran pajak pemohon perizinan	PT Liso Data
2	Din Arpus	SIKD (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis)	Dengan Program aplikasi kominfo	
3	Dinas Kependudukan Catatan Sipil	1. Data Ware House	Untuk melayani pemanfaatan data dari instansi pengguna	Kemendagri
		2. SIAK Konsolidasi	Mengetahui data E-KTP untuk tiap-tiap NIK	Kemendagri
		3. Pencarian NIK Duplicate	Pencarian NIK Duplicate	Kemendagri
4	Dinas PUPR	1. SIRIJKI	Integrasi dengan SIIDA di Dinas PMPTSP	Swakelola
		2. SITARJO	Integrasi dengan SIIDA di Dinas PMPTSP	CV. Tunas
5	Rumah Sakit Umum Daerah	1. Integrasi BPJS	Pembuatan Surat Elegibilitas Pasien, cek Keaktifan peserta BPJS	Mandiri

Tabel 2.62
Lomba Kreativitas dan Inovasi (Krenova)

No	2016			2017			2018		
	Judul Inovasi	Hasil Inovasi	Pemenang	Judul Inovasi	Hasil Inovasi	Pemenang	Judul Inovasi	Hasil Inovasi	Pemenang
1	SIHEGI	Lampu Hemat Enaegi	Juara Utama Provinsi	BRIKET KOKAWA	Briket dari Kotoran Kambing dengan Pemanasan lebih dari 5000 PPM	Juara Utama Provinsi	SMART HELM	Helm anti Begal	Juara Kabupaten

2	KOMPOR HYBRIED	Kompore dengan 3 bahan bakar	Juara II Kabupaten	SIRA	Alat pengontrol Air dalam tanah dengan Aplikasi WEB	Juara Kabupaten	LEARNCY	Game Pendidikan dengan Android	Juara Provinsi
3	MESIN GULA SEMUT	Alat pengolah gula jawa menjadi gula semut	Juara I Kabupaten	INCUMO	Kartu Pendidikan untuk anak - anak Sekolah Dasar	Juara II Kabupaten	SEBERKAS CAHAYA DARI LIMBAH		Juara II Kabupaten

2.1.3.35. Fungsi Penunjang Urusan Keuangan

Tabel 2.63
Kinerja Keuangan Daerah Dari Tahun 2015-2018

No	Uraian	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6
1	Persentase tertib administrasi keuangan daerah dengan opini hasil audit BPK	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Waktu Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu

Sumber Data: BPPKAD Kabupaten Purworejo Tahun 2018

Adapun target dan realisasi makro capaian pendapatan asli daerah tahun 2015 sampai 2018, sebagaimana tabel berikut ini (dalam milyar rupiah).

Tabel 2.64
Target dan Realisasi PAD dari Tahun 2015-2018

No	Tahun	Target	Realisasi
1	2	3	4
1	2015	199,690	223,934
2	2016	201,409	255,460
3	2017	237,664	298,606
4	2018	278,952	286,969

Sumber Data: BPPKAD Kabupaten Purworejo Tahun 2015-2018

Peningkatan PAD secara signifikan semula pada tahun 2015 sebesar Rp223,934,000,000.00 menjadi Rp298,606,000,000.00 pada tahun 2017, pada tahun 2018 terjadi penurunan menjadi Rp286,969,000,000.00. Penurunan ini karena terjadi penurunan pada pendapatan rumah sakit daerah, retribusi parkir dan objek wisata. Nilai penyumbang PAD nampak pada tabel berikut.

Tabel 2.65
Komponen PAD dari Tahun 2015-2018
(dalam milyar rupiah)

No	Uraian	Tahun			
	Komponen	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan Pajak Daerah	38,016	42,380	53,417	68,815
2	Hasil Retribusi Daerah	16,713	10,662	11,731	12,868
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5,747	6,380	22,586	10,259
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	173,456	196,037	210,872	195,027
	Jumlah	233,934	255,460	298,606	286,969

Sumber Data: BPPKAD Kabupaten Purworejo Tahun 2015-2018

- a) Persentase tertib administrasi keuangan daerah dengan opini hasil audit BPK

Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Opini Wajar tanpa pengecualian (biasa disingkat WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

- b) Waktu Penetapan APBD

Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 bahwa Penetapan Perda tentang APBD dan Peraturan Kepala daerah tentang penjabaran APBD dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember Tahun anggaran sebelumnya. Penetapan APBD pada awal tahun perencanaan tidak tepat waktu, yang selanjutnya ditargetkan tepat waktu setiap tahunnya. Pada Tahun ke empat RPJMD target tersebut telah dicapai dimana realisasi penetapan APBD nampak pada tabel berikut.

Tabel 2.66
Ketepatan Waktu Penetapan APBD dari Tahun 2015-2019

Tahun	Waktu Penetapan	Realisasi
1	2	3
2015	30 Desember 2014	tepat waktu
2016	30 Desember 2015	tepat waktu
2017	22 Desember 2016	tepat waktu
2018	27 Desember 2017	tepat waktu
2019	21 Desember 2018	tepat waktu

Sumber Data: BPPKAD Kab Purworejo Tahun 2014-2018

2.1.3.36. Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian Serta Diklat

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo pada tahun 2016 sebanyak 9.245 orang yang terdiri dari 50,92 persen pegawai laki-laki dan 49,08 persen pegawai perempuan. Dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan pegawai berturut-turut adalah 1,00 persen tamat SD, 2,98 persen tamat SMP, 23,30 persen tamat SMA, 16 persen tamat Diploma, dan 56,72 persen Sarjana.

Tabel 2.67
Kondisi Bidang Kepegawaian Tahun 2015-2018

No.	Uraian	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah Pegawai				
	PNS Pria	5.487	4.708	4.395	3.971
	PNS wanita	5.086	4.537	4.471	4.259
2	Komposisi pegawai				
	Jabatan Struktural	873	801	810	735
	Jabatan Fungsional	6.448	5.458	5.272	5.296
	Pelaksana (F Umum)	3.252	2.986	2.784	2.199
3	Berdasarkan Golongan				
	Golongan I	205	171	146	112
	Golongan II	1.817	1.625	1.601	1.349
	Golongan III	4.422	4.018	3.916	3.845
	Golongan IV	4.129	3.431	3.203	2.924
5	Berdasar Usia				
	Usia < 20 Tahun	-	-	-	-
	Usia 21-30 Tahun	349	235	177	96
	usia 31-40 Tahun	1.637	1.459	1.443	1.368
	Usia 41-50 tahun	3.653	2.941	2.580	2.242
	Usia 51-60 tahun	4.934	4.610	4.666	4.523
6	Berdasarkan Eselon				
	Eselon II	25	25	29	29
	Eselon III	135	125	136	139
	Eselon IV	660	614	608	532

No.	Uraian	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
	Eselon V	53	37	37	35
7	Berdasar jenis Jabatan Fungsional				
	Rumpun Pendidikan	5.447	4.466	4.216	4.169
	Rumpun Kesehatan	754	761	772	888
	Rumpun Teknis	247	231	284	241

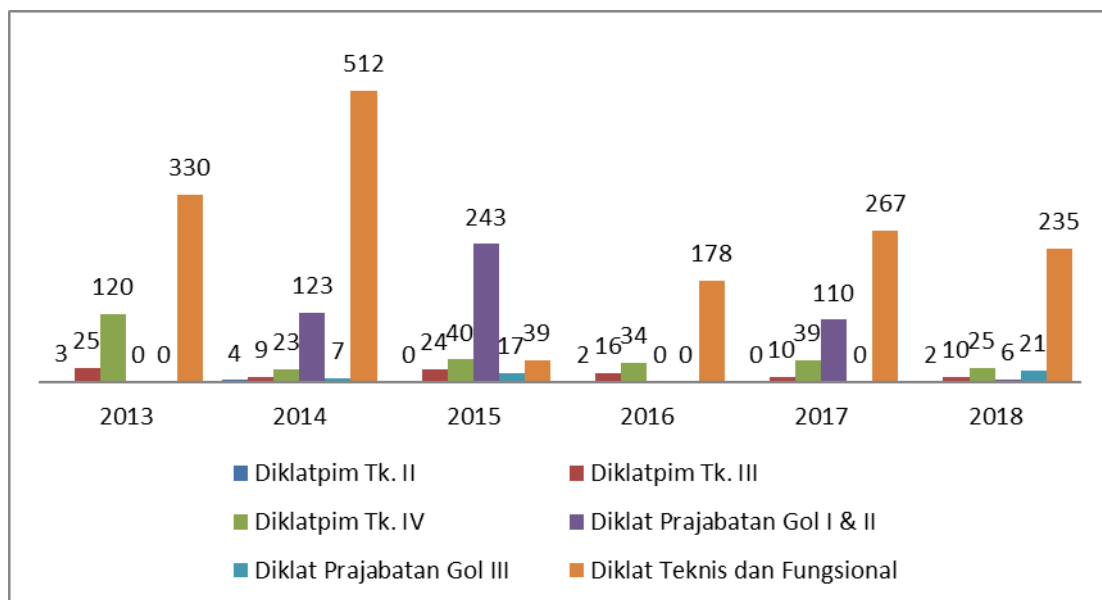
Sumber : BKD Kabupaten Purworejo, Tahun 2018

Berkaitan dengan ketercapaian kinerja selama tahun 2015-2018 dijelaskan sebagai berikut:

- a) Rasio pegawai dengan kompetensi teknis dan mental yang handal (produktif, profesional, dan proporsional serta efektif dan efisien dalam pelayanan publik dan persentase kompetensi pegawai sesuai dengan bidang tugasnya).
- b) Persentase aparatur pemerintah yang mengikuti pendidikan dan pelatihan peningkatan SDM

Indikator kinerja ini dihitung berdasarkan jumlah aparatur pemerintahan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan peningkatan SDM (Diklatpim Tingkat II,III,IV) dibandingkan dengan jumlah aparatur yang wajib mengikuti Diklatpim Tingkat II, III, IV. Adapun Persentase aparatur pemerintah yang mengikuti pendidikan dan pelatihan peningkatan SDM tahun tahun 2015 sebesar 91,27% dan tahun 2018 sebesar 78,23%.Penurunan ini disebabkan adanya promosi jabatan sehingga bertambahnya pejabat yang belum mengikuti diklat sesuai eselonnya.

Pelaksanaan Diklatpim II, III, IV diselenggarakan di beberapa lembaga diklat seperti Badan diklat provinsi Jawa Tengah dan Pusdiklat regional Yogyakarta. Untuk CPNS yang wajib mengikuti diklat prajabatan diselenggarakan secara mandiri. Data pelaksanaan diklatpim, prajabatan, teknis dan fungsional tersaji pada grafik berikut ini:



Gambar 2.18
Data PNS yang Mengikuti Diklatpim, Prajabatan, Teknis dan Fungsional
Sumber : BKD Kabupaten Purworejo, Tahun 2018.

Tabel 2.68
Tingkat Pendidikan PNS Kabupaten Purworejo
Tahun 2015-2018

No.	Uraian	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6
A	Berdasar Pendidikan				
1	SD	106	93	78	67
2	SMP	323	276	218	183
3	SMA/D1	2.427	2.152	1.942	1.697
4	D2	861	659	449	324
5	D3	923	822	913	839
6	D4/S1	5.156	4.546	4.534	4.316
7	S2	775	695	731	803
8	S3	2	2	1	1

Sumber BKD Kabupaten Purworejo, 2018

2.1.3.37. Fungsi Penunjang Urusan Penyusunan Kebijakan, Koordinasi Dan Pelayanan Administratif

Untuk melaksanakan Fungsi Penunjang Perumusan Kebijakan, Koordinasi dan Pelayanan Administratif dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah. Bentuk perumusan kebijakan berupa diantaranya berupa, penerbitan produk hukum. Pencapaian kinerja bidang hukum Kabupaten Purworejo Tahun 2015-2018 sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.69
Kinerja Bidang Hukum Kabupaten Purworejo Tahun 2015-2018

No	Uraian	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6
1	Tingkat ketersediaan produk-produk hukum daerah sebagai landasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	100%	100%	100%	100%

Dari data diatas terlihat bahwa, Persentase ketersediaan produk-produk hukum daerah sebagai landasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan kondisi baik mampu mencapai 100%,

Capaian ketersediaan produk hukum daerah didukung oleh ketersediaan Sumber Daya Manusia berupa:

- a) Tim Penerbit Produk-produk hukum Daerah;
- b) Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah;
- c) Tim Asistensi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
- d) Perancang Peraturan Perundang-undangan Daerah.

Fungsi Penyusunan Kebijakan, Koordinasi dan Pelayanan Administratif dilakukan oleh Sekretariat Daerah mencakup empat puluh dua perangkat daerah lembaga teknis,dinas daerah, Sekretariat daerah, sekretariat DPRD dan Kecamatan.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kinerja pencapaian aspek daya saing daerah Kabupaten Purworejo sampai dengan akhir tahun 2018 dapat ditinjau dari beberapa hal yang dapat memacu pergerakan semua sektor pelayanan dasar maupun sektor produktif terkait aksesibilitasnya serta merupakan kewenangan daerah, didukung beberapa tolok ukur lain terkait ketentraman ketertiban masyarakat yang mendukung menciptakan stabilitas daerah sehingga kegiatan-kegiatan pelayanan dan produksi daerah dapat berjalan dengan lancar. Capaian dari beberapa tolok ukur tersebut adalah sebagaimana tampak dalam tabel berikut ini:

a. Nilai Tukar Petani

Salah satu keberhasilan pembangunan di sektor pertanian adalah terjaminnya tingkat harga produsen hasil-hasil pertanian dan harga barang dan jasa kebutuhan usaha dan rumah tangga petani di

pedesaan. Nilai Tukar Petani adalah salah satu indikator yang dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan petani. Indikator ini merupakan perbandingan antara harga yang diterima petani atas barang-barang hasil produksi pertaniannya dengan harga yang dibayar petani atas pengeluaran konsumsi untuk kehidupan sehari-hari petani.

Tabel 2.70
Perkembangan Nilai Tukar Petani Kabupaten Purworejo
Tahun 2015-2018

No.	Bulan	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6
1	Januari	102,25	107,17	108,37	103,01
2	Februari	101,34	107,63	105,94	102,36
3	Maret	100,28	107,38	101,95	101,41
4	April	99,02	102,51	100,1	100,40
5	Mei	99,94	99,74	100,54	99,95
6	Juni	99,44	99,36	100,58	100,33
7	Juli	101,73	100,75	102,29	99,43
8	Agustus	104,99	100,97	103,09	98,99
9	September	103,83	99,93	104,34	100,33
10	Oktober	101,81	102,22	104,85	100,18
11	November	105,41	107,58	106,05	100,28
12	Desember	106,59	107,76	105,28	101,30
	<i>Rata-Rata</i>	102,22	103,58	103,62	100,66

Sumber : Bappeda, 2018.

Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Purworejo mengalami penurunan pada tahun 2018 dibandingkan tahun 2017. Perkembangan NTP dari tahun 2015 yaitu sebesar 102,22 %. Pada tahun 2016 **naik** (1,36%) menjadi 103,5% dibandingkan tahun 2015. Pada tahun 2017 **naik** (0,04%) menjadi 103,62% dibandingkan tahun 2016. Pada tahun 2018 **turun** (2,54%) menjadi 100,66% dibandingkan tahun 2018.

NTP diatas menunjukkan di tahun 2018 mengalami penurunan tajam, bahkan lebih rendah dibandingkan data kondisi awal tahun 2015. Kondisi ini menunjukkan secara umum penurunan tingkat kesejahteraan petani di Kabupaten Purworejo.

Tabel 2.71
Perkembangan Nilai Tukar Petani Tahun 2017
Berdasar Bulan dan Sub Sektor Pertanian

No	Bulan	Tanaman Pangan	Horti Kultura	TPR	Peter nakan	Per ikanan	Umum
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jan	105,15	98,50	111,57	97,02	103,13	103,01
2	Feb	105,70	98,12	109,31	97,16	97,16	102,36
3	Mar	99,38	100,62	109,15	96,99	98,57	101,41
4	April	95,18	101,94	107,48	97,24	99,38	100,40
5	Mei	95,26	100,92	105,61	98,39	97,84	99,95
6	Juni	96,02	102,61	104,75	98,40	97,35	100,33
7	Juli	96,65	99,52	102,05	99,63	98,79	99,43
8	Agust	97,20	98,11	102,07	98,39	101,05	98,99
9	Sept	98,41	99,08	102,56	101,35	100,14	100,33
10	Okt	100,73	100,23	99,45	99,97	102,81	100,18
11	Nov	105,91	99,15	98,14	98,32	102,83	100,28
12	Des	106,08	101,89	97,31	99,78	101,91	101,30

Sumber : Nilai Tukar Petani, BPS, Tahun 2018

Nilai NTP sub sektor tiap-tiap bulannya dari tabel 2.67 dapat dicermati sebagai berikut :

Tabel 2.72
Ringkasan Perkembangan Nilai Tukar Petani Tahun 2018
Berdasar Bulan Per Sub Sektor Pertanian

Sub sektor	NTP > 100	NTP < 100
TPR	9 bulan	3 bulan
Hortikultura	6 bulan	6 bulan
Perikanan	6 bulan	6 bulan
Tanaman Pangan	5 bulan	7 bulan
Peternakan	1 bulan	11 bulan

Secara umum Penurunan NTP di bawah 100 disebabkan karena Nilai Yang diterima petani akan produknya mengalami penurunan harga, sedangkan di sisi lain biaya sarana produksi cenderung mengalami peningkatan harga, sedangkan kondisi konsumsi rumah tangga petani rata-rata stabil setiap bulannya.

b. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purworejo tahun 2017 yang ditunjukkan oleh laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2010, lebih tinggi dari tahun sebelumnya, yaitu 5,14 persen (2016 = 5,12 persen). Pertumbuhan riil sektoral tahun 2017 mengalami fluktuasi dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh sektor informasi dan komunikasi

sebesar 13,54 persen, namun peranannya terhadap PDRB sebesar 4,90 persen. Sektor yang mengalami pertumbuhan paling rendah pada tahun 2017 adalah sektor pertanian , kehutanan dan perikanan, yaitu sebesar 1,43 persen.

Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan masih memberikan sumbangan tertinggi terhadap ekonomi Kabupaten Purworejo yaitu sebesar 24,22 persen, dengan laju pertumbuhan sebesar 1,43 persen. Dari angka-angka indeks harga implisit PDRB dapat diketahui kenaikan harga dari waktu ke waktu baik secara agregat maupun secara sektoral. Secara agregat indeks implisit di Kabupaten Purworejo tahun 2017 sebesar 134. Sedangkan secara sektoral, pertumbuhan indeks implisit yang paling cepat atau di atas angka rata-rata indeks implisit Kabupaten Purworejo tahun 2017 terjadi pada sektor Pertambangan dan Penggalian 152,89 persen.

2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Data kondisi fasilitas wilayah/ infrastruktur Kabupaten Purworejo Tahun 2015-2018, sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.73

Kondisi Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Kabupaten Purworejo Tahun 2015-2018

No	Uraian	Tahun		
		2016	2017	2018
1	2	3	4	5
1	Jalan Kondisi Baik-Sedang(Km)	432,67	555,44	588,15
2	Jalan Kondisi Rusak (Km)	245,23	111,21	95,5
3	Jalan Kondisi Rusak Berat (Km)	91,35	102,5	85,6
4	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten	52%	52%	52%
	a. Jumlah jaringan jalan yang telah terlayani angkutan umum	120	120	120
	b. Jumlah jaringan jalan yang seharusnya dilayani angkutan umum	229	229	229

Sumber data : Data Dasar Pembangunan Daerah 2015-2018

2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Iklim berinvestasi yang kondusif dalam perekonomian merupakan harapan bagi masyarakat, investor, pelaku usaha dan pemerintah. Penciptaan iklim investasi yang kondusif tidak hanya berdasarkan faktor ekonomi saja namun faktor non ekonomi salah

satunya tingkat kriminalitas dalam masyarakat. Tingkat kriminalitas di Kabupaten Purworejo rata-rata menurun. Keadaan ini mendukung iklim investasi yang kondusif. Tabel berikut menyajikan tingkat kriminalitas di Kabupaten Purworejo tahun 2014-2017.

Tabel 2.74
Tingkat kriminalitas di Kabupaten Purworejo Tahun 2017

No	Uraian	Tahun			
		2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6
1	Pembunuhan	3	-	-	1
2	Penganiyaan berat		2	1	2
3	Penganiyaan ringan	20	12	7	17
4	Pencurian berat	66	66	46	35
5	Pencurian dengan kekerasan	6	11	8	4
6	Pencurian kendaraan bermotor	43	37	24	19
7	Pencurian biasa	17	21	12	14
8	Penipuan	30	29	10	15
9	Penggelapan	20	28	10	14
10	Kebakaran/Pembakaran	-	3	-	7
11	Narkotika		3	9	6
12	Pemalsuan uang	2	2	-	0
13	Pemalsuan surat/materai	5	9	-	0
14	Penadahan	1	6	-	0
15	Penculikan	-	-	-	0
16	Perkosaan	-	1		0
17	Perjudian	-	27	30	21
18	Pengrusakan	6	3	1	2
19	Pengeroyokan	7	1	3	2
20	Perbuatan cabul	27	11	4	16
21	KDRT	12	7	5	4
22	Pemerasan	-	-	-	2

Sumber data : DDA Kabupaten Purworejo Tahun 2018

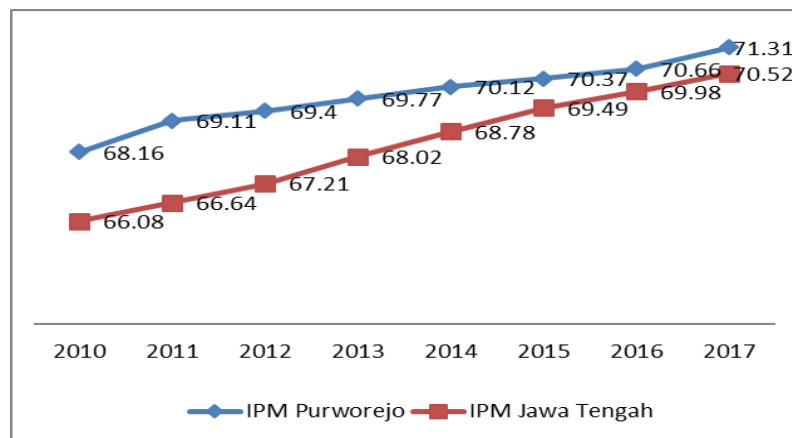
2.1.4.4. Fokus Sumber Daya manusia

a. Kualitas Pembangunan Manusia

Salah satu ukuran kualitas yang dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana kualitas pembangunan manusia yang telah berhasil dicapai adalah dengan *Human Development Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, yaitu Angka Usia Harapan Hidup (AHH) untuk mengukur peluang hidup. Sedangkan rata-rata lama sekolah dan

angka harapan lama sekolah merupakan dimensi pokok yang menunjukkan status tingkat pendidikan. Pengeluaran riil per kapita guna mengukur akses terhadap sumberdaya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak.

Pembangunan manusia di Kabupaten Purworejo selama kurun waktu 2010-2017 memperlihatkan peningkatan. Hal ini ditunjukkan oleh capaian angka IPM selama kurun waktu tersebut, yaitu mencapai 68,16 pada tahun 2010, meningkat menjadi 69,40 pada tahun 2012, kembali meningkat menjadi 70,12 pada tahun 2014, dan terus meningkat menjadi 71,31 pada tahun 2017. Dengan demikian, dalam kurun waktu tujuh tahun telah terjadi kenaikan IPM hingga 3.15 poin. Peningkatan IPM tersebut telah membawa perubahan status pembangunan manusia di kabupaten Purworejo dari kelompok “sedang” menjadi “tinggi”. Perubahan status ini mulai tercapai sejak tahun 2014.



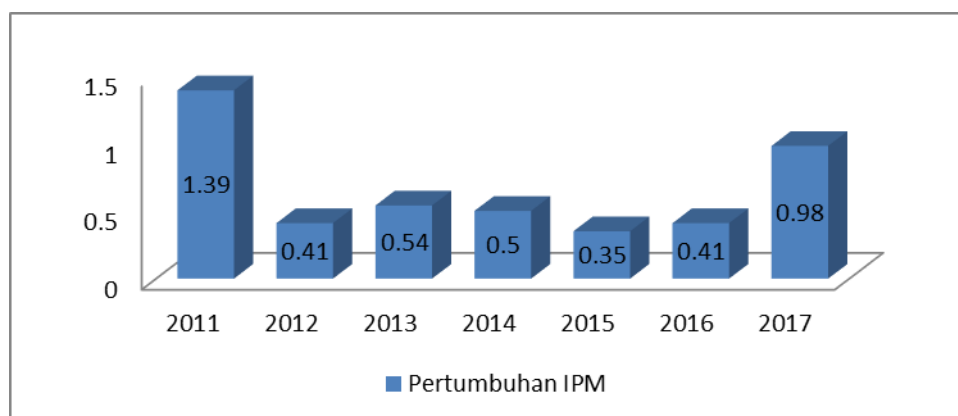
Gambar 2.19 Perkembangan IPM Kabupaten Purworejo dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2017

Sumber data: *Kompilasi Statistik Sosial Kabupaten Purworejo, 2018*

Peningkatan nilai IPM kabupaten Purworejo tersebut tidak diikuti oleh peningkatan peringkat IPM kabupaten Purworejo. IPM Kabupaten Purworejo berada pada peringkat 14 dari seluruh 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah, diantara 29 Kabupaten se Jawa Tengah nilai IPM Kabupaten Purworejo tahun 2017 ada pada peringkat 8 teratas.

Pertumbuhan IPM Kabupaten Purworejo selama tahun 2011-2017 relatif stabil, yaitu pada kisaran 0,35 sampai 1,39 persen. Pertumbuhan IPM tertinggi selama kurun waktu itu dicapai pada

tahun 2011 sebesar 1,39 persen dengan peningkatan IPM sebesar 0,95 poin dibanding tahun 2010. Kecenderungan penurunan angka pertumbuhan IPM yang diiringi peningkatan angka IPM memberikan indikasi adanya peningkatan kualitas penduduk yang sudah semakin membaik, namun peningkatan kualitas hidupnya bergerak melambat.



Gambar 2.20

Pertumbuhan IPM Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2017

Sumber data: Kompilasi Statistik Sosial Kabupaten Purworejo, 2018

IPM merupakan agregasi dari tiga dimensi yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Selama periode 2011-2017, Kabupaten Purworejo mengalami peningkatan di seluruh dimensi. Dimensi umur panjang dan hidup sehat yang diwakili oleh Angka Harapan hidup (AHH) saat lahir menunjukkan tren yang meningkat pada periode tersebut pada tahun 2010 angka harapan hidup saat lahir 73,45 pada tahun 2017 menjadi 74,26.

Dimensi pengetahuan yang merupakan agregasi dari angka harapan lama sekolah dengan rata-rata lama sekolah juga menunjukkan peningkatan. Secara rata-rata angka harapan lama sekolah tumbuh sebesar 1,36 persen per tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah hanya tumbuh sebesar 0,57 persen per tahun. Selain itu, standar hidup layak yang diwakili oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan juga mengalami kenaikan dari 8,62 juta rupiah per tahun pada tahun 2010 menjadi 9,6 juta rupiah per tahun pada tahun 2017. Peningkatan indikator-indikator komponen IPM menunjukkan peningkatan kualitas hidup manusia di Kabupaten Purworejo, baik dari segi kesehatan, pendidikan, dan kemampuan daya beli masyarakat.

Tabel 2.75
Komponen IPM Kabupaten Purworejo Tahun 2010-2017

No	Komponen IPM	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Angka Harapan Hidup (tahun)	73.45	73.56	73.66	73.77	73.83	74.03	74,14	74.26
2	Angka Harapan Lama Sekolah (tahun)	12.26	12.69	32.74	12.83	13.03	13.04	13,05	13.47
3	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7.39	7.45	7.51	7.57	7.63	7.65	7,66	7.69
4	Pengeluaran Riil per Kapita (ribu rupiah)	8.619	8,921	9,022	9,155	9,189	9,305	9,497	9.6

Sumber : *Kompilasi Statistik Sosial, Kabupaten Purworejo, Kominfo, 2018*

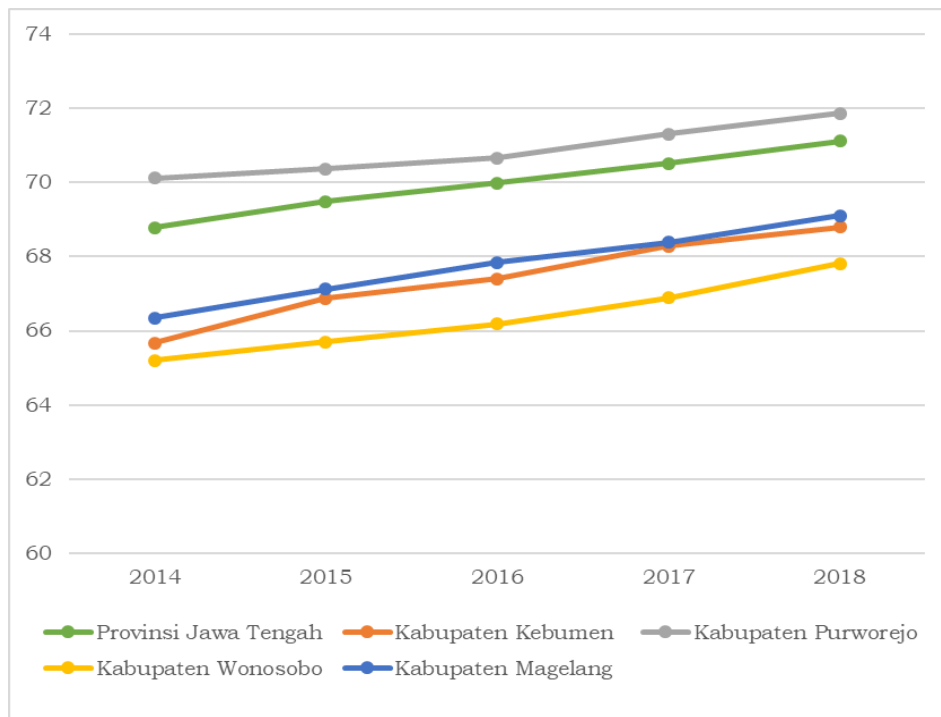
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Purworejo menempati posisi paling tinggi jika dibandingkan dengan Kabupaten tetangga yaitu Kabupaten Kebumen, Kabupaten Wonosobo, dan Kabupaten Magelang, bahkan sudah di melebihi rata-rata IPM Provinsi Jawa Tengah.

Hal ini menunjukkan bahwa kualitas hidup manusia di Kabupaten Purworejo, baik dari segi kesehatan, pendidikan, dan kemampuan daya beli masyarakat rata-rata sudah lebih baik dibanding dengan kabupaten-kabupaten tetangga seperti ditunjukkan dalam tabel dan grafik berikut

Tabel 2.76
Perbandingan IPM Kabupaten Purworejo dengan Kabupaten Tetangga Tahun 2014-2018

IPM	2014	2015	2016	2017	2018
Provinsi Jawa Tengah	68,78	69,49	69,98	70,52	71,12
Kabupaten Kebumen	65,67	66,87	67,41	68,29	68,8
Kabupaten Purworejo	70,12	70,37	70,66	71,31	71,87
Kabupaten Wonosobo	65,2	65,7	66,19	66,89	67,81
Kabupaten Magelang	66,35	67,13	67,85	68,39	69,11

Sumber: *Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2014-2018*



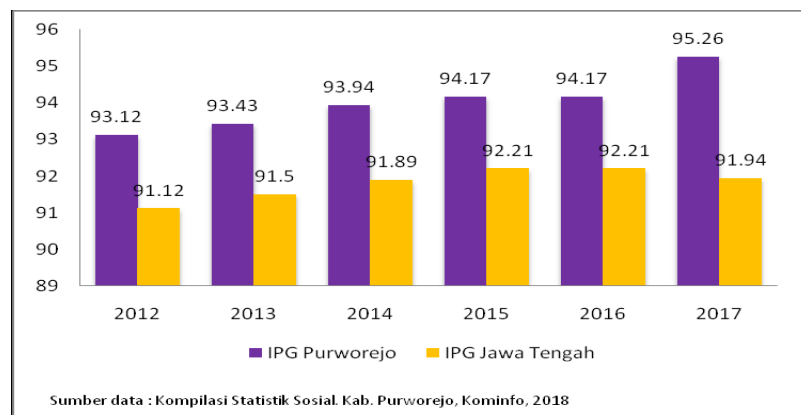
Gambar 2.21

Pertumbuhan IPM Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2017

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2014-2018

b. Pencapaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Purworejo

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan ukuran rasio antara IPM perempuan dan laki-laki. Melalui IPG dapat diukur kesenjangan atau gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Dengan ukuran yang terpisah ini, maka interpretasi tentang kualitas hidup masing-masing kelompok gender tersebut dapat dilakukan secara parsial.



Gambar 2.22 Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Purworejo tahun 2012-2017

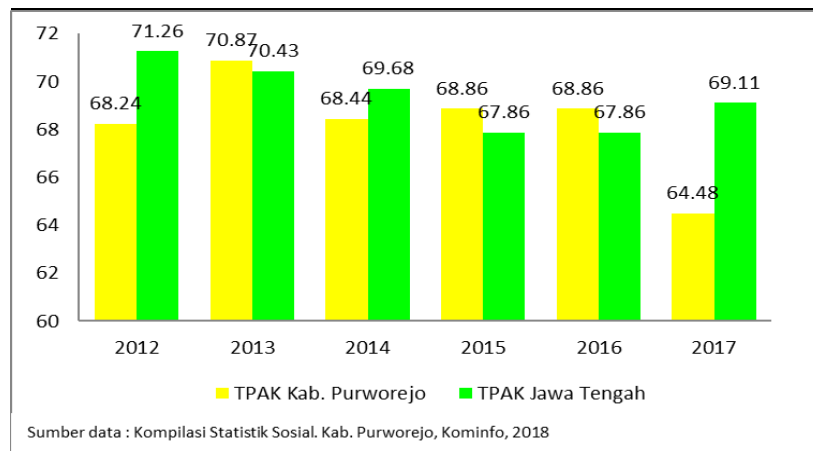
Selama kurun waktu enam tahun terakhir, pencapaian pembangunan gender di Kabupaten Purworejo menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. IPG Kabupaten Purworejo dalam kurun waktu 2012-2017 telah meningkat dari 93,12 pada tahun 2012 menjadi 95,26 pada tahun 2017. Peningkatan IPG Kabupaten Purworejo selama kurun waktu tersebut sejalan dengan peningkatan IPG Provinsi Jawa Tengah.

Peningkatan IPG selama kurun 2012-2017 menunjukkan bahwa program-program pemerintah yang berpedoman pada pengarusutamaan gender, sudah memberikan hasil yang positif terhadap peningkatan kapabilitas dasar perempuan di Kabupaten Purworejo. Peningkatan IPG dikarenakan adanya peningkatan beberapa indikator dalam setiap dimensi, baik kesehatan, pendidikan maupun ekonomi.

c. Tingkat Pengangguran Terbuka

Isu ketenagakerjaan yang seringkali mendapatkan perhatian adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja.

Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Adapun data Perkembangan TPAK (tingkat partisipasi angkatan kerja) Kabupaten Purworejo dan Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2012-2017, adalah sebagaimana gambar atau bagan berikut ini.



Gambar 2.23 Perkembangan TPAK Kabupaten Purworejo dan Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2012-2017

Perkembangan jumlah angkatan kerja kabupaten Purworejo selama tahun 2012-2017 menunjukkan penurunan, meskipun pernah terjadi peningkatan pada tahun 2013. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) tahun 2017 sebesar 64,48 persen, menurun dari 68,86 persen pada tahun 2016. Penurunan TPAK, menunjukkan bahwa semakin menurunnya jumlah penduduk yang berpotensi untuk bekerja.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Purworejo pada tahun 2017 sebesar 64,48 persen yang berarti dari 100 orang penduduk usia kerja, sekitar 64 orang termasuk angkatan kerja. Selain itu, dapat diartikan pula bahwa dari 1000 orang penduduk usia kerja sekitar 645 orang di antaranya aktif secara ekonomi.

Selain TPAK, isu penting yang seringkali mendapatkan perhatian adalah isu pengangguran. Konsep pengangguran yang digunakan adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dan pada waktu yang bersamaan mereka tak bekerja (*jobless*). Pengangguran dengan konsep tersebut biasanya disebut sebagai pengangguran terbuka (*open unemployment*).

Indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran diukur dengan Tingkat Pengangguran terbuka (TPT), dimana TPT merupakan persentase jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja. TPT Kabupaten Purworejo selama

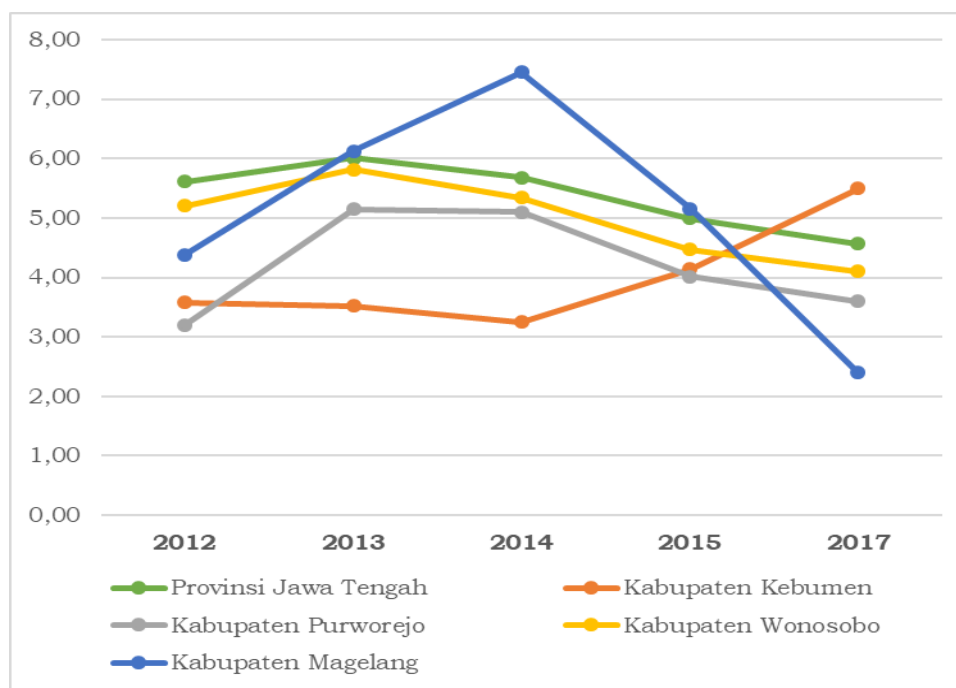
periode 2012-2017 mengalami perkembangan yang fluktuatif. Pada Tahun 2012 mencapai 3,2 persen mengalami kenaikan pada tahun 2013 menjadi 5,15 persen dan mengalami penurunan kembali sampai tahun 2017 menjadi 3,64 persen, nilai ini berada di bawah Provinsi Jawa Tengah yaitu 4,57 persen.

Jika dibandingkan dengan kabupaten tetangga, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Purworejo menunjukkan angka yang relatif rendah. Secara rata-rata dari tahun 2012 hingga 2017, Kabupaten Purworejo menempati posisi kedua terendah setelah Kabupaten Kebumen dan menunjukkan penurunan yang signifikan dari tahun ke tahun seperti dapat dilihat dalam tabel dan grafik berikut

Tabel 2.77
Perbandingan TPT Kabupaten Purworejo dengan
Kabupaten Tetangga Tahun 2012-2017

Tingkat Pengangguran Terbuka	2012	2013	2014	2015	2017
Provinsi Jawa Tengah	5,61	6,01	5,68	4,99	4,57
Kabupaten Kebumen	3,58	3,52	3,25	4,14	5,50
Kabupaten Purworejo	3,20	5,15	5,10	4,01	3,60
Kabupaten Wonosobo	5,21	5,82	5,34	4,47	4,10
Kabupaten Magelang	4,38	6,13	7,45	5,16	2,40

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2012-2017



Gambar 2.24
Grafik Perbandingan TPT Kabupaten Purworejo dengan
Kabupaten Tetangga Tahun 2012-2017
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2012-2017

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai dengan Bulan Mei Tahun 2019

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dalam periode tahunan melalui pelaksanaan program/kegiatan pembangunan. Namun demikian dalam pelaksanaannya, program pembangunan mempunyai potensi untuk tidak memberikan hasil sesuai dengan target yang telah direncanakan dan ditargetkan. Untuk itu, diperlukan evaluasi program pembangunan untuk melihat bagaimana pencapaian tujuan sebuah program/kegiatan dikaitkan dengan proses/tahapan perencanaan sebelumnya.

2.2.1. Misi ke-1 : Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai Kabupaten yang Religius dan Demokratis

Pada misi pertama terdapat dua program yang dilaksanakan yaitu Program Fasilitasi dan Koordinasi Kehidupan Beragama dan Pelayanan Komunikasi Publik. Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo. Hasil evaluasi sampai dengan bulan Mei tidak ada permasalahan, masih kecilnya capaian kinerja pada program Pelayanan Komunikasi Publik karena pelaksanaan kegiatan direncanakan pada semester II.

Tabel 2.78

Evaluasi Pelaksanaan Program pada Misi ke-1 Urusan Kesekretariatan Daerah s/d Bulan Mei Tahun Anggaran 2019

No.	Program	Capaian Kinerja (%)		Penanggungjawab
		Fisik	Keuangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pelayanan Komunikasi Publik	14.00%	13.35%	Setda
2.	Fasilitasi dan Koordinasi Kehidupan Beragama	51.99%	42.72%	Setda

Sumber : Laporan hasil evaluasi RKPD Bulan Mei tahun 2019

2.2.2. Misi ke-2 : Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai Gerbang Ekonomi Utama Bagian Selaan Provinsi Jawa Tengah yang Berbasis Pertanian, Pariwisata, Industri, dan Perdagangan

Pada misi ke-2 pada urusan kemiskinan terdapat empat program yang dilaksanakan. Hasil evaluasi sampai dengan bulan Mei tidak ada permasalahan pada pelaksanaan kegiatan. Masih kecilnya penyerapan anggaran pada beberapa program dikarenakan penyerapan untuk perjalanan luar daerah disesuaikan dengan undangan yang ada. Pada Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah pemetaan potensi 53 desa merah dan pelaksanaan bintek.

Tabel 2.79
Evaluasi Pelaksanaan Program pada Misi ke-2 Urusan Kemiskinan s/d Bulan Mei Tahun Anggaran 2019

No.	Program	Capaian Kinerja (%)		Penanggungjawab
		Fisik	Keuangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin	32.27%	32.27%	Dinas Kesehatan
2.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	13.10%	12.66%	DinPPKP
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin	37.43%	37.43%	Dipermades
4.	Program Peningkatan Akses Pendidikan Berkualitas untuk Penduduk Miskin	15.08%	9.00%	Dindikpora

Sumber : Laporan hasil evaluasi RKPD Bulan Mei tahun 2019.

Pada misi ke-2 pada urusan ketenagakerjaan terdapat tiga program yang dilaksanakan. Hasil evaluasi sampai dengan bulan Mei tidak ada permasalahan, kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan.

Tabel. 2.80
Evaluasi Pelaksanaan Program pada Misi ke-2 Urusan Ketenagakerjaan s/d Bulan Mei Tahun Anggaran 2019

No.	Program	Capaian Kinerja (%)		Penanggungjawab
		Fisik	Keuangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	56.88%	56.88%	Diperinaker
2.	Program Peningkatan Kesempatan kerja	69.00%	45.91%	Diperinaker
3.	Program Pengembangan dan perlindungan Tenaga kerja	55.91%	37.36%	Diperinaker

Sumber : Laporan hasil evaluasi RKPD Bulan Mei tahun 2019

Pada misi ke-2 pada urusan pertanian terdapat delapan program yang dilaksanakan. Hasil evaluasi sampai dengan bulan Mei, pada Program Peningkatan Produksi Peternakan dengan realisasi fisik dan keuangan yang masih rendah dikarenakan rencana kegiatan baru dilaksanakan pada semester II, progress kegiatan masih dalam persiapan pengadaan ternak. Sedangkan pada program Peningkatan Produksi Perikanan, kegiatan telah terlaksana namun untuk keuangan masih dalam proses pencairan.

Tabel. 2.81
Evaluasi Pelaksanaan Program pada Misi ke-2 Urusan Pertanian
s/d Bulan Mei Tahun Anggaran 2019

No.	Program	Capaian Kinerja (%)		Penanggungjawab
		Fisik	Keuangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian	26.28%	24.81%	DPPKP
2.	Program Penerapan Teknologi Pertanian	42.62%	33.79%	DPPKP
3.	Program Peningkatan Produksi/produktivitas Perkebunan	38.06%	33.60%	DPPKP
4.	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perkebunan	49.15%	49.15%	DPPKP
5.	Program Pemberdayaan Penyuluh dan Peningkatan Penyuluhan Pertanian	32.28%	29.72%	DPPKP
6.	Program Peningkatan Produksi Peternakan	8.77%	4.56%	DPPKP
7.	Program Agribisnis Komoditas Unggulan Pertanian dan Peternakan	41.92%	36.95%	DPPKP
8.	Program Peningkatan Produksi Perikanan	58.08%	5.42%	DPPKP

Sumber : Laporan hasil evaluasi RKPD Bulan Mei tahun 2019

Pelaksanaan misi ke-2 pada urusan agribisnis terdapat tiga program yang dilaksanakan. Hasil evaluasi sampai dengan bulan Mei, masih rendahnya penyerapan keuangan dikarenakan masih dalam proses pencairan, namun pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan.

Tabel 2.82
Evaluasi Pelaksanaan Program pada Misi ke-2 Urusan Agribisnis
s/d Bulan Mei Tahun Anggaran 2019

No.	Program	Capaian Kinerja (%)		Penanggungjawab
		Fisik	Keuangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Program Agribisnis Komoditas Unggulan Pertanian dan Peternakan	41.92%	36.95%	DPPKP
2.	Program Agribisnis komoditas unggulan perikanan	9.40%	9.40%	DPPKP
3.	Program Agribisnis Komoditas Unggulan di sektor Hilir	10.00%	0.57%	Diperinaker

Sumber : Laporan hasil evaluasi RKPD Bulan Mei tahun 2019

Pelaksanaan misi ke-2 pada urusan pariwisata, Industri, Koperasi dan UKM serta Penanaman Modal terdapat enam program yang dilaksanakan. Hasil evaluasi sampai dengan bulan Mei, program kegiatan berjalan sesuai yang direncanakan. Untuk Program Pengembangan Destinasi, Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kegiatan masih dalam proses lelang.

Tabel 2.83
Evaluasi Pelaksanaan Program pada Misi ke-2 Urusan Pariwisata s/d Bulan Mei
Tahun Anggaran 2019

No.	Program	Capaian Kinerja (%)		Penanggungjawab
		Fisik	Keuangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Program Pengembangan Destinasi, Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	22.66%	19.69%	Dinparbud

Sumber : Laporan hasil evaluasi RKPD Bulan Mei tahun 2019

Tabel 2.84
Evaluasi Pelaksanaan Program pada Misi ke-2 Urusan Industri s/d Bulan Mei
Tahun Anggaran 2019

No.	Program	Capaian Kinerja (%)		Penanggungjawab
		Fisik	Keuangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Program Pengelolaan Industri Kecil dan Menengah	85.00%	50.98%	Diperinaker

Sumber : Laporan hasil evaluasi RKPD Bulan Mei tahun 2019

Tabel 2.85
Evaluasi Pelaksanaan Program pada Misi ke-2 Urusan Koperasi dan UKM s/d
Bulan Mei Tahun Anggaran 2019

No.	Program	Capaian Kinerja (%)		Penanggungjawab
		Fisik	Keuangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	50.27%	46.17%	DinKUKMP
2.	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil.	44.18%	39.15%	DinKUKMP

Sumber : Laporan hasil evaluasi RKPD Bulan Mei tahun 2019

Tabel 2.86
Evaluasi Pelaksanaan Program pada Misi ke-2 Urusan Penanaman Modal s/d
Bulan Mei Tahun Anggaran 2019

No.	Program	Capaian Kinerja (%)		Penanggungjawab
		Fisik	Keuangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	62.45%	54.58%	DMPTSP
2.	Program Peningkatan Promosi investasi	33.43%	20.86%	DMPTSP

Sumber : Laporan hasil evaluasi RKPD Bulan Mei tahun 2019

Tabel 2.87
Evaluasi Pelaksanaan Program pada Misi ke-2 Urusan Perdagangan s/d Bulan
Mei Tahun Anggaran 2019

No.	Program	Capaian Kinerja (%)		Penanggungjawab
		Fisik	Keuangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan	21.11%	19.75%	DinKUKMP
2.	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Daerah	10.87%	8.06%	DinKUKMP
3.	Program Peningkatan promosi perdagangan	41.10%	37.63%	DinKUKMP

Sumber : Laporan hasil evaluasi RKPD Bulan Mei tahun 2019

Pelaksanaan misi ke-2 pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdapat sebelas program yang dilaksanakan. Hasil evaluasi sampai dengan bulan Mei, program kegiatan berjalan sesuai yang direncanakan. Realisasi fisik dan keuangan di beberapa program masih rendah karena masih dalam tahap lelang.

Tabel 2.88
Evaluasi Pelaksanaan Program pada Misi ke-2 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang s/d Bulan Mei Tahun Anggaran 2019

No.	Program	Capaian Kinerja (%)		Penanggungjawab
		Fisik	Keuangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Program Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	15.94%	12.76%	DPUPR
2.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Air bersih	2.33%	2.00%	Diperkimtan
3.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah	25.00%	23.64%	Diperkimtan
4.	Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan	46.13%	34.39%	DinLH
5.	Program Pengembangan dan pengelolaan sistem drainase	100.00%	52.79%	DPUPR
6.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang daerah	21.79%	18.28%	DPUPR
7.	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	56.24%	17.93%	DPUPR
8.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Bangunan Gedung	0.57%	0.34%	DPUPR
9.	Program Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi	48.00%	35.78%	DPUPR
10.	Program pengembangan infrastruktur kawasan strategis	4.95%	2.79%	DPUPR
11.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi	8.75%	6.98%	DPUPR

Sumber : Laporan hasil evaluasi RKPD Bulan Mei tahun 2019

Pelaksanaan misi ke-2 pada urusan perhubungan terdapat satu program yang dilaksanakan. Ada beberapa kendala selama pelaksanaan program kegiatan yaitu adanya perubahan lokasi kegiatan sehingga diajukan pada perubahan anggaran, adanya perubahan teknis pelaksanaan kegiatan oleh kementerian perhubungan, sedangkan keuangan masih dalam proses pencairan

Tabel 2.89
Evaluasi Pelaksanaan Program pada Misi ke-2 Urusan Perhubungan s/d Bulan Mei Tahun Anggaran 2019

No.	Program	Capaian Kinerja (%)		Penanggungjawab
		Fisik	Keuangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Program Pengelolaan Transportasi Darat	43.41%	35.17%	Dinhub

Sumber : Laporan hasil evaluasi RKPD Bulan Mei tahun 2019

Urusan Perumahan Rayat, Kawasan Pemukiman dan Petanahan terdapat dua program yang dilaksanakan. Hasil evaluasi sampai dengan

bulan Mei, kendala yang dihadapi adalah kegiatan yang belum bisa dilaksanakan karena dana belum bisa dicairkan yaitu kegiatan-kegiatan dari sumber DAK, untuk penambahan dan perluasan jaringan listrik menunggu informasi dari ESDM. dan beberapa kegiatan menunggu peraturan dan hasil konsultasi dari pusat.

Tabel 2.90
Evaluasi Pelaksanaan Program pada Misi ke-2 Urusan Perumahan Rayat, Kawasan Permukiman dan Petanahan s/d Bulan Mei Tahun Anggaran 2019

No.	Program	Capaian Kinerja (%)		Penanggungjawab
		Fisik	Keuangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	29.64%	27.24%	Diperkimtan
2.	Program Penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh	2.73%	1.06%	Diperkimtan

Sumber : Laporan hasil evaluasi RKPD Bulan Mei tahun 2019

Urusan Lingkungan Hidup terdapat tiga program yang dilaksanakan. Hasil evaluasi sampai dengan bulan Mei, program kegiatan sesuai dengan yang direncanakan. Pengadaan bibit tanaman dan kendaraan operasional persampahan dan kebersihan masih dalam proses pengadaan.

Tabel 2.91
Evaluasi Pelaksanaan Program pada Misi ke-2 Urusan Lingkungan Hidup s/d Bulan Mei Tahun Anggaran 2019

No.	Program	Capaian Kinerja (%)		Penanggungjawab
		Fisik	Keuangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Program Pengendalian pencemaran lingkungan	19.01%	7.43%	DinLH
2.	Program Pengendalian kerusakan lingkungan	23.29%	11.93%	DinLH
3.	Program Pengelolaan Persampahan dan limbah	6.81%	3.18%	DinLH

Sumber : Laporan hasil evaluasi RKPD Bulan Mei tahun 2019

2.2.3. Misi ke-3 : Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai Daerah Tujuan Wisata Unggulan Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal

Pelaksanaan misi ke-3 pada urusan kebudayaan terdapat tiga program yang dilaksanakan. Kendala selama pelaksanaan program kegiatan sampai dengan bulan Mei yaitu adanya revisi RKA (kegiatan dengan sumber dana DAK), pembuatan brosur dan tiket masih dalam proses, pelaksanaan festival seni ndolalak diundur menyesuaikan

program sekolah, penyelenggaraan even seni diundur karena adanya pergantian kepengurusan pada dewan kesenian.

Tabel 2.92
Evaluasi Pelaksanaan Program pada Misi ke-3 Urusan Kebudayaan
s/d Bulan Mei Tahun Anggaran 2019

No.	Program	Capaian Kinerja (%)		Penanggungjawab
		Fisik	Keuangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Program Pengembangan dan Pelestarian Seni dan Budaya	49.77%	32.70%	Dinparbud
2.	Program Pelestarian Pengelolaan Nilai Sejarah, Nilai Budaya, dan Kepurbakalaan	16.25%	8.95%	Dinparbud
3.	Program Pembinaan Seni Budaya dan Adat daerah	61.43%	44.05%	Dinparbud

Sumber : Laporan hasil evaluasi RKPD Bulan Mei tahun 2019

2.2.4. Misi ke-4 : Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai Kabupaten yang Unggul di Bidang Seni, Budaya, Olahraga

Pelaksanaan misi ke-4 pada urusan kebudayaan terdapat satu program yang dilaksanakan. Beberapa kendala selama pelaksanaan program kegiatan sampai dengan bulan Mei yaitu pembuatan brosur dan tiket masih dalam proses, pelaksanaan festival seni ndolalak diundur menyesuaikan program sekolah, penyelenggaraan even seni diundur karena adanya pergantian kepengurusan pada dewan kesenian

Tabel 2.93
Evaluasi Pelaksanaan Program pada Misi ke-4 Urusan Kebudayaan
s/d Bulan Mei Tahun Anggaran 2019

No.	Program	Capaian Kinerja (%)		Penanggungjawab
		Fisik	Keuangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Program Pembinaan Prestasi Seni dan Organisasi	35.34%	19.63%	Dinparbud

Sumber : Laporan hasil evaluasi RKPD Bulan Mei tahun 2019

Urusan Pemuda dan Olahraga terdapat tiga program yang dilaksanakan. Hasil evaluasi sampai dengan bulan Mei, program kegiatan sesuai dengan yang direncanakan. Penyerapan anggaran masih dalam proses pencairan.

Tabel 2.94
Evaluasi Pelaksanaan Program pada Misi ke-4 Urusan Pemuda dan Olahraga s/d
Bulan Mei Tahun Anggaran 2019

No.	Program	Capaian Kinerja (%)		Penanggungjawab
		Fisik	Keuangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Program Pembinaan dan Masyarakatan Olahraga	61.75%	41.31%	Dindikpora
2.	Program Pengembangan Kepemudaan	45.00%	25.22%	Dindikpora
3.	Praogram Pengembangan Wahana Seni Budaya	45.08%	45.08%	Dindikpora

Sumber : Laporan hasil evaluasi RKPD Bulan Mei tahun 2019

2.2.5. Misi ke-5: Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai Kabupaten yang Unggul di Bidang Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan

Pelaksanaan misi ke-5 pada urusan pendidikan terdapat tujuh program yang dilaksanakan. Capaian keuangan masih rendah karena sebagian besar kegiatan bersumber dari DAK sehingga belum ada penyerapan anggaran. Program e-learning dilaksanakan pada semester II.

Tabel 2.95
Evaluasi Pelaksanaan Program pada Misi ke-5 Urusan Pendidikan
s/d Bulan Mei Tahun Anggaran 2019

No.	Program	Capaian Kinerja (%)		Penanggungjawab
		Fisik	Keuangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Program Pendidikan Anak Usia Dini	28.18%	21.38%	Dindikpora
2.	Program Pendidikan Masyarakat	15.68%	9.00%	Dindikpora
3.	Program Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun	39.61%	19.51%	Dindikpora
4.	Program Peningkatan Akses Pendidikan Berkualitas Untuk Penduduk Miskin	20.00%	9.00%	Dindikpora
5.	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	23.64%	18.87%	Dindikpora
6.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	53.67%	28.64%	Dindikpora
7.	Program e-learning	7.00%	1.42%	Dindikpora

Sumber : Laporan hasil evaluasi RKPD Bulan Mei tahun 2019

Urusan kesehatan terdapat sembilan program yang dilaksanakan. Permasalahan yang dihadapi adalah pelaksanaan konsolidasi pengadaan ATK merupakan hal baru. ATK masih melekat per kegiatan, namun pengadaan menjadi satu sampai dengan bulan mei kontrak sudah dilaksanakan.

Tabel 2.96
Evaluasi Pelaksanaan Program pada Misi ke-5 Urusan Kesehatan s/d Bulan Mei
Tahun Anggaran 2019

No.	Program	Capaian Kinerja (%)		Penanggungjawab
		Fisik	Keuangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin	32.27%	32.27%	Dinkes
2.	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan	44.30%	28.95%	Dinkes
3.	Program Pelayanan Promosi Kesehatan	11.00%	10.55%	Dinkes
4.	Program Pelayanan Skrining dan Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Daur Kehidupan	23.00%	10.02%	Dinkes
5.	Program Pelayanan Pemeriksaan Penyakit Menular	14.00%	13.62%	Dinkes
6.	Program Pelayanan Kesehatan Lingkungan dan Respon Verifikasi terhadap SKDR	12.35%	12.35%	Dinkes
7.	Program Kefarmasian, Pengawasan Obat dan Makanan	5.17%	5.17%	Dinkes
8.	Program Upaya Kesehatan Perorangan	5.58%	5.58%	Dinkes
9.	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	3.00%	2.04%	Dinkes

Sumber : Laporan hasil evaluasi RKPD Bulan Mei tahun 2019

2.2.6. Misi ke-6: Mewujudkan Kabupaten Purworejo menjadi Kabupaten yang Memiliki Aparatur Pemerintahan yang Mampu Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Partisipatif yang Berorientasi pada Optimalisasi Pelayanan Publik

Pelaksanaan misi ke-6 pada urusan keuangan terdapat satu program yang dilaksanakan. Sampai dengan bulan Mei pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan rencana yang telah disusun.

Tabel 2.97
Evaluasi Pelaksanaan Program pada Misi ke-6 Urusan Keuangan s/d Bulan Mei
Tahun Anggaran 2019

No.	Program	Capaian Kinerja (%)		Penanggungjawab
		Fisik	Keuangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	32.08%	32.08%	BPPKAD

Sumber : Laporan hasil evaluasi RKPD Bulan Mei tahun 2019

Pelaksanaan misi ke-6 pada urusan perencanaan terdapat satu program yang dilaksanakan. Sampai dengan bulan Mei pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan perencanaan, penyerapan keuangan terkendala karena kegiatan bersumber dari bantuan keuangan provinsi sehingga dana belum dapat dicairkan.

Tabel 2.98
Evaluasi Pelaksanaan Program pada Misi ke-6 Urusan Perencanaan s/d Bulan Mei Tahun Anggaran 2019

No.	Program	Capaian Kinerja (%)		Penanggungjawab
		Fisik	Keuangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	32.00%	27.20%	Bappeda

Sumber : Laporan hasil evaluasi RKPD Bulan Mei tahun 2019

Pelaksanaan misi ke-6 pada urusan pengawasan terdapat satu program yang dilaksanakan oleh Inspektorat. Kendala yang dihadapi adalah adanya mandatoring dari KPK, sehingga program kerja pengawasan harus disesuaikan, sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan.

Tabel 2.99
Evaluasi Pelaksanaan Program pada Misi ke-6 Urusan Pengawasan s/d Bulan Mei Tahun Anggaran 2019

No.	Program	Capaian Kinerja (%)		Penanggungjawab
		Fisik	Keuangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	34.86%	24.55%	Inspektorat

Sumber : Laporan hasil evaluasi RKPD Bulan Mei tahun 2019

Urusan Penelitian dan Pengembangan terdapat satu program yang dilaksanakan. Sampai dengan bulan Mei pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan perencanaan, penyerapan anggaran yang masih kecil akan diefisiensi di perubahan.

Tabel 2.100
Evaluasi Pelaksanaan Program pada Misi ke-6 Urusan Penelitian Pengembangan
s/d Bulan Mei Tahun Anggaran 2019

No.	Program	Capaian Kinerja (%)		Penanggungjawab
		Fisik	Keuangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Program Penelitian dan Pengembangan	16.67%	9.89%	Bappeda

Sumber : Laporan hasil evaluasi RKPD Bulan Mei tahun 2019

Urusan Kepegawaian, Kesekretariatan Daerah dan Fungsi Penunjang Tugas Camat sampai dengan bulan Mei pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan perencanaan. Pada Program Pembinaan Desa/Kelurahan beberapa kecamatan masih dalam proses pencairan anggaran.

Tabel 2.101
Evaluasi Pelaksanaan Program pada Misi ke-6 Urusan Kepegawaian
s/d Bulan Mei Tahun Anggaran 2019

No.	Program	Capaian Kinerja (%)		Penanggungjawab
		Fisik	Keuangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Program Manajemen Kepegawaian Daerah	33.46%	27.63%	BKD

Sumber : Laporan hasil evaluasi RKPD Bulan Mei tahun 2019

Tabel 2.102
Evaluasi Pelaksanaan Program pada Misi ke-6 Urusan Kesekretariatan Daerah
s/d Bulan Mei Tahun Anggaran 2019

No.	Program	Capaian Kinerja (%)		Penanggungjawab
		Fisik	Keuangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Program Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah	55.67%	40.43%	Setda
2.	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan	48.20%	46.28%	Setda
3.	Program Koordinasi Perangkat Daerah	43.11%	36.38%	Setda

Sumber : Laporan hasil evaluasi RKPD Bulan Mei tahun 2019

Tabel 2.103
Evaluasi Pelaksanaan Program pada Misi ke-6 Urusan Fungsi Penunjang Tugas
Camat s/d Bulan Mei Tahun Anggaran 2019

No.	Program	Capaian Kinerja (%)		Penanggungjawab
		Fisik	Keuangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Program Koordinasi Tingkat Kecamatan	45.26%	39.38%	Kecamatan
2.	Program Pembinaan Desa/Kelurahan	29.44%	16.00%	Kecamatan
3.	Program Pelayanan Masyarakat	56.50%	55.78%	Kecamatan

Sumber : Laporan hasil evaluasi RKPD Bulan Mei tahun 2019

Pelaksanaan misi ke-6 pada urusan Dukungan Penyelenggaraan Fungsi DPRD terdapat satu program yang dilaksanakan. Sampai dengan bulan Mei pelaksanaan kegiatan sesuai rencana, beberapa pelaksanaan kegiatan sesuai dengan aduan masyarakat dan adanya pengurangan anggaran di perubahan pada kegiatan pembahasan raperda.

Tabel 2.104
Evaluasi Pelaksanaan Program pada Misi ke-6 Urusan Dukungan
Penyelenggaraan Fungsi DPRD s/d Bulan Mei Tahun Anggaran 2019

No.	Program	Capaian Kinerja (%)		Penanggungjawab
		Fisik	Keuangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Program Dukungan penyelenggaraan fungsi DPRD	36.01%	36.01%	Setwan

Sumber : Laporan hasil evaluasi RKPD Bulan Mei tahun 2019

Pelaksanaan misi ke-6 pada urusan Kominfo terdapat tiga program yang dilaksanakan. Kendala pelaksanaan program kegiatan sampai dengan bulan Mei adalah pengembangan smart city masih proses lelang, pengumpulan data belum dapat dilaksanakan sesuai rencana dan beberapa kegiatan yang melaksanakan efisiensi di perubahan anggaran.

Tabel 2.105
Evaluasi Pelaksanaan Program pada Misi ke-6 Urusan Kominfo s/d Bulan Mei
Tahun Anggaran 2019

No.	Program	Capaian Kinerja (%)		Penanggungjawab
		Fisik	Keuangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	42.84%	25.03%	Kominfo
2.	Program Penyelenggaraan Persandian	40.00%	28.15%	Kominfo
3.	Program Penyusunan Statistik	44.29	25.53%	Dinkominfo

Sumber : Laporan hasil evaluasi RKPD Bulan Mei tahun 2019

Urusan Admindukcapil terdapat satu program yang dilaksanakan. Pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan perencanaan.

Tabel 2.106 Evaluasi Pelaksanaan Program pada Misi ke-6 Urusan Admindukcapil s/d Bulan Mei Tahun Anggaran 2019

No.	Program	Capaian Kinerja (%)		Penanggungjawab
		Fisik	Keuangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Program Pelayanan Administrasi Kependudukan	56.58%	52.53%	Dindukcapil

Sumber : Laporan hasil evaluasi RKPD Bulan Mei tahun 2019

Urusan Pertanahan terdapat satu program yang dilaksanakan. Pelaksanaan kegiatan identifikasi tanah negara menunggu hasil konsultasi ke pemerintah pusat.

Tabel 2.107 Evaluasi Pelaksanaan Program pada Misi ke-6 Urusan Pertanahan s/d Bulan Mei Tahun Anggaran 2019

No.	Program	Capaian Kinerja (%)		Penanggungjawab
		Fisik	Keuangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Program Koordinasi Penyelenggaraan Pertanahan	26.86%	22.27%	Diperkimtan

Sumber : Laporan hasil evaluasi RKPD Bulan Mei tahun 2019

Urusan Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdapat empat program yang dilaksanakan. Pelaksanaan kegiatan sampai bulan Mei tidak ada kendala, kegiatan pada program penghargaan kepahlawanan masih dalam proses pencairan.

Tabel 2.108 Evaluasi Pelaksanaan Program pada Misi ke-6 Urusan Sosial s/d Bulan Mei Tahun Anggaran 2019

No.	Program	Capaian Kinerja (%)		Penanggungjawab
		Fisik	Keuangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Program Penanganan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	52.39%	35.77%	DinSos PP KB PPPA
2.	Program Penghargaan Kepahlawanan	26.35%	5.24%	DinSos PP KB PPPA

Sumber : Laporan hasil evaluasi RKPD Bulan Mei tahun 2019

Tabel 2.109 Evaluasi Pelaksanaan Program pada Misi ke-6 Urusan Pengendalian Penduduk dan KB s/d Bulan Mei Tahun Anggaran 2019

No.	Program	Capaian Kinerja (%)		Penanggungjawab
		Fisik	Keuangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Program Keluarga Berencana (KB)	33.97%	27.32%	DinSos PP KB PPPA
2.	Program Keluarga Sejahtera	63.18%	49.84%	DinSos PP KB PPPA

Sumber : Laporan hasil evaluasi RKPD Bulan Mei tahun 2019

Tabel 2.110 Evaluasi Pelaksanaan Program pada Misi ke-6 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak s/d Bulan Mei Tahun Anggaran 2019

No.	Program	Capaian Kinerja (%)		Penanggungjawab
		Fisik	Keuangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Program Pemberdayaan Perempuan dan Anak	41.67%	35.33%	DinSos PP KB PPPA

Sumber : Laporan hasil evaluasi RKPD Bulan Mei tahun 2019

Urusan Tramtibumlinmas terdapat empat program yang dilaksanakan. Pelaksanaan kegiatan sampai bulan Mei tidak ada kendala, kegiatan berjalan sesuai rencana.

Tabel 2.111 Evaluasi Pelaksanaan Program pada Misi ke-6 Urusan Tramtibumlinmas s/d Bulan Mei Tahun Anggaran 2019

No.	Program	Capaian Kinerja (%)		Penanggungjawab
		Fisik	Keuangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Program Pemeliharaan Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat serta Pencegahan Tindak Kriminal	57.09%	55.34%	SatpolPP dan Damkar
2.	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	29.09%	29.09%	SatpolPP dan Damkar
3.	Program Peningkatan Kewaspadaan Dini Dan Pembinaan Masyarakat	40.77%	40.77%	SatpolPP dan Damkar
4.	Program Pendidikan Politik Masyarakat	64.90%	64.90%	SatpolPP dan Damkar

Sumber : Laporan hasil evaluasi RKPD Bulan Mei tahun 2019

Urusan Perpustakaan dan Kearsipan terdapat dua program yang dilaksanakan. Pelaksanaan kegiatan sampai bulan Mei tidak ada kendala, kegiatan berjalan sesuai rencana, anggaran masih pada proses pencairan.

Tabel 2.112 Evaluasi Pelaksanaan Program pada Misi ke-6 Urusan Perpustakaan s/d Bulan Mei Tahun Anggaran 2019

No.	Program	Capaian Kinerja (%)		Penanggungjawab
		Fisik	Keuangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Program pengelolaan, pengembangan dan pembinaan perpustakaan	41.00%	23.96%	Dinarpusda

Sumber : Laporan hasil evaluasi RKPD Bulan Mei tahun 2019

Tabel 2.113 Evaluasi Pelaksanaan Program pada Misi ke-6 Urusan Kearsipan s/d Bulan Mei Tahun Anggaran 2019

No.	Program	Capaian Kinerja (%)		Penanggungjawab
		Fisik	Keuangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Program pengelolaan, perlindungan dan penyelamatan arsip daerah	56.00%	30.74%	Dinarpusda

Sumber : Laporan hasil evaluasi RKPD Bulan Mei tahun 2019

Urusan Transmigrasi dan ESDM terdapat dua program yang dilaksanakan. Sampai bulan Mei tidak ada kendala, kegiatan dilaksanakan pada semester II.

Tabel 2.114 Evaluasi Pelaksanaan Program pada Misi ke-6 Urusan Transmigrasi s/d Bulan Mei Tahun Anggaran 2019

No.	Program	Capaian Kinerja (%)		Penanggungjawab
		Fisik	Keuangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Program Penyelenggaraan Transmigrasi	18.50%	13.45%	Diperinaker

Sumber : Laporan hasil evaluasi RKPD Bulan Mei tahun 2019

Tabel 2.115 Evaluasi Pelaksanaan Program pada Misi ke-6 Urusan ESDM s/d Bulan Mei Tahun Anggaran 2019

No.	Program	Capaian Kinerja (%)		Penanggungjawab
		Fisik	Keuangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Program Fasilitasi Penyelenggaraan Energi Sumber Daya Mineral	0.00%	0.00%	DMPTSP

Sumber : Laporan hasil evaluasi RKPD Bulan Mei tahun 2019

Urusan Administrasi Umum terdapat lima program yang dilaksanakan oleh semua Perangkat Daerah. Sampai bulan Mei tidak ada

RKPD Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 II-93

kendala, pada kegiatan jasa surat menyurat untuk anggaran tidak dapat diserap karena pengiriman surat melalui intranet, sehingga pada perubahan anggaran diefisiensikan dengan merekomposisi pada kegiatan yang lain.

Tabel 2.116 Evaluasi Pelaksanaan Program pada Misi ke-6 Urusan Administrasi Umum s/d Bulan Mei Tahun Anggaran 2019

No.	Program	Capaian Kinerja (%)		Penanggungjawab
		Fisik	Keuangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	41.77%	35.58%	Semua PD
2.	Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	48.96%	37.96%	Semua PD
3.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	29.95%	26.90%	Semua PD
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	44.01%	38.19%	Semua PD
5.	Penyusunan Data Dasar Pembangunan	31.69%	24.43%	Semua PD

Sumber : Laporan hasil evaluasi RKPD Bulan Mei tahun 2019

2.2.7. Misi ke-7: Mewujudkan Desa di Kabupaten Purworejo sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi melalui Pemberdayaan Masyarakat dalam Berbagai Bidang.

Pelaksanaan misi ke-7 pada urusan Pemberdayaan Masyarakat terdapat dua program yang dilaksanakan. Dalam pelaksanaan kegiatan tidak ada kendala dan berjalan sesuai rencana.

Tabel 2.117
Evaluasi Pelaksanaan Program pada Misi ke-7 Urusan Pemberdayaan Masyarakat s/d Bulan Mei Tahun Anggaran 2019

No.	Program	Capaian Kinerja (%)		Penanggungjawab
		Fisik	Keuangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	46.90%	38.62%	Dipermades
2.	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	34.33%	34.33%	Dipermades

Sumber : Laporan hasil evaluasi RKPD Bulan Mei tahun 2019

Tabel 2.118
 Realisasi Kinerja Fisik dan Keuangan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo
 sampai dengan Bulan Mei Tahun 2019

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH ANGGARAN PADA DPA (Rp)	BULAN MEI		
			REALISASI PENYERAPAN (Rp)	CAPAIAN REALISASI KINERJA FISIK	CAPAIAN REALISASI KINERJA KEUANGAN
				(%)	(%)
1	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	132,851,667,848	25,677,256,652	38.16%	19.33%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	784,723,343	300,385,847	41.71%	38.28%
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	200,242,830	69,945,192	40.61%	34.93%
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	536,969,900	177,946,100	53.07%	33.14%
4	Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan	174,116,000	20,277,300	55.00%	11.65%
5	Program Pendidikan Anak Usia Dini	822,777,500	175,896,353	28.18%	21.38%
6	Program Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun	118,935,297,875	23,204,619,076	39.61%	19.51%
7	Program Pendidikan Masyarakat	1,595,829,800	143,657,247	15.68%	9.00%
8	Program Peningkatan Akses Pendidikan Berkualitas Untuk Penduduk Miskin	33,000,000	2,970,800	20.00%	9.00%
9	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	4,760,001,200	898,005,100	23.64%	18.87%
10	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	437,431,500	125,259,074	53.67%	28.64%
11	Program E-Learning	3,178,778,100	44,982,600	7.00%	1.42%
12	Program Pengembangan Kepemudaan	422,499,800	106,534,900	45.00%	25.22%
13	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	810,000,000	334,648,466	61.75%	41.31%
14	Program Pengembangan Wahana Pemuda dan Olahraga	160,000,000	72,128,597	43.25%	45.08%
2	Dinas Kesehatan	105,522,930,096	12,131,165,818	30.49%	11.50%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	476,855,882	185,465,426	39.00%	38.89%
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	449,561,000	33,347,713	7.42%	7.42%
3	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	418,412,514	105,420,292	30.00%	25.20%
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	274,364,500	98,963,700	36.00%	36.07%
5	Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan	35,000,000	8,212,900	23.47%	23.47%
6	Program Kefarmasian, Pengawasan Obat dan Makanan	7,776,824,900	401,723,387.00	5.17%	5.17%
7	Program Upaya Kesehatan Perorangan	850,863,000	47,456,100	2.00%	5.58%
8	Program Pelayanan Promosi Kesehatan	107,612,100	11,354,000	11.00%	10.55%

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH ANGGARAN PADA DPA (Rp)	BULAN MEI		
			REALISASI PENYERAPAN (Rp)	CAPAIAN REALISASI KINERJA FISIK	CAPAIAN REALISASI KINERJA KEUANGAN
				(%)	(%)
9	Program Pelayanan Skrining dan Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Daur Kehidupan	61,942,012,900	6,208,171,501	23.00%	10.02%
10	Program Pelayanan Kesehatan Lingkungan dan Respon Verifikasi terhadap SKDR	3,735,762,400	461,297,443	12.35%	12.35%
11	Program Pelayanan Pemeriksaan Penyakit Menular	1,795,065,100	244,516,350	14.00%	13.62%
12	Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin	12,441,691,800	4,014,560,606	32.27%	32.27%
13	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	15,218,895,000	310,676,400	3.00%	2.04%
3	Rumah Sakit Umum Daerah	147,227,269,000	42,616,685,815	39.64%	28.95%
1	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan	147,227,269,000	42,616,685,815	44.30%	28.95%
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	172,668,806,411	13,759,804,379	10.10%	7.97%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	494,977,400	166,181,864	39.50%	33.57%
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	312,860,400	100,020,061	50.03%	31.97%
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	270,000,000	94,493,401	41.16%	35.00%
4	Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan	70,000,000	-	0.57%	0.00%
5	Program Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	87,325,972,611	11,144,514,350	15.94%	12.76%
6	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Drainase	400,000,000	211,172,050	100.00%	52.79%
7	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah	675,000,000	123,383,766	21.79%	18.28%
8	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	200,000,000	35,862,650	56.24%	17.93%
9	Program Pengembangan dan Pengelolaan Gedung	40,400,000,000	137,167,800	0.57%	0.34%
10	Program Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi	70,000,000	25,048,600	48.00%	35.78%
11	Program Pengembangan Infrastruktur Kawasan Strategis	29,641,479,000	828,068,100	4.95%	2.79%
12	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi	12,808,517,000	893,891,737	8.75%	6.98%
5	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan	8,137,564,350	1,441,940,348	19.41%	17.72%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	153,897,300	61,962,969	45.62%	40.26%
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	71,128,450	33,658,000	48.32%	47.32%

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH ANGGARAN PADA DPA (Rp)	BULAN MEI		
			REALISASI PENYERAPAN (Rp)	CAPAIAN REALISASI KINERJA FISIK	CAPAIAN REALISASI KINERJA KEUANGAN
				(%)	(%)
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	46,256,500	15,940,800	37.70%	34.46%
4	Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	4,272,684,200	1,163,934,811	29.64%	27.24%
5	Program Penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh	275,000,000	2,914,100	2.73%	1.06%
6	Program Pengembangan dan Pengelolaan Air Bersih	2,861,267,000	57,346,538	2.33%	2.00%
7	Program Koordinasi Penyelenggaraan Pertanahan	141,198,000	31,448,000	26.86%	22.27%
8	Program Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah	316,132,900	74,735,130	25.00%	23.64%
6	Dinas Lingkungan Hidup	11,570,394,460	2,438,752,169	31.27%	21.08%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	212,869,400	70,889,362	41.90%	33.30%
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	133,644,000	42,758,075	50.41%	31.99%
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	25,000,000	5,278,800	35.60%	21.12%
4	Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan	28,000,000	2,247,900	18.000%	8.03%
5	Program Pengelolaan Persampahan dan Limbah	2,099,555,800	66,854,600	6.81%	3.18%
6	Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan	1,300,429,860	96,677,360	19.01%	7.43%
7	Program Pengendalian Kerusakan Lingkungan	2,307,140,000	275,184,426	23.29%	11.93%
8	Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan	5,463,755,400	1,878,861,646	46.13%	34.39%
7	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	10,896,020,180	3,621,742,655	42.73%	33.24%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	657,289,900	313,972,003	47.77%	47.77%
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	340,509,000	91,659,097	26.92%	26.92%
3	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	67,095,200	35,726,366	53.25%	53.25%
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	128,581,900	65,565,500	50.99%	50.99%
5	Program penyusunan data dasar pembangunan	13,207,100	6,660,600	50.43%	50.43%
6	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	9,689,337,080	3,108,159,089	32.08%	32.08%
8	Badan Kepegawaian Daerah	10,344,182,900	2,882,244,261	33.88%	27.86%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	274,956,800	87,733,246	47.77%	31.91%

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH ANGGARAN PADA DPA (Rp)	BULAN MEI		
			REALISASI PENYERAPAN (Rp)	CAPAIAN REALISASI KINERJA FISIK	CAPAIAN REALISASI KINERJA KEUANGAN
				(%)	(%)
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	103,890,000	37,049,778	35.66%	35.66%
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	65,250,000	22,096,000	50.99%	33.86%
4	Program penyusunan data dasar pembangunan	9,967,000	2,573,500	25.82%	25.82%
5	Program Manajemen Kepegawaian Daerah	9,890,119,100	2,732,791,737	33.46%	27.63%
9	Sekretariat Daerah	16,515,011,584	6,705,811,561	42.97%	40.60%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4,501,035,684	1,631,225,693	36.24%	36.24%
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1,829,709,800	689,485,610	40.41%	37.68%
3	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	84,000,000	38,477,200.00	76.90%	45.81%
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	191,900,000	81,703,200	43.37%	42.58%
	Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan	10,000,000	6,397,900	64.00%	63.98%
5	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan	5,741,623,900	2,657,069,668	48.20%	46.28%
6	Program Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah	603,256,900	243,917,736	55.67%	40.43%
7	Program Koordinasi Perangkat Daerah	1,802,887,700	655,846,230	43.11%	36.38%
8	Program Pelayanan Komunikasi Publik	157,433,000	21,021,100	14.00%	13.35%
9	Program Fasilitasi dan Koordinasi Kehidupan Beragama	1,593,164,600	680,667,224	51.99%	42.72%
10	Din Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	13,910,598,300	4,205,526,106	39.42%	30.23%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	681,047,400	225,771,504	42.33%	33.15%
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	321,415,600	69,447,221	29.57%	21.61%
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	95,105,400	47,865,700	59.55%	50.33%
4	Program penyusunan data dasar pembangunan	18,848,000	5,772,800	37.00%	30.63%
5	Program Penanganan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	2,979,108,500	1,065,700,080	52.39%	35.77%
6	Program Penghargaan Kepahlawanan	77,288,400	4,052,400	26.35%	5.24%
7	Program Pemberdayaan Perempuan dan Anak	869,500,000	307,174,348	41.67%	35.33%

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH ANGGARAN PADA DPA (Rp)	BULAN MEI		
			REALISASI PENYERAPAN (Rp)	CAPAIAN REALISASI KINERJA FISIK	CAPAIAN REALISASI KINERJA KEUANGAN
				(%)	(%)
8	Program Keluarga Berencana (KB)	8,462,285,000	2,312,234,303	33.97%	27.32%
9	Program Keluarga Sejahtera	292,000,000	145,539,350	63.18%	49.84%
10	Program Peningkatan Kepesertaan KB bagi Pasangan Usia Subur Miskin	114,000,000	21,968,400	30.00%	19.27%
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4,347,664,600	2,168,515,966	53.39%	49.88%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	525,699,300	209,804,629	41.78%	39.91%
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	234,293,700	82,302,204	35.13%	35.13%
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	91,961,700	39,948,217	49.04%	43.44%
4	Program Pelayanan Administrasi Kependudukan	3,495,709,900	1,836,460,916	56.58%	52.53%
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5,382,270,400	2,099,939,529	44.50%	39.02%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	374,699,000	149,853,591	39.99%	39.99%
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	160,923,300	81,800,210	50.83%	50.83%
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	107,153,700	45,313,000	42.29%	42.29%
4	Program penyusunan data dasar pembangunan	20,000,000	7,405,300	37.03%	37.03%
5	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4,501,824,600	1,738,513,178	46.90%	38.62%
6	Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin	75,328,000	28,191,950	37.43%	37.43%
7	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	142,341,800	48,862,300	34.33%	34.33%
13	Dinas Perhubungan	14,184,913,700	5,039,943,259	43.55%	35.53%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	386,140,700	149,262,809	41.97%	38.66%
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	185,924,000	107,233,328	58.84%	57.68%
3	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	47,640,000	6,120,000	34.29%	12.85%
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	70,512,200	29,649,500	45.11%	42.05%
5	Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan	17,538,600	7,841,900	45.00%	44.71%
6	Program Pengelolaan Transportasi Darat	13,477,158,200	4,739,835,722	43.41%	35.17%
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	11,209,531,643	2,754,273,810	42.11%	24.57%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	399,309,100	88,207,395	39.35%	22.09%

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH ANGGARAN PADA DPA (Rp)	BULAN MEI		
			REALISASI PENYERAPAN (Rp)	CAPAIAN REALISASI KINERJA FISIK	CAPAIAN REALISASI KINERJA KEUANGAN
				(%)	(%)
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	179,807,943	51,310,736	63.88%	28.54%
3	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	74,980,000	625,000	5.00%	0.83%
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	90,000,000	35,124,103	57.89%	39.03%
5	Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan	20,000,000	6,317,600	43.00%	31.59%
6	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	9,323,183,700	2,333,275,560	42.84%	25.03%
7	Program Penyusunan Statistik	340,000,000	86,818,725	44.29%	25.53%
8	Program Penyelenggaraan Persandian	43,085,000	12,129,891	40.00%	28.15%
9	Program Pelayanan Komunikasi Publik	739,165,900	140,464,800	42.75%	19.00%
15	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah & Perdagangan	14,587,276,105	3,458,697,135	26.09%	23.71%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	202,844,000	89,936,224	47.69%	44.34%
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	77,766,000	37,451,551	55.28%	48.16%
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	29,688,100	17,417,000	68.19%	58.67%
4	Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan	19,497,200	-	0.00%	0.00%
5	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Daerah	1,696,000,000	136,738,700	10.87%	8.06%
6	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	660,000,000	304,729,448	50.27%	46.17%
7	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil	2,199,548,600	861,224,913	44.18%	39.15%
8	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan	9,151,597,205	1,807,154,983	21.11%	19.75%
9	Program Peningkatan Promosi Perdagangan	550,335,000	204,044,316	41.10%	37.08%
16	Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1,501,666,300	565,026,304	45.72%	37.63%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	284,217,900	81,012,586	32.85%	28.50%
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	94,866,000	41,695,274	46.54%	43.95%
3	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	23,360,000	-	6.00%	0.00%
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	28,359,600	5,367,800	26.48%	18.93%

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH ANGGARAN PADA DPA (Rp)	BULAN MEI		
			REALISASI PENYERAPAN (Rp)	CAPAIAN REALISASI KINERJA FISIK	CAPAIAN REALISASI KINERJA KEUANGAN
				(%)	(%)
5	Program penyusunan data dasar pembangunan	7,500,000	-	0.00%	0.00%
6	Program Fasilitasi Penyelenggaraan Energi Sumber Daya Mineral	9,000,000	-	0.00%	0.00%
7	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	643,618,000	351,271,524	62.45%	54.58%
8	Program Peningkatan Promosi Investasi	410,744,800	85,679,120	33.43%	20.86%
17	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3,582,926,300	1,291,289,278	40.80%	36.04%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	419,218,900	131,070,953	31.27%	31.27%
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	203,919,800	96,467,976	47.31%	47.31%
3	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	36,300,200	480,000	1.32%	1.32%
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	39,366,500	16,705,750	42.44%	42.44%
5	Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan	100,000,000	33,848,350	33.85%	33.85%
6	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Daerah	2,784,120,900	1,012,716,249	36.37%	36.37%
18	Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran	2,689,526,700	1,300,104,146	53.23%	48.34%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	189,247,700	77,384,439	40.89%	40.89%
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	118,250,000	65,564,426	55.45%	55.45%
3	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	61,159,500	10,373,000	16.96%	16.96%
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	34,613,000	8,664,200	25.03%	25.03%
5	Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan	8,714,700	1,196,300	13.73%	13.73%
6	Program Pemeliharaan Keamanan, ketertiban dan Ketentraman Masyarakat serta pencegahan tindak kriminal	1,631,097,400	902,661,481	57.09%	55.34%
7	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	646,444,400	234,260,300	36.24%	36.24%
19	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	2,186,461,100	876,749,066	51.50%	40.10%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	160,619,400	51,192,286	31.87%	31.87%
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	75,411,700	28,707,800	38.07%	38.07%
3	Program peningkatan kapasitas sumber daya	7,430,000	4,185,000	56.33%	56.33%

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH ANGGARAN PADA DPA (Rp)	BULAN MEI		
			REALISASI PENYERAPAN (Rp)	CAPAIAN REALISASI KINERJA FISIK	CAPAIAN REALISASI KINERJA KEUANGAN
				(%)	(%)
	aparatur				
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	27,000,000	9,555,980	35.39%	35.39%
5	Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan	5,000,000	120,000	2.40%	2.40%
6	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	330,000,000	96,002,800	29.09%	29.09%
7	Program Pendidikan Politik Masyarakat	176,000,000	114,224,900	64.90%	64.90%
8	Program Peningkatan Kewaspadaan Dini dan Pembinaan Masyarakat	1,405,000,000	572,760,300	40.77%	40.77%
20	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	34,329,602,090	7,041,505,583	24.75%	20.51%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	259,305,900	97,325,554	54.32%	37.53%
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	93,416,000	47,332,150	73.18%	50.67%
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	41,212,000	19,695,650	66.16%	47.79%
4	Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan	21,000,000	9,855,000	58.93%	46.93%
5	Program Pengembangan dan Pelestarian Seni dan Budaya	1,646,945,000	538,484,300.00	49.77%	32.70%
6	Program Pelestarian Pengelolaan Nilai Sejarah, Nilai Budaya, dan Kepurbakalaan	820,000,000	73,350,244	16.25%	8.95%
7	Program Pembinaan Seni Budaya dan Adat Daerah	143,770,000	63,329,400	61.43%	44.05%
8	Program Pembinaan Prestasi Seni dan Organisasi	524,496,000	102,932,500	35.34%	19.63%
9	Program Pengembangan Wahana Seni Budaya	191,797,000	65,793,557	46.80%	34.30%
10	Program Pengembangan Destinasi, Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	30,587,660,190	6,023,407,228	22.66%	19.69%
21	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1,637,439,800	506,614,806	40.88%	30.94%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	218,252,300	86,935,770	47.00%	39.83%
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	96,269,000	33,174,896	42.00%	34.46%
3	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	73,862,700	35,338,600	50.00%	47.84%
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	104,990,200	42,093,800	48.00%	40.09%
5	Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan	15,033,500	1,820,000	25.00%	12.11%

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH ANGGARAN PADA DPA (Rp)	BULAN MEI		
			REALISASI PENYERAPAN (Rp)	CAPAIAN REALISASI KINERJA FISIK	CAPAIAN REALISASI KINERJA KEUANGAN
				(%)	(%)
6	Program Pengelolaan, Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Daerah	542,254,200	166,676,940	56.00%	30.74%
7	Program Pengelolaan, Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan	586,777,900	140,574,800	41.00%	23.96%
22	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan & Perikanan	13,328,125,600	3,180,238,251	31.70%	23.86%
1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	923,166,100	116,916,744	13.10%	12.66%
2	Program Peningkatan Produksi Perikanan	1,269,144,800	68,724,904	58.08%	5.42%
3	Program Agribisnis Komoditas Unggulan Perikanan	21,198,000	1,992,300	9.40%	9.40%
4	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	504,753,300	198,650,751	46.47%	39.36%
5	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	343,519,000	126,723,113	38.16%	36.89%
6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	65,805,000	38,059,450	55.99%	57.84%
7	Penyusunan Data Dasar Pembangunan	119,967,000	43,677,371	40.00%	36.41%
8	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perkebunan	372,625,400	183,132,100	48.00%	49.15%
9	Program Peningkatan Produksi Peternakan	2,094,492,200	95,611,600	8.77%	4.56%
10	Program Peningkatan Produksi/Produktivitas Perkebunan	399,564,000	134,253,700	38.06%	33.60%
11	Program Penerapan Teknologi Pertanian	399,160,100	134,889,389	42.62%	33.79%
12	Program Pemberdayaan Penyuluh dan Peningkatan Penyuluhan Pertanian	2,271,981,600	675,244,610	32.28%	29.72%
13	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian	2,605,264,600	646,438,450	26.28%	24.81%
14	Program Agribisnis Komoditas Unggulan Pertanian dan Peternakan	1,937,484,500	715,923,769	41.92%	36.95%
23	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	4,558,555,355	1,777,333,840	60.35%	38.99%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	703,198,810	199,633,983	28.39%	28.39%
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	233,622,400	37,583,106	16.09%	16.09%
3	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	12,508,200	1,460,100	12.30%	11.67%
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	129,949,200	40,832,200	41.43%	31.42%
5	Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan	24,623,500	7,668,100	0.00%	31.14%

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH ANGGARAN PADA DPA (Rp)	BULAN MEI		
			REALISASI PENYERAPAN (Rp)	CAPAIAN REALISASI KINERJA FISIK	CAPAIAN REALISASI KINERJA KEUANGAN
				(%)	(%)
6	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1,391,065,645	791,293,800	31.14%	56.88%
7	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	348,770,200	160,135,800	69.00%	45.91%
8	Program Pengembangan dan Perlindungan Tenaga Kerja	423,594,400	158,269,700	55.91%	37.36%
9	Program Pengelolaan Industri Kecil dan Menengah	649,941,000	331,362,412	85.00%	50.98%
10	Program Agribisnis Komoditas Unggulan di Sektor Hilir	288,286,700	1,634,000	10.00%	0.57%
11	Program Penyelenggaraan Transmigrasi	352,995,300	47,460,639	18.50%	13.45%
24	Sekretariat DPRD	24,996,120,016	8,952,498,469	49.80%	35.82%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,456,913,500	572,338,243	39.28%	39.28%
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	776,372,816	183,588,551	23.65%	23.65%
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	44,308,500	15,977,000	36.06%	36.06%
4	Program Dukungan Penyelenggaraan Fungsi DPRD	22,718,525,200	8,180,594,675	36.01%	36.01%
25	Inspektorat	4,521,257,400	1,160,577,452	35.43%	25.67%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	244,091,000	86,844,389	42.45%	35.58%
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	186,376,400	64,176,327	37.01%	34.43%
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	31,900,000	13,095,500	45.02%	41.05%
4	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	4,058,890,000	996,461,236	34.86%	24.55%
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3,698,032,702	1,034,263,488	40.80%	27.97%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	323,373,102	149,394,573	46.20%	46.20%
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	145,628,000	57,330,778	39.37%	39.37%
3	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	52,000,000	19,139,200	36.81%	36.81%
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	75,900,000	36,067,890	47.52%	47.52%
5	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	2,689,919,400	731,665,247	27.20%	27.20%
6	Program Penelitian dan Pengembangan	411,212,200	40,665,800	9.89%	9.89%
27	Kecamatan Grabag	1,069,989,000	418,586,418	52.74%	39.12%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	127,253,000	43,244,168	40.99%	33.98%

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH ANGGARAN PADA DPA (Rp)	BULAN MEI		
			REALISASI PENYERAPAN (Rp)	CAPAIAN REALISASI KINERJA FISIK	CAPAIAN REALISASI KINERJA KEUANGAN
				(%)	(%)
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	172,842,000	126,976,300	79.80%	73.46%
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	16,050,000	3,022,950	18.85%	18.83%
4	Program penyusunan data dasar pembangunan	33,259,000	7,851,900	40.00%	23.61%
5	Program Koordinasi Tingkat Kecamatan	287,375,000	101,457,150	46.44%	35.30%
6	Program Pembinaan Desa/Kelurahan	378,210,000	86,979,450	44.81%	23.00%
7	Program Pelayanan Masyarakat	55,000,000	49,054,500	100.00%	89.19%
28	Kecamatan Ngombol	901,471,100	350,953,381	39.78%	38.93%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	146,124,600	51,633,081	38.45%	35.33%
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	297,888,500	96,648,900	33.46%	32.44%
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	12,000,000	4,585,000	39.20%	38.21%
4	Program penyusunan data dasar pembangunan	13,950,000	7,906,000	57.00%	56.67%
5	Program Koordinasi Tingkat Kecamatan	363,135,000	155,095,200	43.00%	42.71%
6	Program Pembinaan Desa/Kelurahan	60,000,000	31,046,400	52.56%	51.74%
7	Program Pelayanan Masyarakat	8,373,000	4,038,800	48.23%	48.24%
29	Kecamatan Purwodadi	600,796,500	225,140,580	39.13%	37.47%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	121,362,500	54,758,563	47.79%	45.12%
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	87,095,600	35,583,617	41.63%	40.86%
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	14,770,000	6,257,100	43.00%	42.36%
4	Program penyusunan data dasar pembangunan	13,102,400	13,102,400	100.00%	100.00%
5	Program Koordinasi Tingkat Kecamatan	275,350,000	96,004,900	36.89%	34.87%
6	Program Pembinaan Desa/Kelurahan	83,616,000	16,304,000	20.21%	19.50%
7	Program Pelayanan Masyarakat	5,500,000	3,130,000	57.00%	56.91%
30	Kecamatan Bagelen	482,659,556	193,919,971	42.71%	40.18%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	108,295,556	42,757,671	41.34%	39.48%
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	49,989,000	23,964,800	48.18%	47.94%

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH ANGGARAN PADA DPA (Rp)	BULAN MEI		
			REALISASI PENYERAPAN (Rp)	CAPAIAN REALISASI KINERJA FISIK	CAPAIAN REALISASI KINERJA KEUANGAN
				(%)	(%)
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	27,638,800	11,130,500	43.06%	40.27%
4	Program penyusunan data dasar pembangunan	9,090,900	2,911,300	35.10%	32.02%
5	Program Koordinasi Tingkat Kecamatan	236,665,300	103,562,600	46.91%	43.76%
6	Program Pembinaan Desa/Kelurahan	45,930,600	5,898,400	13.36%	12.84%
7	Program Pelayanan Masyarakat	5,049,400	3,694,700	100.00%	73.17%
31	Kecamatan Kaligesing	500,898,100	157,143,248	53.45%	31.37%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	73,134,300	31,585,373	48.95%	43.19%
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	90,057,200	51,893,775	73.88%	57.62%
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	14,655,400	6,687,500	55.05%	45.63%
4	Program penyusunan data dasar pembangunan	6,599,900	-	30.00%	0.00%
5	Program Koordinasi Tingkat Kecamatan	189,590,100	40,638,100	55.36%	21.43%
6	Program Pembinaan Desa/Kelurahan	121,861,200	21,838,500	37.26%	17.92%
7	Program Pelayanan Masyarakat	5,000,000	4,500,000	90.00%	90.00%
32	Kecamatan Purworejo	16,220,374,574	2,853,122,463	29.83%	17.59%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	914,676,374	204,703,693	22.38%	22.38%
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	544,219,000	44,359,327	8.15%	8.15%
3	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	8,852,300	-	0.00%	0.00%
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	34,299,600	7,446,800	21.71%	21.71%
5	Program penyusunan data dasar pembangunan	11,399,200	-	0.00%	0.00%
6	Program Koordinasi Tingkat Kecamatan	156,894,400	60,801,300	38.75%	38.75%
7	Program Pembinaan Desa/Kelurahan	14,550,033,700	2,535,811,343	17.43%	17.43%
33	Kecamatan Banyuurip	3,803,574,700	735,547,264	21.74%	19.34%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	235,592,000	51,491,046	31.39%	21.86%
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	140,037,900	87,582,525	70.41%	62.54%
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	12,390,000	5,917,000	47.76%	47.76%
4	Program penyusunan data	5,060,000	757,100	14.96%	14.96%

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH ANGGARAN PADA DPA (Rp)	BULAN MEI		
			REALISASI PENYERAPAN (Rp)	CAPAIAN REALISASI KINERJA FISIK	CAPAIAN REALISASI KINERJA KEUANGAN
				(%)	(%)
	dasar pembangunan				
5	Program Koordinasi Tingkat Kecamatan	169,992,900	88,814,700	52.25%	52.25%
6	Program Pembinaan Desa/Kelurahan	3,237,212,300	499,288,093	15.42%	15.42%
7	Program Pelayanan Masyarakat	3,289,600	1,696,800	51.58%	51.58%
34	Kecamatan Bayan	1,688,062,700	313,010,712	24.18%	18.54%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	185,199,700	58,835,312	47.38%	31.77%
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	154,088,900	90,696,000	69.46%	58.86%
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	9,999,500	4,003,400	42.74%	40.04%
4	Program penyusunan data dasar pembangunan	2,999,900	1,766,400	63.110%	58.88%
5	Program Koordinasi Tingkat Kecamatan	151,274,800	52,494,100	44.47%	34.70%
6	Program Pembinaan Desa/Kelurahan	1,164,499,900	98,068,200	12.72%	8.42%
7	Program Pelayanan Masyarakat	20,000,000	7,147,300	42.64%	35.74%
35	Kecamatan Kutoarjo	7,103,112,200	1,015,539,440	21.91%	14.30%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	269,623,800	58,195,623	50.54%	21.58%
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	282,640,000	181,650,275	86.16%	64.27%
3	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	9,670,000	3,085,200	31.90%	31.90%
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	18,525,900	7,006,300	42.52%	37.82%
5	Program penyusunan data dasar pembangunan	15,962,700	2,279,100	53.60%	14.28%
6	Program Koordinasi Tingkat Kecamatan	283,105,000	110,560,700	43.60%	39.05%
7	Program Pembinaan Desa/Kelurahan	6,215,000,000	649,229,442	18.07%	10.45%
8	Program Pelayanan Masyarakat	8,584,800	3,532,800	41.150%	41.15%
36	Kecamatan Gebang	1,899,854,100	486,498,563	27.48%	25.61%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	204,634,300	62,010,273	30.30%	30.30%
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	241,490,400	176,700,718	73.17%	73.17%
3	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	7,235,600	3,617,800	50.00%	50.00%
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	21,498,000	7,961,000	37.03%	37.03%

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH ANGGARAN PADA DPA (Rp)	BULAN MEI		
			REALISASI PENYERAPAN (Rp)	CAPAIAN REALISASI KINERJA FISIK	CAPAIAN REALISASI KINERJA KEUANGAN
				(%)	(%)
5	Program penyusunan data dasar pembangunan	19,545,600	-	0.00%	0.00%
6	Program Koordinasi Tingkat Kecamatan	283,131,600	99,009,300	34.97%	34.97%
7	Program Pembinaan Desa/Kelurahan	1,100,796,600	132,449,472	12.03%	12.03%
8	Program Pelayanan Masyarakat	21,522,000	4,750,000	22.07%	22.07%
37	Kecamatan Butuh	930,229,600	522,608,818	57.28%	56.18%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	132,785,400	55,468,318	42%	41.77%
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	227,832,600	189,315,000	87.30	83.09%
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	18,076,000	9,236,800	51.00	51.10%
4	Program penyusunan data dasar pembangunan	10,171,400	-	0.00	0.00%
5	Program Koordinasi Tingkat Kecamatan	191,342,900	107,880,300	57.89	56.38%
6	Program Pembinaan Desa/Kelurahan	338,021,300	154,939,900	46.00	45.84%
7	Program Pelayanan Masyarakat	12,000,000	5,768,500	48.00	48.07%
38	Kecamatan Pituruh	808,860,400	320,644,493	43.00%	39.64%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	135,705,000	59,157,093	44.00%	43.59%
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	115,842,600	67,110,500	61.58%	57.93%
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	20,000,000	7,372,400	41.75%	36.86%
4	Program penyusunan data dasar pembangunan	5,500,000	125,000	44.51%	2.27%
5	Program Koordinasi Tingkat Kecamatan	341,483,800	142,095,500	44.40%	41.61%
6	Program Pembinaan Desa/Kelurahan	179,329,000	40,682,400	29.12%	22.69%
7	Program Pelayanan Masyarakat	11,000,000	4,101,600	39.16%	37.29%
39	Kecamatan Kemiri	728,857,500	293,272,923	50.91%	40.24%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	140,996,700	52,059,973	46.15%	36.92%
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100,175,800	46,878,750	60.45%	46.80%
3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	48,000,000	8,135,000	42.37%	16.95%

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH ANGGARAN PADA DPA (Rp)	BULAN MEI		
			REALISASI PENYERAPAN (Rp)	CAPAIAN REALISASI KINERJA FISIK	CAPAIAN REALISASI KINERJA KEUANGAN
				(%)	(%)
4	Program penyusunan data dasar pembangunan	15,613,600	8,088,000	57.00%	51.80%
5	Program Koordinasi Tingkat Kecamatan	252,632,200	117,994,300	56.35%	46.71%
6	Program Pembinaan Desa/Kelurahan	156,439,200	51,119,200	40.98%	32.68%
7	Program Pelayanan Masyarakat	15,000,000	8,997,700	65.00%	59.98%
40	Kecamatan Bruno	709,582,900	289,058,277	47.48%	40.74%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	192,524,800	78,206,077	47.70%	40.62%
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	60,639,500	21,432,000	29.00%	35.34%
3	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	3,500,000	-	0.00%	0.00%
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	10,999,800	5,624,800	49.36%	51.14%
5	Program penyusunan data dasar pembangunan	5,999,800	2,000,000	41.00%	33.33%
6	Program Koordinasi Tingkat Kecamatan	235,943,300	94,459,200	50.62%	40.03%
7	Program Pembinaan Desa/Kelurahan	169,675,700	74,394,900	48.39%	43.85%
8	Program Pelayanan Masyarakat	30,300,000	12,941,300	50.98%	42.71%
41	Kecamatan Loano	789,555,100	272,003,500	45.18%	34.45%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	166,050,100	51,335,686	38.88%	30.92%
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	108,400,000	50,133,000	63.43%	46.25%
3	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	7,500,000	2,691,790	38.00%	35.89%
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	20,000,000	7,299,092	42.5%	36.50%
5	Program penyusunan data dasar pembangunan	14,500,000	7,620,740	46.00%	52.56%
6	Program Koordinasi Tingkat Kecamatan	274,605,000	81,581,216	44.91%	29.71%
7	Program Pembinaan Desa/Kelurahan	190,000,000	68,619,376	41.71%	36.12%
8	Program Pelayanan Masyarakat	8,500,000	2,722,600	33.00%	32.03%
42	Kecamatan Bener	805,096,000	342,429,616	42.96%	42.53%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	178,276,100	66,100,966	61.00%	37.08%
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	178,784,100	127,311,750	71.21%	71.21%
3	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	8,000,000	3,205,100	40.06%	40.06%
4	Program peningkatan pengembangan sistem	17,400,000	6,364,900	56.33%	36.58%

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH ANGGARAN PADA DPA (Rp)	BULAN MEI		
			REALISASI PENYERAPAN (Rp)	CAPAIAN REALISASI KINERJA FISIK	CAPAIAN REALISASI KINERJA KEUANGAN
				(%)	(%)
	pelaporan capaian kinerja dan keuangan				
5	Program penyusunan data dasar pembangunan	11,628,000	-	0.00%	0.00%
6	Program Koordinasi Tingkat Kecamatan	232,945,500.00	93,488,900	40.13%	40.13%
7	Program Pembinaan Desa/Kelurahan	172,062,300.00	42,024,600	29.16%	24.42%
8	Program Pelayanan Masyarakat	6,000,000.00	3,933,400	65.56%	65.56%
JUMLAH		815,428,788,970	167,477,979,813	30.63%	20.54%

Sumber : Laporan hasil evaluasi RKPD Bulan Mei tahun 2019

Berdasarkan analisis kinerja program tingkat capaian RKPD Tahun 2018, terdapat beberapa indikator kinerja program yang bernilai di bawah 85%, sebagai berikut:

1. Urusan Pendidikan

a. Program Pendidikan Anak Usia Dini

Indikator persentase ketersediaan sarana prasarana penunjang pembelajaran PAUD dengan realisasi 34,81% target 46,60%. Pemberdayaan masyarakat dan keterlibatan pendanaan pemerintahan desa masih kurang sehingga indikator ini tidak tercapai.

b. Program Pendidikan Masyarakat

Indikator Persentase Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) berkinerja A dan B. Dengan target 43,13% realisasi 30%. Salah satu faktor indikator ini tidak tercapai adalah masih kurang profesionalnya pengelola dalam meningkatkan kinerja LKP yang sesuai standar.

c. Program Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun

Persentase SMP yang memiliki Laboratorium Penunjang dari target 83,51% terealisasi 70%, permasalahan yang ada karena faktor keterbatasan alokasi pendanaan baik pusat maupun daerah.

Realisasi indikator Persentase SD yang memiliki sanitasi layak masih 84,76% dari target 100%. Hal ini dikarenakan masih perlunya peningkatan perilaku pola hidup bersih dan sehat di sekolah.

Angka Putus Sekolah jenjang SD/SDLB/MI dari target 0,03% terealisasi 0,08%, jenjang SMP/SMPLB/MTs target 0,06% terealisasi 0,45%. Faktor yang mempengaruhi angka putus sekolah adalah faktor lingkungan keluarga dalam bentuk hubungan keluarga yang kurang harmonis, faktor lingkungan sekolah dalam bentuk anak sering mengalami konflik dengan sesama teman di sekolah, faktor lingkungan masyarakat tempat tinggal yang mayoritas berpendidikan rendah, faktor ekonomi dalam bentuk kurangnya perhatian orang tua, faktor minat anak dan jarak tempuh antara tempat tinggal dan sekolah dan faktor kondisi geografis.

Angka lulus pendidikan kesetaraan paket A dan paket B dari target masing-masing 100% terealisasi 68,18% dan target 100% terealisasi 83,94% hal ini dikarenakan masih heterogennya kemampuan warga belajar paket A dan B yang dipengaruhi oleh faktor usia. Perlu dilaksanakan peningkatan kualitas proses pembelajaran program kesetaraan paket A dan B. Kesadaran masyarakat untuk mengikuti paket A dan B masih perlu ditingkatkan.

d. Program Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Indikator Kepala SMP berkualifikasi akademik S-1 / D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masih mencapai target 90% dari target yang ditentukan 68%, dikarenakan masih ditemui sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam melakukan rekrutmen Kepala Sekolah belum memperhatikan kualifikasi sebagai Kepala Sekolah. Pemerintah daerah menghimbau kepada sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam melakukan rekrutmen Kepala Sekolah agar memperhatikan kualifikasi sebagai dasar pengangkatan Kepala Sekolah.

Cakupan sekolah berbasis e-learning (creative multi media) masih dapat terealisasi 11,64% dari target 17,10%. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan akses dan SDM dalam rangka pelaksanaan e-learning.

2. Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

a. Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Persentase TPA yang memenuhi kriteria dan dioperasikan secara layak target 80% realisasi 44% hal ini disebabkan TPA yang ada belum bisa melayani seluruh wilayah di Kabupaten Purworejo.

b. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah

Indikator tersedianya peraturan dan informasi Rencana Umum dan rinci Tata Ruang (RTRW, RDTR dan RTR kawasan strategis) target 19,05%, masih terealisasi 14,29%. Hal ini dikarenakan revisiregulasi/peraturan RTRW belum disahkan, sehingga peraturan dan kegiatan yang berkaitan dengan RTRW menjadi terhambat yaitu RDTR dan RTRK.

c. Program Penataan Bangunan dan Lingkungan

Pada indikator persentase kesesuaian bangunan dengan RTBL dari target 8% baru terealisasi 2,50% sehingga tingkat capaian 31%. Hal ini dikarenakan bangunan gedung yang terinventarisir belum semua memiliki IMB.

d. Program Pengembangan dan Pengelolaan Bangunan Gedung

Cakupan penanganan bangunan gedung negara target 100% realisasi 42,78%, hal ini disebabkan jumlah gedung negara yang terinventarisir tidak semuanya dalam kondisi rusak, sehingga dapat dioptimalkan pemanfaatannya dengan pemeliharaan tidak harus dibangun.

e. Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi

Persentase pengurangan genangan air banjir pada irigasi kewenangan kabupaten dari target 33,82% masih tercapai 4,83%. Hal ini disebabkan perubahan iklim yang cukup ekstrim dan curah hujan yang tinggi, serta cakupan jaringan drainase yang belum memadai.

3. Urusan Trantibumlinmas

a. Program Peningkatan Kewaspadaan Dini dan Pembinaan Masyarakat

Tingkat koordinasi kerjasama penyelesaian konflik di daerah target 100% realisasi 67,51%, disebabkan antara lain belum optimalnya fungsi koordinasi forum komunikasi pimpinan daerah.

4. Urusan Lingkungan Hidup

a. Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan

Pada program ini masih terdapat indikator yang belum mencapai target RKPD pada tahun 2018, yaitu pada Indikator Persentase terpenuhinya baku mutu kualitas air sungai yang realisasi masih mencapai 50% dari target 75%. Adapun permasalahan yang ditemui yaitu kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan masih rendah.

5. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jumlah kelompok simpan pinjam kelompok perempuan yang aktif target 2845 realisasi 2168 kurang disiplinnya anggota kelompok dalam pengelolaan simpan pinjam.

Persentase pasar desa yang aktif target 75% realisasi 60% hal ini disebabkan kurangnya pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa dalam pengelolaan pasar desa.

b. Program Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pada Indikator Jumlah unit usaha BUMDes bersama dikarenakan belum adanya regulasi dari pemerintah pusat.

6. Urusan Perhubungan

a. Program Pengelolaan Transportasi Darat

Indikator Cakupan Ketersediaan APILL dari target 77% dan realisasinya yaitu 58% maka belum mencapai pada tahun 2018. Hal ini disebabkan perkembangan kondisi lapangan sudah tidak sesuai dengan prediksi/kajian awal.

b. Program Keselamatan Transportasi Darat (DAK)

Indikator Persentase tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten, saat ini capaiannya 52% dari target 75%. Hal ini dipengaruhi antara lain beberapa trayek angkudes sudah tidak beroperasi lagi dikarenakan sepi penumpang dan usia kendaraan.

7. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

a. Program Pengembangan Wahana Pemuda dan Olahraga

Tersediannya tempat pembinaan pemuda dan olahraga target 100% capaian 50%, hal ini dikarenakan pembangunan heroes park

Purworejo sebagai salah satu wahana pemuda dan olahraga baru akan dilaksanakan pada tahun 2019.

8. Urusan Kelautan dan Perikanan

a. Program Peningkatan Produksi Perikanan

Indikator Persentase kenaikan produksi perikanan budidaya (per tahun) realisasi 3% dari target 4% disebabkan beberapa jenis komoditas perikanan tidak ekonomis dibudidayakan sehingga tidak menarik minat masyarakat.

b. Program Agribisnis Komoditas Unggulan Perikanan

Indikator Cakupan wilayah pengembangan TPI belum mencapai target 7 TPI dengan realisasi 5 TPI mengalami kendala masih terbatasnya jumlah nelayan dan produksi ikan sehingga belum adanya pengembangan TPI maka yang harus dilaksanakan TPI yang sudah ada untuk dikembangkan.

9. Urusan Pertanian

a. Program Agribisnis Komoditas Unggulan Pertanian dan Peternakan

Produksi biofarmaka (ton/th) target 4.750 realisasi 3.891,80, faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya indikator adalah belum adanya kejelasan pasar sehingga minat masyarakat untuk budidaya masih rendah.

Persentase kenaikan populasi ternak kambing kaligesing target 0,50% realisasi -5,5%, berkurangnya populasi kambing ras kaligesing adalah Kabupaten Purworejo ditetapkan sebagai sumber bibit nasional Kambing ras Kaligesing oleh Menteri Pertanian sehingga banyak kambing ras kaligesing yang dibeli oleh pedagang/peternak dari luar wilayah Kabupaten Purworejo. Sementara dari pihak pemerintah daerah sudah melakukan antisipasi agar bibit unggul tidak keluar kaligesing dengan pembinaan.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Mendasari hasil pengolahan data dan informasi pembangunan daerah tahun 2018, permasalahan strategis pembangunan Kabupaten Purworejo yang sedang dan akan dihadapi tahun 2019 dan harus diselesaikan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan daerah tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya infrastruktur dasar dan interkoneksi antar wilayah guna mendukung investasi dan pengembangan wilayah
2. Belum optimalnya layanan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.
3. Belum meratanya kualitas pelayanan pendidikan.
4. Masih rendahnya prestasi pemuda dan olahraga.
5. Masih sedikitnya penyelenggaraan *event* budaya serta pelestarian nilai-nilai budaya daerah
6. Masih lemahnya ketahanan air.
7. Belum optimalnya pengelolaan potensi daerah dibidang pertanian dalam arti luas, pariwisata, industri, koperasi, usaha mikro kecil menengah, perdagangan dan investasi.
8. Belum optimalnya ketahanan pangan.
9. Masih rendahnya kualitas lingkungan hidup.
10. Belum terwujudnya kemandirian desa.
11. Masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran.
12. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik dan kondusivitas daerah (ketentraman ketertiban masyarakat, kerentanan konflik sosial/kehidupan beragama) serta pengelolaan bencana.
13. Masih rendahnya inovasi daerah dan teknologi tepat guna

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2018 yang terdiri atas 90 indikator sasaran, terdapat beberapa indikator yang belum terpenuhi dan menjadi permasalahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan PDRB sektor pertanian tahun 2017 target 4,54% terealisasi 1,43% (BPS, 2018). Salah satu sebab menurunnya peran pertanian adalah luas lahan pada lapangan usaha tersebut lambatnya kenaikan harga produk lapangan usaha tersebut dibandingkan produk lainnya. Pada Tahun 2017 terjadi anomaly cuaca El Nino di awal tahun berlanjut el Nina di pertengahan hingga akhir yang berdampak kurang baik bagi produktivitas pertanian karena banyak tanaman yang terserang hama penyakit.
2. Nilai Tukar Petani (NTP) pada tahun 2018 tingkat capaiannya adalah 96%. Pada tahun 2018 NTP Kabupaten Purworejo berada pada posisi diatas angka 100. Hal ini menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2018, sebagian besar petani di Kabupaten Purworejo mengalami surplus, artinya dari hasil pertanian yang diterima petani bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga petani dan kebutuhan untuk modal usaha pertanian. Target NTP tahun 2018 adalah 104,41% realisasi 100,66% . Naik turunnya NTP dipengaruhi oleh NTP per subsector, baik subsector tanaman pangan, hortikultura tanaman perkebunan rakyat, peternakan maupun perikanan. Nilai NTP pada subsector perkebunan rakyat mengalami penurunan sebesar 2,2% dan subsector peternakan berada dibawah 100.
3. Pertumbuhan PDRB sektor industri sebesar 5,85% tercapai 4.91%. Permasalahan yang timbul adalah belum optimalnya kegiatan agroindustri dan belum optimalnya pembinaan industri kecil. Untuk mengatasi hal tersebut adalah meningkatkan daya saing industri kecil dan menengah, dengan arah kebijakan, melaksanakan pengelolaan industri kecil dan menengah melalui peningkatan kapasitas usaha, pelatihan dan magang.
4. Persentase pertumbuhan koperasi (baru, aktif dan sehat) target 83,50% tercapai 82.5%. Permasalahan yang ada adalah masih adanya koperasi yang tidak sehat. penilaian kesehatan koperasi belum bisa dinilai apabila belum melaksanakan RAT dan keterbatasan SDM untuk pembinaan koperasi. Peningkatan kuantitas dan kualitas koperasi melalui upaya penyehatan, pengawasan koperasi melaksanakan penumbuhan dan pemberdayaan koperasi, peningkatan kualitas kelembagaannya.

- Tingkat pertumbuhan koperasi relative tetap dari tahun 2017 sampai tahun 2018 yaitu 82,5%.
5. Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan target 5,82% terealisasi 5,71% , disebabkan perdagangan komoditas hasil pertanian memiliki nilai ekonomis yang fluktuatif dan cenderung rendah pada tahun 2018.
 6. Persentase Cakupan Air Minum target 97% realisasi 89%, hal ini disebabkan belum optimalnya penyerapan masyarakat terhadap akses air minum yang telah terbangun.
 7. Cakupan Akses Sanitasi layak target 97,34% realisasi 79,71%. Permasalahan masih kurangnya dukungan dana desa dan pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan akses sanitasi layak. Perilaku pola hidup bersih sehat masyarakat masih kurang.
 8. Persentase luas titik genangan yang tertangani target 46,38% tercapai 41,72%, Hal ini dikarenakan penanganan drainase masih fokus pada titik-titik genangan menyesuaikan dengan kemampuan pendanaan dan belum komprehensif. Sedangkan penanganan drainase yang komprehensif dari hilir menuju hulu memerlukan pendanaan yang besar. Laju sedimentasi yang tinggi sebagai akibat dari pola hidup masyarakat yang membuang limbah di saluran drainase. Drainase jalan di perkotaan menjadi satu dengan drainase permukiman. Hal ini berakibat dimensi saluran yang harus dibuat harus lebih besar sehingga dengan pendanaan yang sama menjadikan target panjang saluran yang ditangani berkurang
 9. Rasio Permukiman Layak Huni realisasi 69,84% dari target 71,86% faktor yang mempengaruhi tercapainya target adalah belum terintegrasinya kelembagaan pengelolaan urusan perumahan rakyat, masih kurang optimalnya sinkronisasi program/kegiatan antar OPD dalam rangka penanganan Permukiman Layak Huni
 10. Persentase Peningkatan Kesesuaian Arah Penggunaan Lahan belum sesuai target yang diharapkan tingkat capaian 97% , hal ini dikarenakan adanya perubahan pedoman penyusunan RTRW Kabupaten dengan ditetapkannya Permen ATR Nomor 1 Tahun 2018 sehingga memerlukan penyesuaian Raperda dengan pedoman tersebut. Target kegiatan Penyusunan RTRW pada Tahun 2018

sampai dengan rekomendasi Gubernur dan dari Menteri ATR akan tetapi baru tercapai sampai tahap persetujuan dari DPRD dan persetujuan peta dari BIG. Kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan setelah adanya revisi RTRW yang merupakan kegiatan-kegiatan lanjutan tentang RTRW juga terhambat seperti penetapan RDTR dan RTR Kawasan.

11. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD) target yang ingin dicapai sebesar 66,17% realisasi 58%. Hal ini dikarenakan kualitas air dan kualitas tutupan lahan masih belum memenuhi target sehingga IKLHD belum optimal.
12. Angka Harapan Lama Sekolah target yang ingin dicapai adalah 13,62 terealisasi 13,05. Kendala yang dihadapi adalah keterbatasan ekonomi masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat dan keterjangkauan akses pendidikan.
13. Indikator kinerja sasaran yang perlu perhatian adalah angka kematian ibu target pada tahun 2018 adalah 72/100.000 KH realisasi pada tahun 2018 adalah 78,8/100.000 KH. Belum semua ibu hamil mendapatkan pelayanan sesuai standar yaitu pemeriksaan kehamilan 1 kali pada Trimester 1 (0-12 minggu), 1 kali pada trimester 2 (12-24 minggu) dan 2 kali pada trimester 3 (24-36 minggu), hal ini karena masih ada ibu hamil yang kurang kesadaran untuk melakukan pemeriksaan kehamilan secara dini sehingga mendapatkan pelayanan kehamilan pertama kali pada usia lebih dari 12 minggu. Hal ini juga dipicu jauhnya jarak pelayanan kesehatan dengan tempat tinggal ibu hamil dan infrastuktur yang belum memadai terutama di desa di wilayah pegunungan.
14. Persentase desa cepat berkembang target 66.31% dengan capaian 5.97%. Kendalanya adalah belum adanya analisis desa membangun yang digunakan sebagai dasar pembangunan desa.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Sebelum merumuskan arah kebijakan perekonomian daerah, perlu dilakukan pembahasan terlebih dahulu terhadap arah kebijakan ekonomi secara nasional serta regional (Provinsi Jawa Tengah) yang dapat mempengaruhi kebijakan ekonomi Kabupaten Purworejo.

3.1.1 Arah Kebijakan Ekonomi Nasional

Perekonomian Indonesia pasca reformasi dalam dua dekade terakhir didorong oleh konsumsi rumah tangga dan investasi. Dengan kata lain, perekonomian Indonesia lebih didominasi oleh aktivitas domestik dibandingkan sektor eksternal (perdagangan luar negeri). Peran domestik yang kuat dan ditopang dengan kondisi ekonomi makro yang stabil telah mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,0 persen.

Ekonomi Indonesia pada tahun 2017 tumbuh utamanya didorong oleh peningkatan ekspor dan investasi. Peningkatan ekspor dipicu setidaknya oleh dua hal, yaitu harga komoditas di pasar internasional baik migas maupun nonmigas dan pemulihan kondisi perekonomian global terutama pada negara-negara yang menjadi mitra dagang Indonesia. Perbaikan dari eksternal juga diperkuat dengan kondisi internal dengan semakin tumbuhnya investasi di Indonesia.

Dorongan investasi yang tinggi pada tahun 2017 diikuti dengan peningkatan kebutuhan impor seperti bahan baku dan barang modal. Sebaliknya, konsumsi masyarakat tumbuh melambat yakni sebesar 4,9 persen (yoy) di bawah pertumbuhan rata-rata selama lima tahun terakhir sekitar 5,0 persen. Konsumsi LNPRT tumbuh 6,9 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan tahun 2016 seiring dengan pemilihan kepala daerah serentak di daerah kontributor utama ekonomi nasional yakni DKI Jakarta dan Banten.

Sementara itu, konsumsi pemerintah tumbuh 2,1 persen (yoy), mengalami akselerasi seiring dengan perbaikan kondisi fiskal pemerintah.

Tabel 3.1 Pertumbuhan PDB Sisi Permintaan

Uraian	2016a)	2017 a)	Realisasi Triwulan I Tahun	2018b)
Pertumbuhan PDB	5,0	5	5	5
Konsumsi Rumah Tangga	5,0	4	4	5
Konsumsi LNPRT	6,6	6	8	7
Konsumsi Pemerintah	(0,1)	2	2	4
Investasi (PMTB)	4,5	6	8	7,3
Ekspor Barang dan Jasa	(1,6)	9	6	6
Impor Barang dan Jasa	(2,4)	8	12,7	9

Sumber: RKP Nasional Tahun 2019

Di sisi penawaran, 3 (tiga) sektor yang memberikan kontribusi terbesar bagi PDB pada tahun 2017 adalah industri pengolahan, sektor pertanian, dan perdagangan. Sejak tahun 2014, peran sektor pertambangan dan penggalian secara perlahan digeser oleh sektor konstruksi yang secara bertahap mampu tumbuh di atas pertumbuhan nasional. Sektor pertanian mampu tumbuh 3,8 persen (yoy) yang didorong oleh kenaikan subsektor perikanan dan kehutanan serta kenaikan produksi kelapa sawit. Industri pengolahan cenderung stagnan dengan pertumbuhan sebesar 4,3 persen (yoy), disebabkan kontraksi pada industri batubara dan pengilangan migas, namun terbantu dengan peningkatan pada industri makanan dan minuman dengan industri pengolahan minyak kelapa sawit sebagai motornya. Sementara itu, sektor perdagangan tumbuh positif sebesar 4,4 persen (yoy), didorong oleh peningkatan produksi barang domestik dan volume impor barang.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I tahun 2018 mencapai 5,1 persen, lebih tinggi dibandingkan triwulan I tahun 2017 sebesar 5,0 persen. Akselerasi pertumbuhan ekonomi didorong utamanya oleh pertumbuhan investasi yang kuat, meski net ekspor berkontribusi negatif. Investasi tumbuh tinggi sebesar 8,0 persen didorong oleh pertumbuhan yang tinggi pada mesin dan perlengkapan dan perlengkapan lainnya, melanjutkan tren yang

dimulai sejak triwulan III tahun 2017. Tren ini menunjukkan sustainabilitas investasi ke depan yang sejalan dengan pertumbuhan impor barang modal.

Tabel 3.2 Pertumbuhan PDB Sisi Produksi

Uraian	2016 ^{a)}	2017 ^{a)}	Realisasi Triwulan I	2018 ^{b)}
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3	3,8	3	3,7
Pertambangan dan Penggalian	0	0,7	0	0,3
Industri Pengolahan	4	4,3	4	4,9
Pengadaan Listrik dan Gas, dan Air Bersih	5	1,5	3	3,2
Pengadaan Air	3	4,6	3	4,6
Konstruksi	5	6,8	7	6,7
Perdagangan besar dan eceran, dan reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4	4,4	5	5,9
Transportasi dan Pergudangan	7	8,5	8	8,7
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5	5,5	5	5,7
Informasi dan Komunikasi	8	9,8	8	10,6
Jasa Keuangan	8	5,5	4	7,3
Real Estate	4	3,7	3	4,2
Jasa Perusahaan	7	8,4	8	8,3
Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib	3	2,1	5	3,9
Jasa Pendidikan	3	3,7	4	5,6
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5	6,8	6	8,1
Jasa Lainnya	8	8,7	8	8,9

Sumber: RKP Nasional Tahun 2019

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi pada triwulan I tahun 2018 dialami oleh sektor informasi dan komunikasi, transportasi dan pergudangan, serta konstruksi. Perkembangan ekonomi digital atau e-commerce menjadi pendorong utama pertumbuhan kedua sektor pertama, sementara sektor konstruksi masih didorong oleh proyek infrastruktur pemerintah. Sektor dengan kontribusi terbesar terhadap PDB yaitu industri pengolahan kembali tumbuh di bawah pertumbuhan ekonomi nasional, yakni sebesar 4,50 persen.

Sepanjang tahun 2018, ekonomi Indonesia diperkirakan tumbuh lebih baik, didorong utamanya oleh investasi dan ekspor dan didukung konsumsi rumah tangga yang stabil. Penguatan investasi didukung berbagai perbaikan iklim investasi yang dilakukan

pemerintah dan dorongan belanja infrastruktur yang masih cukup besar. Sementara itu dari sisi eksternal, harga komoditas yang masih relatif tinggi akan mampu menjaga kinerja ekspor Indonesia.

Daya beli masyarakat diperkirakan akan meningkat di tahun 2018, didorong perbaikan kondisi ekonomi secara keseluruhan dan meningkatnya alokasi bantuan sosial yang akan membantu konsumsi masyarakat menengah ke bawah. Peningkatan juga akan bersumber dari kenaikan konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) seiring dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak di 171 wilayah.

Di sisi penawaran, sektor industri pengolahan dan pertanian masih menjadi motor penggerak ekonomi. Sektor-sektor pendukung pariwisata diperkirakan akan mengalami peningkatan seiring penyelenggaraan acara internasional seperti Asian Games, Asian Para Games, dan Pertemuan Tahunan Bank Dunia dan IMF di tahun 2018.

3.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Regional

Perekonomian Jawa Tengah tahun 2017 tumbuh sebesar 5,4%, lebih baik dibandingkan Tahun 2016 sebesar 5,28% dan perekonomian nasional sebesar 5,19%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen impor sebesar 24,11%, diikuti komponen ekspor sebesar 23,55%, dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 7,48%.

Adapun inflasi sampai dengan akhir tahun 2017 mencapai 3,71% meningkat dibanding tahun 2016 sebesar 2,36%. Hal ini antara lain disebabkan oleh meningkatnya harga berbagai kebutuhan bahan pokok masyarakat dan kelompok administred price. Prospek perekonomian Jawa Tengah tahun 2019 di proyeksikan tumbuh pada kisaran 5,2 – 5,6% dengan inflasi sebesar $4 \pm 1\%$.

Proyeksi perekonomian daerah Jawa Tengah tahun 2019 selengkapnya sebagai berikut.

Tabel 3.3 Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Jawa Tengah
Tahun 2018 dan 2019

No	Indikator	Realisasi 2017	2018	2019	
				Target Nasional	RKPD
1.	PDRB/PDB:				
	Atas dasar harga berlaku (Trilyun Rp)	1.150,45	1.378,144	n.a	1.276,72
	Atas dasar harga konstan (Trilyun Rp)	894,825	950,694	n.a	993,03
2.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,4	5,9 – 6,2	5,4 – 5,8	5,2 – 5,6
3.	Inflasi (%)	3,71	4,5 ± 1	2,5 – 4,5	4 ± 1
4.	PDRB/Kapita atas dasar harga berlaku (Juta Rp)	26,12	27,13	72,21	28,60
5.	Nilai Investasi PMA dan PMDN (Trilyun Rupiah)	33,023 (TW III)	46,704	n.a.	52,54
6.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	4,57 (agustus)	4,13	4 - 5	4,33 – 4,43

3.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Purworejo

Tema RKP Nasional Tahun 2020 adalah “*Peningkatan Sumber daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas*”, dengan sasaran dan target yang harus dicapai pada akhir Tahun 2020, antara lain:

- 1) Pertumbuhan Ekonomi Nasional (%): 5,3 - 5,8
- 2) Inflasi Nasional (%): 2,0 – 4,0
- 3) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Nasional (nilai): 72,5
- 4) Tingkat Kemiskinan Nasional (persen): 8,5 – 9,0
- 5) Gini Rasio Nasional (indeks): 0,375 – 0,380
- 6) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Nasional (persen): 4,8-5,1
- 7) Kesenjangan Wilayah (*Indeks Willamson*) Nasional: Masih relatif tinggi kesenjangan antara Wilayah Indonesia barat dan Wilayah Indonesia Timur.

Tema RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 adalah “*Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Peningkatan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia*”, dengan proyeksi Sasaran Makro Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020:

- 1) Pertumbuhan Ekonomi (%): 5,4 - 5,75
- 2) Inflasi (%): 3±1

- 3) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (nilai): 72
- 4) Tingkat Kemiskinan (persen): 9,81 – 8,81
- 5) Gini Rasio (indeks): 0,34
- 6) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (persen): 4,33
- 7) Kesenjangan Wilayah (*Indeks Williamson*): 0,35.

Sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi, maka arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Purworejo pada Tahun 2020 ditujukan dalam rangka pemantapan pembangunan secara menyeluruh diberbagai bidang dengan prioritas pada upaya:

- 1) Penguatan Ketahanan Air, Infrastruktur Dasar Dan Interkoneksi Antar Wilayah Guna Mendukung Investasi Dan Pengembangan Wilayah.
- 2) Penguatan Perekonomian Daerah Yang Didukung Dengan Ketahanan Pangan, Pengembangan Agribisnis Berbasis Produk Unggulan Daerah Dan Investasi.
- 3) Peningkatan Kualitas Dan Pemerataan Pelayanan Pendidikan, Peran Pemuda Dan Olahraga Serta Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Daerah.
- 4) Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan
- 5) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.
- 6) Peningkatan Kemandirian Desa.
- 7) Pengurangan Kemiskinan Dan Pengangguran.
- 8) Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Kondusivitas Daerah Serta Pengelolaan Bencana.
- 9) Penguatan Inovasi Daerah Dan Teknologi Tepat Guna.

Tema RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2020 adalah “*Pemantapan Infrastruktur dan Pertumbuhan Ekonomi dalam rangka mendukung Romansa Purworejo 2020*”, dengan Sasaran Makro Pembangunan Kabupaten Purworejo Tahun 2020:

- 1) Pertumbuhan Ekonomi (%): 6,33 - 6,64
- 2) Inflasi (%): 4 \pm 1
- 3) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (nilai): 73,17
- 4) Tingkat Kemiskinan (persen): 9,5% - 8,0%
- 5) Gini Rasio (indeks): 0,3

6) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (persen): 3,6

7) Kesenjangan Wilayah (*Indeks Willamson*): 0,35.

Ukuran untuk mengetahui kondisi ekonomi Kabupaten Purworejo membutuhkan angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) agar dapat diketahui angka laju pertumbuhan ekonomi dan kemampuan daerah dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa.

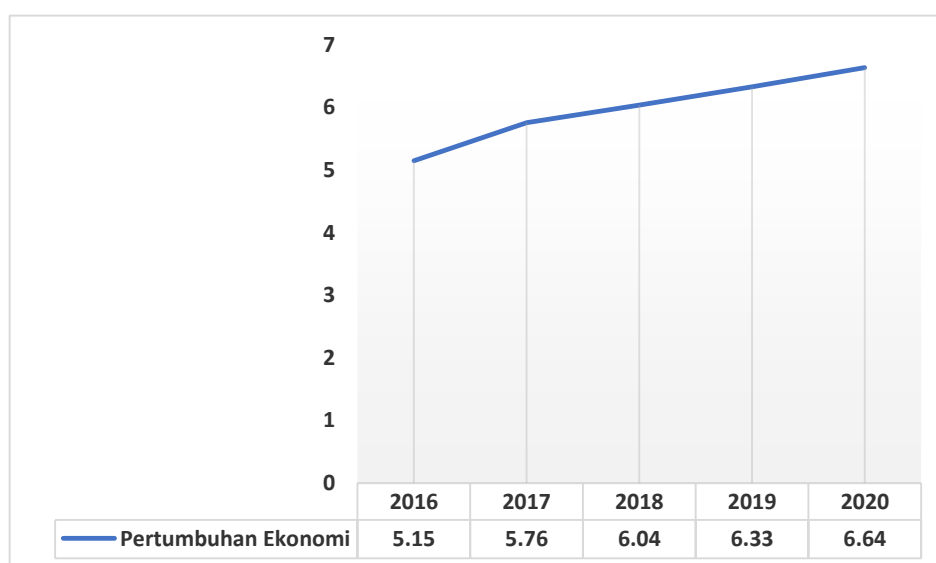
Tabel 3.4
PDRB Atas Dasar Harga Konstan
dan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
1	2	3	4	5	6	7
1	PDRB (juta Rp)	11.646.315,51	12.196.868,60	12.7869.771,94	14.044.432,73	14.732.232,75
2	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,15	5,76	6,04	6,33	6,64

Keterangan: adalah * angka sementara ** angka proyeksi

Sumber: 1. PDRB Kab Purworejo Tahun 2017, BPS, diolah Bappeda Kab Purworejo

2. RPJMD Kab Purworejo Tahun 2016-2021



Gambar 3.1

Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Purworejo

Sumber: RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021

Dengan melihat pola struktur PDRB Kabupaten Purworejo tahun 2017 dan 2018, diperkirakan pada Tahun 2020, kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan masih mempunyai distribusi yang paling dominan. Kontribusi PDRB dapat menggambarkan

peranan sektor lapangan usaha dalam pembentukan PDRB sebagaimana pada tabel sebagai berikut ini.

Tabel 3.5
Kontribusi PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha (ADH Konstan)
Tahun 2016 -2017

Kategori	Lapangan Usaha	2016	2017*
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	25,48	24,22
B	Pertambangan dan Penggalian	0,81	0,80
C	Industri Pengolahan	18,49	18,49
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	0,09
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,06
F	Konstruksi	8,47	8,67
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,46	12,46
H	Transportasi dan Pergudangan	5,24	5,29
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,10	2,11
J	Informasi dan Komunikasi	4,53	4,90
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,62	3,63
L	Real Estate	2,01	2,02
M,N	Jasa Perusahaan	0,29	0,30
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,14	4,06
P	Jasa Pendidikan	8,37	8,58
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,60	1,65
R,S,T	Jasa lainnya	2,24	2,31
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (%)	100,00	100,00

Keterangan: adalah * angka sementara;

Sumber: PDRB Kab Purworejo Tahun 2017, BPS, diolah Bappeda Kab Purworejo

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Kemampuan Keuangan Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dapat dilihat dari realisasi APBD. Adapun rincian realisasi APBD Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2018, Target Tahun 2019 dan Proyeksi Tahun 2020 sebagaimana tercantum pada tabel sebagai berikut ini.

Tabel 3.6
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan APBD Kabupaten Purworejo TA 2016 – 2020

No.	Uraian	Pendapatan Daerah (Rp)				
		Realisasi 2016	Realisasi 2017	Tahun 2018	Target 2019	Proyeksi 2020
1	2	3	4	5	6	7
1	PENDAPATAN	2.069.000.842.574	2.114.807.792.154	2.049.783.717.823	2.174.502.717.050	2.245.019.003.248
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	255.599.240.424	298.606.494.653	286.971.121.793	282.944.007.300	327.074.754.248
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	42.380.056.430	53.416.617.017	68.816.307.333	59.283.352.200	71.514.758.038
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	10.662.278.138	11.731.250.610	12.867.927.066	15.800.168.700	16.253.037.945
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.380.440.636	22.586.342.042	10.259.350.824	12.363.126.100	12.363.126.100
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	196.176.465.220	210.872.284.984	195.027.536.570	195.497.360.300	226.943.832.165
1.2	DANA PERIMBANGAN	1.315.706.156.856	1.207.260.306.714	1.247.436.685.096	1.330.767.995.000	1.330.767.995.000
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	35.510.298.310	32.133.216.461	25.827.467.718	26.638.307.000	26.638.307.000
1.2.2	Dana Alokasi Umum	940.778.244.000	924.251.795.000	924.251.795.000	960.347.165.000	960.347.165.000
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	339.417.614.546	250.875.295.253	297.357.422.378	343.782.523.000	343.782.523.000
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	497.695.445.294	608.940.990.787	515.375.910.934	560.790.714.750	587.176.254.000
1.3.1	Pendapatan Hibah	101.122.050.000	73.321.466.245	71.670.023.690	71.582.520.000	70.612.080.000
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	79.659.074.294	92.084.045.000	98.828.069.544	84.681.376.750	101.242.356.000
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	5.000.000.000	52.286.908.000	9.000.000.000	35.465.110.000	35.465.110.000
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	32.813.271.000	35.279.908.542	10.860.374.100	-	10.795.000.000
1.3.6	Alokasi Dana Desa	279.101.050.000	355.968.663.000	325.017.443.600	369.061.708.000	369.061.708.000

Sumber: Hasil Analisis, 2019

Berdasarkan data realisasi APBD pada tabel 3.3. tersebut maka dapat dihitung Kinerja Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2018:

- 1) Rasio Kemandirian Daerah; rasio yang menunjukkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan daerah,
- 2) Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah; yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima dengan total pendapatan daerah.
- 3) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah; yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan PAD dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah.

Tabel 3.7
Kinerja Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2018

No	Uraian	Kinerja KKD			Keterangan
		2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6
1.	Rasio Kemandirian Daerah (desentralisasi)	12,34	14,12	15,56	Tingkat desentralisasi fiskal dalam kriteria kurang
2.	Rasio Ketergantungan Keuangan daerah	63,58	57,1	55,69	Ketergantungan keuangan daerah sangat tinggi
3.	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	19,42	24,73	18,43	Tingkat kemandirian keuangan daerah rendah sekali.

Sumber: Hasil Analisis, 2019

Berdasarkan tabel 3.7, Kabupaten Purworejo secara rata-rata selama tahun 2016-2018 mengacu angka ketiga rasio, menunjukkan Pendapatan Asli Daerah masih rendah kontribusinya terhadap total pendapatan daerah, sehingga kemampuan pemerintah kabupaten dalam menyelenggarakan desentralisasi sangat rendah. Penggalan potensi yang ada di daerah perlu dilakukan guna meningkatkan pendapatan asli daerah, sehingga ketergantungan keuangan pada pemerintah pusat dapat berkurang.

Tabel 3.8. menyajikan hasil analisis perbandingan proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan di RPJMD tahun rencana dengan proyeksi pendapatan di RKPD Tahun 2020 secara keseluruhan. Berdasarkan perbandingan tersebut diketahui selisihnya kesenjangan pendapatan sebesar Rp 463.209.131.398,00

yang semula ditargetkan dalam RPJMD Tahun 2016-2021 pada Tahun 2020 sebesar Rp 2.708.228.134.646,00 dan target pada RKPD Tahun 2020 sebesar Rp 2.245.019.003.248,00. Kesenjangan pendapatan tersebut yang terbesar dari target pendapatan yang bersumber dari Dana Perimbangan DAU dan DAK. Kesenjangan pendapatan bersumber dari PAD yang terbesar dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada pos pendapatan BLUD RSUD dan Puskesmas.

Tabel.3.8
Perbandingan Proyeksi Pendapatan Daerah
dalam RPJMD dan RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2020

No.	Uraian	Proyeksi RPJMD Tahun 2020 (Rp.)	Proyeksi RKPD Tahun 2020 (Rp.)	Selisih (Rp.)
1	2	3	4	5 = 4-3
A	PENDAPATAN DAERAH	2.708.228.134.646	2.245.019.003.248	(463.209.131.398)
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	312.287.972.170	327.074.754.248	14.786.782.078
1.1	Pendapatan Pajak Daerah	55.398.485.477	71.514.758.038	16.116.272.561
1.2	Hasil Retribusi Daerah	18.004.512.863	16.253.037.945	(1.751.474.918)
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.943.004.900	12.363.126.100	1.420.121.200
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	227.941.968.930	226.943.832.165	998.136.765
2	DANA PERIMBANGAN	1.892.653.872.740	1.330.767.995.000	(561.885.877.740)
2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	36.245.541.548	26.638.307.000	(9.607.234.548)
2.2	Dana Alokasi Umum	1.342.426.694.692	960.347.165.000	(382.079.529.692)
2.3	Dana Alokasi Khusus	513.981.636.500	343.782.523.000	(170.199.113.500)
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	503.286.289.736	587.176.254.000	83.889.964.264
3.1	Pendapatan Hibah	-	70.612.080.000	70.612.080.000
3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	172.486.239.736	101.242.356.000	(30.465.110.000)
3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	5.000.000.000	35.465.110.000	30.465.110.000
3.4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	46.699.000.000	10.795.000.000	(35.904.000.000)
3.5	Dana Desa	279.101.050.000	369.061.708.000	89.960.658.000

Sumber: Hasil Analisis, 2019

Perhitungan kebutuhan belanja dilakukan dengan sebelumnya menghitung kebutuhan anggaran yang bersifat wajib dan mengikat yang harus diselenggarakan seperti:

- a. belanja pegawai,
- b. belanja bunga,
- c. belanja hibah, yang dapat terus-menerus sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,
- d. belanja bantuan sosial untuk penganggulungan kemiskinan,
- e. belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah untuk Pemerintah Desa,

- f. belanja bantuan keuangan kepada desa dan partai politik,
- g. Belanja yang bersumber dari pendapatan yang bersifat mengikat seperti DAK, DBHCHT, DBH Pajak Rokok, DBH PKB dan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah.

3.2.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Rencana Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan daerah terdiri dari 3 kelompok, yaitu: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan kelompok pendapatan yang sepenuhnya menjadi kewenangan daerah untuk mengelolanya sejak merencanakan hingga pengawasan, sedangkan untuk Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengalokasikan untuk Kabupaten Purworejo dengan penetapan pejabat yang berwenang.

3.2.3. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah

Strategi yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam peningkatan pendapatan daerah adalah dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah untuk mendukung pembangunan daerah dengan optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendapatan dan aset-aset pemerintah daerah. Implementasi dari strategi tersebut dijabarkan dalam 2 (dua) arah kebijakan dalam pengelolaan pendapatan daerah.

Kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam pengelolaan pendapatan daerah yaitu:

- 1) Upaya untuk memobilisasi sumber-sumber pendapatan daerah yang muncul sebagai akibat peningkatan aktivitas ekonomi serta adanya berbagai program investasi,
- 2) Optimalisasi manajemen kas pemerintah daerah yang mendukung peningkatan pendapatan daerah.

3.2.4. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Arah kebijakan belanja daerah diarahkan dengan prinsip *“money follow priority program”* yang akan memprioritaskan program dan kegiatan wajib/mengikat, kegiatan yang memprioritaskan pada penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan kemandirian desa, penguatan perekonomian daerah, peningkatan pada aspek layanan dasar, peningkatan kualitas infrastruktur, peningkatan kualitas lingkungan hidup, Peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan, peran pemuda dan olahraga serta pelestarian nilai-nilai budaya daerah, Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, Tata kelola pemerintahan yang baik dan kondusivitas daerah serta pengelolaan bencana dan Penguatan inovasi daerah dan teknologi tepat guna.

3.2.5. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah

Kebijakan perencanaan belanja daerah diarahkan dengan prinsip *“money follow priority program”* yang akan memprioritaskan program dan kegiatan wajib/mengikat, kegiatan yang memprioritaskan pada penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan kemandirian desa, penguatan perekonomian daerah, peningkatan pada aspek layanan dasar, peningkatan kualitas infrastruktur, peningkatan kualitas lingkungan hidup, Peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan, peran pemuda dan olahraga serta pelestarian nilai-nilai budaya daerah, Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, Tata kelola pemerintahan yang baik dan kondusivitas daerah serta pengelolaan bencana dan Penguatan inovasi daerah dan teknologi tepat guna.

Strategi pokok yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam pengelolaan belanja daerah adalah dengan mengoptimalkan penganggaran terpadu untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan serta pendukung urusan dengan meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Disamping itu belanja daerah

diarahkan secara focus pada pendekatan kewilayahan sesuai dengan karakteristik wilayah serta kebutuhan suatu wilayah sehingga ketimpangan wilayah akan semakin menurun.

Implementasi dari strategi tersebut dijabarkan dalam arah kebijakan pengelolaan belanja daerah sebagai berikut ini.

- 1) Peningkatan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dengan penganggaran belanja tidak langsung untuk mendukung ketercapaian kinerja dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik.
- 2) Peningkatan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dengan penganggaran belanja barang dan jasa yang lebih mengutamakan produksi dalam negeri dan melibatkan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis.

Penyusunan belanja untuk pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Pemerintah Daerah berupaya menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, Organisasi Perangkat Daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Anggaran belanja dalam rangka pelaksanaan urusan wajib, pilihan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut disusun dengan memperhatikan secara cermat sumber dana yang digunakan. Kebijakan yang diambil yaitu meningkatkan sinergi pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat kecil dengan sumber dana yang berasal dari Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah serta penerimaan Pembiayaan sehingga menciptakan capaian kinerja yang

optimal. Hal itu sejalan dengan upaya untuk terus mensinergikan prioritas program di daerah dengan prioritas nasional maupun provinsi.

Adapun kebijakan belanja daerah pada Tahun Anggaran 2020 yang hendak dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo untuk tiap kelompok dan jenis belanja yaitu Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga), serta Belanja Langsung (Belanja pegawai, barang dan jasa dan modal).

3.2.5.1 Kebijakan Belanja Tidak Langsung

Sesuai dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait ketentuan mengenai pengelompokan belanja dalam pengelolaan keuangan daerah, belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung terdiri dari jenis belanja, yaitu; (a). belanja pegawai, (b). belanja bunga, (c). belanja subsidi, (d). belanja hibah, (e). belanja bantuan sosial, (f). belanja bagi hasil, (g). belanja bantuan keuangan, (h). belanja tidak terduga.

Kebijakan umum untuk belanja tidak langsung disusun dengan memperhatikan pola pembagian kewenangan daerah, karena belanja tidak langsung salah satunya dapat diarahkan untuk digunakan mendanai hal-hal yang bukan merupakan kewenangan daerah dengan pertimbangan apabila pendanaan untuk membiayai kewenangan daerah telah terpenuhi.

1) Belanja Pegawai

- a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas atau sebutan lain seperti Tunjangan Hari Raya (THR) serta pengurangan jumlah pegawai karena pensiun dan mutasi ke provinsi atau pusat dan juga penambahan pegawai karena kebijakan pemerintah pusat.

- b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, mutasi dan penambahan PNSD diperhitungkan akses yang besarnya $\pm 0,5\%$ dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- c) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNSD, tenaga honorer dan P3K dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2020 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD.
- d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Pentahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial.
- e) Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran, rasionalitas dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Purworejo Nomor 92 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, yang selaras dengan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 serta memperhitungkan komponen tambahan penghasilan pada gaji ketiga belas dan gaji keempat belas atau sebutan lain seperti Tunjangan Hari Raya (THR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- f) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah;
- g) Belanja penghasilan lainnya bagi PNSD dianggarkan untuk Tunjangan Profesi Guru, Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru yang diterima daerah dalam obyek DAK Non Fisik dengan alokasi dan ketentuan pembayarannya berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku.
- h) Belanja Pegawai pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dianggarkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo sebagai tindak lanjut atas pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2) Belanja Bunga

Pada Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Kabupaten Purworejo tidak berencana mengalokasikan belanja bunga.

3) Belanja Subsidi

Pada Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Kabupaten Purworejo tidak berencana mengalokasikan belanja subsidi.

4) Belanja Hibah

- a) Pada Tahun Anggaran 2020, alokasi belanja hibah dibatasi jumlahnya mengingat belanja hibah bersifat bantuan yang tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b) Alokasi belanja hibah dimaksud termasuk Hibah kepada Sekolah Swasta berupa Bantuan Sekolah, Hibah kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo berupa Bantuan Sekolah untuk MI dan MTs di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo, hibah untuk insentif guru ngaji yang dikelola oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo, Hibah kepada KONI, Hibah kepada PRAMUKA, Hibah kepada KORPRI, Hibah kepada PMI, Hibah kepada DEKOPINDA, Hibah kepada BAZNAS, Hibah kepada BADKO TPQ, Hibah kepada LPTQ, Hibah kepada Dewan Masjid Indonesia, Hibah kepada Dewan Wakaf Indonesia, Hibah untuk LPPL Irama FM, Hibah untuk pembangunan sarana dan prasarana wisata, Hibah untuk penyelenggaraan PILKADA Kabupaten Purworejo dan Hibah untuk BOP PAUD.
- c) Alokasi belanja yang bersumber dari pendapatan yang berasal dari Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan karena sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan harus dianggarkan dalam jenis belanja hibah, akan disesuaikan jumlah dan peruntukannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemberi dana.
- d) Mekanisme penganggaran pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja hibah pada Tahun Anggaran 2020 berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 108 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo yang telah disesuaikan dengan Pasal 298 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

5) Belanja Bantuan Sosial

- a) Pada Tahun Anggaran 2020 alokasi belanja bantuan sosial dibatasi jumlahnya dan diberikan secara selektif sesuai kriteria yang ditetapkan dan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, mengingat belanja bantuan sosial bersifat bantuan yang tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus-menerus, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b) Alokasi belanja yang bersumber dari pendapatan yang berasal dari Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan karena sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan harus dianggarkan dalam jenis belanja bantuan sosial akan disesuaikan jumlah dan peruntukannya berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi dana.
- c) Alokasi penganggaran Bantuan Sosial dimaksudkan sebagai pendukung program penanggulangan kemiskinan melalui bantuan sosial pemugaran perumahan bagi keluarga miskin, Program Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga Miskin, Bantuan Sosial Pemberian Pemenuhan Kebutuhan Dasar di Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) / Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), Bantuan Sosial KUBE Disabilitas, Bantuan Sosial Jaminan Hidup untuk Penyandang Cacat dan Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan sebagai akibat bencana alam dan bencana sosial.
- d) Mekanisme penganggaran, pelaksanaan dan pertanggung jawaban belanja bantuan sosial pada tahun 2020 berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 108 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo yang telah disesuaikan dengan Pasal 298 ayat (4)

dan (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

6) Belanja Bagi Hasil

- a) Penganggaran Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% dari pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- b) Penganggaran Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa dalam APBD Tahun Anggaran 2020 harus diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek belanja sesuai kode rekening berkenaan.

7) Belanja Bantuan Keuangan

- a) Penganggaran alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN pada jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD Tahun Anggaran 2020 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- b) Penganggaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa minimal sebesar 10% dari Dana Perimbangan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 setelah dikurangi DAK sebagai tindak lanjut atas ketentuan Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- c) Penganggaran bantuan keuangan untuk pengentasan kemiskinan diberikan kepada desa yang dikendalikan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPKDesa).
- d) Penganggaran bantuan keuangan bidang jalan diberikan kepada desa untuk memperlancar aksesibilitas desa.

- e) Penganggaran bantuan keuangan untuk penyelenggaraan Pilkadaes pada 42 desa di Kabupaten Purworejo yang serentak akan dilaksanakan bersama.
- f) Bantuan keuangan kepada partai politik dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan objek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian objek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran pelaksanaan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang bantuan keuangan kepada partai politik.
- g) Penganggaran belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan daftar nama penerima sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan.

8) Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2019 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, dana pendamping DAK, kegiatan mendesak yang apabila ditunda dampaknya akan lebih besar yang tidak tertampung dalam program dan kegiatan di tahun 2020, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

3.2.5.2 Kebijakan Belanja Langsung

Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah Tahun Anggaran 2020 mengutamakan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh

masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan mempedomani Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan standar teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Analisis Standar Belanja Kabupaten Purworejo, dan Keputusan Bupati Tentang Standar Satuan Harga (SSH).

Kebijakan umum untuk belanja langsung utamanya adalah meliputi kebijakan tentang pengelolaan asset daerah, penanganan kewenangan daerah, standar serta kewajaran belanja. Dalam mengalokasikan anggaran mengacu pada:

- a. Transparansi dan akuntabilitas anggaran
- b. Disiplin anggaran
- c. Keadilan anggaran
- d. Efisiensi dan efektivitas anggaran

Usulan program, kegiatan, dan anggaran dinilai tingkat kewajarannya. Penilaian kewajaran meliputi:

- a. Kesesuaian tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dengan program dan kegiatan yang diusulkan dalam mendukung terwujudnya visi daerah;
- b. Kaitan logis antara permasalahan yang akan diselesaikan Perangkat Daerah dengan prioritas program dan kegiatan yang diusulkan;
- c. Kapasitas Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan dalam pencapaian kinerja yang diinginkan;
- d. Keselarasan dan keterpaduan kegiatan dari masing-masing Perangkat Daerah sehingga memberikan manfaat dampak positif bagi masyarakat. Usulan program dan kegiatan tersebut di atas disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Kebijakan umum anggaran Kabupaten Purworejo tahun 2020 diarahkan dalam tiga fungsi utama, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi.

- a. Fungsi alokasi, yaitu penganggaran untuk kegiatan pembangunan yang tidak mungkin dilaksanakan oleh masyarakat/swasta karena bersifat public services seperti penanganan prasarana dasar, penyediaan infrastruktur;

- b. Fungsi distribusi, yaitu penganggaran diarahkan untuk pemerataan, keadilan sosial, dan mengurangi kesenjangan, yang antara lain meliputi penanganan masalah kemiskinan, pengembangan wilayah tertinggal dan lainnya;
- c. Fungsi stabilisasi, yaitu penganggaran diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat serta stabilitas keamanan dan ketertiban.

Penganggaran belanja langsung memperhatikan beberapa arah kebijakan sebagai berikut:

- 1) Penggunaan dana transfer umum yang terdiri dari DAU dan DBH yang bersifat umum, diarahkan penggunaannya untuk belanja infrastruktur daerah, dengan memperhatikan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015, baik berupa belanja tidak langsung maupun belanja langsung terkait dengan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik, yang besaran alokasinya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- 2) Penggunaan DBH-CHT diarahkan untuk melaksanakan peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu (*cukai illegal*), pelayanan kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang dijabarkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah.
- 3) Pendapatan yang berasal dari DBH Migas wajib dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar yang besarnya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
- 4) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), termasuk yang dibagihasilkan pada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

- 5) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
- 6) Belanja yang bersumber dari DAK dianggarkan pada OPD yang berkenaan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran DAK, terhadap sisa tender pelaksanaan kegiatan DAK, agar digunakan untuk menambah target dan capaian sasaran kinerja kegiatan DAK yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis DAK masing-masing bidang. Apabila sisa tender tidak dapat dimanfaatkan pada tahun berkenaan dan harus dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya tetap menggunakan petunjuk teknis tahun anggaran berkenaan.
- 7) Apabila terdapat sisa DAK sedangkan target kinerja kegiatan DAK sudah tercapai, maka sisa DAK dimaksud dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 untuk menambah volume/target capaian program dan kegiatan DAK yang sama dan/atau untuk mendanai kegiatan pada bidang DAK tertentu sesuai prioritas nasional dengan menggunakan petunjuk teknis tahun anggaran sebelumnya atau petunjuk teknis Tahun Anggaran 2020. Apabila target kinerja kegiatan DAK belum tercapai, sisa DAK dimaksud dianggarkan untuk mendanai kegiatan yang sesuai pada bidang yang sama sesuai prioritas nasional dengan menggunakan petunjuk teknis tahun sebelumnya. Kegiatan tersebut harus selesai dan dapat dimanfaatkan pada akhir Tahun Anggaran 2020.
- 8) Penyelesaian permasalahan mengenai pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan mempedomani Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Pajak.
- 9) Dalam rangka peningkatan bidang pendidikan, Pemerintah Kabupaten Purworejo secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari belanja daerah, sesuai amanat

peraturan perundang-undangan, termasuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari APBD. Untuk dana BOS yang bersumber dari APBD, penganggarannya dalam bentuk program dan kegiatan serta penggunaannya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- 10) Sesuai besaran pendapatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dicantumkan pada pos pendapatan hibah di Lain-Lain Pendapatan Yang Sah dalam RAPBD Tahun Anggaran 2020, maka pada belanja langsung dialokasikan dengan jumlah yang sama untuk belanja BOS yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga atau Perangkat Daerah yang membantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah pada Urusan Pendidikan.
- 11) Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Kabupaten Purworejo secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran urusan kesehatan minimal 10 persen dari total belanja APBD di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- 12) Penyediaan dana pendamping atau sebutan lainnya hanya diperkenankan untuk kegiatan yang telah diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, seperti DAK sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, penerimaan hibah dan bantuan luar negeri sepanjang dipersyaratkan dana pendamping dari APBD sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah.
- 13) Pendanaan untuk organisasi cabang olahraga profesional tidak dianggarkan dalam APBD karena menjadi tanggung jawab induk organisasi cabang olahraga dan/atau organisasi olahraga profesional yang bersangkutan. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, bahwa pembinaan dan pengembangan olahraga profesional dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga dan/atau organisasi olahraga profesional. Cabang olahraga profesional sesuai Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005, adalah olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.

- 14) Penganggaran program “Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah” mengacu pada Lampiran A.VII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
- 15) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013, yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJS yang bersumber dari APBN, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo selaku SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.
- 16) Dalam hal pemerintah daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan:
 - a. pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya;
 - b. akibat pemberian kesempatan kepada penyedia barang/jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui Tahun Anggaran 2018 sesuai peraturan perundang-undangan; atau
 - c. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht);maka harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sesuai kode rekening berkenaan. Tata cara penganggaran dimaksud terlebih dahulu melakukan perubahan atas peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020, dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.
- 17) Dalam Pasal 54A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ditegaskan bahwa kegiatan dapat mengikat dana anggaran:
 - a. untuk 1 (satu) tahun anggaran; atau

b. Lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk kegiatan tahun jamak sesuai peraturan perundang-undangan.

Kegiatan tahun jamak tersebut dalam huruf b harus memenuhi kriteria sekurang-kurangnya:

a. Pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan satu output yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau

b. Pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran seperti penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, layanan pembuangan dan/ataupengelolaan sampah dan pengadaan jasa *cleaning service*.

Penganggaran kegiatan tahun jamak dimaksud berdasarkan atas persetujuan DPRD yang dituangkan dalam nota kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD, yang ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS pada tahun pertama rencana pelaksanaan kegiatan tahun jamak. Nota kesepakatan bersama tersebut sekurang-kurangnya memuat:

a. Nama kegiatan;

b. Jangka waktu pelaksanaan kegiatan;

c. Jumlah anggaran; dan

d. Alokasi anggaran per tahun.

Jangka waktu penganggaran kegiatan tahun jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Kepala Daerah berakhir.

18) Pemerintah Kabupaten Purworejo agar mensinergikan penganggaran program dan kegiatan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 dengan kebijakan nasional, antara lain:

a) Pencapaian SDG's, seperti: kesetaraan gender, penanggulangan HIV/AIDS dan malaria sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan; Terkait dengan upaya percepatan pengarusutamaan gender melalui perencanaan dan penganggaran responsif gender, pemerintah daerah agar mempedomani Surat Edaran Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara

- Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor: 270/M.PPN/11/2012, Nomor: SE-33/MK.02/2012, Nomor: 050/4379A/SJ, Nomor: SE-46/MPP-PA/11/2011 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);
- b) Rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi para lanjut usia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, serta program rehabilitasi dan perlindungan sosial penyandang cacat;
 - c) Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - d) Penguatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
 - e) Pengembangan kearsipan di daerah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik mempedomani amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 - f) Revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan pendidikan wawasan kebangsaan dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012;

- g) Penanganan gangguan keamanan dalam negeri sebagaimana diamanatkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gangguan Dalam Negeri di Daerah;
 - h) Tunjangan PNSD yang bertugas pada unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi terkait dengan pengamanan persandian sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2008 tentang Tunjangan Pengamanan Persandian;
 - i) Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) berbasis NIK secara Nasional dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan perundang-undangan lainnya; dan
 - j) Fasilitasi pengaduan masyarakat dan pengembangan akses informasi secara transparan, cepat, tepat dan sederhana dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 19) Dalam rangka mendukung implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran dalam bentuk program dan kegiatan terkait dengan pembangunan ketahanan keluarga dan gugus tugas pencegahan serta penanganan pornografi.
- 20) Dalam rangka efektifitas pengawasan dan pengendalian penyerapan anggaran daerah, pemerintah daerah menganggarkan kegiatan yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah dan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tim Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran.
- 21) Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan biaya pemilihan Kepala Desa dalam APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2020 untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan

peralatan lainnya, honorarium panitia, dan biaya pelantikan sesuai amanat Pasal 34 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

- 22) Dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah, sebagai pelaksanaan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Purworejo mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya dalam bentuk program/kegiatan di Inspektorat.
- 23) Dalam rangka mendukung program pemerintah mengenai Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) untuk mencapai target indeks inklusif keuangan menjadi 75% (tujuh puluh lima persen) pada akhir tahun 2020, pemerintah daerah dapat kegiatan yang diarahkan untuk mendorong pembentukan dan pelaksanaan kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
- 24) Selanjutnya Penganggaran belanja langsung ke dalam jenis belanja dilakukan dengan kebijakan sebagai berikut:

1) Belanja Pegawai

- a. Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.
- b. Pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud serta bersifat bukan internal OPD tetapi melibatkan OPD-OPD terkait.
- c. Dalam satu kegiatan tidak diperkenankan hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium Non PNSD.
- d. Besaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2) Belanja Barang dan Jasa

- a. Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa dengan menambahkan obyek dan rincian obyek belanja baru serta besarnya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
- b. Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri, yaitu pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus dan pegawai lain yang dibayarkan oleh APBD, dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016.
- c. Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan.
- d. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2020.
- e. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS hanya diberikan kepada Bupati/ Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD. Pengembangan pelayanan kesehatan tersebut hanya berupa pelayanan *Medical check up* sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dalam rangka pemeliharaan kesehatan dan dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah untuk Bupati/ Wakil Bupati dan Sekretariat DPRD untuk Pimpinan dan Anggota DPRD dan dilaksanakan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Tjitrowardojo Purworejo.

- f. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu, yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJS yang bersumber dari APBN, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa.
- g. Penganggaran belanja yang bersumber dari dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014. Dalam hal dana kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran sebelumnya, dana kapitasi tersebut harus digunakan tahun anggaran berikutnya dan penggunaannya tetap mempedomani Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014.
- h. Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah daerah dialokasikan pada masing-masing SKPD sesuai amanat Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan besarnya sesuai dengan masing-masing peraturan daerah.
- i. Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016, serta peraturan perundang-undangan lain dibidang hibah dan bantuan sosial. Pengadaan belanja

barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.

- j. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota DPRD.
- k. Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
 - Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan hanya diberikan untuk Bupati/Wakil Bupati, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
 - Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan

lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

- Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.
 - Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah, berdasarkan kemampuan keuangan daerah dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektifitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas sesuai kebutuhan nyata, yang akan diberikan petunjuk lebih lanjut.
1. Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikutsertakan non PNSD diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas. Tata cara penganggaran perjalanan dinas dimaksud mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
 - m. Penganggaran untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia Pimpinan dan Anggota DPRD serta pejabat/staf pemerintah daerah, yang tempat penyelenggaraannya di luar daerah harus dilakukan sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi dan kompetensi serta manfaat yang akan diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna pencapaian efektifitas penggunaan anggaran daerah. Dalam rangka orientasi dan pendalaman tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota agar berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2013 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

- n. Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Kerja Aparatur.
- o. Penganggaran untuk pemeliharaan barang milik daerah menggunakan dasar perencanaan pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- p. Pemerintah Kabupaten Purworejo menganggarkan belanja untuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik Pemerintah Kabupaten Purworejo pada masing-masing OPD sesuai amanat Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan besarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- q. Porsi operasional bagi kegiatan yang terdapat target pendapatan di luar untuk pelayanan publik dan investasi, yaitu terkait operasional perparkiran, operasional pariwisata, operasional sektor kelautan, perikanan dan peternakan, operasional sektor pertanian, operasional sektor industri dan perdagangan, serta operasional perijinan tingkat kecamatan, diarahkan dilakukan seefisien mungkin. Sedangkan beberapa operasional yang lain diarahkan melalui rasionalisasi pembiayaan melalui unit cost maupun perhitungan biaya proporsional.

- r. Pemerintah daerah memprioritaskan pelaksanaan kebijakan pembangunan lingkungan tingkat kelurahan dengan alokasi anggaran pada kecamatan yang bersumber dari pendapatan eks-bengkok dan sumber lainnya.

3) Belanja Modal

- a. Pemerintah Kabupaten Purworejo harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2020 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pengembangan pertumbuhan ekonomi.
- b. Penganggaran untuk pengadaan kebutuhan barang milik daerah menggunakan dasar perencanaan kebutuhan barang milik daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Selanjutnya, untuk pengadaan barang milik daerah juga memperhatikan standar sarana dan prasarana kerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.
- c. Khusus penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerah mempedomani Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Selanjutnya, untuk efisiensi penggunaan anggaran, pembangunan gedung kantor baru milik pemerintah daerah tidak diperkenankan sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-841/MK.02/2014 tanggal 16 Desember 2014 hal Penundaan/Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Negara/Lembaga, kecuali penggunaan anggaran tersebut

terkait langsung dengan upaya peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik.

- d. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD.
- e. Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya (aset tak berwujud) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*). Nilai aset tetap dan aset lainnya yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan, sesuai maksud Pasal 27 ayat (7) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrua.

- f. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*), dan dapat memperpanjang masa manfaat atau yang dapat memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PSAP Nomor 7, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Adapun perkiraan rencana sumber dan besaran belanja daerah pada Tahun Anggaran 2020 dibandingkan realisasi 3 (tiga) tahun terakhir dan target tahun 2019, dijelaskan pada tabel 3.9.

Tabel 3.9
Realisasi, Target dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Belanja Daerah (Rp)				
		Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Target Tahun 2019	Proyeksi Tahun 2020
1	2	3	4	5	6	7
2	BELANJA	1.967.707.975.519	2.265.141.731.647	1.875.058.304.015	2.215.437.473.275	2.433.729.297.559,58
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.320.625.848.017	1.349.130.524.502	1.152.119.340.286	1.423.143.936.605	1.522.395.632.456,58
2.1.1	Belanja Pegawai	929.269.576.117	832.772.371.824	683.453.596.201	878.604.888.316	870.894.076.565,58
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	214.375.000	-	850.000.000,00
2.1.4	Belanja Hibah	10.694.942.000	16.832.917.300	12.060.089.000	33.492.741.000	89.220.773.916,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	6.784.300.000	6.596.200.000	11.208.175.000	12.424.650.000	12.424.650.000,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil	9.440.953.688	9.715.465.200	9.441.406.000	9.441.406.000	8.777.847.200,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	363.824.322.200	482.290.864.992	433.982.835.824	486.106.290.500	533.834.352.280,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	611.754.012	922.705.186	1.758.863.261	3.073.960.789	6.000.000.000,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	647.082.127.502	916.011.207.145	722.938.963.729	792.293.536.670	911.333.665.103,00
2.2.1	Belanja Pegawai	54.172.789.921	67.195.719.063	83.885.725.475	81.257.072.660	-
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	318.646.776.167	383.688.831.716	348.533.845.104	432.952.854.285	-
2.2.3	Belanja Modal	274.262.561.414	465.126.656.366	290.519.393.150	278.083.609.725	-
	SURPLUS / (DEFISIT)	101.826.795.232	(150.333.939.493)	(158.091.187.600)	(40.934.756.225)	(188.710.294.311,58)

Sumber: Hasil Analisis, 2019

Tabel 3.10
Perbandingan Belanja Daerah
dalam RPJMD dan RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2020

No	Uraian	Proyeksi RPJMD Tahun 2020 (Rp.)	Proyeksi RKPD Tahun 2020 (Rp.)	Selisih (Rp.)	Ket.
1	2	3	4	5	6
A.	BELANJA	2.734.728.134.646	2.433.729.297.559,58	300.998.837.086,42	
I.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.393.189.587.246	1.522.395.632.456,58	-129.206.045.210,58	
1	- Belanja Pegawai	915.528.879,975	870.894.076.565,58	44.634.803.409,42	
2	- Belanja Bunga	-	850.000.000,00	-850.000.000,00	
3	- Belanja Hibah	59.477.218.000	89.220.773.916,00	-29.743.555.916,00	
4	- Belanja Bantuan Sosial	18.014.350.000	12.424.650.000,00	5.589.700.000,00	
5	- Belanja Bagi Hasil	12.583.081.271	8.777.847.200,00	3.805.234.071,00	
6	- Belanja Bantuan Keuangan	377.586.058.000	533.834.352.280,00	-156.248.294.280,00	
7	- Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000	6.000.000.000,00	4.000.000.000,00	
II.	BELANJA LANGSUNG	1.341.538.547.400	911.333.665.103,00	438.092.638.497,00	
III.	Surplus (Defisit)	(26.500.000.000)	(188.710.294.311,58)	126.258.791.217,58	

Sumber: Hasil Analisis, 2019

Berdasarkan hasil analisis kemampuan keuangan daerah, maka jumlah anggaran yang dialokasikan untuk belanja langsung yaitu untuk membiayai program dan kegiatan prioritas Pembangunan Daerah pada RKPD Tahun 2020 sebesar Rp911.333.665.103,00 selisih lebih kecil sebesar Rp438.092.638.497,00 dari yang diproyeksikan dalam RPJMD pada tahun berkenaan sebesar Rp1.341.538.547.400,00.

3.2.6. Kebijakan Surplus/Defisit APBD

- 1) Surplus atau defisit APBD adalah selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah.
- 2) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, penggunaan surplus tersebut diutamakan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial. Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.
- 3) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, Pemerintah Kabupaten Purworejo menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan,

hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan/atau penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

- 4) Pemerintah Kabupaten Purworejo mempedomani penetapan batas maksimal defisit APBD Tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan melaporkan posisi surplus/defisit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester Tahun Anggaran 2020.

3.2.7. Kebijakan Anggaran Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan daerah diarahkan dalam rangka memanfaatkan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran yang direncanakan. Surplus anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan daerah lebih besar daripada anggaran belanja daerah, sedangkan defisit anggaran terjadi apabila sebaliknya, yaitu anggaran belanja daerah lebih besar daripada anggaran pendapatan daerah.

Kebijakan Pembiayaan harus terkait dengan penyelesaian permasalahan-permasalahan pembangunan daerah maupun pemanfaatan potensi-potensi daerah. Penyelesaian permasalahan pembangunan melalui pos pembiayaan diantaranya adalah melalui

- a. Strategi pembentukan dana cadangan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat multi tahunan serta kemanfaatannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat, seperti untuk pendidikan, infrastruktur dan lain-lain.
- b. Pemberian Pinjaman daerah kepada pihak ketiga misal dalam bentuk dana bergulir untuk meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat.
- c. Penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka memanfaatkan potensi BUMD sebagai *profit center* yang dimiliki pemerintah daerah, perlu diberikan sesuai dengan rencana pengembangan usaha masing-masing BUMD yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan daerah.

3.2.7.1 Penerimaan Pembiayaan

- 1) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2019 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2020 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2020.
- 2) Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan kembali investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima.
- 3) Penerimaan hutang daerah dilakukan oleh daerah untuk mengatasi keterbatasan kas dalam berbagai hal mengenai pelaksanaan pemerintahan seperti pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan publik serta meningkatkan perekonomian di daerah. Pada tahun 2020 penerimaan hutang daerah dilakukan untuk melaksanakan pembangunan Pasar Purworejo sebagai relokasi dari Pasar Suronegaran yang asetnya tanahnya milik PT. Kereta Api Indonesia. Dalam jangka waktu tertentu, maka penerimaan pembiayaan berupa penerimaan hutang daerah ini akan dikembalikan kepada pemberi pinjaman dengan sejumlah biaya bunga yang telah ditentukan sebelumnya.

3.2.7.2 Pengeluaran Pembiayaan

- 1) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Purworejo pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah tersebut, tidak perlu diterbitkan Peraturan Daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah dimaksud. Dalam hal Pemerintah Kabupaten Purworejo akan menambah jumlah penyertaan modal

melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dimaksud, Pemerintah Kabupaten Purworejo melakukan perubahan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal tersebut.

- 2) Pemerintah Kabupaten Purworejo dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, Pemerintah Kabupaten Purworejo dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna memenuhi *Capital Adequacy Ratio (CAR)* sebagaimana dipersyaratkan oleh Bank Indonesia. Selain itu, dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Masyarakat Kecil dan Menengah (UMKM), Pemerintah Kabupaten Purworejo dapat melakukan penyertaan modal kepada BPR yang dimiliki sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Dalam rangka penguatan struktur permodalan PDAM, karena PDAM Tirta Perwitasari Kabupaten Purworejo layanannya belum mencapai 80% dari jumlah penduduk yang menjadi cakupan pelayanan PDAM, maka bagian laba bersih PDAM harus diinvestasikan kembali untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, baik fisik maupun non fisik serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Purworejo dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat, agar percepatan pemenuhan target pelayanan air perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% dan wilayah pedesaan sebanyak 60% sesuai target Nasional 100-0-100.
- 4) Jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 dan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

3.2.7.3 Kebijakan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan

- 1) Pemerintah Kabupaten Purworejo menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Anggaran 2020 bersaldo nol.
- 2) Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, Pemerintah Kabupaten Purworejo harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.
- 3) Dalam hal perhitungan SILPA Tahun Berjalan negatif, Pemerintah Kabupaten Purworejo melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya, maupun melakukan pinjaman daerah.

Perkiraan besaran pembiayaan daerah pada Tahun Anggaran 2020 dibandingkan 3 (tiga) tahun terakhir, dan Target Tahun 2019 ditunjukkan pada tabel 3.11

Tabel 3.11
Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Pembiayaan Daerah (Rp)				
		Realisasi Tahun 2016	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Target Tahun 2019	Proyeksi Tahun 2020
1	2	3	4	5	6	7
3	PEMBIAYAAN DAERAH	237.594.855.687	326.117.694.262	158.091.187.600	40.934.756.225	188.682.102.311,58
3 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	241.594.855.687	339.211.694.262	158.091.187.600	40.934.756.225	188.682.102.311,58
3 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	241.568.105.687	339.192.444.262	114.091.187.600	38.934.756.225	146.682.102.311,58
3 . 1 . 2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3 . 1 . 3	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	44.000.000.000	-	40.000.000.000,00
3 . 1 . 4	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	26.750.000	19.250.000	-	2.000.000.000	2.000.000.000,00
3 . 1 . 5	Penerimaan Dana Bergulir	-	-	-	-	-
3 . 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	4.000.000.000	13.094.000.000	-	-	-
3 . 2 . 1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3 . 2 . 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	4.000.000.000	13.094.000.000	-	-	-
3 . 2 . 3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	-
3 . 2 . 4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-

Sumber : Hasil Analisis, 2019

Tabel 3.12
Perbandingan Proyeksi Pembiayaan Daerah
dalam RPJMD dan RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2020

No	Uraian	Proyeksi RPJMD Tahun 2020 (Rp)	Proyeksi RKPD Tahun 2020 (Rp)	Selisih (Rp.)	Ket
1	2	3	4	5 (4-3)	6
A	PEMBIAYAAN	26.500.000.000	188.682.102.311,58	162.182.102.311,58	
I	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	35.000.000.000	188.682.102.311,58	153.682.102.311,58	
1	SiLPA tahun sebelumnya	-	146.682.102.311,58	146.682.102.311,58	
2	Pencairan Dana Cadangan	35.000.000.000	-	(35,000,000,000)	
3	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	40.000.000.000,00	40.000.000.000	
4	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	2.000.000.000,00	2.000.000.000	
5	Penerimaan Dana Bergulir	-	-	-	
II	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	8.500.000.000	-	-	
1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	
2	Penyertaan Modal (investasi) PEMDA	8.500.000.000	-	-	
3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	
4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	

Sumber: Hasil Analisis, 2019

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo disusun dengan berpedoman pada prioritas nasional dan Provinsi Jawa Tengah untuk menjamin sinergitas sasaran pokok pembangunan dan arah kebijakan pembangunan serta dalam rangka pencapaian sasaran pokok pembangunan nasional dengan tetap mengoptimalkan potensi dan keunggulan daerah.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Visi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Purworejo periode Tahun 2016-2021 pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021, yaitu: **Terwujudnya Kabupaten Purworejo Yang Semakin Sejahtera Berbasis Pertanian, Pariwisata, Industri, Dan Perdagangan Yang Berwawasan Budaya, Lingkungan, Dan Ekonomi Kerakyatan**. Sementara misi, tujuan, dan sasaran Kabupaten Purworejo dan hubungannya dijelaskan dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1.
Hubungan Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan

No	Misi	Tujuan	Sasaran
1	2	3	4
1	Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai kabupaten yang religius dan demokratis.	Meningkatkan kerukunan hidup beragama dan menanamkan nilai-nilai kehidupan beragama sejak usia dini	Meningkatnya semangat kehidupan beragama
		Meningkatkan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	Meningkatnya partisipasi publik dalam upaya perbaikan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan
2	Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai gerbang ekonomi utama bagian selatan Provinsi Jawa Tengah	Meningkatkan pelayanan dasar dan akses terhadap ekonomi produktif masyarakat kurang mampu	Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin
		Meningkatkan daya saing tenaga kerja	Meningkatnya daya saing tenaga kerja

No	Misi	Tujuan	Sasaran		
1	2	3	4		
	yang berbasis pertanian, pariwisata, industri, dan perdagangan	Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian dalam arti luas dan ketersediaan pangan	Meningkatnya produksi dan produktivitas sektor pertanian dalam arti luas Meningkatnya ketersediaan, distribusi dan konsumsi serta keamanan pangan daerah		
		Mengembangkan agribisnis dalam pengelolaan potensi pertanian	Meningkatnya usaha agribisnis dalam pengelolaan potensi pertanian		
		Mengembangkan pariwisata unggulan dalam rangka menggerakkan perekonomian daerah	Berkembangnya dan meningkatnya daya jual potensi wisata		
		Meningkatkan kualitas koperasi, daya saing industri kecil dan menengah	Berkembangnya industri kecil dan menengah Meningkatnya kuantitas dan kualitas koperasi dan UMK (Usaha Mikro dan Kecil)		
		Meningkatkan iklim investasi yang kondusif	Meningkatnya nilai investasi		
		Meningkatkan peran sektor perdagangan dalam perekonomian daerah	Meningkatnya produktivitas sektor perdagangan		
		Mewujudkan interkoneksi antar wilayah guna mendukung investasi dan pengembangan wilayah	Terwujudnya interkoneksi antar pusat kegiatan dan produksi di kabupaten Meningkatnya cakupan layanan transportasi yang efektif dan efisien		
		Meningkatkan akses layanan infrastruktur dasar yang berkualitas	Meningkatnya cakupan air minum, sanitasi & rumah layak huni bagi masyarakat		
		Meningkatkan kualitas penataan ruang	Meningkatnya kesesuaian arahan penggunaan lahan		
		Meningkatkan pengembangan kawasan strategis	Meningkatnya pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh, perkotaan Purworejo-Kutoarjo dan border city.		
		Meningkatkan ketahanan air guna mendukung kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya pelayanan irigasi		
		Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup daerah		
		3	Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai Daerah tujuan Wisata unggulan berbasis budaya dan kearifan lokal	Meningkatkan Aktualisasi dan Pelestarian Budaya serta kearifan lokal untuk menunjang pariwisata daerah	Meningkatnya partisipasi pelaku budaya daerah Meningkatnya pembinaan dan perlindungan asset budaya
		4	Mewujudkan	Meningkatkan prestasi seni	Meningkatnya prestasi seni dan

No	Misi	Tujuan	Sasaran
1	2	3	4
	Kabupaten Purworejo yang unggul di bidang seni, budaya, olahraga	dan budaya daerah	budaya daerah
		Meningkatkan prestasi Pemuda dan olahraga	Meningkatnya prestasi Pemuda dan olahraga
		Meningkatkan wahana pencapaian prestasi seni budaya dan olahraga	Meningkatnya ketersediaan wahana peningkatan prestasi seni budaya
			Meningkatnya ketersediaan wahana peningkatan prestasi pemuda dan olahraga
5	Mewujudkan Kab Purworejo sebagai kabupaten yang unggul di bidang pendidikan dan pelayanan kesehatan.	Meningkatkan pemerataan dan akses pada pendidikan berkualitas	Meningkatnya Aksesibilitas pendidikan
		Mewujudkan pendidikan berbasis e-learning	Terwujudnya Satuan pendidikan berbasis e-learning
		Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas selama 24 jam	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
6	Mewujudkan Kabupaten Purworejo menjadi kabupaten yang memiliki aparatur pemerintahan yang mampu melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan partisipatif yang berorientasi pada optimalisasi pelayanan publik.	Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kapasitas pengelolaan keuangan dan asset daerah
			Terwujudnya perencanaan yang akuntabel dan tepat waktu
			Meningkatnya kapasitas pembinaan dan pengawasan internal pemerintahan
			Penguatan Sistim Inovasi Daerah (SIDa)
			Meningkatnya kompetensi aparatur
			Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih efektif
			Optimalisasi fungsi camat dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa
			Terselenggaranya dukungan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD
			Meningkatnya keterbukaan informasi dan komunikasi publik yang berbasis Teknologi Informasi.
			Meningkatnya keamanan informasi pemerintah daerah
Meningkatnya kepemilikan			

No	Misi	Tujuan	Sasaran
1	2	3	4
			dokumen kependudukan dan pencatatan sipil
			Meningkatnya layanan penanganan masalah pertanahan
			Terkendalinya pertumbuhan penduduk
			Meningkatnya pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
			Optimalnya pelayanan penanggulangan bencana dan kebakaran di daerah
			Meningkatnya layanan tramtibuslinmas
			Meningkatnya kesetaraan gender , perlindungan perempuan dan anak dan pemenuhan hak anak
			Meningkatnya minat baca masyarakat
			Meningkatnya tertib kearsipan daerah
			Meningkatnya layanan ketersediaan statistik sektoral dan daerah yang akurat
			Meningkatnya layanan informasi dan fasilitasi penyelenggaraan transmigrasi
			Meningkatnya fasilitasi serta layanan data dan informasi urusan ESDM
			Meningkatnya dukungan kinerja perangkat daerah
7	Mewujudkan desa di Kabupaten Purworejo sebagai pusat pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat dalam berbagai bidang.	Meningkatkan kemandirian desa melalui pemberdayaan masyarakat	Meningkatnya status desa
		Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif	Cakupan layanan pembangunan kawasan perdesaan

Sumber: RPJMD Kabupaten Purworejo 2016-2021

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2020

4.2.1. Sasaran Pembangunan Nasional, Provinsi, dan Daerah

Sasaran pembangunan meliputi dimensi pembangunan manusia dan masyarakat, ekonomi makro, serta dimensi pemerataan pembangunan wilayah. Pembangunan manusia diukur dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang mencakup komponen pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan serta kemampuan daya beli masyarakat.

Dimensi ekonomi makro diukur dengan pertumbuhan ekonomi dan dimensi pemerataan pembangunan wilayah diukur dengan tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan indeks kesenjangan wilayah dengan angka Williamson. Adapun penyelarasan target sasaran beberapa indikator makro pembangunan baik tingkat nasional, tingkat Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten Purworejo tahun 2020 sebagaimana Tabel 4.2.

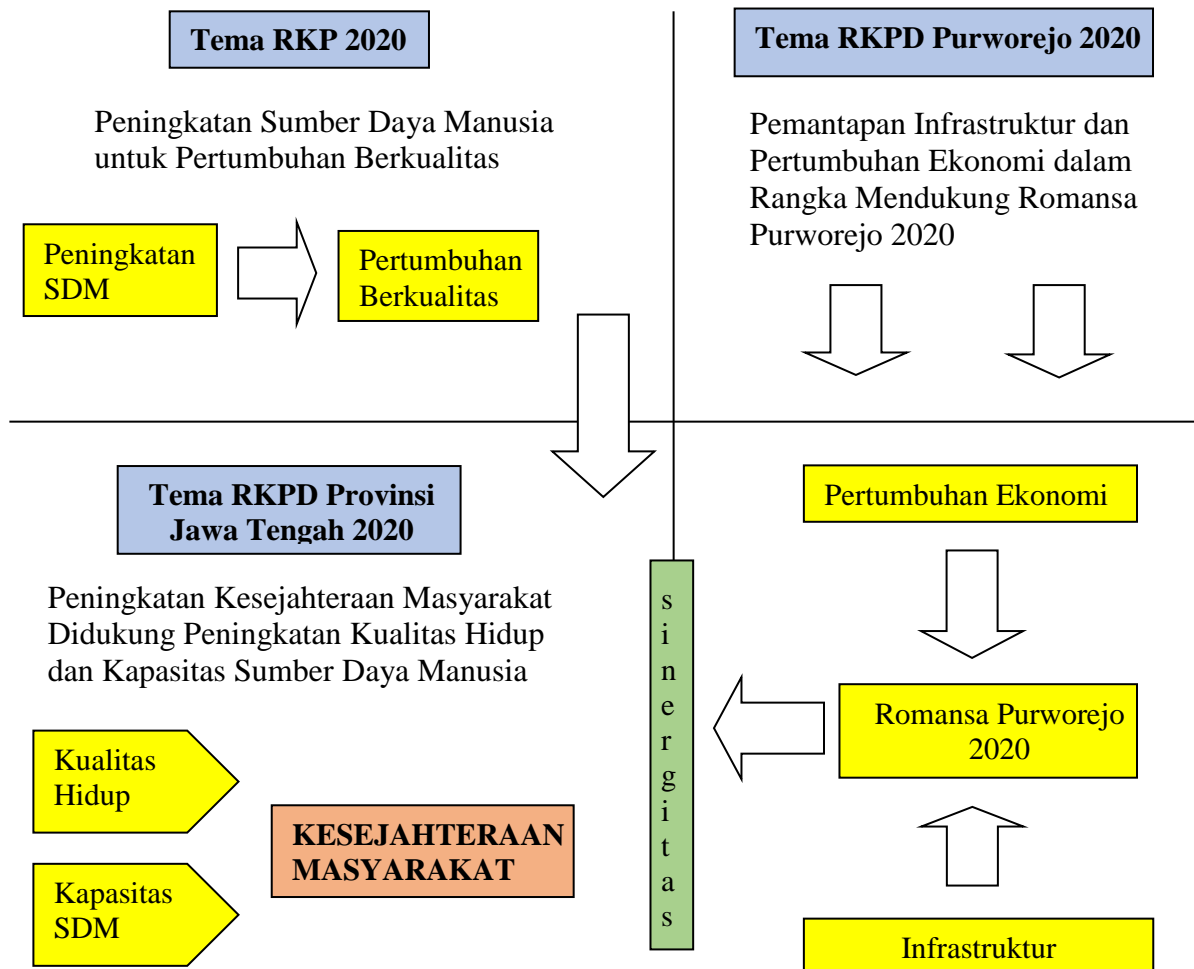
Tabel 4.2.
Sasaran Makro Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten Purworejo Tahun 2020

No	Indikator	Target Tahun 2020		
		Nasional	Jawa Tengah	Kab. Purworejo
1	2	3	4	5
1.	Pertumbuhan Ekonomi	5,3 - 5,5%	5,40 -5,7%	6,33% - 6,64%
2.	Kemiskinan	8,5% - 9,0%	9,81 – 8,81%	9,5% - 8,0%
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,8% - 5,1%	4,33%	3,6%
4.	Indeks Pembangunan Manusia	72,50	72	73,17
5.	Inflasi	2,0 - 4,0	3 ± 1	4 ± 1
6.	Kesenjangan Wilayah (<i>Indeks Willamson</i>)	Masih relatif tinggi kesenjangan antara Wilayah Indonesia barat dan Wilayah Indonesia Timur	0,59	0,35
7.	Gini Rasio	0,375-0,380	0,34	0,30

Sumber: Musrenbang RKPD Provinsi Jawa Tengah, Musrenbang RKP dan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021

4.2.2. Penyelarasan Prioritas Nasional, Provinsi, dan Daerah

Penyelarasan tema pembangunan dan prioritas nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Purworejo dijelaskan pada Gambar 4.1 dan Tabel 4.3.



Gambar 4.1

Penyelarasan Tema Pembangunan Nasional Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Purworejo Tahun 2020

Sumber: Hasil Analisis, 2019

Tabel 4.3.

Penyelarasan Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi Jawa Tengah, dan Prioritas Kabupaten Purworejo Tahun 2020

Prioritas Nasional		Prioritas Provinsi Jawa Tengah		Prioritas Kabupaten Purworejo	
1		2		3	
1	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	2	Peningkatan Kualitas Hidup dan Kapasitas SDM	3	Peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan, peran pemuda dan olahraga serta pelestarian nilai-nilai budaya daerah
				4	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
		1	Percepatan	7	Pengurangan kemiskinan

Prioritas Nasional		Prioritas Provinsi Jawa Tengah		Prioritas Kabupaten Purworejo	
1		2		3	
			Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran		dan pengangguran
2	Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah	3	Peningkatan Kapasitas dan Daya Saing Ekonomi Rakyat Secara Berkelanjutan	1	Penguatan ketahanan air, infrastruktur dasar dan interkoneksi antar wilayah guna mendukung investasi dan pengembangan wilayah
				6	Peningkatan kemandirian desa
3	Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja			9	Penguatan inovasi daerah dan teknologi tepat guna
4	Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup			2	Penguatan perekonomian daerah yang didukung dengan ketahanan pangan, pengembangan agribisnis berbasis produk unggulan daerah dan investasi
				5	Peningkatan kualitas lingkungan hidup
5	Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	4	Reformasi Birokrasi	8	Tata kelola pemerintahan yang baik dan kondusivitas daerah serta pengelolaan bencana

Sumber: Hasil Analisis, 2019

4.2.3. Isu Strategis Pembangunan Daerah

Pembangunan mengarah pada tujuan pembangunan yang berkelanjutan dengan fokus pada tiga pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu pilar sosial, ekonomi, dan lingkungan secara sinergis. Permasalahan yang kini menjadi perhatian dunia dan juga Indonesia, yakni kemiskinan, pertumbuhan ekonomi yang relatif stagnan, dan perubahan iklim.

Berdasarkan permasalahan pembangunan daerah yang telah diidentifikasi dan dianalisis dalam Bab II, dirumuskan isu strategis pembangunan Kabupaten Purworejo tahun 2020 sebagai berikut.

1. Pembangunan Infrastruktur.
2. Peningkatan Pengelolaan Potensi Daerah.
3. Kualitas dan Pemerataan Akses Pendidikan dan Kesehatan.
4. Pengelolaan Lingkungan Hidup.
5. Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran.
6. Tata Kelola Pemerintahan Daerah.

1) Isu Strategis: Pembangunan Infrastruktur

Ketahanan air yang ditunjukkan dengan data pada Tahun 2018 untuk capaian kinerja sistem irigasi pada DI kewenangan kabupaten dalam kondisi baik sebesar 63,40%, capaian kondisi fisik jaringan irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik sebesar 58,68%, dan capaian persentase pengurangan genangan air banjir irigasi kewenangan kabupaten sebesar 4,83%. Secara umum capaian persentase kinerja layanan irigasi pada Tahun 2018 sebesar 60,47%, jadi cakupan pelayanan air irigasi masih perlu untuk ditingkatkan.

Akses infrastruktur dasar meliputi air bersih, sanitasi dan perumahan masih perlu untuk ditingkatkan. Tahun 2018 penduduk yang memperoleh cakupan akses sanitasi layak sebesar 79,71%, cakupan akses air minum sebesar 89%, ketersediaan rumah layak huni sebesar 69,84% dan persentase luas titik genangan yang tertangani sebesar 41,72%.

Kondisi infrastruktur prasarana jalan di Kabupaten Purworejo tahun 2018, dari 769,25 km panjang jalan yang menjadi kewenangan daerah, kondisi baik dan sedang sebesar 588,15 km atau 76,46%. Jumlah jembatan dalam kondisi baik ada 411 buah atau 92,78% dari 443 jembatan yang menjadi kewenangan Kabupaten.

Strategi:

- a) Meningkatkan ketahanan air guna mendukung peningkatan produktivitas daerah
- b) Meningkatkan pelayanan infrastruktur dasar menuju universal akses
- c) Meningkatkan interkoneksi antar wilayah guna mendukung peningkatan produktivitas daerah

Prioritas:

Penguatan ketahanan air, infrastruktur dasar dan interkoneksi antar wilayah guna mendukung investasi dan pengembangan wilayah.

2) Isu Strategis: Peningkatan Pengelolaan Potensi Daerah

Potensi Kabupaten Purworejo meliputi sektor pertanian, perdagangan, industri, pariwisata, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah serta investasi. Sektor pertanian, kehutanan dan

perikanan pada tahun 2017 masih merupakan penyumbang terbesar PDRB (24,22%). Sedangkan 5 sektor terbesar lainnya adalah industri pengolahan sebesar 18.69%, perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 12.64%, konstruksi sebesar 8.67%, jasa pendidikan sebesar 8.58%, dan transportasi dan pergudangan sebesar 5,29%.

Strategi:

- a) Peningkatan produktivitas perekonomian daerah melalui sektor basisnya yaitu pertanian dalam arti luas dengan pengembangan pola agribisnis.
- b) Mendorong sektor-sektor ekonomi produktif lainnya yaitu industri, perdagangan, koperasi dan pariwisata
- c) Mendorong investasi dengan meningkatkan promosi investasi dan kerjasama investasi.
- d) Meningkatkan pelayanan perijinan dan penanaman modal dengan penyederhanaan dan pemberian kemudahan perijinan, mengembangkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), pelayanan perijinan *online*, promosi investasi, pengendalian dan fasilitasi penanaman modal, peta potensi investasi, data dan sistem informasi penanaman modal.

Prioritas:

Penguatan perekonomian daerah yang didukung dengan ketahanan pangan, pengembangan agribisnis berbasis produk unggulan daerah dan investasi.

3) Isu Strategis: Kualitas dan Pemerataan Akses Pendidikan dan Kesehatan

Kualitas dan pemerataan akses pendidikan dan kesehatan masih perlu ditingkatkan. Kualitas pembangunan manusia yang diukur dari nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat ditingkatkan dengan cara meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan. Angka Harapan Lama Sekolah pada tahun 2017 sebesar 13,47 tahun. Rata-rata lama sekolah sebesar 7,69 tahun dan Angka Usia Harapan Hidup 74,26 tahun. Pada tahun 2018, Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan dasar meliputi PAUD

usia 0-6 tahun (60,92%), APK SD/SDLB/MI Paket A (107,25%) dan APK SMP/SMPLB/MTs/Paket B (102,19%).

Di bidang kesehatan, pelayanan kesehatan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan pemberantasan penyakit menular dan tidak menular masih perlu pula untuk ditingkatkan dalam rangka meningkatkan usia harapan hidup. Fokus utama adalah penurunan angka kematian ibu, yang pada tahun 2018 tercatat sebesar 78,76/100.000 KH.

Strategi:

- a) Meningkatkan akses pendidikan berkualitas terutama pada pendidikan dasar.
- b) Meningkatkan peran pemuda dan olahraga serta pelestarian nilai-nilai budaya daerah.
- c) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan

Prioritas:

1. Peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan, peran pemuda dan olahraga serta pelestarian nilai-nilai budaya daerah.
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan

4) Isu Strategis: Pengelolaan Lingkungan Hidup

Isu pembangunan berkelanjutan sudah menjadi isu global untuk menjaga planet bumi ini mempunyai daya dukung dan daya tampung lingkungan yang seimbang untuk kehidupan manusia. Indikator kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat ditunjukkan dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Pada tahun 2018, IKLH sebesar 58%. Kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah adalah untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Strategi:

Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Prioritas:

Peningkatan kualitas lingkungan hidup.

5) Isu Strategis: Pengurangan kemiskinan dan pengangguran

Tahun 2018 Angka kemiskinan di Kabupaten Purworejo masih tergolong tinggi 11,67% (sumber: BPS, tahun 2018). Pada tahun 2017 menurut data Sakernas prosentase penduduk umur 15 tahun ke atas yang bekerja sebesar 64,48%, dengan Tingkat Pengangguran

sebesar 3,64%. Tingginya angka kemiskinan, banyaknya penduduk miskin serta tingginya tingkat pengangguran, maka pengurangan kemiskinan dan pengangguran menjadi isu strategis yang perlu ditangani. Lokasi kemiskinan masih didominasi di wilayah desa.

Strategi:

- a) Pemberdayaan pemerintah desa, masyarakat desa dan lembaga desa dengan peningkatan kapasitas aparat di desa, dukungan pembentukan BUMDes dan Kerjasama Antar Desa.
- b) Pembangunan kawasan perdesaan melalui tahapan penyusunan regulasi, pemetaan potensi desa dan antar desa serta penyediaan sarana prasarana pendukung kawasan
- c) Peningkatan pelayanan dasar melalui Sistem Jaminan Sosial bidang Kesehatan, Pendidikan, Pangan dan Papan.
- d) Dukungan bagi peningkatan produktivitas penduduk miskin
- e) Pelayanan bagi pencari kerja yaitu peningkatan kualitas dan produktivitas serta peningkatan kesempatan kerja dengan pelatihan berbasis kompetensi, layanan magang, padat karya serta meningkatkan partisipasi lembaga pelatihan milik masyarakat, menyelenggarakan forum-forum untuk mempertemukan pencari kerja dengan penyedia lapangan kerja dan meningkatkan ketersediaan informasi pasar kerja.
- f) Pengembangan dan perlindungan tenaga kerja dengan meningkatkan kualitas hubungan tripartit dan bipartit, meningkatkan kualitas kapasitas penerapan sistem perlindungan tenaga kerja (jaminan sosial, syarat kerja, peraturan ketenagakerjaan) di perusahaan.

Prioritas:

1. Peningkatan kemandirian desa
2. Pengurangan kemiskinan dan pengangguran.

6) Isu Strategis: Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Tata kelola (*governance*) tidak dapat dilepaskan dari prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Untuk mengarah ke tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), ketiga prinsip ini akan

selalu diupayakan meningkat di segala bidang urusan yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat.

Strategi:

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan inovasi daerah dan teknologi tepat guna dalam pengelolaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Prioritas:

1. Tata kelola pemerintahan yang baik dan kondusivitas daerah serta pengelolaan bencana.
2. Penguatan inovasi daerah dan teknologi tepat guna

4.2.4. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

1. Mewujudkan sasaran makro pembangunan daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020, meliputi:
 - a. Perubahan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purworejo dari 5,14% (Tahun 2017) menjadi 6,33% - 6,64% (Tahun 2020) melalui upaya:
 - 1) Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dalam arti luas;
 - 2) Pengembangan agribisnis komoditas unggulan pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan;
 - 3) Peningkatan daya jual potensi wisata daerah;
 - 4) Peningkatan daya saing industri kecil dan menengah;
 - 5) Penumbuhan, penyehatan dan pengawasan koperasi dan UMK;
 - 6) Peningkatan pelayanan perijinan dan penanaman modal yang sesuai dengan arahan penataan ruang;
 - 7) Perwujudan kemandirian desa melalui Pemberdayaan pemerintah desa, masyarakat desa dan lembaga desa.
 - b. Meningkatnya indeks Pembangunan Manusia dari 71,31 (Tahun 2017) menjadi 73,17 (Tahun 2020) melalui upaya:
 - 1) Peningkatan aksesibilitas pendidikan yang berkualitas pada tingkat anak usia dini, pendidikan dasar dan masyarakat serta peningkatan kualitas manajemen pelayanannya;
 - 2) Penyelenggaraan *e-learning* di tingkat SD dan SMP;

- 3) Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan;
 - 4) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan selama 24 jam.
- c. Menurunnya angka kemiskinan dari 11,67 % (Tahun 2018) menjadi 9,5% - 8,0% (Tahun 2020) melalui upaya pengurangan beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin melalui peningkatan pelayanan dasar dan akses terhadap ekonomi produktif masyarakat kurang mampu secara terpadu pada seluruh tingkatan pemerintahan (kabupaten-kecamatan-desa/kelurahan). Salah satu inovasi untuk mengurangi kemiskinan adalah melalui Program Peningkatan Pendapatan Keluarga Miskin (Propendakin), dimana setiap desa/kelurahan menerima bantuan keuangan sebesar Rp25.000.000,00 dan diwajibkan untuk digunakan mengentaskan minimal 20 rumah tangga miskin produktif dengan diwujudkan bantuan sarana prasarana sebagai modal usaha. Untuk memantau dan memfasilitasi pelaksanaan program dibentuk Tim Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan.
- d. Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari 3,64% (Tahun 2017) menjadi 3,60% (Tahun 2020), perlu upaya lebih intensif antara lain yaitu:
- 1) peningkatan daya saing tenaga kerja melalui pelayanan bagi pencari kerja yaitu peningkatan kualitas dan produktivitasnya serta peningkatan kesempatan kerja;
 - 2) pengembangan dan perlindungan tenaga kerja.
- e. Menurunnya kesenjangan antar wilayah yang diukur dengan indeks Williamson semula 0,364 (Tahun 2015) menjadi 0,350 (Tahun 2020) perlu meningkatkan upaya:
- 1) pengembangan kawasan strategis kabupaten melalui pembangunan infrastruktur kawasan strategis;
 - 2) perwujudan pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif sesuai dengan arahan pengembangan wilayah di daerah.
2. Peningkatan kualitas pembangunan, pemeliharaan jalan dan jembatan untuk mewujudkan interkoneksi antar pusat kegiatan dan produksi.

3. Pemenuhan akses layanan infrastruktur dasar yang berkualitas sesuai target nasional, meliputi akses pendidikan, akses kesehatan, dan akses perumahan.
4. Peningkatan kualitas pengelolaan dan pengembangan sistem irigasi dan drainase.
5. Peningkatan kualitas pengelolaan layanan melalui upaya keselamatan transportasi.
6. Optimalisasi upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui pemenuhan baku mutu kualitas air, udara, serta meningkatkan tingkat tutupan lahan vegetasi.
7. Meningkatkan semangat kehidupan beragama melalui pelayanan, koordinasi dan fasilitasi kehidupan beragama.
8. Peningkatan partisipasi publik dalam upaya perbaikan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan melalui pemanfaatan wahana komunikasi publik.
9. Pengendalian keseimbangan ketersediaan bahan pangan dan kebutuhan pangan melalui pengendalian sistem stok bahan pangan, menyediakan sarana prasarana pendukungnya dan memperbaiki pola konsumsi pangan.
10. Pengintensifan pengembangan dan pelestarian seni, budaya, nilai sejarah dan kepurbakalaan daerah melalui peningkatan inventarisasi dan pembinaan potensi, serta meningkatkan frekuensi event aktualisasi potensi.
11. Peningkatan kualitas pembinaan prestasi kepemudaan dan olahraga dengan meningkatkan partisipasi organisasi masyarakat yang bergerak di bidang kepemudaan dan olahraga, meningkatkan kuantitas dan kualitas kompetisi seni budaya daerah, kompetisi kepemudaan dan olahraga serta penyediaan wahana peningkatan prestasi di bidang seni budaya dan pemuda olahraga.
12. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
13. Mengembangkan inovasi daerah dan teknologi tepat guna.

4.2.5. Arah Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pokok-pokok pikiran DPRD merupakan wujud akumulasi dan representasi masyarakat kabupaten Purworejo melalui kegiatan reses

yang dilakukan pimpinan dan anggota DPRD di 6 daerah pemilihan yang meliputi 16 kecamatan. Kegiatan reses ini telah berhasil merangkul banyak aspirasi dari masyarakat, setiap anggota DPRD membawa aspirasi warga untuk ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten Purworejo lewat mekanisme perencanaan pembangunan tahunan.

Hasil penyerapan aspirasi masyarakat tersebut yang kemudian dirangkum sebagai pokok – pokok pikiran DPRD Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut :

1. BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
 - a. Melaksanakan penertiban administrasi kependudukan dan akta catatan sipil
 - b. Meningkatkan SDM pengelola administrasi kependudukan (Tingkat Kecamatan)
 - c. Meningkatkan sosialisasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
 - d. Memberdayakan pelayanan Tingkat Kecamatan
 - e. Melaksanakan penambahan sarana dan prasarana khususnya pada Tingkat Kecamatan
2. BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 - a. Meningkatkan manajemen SDM bidang IT
 - b. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung bagi pengembangan sistem informasi
 - c. Terintegrasinya sistem informasi pada Perangkat Daerah, sektor swasta baik badan maupun perorangan
 - d. Meningkatkan komunikasi dan penyampaian informasi kepada publik
 - e. Meningkatkan penyampaian informasi pembangunan kepada seluruh masyarakat
3. BIDANG PERTANAHAN
 - a. Meningkatkan kegiatan penatagunaan tanah Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa (tanah kas desa)
 - b. Meningkatkan pengaturan penguasaan tanah
 - c. Meningkatkan sosialisasi (pemasyarakatan) masalah hukum pertanahan

- d. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung operasional bidang pertanahan.
 - e. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kepastian kepemilikan tanah.
 - f. Pemutakhiran data inventarisasi penatagunaan tanah
4. BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN KESATUAN BANGSA
- a. Membangun kesepakatan pemahaman kepentingan antar daerah
 - b. Meningkatkan rasa kebangsaan dan patriotisme masyarakat.
 - c. Meningkatkan stabilitas keamanan dan hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat
 - d. Meningkatkan koordinasi dengan institusi keamanan vertical dalam rangka menjamin rasa aman masyarakat
5. BIDANG PEMERINTAHAN UMUM
- a. Menjamin terselenggaranya pemerintahan yang baik dan pembangunan daerah.
 - b. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintahan daerah dalam mewujudkan prinsip – prinsip pemerintahan yang baik (good governance) dan demokrasi di daerah.
 - c. Meningkatkan penyelenggaraan administrasi pemerintahan, persandian dan kerjasama antar daerah dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah.
 - d. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa / kelurahan dalam pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 - e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas perencanaan pembangunan melalui peningkatan partisipasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan.
 - f. Meningkatkan pelayanan penyediaan data / informasi yang lengkap dan mutakhir bagi perencanaan pembangunan daerah dan pengembangan usaha.
 - g. Meningkatkan kinerja kelembagaan dan penataan struktur organisasi dan tata kerja.
 - h. Meningkatkan sosialisasi perda – perda tentang desa

- i. Meningkatkan pelaksanaan inventarisasi, pengelolaan dan pengendalian aset – aset pemerintah daerah.
6. BIDANG PERANGKAT DAERAH DAN KEPEGAWAIAN
 - a. Meningkatkan pengelolaan SDM aparatur guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
 - b. Meningkatkan kinerja kepegawaian daerah yang berorientasi pada pelayanan masyarakat.
 7. BIDANG KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
 - a. Meningkatkan pengelolaan kearsipan daerah.
 - b. Meningkatkan pelayanan informasi melalui media buku.
 8. BIDANG HUKUM DAN PERUNDANG – UNDANGAN
 - a. Meningkatkan upaya penegakan perda
 - b. Meningkatkan pengkajian dalam rangka pemutakhiran peraturan-peraturan daerah yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun disesuaikan dengan kebutuhan daerah
 - c. Meningkatkan jaringan dokumentasi dan informasi produk-produk hukum dan perda
 9. BIDANG INFRASTRUKTUR
 - a. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar publik
 - b. Perlunya saran dan prasarana berupa alat berat (beghoe) pada Dinas PUPR untuk mendukung kinerja Dinas dalam penanggulangan bencana.
 - c. Perlunya perencanaan yang matang dan baik dalam pelaksanaan pembangunan kawasan Heroik Park.
 - d. Perlunya peningkatan / pemeliharaan jalan menuju TPA Jetis.
 - e. Perlunya koordinasi dan komunikasi dengan Kementerian PUPR terkait jalan – jalan yang menuju ke arah Yogyakarta.
 - f. Perlunya dilakukan tindakan "black list" kepada pelaksana kegiatan hasil kerjanya tidak baik.
 10. BIDANG PERTANIAN
 - a. Pemanfaatan teknologi tepat guna dan sederhana untuk peningkatan produktivitas pertanian.
 - b. Penyebaran bantuan – bantuan agar sesuai kebutuhan.

- c. Perlunya dilakukan koordinasi antar perangkat daerah agar diperoleh data – data jaringan irigasi akurat, hal ini untuk mengetahui kebutuhan anggaran tiap daerah jaringan irigasi.
- d. Dengan akan dibangunnya Waduk Bener, diharapkan perencanaan di Dinas PUPR dan Dinas Pertanian PKP agar kedepan benar – benar matang. Master plant harus segera disiapkan.

11. BIDANG PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

- a. Terkait dengan jalan kelurahan, kedepan agar disinkronkan dengan dana yang ada di kelurahan agar tidak terjadi duplikasi anggaran.
- b. Perlu penanganan lebih intensif terkait air bersih dan prioritasnya jelas bagi daerah – daerah yang rawan kekurangan air bersih pada musim kemarau.
- c. Sumber – sumber mata air perlu diperhatikan.
- d. Untuk wilayah yang terdapkan banjir (khususnya grabag) agar dikoordinasikan secara matang oleh perangkat daerah untuk penanganannya.

12. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

- a. Untuk pokok – pokok teduh pinggir jalan yang umurnya sudah tua dan membahayakan diwilayah perkotaan agar dilakukan pengamanan / penebangan dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi.
- b. Perlu adanya formulasi penanganan sampah.
- c. Perlunya pengkajian untuk penanganan sampah (tidak hanya 1 metode saja).
- d. Perlunya pembatasan pemakaian kantor – kantong plastik.
- e. Harus disegerakan Peraturan Bupati terkait pengelolaan sampah.

13. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA

- a. Perlunya bantuan untuk BPBD terkait anggaran untuk pembelian air bersih dan BBM untuk droping air bersih.
- b. Perlunya penambahan armada untuk droping air bersih

- c. Perlu dilaksanakan sosialisasi kebencanaan di wilayah pantai selatan (terkait bahaya stunami) dan untuk benteng arus stunami agar ditanami pohon – pohon bakau.
14. BIDANG PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
- a. Guna mendukung Bandara NYIA dan akan didirikannya Otoritas Borobudur perlu adanya penambahan pelatihan keterampilan
 - b. Pengiriman wakil-wakil dari Purworejo yang mempunyai kompetensi untuk mengikuti latihan kebandaraan di Kulonprogo
 - c. Mengacu pada tahun 2019 sebanyak 9 kegiatan, acuan 2020 untuk kegiatan yang dibiayai oleh APBN masih belum bisa menentukan jumlahnya.
 - d. Sebanyak kurang lebih 3.625 diperlukan sebagai Bandara NYIA yang terdiri dari 100 paket latihan kebandaraan, baru 49 pendaftar yang dikirim untuk melaksanakan uji komptensi.
 - e. Terkait dengan pelatihan, terdapat 42 paket pelatihan Las yang diusulkan oleh Perinaker dengan pendaftar 1.165, APBD hanya disetujui 31 paket, dan dalam perubahan akan diusulkan sebanyak 14 paket, sehingga total menjadi 45 paket.
 - f. Prosentase kerja yang belum tertampung dari APK 9.000-10.000 sebanyak 25%
15. BIDANG KESEHATAN
- a. Terkait dengan permasalahan kemiskinan sebesar 74.6% masyarakat yang mempunyai kartu BPJS atau sekitar 577.540 penduduk.
 - b. Masih terdapat 5 Puskesmas yang dalam kondisi rusak parah, yaitu Bubutan, Gebang, Karanggetas, Banyuasin dan Bayan.
 - c. Pada tahun 2019 sudah dianggarkan sebesar Rp. 14 Miliar untuk 3 Puskesmas dari APBN.
 - d. Terkait dengan formasi Bidan Desa dari 496 baru terpenuhi sebanyak 320, atau kekurangan sebanyak 176 Bidan Desa sudah terdapat 132 Bidan PTT, yang pada tahun 2018 sudah diangkat 110 sudah diangkat ASN, sedang kekurangannya sudah diusulkan kepada BKD.

- e. Terkait dengan BPJS untuk tenaga honorer dan keluarganya yang sampai dengan saat ini sebesar 3% dipotong dari honor, dan 2% dibayarkan Dinas Kesehatan, karena Dinas Kesehatan mendapatkan dana tambahan sebesar 2,7M, maka Dinas Kesehatan merencanakan akan melaksanakan konsultasi terkait dengan apakah diperbolehkan apabila besarnya dana BPJS dibayarkan semua oleh Dinas Kesehatan.
 - f. Terkait dengan BPJS yang sudah 4 tahun berjalan, iuran yang masuk dengan cost sebesar 400%, sebagai contoh apabila iuran sebesar 50M, maka cost yang harus disediakan sebesar 200M.
16. BIDANG PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
- a. Untuk Bandar Udara NYIA tidak hanya sector industry yang dibutuhkan akan tetapi juga sector pariwisata.
 - b. Destinasi unggulan untuk mendorong peningkatan potensi pariwisata adalah Destinasi Desa, dengan anggaran sebesar 900 juta untuk 3 paket pengembangan SDM
 - c. Badan Otorita Borobudur membutuhkan sekitar 3.000 orang.

4.2.6. Penetapan Prioritas Pembangunan Daerah

Berdasarkan hasil perumusan tujuan, sasaran, dan strategi yang maka tema pembangunan Kabupaten Purworejo Tahun 2020 adalah **“Pemantapan Infrastruktur dan Pertumbuhan Ekonomi dalam rangka Mendukung Romansa Purworejo 2020”** dan Prioritas Pembangunan Tahun 2020 adalah:

1. Penguatan ketahanan air, infrastruktur dasar dan interkoneksi antar wilayah guna mendukung investasi dan pengembangan wilayah.
2. Penguatan perekonomian daerah yang didukung dengan ketahanan pangan, pengembangan agribisnis berbasis produk unggulan daerah dan investasi.
3. Peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan, peran pemuda dan olahraga serta pelestarian nilai-nilai budaya daerah.
4. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup.
6. Peningkatan kemandirian desa.

7. Pengurangan kemiskinan dan pengangguran.
8. Tata kelola pemerintahan yang baik dan kondusivitas daerah serta pengelolaan bencana.
9. Penguatan inovasi daerah dan teknologi tepat guna.

Selanjutnya, prioritas, sasaran dan indikator kinerja sasaran pembangunan Kabupaten Purworejo Tahun 2020 dijelaskan pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4.
Prioritas, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2020

No	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2020
1	2	3	4	5
1.	Penguatan ketahanan air, infrastruktur dasar dan interkoneksi antar wilayah guna mendukung investasi dan pengembangan wilayah	Meningkatnya pelayanan irigasi	Persentase kinerja layanan irigasi	71,50%
		Terwujudnya interkoneksi antar pusat kegiatan dan produksi di kabupaten.	Persentase interkoneksi antar pusat kegiatan dan produksi di kabupaten	100%
		Meningkatnya cakupan layanan transportasi yang efektif dan efisien.	Tingkat kelancaran, keamanan, dan Keselamatan Transportasi	92%
		Meningkatnya cakupan air minum, sanitasi dan rumah layak huni bagi masyarakat.	Persentase cakupan air minum	100%
			Cakupan akses sanitasi layak	100%
			Persentase pengangkutan sampah	70%
			Persentase luas titik genangan yang tertangani	55,49%
		Rasio permukiman layak huni	79,96%	
		Meningkatnya kesesuaian arahan penggunaan lahan.	Persentase peningkatan kesesuaian arahan penggunaan lahan	90%
Meningkatnya pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh, perkotaan Purworejo-Kutoarjo dan border city	Persentase pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh, perkotaan Purworejo - Kutoarjo dan <i>border city</i>	52,5%		
2.	Penguatan perekonomian daerah yang didukung dengan ketahanan pangan, pengembangan agribisnis berbasis produk unggulan daerah dan investasi	Meningkatnya produksi dan produktivitas sector pertanian dalam arti luas	Pertumbuhan PDRB per kapita sektor pertanian	4,84%
		Meningkatnya ketersediaan, distribusi dan	Skor Pola Pangan Harapan	85,90%

No	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2020
1	2	3	4	5
		konsumsi serta keamanan pangan		
		Meningkatnya usaha agribisnis dalam pengelolaan potensi pertanian	Subsistem <i>agroinput</i> dan <i>agro-onfarm</i>	100%
			Nilai Tukar Petani	105,87
			Subsistem <i>agroprocessing</i> dan <i>agromarketing</i>	75%
		Meningkatnya nilai investasi	Pertumbuhan nilai investasi	2%
		Berkembangnya dan meningkatnya daya jual potensi wisata	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan	20%
		Meningkatnya kuantitas dan kualitas koperasi dan UMK (Usaha Mikro Kecil)	Persentase Pertumbuhan koperasi (baru, aktif, sehat)	84,5%
			Persentase pertumbuhan UMK	5%
		Berkembangnya industri kecil dan menengah	Pertumbuhan PDRB sektor industri	6,29%
		Meningkatnya produktivitas sektor perdagangan.	Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	6,92%
3.	Peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan, peran pemuda dan olahraga serta pelestarian nilai-nilai budaya daerah	Meningkatnya aksesibilitas pendidikan	Rata-rata lama sekolah.	7,1
			Angka Harapan Lama Sekolah	14,1
		Terwujudnya Satuan pendidikan berbasis <i>e-learning</i>	Cakupan wilayah penerapan <i>e-learning</i> di tingkat SD	100%
			Cakupan wilayah penerapan <i>e-learning</i> di tingkat SMP	100%
		Meningkatnya partisipasi pelaku budaya daerah	Cakupan pelaku budaya dalam even budaya daerah	10%
		Meningkatnya pembinaan dan perlindungan aset budaya	Cakupan pembinaan aset budaya	100%

No	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2020
1	2	3	4	5
		Meningkatnya prestasi seni dan budaya daerah	Cakupan perlindungan asset budaya	38%
		Meningkatnya ketersediaan wahana peningkatan prestasi seni budaya	Pertumbuhan prestasi seni dan budaya daerah	10,00%
		Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga	Optimalisasi pemanfaatan pembinaan seni budaya	100%
		Meningkatnya ketersediaan wahana peningkatan prestasi pemuda dan olahraga.	Pertumbuhan prestasi pemuda dan olahraga	10%
			Optimalisasi pemanfaatan pembinaan pemuda dan olahraga di <i>Heroes Park</i> dan <i>Sport center</i> WR Supratman	100%
4.	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.	Usia Harapan Hidup	74,40
			Angka Kematian Ibu	70/100.000KH
			Angka Kematian Balita	10,5/1.000KH
			Angka Kematian Bayi	11/1.000 KH
			Prevalensi gizi buruk	0,05%
			Eliminasi malaria:	
			- API	<1
			- Kasus Indogenius	20%
5.	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	68,5%
6.	Peningkatan Kemandirian desa	Meningkatnya status desa.	Persentase desa cepat berkembang	66,31%
			Persentase desa berkembang	27,29%
			Persentase desa	6,40%
		Cakupan layanan pembangunan kawasan perdesaan	Persentase kawasan perdesaan yang tertangani	100%

No	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2020
1	2	3	4	5
7.	Pengurangan kemiskinan dan pengangguran	Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin.	Persentase Cakupan pelayanan dasar dan akses terhadap ekonomi produktif masyarakat kurang mampu	100%
		Menurunnya tingkat kemiskinan dan kesenjangan antar kelompok pendapatan masyarakat	Persentase penduduk Miskin	8%
		Menurunnya Tingkat Pengangguran	Gini ratio	0,30
		Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,6
8.	Tata kelola pemerintahan yang baik dan kondusivitas daerah serta pengelolaan bencana	Meningkatnya semangat kehidupan beragama	Prosentase cakupan peningkatan daya saing tenaga kerja	100%
		Meningkatnya partisipasi publik dalam upaya perbaikan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan	Cakupan layanan koordinasi dan fasilitasi kehidupan beragama	100%
		Terwujudnya perencanaan yang akuntabel dan tepat waktu	Cakupan layanan komunikasi publik	100%
		Meningkatnya kapasitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Perencanaan pembangunan daerah yang akuntabel dan tepat waktu	97%
		Meningkatnya kapasitas pembinaan dan pengawasan internal pemerintahan	Opini Hasil Audit BPK	WTP
		Meningkatnya kompetensi aparatur	Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Purworejo	3
		Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih efektif	Persentase aparat yang memiliki kapasitas sesuai standard	95,5%
			Cakupan layanan perumusan kebijakan daerah	100%
	Persentase BUMD sehat	100%		
	Indeks kepuasan layanan masyarakat	95%		

No	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2020
1	2	3	4	5
			Persentase penerapan SOP Pelayanan Publik dan Perangkat daerah	100%
			Cakupan pelayanan perangkat daerah	100%
			Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	100%
		Optimalisasi fungsi camat dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa	Persentase penyelesaian permasalahan pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan	100%
		Terselenggaranya dukungan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD	Prosentase terwujudnya pelaksanaan fungsi DPRD yang tepat waktu.	100%
		Meningkatnya keterbukaan informasi dan komunikasi publik yang berbasis Teknologi Informasi	Persentase perangkat daerah yang memiliki website yang interaktif	100%
			Cakupan layanan cybercity	100%
			Cakupan layanan system informasi desa	100%
			Cakupan layanan system informasi pemerintah daerah	100%
		Meningkatnya keamanan informasi pemerintah daerah	Cakupan layanan pengamanan informasi persandian	100%
		Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase kepemilikan kartu keluarga	96,90%
			Persentase kepemilikan KTP elektronik	96%
			Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	70%
			Persentase kepemilikan Akte kelahiran bagi bayi yang lahir pada tahun berjalan	90,00%
			Persentase penduduk yang memiliki akta kelahiran bagi penduduk usia 0-18 tahun	90,00%

No	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2020
1	2	3	4	5
			Persentase kepemilikan Akte kematian	70%
			Persentase kepemilikan Akte perkawinan non muslim	100%
		Meningkatnya layanan penanganan masalah pertanahan	Persentase penanganan permasalahan pertanahan	100%
		Terkendalinya pertumbuhan penduduk	Angka pertumbuhan penduduk	0,35
			Cakupan keluarga yang mendapatkan pelayanan UPPKS	2,70%
			Cakupan keluarga yang mendapatkan layanan Tri Bina	62,44%
		Meningkatnya pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Cakupan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	100%
		Optimalnya pelayanan penanggulangan bencana dan kebakaran di daerah	Cakupan pelayanan penanggulangan bencana	100%
			Cakupan pelayanan kebakaran kabupaten	34,2%
		Meningkatnya layanan tramtibumlinmas	Cakupan pelayanan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat	100%
		Meningkatnya kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak dan pemenuhan hak anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,30
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	69,00
			Cakupan layanan pemenuhan hak anak (indikator pemenuhan hak anak)	80
		Meningkatnya minat baca masyarakat	Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan	2,76%
		Meningkatnya tertib kearsipan daerah	Persentase tertib kearsipan lembaga	86%

No	Prioritas	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2020
1	2	3	4	5
			pemerintah daerah	
		Meningkatnya layanan ketersediaan statistik sektoral dan daerah yang akurat	Tingkat ketersediaan data statistik sektoral dan daerah yang akurat	100%
		Meningkatnya layanan informasi dan fasilitasi penyelenggaraan transmigrasi	Cakupan layanan informasi dan fasilitasi penyelenggaraan transmigrasi	100%
		Meningkatnya fasilitasi serta layanan data dan informasi urusan ESDM	Cakupan layanan informasi dan fasilitasi ESDM	100%
		Meningkatnya dukungan kinerja perangkat daerah.	Cakupan dukungan terhadap kinerja perangkat daerah	100%
9.	Penguatan inovasi daerah dan teknologi tepat guna	Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)	Prosentase penguatan SIDa	100%

Sumber: Hasil Analisis, 2019.

Cascading prioritas, tujuan, sasaran dan program dalam rangka mewujudkan misi perlu dilakukan untuk mencapai hasil yang maksimal. *Cascading* tersebut yang disajikan dalam Tabel 4.5.

Tabel 4.5.

Cascading Misi, Prioritas, Tujuan, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020

Keterkaitan dengan Misi Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Periode Tahun 2016-2021	Prioritas	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2020	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target 2020	OPD Pengelola
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Misi Kedua (2) "Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai gerbang ekonomi utama bagian selatan Provinsi Jawa Tengah yang berbasis pertanian, pariwisata, industri, dan perdagangan"	1. Penguatan ketahanan air, infrastruktur dasar dan interkoneksi antar wilayah guna mendukung investasi dan pengembangan wilayah	1. Meningkatkan ketahanan air guna mendukung kesejahteraan masyarakat	1. Meningkatnya cakupan pelayanan irigasi	1. Persentase kinerja layanan irigasi	71.50%	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi	Kinerja sistem irigasi pada DI Kewenangan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	72.34%	DINPUPR
							Kondisi Fisik Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	71.85%	
							Prosentase pengurangan genangan air banjir irigasi kewenangan kabupaten	55,56%	
	2. Mewujudkan interkoneksi antar wilayah guna mendukung investasi dan pengembangan wilayah	2. Terwujudnya interkoneksi antar pusat kegiatan dan produksi di kabupaten	2. Persentase interkoneksi antar pusat kegiatan dan produksi di kabupaten	100%	Program Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	83.00%	DINPUPR	
						Prosentase Peningkatan kapasitas jalan kabupaten	74.31%		
						Prosentase Jembatan dalam Kondisi Baik	98.63%		
						Prosentase Peningkatan kapasitas jembatan	85.37%		
		3. Meningkatnya cakupan layanan	3. Tingkat kelancaran, keamanan, dan keselamatan	92%	Program Pengelolaan Transportasi Darat	Cakupan Ketersediaan Rambu Jalan	90%	DINHUB	

Keterkaitan dengan Misi Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Periode Tahun 2016-2021	Prioritas	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2020	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target 2020	OPD Pengelola
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			transportasi yang efektif dan efisien	transportasi			Cakupan Ketersediaan Alat Pengaman Jalan	80%	
							Cakupan Ketersediaan Marka Jalan	68%	
							Cakupan Ketersediaan APILL	92%	
							Persentase tersedianya halte yang layak fungsi pada setiap prasarana kabupaten yang telah dilayani angkutan umum	100%	
							Persentase kendaraan operasional perhubungan yang layak fungsi	100%	
							Persentase titik parkir yang terlayani	100%	
							Persentase tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten	75%	
							Persentase Rasio Ijin Trayek	100%	
							Persentase kendaraan umum laik jalan	100%	
							Persentase tersedianya unit pengujian kendaraan	100%	

Keterkaitan dengan Misi Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Periode Tahun 2016-2021	Prioritas	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2020	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target 2020	OPD Pengelola		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
							wajib uji yang layak fungsi				
							Persentase terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum	100%			
							Persentase terpenuhinya standar keselamatan pada perlintasan sebidang	100%			
		3. Meningkatkan akses layanan infrastruktur dasar yang berkualitas	4. Meningkatnya cakupan air minum, sanitasi dan rumah layak huni bagi masyarakat	4.1. Persentase cakupan air minum	100%	Program Pengembangan dan Pengelolaan Air bersih	Persentase cakupan layanan air minum Perkotaan	100.00%	DINPERKIMTAN		
								Persentase cakupan layanan air minum Perdesaan	100.00%		
						4.2. Cakupan akses sanitasi layak	100%	Program Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah	Prosentase penduduk yang dilayani system air limbah	99.26%	DINPERKIMTAN
						4.3. Persentase pengangkutan sampah	70.00%	Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Prosentase sampah yang tertangani	100.00%	DINLH
							Prosentase TPA yang memenuhi kriteria dan dioperasikan secara layak	80.00%			
							Prosentase cakupan layanan persampahan	100.00%			
				4.4. Persentase luas titik genangan yang tertangani	52.45%	Program Pengembangan dan pengelolaan sistem	Prosentase Saluran drainase dalam kondisi	32.26%	DINPERKIMTAN		

Keterkaitan dengan Misi Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Periode Tahun 2016-2021	Prioritas	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2020	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target 2020	OPD Pengelola
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						drainase	baik		
				4.5. Rasio permukiman layak huni	79.96%	Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Prosentase Rumah layak Huni	86.01%	DINPERKIMTAN
							Prosentase Kebutuhan rumah (backlog rumah)	2,74%	
							Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	43.50%	
						Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial	Cakupan perbaikan perumahan dan lingkungan akibat bencana alam/sosial	75%	
						Program Penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh	Prosentase kawasan permukiman kumuh	18.70%	
		4. Meningkatkan kualitas penataan ruang	5. Meningkatnya kesesuaian arahan penggunaan lahan.	5. Persentase peningkatan kesesuaian arahan penggunaan lahan	90.00%	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah	Tersedianya peraturan dan informasi Rencana Umum dan rinci Tata Ruang (RTRW, RDTR dan RTR kawasan strategis)	19.05%	DINPUPR
							Prosentase kesesuaian Rencana Tata Ruang dlm RPJMD/Renstra PD dan RKPD/Renja PD	100%	
							Prosentase cakupan layanan perijinan	100.00%	

Keterkaitan dengan Misi Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Periode Tahun 2016-2021	Prioritas	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2020	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target 2020	OPD Pengelola
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							pemanfaatan ruang		
						Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	Prosentase kesesuaian bangunan dengan RTBL	10.00%	
						Program Pengembangan dan Pengelolaan Bangunan Gedung	Cakupan penanganan bangunan gedung	100.00%	
						Program Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi	Prosentase permohonan IUJK yang terlayani sesuai SOP	100.00%	
							Prosentase ketersediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	71.43%	
		5. Meningkatkan pengembangan kawasan strategis	6. Meningkatnya pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh, perkotaan Purworejo-Kutoarjo dan border city;	6. Persentase pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh, perkotaan Purworejo-Kutoarjo dan border city	52.5%	Program pengembangan infrastruktur kawasan strategis	Cakupan infrastruktur kawasan perkotaan purworejo-kutoarjo	79.60%	DINPUPR
							Cakupan infrastruktur kawasan purwokulon (bordercity)	60.60%	
							Cakupan infrastruktur kawasan strategis cepat tumbuh (KSCT: minapolitan, agropolitan, kawasan pariwisata dan perbatasan)	14.65%	

Keterkaitan dengan Misi Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Periode Tahun 2016-2021	Prioritas	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2020	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target 2020	OPD Pengelola
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Misi Kedua (2) " Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai gerbang ekonomi utama bagian selatan Provinsi Jawa Tengah yang berbasis pertanian, pariwisata, industri, dan perdagangan"	2. Penguatan perekonomian daerah yang didukung dengan ketahanan pangan, pengembangan agribisnis berbasis produk unggulan daerah dan investasi	6. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian dalam arti luas dan ketersediaan pangan	7. Meningkatnya produktivitas sektor pertanian dalam arti luas	7. Pertumbuhan PDRB sektor pertanian	4,84%	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian	Jumlah luasan panen komoditas pertanian (ha/tahun)	118,100	DINPPKP
						Program Penerapan Teknologi Pertanian	Luas penerapan teknologi intensifikasi pertanian (ha)	2,300	
							Prosentase penerapan teknologi IB (%)	80%	
							Program Pemberdayaan Penyuluh dan Peningkatan Penyuluhan Pertanian	Prosentase cakupan pelayanan Penyuluhan (WIBI)	
						Prosentase pengukuhan kenaikan kelas kelompok			
						- lanjut		9%	
						- madya		2%	
						Program Peningkatan Produksi Peternakan	- Utama	3%	
							Prosentase kenaikan populasi ternak besar	1%	
							Prosentase kenaikan populasi ternak kecil	3.00%	
							Prosentase kenaikan populasi ternak unggas	5%	
						Program Peningkatan Produksi/produktivitas Perkebunan	Cakupan layanan pemotongan ternak pada RPH	100%	
							Jumlah produksi kelapa (ton) setara kopra	24,967.14	
	Jumlah produksi kelapa deres dalam bentuk gula	18,655.94							

Keterkaitan dengan Misi Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Periode Tahun 2016-2021	Prioritas	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2020	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target 2020	OPD Pengelola
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							(ton)		
							Jumlah produksi cengkeh (ton)	532.08	
							Produktivitas kakao (kg/ha)	1,217.83	
							produktivitas karet (kg/ha)	866.71	
							Produktivitas aren (kg/ha)	1,070.53	
							Produktivitas kopi (kg/ha)	331.2153	
						Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perkebunan	Prosentase peningkatan jumlah kelompok tani yang menerapkan teknologi perkebunan (SLPHT)	8	
						Program Peningkatan Produksi Perikanan	Prosentase kenaikan produksi perikanan budidaya (per tahun)	3%	
							Prosentase kenaikan produksi perikanan tangkap (per tahun)	4%	
			8. Meningkatnya ketersediaan, distribusi dan konsumsi serta keamanan pangan	8. Skor Pola Pangan Harapan	85.90%	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Desa rawan / rentan pangan yang ditangani	12 desa	DINPPKP
							Rasio ketersediaan energi	100%	

Keterkaitan dengan Misi Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Periode Tahun 2016-2021	Prioritas	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2020	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target 2020	OPD Pengelola			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
							(2.200 kal/cap/hari)					
							Rasio ketersediaan protein (57 gr/ cap/hari)	100%				
		7. Mengembangkan agribisnis dalam pengelolaan potensi pertanian	9. Meningkatnya usaha agribisnis dalam pengelolaan potensi pertanian	9.1. Subsystem agroinput dan agroomfarm	100%	Program Agribisnis Komoditas Unggulan Pertanian dan Peternakan	Produksi Padi (ton/ th)	358,458	DINPPKP			
							Produksi jagung (ton/th)	20,937				
				Produksi durian (ton/th)	267							
				Produksi biofarmaka (ton/th)	4,800							
							9.2. Nilai Tukar Petani	105.87		Prosentase kenaikan populasi ternak kambing kaligesing (%)	0.50%	DINPPKP
									Program Agribisnis komoditas unggulan perikanan	Kelompok perikanan (pembenihan dan pembesaran) yang memiliki sertifikat CBIB meningkat	10	
										Cakupan wilayah pengembangan TPI	7	
							Even promosi perikanan meningkat	5				
				9.3 Subsystem agroprocessing dan agromarketing	75%	Program Agribisnis Komoditas Unggulan di sektor Hilir	Jumlah KUB yang dibina	106	DINPERINAKEK			
		8. Meningkatkan iklim investasi yang kondusif	10. Meningkatnya nilai investasi	10. Pertumbuhan nilai investasi	2%	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	Persentase Jumlah jenis ijin yang dilayani	100%	DINPMPTSP			
						Program Peningkatan Promosi investasi	Persentase peningkatan nilai investasi	2%, (237 M)				

Keterkaitan dengan Misi Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Periode Tahun 2016-2021	Prioritas	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2020	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target 2020	OPD Pengelola	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		9. Mengembangkan pariwisata unggulan dalam rangka menggerakkan perekonomian daerah	11. Berkembangnya dan meningkatnya daya jual potensi wisata	11. Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	20%	Program Pengembangan Destinasi, Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kinerja pengembangan pariwisata	85.00%	DINPARBUD	
		10. Meningkatkan kualitas koperasi, daya saing industri kecil dan menengah	12. Meningkatkan kuantitas dan kualitas koperasi dan UMK (Usaha Mikro Kecil)	12.1. Persentase pertumbuhan UMK	5%	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil	Prosentase Peningkatan Usaha mikro yang dibina	20%		
				12.2. Persentase Pertumbuhan koperasi (baru, aktif, sehat)	84.50%	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Prosentase Usaha Mikro yang berkembang menjadi usaha kecil	4%		
				13. Berkembangnya industri kecil dan menengah	13. Pertumbuhan PDRB sector industri	6.29%	Program Pengelolaan Industri Kecil dan Menengah	Prosentase jumlah koperasi aktif	89%	DINKUKM
								Prosentase Jumlah Koperasi sehat	84%	
		11. Meningkatkan peran sektor perdagangan dalam perekonomian daerah	14. Meningkatkan produktivitas sektor perdagangan	14. Pertumbuhan PDRB sector perdagangan	6.92%	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan	Prosentase industri kecil dan menengah yang dibina sistem pengelolaannya	14.47%	DINPERINAKER	
						Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Daerah	Prosentase jumlah pasar dalam kondisi baik	100%	DINKUKM	
							cakupan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan daerah	100%		

Keterkaitan dengan Misi Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Periode Tahun 2016-2021	Prioritas	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2020	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target 2020	OPD Pengelola	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
						Program Peningkatan promosi perdagangan	Cakupan jenis komoditas yang dipromosikan	100%		
Misi Kelima (5) "Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai kabupaten yang unggul di bidang pendidikan dan pelayanan kesehatan"	3. Peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan, peran pemuda dan olahraga serta pelestarian nilai-nilai budaya daerah	12. Meningkatkan pemerataan dan akses pada pendidikan berkualitas	15. Meningkatnya aksesibilitas pendidikan	15.1. Angka Harapan Lama Sekolah	14.1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD 3-6 tahun	56.40%	DINDIKPORA	
							APK PAUD 0-6 tahun	33.60%		
							Prosentase Ketersediaan kurikulum muatan lokal PAUD	100%		
							Prosentase Keterlaksanaan kurikulum muatan lokal PAUD	100%		
							Prosentase ketersediaan sarana prasarana penunjang pembelajaran PAUD	48.20%		
							Program Pendidikan Masyarakat	Prosentase Angka Buta Huruf (Penurunan)		0.18%
							Persentase Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) berkinerja A dan B	44.33%		
							15.2. Rata-rata lama sekolah	7.1		Program Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun
			APM SD/ SDLB/MI/ Paket A	87.88%						

Keterkaitan dengan Misi Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Periode Tahun 2016-2021	Prioritas	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2020	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target 2020	OPD Pengelola
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							APK SMP/ SMPLB/ MTs/ Paket B	100%	
							APM SMP/ SMPLB/ MTs/ Paket B	78.09%	
							Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD dan 6 km untuk SMP dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil	100.00%	
							Di setiap SD dan SMP tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru.	52.11%	

Keterkaitan dengan Misi Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Periode Tahun 2016-2021	Prioritas	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2020	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target 2020	OPD Pengelola
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Prosentase Ruang kelas SD sesuai standar nasional pendidikan dan memenuhi Keamanan, Kebersihan, Keindahan	92,06%	
							Prosentase Ruang kelas SMP sesuai standar nasional pendidikan dan memenuhi Keamanan, Kebersihan, Keindahan	96,25%	
							Prosentase SD yang memiliki perpustakaan	91,28%	
							Prosentase SMP yang memiliki Laboratorium Penunjang	83,86%	
							Prosentase SD yang memiliki sanitasi layak	100,00%	
							Prosentase SMP yang memiliki sanitasi layak	100,00%	
							Prosentase ketersediaan sarana prasarana penunjang pembelajaran SD/SMP	87,00%	
							Angka putus sekolah:		
							Jenjang SD/SDLB/MI	0,03%	
							Jenjang	0,06%	

Keterkaitan dengan Misi Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Periode Tahun 2016-2021	Prioritas	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2020	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target 2020	OPD Pengelola
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							SMP/SMPLB/MT's		
							Angka Kelulusan:		
							Angka Kelulusan SD/SDLB/MI	100%	
							Angka Kelulusan SMP/MTs/SMPLB	100%	
							Angka lulus pendidikan kesetaraan paket A	100%	
							Angka lulus pendidikan kesetaraan paket B	100%	
							Prosentase Ketersediaan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar	100%	
							Prosentase Keterlaksanaan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar	100%	
							Nilai rata rata Ujian Nasional		
							SD/MI	7.425	
							SMP/MTs	6.375	
							Prosentase Pengelolaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) yang sesuai standar	76%	
							Sekolah terakreditasi A	100%	

Keterkaitan dengan Misi Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Periode Tahun 2016-2021	Prioritas	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2020	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target 2020	OPD Pengelola
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							dan B		
							Angka Melanjutkan:		
							Jenjang SMP/MTs	100%	
							Jenjang SMA/SMK/MA	100%	
						Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Ketersediaan Pendidik yang telah berkualifikasi S-1/D-IV dan bersertifikat pendidik PAUDNI	713	
							Ketersediaan guru untuk SD sesuai standar	97.50%	
							Ketersediaan guru untuk SMP sesuai standar	96.50%	
							Di setiap SD tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik	91.50%	

Keterkaitan dengan Misi Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Periode Tahun 2016-2021	Prioritas	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2020	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target 2020	OPD Pengelola
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Di setiap SMP tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%	61.00%	
							Di setiap SMP tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris	42.00%	
							Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	76.00%	

Keterkaitan dengan Misi Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Periode Tahun 2016-2021	Prioritas	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2020	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target 2020	OPD Pengelola
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Kepala SMP berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	96.50%	
							Di setiap kabupaten / kota semua pengawas sekolah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	100%	
						Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Cakupan layanan manajemen pendidikan	100%	
		13. Mewujudkan pendidikan berbasis e-learning	16. Terwujudnya Satuan pendidikan berbasis e-learning	16.1. Cakupan wilayah penerapan e-learning di tingkat SD	100%	Program e-learning	Cakupan sekolah berbasis <i>e-learning</i> (<i>creative multi media</i>)	56.57%	DINDIKPORA
				16.2. Cakupan wilayah penerapan e-learning di tingkat SMP	100%				
Misi Ketiga (3) "Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai daerah tujuan wisata unggulan berbasis budaya dan kearifan lokal"		14. Meningkatkan Aktualisasi dan pelestarian Budaya serta kearifan lokal untuk menunjang pariwisata daerah	17. Meningkatnya partisipasi pelaku budaya daerah	17. Cakupan pelaku budaya dalam even budaya daerah	10%	Program Pengembangan dan Pelestarian Seni dan Budaya	Cakupan Gelar Seni	100%	DINPARBUD
							Misi Kesenian	100%	
			18. Meningkatkan pembinaan dan perlindungan asset budaya	18.1. Cakupan perlindungan asset budaya	38%	Program Pelestarian Pengelolaan Nilai Sejarah, Nilai Budaya, dan Kepurbakalaan	Jumlah cagar budaya yang diregistrasi	614	DINPARBUD
							Jumlah cagar budaya yang direvitalisasi	87	
							Tersedianya museum yang representatif	1	

Keterkaitan dengan Misi Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Periode Tahun 2016-2021	Prioritas	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2020	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target 2020	OPD Pengelola
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Misi Keempat (4) "Mewujudkan Kabupaten Purworejo yang unggul di bidang seni, budaya, dan olahraga"				18.2. Cakupan pembinaan asset budaya	100%	Program Pembinaan Seni Budaya dan Adat daerah	Cakupan Pembinaan Seni, Nilai Sejarah, Adat, dan Tradisi	100%	DINPARBUD
		15. Meningkatkan prestasi seni dan budaya daerah	19. Meningkatnya prestasi seni dan budaya daerah	19. Pertumbuhan prestasi seni dan budaya daerah	10%	Program Pembinaan Prestasi Seni dan Organisasi	Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian	86.25%	DINPARBUD
							Cakupan Organisasi	100%	
		16. Meningkatkan wahana pencapaian prestasi seni budaya dan olahraga	20. Meningkatnya ketersediaan wahana peningkatan prestasi seni budaya	20. Optimalisasi pemanfaatan pembinaan seni budaya	100%	Program Pengembangan Wahana Seni Budaya	Tersedianya tempat pembinaan seni budaya	100%	DINPARBUD
		17. Meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga	21. Meningkatnya ketersediaan wahana peningkatan prestasi pemuda dan olahraga	21. Optimalisasi pemanfaatan pembinaan pemuda dan olahraga di Heroes Park dan Sport center WR Supratman	100%	Program Pengembangan Wahana Pemuda dan Olahraga	Tersedianya tempat pembinaan pemuda dan olahraga	100%	DINDIKPORA
			22. Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga	22. Pertumbuhan prestasi pemuda dan olahraga	10%	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Jumlah prestasi olahraga	33	DINDIKPORA
							Jumlah penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah Kabupaten	18	
						Jumlah event olahraga untuk masyarakat	3		
						Prosentase klub / organisasi olahraga yang	90%		

Keterkaitan dengan Misi Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Periode Tahun 2016-2021	Prioritas	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2020	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target 2020	OPD Pengelola
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							aktif		
						Program Pengembangan Kepemudaan	Jumlah organisasi kepemudaan aktif	20	
							Jumlah Kewirausahaan Pemuda	17	
							Prosentase organisasi kepramukaan yang aktif	100%	
							Jumlah pemuda pelopor kabupaten	9	
Misi Kelima (5) "Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai kabupaten yang unggul di bidang pendidikan dan pelayanan kesehatan"	4. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan	18. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas selama 24 jam	23. Meningkatnya usia harapan hidup masyarakat	23.1. Usia Harapan Hidup	74.40	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Persentase cakupan pelayanan kesehatan RSUD dr. Tjitrowardojo	96.67%	RSUD dr. Tjitrowardojo dan DINKES
							Cakupan pelayanan gawat darurat level 3 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	90.00%	
						Program Pelayanan Promosi Kesehatan	Prosentase Satuan Pendidikan Dasar mendapatkan Promosi Kesehatan	100%	

Keterkaitan dengan Misi Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Periode Tahun 2016-2021	Prioritas	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2020	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target 2020	OPD Pengelola
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Prosentase Satuan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu melaksanakan Promosi Kesehatan	100%	
							Prosentase Satuan Puskesmas melaksanakan Promosi Kesehatan untuk Pemberdayaan dibidang kesehatan	100%	
							Prosentase Desa Siaga Aktif:		
							Mandiri	23%	
							Purna	45%	
							Madya	22%	
							Pratama	10%	
				23.2. Angka Kematian Ibu	70 / 100.000 KH	Program Pelayanan Skrining dan Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Daur Kehidupan	Prosentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Antenatal Sesuai Standar	100%	DINKES
							Prosentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan Sesuai Standar di Fasilitas Kesehatan	100%	

Keterkaitan dengan Misi Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Periode Tahun 2016-2021	Prioritas	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2020	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target 2020	OPD Pengelola
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				23.3. Angka Kematian Balita	10,5 /1.000 KH		Prosentase Usia bawah lima tahun (Balita) Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Fasilitas Kesehatan	100%	DINKES
				23.4. Angka Kematian Bayi	11/ 1.000 KH		Prosentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Fasilitas Kesehatan	100%	DINKES
				23.5. Prevalensi gizi buruk	0.05%		Prevalensi balita pendek (stunting)	7.00%	DINKES
							Eliminasi kretin baru (kasus)	0	
				23.1. Usia Harapan Hidup	74.40		Prosentase Siswa Satuan Pendidikan dasar mendapatkan skrining Kesehatan Sesuai Standar	100%	DINKES
							Prosentase Usia 15 - 59 tahun mendapatkan skrining Kesehatan Sesuai Standar	100%	
							Prosentase Remaja putri mendapat tablet tambah darah	40%	

Keterkaitan dengan Misi Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Periode Tahun 2016-2021	Prioritas	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2020	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target 2020	OPD Pengelola
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Prosentase Usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining Kesehatan Sesuai Standar	100%	
							Prosentase Penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	
							Prosentase Penderita diabetes mellitus mendapatkan pelayanan sesuai standar	100%	
							Prosentase desa /kel melaksanakan posbindu penyakit tidak menular	51.00%	
						Program Pelayanan Pemeriksaan Penyakit Menular	Prosentase Tuberculosis mendapatkan pelayanan Tuberculosis sesuai standar	100%	
							Prosentase Penderita Tuberculosis sembuh	80% dari yg ditangani	
							Prosentase orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	100%	

Keterkaitan dengan Misi Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Periode Tahun 2016-2021	Prioritas	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2020	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target 2020	OPD Pengelola
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Prosentase penderita DBD tertangani	100%	
							Prosentase ISPA/Diare dan penyakit menular lainnya tertangani	100%	
				23.6. Eliminasi malaria: API	<1		Prosentase Cakupan pelayanan penderita malaria yang mendapat pelayanan sesuai standar	100%	DINKES
				23.7. Eliminasi malaria: Kasus indogenius	20%				DINKES
				23.1. Usia Harapan Hidup	74.40	Program Pelayanan Kesehatan Lingkungan dan Respon Verifikasi terhadap SKDR	Prosentase satuan Pendidikan dasar mendapatkan pelayanan Hygiene sanitasi pangan sesuai standar	100%	DINKES
							Prosentase Respon Verifikasi terhadap SKDR (Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon) dalam waktu kurang dari 24 jam	100%	
							Prosentase layanan pemeriksaan air minum	100%	

Keterkaitan dengan Misi Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Periode Tahun 2016-2021	Prioritas	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2020	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target 2020	OPD Pengelola
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Jumlah desa yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat / ODF (Open Defecation Free)	100%	
						Program Kefarmasian, Pengawasan Obat dan Makanan	Cakupan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai kebutuhan	100%	
							Prosentase pengawasan obat dan makanan	55%	
							Prosentase penggunaan obat rasional	90.00%	
							Cakupan Pelayanan Sertifikasi Produk Pangan	100%	
						Program Upaya Kesehatan Perorangan	Jumlah Puskesmas terakreditasi	27 Puskesmas	
							Jumlah Puskesmas yg memberikan pelayanan 24 jam	27	
							Layanan Rumah Sakit Umum Kelas C	100%	
							Persentase Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai Standar	100%	

Keterkaitan dengan Misi Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Periode Tahun 2016-2021	Prioritas	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2020	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target 2020	OPD Pengelola
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Fasilitas Penunjang Pelayanan Kesehatan Yang teregristrasi	100%	
							Prosentase Puskesmas yang melaksanakan kesehatan olahraga	100%	
							Prosentase Puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja	100%	
							Cakupan Tenaga Kesehatan Yang teregristrasi	100%	
							Prosentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	
						Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Tingkat kondisi sarana dan prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	100%	
Misi Kedua (2) "Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai	5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup	19. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	24. Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup	24. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	68,5	Program Pengendalian pencemaran lingkungan	Prosentase Terpenuhiya baku mutu kualitas air sungai	80%	DINLH

Keterkaitan dengan Misi Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Periode Tahun 2016-2021	Prioritas	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2020	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target 2020	OPD Pengelola	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
gerbang ekonomi utama bagian selatan Provinsi Jawa Tengah yang berbasis pertanian, pariwisata, industri, dan perdagangan"			daerah				Prosentase terpenuhinya kualitas udara ambient	80%		
						Program Pengendalian kerusakan lingkungan	Prosentase tingkat tutupan lahan berupa hutan/vegetasi terhadap luas wilayah	60%		
						Program Pengelolaan Persampahan dan limbah	Prosentase Rumah tangga yang menerapkan 3R	30%		
Misi Tujuh (7) "Mewujudkan desa di Kabupaten Purworejo sebagai pusat pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat dalam berbagai bidang"	6. Peningkatan Kemandirian desa	20. Meningkatkan kemandirian desa melalui pemberdayaan masyarakat	25. Meningkatkan status desa	25.1. Persentase desa cepat berkembang	66.31%	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Prosentase LPMD/K dan KPMD yang berperan aktif dalam pembangunan desa	100%	DINPERMASDES	
					25.2. Persentase desa berkembang		27.29%	Jumlah Kelompok Simpan Pinjam Kelompok Perempuan yang aktif	3145	DINPERMASDES
					25.3. Persentase desa kurang berkembang		6.40%	Prosentase PKK aktif di desa / kelurahan	1	DINPERMASDES
								Jumlah UEP yang aktif	141	
								Jumlah BUMDES	355	
								Prosentase pasar desa yang aktif	95.00%	
								Prosentase UEP-SP-LPM yang aktif (Usaha Ekonomi Produktif-Simpan Pinjam-Lumbung Pangan Masyarakat)	100%	

Keterkaitan dengan Misi Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Periode Tahun 2016-2021	Prioritas	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2020	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target 2020	OPD Pengelola	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
							Prosentase posyandu aktif	100%		
		21. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif	26. Cakupan layanan pembangunan kawasan perdesaan	26. Persentase kawasan perdesaan yang tertangani	100%	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Prosentase BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) aktif	100%	DINPERMASDES	
							Jumlah unit usaha BUMDes Bersama	16		
Misi Kedua (2) "Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai gerbang ekonomi utama bagian selatan Provinsi Jawa Tengah yang berbasis pertanian, pariwisata, industri, dan perdagangan"	7. Pengurangan kemiskinan dan pengangguran	22. Meningkatkan pelayanan dasar dan akses terhadap ekonomi produktif masyarakat kurang mampu	27. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin	27. Persentase Cakupan pelayanan dasar dan akses terhadap ekonomi produktif masyarakat kurang mampu	100%	Program Peningkatan Akses Pendidikan Berkualitas Untuk Penduduk Miskin	Cakupan layanan pendidikan untuk penduduk miskin	100%	DINDIKPORA	
						Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin	Cakupan Masyarakat Miskin yang mendapat pelayanan Kesehatan	100.00%		DINKES
							Cakupan Masyarakat Miskin yang mendapat pelayanan Kesehatan rujukan	16.00%		
							Prosentase peningkatan maskin yang mendapatkan bantuan premi asuransi kesehatan oleh daerah	440.81%		
						Program Penanganan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah	Prosentase PMKS yang mendapatkan penanganan	20,47%	DINSOS PPPA	

Keterkaitan dengan Misi Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Periode Tahun 2016-2021	Prioritas	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2020	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target 2020	OPD Pengelola
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Kesejahteraan Sosial	Cakupan (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) PSKS yang dibina	13.82%	
						Program Peningkatan Kepesertaan Keluarga Berencana bagi Pasangan Usia Subur Miskin	Jumlah Pasangan Usia Subur miskin yang terlayani KB	2228 akseptor	DINSOSPPKBPPPA
						Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin	Prosentase desa yang sudah mengakomodir kebutuhan masyarakat miskin	80.00%	DINPERMASDES
							Persentase Rumah Tangga Miskin mendapatkan pemberdayaan ekonomi produktif terpadu	36.03%	
						Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Desa rawan / rentan pangan yang ditangani	6 desa	DINPPKP
							Rasio ketersediaan energi (2.200 kal/cap/hari)	100%	
							Rasio ketersediaan protein (57 gr/ cap/hari)	100%	
		23. Meningkatkan daya saing tenaga	28. Meningkatnya daya saing	28. Prosentase cakupan peningkatan daya saing	100%	Program Peningkatan Kesempatan kerja	Persentase tenaga kerja yang ditangani tiap tahun	14,83%	DINPERINAKER

Keterkaitan dengan Misi Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Periode Tahun 2016-2021	Prioritas	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2020	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target 2020	OPD Pengelola
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		kerja	tenaga kerja	tenaga kerja		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Pencari kerja yang mendapat pelayanan peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja tiap tahun	25,23%	
						Program Pengembangan dan Perlindungan Tenaga kerja	Capaian sarana Hubungan Industrial (HI) dan Syarat kerja	43,22%	
							Capaian Perlindungan dan Kesejahteraan pekerja	65,48%	
Misi Pertama (1) "Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai kabupaten yang religius dan demokratis"	8. Tata kelola pemerintahan yang baik dan kondusivitas daerah serta pengelolaan bencana	24. Meningkatkan kerukunan hidup beragama dan menanamkan nilai-nilai kehidupan beragama sejak usia dini	29. Meningkatnya semangat kehidupan beragama	29. Cakupan layanan koordinasi dan fasilitasi kehidupan beragama	100%	Program Fasilitasi dan koordinasi kehidupan beragama	Jumlah layanan koordinasi dan fasilitasi kehidupan beragama	100%	SETDA
		25. Meningkatkan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	30. Meningkatnya partisipasi publik dalam upaya perbaikan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan	30. Cakupan layanan komunikasi publik	100%	Program Pelayanan Komunikasi publik	wahana komunikasi publik	100%	SETDA dan DINKOMFINFO

Keterkaitan dengan Misi Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Periode Tahun 2016-2021	Prioritas	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2020	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target 2020	OPD Pengelola	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Misi Keenam (6) "Mewujudkan Kabupaten Purworejo menjadi kabupaten yang memiliki aparatur pemerintahan yang mampu melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan partisipatif yang berorientasi pada optimalisasi pelayanan publik."		26. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik	31. Terwujudnya perencanaan yang akuntabel dan tepat waktu	31. Perencanaan pembangunan daerah yang akuntabel dan tepat waktu	97%	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan Optimalisasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	BAPPEDA	
							Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Prosentase ketepatan waktu penyusunan APBD dan APBD Perubahan	100%	BPPKAD
								Tingkat capaian PAD terhadap target	100%	
								Prosentase peningkatan PAD terhadap pendapatan daerah	15.10%	
								Prosentase pemantauan penyusunan APBDes tepat waktu	100%	
Tertib Pengelolaan Keuangan Daerah	90.00%									

Keterkaitan dengan Misi Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Periode Tahun 2016-2021	Prioritas	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2020	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target 2020	OPD Pengelola
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Ketepatan waktu dan keakuratan laporan keuangan daerah	100%	
							Prosentase pengelolaan aset yang dikelola dengan baik	100%	
			33. Meningkatnya kapasitas pembinaan dan pengawasan internal pemerintahan	33. Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Purworejo	3	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Prosentase cakupan desa yang diperiksa / dievaluasi	80.81%	INSPEKTORAT
							Prosentase cakupan satuan kerja yang diperiksa per tahun	80%	
							Cakupan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah	100%	
							Prosentase cakupan pemeriksaan kasus yang tertangani	100%	
							Prosentase pengembalian kerugian negara/darah ke kas negara/daerah	100%	
							Tingkat ketersediaan laporan pajak-pajak pribadi dan LHKASN	100%	

Keterkaitan dengan Misi Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Periode Tahun 2016-2021	Prioritas	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2020	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target 2020	OPD Pengelola
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Prosentase SDM Pemeriksa yang mengikuti Bimbingan Teknis	100%	
							Tingkat SDM Fungsional Pemeriksa sesuai Penjenjangan	100%	
							Tingkat Ketersediaan sistem dan prosedur pengawasan	100%	
			34. Meningkatnya kompetensi aparatur	34. Persentase aparat yang memiliki kapasitas sesuai standard	95.5%	Program Manajemen Kepegawaian Daerah	Prosentase Ketersediaan Jumlah Pegawai Sesuai Formasi	92.00%	BKD
							Prosentase pegawai yang telah lulus diklat prajabatan	100%	
							Prosentase jabatan pimpinan tinggi, administrasi dan fungsional yang telah memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan	95.50%	
							Tingkat Disiplin Pegawai	99.30%	
							Prosentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian	100%	

Keterkaitan dengan Misi Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Periode Tahun 2016-2021	Prioritas	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2020	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target 2020	OPD Pengelola	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			35. Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih efektif	35.1. Cakupan layanan perumusan kebijakan daerah	100%	Program Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah	Tingkat Ketersediaan Kebijakan Daerah untuk penyelenggaraan Pemerintah Daerah	100%	SEKDA	
				35.2. Cakupan pelayanan perangkat daerah	100%	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan	Prosentase Penyelesaian layanan administrasi pemerintah daerah	100%	SEKDA	
				35.3. Persentase penerapan SOP Pelayanan Publik dan Perangkat daerah	95%		Tingkat Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	100%	SEKDA	
				36.4. Indeks kepuasan layanan masyarakat	100%		Tingkat kemudahan akses masyarakat terhadap informasi publik	100%	SEKDA	
				35.5. Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	100%		Program Koordinasi Perangkat Daerah	Prosentase Jumlah Urusan Daerah yang dikoordinasikan	100%	SEKDA
				35.6. Persentase BUMD sehat	100%			Tingkat pelayanan pembentukan kerjasama daerah	100%	SEKDA
				36. Optimalisasi fungsi camat dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan	36. Persentase penyelesaian permasalahan pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan		100%	Program Koordinasi Tingkat Kecamatan	Capaian penyelesaian permasalahan bidang pemerintahan	100%

Keterkaitan dengan Misi Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Periode Tahun 2016-2021	Prioritas	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2020	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target 2020	OPD Pengelola
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			pemberdayaan masyarakat desa						
							Capaian penyelesaian permasalahan bidang pemberdayaan masyarakat	100%	
							Capaian penyelesaian permasalahan bidang pembangunan	100%	
							Capaian penyelesaian permasalahan bidang tramtibum	100%	
							Capaian penyelesaian permasalahan bidang kemasyarakatan	100%	
						Program Pembinaan Desa/Kelurahan	Cakupan jumlah Desa/Kelurahan yang terbina	494 desa/kel (100%)	
						Program Pelayanan Masyarakat	Prosentase jumlah permohonan pelayanan yang tertangani	100%	
			37. Terselenggaranya dukungan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD	37. Prosentase terwujudnya pelaksanaan fungsi DPRD yang tepat waktu.	100%	Program Dukungan penyelenggaraan fungsi DPRD	Terwujudnya dukungan penyelenggaraan fungsi DPRD	100%	SEKRETARIS DPRD

Keterkaitan dengan Misi Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Periode Tahun 2016-2021	Prioritas	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2020	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target 2020	OPD Pengelola
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			38. Meningkatnya layanan penanganan masalah pertanahan	38. Persentase penanganan permasalahan pertanahan	100%	Program Koordinasi Penyelenggaraan Pertanahan	Prosentase tanah negara yang teridentifikasi	100%	DINPERKIMTAN
							Tingkat pelayanan pengadaan dan penanganan sengketa pertanahan	100%	
			39. Meningkatnya pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	39. Cakupan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	100%	Program Penghargaan Kepahlawanan	Cakupan penghargaan kepahlawan	100%	DINSOS PPKBPPPA
			40. Optimalnya pelayanan penanggulangan bencana dan kebakaran di daerah	40.1. Cakupan pelayanan penanggulangan bencana	100%	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Daerah	Kelompok Jejaring Kebencanaan	16 wilayah	Pelaksana BPBD dan SEKDA
							Cakupan wilayah pencegahan bencana	100.00%	
							Prosentase ketersediaan analisis jenis bencana	100.00%	

Keterkaitan dengan Misi Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Periode Tahun 2016-2021	Prioritas	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2020	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target 2020	OPD Pengelola
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Cakupan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana kewilayahan	24.39%	
							Cakupan kejadian tanggap darurat yang tertangani	100%	
							Tingkat pemberdayaan masyarakat pasca bencana	40%	
							Cakupan pemenuhan sarana prasarana pasca bencana	60%	
				40.2. Cakupan pelayanan kebakaran kabupaten	34,2%	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Tingkat Penanganan Kejadian Kebakaran	100%	SATPOL PP DAMKAR
							Tingkat waktu tanggap (response time rate)	100%	
			41. Meningkatnya layanan tramtibumlinmas	41. Cakupan pelayanan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat	100%	Program Pemeliharaan Keamanan, Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat serta Pencegahan Tindak Kriminal	Tertanganinya Gangguan Trantibum	100%	SATPOL PP DAMKAR
						Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Prosentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan Kepada Masyarakat'	100%	SEKDA

Keterkaitan dengan Misi Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Periode Tahun 2016-2021	Prioritas	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2020	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target 2020	OPD Pengelola
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Program Peningkatan Kewaspadaan Dini Dan Pembinaan Masyarakat	Tingkat koordinasi kerjasama penyelesaian konflik di daerah	100%	
						Program Pendidikan Politik Masyarakat	Prosentase tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu	80%	
			42. Meningkatnya minat baca masyarakat	42. Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan	2,76%	Program pengelolaan, pengembangan dan pembinaan perpustakaan	Cakupan layanan perpustakaan (jenis layanan)	16	DINARPUS
							Jumlah koleksi bahan pustaka	47,420	
			43. Meningkatnya tertib kearsipan daerah	43. Persentase tertib kearsipan lembaga pemerintah daerah	86%	Program pengelolaan perlindungan dan penyelamatan arsip daerah	Prosentase pertumbuhan arsip yang dikelola	7%	DINARPUS
			44. Meningkatnya layanan ketersediaan statistik sektoral dan daerah yang akurat	44. Tingkat ketersediaan data statistic sektoral dan daerah yang akurat	100%	Program Penyusunan Statistik	Cakupan ketersediaan statistik dasar dan sektoral	100%	DINKOMINFO
			45. Meningkatnya layanan informasi dan fasilitasi penyelenggaraan transmigrasi	45. Cakupan layanan informasi dan fasilitasi penyelenggaraan transmigrasi	100%	Program Penyelenggaraan Transmigrasi	Kelancaran Pelaksanaan Transmigrasi	100%	DINPERINAKER

Keterkaitan dengan Misi Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Periode Tahun 2016-2021	Prioritas	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2020	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target 2020	OPD Pengelola
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			46. Meningkatnya fasilitasi serta layanan data dan informasi urusan ESDM	46. Cakupan layanan informasi dan fasilitasi ESDM	100%	Program Fasilitasi Penyelenggaraan Energi Sumber Daya Mineral	Prosentase Cakupan Layanan Fasilitasi ESDM	100%	DINPMPTSP
			47. Meningkatnya keterbukaan informasi dan komunikasi publik yang berbasis Teknologi Informasi	47.1. Persentase perangkat daerah yang memiliki website yang interaktif	100%	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase PD yang memiliki jaringan berbasis LAN	100%	DINKOMINFO
				47.2. Cakupan layanan cybercity	100%		Cakupan layanan Teknologi Informasi	100%	
				47.3. Cakupan layanan sistem informasi desa	100%		Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan kelompok Informasi	100%	
				47.4. Cakupan layanan system informasi pemerintah daerah	98%		Persentase data dan informasi pemerintah yang dipublikasikan	100%	
							Persentase pendirian tower telekomunikasi sesuai cellplan	100%	
			48. Meningkatnya keamanan informasi pemerintah daerah	48. Cakupan layanan pengamanan informasi persandian	100%	Program Penyelenggaraan Persandian	Prosentase layanan persandian	100%	DINKOMINFO

Keterkaitan dengan Misi Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Periode Tahun 2016-2021	Prioritas	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2020	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target 2020	OPD Pengelola
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			49. Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	49.1. Persentase kepemilikan kartu keluarga	96.90%	Program Pelayanan Administrasi Kependudukan	Persentase pelayanan Administrasi Kependudukan	100%	DINDUKCAPIL
				49.2. Persentase kepemilikan KTP elektronik	96%				
				49.3. Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	70%				
				49.4. Persentase kepemilikan Akte kelahiran bagi bayi yang lahir pada tahun berjalan	90.00%				
				49.5. Persentase penduduk yang memiliki akta kelahiran bagi penduduk usia 0-18 tahun	90.00%				
				49.6. Persentase kepemilikan Akte kematian	70%				
				49.7. Persentase kepemilikan Akte perkawinan non muslim	100%				
			50. Terkendalinya pertumbuhan penduduk	50.1. Angka pertumbuhan penduduk	0.35	Program Keluarga Berencana (KB)	Rata-rata jumlah anak per keluarga	1.3	DINSOS PPKBPPPA
							Jumlah kelompok KB pria	52	
							Rasio akseptor KB	10.6	
							Cakupan peserta KB aktif	83.00%	

Keterkaitan dengan Misi Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Periode Tahun 2016-2021	Prioritas	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2020	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target 2020	OPD Pengelola
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Prosentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmetneed)	7.00%	
							Prosentase remaja yang diberikan penyuluhan KRR	10.50%	
							Prosentase Jumlah peserta KB Mandiri	43.52%	
				50.2. Cakupan keluarga yang mendapatkan pelayanan UPPKS	2.70%	Program Keluarga Sejahtera	Persentase anggota UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) yang ber KB	83.84%	DINSOS PPKBPPPA
				50.3. Cakupan keluarga yang mendapatkan layanan Tri Bina	62.44%		Cakupan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) Paripurna	19.47%	DINSOS PPKBPPPA
							Cakupan Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) Paripurna	37.94%	
							Cakupan Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) Paripurna	20.73%	
			51. Meningkatnya kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan	51.1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93.3	Program Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Prosentase SKPD Kabupaten yang melaksanakan Program dan Kegiatan Responsif Gender	88%	DINSOS PPPA

Keterkaitan dengan Misi Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Periode Tahun 2016-2021	Prioritas	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2020	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target 2020	OPD Pengelola
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			anak dan pemenuhan hak anak				Prosentase Anggaran Responsif Gender di PD Kabupaten	40%	
							Prosentase Desa yang menerapkan kebijakan responsif gender dalam perencanaan anggaran desa	80%	
				51.2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	69		Jumlah kelompok perempuan yang dilatih	40	DINSOS PPPA
							Cakupan ketersediaan tenaga pelayanan pengaduan terlatih bantuan hukum untuk mendampingi korban dan saksi dan layanan pemulangan korban perempuan dan anak	100%	
				51.3. Cakupan layanan pemenuhan hak anak (indicator pemenuhan hak anak)	80%		Prosentase penanganan tindak kekerasan berbasis gender dan anak	100%	DINSOS PPPA
							Prosentase Capaian indikator Kabupaten Purworejo Layak Anak	80.00%	
							Prosentase pemenuhan perlindungan dan kesejahteraan anak	85.00%	

Keterkaitan dengan Misi Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Periode Tahun 2016-2021	Prioritas	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2020	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target 2020	OPD Pengelola
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			52. Meningkatnya dukungan kinerja perangkat daerah.	52. Cakupan dukungan terhadap kinerja perangkat daerah	100%	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	SEMUA OPD kecuali RSUD
						Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Cakupan sarana prasarana aparatur yang berfungsi dengan baik	100%	SEMUA OPD kecuali RSUD
						Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	SEMUA OPD kecuali RSUD
						Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	100%	SEMUA OPD kecuali RSUD
						Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Prosentase Tersedianyan Data Dasar Pembangunan	100%	SEMUA OPD kecuali RSUD

Keterkaitan dengan Misi Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Periode Tahun 2016-2021	Prioritas	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2020	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target 2020	OPD Pengelola
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Misi Keenam (6) "Mewujudkan Kabupaten Purworejo menjadi kabupaten yang memiliki aparatur pemerintahan yang mampu melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan partisipatif yang berorientasi pada optimalisasi pelayanan publik.	9. Penguatan inovasi daerah dan teknologi tepat guna	26. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik	53. Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)	53. Prosentase penguatan SIDa	100%	Program Penelitian dan Pengembangan	Prosentase Cakupan penelitian pengembangan	100%	BAPPEDA

Sumber: RPJMD Kabupaten Purworejo tahun 2016-2021

4.2.7. Arah Pengembangan Wilayah

Strategi dari pengembangan wilayah ada 2 (dua) hal utama yaitu pengembangan kawasan strategis kabupaten melalui pembangunan infrastruktur kawasan strategis dan mewujudkan pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif. Harapannya kawasan strategis dapat menjadi pengungkit kemajuan pembangunan di Kabupaten Purworejo. Secara umum infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, drainase, dan irigasi menjadi hal yang pokok dan dibutuhkan untuk kepentingan publik. Daya saing wilayah akan bertambah jika ketersediaan infrastruktur publik tersebut dapat dipenuhi.

Arahan kebijakan sebagai dasar dalam pembangunan kewilayahan tetap mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2031. Tiga isu utama yang mempengaruhi kebijakan pembangunan kewilayahan di Kabupaten Purworejo terdiri atas:

- 1) pembangunan Bandara YIA (*Yogyakarta International Airport*) sebagai *Airport city Aerotropolis* di Kabupaten Kulonprogo sehingga Kabupaten Purworejo menjadi *bordercity*.
- 2) pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Borobudur dan sekitarnya.
- 3) pembangunan Bendung Bener di Kabupaten Purworejo.

Lokasi program dan kegiatan dalam RKPD Tahun 2020 harus sesuai dengan ketentuan rencana pemanfaatan ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2031. Program dan kegiatan kewilayahan dalam RKPD Tahun 2020 direncanakan mengacu indikasi program dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2031.

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021, maka upaya pencapaiannya melalui perumusan program prioritas daerah. Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam menyusun RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2020 telah melakukan optimalisasi 3 (tiga) aspek pendekatan *tematik-hololistic, integratif dan spasial* dan penerapan *money follow program*. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk memilih program prioritas yang konsekuensinya akan mendapatkan porsi alokasi pendanaan program yang signifikan sehingga akan lebih efektif dan tepat sasaran.

Rencana program prioritas daerah beserta pendanaan indikatif selanjutnya untuk menjadi pedoman penyempurnaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020. Adapun program prioritas berdasarkan masing-masing urusan disajikan dalam Tabel 5.1. Sedangkan Matrik Rencana Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 disajikan dalam Tabel 5.2.

Tabel 5.1.
Program Prioritas dan Pagu Indikatif Tahun 2020

NO	URUSAN	PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENGELOLA
1	2	3	4	5
A	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR			
1	URUSAN PENDIDIKAN			
1		Program Pendidikan Anak Usia Dini	1.051.294.633	Dindikpora
2		Program Pendidikan Masyarakat	1.812.760.353	Dindikpora
3		Program Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun	172.096.616.903	Dindikpora
4		Program Peningkatan Akses Pendidikan Berkualitas Untuk Penduduk Miskin	33.330.000	Dindikpora
5		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.832.058.000	Dindikpora
6		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1.057.082.617	Dindikpora
2	URUSAN KESEHATAN			
7		Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin	16.710.000.000	Dinkes
8		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan	225.673.492.200	RSUD
9		Program Pelayanan Promosi Kesehatan	279.852.500	Dinkes
10		Program Pelayanan Skrining dan Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Daur Kehidupan	79.708.246.865	Dinkes
11		Program Pelayanan Pemeriksaan Penyakit Menular	1.185.000.000	Dinkes
12		Program Pelayanan Kesehatan Lingkungan dan Respon Verifikasi terhadap SKDR	1.565.730.500	Dinkes
13		Program Kefarmasian, Pengawasan Obat dan Makanan	8.511.168.000	Dinkes
14		Program Upaya Kesehatan Perorangan	76.575.520.000	Dinkes

NO	URUSAN	PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENGELOLA
1	2	3	4	5
15		Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	14.800.000.000	Dinkes
3	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
16		Program Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	81.552.960.000	DinPUPR
17		Program Pengembangan dan Pengelolaan Air bersih	3.631.267.000	Dinperkimtan
18		Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan	7.071.624.800	DinPUPR/DinLH
19		Program Pengembangan dan pengelolaan sistem drainase	450.000.000	DinPUPR
20		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang daerah	501.836.000	DinPUPR
21		Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	150.000.000	DinPUPR
22		Program Pengembangan dan Pengelolaan Bangunan Gedung	64.122.448.000	DinPUPR
23		Program Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi	140.612.000	DinPUPR
24		Program pengembangan infrastruktur kawasan strategis	11.703.700.000	DinPUPR
25		Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi	20.413.723.100	DinPUPR
4	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
26		Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	972.334.200	Dinperkimtan
27		Program Penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh	25.000.000	Dinperkimtan
28		Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial	40.500.000	Dinperkimtan/BPBD
5	URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN			

NO	URUSAN	PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENGELOLA
1	2	3	4	5
	MASYARAKAT			
29		Program Pemeliharaan Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat serta Pencegahan Tindak Kriminal	2.631.163.200	Satpol PP dan Damkar
30		Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Daerah	2.444.042.500	BPBD
31		Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	662.644.400	Satpol PP dan Damkar
32		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	100.000.000	Kantor Kesbangpol
33		Program Peningkatan Kewaspadaan Dini Dan Pembinaan Masyarakat	975.612.000	Kantor Kesbangpol
34		Program Pendidikan Politik Masyarakat	105.000.000	Kantor Kesbangpol
6	URUSAN SOSIAL			
35		Program Penanganan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	2.881.107.000	DinSosPPKBPPPA
36		Program Penghargaan Kepahlawanan	77.288.400	DinSosPPKBPPPA
B	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR			
1	URUSAN TENAGA KERJA			
37		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.361.147.580	Dinperinaker
38		Program Peningkatan Kesempatan kerja	304.222.100	Dinperinaker
39		Program Pengembangan dan perlindungan Tenaga kerja	195.000.000	Dinperinaker
2	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
40		Program Pemberdayaan Perempuan dan Anak	1.996.093.500	DinSosPPKBPPPA
3	URUSAN PANGAN			
41		Program Peningkatan Ketahanan Pangan	406.087.400	DinPPKP
4	URUSAN PERTANAHAN			

NO	URUSAN	PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENGELOLA
1	2	3	4	5
42		Program Koordinasi Penyelenggaraan Pertanahan	141.198.000	Dinperkimtan
5	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP			
43		Program Pengendalian pencemaran lingkungan	898.403.000	DinLH
44		Program Pengendalian kerusakan lingkungan	1.193.640.000	DinLH
45		Program Pengelolaan Persampahan dan limbah	342.178.400	DinLH
6	URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
46		Program Pelayanan Administrasi Kependudukan	3.202.950.700	Disdukcapil
7	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
47		Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin	67.138.900	Dinpermasdes
48		Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.397.026.000	Dinpermasdes
49		Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	88.315.200	Dinpermasdes
8	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
50		Program Keluarga Berencana (KB)	8.603.509.000	DinSosPPKBPPPA
51		Program Peningkatan Kepesertaan Keluarga Berencana bagi Pasangan Usia Subur Miskin	114.000.000	DinSosPPKBPPPA
52		Program Keluarga Sejahtera	267.612.000	DinSosPPKBPPPA
9	URUSAN PERHUBUNGAN			
53		Program Pengelolaan Transportasi Darat	12.392.064.200	Dinhub
10	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI			
54		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	3.763.239.700	Dinkominfo
11	URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH			
55		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	285.000.000	DinKUKMP
56		Program Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil	2.175.929.600	DinKUKMP
12	URUSAN PENANAMAN MODAL			

NO	URUSAN	PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENGELOLA
1	2	3	4	5
67		Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	589.111.700	DinPMPTSP
68		Program Peningkatan Promosi investasi	411.968.200	DinPMPTSP
13	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
69		Program Pembinaan dan Masyarakatan Olahraga	655.112.100	Dindikpora
70		Program Pengembangan Kepemudaan	372.500.000	Dindikpora
71		Program Pengembangan Wahana Pemuda dan Olahraga	10.162.448.000	Dindikpora
14	URUSAN STATISTIK			
72		Program Penyusunan Statistik	260.000.000	Dinkominfo
15	URUSAN PERSANDIAN			
73		Program Penyelenggaraan Persandian	58.685.000	Dinkominfo
16	URUSAN KEBUDAYAAN			
74		Program Pengembangan dan Pelestarian Seni dan Budaya	1.446.945.000	Dinparbud
75		Program Pelestarian Pengelolaan Nilai Sejarah, Nilai Budaya, dan Kepurbakalaan	4.172.736.000	Dinparbud
76		Program Pembinaan Seni Budaya dan Adat daerah	109.770.000	Dinparbud
77		Program Pembinaan Prestasi Seni dan Organisasi	424.496.000	Dinparbud
78		Program Pengembangan Wahana Seni Budaya	1.194.857.000	Dinparbud
17	URUSAN PERPUSTAKAAN			
79		Program pengelolaan, pengembangan dan pembinaan perpustakaan	454.657.200	Dinarpus
18	URUSAN KEARSIPAN			
80		Program pengelolaan, perlindungan dan penyelamatan arsip daerah	420.284.000	Dinarpus
C	URUSAN PILIHAN			
1	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN			

NO	URUSAN	PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENGELOLA
1	2	3	4	5
81		Program Peningkatan Produksi Perikanan	1.449.078.876	DinPPKP
82		Program Agribisnis komoditas unggulan perikanan	40.000.000	DinPPKP
2	URUSAN PARIWISATA			
83		Program Pengembangan Destinasi, Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	21.038.957.700	Dinparbud
3	URUSAN PERTANIAN			
84		Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian	2.126.705.400	DinPPKP
85		Program Penerapan Teknologi Pertanian	70.000.000	DinPPKP
86		Program Peningkatan Produksi/produktivitas Perkebunan	227.000.000	DinPPKP
87		Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perkebunan	160.694.000	DinPPKP
88		Program Pemberdayaan Penyuluh dan Peningkatan Penyuluhan Pertanian	3.031.250.800	DinPPKP
89		Program Peningkatan Produksi Peternakan	301.000.000	DinPPKP
90		Program Agribisnis Komoditas Unggulan Pertanian dan Peternakan	1.520.249.800	DinPPKP
5	URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			
91		Program Fasilitasi Penyelenggaraan Energi Sumber Daya Mineral	19.014.300	DinPMPTSP
6	URUSAN PERDAGANGAN			
92		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan	9.895.446.100	DinKUKMP
93		Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Daerah	509.724.000	DinKUKMP
94		Program Peningkatan promosi perdagangan	495.133.000	
7	URUSAN PERINDUSTRIAN			

NO	URUSAN	PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENGELOLA
1	2	3	4	5
95		Program Pengelolaan Industri Kecil dan Menengah.	2.176.836.000	Dinperinaker
96		Program Agribisnis Komoditas Unggulan di sektor Hilir	160.000.000	Dinperinaker
8	URUSAN TRANSMIGRASI			
97		Program Penyelenggaraan Transmigrasi	150.612.000	Dinperinaker
D	FUNGSI PENUNJANG URUSAN			
1	FUNGSI PENUNJANG URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN			
98		Program Fasilitasi dan koordinasi kehidupan beragama	1.827.172.300	Setda
99		Program Pelayanan Komunikasi publik	157.433.000 / 581.732.900	Setda/Dinkominfo
100		Program Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah	568.875.900	Setda
101		Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan	1.042.744.300 / 6.436.608.150	Dinpermasdes / Setda
102		Program Koordinasi Perangkat Daerah	1.833.278.800	Setda
103		Program Dukungan penyelenggaraan fungsi DPRD	22.632.060.280	Set-DPRD
104		Program Koordinasi Tingkat Kecamatan	5.774.117.300	16 Kecamatan
105		Program Pembinaan Desa/Kelurahan	29.903.445.700	16 Kecamatan
106		Program Pelayanan Masyarakat	201.738.500	16 Kecamatan
2	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PENGAWASAN			
107		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	3.847.588.800	Inspektorat
3	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PERENCANAAN			
108		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	3.013.661.700	Bappeda
4	FUNGSI PENUNJANG URUSAN KEUANGAN			
109		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	9.292.709.900	BPPKAD
5	FUNGSI PENUNJANG URUSAN KEPEGAWAIAN			

NO	URUSAN	PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENGELOLA
1	2	3	4	5
110		Program Manajemen Kepegawaian Daerah	4.321.196.000	BKD
7	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
111		Program Penelitian dan Pengembangan	275.000.000	Bappeda
E	ADMINISTRASI UMUM PADA PERANGKAT DAERAH			
112		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	17.710.515.147	Semua OPD selain RSUD
113		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	15.985.362.950	Semua OPD selain RSUD
114		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2.808.475.855	Semua OPD selain RSUD
115		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.066.724.300	Semua OPD selain RSUD
116		Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan	834.562.300	Semua OPD selain RSUD
JUMLAH				

Sumber: Hasil Analisis, 2019

Tabel 5.2.
Rencana Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021

Nama Perangkat Daerah : DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	TOTAL				133.106.865.170,00				194.124.517.900,00
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar								
11	Pendidikan				121.916.805.070,00				181.551.314.301,00
111	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran		100.00 %	679.962.865,00			100.00 %	744.593.151,50
11.125	Pengelolaan Surat-menyurat dan Kearsipan	Layanan surat-menyurat dan kearsipan	Dindikpora, PPK 16 kec	12.00 Bulan	101.832.500,00	DAU		12.00 Bulan	112.015.750,00
11.126	Penyediaan Layanan Komunikasi, Informasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Layanan komunikasi, informasi, sumber daya air dan listrik	Dindikpora, PPK 16 kec	12.00 Bulan	202.692.665,00	DAU		12.00 Bulan	222.961.931,50
11.127	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Layanan kebersihan kantor	Dindikpora, PPK 16 kec	12.00 Bulan	36.714.100,00	DAU		12.00 Bulan	37.019.510,00
11.128	Koordinasi dan Konsultasi Internal dan Eksternal	Layanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Dindikpora, PPK 16 kec, Luar Daerah	12.00 Bulan	338.723.600,00	DAU		12.00 Bulan	372.595.960,00
112	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Berfungsi Dengan Baik		100.00 %	210.815.000,00			100.00 %	278.709.750,00
1.129	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	Dindikpora	2.00 unit	15.572.000,00	DAU		2.00 unit	17.129.200,00
11.222	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	Dindikpora, PPK 16 kec (direncanakan rehab berat)	17.00 Unit/Th	71.000.000,00	DAU		120.00 Unit/Th	73.205.000,00
11.224	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	Dindikpora, PPK 16 kec	24.00 Unit/Th	87.000.000,00	DAU		24.00 unit	147.408.250,00
11.249	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara rutin/berkala	Dindikpora, PPK 16 kec	73.00 Unit/Th	37.243.000,00	DAU		73.00 unit	40.967.300,00
116	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase capaian kinerja dan keuangan		100.00 %	414.559.405,00			100.00 %	1.394.381.592,50
1.165	Penyusunan Pelaporan Keuangan	Dokumen pelaporan keuangan	Dindikpora	19.00 Dok	278.871.405,00	DAU		19.00 Dok	306.758.545,50
1.166	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan	Dokumen perencanaan dan evaluasi pelaporan	Dindikpora	8.00 Dok	135.688.000,00	DAU		8.00 Dok	1.087.623.047,00
117	Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Prosentase tersedianya data dasar pembangunan		100.00 %	174.728.000,00			100.00 %	1.250.487.301,00
1.171	Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Data Dasar Pembangunan	Dindikpora	3.00 Dok	174.728.000,00	DAU		3.00 Dok	1.250.487.301,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.1.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	% Keterlaksanaan kurikulum muatan lokal PAUD, dan Pendidikan Non Formal		100.00 %	480.730.800,00			100.00 %	1.051.294.633,00
		% Ketersediaan kurikulum muatan lokal PAUD, dan Pendidikan Non Formal		100.00 %				100.00 %	
		% ketersediaan sarana prasarana penunjang pembelajaran PAUDNI		45.80 %				45.80 %	
		APK PAUD 0-6 tahun		32.40 %				32.40 %	
		APK PAUD 3-6 tahun		32.40 %				32.40 %	
11.151	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini TK Negeri	3 TK Negeri, 12.921 TK Swasta	300	81.634.000,00	DAU			188.842.773,00
11.159	Pendampingan BOP PAUD	Pendampingan BOP PAUD	Dindikpora	10.000	42.633.200,00	DAU			75.000.000,00
111.528	Seleksi Gebyar PAUD, lomba gugus PAUD dan Kelompok Bermain berprestasi dan Bunda PAUD	Seleksi Gebyar PAUD	Dindikpora, Lembaga PAUD	560.00 Kali	98.592.600,00	DAU		Kali	108.451.860,00
111.528	Pengembangan Sarana Prasarana PAUD (Bankeu)	UGB	TK Pembina Bagelen, DESA BAGELEN - BAGELEN TK Pembina Bayan, DESA BAYAN - BAYAN	2 Unit	0,00	BANPROV	Kebutuhan: Rp.275.000.000,-		275.000.000,00
111.528	Pengadaan alat permainan edukatif (APE) PAUD (DAK)	Alat permainan edukatif tercukupi	TK Negeri Pembina Bayan, TK Negeri Pembina Purworejo dan TK Negeri Pembina Bagelen	3 TKN	53.871.000,00	DAK	Kebutuhan : Rp.48.050.994,-		55.000.000,00
111.528	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta perabotnya (DAK)	Ruang Kelas tercukupi	TK N Bayan	1 ruang	0,00	DAK	Kebutuhan : Rp.177.847.700,-		180.000.000,00
111.528	Pembangunan area bermain beserta APE luar ruang (DAK)	Area bermain beserta APE luar ruang tercukupi	TK N Bagelen	1 paket	0,00	DAK	Kebutuhan : Rp.20.718.300,-		25.000.000,00
111.528	Pembangunan toilet (jamban) siswa beserta sanitasinya (DAK)	Toilet siswa tercukupi	TKN Purworejo	2 unit	60.000.000,00	DAK	Kebutuhan : Rp.60.000.000,-		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
111.528	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (DAK)	Operasional 3TK	TK Negeri Pembina Bayan, TK Negeri Pembina Purworejo dan TK Negeri Pembina Bagelen	3 TKN	144.000.000,00	DAK			144.000.000,00
1.1.16	Program Pendidikan Masyarakat	Prosentase Angka Buta Huruf (Penurunan)		0.18 %	386.115.000,00			0.17 %	1.812.760.353,00
		Prosentase Lembaga Kursus dan Pelatihan (LPK) Berkinerja A dan B		44.33 %				44.93 %	
11.161	Pemberantasan Buta Aksara	Pemberantasan Buta Aksara di 16 Kecamatan	Dindikpora	16.00 Kecamatan	75.500.000,00	DAU		16.00 Kecamatan	103.434.273,00
11.162	Operasional satuan pendidikan Non Formal Kabupaten Purworejo	Operasional SPNF	Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF) kutoarjo	12 bulan	83.815.000,00	DAU		12 bulan	333.889.825,00
11.163	Pembinaan Lembaga Kursus Pelatihan	Pembinaan Lembaga Kursus Pelatihan dan UPT SPNF	Dindikpora, 16 Kecamatan	2.000	25.000.000,00	DAU		20 lembaga	75.840.380,00
11.164	Pengembangan Taman Bacaan Masyarakat (TBM)	Taman bacaan masyarakat (TBM)	Dindikpora	30.00 Paket	15.000.000,00	DAU		30 Paket	86.821.875,00
11.164	Fasilitasi Penguatan Manajemen Desa Vokasi (Bankeu)	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa	DESA SENDANGSARI - BENER DESA PENUNGKULAN - GEBANG; DESA LUWENGLOR - PITURUH; DESA KALISEMO - LOANO	4 desa	0,00	BANPROV	Kebutuhan : Rp.100.000.000	4 desa	100.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
11.164	Keaksaraan lanjutan (Bankeu)	Meningkatnya warga yang bebas buta aksara	PKBM Lestari, DESA PLIPIRAN - BRUNO PKBM Dian Putri Waringin Jaya, DESA PUCANGAGUNG - BAYAN; PKBM Sekar Arum, DESA PITURUH - PITURUH; PKBM Sunan Geseng, DESA SEMAGUNG - BAGELEN; PKBM Sultan Agung, DESA LOANO - LOANO;	25 kelompok	0,00	BANPROV	Kebutuhan : Rp.250.000.000	265 kelompok	250.000.000,00
11.164	Pembangunan ruang praktik baru beserta perabotnya (DAK)	Ruang praktik tercukupi	UPT SPNF	2 ruang	0,00	DAK	Kebutuhan : Rp.398.360.000,-	2 ruang	438.196.000,00
11.164	Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya (DAK)	Toilet (jamban) tercukupi	UPT SPNF	1 ruang	55.000.000,00	DAK	Kebutuhan : Rp.55.000.000,-	1 ruang	60.500.000,00
11.164	Pembangunan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) beserta perabotnya (DAK)	Taman bacaan masyarakat beserta perabot tercukupi	UPT SPNF	1 unit	0,00	DAK	Kebutuhan : Rp.199.180.000,-	1 unit	219.098.000,00
11.164	Pengadaan peralatan keterampilan (DAK)	Peralatan ketrampilan tercukupi	UPT SPNF	1 paket	100.000.000,00	DAK	Kebutuhan : Rp.100.000.000,-	1 paket	110.000.000,00
11.164	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (DAK)	Operasional PAUD	UPT SPNF	12 bulan	31.800.000,00	DAK		12 bulan	34.980.000,00
1.1.17	Program Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun	% Keterlaksanaan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar		100.00 %	118.265.391.200,00			100.00 %	172.096.616.903,00
		% Ketersediaan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar		100.00 %				100.00 %	
		% ketersediaan sarana prasarana penunjang pembelajaran SD/SMP		87.00 %				90.00 %	
		% Pengelolaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) yang sesuai standar		76.34 %				78.70 %	
		% Ruang kelas SD sesuai standar nasional pendidikan dan memenuhi Keamanan, Kebersihan, Keindahan		92.06 %				100.00 %	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		% Ruang kelas SMP sesuai standar nasional pendidikan dan memenuhi Keamanan, Kebersihan, Keindahan		96.25 %				100.00 %	
		% SD yang memiliki perpustakaan		91.28 %				94.10 %	
		% SD yang memiliki sanitasi layak		100.00 %				100.00 %	
		% Sekolah Terakreditasi A dan B		100.00 %				100.00 %	
		% SMP yang memiliki Laboratorium Penunjang		83.86 %				84.04 %	
		% SMP yang memiliki sanitasi layak		100.00 %				100.00 %	
		Angka Kelulusan SD/SDLB/MI		100.00 %				100.00 %	
		Angka lulus pendidikan kesetaraan paket A		100.00 %				100.00 %	
		Angka lulus pendidikan kesetaraan paket B		100.00 %				100.00 %	
		Angka Melanjutkan		100.00 %				100.00 %	
		Angka putus sekolah SD/SDLB/MI		0.03 %				0.03 %	
		Angka putus sekolah SMP/SMPLB/MTs		0.06 %				0.06 %	
		APK SD/ SDLB/MI/ Paket A		100.00 %				100.00 %	
		APK SMP/ SMPLB/ MTs/ Paket B		100.00 %				100.00 %	
		APM SD/ SDLB/MI/ Paket A		87.88 %				88.27 %	
		APM SMP/ SMPLB/ MTs/ Paket B		78.09 %				78.12 %	
		Di setiap SD dan SMP tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru.		52.11 %				52.54 %	
		Nilai rata rata Ujian Nasional SMP/MTs		6.38				6.50	
		Nilai rata rata Ujian Nasional SD/MI		7.43				7.50	
		Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD dan 6 km untuk SMP dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil		100.00 %				100.00 %	
11.174	Penyelenggaraan Ujian SD	Penyelenggaraan Ujian SD	SD/MI	56.600	558.375.000,00	DAU		566 sd	772.751.980,00
111.726	Rintisan Sekolah Berintegritas SD/SMP	Penyelenggaraan Sekolah berintegritas	Dindikpora	3.000	61.137.000,00	DAU		30 sekolah	10.800.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
111.729	Lomba Dokter Kecil dan Sekolah Sehat	Kegiatan Lomba Dokter Kecil dan Sekolah Sehat	Kabupaten, Karesidenan, Provinsi	300	27.445.000,00	DAU		3	39.524.293,00
111.731	Akreditasi	Sekolah/ lembaga terakreditasi	Kabupaten Purworejo	60sekolah	47.515.000,00	DAU		60 sekolah	126.484.930,00
111.733	Koordinasi Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)	Terlaksananya PPDB	Dindikpora	43 sekolah	223.544.200,00	DAU		43 sekolah	176.743.200,00
111.735	Kegiatan Anak Beriman	Honor Pengajar Agama	SD/MI se kab. Purworejo	1192 pengajar	1.639.048.000,00	DAU		1192 pengajar	1.802.952.800,00
111.782	Bantuan Operasional Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi SD	SD dan SMP Inklusi	Kab. Purworejo	11 sekolah	82.084.000,00	DAU		11 sekolah	90.292.400,00
111.783	Bantuan Operasional Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi SMP	SMP Inklusi	Kab. Purworejo	2 sekolah	10.000.000,00	DAU		2 sekolah	11.000.000,00
111.791	Penyelenggaraan Ujian SMP	Penyelenggaraan UN SMP	Dindikpora	112 SMP/MTs	445.903.000,00	DAU		112 SMP/MTs	490.493.300,00
111.794	Lomba-Lomba SD	Lomba-Lomba SD	Dindikpora	832 siswa	59.300.000,00	DAU		832 siswa	65.230.000,00
111.795	Lomba-Lomba SMP	Lomba-Lomba SMP	Dindikpora	900 siswa	59.300.000,00	DAU		900 siswa	65.230.000,00
1.1.17.108	Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah Untuk SD/MI	Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah Untuk SDN, sekolah berprestasi, dan PTT dan GTT	SDN, 1 sekolah unggulan,	507 sekolah	17.934.422.100,00	DAU		507 sekolah	19.727.864.310,00
1.1.17.109	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pusat SD	Operasional SD	SD se kab. Purworejo	523 SD	48.170.880.000,00	BOS PUSAT		523 SD	52.987.968.000,00
1.1.17.110	Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah Untuk SMP/MTs	Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah Untuk SMPN, SMPT, sekolah berprestasi, dan PTT dan GTT	SMPN, SMPT, 3 sekolah unggulan	46 sekolah	6.655.237.900,00	DAU		46 sekolah	7.320.761.690,00
1.1.17.111	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pusat SMP	Operasional SMP se Kab. Purworejo	SMP se Kab. Purworejo	96 SMP	22.441.200.000,00	BOS PUSAT		96 smp	24.685.320.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.1.17.11 2	Rehabilitasi Sedang Ruang kelas SD (Bankeu)	Ruang Kelas dalam kondisi baik	SDN Sidomulyo, DESA SIDOMULYO - PURWOREJO SDN Wonotulus, DESA WONOTULUS - PURWOREJO; SDN Kunir, DESA KUNIR - BUTUH; SDN Sumowono, DESA SUMOWONO - KALIGESING;	4 ruang	251.000.000,00	BANPROV	Kebutuhan : Rp.819.400.000	4 ruang	251.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.1.17.11 3	Rehab ruang kelas rusak SMP (Bankeu)	Ruang kelas dalam kondisi baik	SMPN 7 Purworejo, DESA DUKUHDUNG US - GRABAG SMPN 33 Purworejo, KELURAHAN KLEDUNGKRA DENAN - BANYUURIP; SMPN 26 Purworejo, DESA POPONGAN - BANYUURIP; SMPN 42 Purworejo, DESA WATUDUWUR - BRUNO; SMPN 22 Purworejo, DESA PELUTAN - GEBANG; SMPN 14 Purworejo, DESA DLANGU - BUTUH;	4 ruang	264.000.000,00	BANPROV	Kebutuhan : Rp.792.000.000	4 ruang	264000000,00
1.1.17.11 4	Pembangunan Ruang Perpustakaan SMP (Bankeu)	Ruang perpustakaan tercukupi	SMPN 7 Purworejo, DESA DUKUHDUNG US - GRABAG	1 ruang	0,00	BANPROV	Kebutuhan : Rp.308.000.000	1 ruang	308000000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.1.17.11 2	Rehabilitasi ruang kelas SD dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya (DAK)	Ruang kelas dalam kondisi baik	SD NEGERI DUKUHDUNG US SD NEGERI SIDOMULYO SD Negeri Rejosari SD NEGERI ROWOPANJA NG SD NEGERI SUMBER SD NEGERI SUKOMANAH SD NEGERI KLEDUNG KRADENAN SD NEGERI PENUNGKULA N SD NEGERI KEMADU SD NEGERI 2 JATIREJO SD NEGERI BENOWO SD NEGERI 1 MARON SD NEGERI KEMIRI SD NEGERI PANGENGUDA NG SD N 1 PUCANGAGUN G SD N JRAKAH SD N NGOMBOL SD N WUNUT SD NEGERI DUDUKULON SD NEGERI SRUWOHREJ O SD N HARGOROJO SD NEGERI KALIWUNGU SD NEGERI	96 ruang	9.120.000.000,00	DAK	Kebutuhan : Rp.17.765.000.000,-	96 ruang	17.765.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.1.17.11 3	Rehabilitasi ruang perpustakaan SD dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya (DAK)	Ruang perpustakaan dalam kondisi baik	SD NEGERI DUKUHDUNG US SD NEGERI SIDOMULYO SD Negeri Rejosari SD NEGERI ROWOPANJA NG SD NEGERI SUMBER SD NEGERI SUKOMANAH SD NEGERI KLEDUNG KRADENAN SD NEGERI PENUNGGKULAN SD NEGERI KEMADU SD NEGERI 2 JATIREJO SD NEGERI BENOWO SD NEGERI 1 MARON SD NEGERI KEMIRI SD NEGERI PANGENGUDA NG SD N 1 PUCANGAGUN G SD N JRAKAH SD N NGOMBOL SD N WUNUT SD NEGERI DUDUKULON SD NEGERI SRUWOHREJ O SD N HARGOROJO SD NEGERI KALIWUNGU SD NEGERI	35 ruang	0,00	DAK	Kebutuhan : Rp.2.625.000.000,-	35 ruang	2.625.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.1.17.11 4	Rehabilitasi jamban siswa/guru SD dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta sanitasinya (DAK)	Jamban siswa/guru dalam kondisi baik	SD N Tlogorejo B SD N Wolojurutengah SD N Loning SD N Majir SD N 1 Jenarwetan SD N 1 Ganggeng SD N Bragolan SD N Lugurejo SD N Penungkulan SD N 2 Sudorogo SD N Bapangsari SD N Girijoyo SD N Kalimeneng SD N Dilem SD N Karangmulyo SD N Karangsari SD N Gerdurejo SD N Kalitengkek SD N Jetis SD N Sedayu SD N Kebongunung SD N 2 Maron SD N Sokoagung SD N Tepus Bagelen SD N Bedug SD N Kaligesing SD N Kedungkamal SD N Bendungan SD N Wonotulus SD N 1 Ganggeng SD N 2 Cangkreplor SD N Plipiran SD N Brunosari SD N Legetan SD N Tasikmadu SD N Luwendlor	46 unit	0,00	DAK	Kebutuhan : Rp.2.116.000.000,-	46 unit	2.116.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.1.17.11 5	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) SD beserta perabotnya (DAK)	Ruang Kelas Baru tercukupi	SD Noyosutan SD N 2 Maron SD Bendungan SD N Tegalsari SD N Pageron SD N Singojoyo SD N Semayu SDN 1 Wirun SD N Kalirejo	9 ruang	1.575.000.000,00	DAK	Kebutuhan : Rp.1.575.000.000,-	9 ruang	1.575.000.000,00
1.1.17.11 6	Pembangunan ruang perpustakaan SD beserta perabotnya (DAK)	Ruang perpustakaan tercukupi	SD N 2 KEDUNGPOMA HAN SD N TEGALREJO	2 ruang	0,00	DAK	Kebutuhan : Rp.350.000.000,-	2 ruang	350.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.1.17.11 7	Pengadaan buku koleksi perpustakaan SD (Buku Referensi, Buku Pengayaan, Buku Panduan Pendidik) (DAK)	Buku koleksi perpustakaan tercukupi	SD N Somongari SD N Ngaran SD N Kuwojo SD N Hargorojo SD N Purwodadi SD N Jatimalang SD N Tursidi Lor SD N Brengkol SD N Kertojayan SD N 1 Patutreja SD N Kaliglagah SD N Dilem SD N 2 Pangenjuruteng ah SD N 1 Mranti SD N Cokroyasan SD N Bukur SD N Kembaran SD N Kemejing SD N Majir SD N 2 Bayem SD N 2 Lugosobo SD N 1 Seren SD N Kaliwatkrangg an SD N Wonorejokulon SD N Giyombong SD N 2 Cepedak SD N Kaliurip SD N Kaliboto SD N Jrakah SD N Sambeng SD N Wangunrejo SD N Candisari	32 paket	0,00	DAK	Kebutuhan : Rp.1.600.000.000,-	32 paket	1.600.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.1.17.11 8	Pengadaan alat kesenian tradisional SD (DAK)	Alat kesenian tradisional tercukupi	SD N Wolojurutengah SD N Kliwonan SD N Wonosri SD N Bapangsari SD Muhamadiyah SD N Tepus, Somorejo SD N Pandanrejo	7 paket	0,00	DAK	Kebutuhan : Rp.630.000.000,-	7 paket	630.000.000,00
1.1.17.11 9	Rehabilitasi ruang laboratorium Ilmu pengetahuan alam (IPA) SMP beserta perabotnya (DAK)	Ruang laboratorium IPA dalam kondisi baik	SMPN 1 (2), 23 (1), 19 (1), 22 (1)	4 ruang	0,00	DAK	Kebutuhan : Rp.600.000.000,-	4 ruang	600.000.000,00
1.1.17.11 10	Rehabilitasi ruang kelasSMP dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya (DAK)	Ruang kelas dalam kondisi baik	SMPN 1 (3), 3 (8), 6 (3), 9 (2), 13 (5), 20 (7), 21 (2), 23 (6), 25 (2), 27 (2), 31 (4), 34 (3), 37 (5), 38 (2), 26 (4), 14 (3), 22 (2), 43 (1), 5 (3)	67 ruang	8.040.000.000,00	DAK	Kebutuhan : Rp.8.040.000.000,-	67 ruang	8.040.000.000,00
1.1.17.11 11	Rehabilitasi ruang laboratorium komputer SMP beserta perabotnya (DAK)	Ruang laboratorium komputer dalam kondisi baik	SMPN 1, 4, 12, 22, 27, 21	6 ruang	0,00	DAK	Kebutuhan : Rp.720.000.000,-	6 ruang	720.000.000,00
1.1.17.11 12	Rehabilitasi ruang perpustakaan SMP dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya (DAK)	Ruang Perpustakaan dalam kondisi baik	SMPN 3, 6, 21, 37	4 ruang	600.000.000,00	DAK	Kebutuhan : Rp.600.000.000,-	4 ruang	600.000.000,00
1.1.17.11 13	Rehabilitasi ruang guru SD dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya (DAK)	Ruang guru dalam kondisi baik	SMPN 6, 21, 23, 27, 30, 36, 1, 3, 4, 5, 6, 22, 31, 20, 14	15 ruang	0,00	DAK	Kebutuhan : Rp.6.000.000.000,-	15 ruang	6.000.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.1.17.11 14	Rehabilitasi jamban siswa/guru SMP dengan tingkat kerusakan minimal sedang, baik beserta sanitasinya atau tanpa sanitasinya (DAK)	jamban siswa/guru dalam kondisi baik	SMPN 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 42	35 ruang	0,00	DAK	Kebutuhan : Rp.2.450.000.000,-	35 ruang	2.450.000.000,00
1.1.17.11 15	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMP beserta perabotnya (DAK)	Ruang Kelas Baru tercukupi	SMPN 41 (1)	1 ruang	0,00	DAK	Kebutuhan : Rp.350.000.000,-	1 ruang	350.000.000,00
1.1.17.11 16	Pembangunan jamban siswa/guru SMP beserta sanitasinya (DAK)	Jamban siswa/guru tercukupi	SMPN 22 (2)	2 ruang	0,00	DAK	Kebutuhan : Rp.260.000.000,-	2 ruang	260.000.000,00
1.1.17.11 17	Pembangunan laboratorium komputer SMP beserta perabotnya (DAK)	Ruang laboratorium komputer tercukupi	SMPN 5	1 ruang	0,00	DAK	Kebutuhan : Rp.350.000.000,-	1 ruang	350.000.000,00
1.1.17.11 18	Pengadaan peralatan laboratorium SMP komputer (DAK)	peralatan labotratorium komputer tercukupi	SMPN 21, 35, 36, 38, 43, 1, 3, 5, 6, 7, 13, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 28, 33	19 paket	0,00	DAK	Kebutuhan : Rp.6.080.000.000,-	19 paket	6.080.000.000,00
1.1.18	Program Peningkatan Akses Pendidikan Berkualitas Untuk Penduduk Miskin	Cakupan layanan pendidikan untuk penduduk miskin		100.00 %	33.000.000,00			100.00 %	33.330.000,00
11.186	Pengelolaan Beasiswa siswa keluarga kurang mampu SD	Pengelolaan Beasiswa siswa keluarga kurang mampu SD	dindikpora	32543 siswa	23.000.000,00	DAU		32543	23.230.000,00
11.187	Pengelolaan Beasiswa siswa keluarga kurang mampu SMP	Pengelolaan Beasiswa siswa keluarga kurang mampu SMP	dindikpora	12528 siswa	10.000.000,00	DAU		12528	10.100.000,00
1.1.19	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Kepala SMP berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik		96.50 %	878.801.200,00			98.00 %	1.832.058.000,00
		Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik		76.00 %				77.00 %	
		Di setiap kabupaten/kota semua pengawas sekolah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;		100.00 %				100.00 %	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Di setiap SD tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik;		91.50 %				9.200	
		Di setiap SMP tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris;		42.00 %				42.00 %	
		Di setiap SMP tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%;		61.00 %				62.00 %	
		Ketersediaan guru sesuai standar untuk SD		97.50 %				98.00 %	
		Ketersediaan Indeks ketersediaan guru sesuai standar untuk SMP		96.50 %				97.00 %	
		Ketersediaan Pendidik yang telah berkualifikasi S-1/D-IV dan bersertifikat pendidik PAUDNI		5.00 Org				750.00 Org	
111.197	Peningkatan Kinerja Pendidik PAUD	Kinerja Pendidik PAUD	dindikpora	3 orang	39.300.000,00	DAU		3 orang	27.720.000,00
111.919	Penilaian Angka Kredit Guru PAUD, Pengawas TK, Penilik PAUD dan Pamong balajar	Angka Kredit Guru PAUD, Pengawas TK, Penilik PAUD dan Pamong balajar	dindikpora	750 orang	43.500.000,00	DAU		750	47.850.000,00
111.920	Pemilihan Guru dan Tenaga Kependidikan SD berprestasi	Pemilihan Guru, Tenaga Kependidikan SD Berprestasi	dindikpora	132 orang	25.425.000,00	DAU		132	27.967.500,00
111.921	Pemilihan Guru dan Tenaga Kependidikan SMP berprestasi	Pemilihan Guru, Tenaga Kependidikan SMP Berprestasi	dindikpora	10.000	25.425.000,00	DAU		100	27.967.500,00
111.922	Seleksi Calon Kepala SD/Pengawas SD	Calon Kepala SD/Pengawas SD	dindikpora	10.000	524.430.000,00	DAU		100	576.873.000,00
111.935	Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik PAUD	Sertifikasi Pendidik PAUD	dindikpora	45.000	14.520.000,00	DAU		450	15.972.000,00
111.936	Pemilihan Guru, Tenaga Kependidikan PAUD berprestasi	Pemilihan Guru, Tenaga Kependidikan PAUD Berprestasi	dindikpora	75 orang	33.900.000,00	DAU		75 orang	37.290.000,00
111.937	Penilaian Angka Kredit Guru SD Pengawas	Angka Kredit dan SPTKG Guru SD, Pengawas dan Penilik	dindikpora	4427 orang	58.000.000,00	DAU		4.427	63.800.000,00
111.939	Penilaian Angka Kredit Guru SMP dan Pengawas	Angka Kredit dan SPTKG Guru SMP dan Pengawas	dindikpora	1021 orang	43.500.000,00	DAU		1.021	47.850.000,00
111.941	Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik SD	Sertifikasi Pendidik SD	dindikpora	420 orang	19.360.000,00	DAU		420	21.296.000,00
111.942	Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik SMP	Sertifikasi Pendidik SMP	dindikpora	420 orang	14.520.000,00	DAU		420	15.972.000,00
111.944	Evaluasi Kinerja Kepala Sekolah SD	Evaluasi Kinerja Kepala Sekolah SD	dindikpora	103 dok	29.619.700,00	DAU		103 Dok	0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
111.946	Evaluasi Kinerja Kepala Sekolah SMP	Evaluasi Kinerja Kepala Sekolah SMP	dindikpora	8 ks	7.301.500,00	DAU		8 Dok	0,00
111.946	Peningkatan Kualifikasi ke S1 Pendidik Formal (Bankeu)	Meningkatnya kualifikasi ke S1 sebanyak 147 Tenaga pendidik formal SD dan PAUD	dindikpora	147 orang	0,00	BANPROV	Kebutuhan : Rp.515.500.000	147 orang	515.500.000,00
111.946	Peningkatan kualifikasi ke S1/D4 Pendidik PAUD (Bankeu)	Meningkatnya kualifikasi S1/D4 Pendidik PAUD sebanyak 116 orang	dindikpora	116 orang	0,00	BANPROV	Kebutuhan : Rp.406.000.000	116 orang	406.000.000,00
1.1.20	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Cakupan layanan manajemen pendidikan		100.00 %	392.701.600,00			100.00 %	1.057.082.617,00
11.201	Penanganan Penyusunan RAPBS	Penanganan Penyusunan RAPBS, Honor Non PNS Tenaga Teknis, Tenaga Ahli Delevoper software, Network, Maintenance Database	Sekolah SD, SMP Negeri/Swasta se Kab Purworejo	615 sekolah	75.000.000,00	DAU			100.367.080,00
11.202	Penanganan Dana Bantuan Operasional Sekolah	Kegiatan Penanganan Dana Bantuan Operasional Sekolah	dindikpora	1 paket	75.000.000,00	DAU		1 Paket	195.926.594,00
11.204	Monitoring, Evaluasi, dan Verifikasi Bantuan Hibah	Monitoring, Evaluasi, dan Verifikasi Bantuan Hibah	dindikpora	3 kegiatan	25.000.000,00	DAU		3 kegiatan	71.071.806,00
11.206	Kegiatan Dewan Pendidikan	Kegiatan Dewan Pendidikan	dindikpora	12 bulan	33.999.900,00	DAU		12 bulan	56.373.267,00
112.028	Pengendalian Mutu Sekolah SD	Operasional Pengawas SD dalam pengendalian mutu sekolah	dindikpora	60 sekolah	29.160.000,00	DAU		60 sekolah	32.076.000,00
112.029	Pengendalian Mutu Sekolah SMP	Operasional Pengawas SMP dalam pengendalian mutu sekolah	dindikpora	5 sekolah	39.541.700,00	DAU		5 sekolah	43.495.870,00
112.029	Regruping Sekolah	SK Regruping	Kab. Purworejo	1 Dok	15.000.000,00	DAU		5 sekolah	16.500.000,00
112.029	Manajemen Pendataan Pendidikan (Bankeu)	Tersedianya Data Pendidikan	dindikpora	1 Kegiatan	100.000.000,00	BANPROV	Kebutuhan : Rp.100.000.000	1 Kegiatan	100.000.000,00
112.029	Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa Melalui Jalur Pendidikan (Bankeu)	Tersedianya Fasilitas Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa Melalui Jalur Pendidikan (Bankeu)	dindikpora	1 kegiatan	0,00	BANPROV	Kebutuhan : Rp.100.000.000,-	1 kegiatan	110.000.000,00
112.029	Penyelenggaraan UN, dan Ujian Sekolah Pendidikan Dasar (Bankeu)	UN dan Ujian Sekolah Pendidikan Dasar	dindikpora	1 Kegiatan	0,00	BANPROV	Kebutuhan : Rp.331.272.000	1 Kegiatan	331.272.000,00
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar								
213	Kepemudaan dan Olah Raga				11.190.060.100,00				12.573.203.599,00
2.13.15	Program Pengembangan Kepemudaan	Jumlah Kewirausahaan Pemuda		17.00 Kewirausahaan	372.500.000,00			18.00 Kewirausahaan	535.390.742,00
		Jumlah organisasi kepemudaan aktif		20.00 Organisasi				20.00 Organisasi	
		Jumlah pemuda pelopor kabupaten		9.00 Org				10.00 Org	
		Prosentase organisasi kepramukaan yang aktif		100.00 %				100.00 %	
213.151	Pembentukan Sikap Mental dan Kedisiplinan Siswa	Terbentuknya Sikap Mental dan Kedisiplinan Siswa	Dindikpora	4 kegiatan	250.000.000,00	DAU		4 kegiatan	400.640.742,00
213.155	Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Dindikpora	7 kegiatan	122.500.000,00	DAU		7 kegiatan	134.750.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.13.16	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Jumlah event olahraga rekreasi masyarakat		3.00 Event	655.112.100,00			4.00 Event	1.854.684.857,00
		Jumlah penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah Kabupaten		18.00 Event				20.00 Event	
		Jumlah prestasi olahraga		33.00 Prestasi				34.00 Prestasi	
		Prosentase klub / organisasi olahraga yang aktif		90.00 %				90.00 %	
213.161	Kompetisi Olahraga Pelajar (POPDA)	Kompetisi Olahraga Pelajar (POPDA)	Kecamatan, Kabupaten, Karesidenan, Provinsi	3 kegiatan	300.000.000,00	DAU		3 kegiatan	565.675.000,00
213.162	Penyelenggaraan Senam Pagi Massal Masyarakat	Even Senam Pagi Massal Masyarakat	Alun-alun Purworejo, 1 kec (diganti Kab. Purworejo)	96 event	30.000.000,00	DAU		192 event	202.917.000,00
213.163	Kejuaraan dan Invitasi Olahraga	Kejuaraan dan Invitasi Olahraga serta NPC	Dalam dan Luar Daerah	8 Kegiatan	325.112.100,00	DAU		8 kegiatan	1.086.092.857,00
		Kejuaraan olahraga umum tingkat Kabupaten	Kab. Purworejo	1 Kegiatan				1 kegiatan	
2.13.17	Program Pengembangan Wahana Pemuda dan Olahraga	Tersedianya tempat pembinaan pemuda dan olahraga		100.00 %	10.162.448.000,00			100.00 %	10.183.128.000,00
213.171	Pemeliharaan GOR/Stadion WR. Soepratman	Pemeliharaan GOR/Stadion WR. Soepratman dan Gedung Pemuda Butuh	GOR/Stadion WR. Supratman dan Gedung Pemuda Butuh	12 bulan	100.000.000,00	DAU		12 bulan	117.128.000,00
213.173	Optimalisasi Gelanggang Pemuda	Pemeliharaan Gelanggang Pemuda	Sanggar Bhakti Pramuka, Jl. Tentara Pelajar Purworejo dan BP Argaputra Punthuk Purworejo	2 Lokasi	62.448.000,00	DAU		2 lokasi	66.000.000,00
213.179	Pembangunan sport centre	Gedung Sport Center GOR WR Supratman	GOR WR Soepratman	1.00 Paket	10.000.000.000,00	DAU		1 Paket	10.000.000.000,00

Nama Perangkat Daerah : DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	TOTAL				200.938.658.947,00				11.182.501.294.689,00
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar								
12	Kesehatan				200.938.658.947,00				221.032.524.841,70
121	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Administrasi Perkantoran		100.00 %	481.910.882,00			100.00 %	530.101.970,20
1.212	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Layanan komunikasi, informasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Kesehatan	12.00 Bulan	220.800.782,00	DAU		12.00 Bulan	242.880.860,20
12.121	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Layanan kebersihan kantor	Dinas Kesehatan	12.00 Bulan	14.051.000,00	DAU		12.00 Bulan	15.456.100,00
12.127	Koordinasi dan Konsultasi Internal dan Eksternal	Layanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Dinas Kesehatan, Dalam Daerah, Luar Daerah	12.00 Bulan	192.014.000,00	DAU		12.00 Bulan	211.215.400,00
12.128	Pengelolaan Keamanan Kantor	Layanan keamanan kantor	Dinas Kesehatan	12.00 Bulan	21.600.000,00	DAU		12.00 Bulan	23.760.000,00
12.129	Pengelolaan Surat Menyurat dan Kearsipan	Layanan surat-menyurat dan kearsipan	Dinas Kesehatan	12.00 Bulan	33.445.100,00	DAU		12.00 Bulan	36.789.610,00
112	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Berfungsi Dengan Baik		100.00 %	442.061.000,00			100.00 %	486.267.100,00
1.229	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	Dinas Kesehatan	10.00 Unit	35.389.000,00	DAU		10.00 Unit	38.927.900,00
12.222	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	Dinas Kesehatan	2.00 Unit/Th	236.813.000,00	DAU		2.00 Unit/Th	260.494.300,00
12.224	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	Dinas Kesehatan	11.00 Unit/Th	140.500.000,00	DAU		11.00 Unit/Th	154.550.000,00
12.228	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara rutin/berkala	Dinas Kesehatan	46.00 Unit/Th	29.359.000,00	DAU		46.00 Unit/Th	32.294.900,00
12.233	Pengadaan Tanah	Tanah Puskesmas	Desa Dukuhrejo Kec. Bayan	1.00 Lokasi	0,00	DAU	Kebutuhan : Rp.3.000.000.000,-	1.00 Lokasi	0,00
125	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur		100.00 %	370.000.000,00			100.00 %	407.000.000,00
1.251	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	Aparatur yang meningkat kualifikasi, kapasitas dan kinerjanya	Dinas Kesehatan	77.00 Org	170.000.000,00	DAU		77.00 Org	187.000.000,00
1.255	Penilaian Angka Kredit Bagi Jabatan Fungsional	Pejabat fungsional yang dinilai angka kreditnya	Dinas Kesehatan	500.00 Org	200.000.000,00	DAU		500.00 Org	220.000.000,00
126	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase Capaian Kinerja Dan Keuangan		100.00 %	274.169.400,00			100.00 %	301.586.340,00
1.265	Penyusunan Pelaporan Keuangan	Dokumen pelaporan keuangan	Dinas Kesehatan	14.00 Dok	137.086.200,00	DAU		14.00 Dok	150.794.820,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.266	Penyusunan Perencanaan Dan Evaluasi Pelaporan	Dokumen perencanaan dan evaluasi pelaporan	Dinas Kesehatan	38.00 Dok	137.083.200,00	DAU		38.00 Dok	150.791.520,00
127	Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Prosentase Tersedianya Data Dasar Pembangunan		100.00 %	34.999.800,00			100.00 %	38.499.780,00
1.271	Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Dokumen data dasar pembangunan	Dinas Kesehatan	1.00 Dok	34.999.800,00	DAU		1.00 Dok	38.499.780,00
1.2.15	Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin	Cakupan Masyarakat Maskin Yang mendapat pelayanan Kesehatan rujukan		16.00 %	16.710.000.000,00			16.00 %	18.381.000.000,00
		Cakupan Masyarakat Maskin Yang mendapat pelayanan Kesehatan		100.00 %				100.00 %	
		Persentase peningkatan maskin yang mendapatkan bantuan premi asuransi kesehatan oleh daerah		440.80 %				440.80 %	
12.151	Jaminan Kesehatan Daerah	Pembayaran Klaim Non Kuota	Kabupaten Purworejo	500.00 Klaim	2.250.000.000,00	DAU		500.00 Klaim	2.475.000.000,00
		Layanan kesehatan masyarakat		100.00 %				100.00 %	
12.152	Fasilitasi pembiayaan kesehatan masyarakat	Optimalisasi Fasilitasi Pemberian Jaminan Pembiayaan Kesehatan bagi masyarakat dan maskin	Kabupaten Purworejo	100.00 %	100.000.000,00	DAU		100.00 %	110.000.000,00
12.154	Pelayanan Premi Bantu lur (PBI) JKN	Jumlah maskin yang mendapatkan iuran asuransi kesehatan	Kabupaten Purworejo	50000.00 Org	11.100.000.000,00	DAU		50000.00 Org	12.210.000.000,00
12.155	Jaminan Persalinan (DAK)	Pembayaran klaim biaya persalinan maskin	Kabupaten Purworejo	1411.00 Org	3.260.000.000,00	DAK		1411.00 Org	3.586.000.000,00
1.2.16	Program Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase Desa Siaga Aktif Madya		22.00 %	279.852.500,00			22.00 %	307.837.750,00
		Persentase Desa Siaga Aktif Mandiri		23.00 %				23.00 %	
		Persentase Desa Siaga Aktif Pratama		0.00 %				0.00 %	
		Persentase Desa Siaga Aktif Purnama		55.00 %				55.00 %	
		Persentase Satuan Pendidikan Dasar mendapatkan Promosi Kesehatan		100.00 %				100.00 %	
		Persentase Satuan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu melaksanakan Promosi Kesehatan		100.00 %				100.00 %	
		Persentase Satuan Puskesmas melaksanakan Promosi Kesehatan untuk Pemberdayaan dibidang kesehatan		100.00 %				100.00 %	
12.161	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Peningkatan kapasitas kader posyandu dan pendampingan desa siaga	Kabupaten Purworejo	480.00 Org	80.000.000,00	DAU		480.00 Org	88.000.000,00
12.163	Kampanye dan Penyuluhan Kesehatan	Jumlah sekolah yang mendapat penyuluhan kesehatan, jumlah desa yang mendapat penyuluhan kesehatan, jumlah puskesmas / pustu yang melaksanakan penyuluhan kesehatan	Kabupaten Purworejo	1080.00 Lokasi	75.000.000,00	DAU		1080.00 Lokasi	82.500.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
12.164	Pengadaan sarana/prasarana dan media promosi kesehatan	Tersedianya media promosi kampanye hidup bersih sehat	Dinas Kesehatan	10.00 Jenis	75.000.000,00	DAU		10.00 Jenis	82.500.000,00
12.167	Pendampingan Desa Siaga Aktif Mandiri	Jumlah Desa Siaga Aktif Mandiri	Kabupaten Purworejo	120.00 Desa	49.852.500,00	DAU		120.00 Desa	54.837.750,00
1.2.17	Program Pelayanan Skrining dan Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Daur Kehidupan	Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Persalinan % Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Persalinan Sesuai Standar di Fasilitas Kesehatan		100.00 %	79.708.246.865,00			100.00 %	87.679.071.551,50
		Persentase Desa /Kel melaksanakan posbindu Penyakit Tidak Menular		52.00 %				52.00 %	
		Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan Sesuai Standar di Fasilitas Kesehatan		100.00 %				100.00 %	
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar		100.00 %				100.00 %	
		Persentase Penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan sesuai standart		100.00 %				100.00 %	
		Persentase Penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standart		100.00 %				100.00 %	
		Persentase Remaja putri mendapat tablet tambah darah		40.00 %				40.00 %	
		Persentase Siswa Satuan Pendidikan dasar mendapatkan skrining Kesehatan Sesuai Standar		100.00 %				100.00 %	
		Persentase Usia 15 - 59 tahun mendapatkan skrining Kesehatan Sesuai Standar		100.00 %				100.00 %	
		Persentase Usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining Kesehatan Sesuai Standar		100.00 %				100.00 %	
		Persentase Usia bawah lima tahun (Balita) Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Fasilitas Kesehatan		100.00 %				100.00 %	
		Eliminasi kretin baru		0.00 %				0.00 %	
		Prevalensi Balita Pendek (stunting)		7.00 %				7.00 %	
12.171	Pelayanan Kesehatan Ibu	Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan Sesuai Standar di Fasilitas Kesehatan	Kabupaten Purworejo	100.00 %	350.000.000,00	DAU		100.00 %	385.000.000,00
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar		100.00 %				100.00 %	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
12.172	Pelayanan Kesehatan Anak	Formulir MTBS/MTBM, balita yang mengikuti kelas balita, puskesmas ramah anak, puskesmas memberikan pelayanan kesehatan bayi/anak sesuai standar	Kabupaten Purworejo	27.00 Lembar	200.000.000,00	DAU		27.00 Lembar	220.000.000,00
		Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Persalinan Sesuai Standar di Fasilitas Kesehatan		100.00 %				100.00 %	
12.173	Pelayanan Kesehatan Remaja	Konselor sebaya	Kabupaten Purworejo	230.00 Org	174.999.000,00	DAU		230.00 Org	192.498.900,00
		Persentase Remaja putri mendapat tablet tambah darah		40.00 %				40.00 %	
12.174	Skrining Kesehatan Siswa Satuan Pendidikan Dasar	Persentase Siswa Satuan Pendidikan dasar mendapatkan skrining Kesehatan Sesuai Standar	Kabupaten Purworejo	100.00 %	90.000.000,00	DAU		100.00 %	99.000.000,00
12.175	Perbaikan Gizi Masyarakat	Balita gizi buruk tertangani	Kabupaten Purworejo	22.00 anak	600.000.000,00	DAU		22.00 anak	660.000.000,00
		Balita gizi kurang tertangani		180.00 anak				180.00 anak	
		Bumil KEK tertangani		130.00 Org				130.00 Org	
		Penderita gizi buruk dan stunting tertangani		80.00 Org				80.00 Org	
12.176	Pelayanan Imunisasi	UCI desa 85 %	Kabupaten Purworejo	494.00 Desa	150.000.000,00	DAU		494.00 Desa	165.000.000,00
12.177	Skrining Kesehatan Usia 15 - 59 tahun di Puskesmas dan jaringan	Persentase penduduk usia 15 - 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Kabupaten Purworejo	100.00 %	100.000.000,00	DAU		100.00 %	110.000.000,00
12.178	Pelayanan Perawatan Kesehatan Masyarakat	Jumlah puskesmas yang melaksanakan program perkesmas	Kabupaten Purworejo	27.00 puskesmas	53.000.000,00	DAU		27.00 puskesmas	58.300.000,00
12.179	Pelayanan Kesehatan Haji	Penetapan status kesehatan jamaah haji	Kabupaten Purworejo	750.00 Org	80.000.000,00	DAU		750.00 Org	88.000.000,00
121.711	Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Grabag (DAK)	Cakupan SPM	Puskesmas Grabag	100.00 %	638.320.320,00	DAK		100.00 %	702.152.352,00
121.712	Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Ngombol (DAK)	Cakupan SPM	Puskesmas Ngombol	100.00 %	745.113.850,00	DAK		100.00 %	819.625.235,00
121.713	Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Bragolan (DAK)	Cakupan SPM	Puskesmas Bragolan	100.00 %	512.921.848,00	DAK		100.00 %	564.214.032,80
121.714	Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Bubutan (DAK)	Cakupan SPM	Puskesmas Bubutan	100.00 %	941.742.900,00	DAK		100.00 %	1.035.917.190,00
121.715	Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Bagelen (DAK)	Cakupan SPM	Puskesmas Bagelen	100.00 %	717.208.373,00	DAK		100.00 %	788.929.210,30
121.716	Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Dadirejo (DAK)	Cakupan SPM	Puskesmas Dadirejo	100.00 %	868.890.000,00	DAK		100.00 %	955.779.000,00
121.717	Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Kaligesing (DAK)	Cakupan SPM	Puskesmas Kaligesing	100.00 %	657.655.900,00	DAK		100.00 %	723.421.490,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
121.718	Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Cangkreng (DAK)	Cakupan SPM	Puskesmas Cangkreng	100.00 %	760.318.130,00	DAK		100.00 %	836.349.943,00
121.719	Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Purworejo (DAK)	Cakupan SPM	Puskesmas Purworejo	100.00 %	707.466.100,00	DAK		100.00 %	778.212.710,00
121.720	Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Mranti (DAK)	Cakupan SPM	Puskesmas Mranti	100.00 %	712.648.600,00	DAK		100.00 %	783.913.460,00
121.721	Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Bayan (DAK)	Cakupan SPM	Puskesmas Bayan	100.00 %	776.762.800,00	DAK		100.00 %	854.439.080,00
121.722	Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Banyuurip (DAK)	Cakupan SPM	Puskesmas Banyuurip	100.00 %	980.689.382,00	DAK		100.00 %	1.078.758.320,20
121.723	Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Seborokrapyak (DAK)	Cakupan SPM	Puskesmas Seborokrapyak	100.00 %	786.567.500,00	DAK		100.00 %	865.224.250,00
121.724	Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Semawungdaleman (DAK)	Cakupan SPM	Puskesmas Semawungdaleman	100.00 %	655.263.400,00	DAK		100.00 %	720.789.740,00
121.725	Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Kutoarjo (DAK)	Cakupan SPM	Puskesmas Kutoarjo	100.00 %	685.768.600,00	DAK		100.00 %	754.345.460,00
121.726	Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Wirun (DAK)	Cakupan SPM	Puskesmas Wirun	100.00 %	750.769.800,00	DAK		100.00 %	825.846.780,00
121.727	Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Butuh (DAK)	Cakupan SPM	Puskesmas Butuh	100.00 %	814.792.000,00	DAK		100.00 %	896.271.200,00
121.728	Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Sruwohrejo (DAK)	Cakupan SPM	Puskesmas Sruwohrejo	100.00 %	856.284.207,00	DAK		100.00 %	941.912.627,70
121.729	Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Pituruh (DAK)	Cakupan SPM	Puskesmas Pituruh	100.00 %	670.325.920,00	DAK		100.00 %	737.358.512,00
121.730	Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Karanggetas (DAK)	Cakupan SPM	Puskesmas Karanggetas	100.00 %	760.659.790,00	DAK		100.00 %	836.725.769,00
121.731	Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Kemiri (DAK)	Cakupan SPM	Puskesmas Kemiri	100.00 %	616.276.700,00	DAK		100.00 %	677.904.370,00
121.732	Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Winong (DAK)	Cakupan SPM	Puskesmas Winong	100.00 %	780.953.030,00	DAK		100.00 %	859.048.333,00
121.733	Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Bruno (DAK)	Cakupan SPM	Puskesmas Bruno	100.00 %	839.411.760,00	DAK		100.00 %	923.352.936,00
121.734	Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Gebang (DAK)	Cakupan SPM	Puskesmas Gebang	100.00 %	688.254.600,00	DAK		100.00 %	757.080.060,00
121.735	Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Loano (DAK)	Cakupan SPM	Puskesmas Loano	100.00 %	612.771.920,00	DAK		100.00 %	674.049.112,00
121.736	Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Banyuasin (DAK)	Cakupan SPM	Puskesmas Banyuasin	100.00 %	739.378.970,00	DAK		100.00 %	813.316.867,00
121.737	Biaya Operasional Kesehatan Puskesmas Bener (DAK)	Cakupan SPM	Puskesmas Bener	100.00 %	608.690.600,00	DAK		100.00 %	669.559.660,00
121.738	Biaya Operasional Kesehatan Kabupaten (DAK)	Cakupan SPM	Kabupaten Purworejo	100.00 %	1.080.000.000,00	DAK		100.00 %	1.188.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
121.740	Layanan Kesehatan Puskesmas Grabag (BLUD)	Cakupan SPM	Puskesmas Grabag	100.00 %	2.758.251.368,00	BLUD		100.00 %	3.034.076.504,80
121.740	Layanan Kesehatan Puskesmas Ngombol (BLUD)	Cakupan SPM	Puskesmas Ngombol	100.00 %	2.969.916.235,00	BLUD		100.00 %	3.266.907.858,50
121.741	Layanan Kesehatan Puskesmas Bragolan (BLUD)	Cakupan SPM	Puskesmas Bragolan	100.00 %	2.961.179.861,00	BLUD		100.00 %	3.257.297.847,10
121.742	Layanan Kesehatan Puskesmas Bubutan (BLUD)	Cakupan SPM	Puskesmas Bubutan	100.00 %	752.383.229,00	BLUD		100.00 %	827.621.551,90
121.743	Layanan Kesehatan Puskesmas Bagelen (BLUD)	Cakupan SPM	Puskesmas Bagelen	100.00 %	1.164.988.174,00	BLUD		100.00 %	1.281.486.991,40
121.744	Layanan Kesehatan Puskesmas Dadirejo (BLUD)	Cakupan SPM	Puskesmas Dadirejo	100.00 %	974.648.714,00	BLUD		100.00 %	1.072.113.585,40
121.745	Layanan Kesehatan Puskesmas Kaligesing (BLUD)	Cakupan SPM	Puskesmas Kaligesing	100.00 %	2.383.798.048,00	BLUD		100.00 %	2.622.177.852,80
121.746	Layanan Kesehatan Puskesmas Cangkreng (BLUD)	Cakupan SPM	Puskesmas Cangkreng	100.00 %	2.469.191.508,00	BLUD		100.00 %	2.716.110.658,80
121.747	Layanan Kesehatan Puskesmas Purworejo (BLUD)	Cakupan SPM	Puskesmas Purworejo	100.00 %	3.051.076.273,00	BLUD		100.00 %	3.356.183.900,30
121.748	Layanan Kesehatan Puskesmas Mranti (BLUD)	Cakupan SPM	Puskesmas Mranti	100.00 %	1.286.783.058,00	BLUD		100.00 %	1.415.461.363,80
121.749	Layanan Kesehatan Puskesmas Bayan (BLUD)	Cakupan SPM	Puskesmas Bayan	100.00 %	2.908.889.919,00	BLUD		100.00 %	3.199.778.910,90
121.750	Layanan Kesehatan Puskesmas Banyuurip (BLUD)	Cakupan SPM	Puskesmas Banyuurip	100.00 %	1.522.329.272,00	BLUD		100.00 %	1.674.562.199,20
121.751	Layanan Kesehatan Puskesmas Seborokrapyak (BLUD)	Cakupan SPM	Puskesmas Seborokrapyak	100.00 %	867.392.862,00	BLUD		100.00 %	954.132.148,20
121.752	Layanan Kesehatan Puskesmas Semawung Daleman (BLUD)	Cakupan SPM	Puskesmas Semawung Daleman	100.00 %	2.458.626.867,00	BLUD		100.00 %	2.704.489.553,70
121.753	Layanan Kesehatan Puskesmas Kutoarjo (BLUD)	Cakupan SPM	Puskesmas Kutoarjo	100.00 %	1.935.042.389,00	BLUD		100.00 %	2.128.546.627,90
121.754	Layanan Kesehatan Puskesmas Wirun (BLUD)	Cakupan SPM	Puskesmas Wirun	100.00 %	820.169.260,00	BLUD		100.00 %	902.186.186,00
121.755	Layanan Kesehatan Puskesmas Butuh (BLUD)	Cakupan SPM	Puskesmas Butuh	100.00 %	2.115.432.899,00	BLUD		100.00 %	2.326.976.188,90
121.756	Layanan Kesehatan Puskesmas Sruwohrejo (BLUD)	Cakupan SPM	Puskesmas Sruwohrejo	100.00 %	979.967.729,00	BLUD		100.00 %	1.077.964.501,90
121.757	Layanan Kesehatan Puskesmas Pituruh (BLUD)	Cakupan SPM	Puskesmas Pituruh	100.00 %	3.158.324.642,00	BLUD		100.00 %	3.474.157.106,20
121.758	Layanan Kesehatan Puskesmas Karanggetas (BLUD)	Cakupan SPM	Puskesmas Karanggetas	100.00 %	1.059.911.546,00	BLUD		100.00 %	1.165.902.700,60
121.759	Layanan Kesehatan Puskesmas Kemiri (BLUD)	Cakupan SPM	Puskesmas Kemiri	100.00 %	2.156.339.844,00	BLUD		100.00 %	2.371.973.828,40

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
121.760	Layanan Kesehatan Puskesmas Winong (BLUD)	Cakupan SPM	Puskesmas Winong	100.00 %	1.435.641.877,00	BLUD		100.00 %	1.579.206.064,70
121.761	Layanan Kesehatan Puskesmas Bruno (BLUD)	Cakupan SPM	Puskesmas Bruno	100.00 %	4.977.766.657,00	BLUD		100.00 %	5.475.543.322,70
121.762	Layanan Kesehatan Puskesmas Gebang (BLUD)	Cakupan SPM	Puskesmas Gebang	100.00 %	1.086.486.823,00	BLUD		100.00 %	1.195.135.505,30
121.763	Layanan Kesehatan Puskesmas Loano (BLUD)	Cakupan SPM	Puskesmas Loano	100.00 %	3.630.694.663,00	BLUD		100.00 %	3.993.764.129,30
121.764	Layanan Kesehatan Puskesmas Banyuasin (BLUD)	Cakupan SPM	Puskesmas Banyuasin	100.00 %	1.187.003.028,00	BLUD		100.00 %	1.305.703.330,80
121.765	Layanan Kesehatan Puskesmas Bener (BLUD)	Cakupan SPM	Puskesmas Bener	100.00 %	3.872.104.120,00	BLUD		100.00 %	4.259.314.532,00
121.780	Pelayanan UKM Sekunder (DAK)	Cakupan SPM	Kabupaten Purworejo	100.00 %	0,00	DAK	Kebutuhan : Rp.1.342.000.000,-	100.00 %	0,00
1.2.18	Program Pelayanan Pemeriksaan Penyakit Menular	Persentase orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standart		100.00 %	1.185.000.000,00			100.00 %	1.303.500.000,00
		Persentase Penderita Tuberculosis mendapatkan pelayanan Tuberculosis sesuai standar		100.00 %				100.00 %	
		Persentase Penderita Tuberculosis sembuh		80.00 %				80.00 %	
		Persentase ISPA, Diare dan penyakit menular lainnya tertangani		100.00 %				100.00 %	
		Persentase Penderita DBD tertangani		100.00 %				100.00 %	
		Persentase Penderita Malaria tertangani		100.00 %				100.00 %	
12.181	Pengendalian dan penanggulangan penyakit menular	Jumlah penderita dan orang beresiko terhadap TBC, ISPA, Diare, HIV-Aids, Demam Berdarah, Pneumonia, Kusta, Leptospirosis dan Penyakit Menular lainnya yang tertangani	Kabupaten Purworejo	100.00 %	135.000.000,00	DAU		100.00 %	148.500.000,00
12.182	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Malaria	Persentase penderita Malaria ditemukan dan diobati	Kabupaten Purworejo	100.00 %	890.000.000,00	DAU		100.00 %	979.000.000,00
121.812	Penanganan dan Pengendalian penyakit tidak menular	Tersedianya Posbindu KIT	Kabupaten Purworejo	35.00 Jenis	100.000.000,00	DAU		35.00 Jenis	110.000.000,00
		Pembinaan dan pelatihan petugas dan kader		494.00 Desa				494.00 Desa	
121.814	Pengendalian dan Penanggulangan Krisis Kesehatan	Desa dengan kejadian KLB/suspek KLB/penyakit potensial KLB dan krisis kesehatan tertanggulangi 24 JAM	Kabupaten Purworejo	100.00 %	60.000.000,00	DAU		100.00 %	66.000.000,00
1.2.19	Program Pelayanan Kesehatan Lingkungan dan Respon Verifikasi terhadap SKDR	Persentase layanan pemeriksaan air minum		100.00 %	1.565.730.500,00			100.00 %	1.722.303.550,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Persentase Respon Verifikasi terhadap SKDR (Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon) dalam waktu kurang dari 24 jam		100.00 %				100.00 %	
		Persentase satuan Pendidikan dasar mendapatkan higine sanitasi pangan sesuai standart		100.00 %				100.00 %	
		Jumlah desa yang melaksanakan ODF (Open Defocation Free)		100.00 %				100.00 %	
12.191	Upaya Kesehatan Kerja	Pembinaan dan pelatihan petugas dan kader	Kabupaten Purworejo	40.00 Lokasi	50.000.000,00	DAU		40.00 Lokasi	55.000.000,00
12.192	Peningkatan Surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah	Persentase Respon Verifikasi terhadap SKDR (Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon) dalam waktu kurang dari 24 jam	Kabupaten Purworejo	100.00 %	100.000.000,00	DAU		100.00 %	110.000.000,00
		Desa dengan kejadian KLB/suspek KLB/penyakit potensial KLB dan krisis kesehatan tertanggulangi 24 JAM		100.00 %				100.00 %	
		Meningkatnya kemampuan petugas surveilans Puskesmas dan Rumah Sakit		50.00 Org				50.00 Org	
		Tersedianya data faktor resiko kejadian KLB/suspek KLB/penyakit potensial KLB dan krisis kesehatan		1.00 Dok				1.00 Dok	
12.194	Layanan sistem rujukan gawat darurat	Terlaksananya Sistem Pelayanan Gawat Darurat Terpadu	Kabupaten Purworejo	100.00 %	350.000.000,00	DAU		100.00 %	385.000.000,00
12.195	Pemeriksaan kualitas air	Hasil pemeriksaan kualitas air minum/air bersih	Kabupaten Purworejo	460.00 Sampel	34.098.900,00	DAU		460.00 Sampel	37.508.790,00
12.196	Penyelenggaraan Penyehatan lingkungan	Jumlah TTU dan TPM dibina	Kabupaten Purworejo	150.00 TTU/TPM	80.000.000,00	DAU		150.00 TTU/TPM	88.000.000,00
		Terlaksananya penyemprotan alat di TPA dan TPS		50.00 Lokasi				50.00 Lokasi	
12.197	Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat	Terlaksananya kampanye Hygiene sanitasi dan pemucuan CLTS	Kabupaten Purworejo	4.00 Desa	50.000.000,00	DAU		4.00 Desa	55.000.000,00
		Monitoring Evaluasi		30.00 Desa				30.00 Desa	
12.198	Pelatihan pengelola tempat pengolahan makanan	Terlaksananya pelatihan Hygiene Saniatsi	Kabupaten Purworejo	40.00 Org	52.500.000,00	DAU		40.00 Org	57.750.000,00
12.199	Pengadaan jamban (sektoral)	Jumlah desa yang melaksanakan ODF (Open Defecation Free)	Kabupaten Purworejo	60.00 Desa	0,00	APBD PROV	Kebutuhan : Rp.400.000.000,-	60.00 Desa	0,00
121.910	Pengadaan Sarana dan Prasarana program pelayanan kesehatan lingkungan	IPAL	Kabupaten Purworejo	2.00 unit	849.131.600,00	DAU		2.00 unit	934.044.760,00
1.2.20	Program Kefarmasian, Pengawasan Obat dan Makanan	Cakupan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai kebutuhan		100.00 %	8.511.168.000,00			100.00 %	9.362.284.800,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Prosentase pengawasan obat dan makanan		55.00 %				55.00 %	
		Prosentase penggunaan obat rasional		90.00 %				90.00 %	
		Cakupan Pelayanan Sertifikasi Produk Pangan		100.00 %				100.00 %	
12.201	Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Obat non esensial, reagen dan perbekalan kesehatan	Dinas Kesehatan	129.00 Item	4.220.168.000,00	DBHCHT		129.00 Item	4.642.184.800,00
		Obat esensial dan bahan medis habis pakai		130.00 Item				130.00 Item	
12.202	KIE Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Terlaksananya penggunaan obat yang rasional	Kabupaten Purworejo	152.00 Sarana	35.000.000,00	DAU		152.00 Sarana	38.500.000,00
12.203	Pembinaan dan Pengawasan Sarana Produksi Distribusi Sediaan Farmasi, Makanan dan Minuman	Data Hasil pengawasan/pembinaan ke sarana produksi dan distribusi di 65 Sarana	Kabupaten Purworejo	65.00 Dok	42.000.000,00	DAU		65.00 Dok	46.200.000,00
12.204	Layanan Kefarmasian	Pengelolaan Kefarmasian	Kabupaten Purworejo	12.00 Bulan	90.000.000,00	DAU		12.00 Bulan	99.000.000,00
12.205	Registrasi Industri Makanan dan Minuman	Persentase pemohon sertifikat produksi pangan terlayani	Kabupaten Purworejo	100.00 %	24.000.000,00	DAU		100.00 %	26.400.000,00
12.206	Distribusi Obat dan E Logistik (DAK)	Cakupan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai kebutuhan	Kabupaten Purworejo	100.00 %	100.000.000,00	DAK		100.00 %	110.000.000,00
12.207	Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK)	Cakupan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai kebutuhan	Kabupaten Purworejo	100.00 %	4.000.000.000,00	DAK		100.00 %	4.400.000.000,00
1.2.21	Program Upaya Kesehatan Perorangan	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Fasilitas Penunjang Pelayanan Kesehatan Yang teregistrasi		100.00 %	76.575.520.000,00			100.00 %	84.233.072.000,00
		Persentase Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standart		100.00 %				100.00 %	
		Persentase Puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja		100.00 %				100.00 %	
		Persentase Puskesmas yang melaksanakan kesehatan olahraga		100.00 %				100.00 %	
		Cakupan Tenaga Kesehatan Yang teregistrasi		100.00 %				100.00 %	
		Jumlah Puskesmas yang memberikan pelayanan 24 jam		27.00 Puskesmas				27.00 Puskesmas	
		Jumlah Puskesmas terakreditasi		27.00 Puskesmas				27.00 Puskesmas	
		Layanan Rumah Sakit tipe C		100.00 %				100.00 %	
		Persentase Puskesmas yang memberikan pelayanan sesuai Standar		100.00 %				100.00 %	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
12.211	Pembinaan Mutu Layanan di Faskes Dasar dan Faskes Rujukan	Jumlah Faskes Rujukan yang mendapat Pembinaan	Kabupaten Purworejo	11.00 Sarana	200.000.000,00	DAU		11.00 Sarana	220.000.000,00
		Jumlah Faskes Dasar yang mendapat Pembinaan		38.00 FKTP				38.00 FKTP	
		Monev ke faskes dasar & Rujukan; workshop; Penilaian Puskesmas Berprestasi		4.00 Kali				4.00 Kali	
12.213	Registrasi dan Sertifikasi Tenaga dan Sarana Pelayanan Kesehatan	Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Fasilitas Penunjang Pelayanan Kesehatan Yang teregristrasi	Kabupaten Purworejo	100.00 %	85.520.000,00	DAU		100.00 %	94.072.000,00
		Rumah Sakit tipe C teregristrasi		1.00 RS				1.00 RS	
		Jumlah Puskesmas Teregristrasi		25.00 Puskesmas				25.00 Puskesmas	
		Cakupan Tenaga Kesehatan Yang teregristrasi		100.00 %				100.00 %	
12.214	Akreditasi Puskesmas	Fasilitas tim penilai akreditasi puskesmas	Kabupaten Purworejo	22.00 puskesmas	60.000.000,00	DAU		22.00 puskesmas	66.000.000,00
12.214	Akreditasi Puskesmas (DAK)	Puskesmas terakreditasi	Kabupaten Purworejo	22.00 puskesmas	1.540.000.000,00	DAK		22.00 puskesmas	1.694.000.000,00
12.215	Pengadaan Alat Kesehatan (DAK)	Alkes fisioterapi puskesmas	Kabupaten Purworejo	22.00 paket	600.000.000,00	DAK		22.00 paket	660.000.000,00
12.215	Optimalisasi SIK	Pemeliharaan prasarana SIK	Kabupaten Purworejo	29.00 Titik	90.000.000,00	DAU		29.00 Titik	99.000.000,00
122.136	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C	Layanan kesehatan rumah sakit umum daerah kelas C	RSUD Kelas C	100%	14.000.000.000,00	DAU		4.00 Bulan	15.400.000.000,00
		Sarana dan prasarana non alkes rumah sakit umum daerah kelas C		52 Jenis					
		Penataan ruang dapur rumah sakit umum daerah kelas C		1 Paket					
		Penataan ruang president suite rumah sakit umum daerah kelas C		1 Paket					
122.138	Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C	Alat kesehatan	RSUD Kelas C	214 Jenis	60.000.000.000,00	DAU		15.00 Paket	66.000.000.000,00
1.2.22	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	tingkat kondisi sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya		100.00 %	14.800.000.000,00			100.00 %	16.280.000.000,00
12.221	Pembangunan Puskesmas (DAK)	Puskesmas yang dibangun	Puskesmas Pituruh, Puskesmas Winong	2.00 Unit	13.000.000.000,00	DAK		2.00 Unit	14.300.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
12.222	Pembangunan Puskesmas Pembantu	Puskesmas Pembantu yang direhab	Pustu Tegalrejo, Pustu Jrasah	2.00 Unit	900.000.000,00	DAU		2.00 Unit	990.000.000,00
12.223	Rehabilitasi Sedang/ Berat Puskesmas Pembantu	Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu	Pustu Borokulon, Pustu Ketawangrejo, Pustu Lubang Kidul, Pustu Soko	4.00 Unit	900.000.000,00	DAU		4.00 Unit	990.000.000,00

Nama Perangkat Daerah : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	TOTAL				156.423.406.000,00				225.673.492.200,00
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar								
12	Kesehatan				156.423.406.000,00				225.673.492.200,00
1.2.23	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan gawat darurat level 3 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di kabupaten / kota		90.00 %	156.423.406.000,00			90.00 %	225.673.492.200,00
		Persentase cakupan pelayanan kesehatan RSUD dr. Tjitrowardojo Purworejo		96.67 %				100.00 %	
12.231	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan	Pelayanan pasien rawat jalan	RSUD Dr. Tjitrowardojo Purworejo	167.156 Pasien	147.225.793.000,00	BLUD		167.156 Pasien	154.587.082.650,00
		Penyelenggaraan Sistem Manajemen Informasi RS		1 Paket				1 Paket	
		Pengembangan administrasi,penyelenggaraan Perencanaan dan sistem akuntansi keuangan (RKB, RKPBU, RKP, Renja, Renja Perubahan, RKT/Perubahan RKT , KUAPPAS, RKA/ Perubahan RKA , RBA/Perubahan RBA , DPA/ Perubahan DPA, PK/Perubahan PK ,RUP dan RSB)		21 Dokumen				21 Dokumen	
		Pelayanan pasien IGD		23.722 Pasien				23.722 Pasien	
		Pelaporan,pemantauan,pengendalian dan evaluasi capaian kinerja pelayanan dan keuangan (Laporan kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan, Audit Independen, Evaluasi SPM, Bantuan Hukum, Evaluasi kinerja, LKj iP, EKPPD/EKPOD, LKPJ, Laporan Fisik d		17 Dokumen				17 Dokumen	
		Pelayanan pasien rawat inap		25.758 Pasien				25.758 Pasien	
		Peningkatan mutu SDM : Pendidikan dan pelatihan berupa kursus, bintek, seminar dsb.		1.300 Orang				1.300 Orang	
		Pelayanan pasien penunjang pelayanan		2.867.509 Pasien				2.867.509 Pasien	
		Pelayanan administrasi perkantoran		12 bulan				12 bulan	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Promosi, Pemasaran dan Penyuluhan Kesehatan		9 jenis				9 jenis	
		Verifikasi Akreditasi Rumah Sakit		1 paket				1 paket	
		Pelayanan Program SDG.S, PPI, PMKP, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Kesehatan dan Keselamatan Pasien		5 paket				5 paket	
12.234	Pembangunan Gedung Rekam Medis 2 Lantai	Bangunan Gedung Rekam Medis 2 Lantai	RSUD Dr. Tjitrowardojo Purworejo	1.00 Unit	2.691.590.000,00	BLUD		0.00 Unit	3.231.528.300,00
12.235	Pengadaan Alat Kesehatan dan Penunjang Pelayanan Kesehatan (BLUD)	Alat Kesehatan dan Penunjang Pelayanan Kesehatan	RSUD Dr. Tjitrowardojo Purworejo	23.00 Jenis	3.077.646.000,00	BLUD		23.00 Jenis	1.137.828.000,00
12.236	Pengadaan Peralatan Komputer	Peralatan Komputer	RSUD Dr. Tjitrowardojo Purworejo	12.00 Jenis	1.083.645.800,00	BLUD		12.00 Jenis	721.341.100,00
12.237	Pengadaan Peralatan Elektronik	Peralatan Elektronik	RSUD Dr. Tjitrowardojo Purworejo	8.00 Jenis	259.965.100,00	BLUD		8.00 Jenis	272.963.350,00
12.238	Pengadaan Peralatan Kantor	Peralatan Kantor	RSUD Dr. Tjitrowardojo Purworejo	16.00 unit	656.427.500,00	BLUD		16.00 unit	689.248.800,00
12.239	Pengadaan Peralatan Mebelair	Peralatan Mebelair	RSUD Dr. Tjitrowardojo Purworejo	15.00 Jenis	686.991.600,00	BLUD		15.00 Jenis	0,00
122.315	Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Dr. Tjitrowardojo Purworejo (Bankeu)	Alat kesehatan	RSUD Dr. Tjitrowardojo Purworejo	22.00 jenis	0,00	BANPROV	Kebutuhan : Rp.50.778.500.000	22.00 jenis	50.778.500.000,00
122.317	Pengadaan Peralatan Ruang Rawat Inap Rumah Sakit (DAK)	Peralatan Ruang Rawat Inap Rumah Sakit	RSUD Dr. Tjitrowardojo Purworejo	10.00 Jenis	741.347.000,00	DAK	Kebutuhan : Rp.1.726.104.000	10.00 Jenis	1.726.104.000,00
122.319	Pengadaan Peralatan Ruang Intensive rumah Sakit (DAK)	Peralatan Intensive	RSUD Dr. Tjitrowardojo Purworejo	6.00 Jenis	0,00	DAK	Kebutuhan : Rp.1.980.223.000	6.00 Jenis	1.980.223.000,00
122.320	Pengadaan Peralatan Bedah Sentral (DAK)	peralatan bedah sentral	RSUD Dr. Tjitrowardojo Purworejo	9.00 Jenis	0,00	DAK	Kebutuhan : Rp.3.971.675.000	9.00 Jenis	3.971.675.000,00
122.354	Pengadaan IPAL Rumah Sakit (DAK)	Pengadaan IPAL Rumah Sakit	RSUD Dr. Tjitrowardojo Purworejo	1.00 Paket	0,00	DAK	Kebutuhan : Rp.3.824.904.000	1.00 Paket	3.824.904.000,00
122.357	Pengadaan Peralatan PICU/NICU Rumah Sakit (DAK)	Peralatan PICU/NICU Rumah Sakit	RSUD Dr. Tjitrowardojo Purworejo	8.00 unit	0,00	DAK	Kebutuhan : Rp.2.752.094.000	8.00 unit	2.752.094.000,00

Nama Perangkat Daerah : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	TOTAL				180.233.747.800,00				220.963.074.847,00
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar								
13	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				180.233.747.800,00				220.963.074.847,00
131	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran		100.00 %	438.079.200,00			100.00 %	0,00
13.125	Pengelolaan Surat-menyurat dan Kearsipan	Layanan surat-menyurat dan kearsipan	DPUPR	12.00 Bulan	72.621.200,00	DAU		12.00 Bulan	0,00
13.126	Penyediaan Layanan Komunikasi, Informasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Layanan komunikasi, informasi, sumber daya air dan listrik	DPUPR	12.00 Bulan	81.771.000,00	DAU		12.00 Bulan	0,00
13.127	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Layanan kebersihan kantor	DPUPR	12.00 Bulan	32.824.000,00	DAU		12.00 Bulan	0,00
13.128	Koordinasi dan Konsultasi Internal dan Eksternal	Layanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	DPUPR, Dalam Daerah, Luar Daerah	12.00 Bulan	205.215.000,00	DAU		12.00 Bulan	0,00
13.129	Pengelolaan Keamanan Kantor	Layanan Keamanan Kantor	DPUPR	12.00 Bulan	45.648.000,00	DAU		12.00 Bulan	0,00
132	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Berfungsi Dengan Baik		100.00 %	438.499.500,00			100.00 %	176.435.000,00
13.222	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	DPUPR	1.00 Unit/Th	97.743.000,00	DAU		1.00 Unit/Th	92.765.500,00
13.224	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	DPUPR	33.00 Unit/Th	163.160.000,00	DAU		33.00 unit	83.669.500,00
13.242	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat	DPUPR	1.00 unit	104.459.000,00	DAU		1.00 unit	0,00
1.3.2.49	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara rutin/berkala	DPUPR	21.00 Unit/Th	9.971.000,00	DAU		1.00 unit	0,00
13.247	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	DPUPR	7.00 unit	63.166.500,00	DAU		7.00 unit	0,00
136	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Capaian Kinerja dan Keuangan		100.00 %	251.380.000,00			100.00 %	503.072.602,00
1.365	Penyusunan Pelaporan Keuangan	Dokumen pelaporan keuangan	DPUPR	14.00 Dok	17.000.000,00	DAU		14.00 Dok	396.592.602,00
1.366	Penyusunan Perencanaan Dan Evaluasi Pelaporan	Dokumen perencanaan dan evaluasi pelaporan	DPUPR	38.00 Dok	234.380.000,00	DAU		38.00 Dok	106.480.000,00
137	Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Prosentase tersedianya data dasar pembangunan		100.00 %	70.510.000,00			100.00 %	416.829.100,00
1.371	Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Dokumen data dasar pembangunan	DPUPR	1.00 Dok	70.510.000,00	DAU		1.00 Dok	416.829.100,00
1.3.15	Program Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik		98.60 %	81.552.960.000,00			100.00 %	60.428.140.060,00
		Persentase peningkatan kapasitas jalan kabupaten		74.31 %				100.00 %	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Persentase peningkatan kapasitas jembatan		85.37 %				100.00 %	
		Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap		83.00 %				85.00 %	
13.151	Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Kabupaten	jalan kondisi baik sedang	Kab. Purworejo	609.35 km	21.337.267.000,00	DAU		611.49 km	57.223.140.060,00
13.152	Operasional dan pemeliharaan peralatan berat dan laboratorium	alat berat dan laboratorium jalan	Kab. Purworejo	13.00 unit	100.000.000,00	DAU		13.00 unit	125.000.000,00
13.154	Mitigasi	bangunan pencegah longsor	Kab. Purworejo	5.00 Lokasi	0,00	DAU	Kebutuhan : Rp.1.000.000.000,-	5.00 Lokasi	1.000.000.000,00
13.155	Penanganan Longsor	bangunan pengaman badan jalan	Kab. Purworejo	5.00 Lokasi	1.000.000.000,00	DAU		5.00 Lokasi	1.000.000.000,00
13.156	Pengadaan Peralatan Berat dan Laboratorium	alat berat dan peralatan laboratorium	Kab. Purworejo	5.00 unit	0,00	DAU	Kebutuhan : Rp.3.806.050.000,-	0.00 unit	0,00
1.3.15.11	Peningkatan Jalan Kabupaten (DAK)	peningkatan jalan kabupaten dengan lapis hotmix	Kab. Purworejo	11.23 km	29.082.877.000,00	DAK	Kebutuhan : Rp.208.794.706.840,-	116.36 km	244.345.601.500,00
1.3.15.11	Peningkatan Jalan Kabupaten (Bankeu)	peningkatan jalan kabupaten dengan lapis hotmix	Kab. Purworejo	1,8 km	3.500.000.000,00	BANPROV	Kebutuhan : Rp. 68.972.434.000,-	116.36 km	244.345.601.500,00
1.3.15.12	Peningkatan Jalan Kabupaten	peningkatan jalan kabupaten dengan lapis hotmix	Kab. Purworejo	2.40 km	15.552.000.000,00	DAU		2.40 km	
		jalan kondisi baik sedang		3.00 km				3.00 km	
1.3.15.12	Penggantian Jembatan Kabupaten	penggantian jembatan kabupaten dengan konstruksi beton	Kab. Purworejo	19.00 meter	3.800.000.000,00	DAU		158.00 meter	23.700.000.000,00
1.3.15.13	Penggantian Jembatan Kabupaten (DAK)	penggantian jembatan kabupaten dengan konstruksi beton	Kab. Purworejo	18.00 meter	3.000.000.000,00	DAK	Kebutuhan : Rp.22.600.000.000,-		
1.3.15.13	Penggantian Jembatan Kabupaten (Bankeu)	penggantian jembatan kabupaten dengan konstruksi beton	Kab. Purworejo	18.00 meter	3.000.000.000,00	BANPROV			
131.513	Pengembangan dan Pengelolaan Database jalan	database jalan kabupaten	Kab. Purworejo	1.00 Dok	40.408.000,00	DAU		1.00 Dok	40.000.000,00
131.514	Pengembangan dan Pengelolaan Database jembatan	database jembatan kabupaten	Kab. Purworejo	1.00 Dok	40.408.000,00	DAU		1.00 Dok	40.000.000,00
131.515	Penyusunan DED jalan dan jembatan	Data DED Jalan dan Jembatan	Kab. Purworejo	8.00 Dok	500.000.000,00	DAU		8.00 Dok	1.000.000.000,00
131.516	Penyusunan RPIJM Jalan	RPIJM Jalan	Kab. Purworejo	1.00 Dok	500.000.000,00	DAU		0.00 Dok	0,00
131.524	Apraisal Tanah Untuk Jalan	Dokumen apraisal tanah	Kab. Purworejo	1.00 Dok	100.000.000,00	DAU			
1.3.16	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Drainase	Persentase Saluran drainase dalam kondisi baik		32.26 %	450.000.000,00			33.07 %	54.332.707.995,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
13.161	Pembangunan Drainase	Saluran drainase	Kab. Purworejo	500.00 meter	0,00	DAU	Kebutuhan : Rp.2.500.000.000,-	0.00 meter	0,00
13.162	Rehabilitasi Drainase	Saluran drainase yang direhab	Kab. Purworejo	2524.00 meter	0,00	DAU	Kebutuhan : Rp.53.932.707.995	0.00 meter	53.932.707.995,00
13.163	Pemeliharaan drainase	Saluran drainase yang dipelihara	Kota Purworejo & Kota Kutoarjo	2.00 Paket	450.000.000,00	DAU	Kebutuhan : Rp.900.000.000,-	2.00 Paket	400.000.000,00
1.3.17	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah	Persentase cakupan layanan perijinan pemanfaatan ruang		100.00 %	501.836.000,00			100.00 %	416.865.661,00
		Persentase kesesuaian Rencana Tata Ruang dlm RPJMD/Renstra PD dan RKPD/Renja PD		100.00 %				100.00 %	
		Tersedianya peraturan dan informasi Rencana Umum dan rinci Tata Ruang (RTRW, RDTR dan RTR kawasan strategis)		19.05 %				23.81 %	
13.174	Penyusunan Materi Teknis Rencana Tata Ruang	Materi Teknis Rencana Rinci Tata Ruang	Kab. Purworejo	1.00 Dok	200.612.000,00	DAU		Dok	0,00
13.175	Penyusunan Raperda Rencana Tata Ruang	Raperda Tata Ruang	Kab. Purworejo	1.00 Dok	100.612.000,00	DAU		Dok	0,00
13.176	Penetapan Perda Rencana Tata Ruang	Perda Tata Ruang	Kab. Purworejo	1.00 Dok	100.612.000,00	DAU		Dok	266.865.661,00
13.177	Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	pengawasan penyelenggaraan penataan ruang	Kab. Purworejo	1.00 Paket	100.000.000,00	DAU		1.00 Paket	150.000.000,00
		Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang	Kab. Purworejo	1.00 Lembaga					
1.3.18	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persentase kesesuaian bangunan dengan RTBL		10.00 %	150.000.000,00			11.00 %	23.093.329.341,00
13.181	Pelayanan sertifikasi Laik Fungsi Bangunan	Sertifikat Laik Fungsi Bangunan	Kab. Purworejo	1.00 Paket	150.000.000,00	DAU		1.00 Paket	119.762.880,00
13.196	Optimalisasi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	Dokumen Data IMB	Kab. Purworejo	1.00 Dok	0,00	DAU	Kebutuhan : Rp.50.000.000,-	4.00 Paket	22.973.566.461,00
1.3.19	Program Pengembangan dan Pengelolaan Bangunan Gedung	Cakupan penanganan bangunan gedung		100.00 %	64.122.448.000,00			100.00 %	22.973.566.461,00
13.191	Inventarisasi Bangunan Gedung Negara	Data Bangunan Milik Negara	Kab. Purworejo	1.00 Paket	120.000.000,00	DAU		0.00 Paket	0,00
13.193	Pembangunan Pasar Purworejo	Pasar Purworejo	Kab. Purworejo	1.00 Paket	40.001.224.000,00	DAU		0.00 Paket	0,00
13.196	Pembangunan Gedung Negara	Gedung negara	Kab. Purworejo	6.00 Paket	24.001.224.000,00	DAU		4.00 Paket	22.973.566.461,00
		DED Gedung Negara	Kab. Purworejo	1.00 Dok				0.00 Dok	
1.3.20	Program Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi	Persentase permohonan IUJK yang terlayani sesuai SOP		100.00 %	140.612.000,00			100.00 %	14.489.381.981,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Prosentase ketersediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi		71.43 %				71.43 %	
13.201	Pembinaan Jasa Konstruksi	pembinaan usaha jasa konstruksi	Kab. Purworejo	1.00 Paket	140.612.000,00	DAU		1.00 Paket	14.489.381.981,00
		pengendalian usaha jasa konstruksi	Kab. Purworejo	1.00 Paket					
1.3.21	Program Pengembangan Infrastruktur Kawasan Strategis	Cakupan infrastruktur kawasan perkotaan purworejo-kutoarjo		79.60 %	11.703.700.000,00			81.60 %	26.695.054.528,00
		Cakupan infrastruktur kawasan purwokulon (bordercity)		60.60 %				62.91 %	
		Cakupan infrastruktur kawasan strategis cepat tumbuh (KSCT: minapolitan, agropolitan , kawasan pariwisata dan perbatasan)		14.65 %				16.25 %	
13.215	Pemeliharaan Trotoar	Trotoar yang dipelihara	Kota Purworejo dan Kutoarjo	2.00 Paket	1.000.000.000,00	DAU		2.00 Paket	1.250.000.000,00
13.216	Pembangunan Jalan Poros Desa	Jalan Poros Desa	Kab. Purworejo	22.50 km	0,00	DAU	Kebutuhan : Rp.24.187.500.000,-	10.00 km	5.000.000.000,00
13.218	Peningkatan Jalan Kabupaten di kawasan strategis	Peningkatan Jalan Kabupaten di kawasan strategis dengan lapis hotmix	Kab. Purworejo	2.50 km	6.703.700.000,00	DAU		10.22 km	20.445.054.528,00
132.113	Pembangunan Trotoar	Trotoar	Kec. Purworejo	1.00 Paket	1.500.000.000,00	DAU		0.00 Paket	0,00
132.118	Penataan Kawasan Segitiga Bagelen	Rumah Durian	Kec. Purworejo	1.00 unit	0,00	DAU	Kebutuhan : Rp.2.000.000.000,-	unit	0,00
132.119	Pembangunan Jalan menuju Goa Seplawan	Jalan menuju goa seplawan	Kec. Kaligesing	625.00 m	2.500.000.000,00	DAU		km	0,00
132.119	Pembangunan Youth Center Buper Argo Putra (Heroes Park)	Gedung youth center	Kec. Purworejo	1.00 Paket	0,00	DAU	Kebutuhan : Rp.7.500.000.000,-		
132.119	Pembangunan Tugu Batas Wilayah	Tugu batas wilayah	Kabupaten Purworejo	3.00 Lokasi	0,00	DAU	Kebutuhan : Rp.3.000.000.000,-		
1.3.22	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi	Kinerja sistem irigasi pada DI Kewenangan Kabupaten Dalam Kondisi Baik		72.34 %	20.413.723.100,00			73.36 %	17.437.692.118,00
		Kondisi Fisik Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik		71.85 %				74.35 %	
		Persentase pengurangan genangan air banjir pada irigasi kewenangan kabupaten		55.56 %				60.39 %	
13.221	Pelayanan dan Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi	Bangunan Irigasi	Kab. Purworejo	696.00 Buah	1.830.887.100,00	DAU		1717.00 Buah	2.200.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Saluran Irigasi	Kab. Purworejo	324219.00 meter				352310.00 meter	
13.222	Pemeliharaan Berkala Jaringan Irigasi	Bangunan Irigasi	Kab. Purworejo	3.00 Buah	1.000.000.000,00	DAU		2.00 Buah	1.103.931.400,00
		Saluran Irigasi	Kab. Purworejo	1737.00 meter				500.00 meter	
13.225	Fasilitasi Lomba Petugas Operasional dan Pemeliharaan Irigasi	Peserta Lomba	Kabupaten, Provinsi, Nasional	2.00 Org	50.000.000,00	DAU		2.00 Org	130.000.000,00
13.226	Pembuatan Buku Data Daerah Irigasi dan SOP Pelayanan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Buku Data DI dan SOP Pelayanan dan Pemeliharaan untuk DI Kewenangan Kabupaten di 5 UPT	Kab. Purworejo	10.00 Buku	60.000.000,00	DAU		Buku	40.000.000,00
13.229	Inventarisasi dan Pengolahan Data Hidrologi	dokumen hidrologi	Kab. Purworejo	2.00 Dok	40.000.000,00	DAU		Dok	40.000.000,00
132.210	Inventarisasi dan Pengolahan Data Jaringan Irigasi	dokumen jaringan irigasi	Kab. Purworejo	5.00 Dok	75.000.000,00	DAU		Dok	58.000.000,00
132.211	Penyusunan DED Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Irigasi	DED Rehabilitasi/ Peningkatan Jaringan Irigasi	Kab. Purworejo	10.00 Dok	200.000.000,00	DAU		0.00 Dok	0,00
132.212	Pendamping IPAIR	Saluran Irigasi	Kab. Purworejo	500.00 meter	100.000.000,00	DAU		1000.00 meter	120.000.000,00
132.214	Penyediaan Bahan Banjiran (Penanganan Darurat)	Batu Belah	Kab. Purworejo	100.00 m3	250.000.000,00	DAU		60.00 m3	643.000.000,00
		Bronjong Pabrikasi	Kab. Purworejo	1000.00 Lembar				1000.00 Lembar	
		Karung Plastik	Kab. Purworejo	10000.00 Lembar				15000.00 Lembar	
132.221	Peningkatan Jaringan Irigasi	Saluran irigasi	Kab. Purworejo	400.00 meter	400.000.000,00	DAU		4800.00 meter	13.102.760.718,00
1.3.22.22	Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK)	Bangunan Irigasi	Kab. Purworejo	18.00 Buah	5.144.000.000,00	DAK	Kebutuhan : Rp.8.041.581.000,-		
1.3.22.23	Rehabilitasi Jaringan Irigasi (IPDMIP)	Bangunan Irigasi	Kab. Purworejo	31.00 Buah	10.892.000.000,00	DAU		30.00 Buah	10.839.000.000,00
		Saluran irigasi	Kab. Purworejo	8800.00 meter				3500.00 meter	
1.3.22.24	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Bangunan Irigasi	Kab. Purworejo	1.00 Buah	0,00	DAU	Kebutuhan Bendung Tegalduren: Rp. 6.800.000.000,-		
132.225	Fasilitasi Kegiatan Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP)	Fasilitasi IPDMIP	Kab. Purworejo	5.00 Paket	371.836.000,00	DAU		Paket	0,00

Nama Perangkat Daerah : DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	TOTAL				5.225.426.050,00				28.217.175.291,00
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar								
13	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				3.815.676.800,00				19.203.084.994,00
1.3.23	Program Pengembangan dan Pengelolaan Air Bersih	Pembangunan SPAM Regional		100.00 Paket	3.631.267.000,00			100.00 Paket	19.203.084.994,00
13.231	Penyusunan DED Pembangunan SPAM Perdesaan	Perencanaan DAK-SPAM	Kab. Purworejo	1.00 Paket	100.000.000,00	DAU		1.00 Paket	80.000.000,00
13.232	Pembangunan SPAM Regional	SPAM Regional	Kab. Purworejo	1.00 Paket	0,00	DAU	Kebutuhan : Rp. 1.000.000.000,-	1.00 Paket	13.311.084.994,00
13.233	SPAM IKK Bagelen	SPAM IKK Bagelen	Kab. Purworejo	1.00 Paket	0,00	DAU	Kebutuhan : Rp. 53.000.000.000,-	1.00 Paket	0,00
13.237	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaan (DAK)	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaan	Kab. Purworejo	2.00 Desa	2.531.267.000,00	DAK		2.00 Desa	2.906.000.000,00
132.312	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaan	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaan	Kab. Purworejo	2.00 Desa	1.000.000.000,00	DAU		2.00 Desa	2.906.000.000,00
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Air Limbah	Pembangunan DAK SLBM		100.00%	184.409.800,00			100.00%	0,00
132.312	Fasilitasi Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) (DAK)	Fasilitasi Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) (DAK)		2 paket	184.409.800,00	DAK		2 paket	
14	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman				1.268.551.250,00				8.734.248.377,00
141	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran		100.00 %	153.897.300,00			100.00 %	169.287.030,00
14.125	Pengelolaan Surat-menyurat dan Kearsipan	Layanan surat-menyurat dan kearsipan	Kab. Purworejo	12.00 Bulan	35.574.900,00	DAU		12.00 Bulan	39.132.390,00
14.126	Penyediaan Layanan Komunikasi, Informasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik	Kab. Purworejo	12.00 Bulan	40.715.400,00	DAU		12.00 Bulan	44.786.940,00
14.127	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Layanan kebersihan kantor	Kab. Purworejo	12.00 Bulan	4.399.000,00	DAU		12.00 Bulan	4.838.900,00
14.128	Koordinasi dan Konsultasi Internal dan Eksternal	Layanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Kab. Purworejo	12.00 Bulan	73.208.000,00	DAU		12.00 Bulan	80.528.800,00
142	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur		100.00 %	71.063.450,00			100.00 %	83.613.795,00
14.222	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	Kab. Purworejo	1.00 Unit/Th	4.786.450,00	DAU		1.00 Unit/Th	5.265.095,00
14.224	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	Kab. Purworejo	21.00 Unit/Th	60.960.000,00	DAU		21.00 Unit/Th	72.500.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
14.247	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	Kab. Purworejo	22.00 unit	5.317.000,00	DAU		22.00 unit	5.848.700,00
146	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase Capaian Kinerja Dan Keuangan		100.00 %	46.256.300,00			100.00 %	50.881.930,00
1.465	Penyusunan Pelaporan Keuangan	Dokumen pelaporan keuangan	Kab. Purworejo	18.00 Dok	12.508.400,00	DAU		18.00 Dok	13.759.240,00
1.466	Penyusunan Perencanaan Dan Evaluasi Pelaporan	Dokumen perencanaan dan evaluasi pelaporan	Kab. Purworejo	12.00 Dok	33.747.900,00	DAU		12.00 Dok	37.122.690,00
1.4.15	Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU		43.50 %	972.334.200,00			46.78 %	1.084.417.620,00
		Persentase Rumah layak Huni		86.01 %				86.50 %	
		Persentase Kebutuhan rumah (backlog rumah)		2.74 %				2.49 %	
14.152	Rehab Rumah Tidak Layak Huni (Sektoral)	Rehab Rumah Tidak Layak Huni	Kab. Purworejo	500.00 unit	0,00	APBD Prov	Kebutuhan : Rp.500.000.000,-	500.00 unit	0,00
14.153	Layanan Penyelenggaraan Rusunawa	Layanan Penyelenggaraan Rusunawa	Kec. Kutoarjo	1.00 Paket	364.284.000,00	DAU		1.00 Paket	396.428.400,00
14.154	Fasilitasi Penambahan dan perluasan jaringan listrik	Fasilitasi Penambahan dan perluasan jaringan listrik	Kab. Purworejo	1.00 Paket	25.000.000,00	DAU		1.00 Paket	50.000.000,00
14.155	Koordinasi Pembangunan Perumahan	Operasional Koordinasi Pembangunan Perumahan	Kab. Purworejo	1.00 Paket	0,00	DAU	Kebutuhan : Rp.50.000.000,-	1.00 Paket	0,00
14.156	Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya (BSPS)	Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni	Kab. Purworejo	2000.00 rumah	0,00	DAU	Kebutuhan : Rp.20.000.000.000,-	2000.00 rumah	0,00
14.157	Pendampingan BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya)	Operasional Monitoring program BSPS	Kab. Purworejo	2000.00 rumah	205.366.000,00	DAU		2000.00 rumah	222.536.600,00
14.159	Pembangunan jalan Kelurahan	Pembangunan Jalan Kelurahan	Kab. Purworejo	1.00 Kelurahan	0,00	DAU	Kebutuhan : Rp.2.500.000.000,-	1.00 Kelurahan	0,00
141.510	Rehab Rumah Tidak Layak Huni	Rehab Rumah Tidak Layak Huni	Kab. Purworejo	1000.00 unit	0,00	DAU	Kebutuhan : Rp.10.000.000.000,-	1000.00 unit	0,00
141.512	Pendampingan KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh)	Operasional Pendampingan KOTAKU	Kab. Purworejo	27.00 des/kel	0,00	DAU	Kebutuhan : Rp.500.000.000,-	27.00 des/kel	0,00
141.521	Penyusunan dokumen RP3KP, dan RKP	Tersusunnya Dokumen RP3KP dan RKP	Kab. Purworejo	2.00 Dok	200.000.000,00	DAU		2.00 Dok	220.000.000,00
	Fasilitasi Peningkatan Rumah Swadaya (DAK)	Fasilitasi Peningkatan Rumah Swadaya	Kab. Purworejo	1000.00 unit	177.684.200,00	DAK		1000.00 unit	195.452.620,00
1.4.17	Program Penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh	Persentase kawasan permukiman kumuh		18.70 %	25.000.000,00			0.00 %	7.346.048.002,00
14.171	DED Penanganan Kawasan Permukiman kumuh	DED Penanganan Kawasan Permukiman kumuh	Kab. Purworejo	1.00 Dok	0,00	DAU	Kebutuhan : Rp.200.000.000,-	1.00 Dok	200.000.000,00
14.172	Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan	Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan	Kab. Purworejo	1.00 Paket	0,00	DAU	Kebutuhan : Rp.6.646.048.002,-	1.00 Paket	6.646.048.002,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
14.174	Pendampingan KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh)	Operasional Pendampingan KOTAKU	Kab. Purworejo	1.00 des/kel	25.000.000,00	DAU		1.00 des/kel	500.000.000,00
14.175	Pendampingan PISEW (Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah)	Operasional PISEW (Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah)		1.00 Desa	0,00	DAU	Kebutuhan : Rp.50.000.000,-	1.00 Desa	0,00
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar								
24	Pertanahan				141.198.000,00				279.841.920,00
2.4.15	Program Koordinasi Penyelenggaraan Pertanahan	Prosentase tanah negara yang teridentifikasi		100.00 %	141.198.000,00			100.00 %	279.841.920,00
		Tingkat pelayanan pengadaan dan penanganan sengketa pertanahan		100.00 %				100.00 %	
24.151	Identifikasi Tanah Negara	Tingkat Pelayanan Pengadaan dan Penanganan Sengketa Pertanahan	Kab. Purworejo	100.00 %	78.602.300,00	DAU	Kebutuhan : Rp.225.000.000,-	100.00 %	104.841.920,00
		Prosentase Tanah Negara Yang Teridentifikasi		100.00 %				100.00 %	
		Dokumen Identifikasi Tanah Negara		1.00 Dok				1.00 Dok	
24.152	Fasilitasi pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Fasilitas Umum	Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Kab. Purworejo	1.00 Dok	38.058.500,00	DAU	Kebutuhan : Rp.140.000.000,-	1.00 Dok	100.000.000,00
24.153	Penanganan Sengketa Pertanahan	Dokumen Pelayanan Terhadap Sengketa Tanah	Kab. Purworejo	1.00 Dok	24.537.200,00	DAU		1.00 Dok	75.000.000,00

Nama Perangkat Daerah : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	TOTAL				1.486.533.000,00				1.776.816.000,00
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar								
15	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				1.486.533.000,00				1.776.816.000,00
151	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran		100.00 %	182.706.000,00			100.00 %	182.816.000,00
15.125	Pengelolaan Surat-menyurat dan Kearsipan	Layanan surat-menyurat dan kearsipan	Kantor Kesbangpol	12.00 Bulan	18.392.000,00	DAU		12.00 Bulan	19.326.000,00
15.126	Penyediaan Layanan Komunikasi, Informasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Layanan komunikasi, informasi, sumber daya air dan listrik	Kantor Kesbangpol	12.00 Bulan	25.628.000,00	DAU		12.00 Bulan	25.630.000,00
15.127	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Layanan kebersihan kantor	Kantor Kesbangpol	12.00 Bulan	12.812.000,00	DAU		12.00 Bulan	11.100.000,00
15.128	Koordinasi dan Konsultasi Internal dan Eksternal	Layanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Kantor Kesbangpol, Dalam Daerah, Luar Daerah	12.00 Bulan	104.250.000,00	DAU		12.00 Bulan	106.360.000,00
15.129	Pengelolaan Keamanan Kantor	Layanan keamanan kantor	Kantor Kesbangpol	12.00 Bulan	21.624.000,00	DAU		12.00 Bulan	20.400.000,00
152	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	cakupan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik		100.00 %	77.183.000,00			100.00 %	86.000.000,00
15.222	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	Kantor Kesbangpol	1.00 Unit/Th	26.520.000,00	DAU		1.00 Unit/Th	29.000.000,00
15.224	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	Kantor Kesbangpol	8.00 Unit/Th	40.412.000,00	DAU		8.00 Unit/Th	45.000.000,00
15.228	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara rutin/berkala	Kantor Kesbangpol	17.00 Unit/Th	10.251.000,00	DAU		17.00 Unit/Th	12.000.000,00
155	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		100.00 %	7.420.000,00			100.00 %	10.000.000,00
1.551	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	Aparatur yang meningkat kualifikasi, kapasitas dan kinerjanya	Kantor Kesbangpol	16.00 Org	7.420.000,00	DAU		16.00 Org	10.000.000,00
156	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase sistem Capaian kinerja dan Keuangan		100.00 %	33.612.000,00			100.00 %	38.000.000,00
1.565	Penyusunan Pelaporan Keuangan	Dokumen Laporan Keuangan	Kantor Kesbangpol	14.00 Dok	7.000.000,00	DAU		14.00 Dok	8.000.000,00
1.566	Penyusunan Perencanaan Dan Evaluasi Pelaporan	Dokumen perencanaan dan Pelaporan	Kantor Kesbangpol	38.00 Dok	26.612.000,00	DAU		38.00 Dok	30.000.000,00
157	Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Prosentase Ketersediaan Data Dasar Pembangunan		100.00 %	5.000.000,00			100.00 %	5.000.000,00
1.571	Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Dokumen data dasar pembangunan	Kantor Kesbangpol	1.00 Dok	5.000.000,00	DAU		1.00 Dok	5.000.000,00
1.5.15	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Prosentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan Kepada Masyarakat		100.00 %	100.000.000,00			100.00 %	150.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
15.151	Orientasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Bangsa	Dialog Kebangsaan dan Ketahanan Bangsa	Kabupaten Purworejo	1.00 Kali	100.000.000,00	DAU		2.00 Kali	150.000.000,00
		Dialog antar suku, etnis, umat beragama dan ormas		1.00 Kali				1.00 Kali	
		Dialog kebhinekaan		1.00 Kali				1.00 Kali	
		jumlah penyelenggaraan pendidikan bela negara bagi masyarakat		80.00 Org				100.00 Org	
1.5.16	Program Peningkatan Kewaspadaan Dini Dan Pembinaan Masyarakat	tingkat koordinasi kerjasama penyelesaian konflik di daerah		100.00 %	975.612.000,00			100.00 %	1.070.000.000,00
15.164	Fasilitasi Keamanan Pemilu (Pilkada, Pilpres, Pileg)	koordinasi pengamanan pemilu (pilkada, pileg, pilpres)	Kabupaten Purworejo	1.00 kali	75.000.000,00	DAU	Ada tahapan penyelenggaraan Pilkada, Hibah pemilukada melalui PPKD, untuk KPU Rp.40.305.746.016,- , untuk Bawaslu Rp.11.797.996.900,-	0.00 Kali	0,00
151.611	Cegah Dini dan Penanganan Konflik Sosial	Fasilitasi penanganan konflik sosial	Kabupaten Purworejo	12.00 Bulan	800.612.000,00	DAU		12 Bulan	850.000.000,00
		Dialog kewaspadaan dini		1.00 Kali				1.00 Kali	
		Koordinasi TIM Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah		3.00 Kali				6.00 Kali	
		data orang asing dan lembaga asing terupdate		1.00 Dok				1.00 Dok	
151.613	Pembinaan Ormas	Data ormas yang terupdate	Kabupaten Purworejo	1.00 Dok	100.000.000,00	DAU		1.00 Dok	220.000.000,00
		Rakor FKUB		6.00 Kali				12.00 kali	
		Fasilitasi kegiatan ormas (pemancangan bambu runcing di makam pahlawan)		1.00 kali				1.00 kali	
1.5.17	Program Pendidikan Politik Masyarakat	prosentase partisipasi masyarakat dalam pemilu		80.00 %	105.000.000,00			80.00 %	235.000.000,00
15.171	Pendidikan Politik Bagi Warga Negara	dialog pendidikan politik dengan masyarakat	Kabupaten Purworejo	3.00 Kali	60.000.000,00	DAU		6.00 kali	150.000.000,00
15.175	Peningkatan Kapasitas dan Kelembagaan Partai Politik	Dokumen verifikasi bantuan keuangan parpol	Kabupaten Purworejo	16.00 Dok	45.000.000,00	DAU	Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Rp.1.097.926.600,- melalui PPKD	16.00 Dok	85.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Bimtek pengelolaan Bantuan Keuangan Parpol		1.00 Kali				1.00 Kali	

Nama Perangkat Daerah : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	TOTAL				3.727.052.500,00				5.917.994.233,00
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar								
15	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				3.727.052.500,00				5.917.994.233,00
151	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran		100%	186.684.700,00			100%	205.424.700,00
15.125	Pengelolaan Surat-menyurat dan Kearsipan	Layanan surat-menyurat dan kearsipan	Satpol PP	12 Bulan	56.544.600,00	DAU		12 Bulan	55.860.600,00
15.126	Penyediaan Layanan Komunikasi, Informasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Layanan komunikasi, informasi, sumber daya air dan listrik	Satpol PP	12 Bulan	32.243.300,00	DAU		12 Bulan	42.243.300,00
15.127	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Layanan kebersihan kantor	Satpol PP	12 Bulan	26.626.800,00	DAU		12 Bulan	36.050.800,00
15.128	Koordinasi dan Konsultasi Internal dan Eksternal	Layanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Satpol PP, Dalam Daerah, Luar Daerah	12 Bulan	71.270.000,00	DAU		12 Bulan	71.270.000,00
152	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan sarana prasarana aparatur yang berfungsi dengan baik		100%	142.073.000,00			100%	310.750.000,00
15.222	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung kantor berfungsi dengan baik	Satpol PP	1.00 Unit/Th	21.750.000,00	DAU		1.00 Unit/Th	50.750.000,00
15.224	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan berfungsi dengan baik	Satpol PP	21 Unit/Th	116.500.000,00	DAU		21 Unit/Th	245.000.000,00
15.230	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan perlengkapan kantor	Gedung/ kantor yang dipelihara rutin/ berkala dan perbaikan peralatan kerja	Satpol PP	6 Unit/Th	3.823.000,00	DAU		2 Unit/Th	15.000.000,00
155	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		100%	61.159.500,00			100%	156.406.047,00
1.551	Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur	Aparatur yang meningkat kualifikasi, kapasitas dan kinerjanya	Satpol PP	1.00 Org	61.159.500,00	DAU			156.406.047,00
		Kesamaptaan bagi anggota Satpol PP Damkar		50.00 Org					100.000.000,00
156	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase capaian kinerja dan keuangan		100%	34.613.000,00			100%	70.998.936,00
1.565	Penyusunan Pelaporan Keuangan	Dokumen pelaporan keuangan	Satpol PP	19 Dok	15.000.000,00	DAU		19 Dok	18.000.000,00
1.566	Penyusunan Perencanaan Dan Evaluasi Pelaporan	Dokumen perencanaan dan evaluasi pelaporan	Satpol PP	13 Dok	19.613.000,00	DAU		13 Dok	52.998.936,00
157	Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Prosentase tersedianya data dasar pembangunan		100%	8.714.700,00			100%	208.414.550,00
1.571	Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Dokumen data dasar pembangunan	Satpol PP, Jawa Tengah	1.00 Dok	8.714.700,00	DAU		1.00 Dok	208.414.550,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.5.18	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Tingkat Penanganan Kejadian Kebakaran		100%	662.644.400,00			100%	780.000.000,00
		Tingkat waktu tanggap (response time rate)		100%				100%	
15.184	Pelayanan dan Pelatihan Pemadam Kebakaran	Tingkat Penanganan Kejadian Kebakaran	Kabupaten Purworejo	12.00 Bulan	662.644.400,00	DAU		12.00 Bulan	780.000.000,00
		Tingkat waktu tanggap (response time rate)		12.00 Bulan				12.00 Bulan	
1.5.19	Program Pemeliharaan Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat serta Pencegahan Tindak Kriminal	Tertanganinya Gangguan Trantibum		100%	2.631.163.200,00			100%	4.186.000.000,00
15.191	Penegakan produk hukum daerah	Penegakan produk hukum secara yustisi	Kabupaten Purworejo	12.00 Bulan	132.926.200,00	DAU		12.00 Bulan	450.000.000,00
		Antisipasi penanganan pelanggaran		12.00 Bulan				12.00 Bulan	
15.196	Patroli dan Pengamanan Wilayah	Patroli kondusifitas wilayah dan evakuasi kebencanaan Kab. Purworejo dan sarasehan Satpol PP Damkar se Eks Karesidenan Kedu	Kabupaten Purworejo	12.00 Bulan	200.000.000,00	DAU		12.00 Bulan	450.000.000,00
15.197	Fasilitasi Pelayanan Pengamanan terpadu	Pengamanan pemilukada	Kabupaten Purworejo	1 Keg	1.575.945.000,00	DAU	Hibah uang melalui PPKD, kepada Polres Rp.2.000.000.000,- dan Kodim Rp.1.000.000,-	1 Keg	1.656.000.000,00
151.911	Peningkatan Kapasitas Anggota Linmas	Pengiriman Linmas mengikuti pelatihan Tk. Prov serta pelatihan Tk. Kabupaten	Kabupaten Purworejo	12.00 Bulan	245.000.000,00	DAU		12.00 Bulan	180.000.000,00
151.927	Operasi Pekat	Tertanganinya Pekat, anjal, penegakan produk hukum secara yustisi dan fasilitasi sekretariat PPNS	Kabupaten Purworejo	12.00 Bulan	130.000.000,00	DAU		12.00 Bulan	450.000.000,00
151.930	Peningkatan Kapasitas anggota Satpol PP Damkar	Fasilitasi dukungan pelaksanaan pelatihan Upacara, pelaksanaan gelar pasukan Satpol PP Damkar Tk. Prov dan Kabupaten dan fasilitasi upacara pemakaman secara sipil.	Kabupaten Purworejo	12.00 Bulan	272.000.000,00	DAU		12.00 Bulan	650.000.000,00
151.931	Pendataan dan Pemberantasan barang industri hasil tembakau	Pendataan dan pemberantasan barang industri hasil tembakau	Kabupaten Purworejo	12.00 Bulan	55.292.000,00	DBHCHT		12.00 Bulan	250.000.000,00
151.932	Sosialisasi aturan barang Industri hasil tembakau	Sosialisasi terkait aturan industri hasil tembakau	Kabupaten Purworejo	12.00 Bulan	20.000.000,00	DBHCHT		12.00 Bulan	100.000.000,00

Nama Perangkat Daerah : **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	TOTAL				3.365.727.700,00				3.344.685.700,00
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar								
14	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman				40.500.000,00				44.550.000,00
14.16	Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial	Cakupan perbaikan perumahan dan lingkungan akibat bencana alam/sosial		75.00 %	40.500.000,00			75.00 %	44.550.000,00
14.164	Verifikasi Perbaikan Perumahan Akibat Bencana	Verifikasi Perbaikan Perumahan AkibatBencana	Kab. Purworejo	1.00 Dok	40.500.000,00	DAU		1.00 Dok	44.550.000,00
15	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				3.325.227.700,00				3.300.135.700,00
151	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran		100.00 %	423.978.900,00			100.00 %	466.376.790,00
15.125	Pengelolaan Surat-menyurat dan Kearsipan	Layanan surat-menyurat dan kearsipan	BPBD	12.00 Bulan	29.447.900,00	DAU		12.00 Bulan	32.392.690,00
15.126	Penyediaan Layanan Komunikasi, Informasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Layanan komunikasi, informasi, sumber daya air dan listrik	BPBD	12.00 Bulan	123.158.000,00	DAU		12.00 Bulan	135.473.800,00
15.127	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Layanan kebersihan kantor	BPBD	12.00 Bulan	34.266.700,00	DAU		12.00 Bulan	37.693.370,00
15.128	Koordinasi dan Konsultasi Internal dan Eksternal	Layanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	BPBD, Dalam Daerah, Luar Daerah	12.00 Bulan	237.106.300,00	DAU		12.00 Bulan	260.816.930,00
152	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Berfungsi Dengan Baik		100.00 %	253.905.500,00			100.00 %	375.080.340,00
15.213	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara rutin/berkala	BPBD	18.00 Unit/Th	21.709.400,00	DAU		18.00 Unit/Th	23.880.340,00
15.222	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	BPBD	1.00 Unit/Th	72.200.700,00	DAU		1.00 Unit/Th	85.000.000,00
15.224	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	BPBD	24.00 Unit/Th	109.995.600,00	DAU		24.00 Unit/Th	266.200.000,00
15.247	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	BPBD	9.00 Unit	49.999.800,00	DAU		9.00 Unit	0,00
155	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur		100.00 %	94.605.200,00			100.00 %	417.082.792,00
1.551	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	Aparatur yang meningkat kualifikasi, kapasitas dan kinerjanya	Luar Daerah	50.00 Org	94.605.200,00	DAU		50.00 Org	417.082.792,00
156	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase capaian kinerja dan keuangan		100.00 %	39.366.000,00			100.00 %	81.141.642,00
1.565	Penyusunan Pelaporan Keuangan	Dokumen pelaporan keuangan	BPBD	18.00 Dok	19.999.300,00	DAU		18.00 Dok	40.000.000,00
1.566	Penyusunan Perencanaan Dan Evaluasi Pelaporan	Dokumen perencanaan dan evaluasi pelaporan	BPBD	6.00 Dok	19.366.700,00	DAU		6.00 Dok	41.141.642,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
157	Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Prosentase Tersedianya Data Dasar Pembangunan		100.00 %	69.329.600,00			100.00 %	333.463.280,00
1.571	Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Dokumen data dasar pembangunan	BPBD	1.00 Dok	69.329.600,00	DAU		1.00 Dok	333.463.280,00
		Penyediaan tenaga kebencanaan	BPBD	12.00 Bulan				12.00 Bulan	
1.5.20	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Daerah	Cakupan kejadian tanggap darurat yang tertangani		100.00 %	2.444.042.500,00			100.00 %	4.891.649.133,00
		Cakupan pemenuhan sarana prasarana pasca bencana		60.00 %				60.00 %	
		Cakupan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana kewilayahan		24.39 %				24.39 %	
		Cakupan wilayah pencegahan bencana		100.00 %				100.00 %	
		Kelompok jejaring kebencanaan		16.00 wilayah				16.00 wilayah	
		Prosentase ketersediaan analisis jenis bencana		100.00 %				100.00 %	
		Tingkat pemberdayaan masyarakat pasca bencana		40.00 %				40.00 %	
15.201	Posko Siaga SAR	Layanan Posko Siaga SAR	Kab. Purworejo	3.00 pos	386.822.000,00	DAU		3.00 pos	432.575.000,00
		Penyediaan tenaga kebencanaan	Kab. Purworejo	12.00 Bulan				12.00 Bulan	
15.202	Pelatihan SAR Penanganan Bencana	Personil SAR Terlatih	Kab. Purworejo	60.00 Org	138.919.400,00	DAU		60.00 Org	112.735.700,00
		Pelatihan Dasar Manajemen Penanggulangan Bencana	Kab. Purworejo	60.00 Org				60.00 Org	
15.203	Penyuluhan Daerah Rawan Bencana	Penyuluhan Daerah Rawan Bencana	Kab. Purworejo	80.00 Desa/Kel	183.240.300,00	DAU		80.00 Desa/Kel	112.735.700,00
		Pembentukan Desa Tangguh Bencana	Kab. Purworejo	10.00 Desa				10.00 Desa	
15.207	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	Pemeliharaan EWS tsunami, EWS banjirdan EWS longsor	Kab. Purworejo	21.00 Unit	100.479.300,00	DAU		21.00 Unit	500.000.000,00
152.010	Kegiatan Tanggap Darurat Bencana	Pendirian posko lapangan dan apel siaga	Kab. Purworejo	12.00 Bulan	408.823.500,00	DAU		12.00 Bulan	1.488.615.573,00
152.012	Tim Kaji Bencana	Dokumen kajian bencana	Kab. Purworejo	1.00 Dok	14.514.800,00	DAU		1.00 Dok	53.146.830,00
152.013	Pengelolaan Logistik Tanggap Darurat Bencana Alam	Pengelolaan logistik	Kab. Purworejo	12.00 Bulan	546.876.700,00	DAU		12.00 Bulan	1.348.918.030,00
152.014	Pusat Pengendalian Operasional Penanggulangan Bencana Alam (Pusdalop- PB)	Penanganan tanggap darurat kebencanaan	Kab. Purworejo	12.00 Bulan	350.000.600,00	DAU		12.00 Bulan	399.300.000,00
		Penyediaan tenaga kebencanaan	Kab. Purworejo	12.00 Bulan				12.00 Bulan	
152.016	Gladi Lapang Penanggulangan Bencana	Gladi personil dan masyarakat	Kab. Purworejo	500.00 Org	158.865.900,00	DAU		500.00 Org	273.786.700,00
		Gladi personil posko Pusdalop	Kab. Purworejo	60.00 Org				60.00 Org	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
152.018	Pemberdayaan Masyarakat Pasca Bencana	Masyarakat korban bencana yang dilatih	Kab. Purworejo	100.00 Org	76.100.000,00	DAU		100.00 Org	73.205.000,00
152.021	Pelatihan Recovery Pasca Bencana	Pelatihan 30 tenaga recovery pasca bencana	Kab. Purworejo	30.00 Org	79.400.000,00	DAU		30.00 Org	96.630.600,00

Nama Perangkat Daerah : DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	TOTAL				6.093.003.036,00				5.344.493.330,00
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar								
21	Tenaga Kerja				3.605.555.036,00				3.653.084.578,00
211	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran		100.00 %	737.232.100,00			100.00 %	803.550.110,00
21.125	Pengelolaan Surat-menyurat dan Kearsipan	Layanan surat menyurat dan kearsipan	Dinperinaker	12.00 Bulan	129.161.800,00	DAU		12.00 Bulan	140.058.380,00
21.126	Penyediaan Layanan Komunikasi, Informasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Layanan komunikasi, informasi, sumber daya air dan listrik	Dinperinaker	12.00 Bulan	72.988.700,00	DAU		12.00 Bulan	80.287.570,00
21.127	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Layanan kebersihan kantor	Dinperinaker	12.00 Bulan	16.470.600,00	DAU		12.00 Bulan	18.117.660,00
21.128	Koordinasi dan Konsultasi Internal dan Eksternal	Layanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Dinperinaker, Dalam Daerah, Luar Daerah	12.00 Bulan	214.015.000,00	DAU		12.00 Bulan	235.416.500,00
21.129	Pengelolaan Keamanan Kantor	Layanan keamanan kantor	Dinperinaker	12.00 Bulan	31.536.000,00	DAU		12.00 Bulan	32.670.000,00
21.130	Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT BLK	Administrasi perkantoran	UPT BLK	12.00 Bulan	273.060.000,00	DAU		12.00 Bulan	297.000.000,00
212	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan sarana prasarana aparatur yang berfungsi dengan baik		100.00 %	814.698.056,00			100.00 %	845.572.250,00
21.222	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	Dinperinaker	1.00 Unit/Th	58.609.200,00	DAU		1.00 Unit/Th	106.000.000,00
21.224	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	Dinperinaker	18.00 Unit/Th	85.562.000,00	DAU		18.00 Unit/Th	191.000.000,00
21.228	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara rutin/berkala	Dinperinaker	86.00 Unit/Th	70.526.856,00	DAU		86.00 Unit/Th	548.572.250,00
21.242	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat	UPT BLK	1.00 unit	600.000.000,00	DBHCHT		1.00 unit	0,00
215	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur		100.00 %	54.396.000,00			100.00 %	277.469.829,00
2.155	Penilaian Angka Kredit Bagi Jabatan Fungsional	Pejabat fungsional yang dinilai angka kreditnya	UPT BLK	27.00 Org	20.736.000,00	DAU		27.00 Org	240.443.829,00
2.156	Peningkatan Kompetensi Instruktur UPT - BLK	Kompetensi Instruktur UPT LLK meningkat	UPT BLK	13.00 Org	33.660.000,00	DAU		13.00 Org	37.026.000,00
216	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase capaian kinerja dan keuangan		100.00 %	127.644.000,00			100.00 %	228.565.861,00
2.165	Penyusunan Pelaporan Keuangan	Laporan Keuangan	Dinperinaker	6.00 Dok	30.865.100,00	DAU		6.00 Dok	100.000.000,00
2.166	Penyusunan Perencanaan Dan Evaluasi Pelaporan	Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan	Dinperinaker	16.00 Dok	96.778.900,00	DAU		16.00 Dok	128.565.861,00
217	Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Prosentase tersedianya data dasar pembangunan		100.00 %	11.215.200,00			100.00 %	125.315.500,00
2.171	Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Dokumen data dasar pembangunan	Dinperinaker	1.00 Dok	11.215.200,00	DAU		1.00 Dok	125.315.500,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.1.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Pencari kerja yang mendapat pelayanan peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja tiap tahun		14.83 %	1.361.147.580,00			14.83 %	480.000.000,00
21.151	Pelatihan Ketrampilan Berbasis Kompetensi	Fasilitasi persiapan magang jepang	Kabupaten Purworejo	16.00 orang	58.581.500,00	DAU		16.00 orang	375.000.000,00
21.153	Monitoring pasca pelatihan	Laporan hasil monitoring pasca pelatihan	Kabupaten Purworejo	1.00 dokumen	20.675.380,00	DAU		1.00 dokumen	40.000.000,00
21.155	Pengadaan Peralatan Pendidikan Dan Pelatihan	Peralatan Pendidikan dan Pelatihan bagi Pencari Kerja	UPT BLK	4.00 unit	1.000.000.000,00	DBHCHT		4.00 unit	0,00
21.156	Pengendalian Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Rekomendasi dan perijinan LPKS	Kabupaten Purworejo	34.00 LPKS	8.675.700,00	DAU		34.00 LPKS	65.000.000,00
211.527	Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Berbasis Masyarakat	Pelatihan Ketrampilan Kejuruan Prosesing	Kabupaten Purworejo	16.00 org	273.215.000,00	DAU		16.00 org	0,00
		Pelatihan ketrampilan kejuruan Garmen		16.00 Org				16.00 Org	
		Pelatihan ketrampilan kejuruan Las		16.00 Org				16.00 Org	
		Pelatihan ketrampilan kejuruan TIK		16.00 Org				16.00 Org	
		Pelatihan Keterampilan Kejuruan Batik		16.00 Org				16.00 Org	
2.1.16	Program Peningkatan Kesempatan kerja	Persentase tenaga kerja yang ditangani tiap tahun		25.23 %	304.222.100,00			25.23 %	628.799.990,00
21.161	Penyusunan dan Penyebarluasan IPK dan Penempatan Tenaga Kerja	Informasi pasar kerja	Kabupaten Purworejo	12.00 Dok	67.089.300,00	DAU		12.00 Dok	200.000.000,00
		Sosialisasi Penempatan Tenaga kerja		100.00 Org				100.00 Org	
21.162	Job Fair	Peluang Kesempatan Kerja	Kabupaten Purworejo	25.00 perusahaan	120.041.900,00	DAU		25.00 perusahaan	300.000.000,00
211.611	Fasilitasi Tenaga kerja Antar Kerja antar daerah	Pengendalian Tenaga Kerja AKAD	Kalimantan Barat	1.00 Lokasi	42.823.000,00	DAU		1.00 Lokasi	47.105.300,00
211.612	Pelatihan Tenaga Kerja melalui Terapan Teknologi Tepat Guna	Perluasan Tenaga Kerja Melalui Terapan Teknologi Tepat Guna (TTG)	Ds Sidomulyo Ds Cengkawakrejo	40.00 orang	74.267.900,00	DAU		40.00 orang	81.694.690,00
2.1.17	Program Pengembangan dan perlindungan Tenaga kerja	Capaian sarana Hubungan Industrial (HI) dan Syarat kerja		43.22 %	195.000.000,00			43.22 %	263.811.038,00
		Capaian Perlindungan dan Kesejahteraan pekerja		65.48 %				65.48 %	
21.171	Fasilitasi Lembaga Kerja Sama Tripartit Kabupaten Purworejo	Hubungan Industrial Tripartit Meningkat	Kabupaten Purworejo	100.00 %	100.000.000,00	DAU		100.00 %	160.000.000,00
21.173	Fasilitasi Dewan Pengupahan Kabupaten Purworejo	Rekomendasi UMK 2021	Kabupaten Purworejo	1.00 Dok	75.000.000,00	DAU		1.00 Dok	78.667.038,00
		Sosialisasi UMK 2021		100.00 orang				100.00 orang	
21.176	Fasilitasi Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial	Layanan Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial	Kabupaten Purworejo	100.00 %	20.000.000,00	DAU		100.00 %	25.144.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	Urusan Pilihan								
37	Perindustrian				2.336.836.000,00				998.800.000,00
3.7.15	Program Pengelolaan Industri Kecil dan Menengah	prosentase industri kecil dan menengah yang dibina sistem pengelolaanya		14.47 %	2.176.836.000,00			14.47 %	554.300.000,00
37.153	Pengawasan dan Pendataan Industri	Data IKM dan IHT	Kabupaten Purworejo	1.00 Dok	65.000.000,00	DBHCHT		1.00 Dok	100.000.000,00
37.123	Pembangunan Gedung Dekranasda	Gedung Dekranasda	Kabupaten Purworejo	1.00 unit	1.620.000.000,00	DAU		1.00 unit	0,00
37.156	Fasilitasi Dekranasda	Fasilitasi Kegiatan Dekranasda	Kabupaten Purworejo	50.00 IKM	366.836.000,00	DAU		50.00 IKM	316.800.000,00
371.527	Penguatan dan Pengembangan Industri Agro	Pelatihan produksi kerajinan bambu	Kabupaten Purworejo	20.00 IKM	65.000.000,00	DAU		20.00 IKM	71.500.000,00
		Pelatihan produksi makanan lokal		40.00 IKM				40.00 IKM	
371.528	Penguatan dan Pengembangan Industri Non Agro	Pelatihan Keterampilan membuat	Kabupaten Purworejo	60.00 IKM	60.000.000,00	DAU		60.00 IKM	66.000.000,00
3.7.16	Program Agribisnis Komoditas Unggulan di sektor Hilir	Jumlah KUB yang dibina		106.00 KUB	160.000.000,00			106.00 KUB	444.500.000,00
37.161	Pelatihan Pembuatan Gula Kelapa Organik	Pelatihan gula kelapa organik	Kabupaten Purworejo	3.00 KUB	65.000.000,00	DAU		3.00 KUB	340.000.000,00
37.166	Pelatihan Industri Komoditas Agro	Pelatihan Pengolahan Durian	Kabupaten Purworejo	4.00 KUB	95.000.000,00	DAU		4.00 KUB	104.500.000,00
38	Transmigrasi				150.612.000,00				692.608.752,00
3.8.15	Program Penyelenggaraan Transmigrasi	Kelancaran Pelaksanaan Transmigrasi		100.00 %	150.612.000,00			100.00 %	692.608.752,00
38.151	Fasilitasi Penempatan Transmigrasi	Layanan transmigrasi I	Kabupaten Purworejo	100.00 %	150.612.000,00	DAU		100.00 %	692.608.752,00

Nama Perangkat Daerah : DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	TOTAL				13.939.609.900,00				15.379.359.436,00
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar								
16	Sosial				2.958.395.400,00				2.850.000.000,00
16.15	Program Penanganan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Cakupan PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) yang dibina		13.82 %	2.881.107.000,00			13.82 %	2.765.000.000,00
		Prosentase PMKS yang mendapatkan penanganan		20.47 %				2.047	
16.158	Fasilitasi dan Penanganan Bekas Warga Lembaga Pemasyarakatan (BWLPP), Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) miskin dan Tuna Susila	Bantuan Stimulan Modal Usaha (Bansos)	Kab. Purworejo	25 orang	101.580.000,00	DAU		25 orang	115.000.000,00
		Bimbingan dan Pembinaan		30 orang				30 orang	
		Pengiriman ke panti		10 orang				10 orang	
16.159	Fasilitasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan	Fasilitasi Pelaksanaan PKH	Kab. Purworejo	35000 KPM	432.510.500,00	DAU		35000 KPM	450.000.000,00
161.510	Pengadaan perlengkapan sekretariat Program Keluarga Harapan dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Pengadaan Sarana Prasarana Sekretariat PKH dan TKSK	Kab. Purworejo	5 unit	329.227.700,00	DAU		5 unit	350.000.000,00
161.511	Fasilitasi Penanganan Korban Bencana	Fasilitasi Kegiatan Penanganan Bencana dari Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	Kab. Purworejo, Semarang	4 kali	138.034.000,00	DAU		4 kali	145.000.000,00
		Pemantapan Tim Psikososial		16.00 Lokasi				16 kec	
		Pemantapan Tagana		50.00 Org				50.00 Org	
		Distribusi Logistik sampai ke sasaran		16.00 Lokasi				16.00 Kecamatan	
161.512	Penanganan pengemis, gelandangan, orang terlantar dan anak terlantar luar panti	Fasilitasi Eks Psikotik	Kab. Purworejo	45.00 Org	100.000.000,00	DAU		45.00 Org	120.000.000,00
		Layanan PGOT		12.00 Bulan				12.00 Bulan	
		Penguatan Keluarga serta Tokoh Masyarakat		50.00 Org				50.00 Org	
		Razia		2.00 Kali				2.00 Kali	
		Terlayannya orang terlantar dan anak terlantar		250.00 Org				250.00 Org	
161.514	Penyediaan Logistik Bagi Anak di UPT Tat Twam Asi	Logistik Penerima Manfaat di UPT Tat Twam Asi	UPT	12.00 Bulan	360.960.900,00	DAU		12.00 Bulan	375.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
161.520	Validasi Sasaran Program Penanganan Fakir Miskin	Verifikasi dan Validasi data Penerima program Penangan Fakir Miskin; validasi data PMKS dan PSKS	Kab. Purworejo	16.00 Kecamatan	290.612.000,00	DAU		16.00 Kecamatan	300.000.000,00
161.521	Penyelenggaraan Rehabilitasi Anak Bermasalah	Pengiriman Anak Bermasalah ke Panti / Balai Rehabilitasi Sosial	Kab. Purworejo	20.00 Org	152.160.000,00	DAU		20.00 Org	170.000.000,00
		Bantuan Sosial bagi Anak Bermasalah		10.00 Paket				10.00 Paket	
161.524	Operasional Rumah Singgah Untuk PMKS	Operasional Rumah Singgah	Cangkrup Kidul	36.00 Bulan	66.224.000,00	DAU		Bulan	75.000.000,00
161.525	Fasilitasi dan Penanganan Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Bantuan Sosial KUBE	Kab. Purworejo	2 kube	371.759.200,00	DAU		2 kube	385.000.000,00
		Bimbingan Lanjut Ketrampilan bagi Disabilitas		30 orang				30 orang	
		Fasilitasi Jaminan Hidup		145 orang				145 orang	
		Penyuluhan lanjut usia		50 orang				50 orang	
		Bantuan Sosial Lanjut Usia Non Potensial		20 orang				20 orang	
		Bantuan Modal stimulan Untuk Usaha (Bansos) bagi Lanjut Usia Potensial		20 orang				20 orang	
		Bantuan alat bantu penyandang disabilitas dan bantuan modal stimulan untuk Usaha Ekonomi Produktif Disabilitas dan Keluarganya		20 orang				20 orang	
		Fasilitasi mengantar dan menjemput penerima manfaat (disabilitas) ke balai rehabilitasi, panti , dan RS		20 orang				20 orang	
161.526	Fasilitasi Pelaksanaan Program Penanganan Fakir Miskin	Fasilitasi dan Pembinaan Penerima Bantuan KUBE	Kab. Purworejo	250 kube	265.000.000,00	DAU		250 kube	0,00
		Fasilitasi dan Pembinaan Penerima Bantuan RS RTLH		100 KK				100 KK	
		Fasilitasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)		54.795 KPM				54.795 KPM	
		Fasilitasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)		125 e warung				125 e warung	
161.527	Fasilitasi Kelembagaan dan Organisasi Sosial	Fasilitasi Penanganan PMKS di Kecamatan	Kab. Purworejo	16 orang	273.038.700,00	DAU		16 orang	280.000.000,00
		Fasilitasi dan pembinaan Panti Sosial, Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Organisasi Sosial		8 panti				8 panti	
		Fasilitasi dan Pembinaan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)		16 kecamatan				16 kecamatan	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Fasilitasi dan Pembinaan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)		494 desa				494 desa	
		Fasilitasi LK3		1 lembaga				1 lembaga	
		Fasilitasi dan Pembinaan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)							
		Fasilitasi Karang Taruna		1 paket				1 paket	
		Fasilitasi Karang Taruna		16 kecamatan				16 kecamatan	
		Fasilitasi Karang Taruna		494 desa				494 desa	
		Fasilitasi Komda Lansia		1 lembaga				1 lembaga	
1.6.16	Program Penghargaan Kepahlawanan	Cakupan Penghargaan keahlawanan		100.00 %	77.288.400,00			100.00 %	85.000.000,00
16.161	Pemberian Tali Asih Keluarga Perintis dan Veteran	Tali Asih nag keluarga Perintis dan Veteran Miskin	Kab. Purworejo	20 orang	19.079.700,00	DAU		20 orang	25.000.000,00
16.162	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP)	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Kab. Purworejo	12 bulan	58.208.700,00	DAU		12 bulan	70.000.000,00
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar								
22	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				1.996.093.500,00				2.299.616.140,00
221	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran		100.00 %	683.861.600,00			100.00 %	700.000.000,00
2.218	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa Kebersihan	Dinsospppa	12.00 Bulan	36.020.000,00	DAU		12.00 Bulan	40.000.000,00
22.125	Pengelolaan Surat-menyurat dan Kearsipan	Layanan surat-menyurat dan kearsipan	Dinsospppa	12.00 Bulan	56.175.100,00	DAU		12.00 Bulan	60.000.000,00
22.126	Penyediaan Layanan Komunikasi, Informasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Layanan komunikasi, informasi, sumber daya air dan listrik	Dinsospppa	12.00 Bulan	69.024.300,00	DAU		12.00 Bulan	75.000.000,00
22.128	Pengelolaan Keamanan Kantor	Layanan Keamanan Kantor	Dinsospppa	12.00 Bulan	32.236.000,00	DAU		12.00 Bulan	35.000.000,00
22.129	Koordinasi dan Konsultasi Internal dan Eksternal	Layanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Dinsospppa	12.00 Bulan	343.481.200,00	DAU		12.00 Bulan	345.000.000,00
22.130	Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Rumah Pelayanan Sosial Tat Twam Asi	Pelayanan Administrasi Perkantoran UPT Tat Twam Asi	UPT tat twam asi	12.00 Bulan	146.925.000,00	DAU		12.00 Bulan	145.000.000,00
222	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		100.00 %	335.096.100,00			100.00 %	342.000.000,00
22.222	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	Dinsospppa	3.00 Unit/Th	69.880.200,00	DAU		1.00 Paket	70.000.000,00
22.224	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	Dinsospppa	159.00 Unit/Th	187.566.000,00	DAU		1.00 Paket	190.000.000,00
22.228	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara rutin/berkala	Dinsospppa	8.00 Unit/Th	71.925.000,00	DAU		1.00 unit	75.000.000,00
22.246	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Dan Prasarana UPT	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Dinsospppa	5.00 Unit/Th	5.724.900,00	DAU		1.00 Paket	7.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
226	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase capaian kinerja dan keuangan		100.00 %	95.060.800,00			100.00 %	130.884.500,00
2.265	Penyusunan Pelaporan Keuangan	Dokumen pelaporan keuangan	Kab. Purworejo	19.00 Dok	42.048.800,00	DAU		19.00 Dok	65.884.500,00
2.266	Penyusunan Perencanaan Dan Evaluasi Pelaporan	Dokumen perencanaan dan evaluasi pelaporan	Kab. Purworejo	12.00 Dok	53.012.000,00	DAU		12.00 Dok	65.000.000,00
227	Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Prosentase tersedianya data dasar pembangunan		100.00 %	18.848.000,00			100.00 %	166.731.640,00
2.271	Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Dokumen data dasar pembangunan	Kab. Purworejo	1.00 Dok	18.848.000,00	DAU		1.00 Dok	166.731.640,00
2.2.15	Program Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Persentase PD Kabupaten yang melaksanakan Program dan Kegiatan Responsif Gender		88%	863.227.000,00			88%	960.000.000,00
		Persentase Anggaran Responsif Gender di PD Kabupaten		40%				40%	
		Persentase Desa yang menerapkan kebijakan responsif gender dalam perencanaan anggaran desa		80%				80%	
		Cakupan ketersediaan tenaga pelayanan pengaduan terlatih, bantuan hukum untuk mendampingi korban dan saksi dan layanan		100%				100%	
		Persentase penanganan tindak kekerasan berbasis gender dan anak		100%				100%	
		Persentase Capaian indikator Kabupaten Purworejo Layak Anak		80.00%				80.00%	
		Persentase pemenuhan perlindungan dan kesejahteraan anak.		85.00%				85.00%	
		Jumlah kelompok perempuan yang dilatih		40 Kel				40 Kel	
22.151	Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG)	Koordinasi PPRG	Kab. Purworejo		62.250.000,00	DAU			70.000.000,00
		Dokumen Data Pilah Gender							
		Pelatihan PUG							
		Penyusunan Dokumen Raperda PUG							
		Sosialisasi bagi Kepala Desa dan Lembaga Desa dalam Penyusunan Anggaran Desa Berspektif Gender							
22.152	Penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak	sosialisasi Stop Bullying	Kab. Purworejo	3 kali/50 orang	171.224.000,00	DAU		3 kali/50 orang	180.000.000,00
		Penyuluhan penanganan kasus		50 orang				50 orang	
		Fasilitasi Lembaga		3 org/12 bulan				3 org/12 bulan	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
22.153	Fasilitasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Pembinaan Pasca Korban	Kab. Purworejo	230 orang	80.612.000,00	DAU		230 orang	90.000.000,00
		Penanganan Pengaduan Korban Kekerasan		65 kasus				65 kasus	
22.154	Penyelenggaraan pemenuhan hak anak	Koordinasi dan Evaluasi Kabupaten Layak Anak	Kab. Purworejo	60 orang	150.000.000,00	DAU		60 orang	175.000.000,00
		Fasilitasi Forum Anak Kabupaten Purworejo (FORKARE)		3 kelompok				3 kelompok	
		Penanganan dan Pemenuhan Hak Anak Bermasalah		65.00 Kasus				65.00 Kasus	
		Penyuluhan Pemenuhan Hak Anak		64 kasus				64 kasus	
22.155	Operasional Taman Cerdas	Hotspot Area	Kab. Purworejo	12.00 Bulan	66.891.000,00	DAU		12.00 Bulan	75.000.000,00
		Kebersihan dan Operasional Pendukung Kegiatan di Taman Cerdas		12 bulan				12 bulan	
		Listrik		2.00 rekening				2.00 rekening	
		Tenaga Operasional		3 orang/12 bulan				3 orang/12 bulan	
22.159	Dukungan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Pelatihan Analisis Sosial	Kab. Purworejo	3.00 Kel	147.000.000,00	DAU		3.00 Kel	160.000.000,00
		Pembekalan Calon dan Keluarga TKI		80 orang				80 orang	
		Seminar dan Lomba PKH		300.00 Org				300.00 Org	
		Koordinasi Pkijatap/Satgas GSIB		40 orang				40 orang	
221.511	Penguatan Kelompok Kerja PUG	Rakor Pokja PUG	Kab. Purworejo	40 orang	9.500.000,00	DAU		40 orang	15.000.000,00
		Focal Point		25 orang				25 orang	
		Tim teknis ARG		10 orang				10 orang	
221.512	Sosialisasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Untuk Desa	Sosialisasi kegiatan PPRG Desa	Kab. Purworejo	500 orang	43.250.000,00	DAU		500 orang	50.000.000,00
221.513	Fasilitasi Pembinaan DWP dan GOW	Pertemuan	Kab. Purworejo	12 kali	132.500.000,00	DAU		12 kali	145.000.000,00
		Rakor,Rapat-rapat,Temu Kader,Lomba,Sosialisasi,Pembinaan, Pelatihan,Monev		4 kali				4 kali	
		Pembinaan dan pelatihan petugas dan kader		420 orang				420 orang	
28	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				8.985.121.000,00				10.229.743.296,00
2.8.15	Program Keluarga Berencana (KB)	Rata-rata jumlah anak per keluarga		1,3 Anak	8.603.509.000,00			1,3 Anak	9.720.850.000,00
		Jumlah kelompok KB pria		52 Kel				52 Kel	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Rasio akseptor KB		10.6 %				10.6 %	
		Cakupan peserta KB aktif		83.00 %				83.00 %	
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmetneed)		7.00 %				7.00 %	
		Persentase remaja yang diberikan penyuluhan KRR		10.5 %				10.5 %	
		Persentase Jumlah peserta KB Mandiri		43.52 %				43.52 %	
281.510	Pelayanan Komunikasi Informasi Edukasi KKB (KIE KKB)	Terlaksananya kegiatan pelayanan KIE KKB	Kab. Purworejo	494.00 Desa	636.412.000,00	DAU		494.00 Desa	650.000.000,00
281.512	Pelayanan Keluarga Berencana	Pemasangan kontrasepsi	Kab. Purworejo	16 kecamatan	264.612.000,00	DAU		16 kecamatan	275.000.000,00
		Pelaksanaan MOP dan MOW		40 akseptor				40 akseptor	
281.513	Dukungan Updating Data Keluarga	Update data keluarga	Kab. Purworejo	1 dokumen	40.000.000,00	DAU		1 dokumen	50.000.000,00
281.514	Pengembangan Kelompok KB Pria	Jumlah kelompok KB pria	Kab. Purworejo	4.00 Kel	11.000.000,00	DAU		4.00 Kel	15.000.000,00
281.515	Monitoring dan Evaluasi Kepesertaan KB	Monitoring dan Evaluasi Hasil Pelayanan KB	Kab. Purworejo	56 kkb/faskes	10.000.000,00	DAU		56 kkb/faskes	15.000.000,00
281.516	Pendayagunaan Penyuluh KB dan Organisasi Masyarakat	Penilaian Angka Kredit PKB	Kab. Purworejo	81 pkb	56.000.000,00	DAU		81 pkb	70.000.000,00
		Penggerakan KB bagi Ormas		50 orang				50 orang	
281.517	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja	Kab. Purworejo	300 orang	100.000.000,00	DAU		300 orang	115.000.000,00
281.518	Monitoring dan Evaluasi Kepesertaan KB Mandiri	Monitoring dan Evaluasi Peserta KB Mandiri	Kab. Purworejo	24 faskes	6.000.000,00	DAU		24 faskes	15.000.000,00
281.518	Pengadaan Sarana Prasarana Klinik Pelayanan KB	Tersedianya Lemari Alat Kontrasepsi	Kab. Purworejo	20 buah	280.000.000,00	DAK		20 buah	280.000.000,00
281.518	Pengadaan Media/Alat Pengolah Data	Tersedianya Media/alat Pengolah Data	Kab. Purworejo	3 Jenis	852.635.000,00	DAK	Kebutuhan: Rp.856.900.000,-	3 Jenis	856.900.000,00
281.518	Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Data Kependudukan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Rumah Kependudukan	Kab. Purworejo	5 Jenis	0,00	DAK	Kebutuhan: Rp.44.100.000,-	5 Jenis	44.100.000,00
281.518	Pengadaan Sarana Kerja PPKDB dan Sub PPKDB (DAK)	Sarana kerja PPKDB dan Sub PPKDB	Kab. Purworejo	247 Set	0,00	DAK	Kebutuhan: Rp.988.000.000,-	247 Set	988.000.000,00
281.518	Bantuan Operasional KB (BOKB) DAK	Operasional Balai Penyuluhan KB dan Pendistribusian Alkon	Kab. Purworejo	16 Balai	6.346.850.000,00	DAK		16 Balai	6.346.850.000,00
2.8.16	Program Peningkatan Kepesertaan Keluarga Berencana bagi Pasangan Usia Subur Miskin	Jumlah Pasangan Usia Subur Miskin yang terlayani KB		2228.00 Akseptor	114.000.000,00			2789.00 Akseptor	188.893.296,00
28.161	Pelayanan Kontrasepsi Keluarga Berencana Bagi Keluarga Miskin	aseptor KB Bagi PUS miskin	Kab. Purworejo	557.00 Org	114.000.000,00	DAU		557.00 Org	188.893.296,00
2.8.17	Program Keluarga Sejahtera	Persentase anggota UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) yang ber KB		83.84 %	267.612.000,00			84.18 %	320.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
28.177	Pengembangan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	Jumlah keluarga yang mendapat layanan UPPKS	Kab. Purworejo	4.153 PUS	100.612.000,00	DAU		4.153 PUS	120.000.000,00
28.178	Pengembangan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) Paripurna	Jumlah Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) yang Paripurna	Kab. Purworejo	135 kelompok	65.000.000,00	DAU		135 kelompok	75.000.000,00
28.179	Pengembangan Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) Paripurna	Jumlah Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) yang Paripurna	Kab. Purworejo	120 kelompok	57.000.000,00	DAU		120 kelompok	65.000.000,00
281.710	Pengembangan Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) Paripurna	Jumlah Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) yang Paripurna	Kab. Purworejo	120 kelompok	45.000.000,00	DAU		120 kelompok	60.000.000,00

Nama Perangkat Daerah : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	TOTAL				9.936.457.400,00				10.710.103.140,00
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar								
13	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				7.071.624.800,00				7.778.787.280,00
1.3.25	Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Prosentase cakupan layanan persampahan		100.00 %	7.071.624.800,00			100.00 %	7.778.787.280,00
		Prosentase sampah yang tertangani		100.00 %				100.00 %	
		Prosentase TPA yang memenuhi kriteria dan dioperasikan secara layak		80.00 %				80.00 %	
13.251	Pengelolaan TPA	Operasional pengelolaan TPA	TPA Jetis, Kabupaten Purworejo	12.00 bulan	2.782.922.000,00	DAU		12.00 bulan	3.061.214.200,00
13.252	Pemeliharaan kendaraan operasional	terlaksananya pemeliharaan kendaraan operasional	Dinas LH	36.00 unit	875.549.700,00	DAU		36.00 unit	963.104.670,00
13.253	Penanganan kebersihan dan pertamanan	Upah PHL	Dinas LH	119.00 Org	2.620.195.100,00	DAU		119.00 Org	2.882.214.610,00
		Pakaian kerja lapangan		7.00 jenis				7.00 jenis	
		Sarana prasarana pertamanan dan kebersihan		27.00 jenis				27.00 jenis	
13.254	Pemindahan TPS dan Pembuatan Taman	Tertatanya TPS	Pangenrejo dan Doplang	2 TPS (lanjutan)	0,00	DAU	Kebutuhan : Rp.100.000.000	2 TPS (lanjutan)	
13.255	Pengelolaan Sampah Serta Sarana Prasarana Pendukung (DAK)	Sarana prasarana persampahan		2.00 unit	792.958.000,00	DAK	Kebutuhan : Rp.1.000.000.000	2.00 unit	872.253.800,00
13.256	Rehab Sedang/Berat Infrastruktur TPA	terlaksananya rehabilitasi infrastruktur TPA	TPA Jetis	308 m2	0,00	DAU	Kebutuhan : Rp.100.000.000	308 m2	0,00
13.257	Pengadaan Tanah TPA	Perluasan tanah TPA	TPA Jetis	4000 m2	0,00	DAU	Kebutuhan : Rp.2.000.000.000	4000 m2	0,00
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar								
25	Lingkungan Hidup				2.864.832.600,00				2.931.315.860,00
251	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran		100.00 %	249.572.000,00			100.00 %	274.529.200,00
25.121	Pengelolaan Keamanan Kantor	Layanan keamanan kantor	Dinas LH	12.00 Bulan	45.648.000,00	DAU		4.00 Org	50.212.800,00
25.122	Koordinasi dan Konsultasi Internal dan Eksternal	Layanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Dinas LH, Dalam Daerah, Luar Daerah	12.00 Bulan	121.684.000,00	DAU		12.00 Bulan	133.852.400,00
25.123	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Layanan kebersihan kantor	Dinas LH	12.00 Bulan	2.200.000,00	DAU		12.00 Bulan	2.420.000,00
25.124	Penyediaan Layanan Komunikasi, Informasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Layanan komunikasi, informasi, sumber daya air dan listrik	Dinas LH	12.00 Bulan	45.500.000,00	DAU		12.00 Bulan	50.050.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
25.125	Pengelolaan Surat-menyurat dan Kearsipan	Layanan surat-menyurat dan kearsipan	Dinas LH	12.00 Bulan	34.540.000,00	DAU		12.00 Bulan	37.994.000,00
252	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Berfungsi Dengan Baik		100.00 %	129.539.200,00			100.00 %	142.493.120,00
2.521	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	Dinas LH	3 unit PC, 5 unit laptop, 3 unit printer, 5 paket CCTV, 5 unit rak arsip	0,00	DAU	Kebutuhan : Rp.500.000.000 (lokasi cctv rencana smart city (taman geger menjangan, TPS, TPA, hanggar, Dinas LH))	3 unit PC, 5 unit laptop, 3 unit printer, 5 paket CCTV, 5 unit rak arsip	0,00
2.522	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	Dinas LH	1.00 Unit/Th	53.305.200,00	DAU		1.00 Unit/Th	58.635.720,00
2.523	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	Dinas LH	18.00 Unit/Th	52.500.000,00	DAU		18.00 Unit/Th	57.750.000,00
2.524	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara rutin/berkala	Dinas LH	28.00 Unit/Th	23.734.000,00	DAU		28.00 Unit/Th	26.107.400,00
2.525	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat	Dinas LH	1 Unit	0,00	DAU	Kebutuhan : Rp.400.000.000	1 Unit	0,00
256	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase capaian kinerja dan keuangan		100.00 %	27.500.000,00			100.00 %	30.250.000,00
2.565	Penyusunan Pelaporan Keuangan	Dokumen pelaporan keuangan	Dinas LH	18.00 Dok	11.000.000,00	DAU		18.00 Dok	12.100.000,00
2.566	Penyusunan Perencanaan Dan Evaluasi Pelaporan	Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan	Dinas LH	7.00 Dok	16.500.000,00	DAU		7.00 Dok	18.150.000,00
257	Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Prosentase tersedianya data dasar pembangunan		100.00 %	24.000.000,00			100.00 %	26.400.000,00
2.571	Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Dokumen data dasar pembangunan	Dinas LH	1.00 Dok	24.000.000,00	DAU		1.00 Dok	26.400.000,00
2.5.15	Program Pengendalian pencemaran lingkungan	Prosentase Terpenuhi baku mutu kualitas air sungai		80.00 %	898.403.000,00			80.00 %	768.243.300,00
		Prosentase terpenuhinya kualitas udara ambient		80.00 %				80.00 %	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
25.151	Pembangunan Biogas	IPAL Biogas	Desa Prigelan Kecamatan Pituruh, Desa Plipir Kecamatan Purworejo, Desa Jogoresan Kecamatan Purwodadi	3.00 unit	250.000.000,00	DBHCHT		3.00 unit	275.000.000,00
25.152	Pemantauan dan pengawasan LH	Jumlah Usaha dan atau Kegiatan Yang Memiliki Ijin Lingkungan yang dilakukan Pengawasan	Kabupaten Purworejo	80.00 industri	108.545.200,00	DAU		80.00 industri	119.399.720,00
		Penanganan pengaduan masyarakat tentang adanya dugaan pencemaran atau kerusakan lingkungan serta penyelesaian sengketa lingkungan		10.00 jenis layanan				10.00 jenis layanan	
		terlaksananya sosialisasi, seleksi dan penilaian proper bagi kegiatan usaha		1.00 industri				1.00 industri	
25.153	Pengadaan alat-alat laboratorium	penunjang alat laboratorium	Dinas LH	1 paket	0	DAK	Kebutuhan : Rp.1.000.000.000	1 paket	
25.154	Pemeriksaan dokumen dan perizinan LH	Jumlah Rekomendasi Dokumen LH dan atau Ijin Lingkungan yang diterbitkan	Kabupaten Purworejo	30.00 izin kegiatan/usaha	80.604.800,00	DAU		30.00 izin kegiatan/usaha	88.665.280,00
25.155	Penyusunan Laporan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Laporan indeks kualitas air, udara dan tutupan vegetasi	Kabupaten Purworejo	5.00 Buku	224.253.000,00	DAU		5.00 Buku	246.678.300,00
		Laporan identifikasi B3 LB3		1.00 Dok				1.00 Dok	
		Laporan kualitas air dan udara serta pengelolaan laboratorium LH		1.00 Dok				1.00 Dok	
25.156	Inventarisasi GRK	Dokumen inventarisasi GRK	Dinas LH	1.00 Dok	35.000.000,00	DAU		1.00 Dok	38.500.000,00
25.157	IPAL Usaha Skala Kecil (Bankeu)	IPAL Usaha Skala Kecil	Kedungkamal Kec. Grabag, Dadirejo Kec.Bagelen	2 unit	0,00	BANPROV	Kebutuhan : Rp.300.000.000	2 unit	0,00
25.158	Penyusunan KLHS	KLHS RDTR Border City	Dinas LH	1.00 Dok	200.000.000,00	DAU	Kebutuhan : Rp.325.000.000	1.00 Dok	220.000.000,00
		KLHS Kawasan Purworejo Kutoarjo		1.00 Dok				1.00 Dok	
2.5.16	Program Pengendalian kerusakan lingkungan	Prosentase tingkat tutupan lahan berupa hutan/vegetasi terhadap luas wilayah		60.00 %	1.193.640.000,00			60.00 %	1.313.004.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
25.161	Pengelolaan kawasan lindung di luar kawasan hutan (Sektoral)	Sosialisasi bagi desa di kawasan lindung di luar kawasan hutan dan hibah tanaman kehutanan	Desa Limbangan Kec. Bener	1 paket	0	APBD Prov	Kebutuhan : Rp.200.000.000 Kegiatan Sektoral	1 paket	0,00
25.162	Menuju Indonesia Hijau	Laporan MIH, aksi lingkungan	Kabupaten Purworejo	1.00 Dok	65.000.000,00	DAU		1.00 Dok	71.500.000,00
25.163	Seleksi calon penerima penghargaan di bidang LH	Calon Penerima penghargaan bidang LH (Kalpataru, Proklam, SDG)	Kabupaten Purworejo	4.00 penghargaan	79.363.000,00	DAU		4.00 penghargaan	87.299.300,00
25.164	Pemeliharaan pertamanan dan sarana kebersihan kota	Pemeliharaan makam, taman dan kebersihan kota	Kabupaten Purworejo	2.00 kota	869.000.000,00	DAU		2.00 kota	955.900.000,00
25.165	Pelatihan fungsi ekologi mangrove (Sektoral)	pelatihan mangrove dan pengadaan bibit mangrove terlaksana	Kabupaten Purworejo	1 paket	0,00	APBD Prov	Kebutuhan : Rp.275.000.000 Bankeu APBD Prov	1 paket	0,00
25.166	Penghijauan di Wilayah Rawan Longsor, Sumber Mata Air, Dan daerah Konservasi	Bibit Tanaman	Kecamatan Kaligesing	5.00 jenis	130.277.000,00	DAU		5.00 jenis	143.304.700,00
25.167	Konservasi Catchment Area dan Sumber Mata Air	konservasi vegetatif dan sipil teknis	Kabupaten Purworejo	2 paket	0,00	DAU	Kebutuhan : Rp.150.000.000	2 paket	0,00
25.168	Pengadaan pohon ayoman dan elemen taman	keindahan kota	Kabupaten Purworejo	3 paket	0,00	DAU	Kebutuhan : Rp.400.000.000	3 paket	0,00
25.169	Penataan kawasan sudagaran kutoarjo	Tertatanya kawasan sudagaran tahap 2	Taman Sudagaran Kutoarjo	1 paket	0,00	DAU	Kebutuhan : Rp.1000.000.000	1 paket	0,00
25.170	Penataan Taman Purworejo DIY	Pembuatan /pemasangan Branding Purworejoo	Desa Dadirejo, Bagelen	1 paket	0,00	DAU	Kebutuhan : Rp.500.000.000	1 paket	0,00
25.171	Pengelolaan Hutan Kota	Meningkatnya fungsi hutan kota	Hutan Argo Putro	1 paket	0,00	DAU	Kebutuhan : Rp.200.000.000	1 paket	0,00
25.172	Penyusunan Raperda tentang Lingkungan Hidup	Raperda	Dinas LH	1.00 Dok	50.000.000,00	DAU	Kebutuhan : Rp.150.000.000	1.00 Dok	55.000.000,00
2.5.17	Program Pengelolaan Persampahan dan limbah	Prosentase Rumah tangga yang menerapkan 3R		30.00 %	342.178.400,00			30.00 %	376.396.240,00
25.171	Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah	tempat sampah terpilah	Dinas LH	28.00 unit	71.178.400,00	DAU		28.00 unit	78.296.240,00
		pengadaan gerobag sampah		7.00 unit				7.00 unit	
25.172	Pembentukan bank sampah	Kelompok bank sampah	Kabupaten Purworejo	80.00 kelompok	115.000.000,00	DAU		80.00 kelompok	126.500.000,00
25.173	Pengadaan kendaraan operasional persampahan dan kebersihan	kendaraan operasional kebersihan	Dinas LH	1 mobil toilet, 1 arm roll	0,00	DAU	Kebutuhan : Rp.1.350.000.000 (mobil toilet 900jt, arm roll 400jt AP 50)	1 mobil toilet, 1 arm roll	0,00
251.725	Sekolah Adiwiyata dan Sarana Adiwiyata	Sekolah berwawasan lingkungan adiwiyata	Kabupaten Purworejo	24.00 sekolah	156.000.000,00	DAU		24.00 sekolah	171.600.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
251.726	Lomba lingkungan	Juara lomba bersih sehat, lomba lingkungan kelurahan bersih dan hijau dan Bank Sampah	Kabupaten Purworejo	1 kegiatan	0	DAU	Kebutuhan : Rp.100.000.000	1 kegiatan	0,00
251.727	Sarana dan Prasarana Kebersihan (Bankeu)	Bank sampah, Bank Sampah induk	Desa Pepe Kecamatan Pituruh, Desa Trirejo Kecamatan Loano	2 paket	0	BANPROV	Kebutuhan : Rp.825.000.000	2 paket	0,00
251.728	Rumah Pengomposan (Bankeu)	Rumah kompos	Desa Tunjungtejo Kecamatan Pituruh, Desa Kaligono Kecamatan Kaligesing	2 paket	0	BANPROV	Kebutuhan : Rp.550.000.000	2 paket	0,00
251.729	Pompa submersible (aerasi air lindi TPA Kabupaten Purworejo) (Bankeu)	Pompa submersible	TPA Jetis	1 paket	0	BANPROV	Kebutuhan : Rp.750.000.000	1 paket	0,00

Nama Perangkat Daerah : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	TOTAL				4.263.329.600,00				6.502.166.200,00
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar								
26	Administrasi Kependudukan dan Cakil				4.263.329.600,00				6.502.166.200,00
261	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran		100.00 %	533.217.900,00			100%	411.400.000,00
26.125	Pengelolaan Surat-menyurat dan Kearsipan	Layanan surat-menyurat dan kearsipan	Kab. Purworejo	12 Bulan	104.412.400,00	DAU		12 bulan	
26.126	Penyediaan Layanan Komunikasi, Informasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Layanan komunikasi, informasi, sumber daya air dan listrik	Disdukcapil	12 Bulan	225.298.000,00	DAU		12 bulan	300.000.000,00
26.127	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Layanan kebersihan kantor	Disdukcapil	12 Bulan	40.163.000,00	DAU		12 bulan	86.400.000,00
26.128	Koordinasi dan Konsultasi Internal dan Eksternal	Layanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Disdukcapil, Dalam Daerah, Luar Daerah	12 Bulan	163.344.500,00	DAU		12 bulan	25.000.000,00
262	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Berfungsi Dengan Baik		100.00 %	435.199.300,00			100.00 %	930.766.200,00
26.222	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	Disdukcapil	4 Unit/Th	31.558.800,00	DAU	Kebutuhan : Rp. 150.766.200,- untuk Luas : 1.137 M2, anggaran yg tersedia hanya dapat memelihara 238 M2	4 Unit/Th	150.766.200,00
26.224	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	Disdukcapil	29 Unit/Th	108.824.000,00	DAU		29 Unit/Th	130.000.000,00
26.247	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Roll O Pack	Disdukcapil	1 unit	205.976.200,00	DAU	Kebutuhan : Rp. 2.669.204.800,- Anggaran tersedia hanya untuk : Roll O Pack 1 unit, Server 1 unit, Printer 19 unit.		500.000.000,00
		Fingerprint		1 unit				1 unit Fingerprint	
		Genset		1 unit				1 unit Genset	
		Printer inkjet		20 unit					
		Server		1 unit					
		Scanner		16 unit				1 unit Scanner	
		Alat Perekam eKTP		16 unit				16 unit Alat Perekam eKTP	
		Alat Pembaca eKTP		16 unit				16 unit Alat Pembaca eKTP	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
26.249	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara rutin/berkala	Disdukcapil	94 Unit/Th	88.840.300,00	DAU		94 Unit/Th	150.000.000,00
26.249	Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai dan Perlengkapannya	Pakaian dinas pegawai dan perlengkapannya yang diadakan	Disdukcapil	72 stel		DAU	Kebutuhan : Rp.45.000.000,-		
26.249	Rehab sedang/berat gedung kantor	Gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat	Disdukcapil	1 unit		DAU	Kebutuhan : Rp.200.000.000,-		
266	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan		100.00 %	91.961.700,00			100.00 %	115.000.000,00
2.665	Penyusunan Pelaporan Keuangan	Dokumen pelaporan keuangan	Disdukcapil	14 Dok	40.000.000,00	DAU		14 dokumen	50.000.000,00
2.666	Penyusunan Perencanaan Dan Evaluasi Pelaporan	Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan	Disdukcapil	25 Dok	51.961.700,00	DAU		25 dokumen	65.000.000,00
2.6.15	Program Pelayanan Administrasi Kependudukan	Prosentase pelayanan adminduk		100.00 %	3.202.950.700,00			100.00 %	5.045.000.000,00
26.151	Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu (DAK)	Laporan penyelenggaraan adminduk	Kab. Purworejo	1 Laporan	1.858.666.000,00	DAK		1 laporan	2.500.000.000,00
26.153	Intensifikasi Pelayanan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan	Dokumen penduduk rentan	Kab. Purworejo	1 Dok	22.479.000,00	DAU		1 dokumen	50.000.000,00
26.157	Pemutakhiran Data Kependudukan	Validasi Biodata Penduduk	Kab. Purworejo, Disdukcapil	8 Desa	254.925.900,00	DAU		8 Desa	580.000.000,00
		Penjilidan		300 Bendel				500 bendel	
		Laminasi		2000 Lembar				3.000 lembar	
		Fumigasi		565 m3				565 M3	
		Termite Control/anti rayap		224 m2				224 M2	
261.513	Fasilitasi Dokumen Kependudukan Lintas Instansi	Perjanjian kerja sama	Kab. Purworejo	100 Instansi	213.927.800,00	DAU		100 instansi	300.000.000,00
		ISO dan sertifikasi		1 dokumen				1 dokumen	
261.547	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	KTP-el	Kab. Purworejo	52.000 Pelayanan	515.590.000,00	DAU		52.000 Pelayanan	1.000.000.000,00
		KK		64.000 Pelayanan				64.000 Pelayanan	
		KIA		30.000 Pelayanan				30.000 Pelayanan	
261.548	Pelayanan Pencatatan Kelahiran	Akta Kelahiran	Kab. Purworejo	14.000 Pelayanan	66.852.000,00	DAU		14.000 Pelayanan	100.000.000,00
261.549	Pelayanan Akta Kematian, Pengangkatan Anak dan Pengesahan Anak	Akta Kematian	Kab. Purworejo	2.500 Pelayanan	35.013.500,00	DAU		2.500 pelayanan	100.000.000,00
		Akta pengangkatan anak, pengesahan anak, perubahan nama		30 pelayanan					
261.550	Pelayanan Pencatatan Perkawinan dan Perceraian	Akta Perkawinan	Kab. Purworejo	80 pelayanan	29.530.000,00	DAU			100.000.000,00
		Akta Perceraian		20 pelayanan					

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
261.551	Pengembangan SIAK	Update aplikasi	Kab. Purworejo	1 Aplikasi	161.625.500,00	DAU		1 aplikasi	265.000.000,00
		Teknisi jaringan		48 org/bulan				48 orang/bulan	
		Upgrading operator SIAK		50 OK				50 OK	
261.553	Penerbitan Surat Keterangan Pindah	Surat Keterangan Pindah	Kab. Purworejo	16.000 pelayanan	44.341.000,00	DAU		16.000 pelayanan	50.000.000,00

Nama Perangkat Daerah : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	TOTAL				5.182.362.250,00				7.823.043.800,00
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar								
27	Pemberdayaan Masyarakat Desa				4.139.617.950,00				5.193.660.200,00
271	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran		100.00 %	333.359.700,00			100.00 %	382.064.500,00
27.125	Pengelolaan Surat-menyurat dan Kearsipan	Layanan surat-menyurat dan kearsipan	Dinpermades	12.00 Bulan	16.588.300,00	DAU		12.00 Bulan	32.000.000,00
27.126	Penyediaan Layanan Komunikasi, Informasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Layanan komunikasi, informasi, sumber daya air dan listrik	Dinpermades	12.00 Bulan	68.347.900,00	DAU		12.00 Bulan	99.825.000,00
27.127	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Layanan kebersihan kantor	Dinpermades	12.00 Bulan	31.960.000,00	DAU		12.00 Bulan	35.000.000,00
27.128	Koordinasi dan Konsultasi Internal dan Eksternal	Layanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Dinpermades, Dalam Daerah, Luar Daerah	12.00 Bulan	192.439.500,00	DAU		12.00 Bulan	192.439.500,00
27.129	Pengelolaan Keamanan Kantor	Layanan keamanan kantor	Dinpermades	12.00 Bulan	24.024.000,00	DAU		12.00 Bulan	22.800.000,00
272	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Berfungsi Dengan Baik		100.00 %	141.481.000,00			100.00 %	442.618.800,00
27.222	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	Dinpermades	1.00 Unit/Th	47.671.000,00	DAU		1.00 Unit/Th	55.000.000,00
27.224	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	Dinpermades	19.00 Unit/Th	62.500.000,00	DAU		19.00 Unit/Th	68.750.000,00
27.228	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara rutin/berkala	Dinpermades	49.00 Unit/Th	31.310.000,00	DAU		49.00 Unit/Th	106.953.000,00
27.242	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat	Dinpermades	2.00 unit	0,00	DAU	Kebutuhan : Rp. 511.000.000,- untuk Rehab Gedung A & C	2.00 unit	98.800.000,00
27.242	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	Dinpermades	9.00 unit	0,00	DAU	Kebutuhan : Rp. 113.115.800,-	9.00 unit	113.115.800,00
276	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase Capaian Kinerja Dan Keuangan		100.00 %	94.633.950,00			100.00 %	133.100.000,00
2.765	Penyusunan Pelaporan Keuangan	Dokumen pelaporan keuangan	Dinpermades	19.00 Dok	36.313.800,00	DAU		19.00 Dok	59.895.000,00
2.766	Penyusunan Perencanaan Dan Evaluasi Pelaporan	Dokumen perencanaan dan evaluasi pelaporan	Dinpermades	15.00 Dok	58.320.150,00	DAU		15.00 Dok	73.205.000,00
277	Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Prosentase Tersedianyan Data Dasar Pembangunan		100.00 %	17.663.200,00			100.00 %	26.620.000,00
2.771	Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Dokumen data dasar pembangunan	Dinpermades	1.00 Dok	17.663.200,00	DAU		1.00 Dok	26.620.000,00
2.7.15	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase LPMD/K dan KPMD yang berperan aktif dalam pembangunan desa		100.00 %	3.397.026.000,00			100.00 %	3.854.400.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Jumlah Kelompok Simpan Pinjam		3145.00 Kel				3295.00 Kel	
		Kelompok Perempuan yang aktif							
		Persentase PKK aktif di desa / kelurahan		100.00 %				100.00 %	
		Jumlah UEP yang aktif		141.00 Kel				141.00 Kel	
		Jumlah BUMDES		355.00 BUMDES				469.00 BUMDES	
		Persentase pasar desa yang aktif		95.00 %				100.00 %	
		Persentase UEP-SP-LPM yang aktif (Usaha Ekonomi Produktif-Simpan Pinjam-Lumbung Pangan Masyarakat)		100.00 %				100.00 %	
		Persentase posyandu aktif		100.00 %				100.00 %	
271.51	Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM)	Pelaksanaan BBGRM (Upacara),	Kab. Purworejo	1.00 kali	26.490.000,00	DAU		1.00 kali	150.000.000,00
		Pelaksanaan gotong royong masyarakat,		53.00 desa				53.00 desa	
		Monev		1.00 Kali				1.00 Kali	
271.57	Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Jateng	- Sosialisasi , verifikasi, monev	Kab. Purworejo	469.00 Desa	35.326.300,00	DAU		469.00 Desa	121.000.000,00
271.512	Dukungan keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat	Pendampingan dan e monev dana bergulir/aset, Rakor tingkat Kabupaten/Propinsi/ Nasional, Workshop, rakor bagi pengurus BKAD, dan monev	Kab. Purworejo	12.00 kali	53.601.600,00	DAU		12.00 kali	60.000.000,00
271.513	Pelatihan Pengembangan potensi lokal bagi Kel.Binaan P2MBG	Pembinaan P2MBG dilokasi binaan Tahun 2020	Kab. Purworejo	50.00 orang	52.773.100,00	DAU		50.00 orang	0,00
271.515	Fasilitasi Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Rakor,Rapat-rapat,Temu Kader,Lomba,Sosialisasi,Pembinaan, Pelatihan,Monev	Kab. Purworejo	47.00 Desa/kel	341.418.600,00	DAU		47.00 Desa/kel	550.000.000,00
271.516	Penerapan Teknologi Tepat Guna(TTG) berbasis Pemberdayaan Masyarakat	Pembinaan Posyantek antar Desa di 16 Kec, Posyantek Desa 32 Desa, Gelar TTG tingkat nasional	Kab. Purworejo	3.00 Dokumen	70.653.000,00	DAU		3.00 Dokumen	300.000.000,00
271.520	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Badan Pengelola Sarana Prasarana Air Minum dan sanitasi (BP-SPAMS)	Monev BP-SPAMS,	Kab. Purworejo	60.00 BP-SPAMS	42.296.600,00	DAU		60.00 BP-SPAMS	75.000.000,00
271.521	Pembinaan dan Monev BUMDesa	Pembinaan unit usaha BUM Desa;	Kab. Purworejo	150.00 orang	35.326.300,00	DAU		161.00 orang	100.000.000,00
		Monev		129.00 Desa				150.00 Desa	
271.524	Dukungan Penguatan Kelembagaan Posyandu	Bintek Pokjandal Posyandu, monev	Kab. Purworejo	80.00 pokjandal	35.938.200,00	DAU		331.00 pokjandal	100.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
271.545	Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan	Lomba desa tk.Kecamatan,Kabupaten dan Pengiriman Pemenang Lomba Desa/Kelurahan Ke Provinsi; Pelatihan tugas pokok Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kab. Purworejo	2.00 Dokumen	80.081.700,00	DAU		2.00 Dokumen	250.000.000,00
271.546	Dukungan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)	Tersedianya bahan material untuk pelaksanaan TMMD	Kab. Purworejo	3.00 Desa	1.773.400.000,00	DAU		3.00 Desa	1.973.400.000,00
271.547	TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) / Bankeu	Pelaksanaan TMMD (Bankeu)	Kab. Purworejo	3.00 Desa	795.000.000,00	BANPROV		3.00 Desa	
271.548	Koordinasi profil desa,dan evaluasi peningkatan status desa	Bintek profil desa/kelurahan, Monitoring dan Evaluasi profil desa, dan Pemutahiran Data Status Desa	Kab. Purworejo	494.00 Desa/Kelurahan	44.770.000,00	DAU		494.00 Desa/Kelurahan	150.000.000,00
271.551	Verifikasi dan Monev Bantuan Modal UED- SP, Lumbung Pangan Masyarakat dan Pasar Desa	Monev lumbung pangan desa, dan pasar desa aktif	Kab. Purworejo	2.00 Dokumen	9.950.600,00	DAU		2.00 Dokumen	25.000.000,00
2.7.16	Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin	Persentase Rumah Tangga Miskin mendapatkan pemberdayaan ekonomi produktif terpadu		36,03%	67.138.900,00			45,15%	180.000.000,00
		Prosentase desa yang sudah mengakomodir kebutuhan masyarakat miskin		80,00%				100,00%	
27.166	Monev Pemberdayaan Masyarakat Miskin dan Pemetaan Potensi	Monev propendakin	Kab. Purworejo	16.00 Kecamatan	67.138.900,00	DAU		16.00 Kecamatan	180.000.000,00
		Pemetaan potensi masyarakat miskin		16.00 Kelompok				16.00 kelompok	
		Bintek tinangkis		53.00 Desa Miskin				53.00 Desa Miskin	
2.7.17	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah unit usaha BUMDes Bersama		16 BUMDesa Bersama	88.315.200,00			16 BUMDesa Bersama	174.856.900,00
		Prosentase BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) aktif		100,00%				100,00%	
27.171	Pembentukan Kawasan Perdesaan	Terbentuknya Kawasan Perdesaan, dan fasilitasi pelaksanaan KKN mahasiswa di kab. Purworejo	Kab. Purworejo	2 Dokumen	88.315.200,00	DAU		2 Dokumen	174.856.900,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang								
41	Administrasi Pemerintahan				1.042.744.300,00				2.629.383.600,00
4.1.18	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan	Prosentase Penyelesaian layanan administrasi pemerintah daerah		100.00 %	1.042.744.300,00			100.00 %	2.629.383.600,00
4.1.18.11	Fasilitasi Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	Bintek Lembaga Kemasyarakatan Desa	Kab. Purworejo	100.00 LKD	132.474.200,00	DAU		100.00 LKD	471.933.600,00
		Pelatihan SID		50.00 Aparat Desa				50.00 Aparat Desa	
		Monev dan pengiriman peserta pelatihan		25.00 Desa				25.00 Desa	
		Pelatihan pengelolaan administrasi pemerintahan desa		100.00 aparat desa				100.00 aparat desa	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.1.18.11 2	Pengembangan Sistem Informasi Desa (SID)	Bintek SID, Tersedianya Aplikasi Integrasi Data, Monev	Kab. Purworejo	100 desa	0,00	DAU	Kebutuhan: Rp.208.584.500,-	100 desa	
4.1.18.11 3	Bupati Saba Desa	Jumlah kunjungan Bupati ke desa	Kab. Purworejo	6.00 Kali	380.372.300,00	DAU		10.00 kali	659.450.000,00
4.1.18.11 4	Fasilitasi Penyelenggaraan Bidang Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa Serentak, penyusunan produk hukum tentang desa, pembekalan perangkat desa baru, Rakor Kepala Desa	Kab. Purworejo	4.00 dokumen	309.106.900,00	DAU		4.00 dokumen	650.000.000,00
4.1.18.11 5	Fasilitasi Pengelolaan Kekayaan Desa	Monev.aset desa	Kab. Purworejo	469.00 Desa	44.158.000,00	DAU		469.00 Desa	148.000.000,00
4.1.18.11 6	Pendampingan Pengelolaan Dana Transfer Desa	Fasilitasi pengelolaan dana desa,ADD dan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah.	Kab. Purworejo	469.00 desa	88.316.600,00	DAU		469.00 desa	350.000.000,00
4.1.18.11 7	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa berbasis aplikasi, monitoring pelaksanaan Musrenbangdes	Kab. Purworejo	469.00 Desa	88.316.300,00	DAU		469.00 Desa	350.000.000,00

Nama Perangkat Daerah : DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	TOTAL				13.114.891.700,00				44.386.304.200,00
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar								
29	Perhubungan				13.114.891.700,00				44.386.304.200,00
291	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran		100.00 %	388.588.700,00			100.00 %	439.418.000,00
29.125	Pengelolaan Surat-menyurat dan Kearsipan	Layanan surat-menyurat dan kearsipan	Dinhub	12.00 Bulan	52.400.700,00	DAU		12.00 Bulan	56.968.000,00
29.126	Penyediaan Layanan Komunikasi, Informasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Layanan komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinhub	12.00 Bulan	97.050.000,00	DAU		12.00 Bulan	103.000.000,00
29.127	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Layanan kebersihan kantor	Dinhub	12.00 Bulan	11.200.000,00	DAU		12.00 Bulan	12.000.000,00
29.128	Koordinasi dan Konsultasi Internal dan Eksternal	Layanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Dinhub, Dalam Daerah, Luar Daerah	12.00 Bulan	193.702.000,00	DAU		12.00 Bulan	235.050.000,00
29.129	Pengelolaan Keamanan Kantor	Layanan keamanan kantor	Dinhub	12.00 Bulan	34.236.000,00	DAU		12.00 Bulan	32.400.000,00
292	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan sarana prasarana aparatur yang berfungsi dengan baik		100.00 %	194.778.000,00			100.00 %	439.950.000,00
29.222	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	Dinhub	1.00 Unit/Th	65.250.000,00	DAU		1.00 Unit/Th	298.350.000,00
29.224	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	Dinhub	19.00 Unit/Th	87.100.000,00	DAU		19.00 unit	91.600.000,00
29.228	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara rutin/berkala	Dinhub	76.00 Unit/Th	42.428.000,00	DAU		76.00 unit	50.000.000,00
295	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100.00 %	47.640.000,00			100.00 %	78.650.000,00
2.951	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	Aparatur yang meningkat kualifikasi, kapasitas dan kinerjanya	Dalam Daerah, Luar Daerah	15.00 Org	47.640.000,00	DAU		15.00 Org	78.650.000,00
296	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan		100.00 %	88.320.800,00			100.00 %	95.000.000,00
2.965	Penyusunan Pelaporan Keuangan	Dokumen pelaporan keuangan	Dinhub	14.00 Dok	35.612.000,00	DAU		14.00 Dok	40.000.000,00
2.966	Penyusunan Perencanaan Dan Evaluasi Pelaporan	Dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan	Dinhub	14.00 Dok	52.708.800,00	DAU		15.00 Dok	55.000.000,00
297	Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Prosentase Ketersediaan Data Dasar Pembangunan		100.00 %	3.500.000,00			100.00 %	5.000.000,00
2.971	Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Data Dasar Pembangunan	Dinhub	1.00 Dok	3.500.000,00	DAU		1.00 Dok	5.000.000,00
2.9.15	Program Pengelolaan Transportasi Darat	Cakupan Ketersediaan Rambu Jalan		90.00 %	12.392.064.200,00			100.00 %	43.328.286.200,00
		Cakupan Ketersediaan Alat Pengaman Jalan		80.00 %				100.00 %	
		Cakupan Ketersediaan Marka Jalan		68.00 %				100.00 %	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Cakupan Ketersediaan APILL		92.00 %				100.00 %	
		Persentase tersedianya halte yang layak fungsi pada setiap prasarana kabupaten yang telah dilayani angkutan umum		100.00 %				100.00 %	
		Persentase kendaraan operasional perhubungan yang layak fungsi		100.00 %				100.00 %	
		Persentase titik parkir yang terlayani		100.00 %				100.00 %	
		Persentase tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten		75.00 %				75.00 %	
		Persentase Rasio Ijin Trayek		100.00 %				100.00 %	
		Persentase kendaraan umum laik jalan		100.00 %				100.00 %	
		Persentase tersedianya unit pengujian kendaraan wajib uji yang layak fungsi		100.00 %				100.00 %	
		Persentase terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum		100.00 %				100.00 %	
		Persentase terpenuhinya standar keselamatan pada perlintasan sebidang		100.00 %				100.00 %	
29.151	Pengadaan Rambu Lalu Lintas	Rambu jalan	Kab. Purworejo	203.00 Buah	457.320.000,00	DAU		175.00 Buah	500.000.000,00
29.152	Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas	Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas	Kab. Purworejo	12.00 Bulan	30.000.000,00	DAU		12.00 Bulan	32.000.000,00
291.511	Pemeliharaan LPJU	Pemeliharaan LPJU	Kab. Purworejo	12.00 Bulan	5.440.557.000,00	DAU		12.00 Bulan	6.000.000.000,00
291.527	Pengelolaan Perparkiran	Layanan perparkiran	Dinhub	12.00 Bulan	1.735.112.000,00	DAU		12.00 Bulan	1.907.950.000,00
291.530	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perparkiran	Papan Informasi Parkir	Kab. Purworejo	15.00 Buah	36.425.000,00	DAU		0.00 Buah	150.000.000,00
		Marka Parkir		490.00 Meter				3500.00 meter	
291.536	Pelayanan Perijinan Angkutan Umum	Pelayanan Perijinan Angkutan Umum	Dinhub	12.00 Bulan	66.214.000,00	DAU		12.00 Bulan	72.162.200,00
291.537	Pelayanan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Darat	Operasional pengujian kendaraan	Dinhub	12.00 Bulan	279.485.500,00	DAU		12.00 Bulan	300.000.000,00
291.544	Fasilitasi Sewa Bus	Layanan sewa bus (kepentingan publik)	DKI, Jawa Tengah	4.00 Bus	83.000.000,00	DAU		7.00 bus	91.300.000,00
291.553	Layanan Terminal	Layanan Terminal	Dinhub	12.00 Bulan	224.130.000,00	DAU		12.00 Bulan	250.000.000,00
291.555	Pembangunan Terminal Tipe C	Terminal tipe C	Kab. Purworejo	1.00 Lokasi	1.000.000.000,00	DAU		0.00 Lokasi	0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
291.557	Pemeliharaan Terminal tipe C	Pemeliharaan Terminal tipe C	Terminal Kongsi dan Nonbis Kta	2.00 Lokasi	50.000.000,00	DAU		3.00 Lokasi	100.000.000,00
291.566	Pengadaan APILL	APILL	Kab. Purworejo	7.00 Unit	0,00	DAU		1 Lokasi	500.000.000,00
291.567	Pemeliharaan APILL	APILL yang dipelihara	Kab. Purworejo	12.00 Bulan	268.947.800,00	DAU		12.00 Bulan	300.000.000,00
291.568	Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Lalu Lintas dan Perlengkapan Jalan	Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Perlengkapan Jalan	Dinhub	12.00 Bulan	163.409.000,00	DAU		12.00 Bulan	210.000.000,00
291.571	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan Kelengkapannya	Lampu Penerangan Jalan Umum dan Kelengkapannya	Kab. Purworejo	48.00 Unit	1.400.614.300,00	DAU	Kebutuhan : Rp.2.300.000.000,- untuk 100 Titik	91.00 Unit	3.500.000.000,00
291.572	Pengecatan Marka Jalan	Marka jalan	Kab. Purworejo	15.00 Ruas Jalan	344.818.000,00	DAU		4000 Meter	224.706.000,00
291.573	Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum	Layanan angkutan umum yang meningkat	Dinhub	12.00 Bulan	58.800.000,00	DAU		12.00 Bulan	64.680.000,00
291.574	Pengawasan Bengkel	Dokumen klasifikasi bengkel	Kab. Purworejo	1.00 Dok	13.875.000,00	DAU		1.00 Dok	22.500.000,00
291.575	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor	Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor yang dipelihara	Dinhub	11.00 Unit	63.072.700,00	DAU		11.00 Unit	70.000.000,00
291.576	Posko Lebaran Natal dan Tahun Baru	Posko lebaran, natal dan tahun baru	Kab. Purworejo	2.00 Lokasi	42.000.000,00	DAU		2.00 Lokasi	46.200.000,00
291.577	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Keselamatan Berjalan Lintas	Meningkatnya Ketertiban dan Keselamatan Berjalan Lintas	Kab. Purworejo	12.00 Bulan	321.015.550,00	DAU		12.00 Bulan	431.330.000,00
291.578	Pengelolaan Keselamatan Lalu Lintas pada Perlintasan Sebidang	Layanan Keselamatan Lalu Lintas pada Perlintasan Sebidang	Kab. Purworejo	12.00 Bulan	313.268.350,00	DAU		12.00 Bulan	330.458.000,00
291.578	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (Bankeu)	Lampu Penerangan Jalan Umum dan Kelengkapannya	Kab. Purworejo	1160 Unit	0,00	BANPROV	Kebutuhan : Rp.30.682.000.000,-	500 Unit	13.225.000.000,00
291.579	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan (DAK)	Alat penerangan jalan umum	Kab. Purworejo	460.00 Unit	0,00	DAK	Kebutuhan : Rp.15.247.232.000,-	300.00 Unit	15.000.000.000,00
		Pagar pengaman jalan		220.00 Meter				160.00 Meter	
		Alat pemberi isyarat lalu lintas		6.00 Unit				7.00 Unit	
		Marka jalan		7000.00 Meter				3000.00 Meter	
		Rambu lalu lintas		161.00 Buah				100.00 Buah	
		Cermin tikungan		20.00 Buah				10.00 Buah	
		Deliniator		150.00 Buah				150.00 Buah	
		Zona Selamat Sekolah		2.00 Lokasi				2.00 Lokasi	

Nama Perangkat Daerah : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
TOTAL					5.302.664.444,00			6.388.746.716,00	
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar								
210	Komunikasi dan Informatika				4.983.979.444,00			5.999.774.380,00	
2.101	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase cukupan layanan administrasi perkantoran		100.00 %	271.770.900,00			100.00 %	387.256.112,00
210.125	Pengelolaan Surat-menyurat dan Kearsipan	Layanan surat-menyurat dan kearsipan	Dinkominfo	12.00 Bulan	63.690.700,00	DAU		12 bulan	75.694.440,00
210.126	Penyediaan Layanan Komunikasi, Informasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Layanan komunikasi, informasi, sumber daya air dan listrik	Dinkominfo	12.00 Bulan	19.219.200,00	DAU		12 bulan	23.063.040,00
210.127	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Layanan kebersihan kantor	Dinkominfo	12.00 Bulan	32.150.000,00	DAU		12 bulan	37.111.200,00
210.128	Koordinasi dan Konsultasi Internal dan Eksternal	Layanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Dinkominfo, Dalam Daerah, Luar Daerah	12.00 Bulan	156.711.000,00	DAU		12 bulan	251.387.432,00
2.102	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		0.00 %	180.419.944,00			100.00 %	179.807.944,00
21.027	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	Dinkominfo	2.00 unit	0,00	DAU		0.00 unit	0,00
210.224	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Dinkominfo	9.00 Unit/Th	80.612.000,00	DAU		9.00 Unit/Th	80.000.000,00
210.249	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara rutin/berkala	Dinkominfo	274 Unit/Th	99.807.944,00	DAU		274 Unit/Th	99.807.944,00
2.105	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		100.00 %	74.980.000,00			100.00 %	74.980.000,00
21.051	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	Aparatur yang meningkat kualifikasi, kapasitas dan kinerjanya	Dinkominfo, Dalam Daerah, Luar Daerah	20.00 Org	74.980.000,00	DAU		20 orang	74.980.000,00
2.106	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase capaian realisasi fisik dan keuangan terkendali		100.00 %	91.836.000,00			100.00 %	90.000.000,00
21.065	Penyusunan Pelaporan Keuangan	Dokumen pelaporan keuangan	Dinkominfo	14.00 Dok	11.200.000,00	DAU		14 dok	40.000.000,00
21.066	Penyusunan Perencanaan Dan Evaluasi Pelaporan	Dokumen perencanaan dan evaluasi pelaporan	Dinkominfo	38.00 Dok	80.636.000,00	DAU		38 dok	50.000.000,00
2.107	Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Prosentase Ketersediaan Data Dasar Pembangunan		100.00 %	20.000.000,00			100.00 %	20.000.000,00
21.071	Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Data dasar pembangunan	Dinkominfo	1.00 Dok	20.000.000,00	DAU		1.00 Dok	20.000.000,00
2.108	Program Pelayanan Komunikasi Publik	Wahana komunikasi publik		100.00 %	581.732.900,00			100.00 %	600.000.000,00
21.081	Forum Komunikasi Critical Voice Point	Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Pemerintah Daerah	Kabupaten Purworejo	12.00 Dok	581.732.900,00	DAU		12 dok	600.000.000,00
2.10.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Cakupan layanan Teknologi Informasi		100.00 %	3.763.239.700,00			100.00 %	4.647.730.324,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan kelompok Informasi		10.000				10.000	
		Prosentase data dan informasi pemerintah yang dipublikasikan		10.000				8.000	
		Prosentase PD yang memiliki jaringan berbasis LAN		10.000				9.600	
210.152	Pengembangan Smart City	Layanan sistem data elektronik berupa langganan dan pemeliharaan jaringan, hosting	Kabupaten Purworejo	400 mbps, 12 bln	3.076.946.200,00	DAU	Kebutuhan : Rp 5.964.277.800,-	400 mbps	3.719.392.324,00
		Sarana dan prasarana pendukung Smart City		1.00 Paket				1 paket	
		Bandwith desa (Smart Kampung)		500 mbps				500 mbps	
		Sewa Comand Center		1 unit				1 unit	
		Jaringan FO obyek strategis daerah		2 titik				2 titik	
210.153	Optimalisasi Pelaksanaan e_Government	Kapasitas Pelaksanaan E Government meningkat	Kabupaten Purworejo	42 OPD	420.620.800,00	DAU		42 OPD	275.000.000,00
		Tim E government Kabupaten Purworejo		50 orang				50 orang	
		Tenaga Ahli E government		11 orang				11 orang	
		JFT Pranata Komputer		72 orang				72 orang	
210.155	Diseminasi Kelompok Informasi Masyarakat	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi	Kabupaten Purworejo	5 kelompok, 16 kecamatan	109.412.500,00	DAU		5 kelompok, 16 kecamatan	200.000.000,00
		Pembinaan warnet		1 kali				1 kali	
210.158	Penyebarluasan Informasi Kepada Masyarakat	Peningkatan publikasi dan informasi	Kabupaten Purworejo	12 bulan	90.072.200,00	DAU		12 bulan	115.000.000,00
		PPID pembantu		42 OPD				42 OPD	
2.10.15.10	Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi	Data, informasi dan rekomendasi hasil pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi	Kabupaten Purworejo	170 titik	66.188.000,00	DAU		170 titik	338.338.000,00
214	Statistik				260.000.000,00				340.000.000,00
2.14.15	Program Penyusunan Statistik	Prosentase ketersediaan statistik dasar dan sektoral		100.00 %	260.000.000,00			100.00 %	340.000.000,00
214.151	Penyusunan Statistik Sektoral Kabupaten Purworejo	Kompilasi statistik sektoral 26 urusan	Kabupaten Purworejo	26 urusan	200.000.000,00	DAU		26 urusan	280.000.000,00
		Kondisi makro ekonomi daerah (PDRB, Inflasi Pendanaan pembangunan)		3 hal				3 hal	
		Kondisi sosial daerah (IPM, kemiskinan, kesenjangan sosial)		3 hal				3 hal	
		Kapasitas pengelolaan statistik (Tim Satu Data Kabupaten)		60 orang				60orang	
2.14.15.13	Survey Strategik Tematik	Area blank spot telekomunikasi	Kabupaten Purworejo	1 dokumen	60.000.000,00	DAU		1 dokumen	60.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
215	Persandian				58.685.000,00				48.972.336,00
2.15.15	Program Penyelenggaraan Persandian	Jasa Persandian/ Pengelolaan Persandian		100%	58.685.000,00			100.00 %	48.972.336,00
215.151	Pelayanan dan Penyediaan Jasa Persandian	Pengelolaan persandian	Kabupaten Purworejo	12 bulan	58.685.000,00	DAU		12 bulan	48.972.336,00

Nama Perangkat Daerah : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	TOTAL				1.509.010.300,00				2.084.328.143,00
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar								
212	Penanaman Modal				1.489.996.000,00				2.063.412.143,00
2.121	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran		100.00 %	250.547.400,00			100.00 %	275.604.100,00
212.125	Pengelolaan Surat-menyurat dan Kearsipan	Layanan surat-menyurat dan kearsipan	DINPMPTSP	12.00 Bulan	35.469.200,00	DAU		12.00 Bulan	39.017.000,00
212.126	Penyediaan Layanan Komunikasi, Informasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Layanan komunikasi, informasi, sumber daya air dan listrik	DINPMPTSP	12.00 Bulan	50.734.000,00	DAU		12.00 Bulan	55.808.000,00
212.127	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Layanan kebersihan kantor	DINPMPTSP	12.00 Bulan	4.097.800,00	DAU		12.00 Bulan	4.508.000,00
212.128	Koordinasi dan Konsultasi Internal dan Eksternal	Layanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	DINPMPTSP, Dalam Daerah, Luar Daerah	12.00 Bulan	160.246.400,00	DAU		12.00 Bulan	176.271.100,00
2.122	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Berfungsi Dengan Baik		100.00 %	173.086.700,00			100.00 %	615.779.043,00
21.229	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	DINPMPTSP	6.00 unit	68.760.700,00	DAU		12.00 unit	491.693.243,00
212.222	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	DINPMPTSP	1.00 Unit/Th	27.846.000,00	DAU		1.00 Unit/Th	30.631.000,00
212.224	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	DINPMPTSP	8.00 Unit/Th	48.912.000,00	DAU		8.00 Unit/Th	63.130.000,00
212.228	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara rutin/berkala	DINPMPTSP	9.00 Unit/Th	27.568.000,00	DAU		10.00 Unit/Th	30.324.800,00
2.125	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur		100.00 %	36.312.000,00			100.00 %	39.945.000,00
21.256	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	Aparatur yang meningkat kualifikasi, kapasitas dan kinerjanya	Jateng dan Luar Jateng	10.00 Org	36.312.000,00	DAU		12.00 Org	39.945.000,00
2.126	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase Capaian Kinerja Dan Keuangan		100.00 %	21.470.000,00			100.00 %	29.800.000,00
21.265	Penyusunan Pelaporan Keuangan	Dokumen pelaporan keuangan	DINPMPTSP	19.00 Dok	3.216.000,00	DAU		19.00 Dok	9.000.000,00
21.266	Penyusunan Perencanaan Dan Evaluasi Pelaporan	Dokumen perencanaan dan evaluasi pelaporan	DINPMPTSP	10.00 Dok	18.254.000,00	DAU		10.00 Dok	20.800.000,00
2.127	Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Prosentase tersedianya data dasar pembangunan		100.00 %	7.500.000,00			100.00 %	8.500.000,00
21.271	Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Dokumen data dasar pembangunan	DINPMPTSP	1.00 Dok	7.500.000,00	DAU		1.00 Dok	8.500.000,00
2.12.15	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	Persentase Jumlah Perizinan yang Dilayani		100.00 %	589.111.700,00			100.00 %	641.964.000,00
212.151	Pelayanan Perizinan	Cetak Blangko Perizinan	Kabupaten Purworejo	4650 Lbr	317.378.700,00	DAU		4650 Lbr	347.097.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Peninjauan Lokasi Perizinan		72 Kali				72 Kali	
		Pakaian Dinas Khusus DINPMPTSP		0 Stel				0 Stel	
		Pembuatan Stiker Tanda Izin		8500 Lbr				8500 Lbr	
		Rakor Tim		10 Kali				10 Kali	
		Jasa Perseorangan		3.00 Org				3.00 Org	
212.154	Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi SIM Perizinan	Pemeliharaan Aplikasi SIM Perizinan	Kabupaten Purworejo	12.00 Bulan	122.167.600,00	DAU		12.00 Bulan	132.365.000,00
		Jasa Perorangan Staf Operator SIM Perizinan		24.00 OB				24.00 OB	
		Jasa Perorangan Staf Pengolahan Data Perizinan		12.00 OB				12.00 OB	
		Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)		1.00 kali				1.00 kali	
212.155	Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Perizinan	Data Informasi dan Rekomendasi hasil money	Kabupaten Purworejo	1.00 Dok	133.996.000,00	DAU		1.00 Dok	145.376.000,00
		Jasa Perseorangan		3.00 Org				3.00 Org	
		Focus Group Discussion		1.00 Kali				1.00 Kali	
		Pemutihan IMB		1.00 Kecamatan				1.00 Kecamatan	
212.156	Pengkajian dan Penyusunan Regulasi Penanaman Modal dan Perizinan	Perubahan dan Penyusunan Regulasi PM / Perizinan	Kabupaten Purworejo	2.00 Dok	15.569.400,00	DAU		2.00 Dok	17.126.000,00
2.12.16	Program Peningkatan Promosi investasi	Persentase Peningkatan nilai investasi		2.00 %	411.968.200,00			2.00 %	451.820.000,00
212.161	Pengembangan Penanaman Modal	Koordinasi Penanaman Modal	Kabupaten Purworejo	12.00 Bulan	119.403.200,00	DAU		12.00 Bulan	131.344.000,00
		Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal		12.00 Bulan				12.00 Bulan	
		Laporan Kegiatan Wasdal (Monitoring LKPM)		1.00 Dok				1.00 Dok	
		Kegiatan Satgas Berusaha		12.00 Bulan				12.00 Bulan	
		Forum Pengembangan Penanaman Modal (Business Forum)		1.00 Kali				1.00 Kali	
212.163	Promosi dan Kerjasama Investasi	Pelaksanaan Promosi CJIBF	Jawa dan Luar Jawa	1.00 kali	292.565.000,00	DAU		1.00 kali	320.476.000,00
		Pelaksanaan Pameran di Luar Jawa		1.00 kali				1.00 kali	
		Mengikuti Pameran Purworejo Expo		1.00 kali				1.00 kali	
		Mengikuti kegiatan yang mendukung pameran dan kerjasama investasi		12.00 Bulan				12.00 Bulan	
3	Urusan Pilihan								
35	Energi dan Sumberdaya Mineral				19.014.300,00				20.916.000,00
3.5.15	Program Fasilitas Penyelenggaraan Energi Sumber Daya Mineral	Prosentase Cakupan Layanan Fasilitas ESDM		100.00 %	19.014.300,00			100.00 %	20.916.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
35.151	Fasilitasi Sektor Sumber Daya Mineral	Fasilitasi Perizinan Bidang ESDM	Kabupaten Purworejo	1.00 Dok	19.014.300,00	DAU		1.00 Dok	20.916.000,00

Nama Perangkat Daerah : DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	TOTAL				28.803.307.600,00				34.230.917.900,00
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar								
216	Kebudayaan				7.764.349.900,00				3.347.449.900,00
2.161	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran		100.00 %	264.492.600,00			100.00 %	264.492.600,00
21.612	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Layanan komunikasi, informasi, sumber daya air dan listrik	DINPARBUD	12.00 Bulan	30.061.300,00	DAU		12.00 Bulan	30.061.300,00
216.125	Pengelolaan Surat-menyurat dan Kearsipan	Layanan surat-menyurat dan kearsipan	DINPARBUD	12.00 Bulan	34.394.800,00	DAU		12.00 Bulan	34.394.800,00
216.127	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Layanan kebersihan kantor	DINPARBUD	12.00 Bulan	9.096.000,00	DAU		12.00 Bulan	9.096.000,00
216.128	Koordinasi dan Konsultasi Internal dan Eksternal	Layanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	DINPARBUD, Dalam Daerah, Luar Daerah	12.00 Bulan	157.928.500,00	DAU		12.00 Bulan	157.928.500,00
216.129	Pengelolaan Keamanan Kantor	Layanan keamanan kantor	DINPARBUD	12.00 Bulan	33.012.000,00	DAU		12.00 Bulan	33.012.000,00
2.162	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Berfungsi Dengan Baik		100.00 %	93.321.600,00			100.00 %	93.321.600,00
216.222	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	DINPARBUD	1.00 Unit/Th	33.945.600,00	DAU		1.00 Unit/Th	33.945.600,00
216.224	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	DINPARBUD	19.00 Unit/Th	41.000.000,00	DAU		19.00 Unit/Th	41.000.000,00
216.228	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara rutin/berkala	DINPARBUD	17.00 Unit/Th	18.376.000,00	DAU		17.00 Unit/Th	18.376.000,00
2.166	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase Capaian Kinerja Dan Keuangan		100.00 %	41.212.000,00			100.00 %	41.212.000,00
21.665	Penyusunan Pelaporan Keuangan	Dokumen pelaporan keuangan	DINPARBUD	10.00 Dok	20.000.000,00	DAU		10.00 Dok	20.000.000,00
21.666	Penyusunan Perencanaan Dan Evaluasi Pelaporan	Dokumen perencanaan dan evaluasi pelaporan	DINPARBUD	5.00 Dok	21.212.000,00	DAU		5.00 Dok	21.212.000,00
2.167	Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Prosentase tersedianya data dasar pembangunan		100.00 %	16.519.700,00			100.00 %	16.519.700,00
21.671	Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Dokumen data dasar pembangunan	DINPARBUD	1.00 Dok	16.519.700,00	DAU		1.00 Dok	16.519.700,00
2.16.15	Program Pengembangan dan Pelestarian Seni dan Budaya	Cakupan Gelar Seni		100.00 %	1.446.945.000,00			100.00 %	1.846.945.000,00
		Misi Kesenian		100.00 %				100.00 %	
216.151	Gelar Seni	Terlaksananya pementasan kesenian dalam daerah dan luar daerah	Kabupaten Purworejo	23 Kali	400.000.000,00	DAU	Kebutuhan : Rp. 800.000.000,-	23 Kali	800.000.000,00
		Misi Kesenian 100%				DAU			
216.152	Parade Budaya	Terlaksananya pementasan Jumengan Cokronegoro dan Pelaksanaan Parade Budaya	Kabupaten Purworejo	2.00 Kali	846.945.000,00	DAU		2.00 Kali	846.945.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
216.153	Fasilitasi Grup Kesenian	Terfasilitasinya hibah alat kesenian kepada grup kesenian	Kabupaten Purworejo	13 Grup	200.000.000,00	DAU		13 Grup	200.000.000,00
2.16.16	Program Pelestarian Pengelolaan Nilai Sejarah, Nilai Budaya, dan Kepurbakalaan	Jumlah cagar budaya yang diregistrasi		614.00 Buah	4.172.736.000,00			614.00 Buah	321.836.000,00
		Jumlah cagar budaya yang direvitalisasi		87.00 Buah				87.00 Buah	
		Tersedianya museum yang representatif		1.00 Buah				1.00 Buah	
216.161	Inventarisasi dan Pelestarian Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang direvitalisasi dan usulan penetapan Cagar Budaya	Kabupaten Purworejo	10.00 Buah	0,00	DAU		10.00 Buah	0,00
		Jumlah Cagar Budaya yang direvitalisasi dan usulan penetapan Cagar Budaya	Kabupaten Purworejo	10.00 Buah				10.00 Buah	
		Jumlah Cagar Budaya yang direvitalisasi dan usulan penetapan Cagar Budaya	Kabupaten Purworejo	87.00 Buah				87.00 Buah	
		Jumlah Cagar Budaya yang direvitalisasi dan usulan penetapan Cagar Budaya	Kabupaten Purworejo	87.00 Buah				87.00 Buah	
2.16.16.15	Pelestarian Nilai Tradisi	Jamasan Tosan Aji	Kabupaten Purworejo	1 Kali	101.836.000,00	DAU		1 Kali	101.836.000,00
		Pelestarian nilai Sejarah dan Budaya	Kabupaten Purworejo	1 Kali				1 Kali	
		Terpelihara Benda Cagar Budaya	Kabupaten Purworejo	12.00 Bulan				12.00 Bulan	
216.164	Konservasi Cagar Budaya	Konservasi Cagar Budaya	Kabupaten Purworejo	1 Paket	150.000.000,00	DAU		1 Paket	150.000.000,00
		Fasilitasi TACB dan registasi Cagar Budaya, monev	Kabupaten Purworejo	12 Bulan				12 Bulan	
		Terpeliharanya kelstarian cagar budaya	Kabupaten Purworejo	8 Buah				8 Buah	
2.16.16.14	Pembangunan Art Center	Art center	Kabupaten Purworejo	1.00 Paket	3.850.900.000,00	DAU		1.00 Paket	0,00
2.16.16.16	Pengelolaan Museum	Pemeliharaan Gedung dan Konservasi Koleksi Museum	Kabupaten Purworejo	12 Bulan	70.000.000,00	DAU		12 Bulan	70.000.000,00
2.16.17	Program Pembinaan Seni Budaya dan Adat daerah	Cakupan Pembinaan seni, Nilai Sejarah, Adat Dan Tradisi		100.00 %	109.770.000,00			100.00 %	143.770.000,00
216.171	Pelestarian Seni	Pembinaan terhadap kelompok seni, monev	Kabupaten Purworejo	16 Kali	50.000.000,00	DAU		16 Kali	50.000.000,00
216.172	Persemaian Karakter Budaya	Penguatan karakter bangsa bagi masyarakat dan siswa	Kabupaten Purworejo	28 Kali	0,00	DAU	Kebutuhan : Rp.34.000.000,-	28 Kali	34.000.000,00
216.173	Workshop Sejarah Lokal	Workshop sejarah bagi guru/ masyarakat	Kabupaten Purworejo	1 Kali	35.000.000,00	DAU		1 Kali	35.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
216.174	Pembinaan Kelompok Penghayat Kepercayaan	Pertemuan dengan kelompok penghayat kepercayaan, monev	DINPARBUD	1 Kali	24.770.000,00	DAU		1 Kali	24.770.000,00
2.16.18	Program Pembinaan Prestasi Seni dan Organisasi	Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian		86.25 %	424.496.000,00			86.25 %	424.496.000,00
		Cakupan Organisasi		100.00 %				100.00 %	
216.181	Festival Seni	Terlaksananya Festival kesenian	Kabupaten Purworejo	5 Kali	274.496.000,00	DAU		5 Kali	274.496.000,00
		Lomba dan festival seni	Kabupaten Purworejo						
216.184	Fasilitasi Dewan Kesenian dan Persatuan Perdalangan Indonesia	Terfasilitasinya Dewan Kesenian dan Persatuan Pedalangan Indonesia	Kabupaten Purworejo	13 Event	150.000.000,00	DAU		13 Event	150.000.000,00
2.16.19	Program Pengembangan Wahana Seni Budaya	Tersedianya tempat pembinaan seni budaya		100.00 %	1.194.857.000,00			100.00 %	194.857.000,00
216.191	Pemeliharaan dan pengelolaan gedung kesenian	Terlaksananya pemeliharaan dan pengelolaan gedung kesenian	Kabupaten Purworejo	12.00 Bulan	194.857.000,00	DAU		12.00 Bulan	194.857.000,00
216.194	Penyempurnaan Gedung Kesenian	Terlaksananya Rehap Gedung Kesenian	Kabupaten Purworejo	1 Paket	1.000.000.000,00	DAU		1 Paket	0,00
3	Urusan Pilihan								
32	Pariwisata				21.038.957.700,00				30.883.468.000,00
3.2.15	Program Pengembangan Destinasi, Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kinerja pengembangan pariwisata		85.00 %	21.038.957.700,00			85.00 %	30.883.468.000,00
32.152	Pengelolaan Obyek Wisata dan Aset Daerah	Layanan pengelolaan obyek wisata dan aset daerah	Kabupaten Purworejo	5.00 Lokasi	1.512.852.000,00	DAU		5.00 Lokasi	2.891.004.838,00
32.153	Pembuatan Sarana Promosi Wisata	Sarana promosi wisata	Bandara YIA	1 Paket	400.000.000,00	DAU		1 Paket	2.000.000.000,00
		Sarana promosi guna peningkatan jumlah pengunjung obyek wisata.	Kabupaten Purworejo	20.00 Buah				20.00 Buah	
		Sarana promosi guna peningkatan jumlah pengunjung obyek wisata.	Kabupaten Purworejo	20.00 Buah				20.00 Buah	
32.154	Event Wisata	Even Wisata (lomba layang layang tingkat nasional, festival Purworejo, festival WR. Soepratman, Purworejo Carnival, festival tahun baru)	Kabupaten Purworejo	5 Kegiatan	924.804.700,00	DAU		5 Kegiatan	7.600.000.000,00
32.155	Pelatihan Managemen Kelompok Sadar Wisata dan Jambore Pokdarwis	Pemberdayaan masyarakat bidang pariwisata	Kabupaten Purworejo	25 Kali	330.000.000,00	DBHCHT		25 Kali	950.000.000,00
32.156	Pemilihan Bagus dan RoroTingkat Kabupaten dan Pengiriman Mas dan Mbak Tingkat Provinsi Jawa Tengah	Fasilitas pemilihan mas dan mbak serta pengiriman Mas dan Mbak Tk. Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Purworejo	11 Pasang	75.000.000,00	DAU		11 Pasang	210.000.000,00
321.533	Pengadaan Sarana Fasilitas Penunjang Wisata	Pengadaan Sarana Fasilitas Penunjang Wisata (CCTV, Kendaraan Roda 3, Alat Kebersihan, Comand Centre)	Kabupaten Purworejo	4.00 Paket	500.000.000,00	DBHCHT		4.00 Paket	232.463.162,00
321.537	Pameran Pariwisata	Pameran dalam dan luar daerah	Kabupaten Purworejo, Luar Daerah	3.00 Kali	150.000.000,00	DAU		3.00 Kali	0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
321.548	Operasional UPT alun- alun	Terselenggaranya Operasional Pelayanan dan pemeliharaan Alun- alun Purworejo	Kabupaten Purworejo	12.00 Bulan	1.015.912.000,00	DAU		12.00 Bulan	0,00
321.563	Penataan Alun alun Kutoarjo	Terevitalisasinya kawasan alun-alun Kutoarjo	Kabupaten Purworejo	1 Paket	7.500.000.000,00	DAU		1 Paket	0,00
321.564	Pengembangan Wisata Terpadu	Tempat kuliner, parkir dan MCK	Kabupaten Purworejo	1 Paket	4.500.000.000,00	DAU		1 Paket	17.000.000.000,00
321.565	Pembangunan Atraksi Wisata (DAK)		Kabupaten Purworejo	1 Paket	4.130.389.000,00	DAK	Kebutuhan : Rp.13.644.600.000,-	1 Paket	0,00

Nama Perangkat Daerah : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	TOTAL				1.398.572.900,00				17.923.300.000,00
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar								
217	Perpustakaan				454.657.200,00				16.270.000.000,00
2.17.15	Program pengelolaan, pengembangan dan pembinaan perpustakaan	Cakupan layanan perpustakaan		16.00 jenis layanan	454.657.200,00			18.00 jenis layanan	16.270.000.000,00
		Jumlah koleksi bahan pustaka		47420.00 Exp				50500.00 Exp	
217.152	Penyediaan Bahan Pustaka/Buku Perpustakaan	Koleksi bahan pustaka	Kabupaten Purworejo	2000.00 eks	116.244.100,00	DAU		3500.00 eks	275.000.000,00
217.156	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan	Meja	Kabupaten Purworejo	2.00 Buah	15.868.100,00	DAU		11 jenis	210.000.000,00
		Printer		2.00 unit					
		Papan pengumuman		2.00 unit					
		Tenda payung		1.00 unit					
		Tikar		11.00 lembar					
217.158	Pembangunan Gedung Perpustakaan	Gedung perpustakaan yang representatif	Kabupaten Purworejo	1.00 Paket	0,00	DAU	Kebutuhan : Rp.4.000.000.000,-	1 Paket	15.000.000.000,00
2.17.15.28	Pemeliharaan Sarpras Layanan Perpustakaan	Pemeliharaan otomasi, pemeliharaan bahan perpustakaan, perawatan buku	Kabupaten Purworejo	1.00 Jenis	18.084.000,00	DAU		3 jenis	150.000.000,00
2.17.15.30	Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan	Lomba yang berkaitan dengan perpustakaan	Kabupaten Purworejo	2.00 Jenis	99.460.100,00	DAU		3 Jenis	350.000.000,00
		Pemanfaatan perpustakaan sebagai media pembelajaran masyarakat		6.00 Keg				8 Keg	
		Pembinaan perpustakaan		17.00 Lokasi				40 Lokasi	
2.17.15.31	Layanan, Promosi dan Publikasi	Pelayanan perpustakaan umum menetap dan keliling	Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah	34.00 Lokasi	205.000.900,00	DAU		40 Lokasi	285.000.000,00
		Roadshow layanan perpustakaan ke Desa/ Sekolah/ Tempat Wisata		3.00 Lokasi				5 lokasi	
		Promosi koleksi dan kegiatan perpustakaan		2.00 Kali				2 kali	
218	Kearsipan				943.915.700,00				1.653.300.000,00
2.181	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian layanan administrasi perkantoran		100.00 %	269.929.000,00			100.00 %	317.500.000,00
218.125	Pengelolaan Surat-menyurat dan Kearsipan	Layanan surat-menyurat dan kearsipan	Dinarpus	12.00 Bulan	27.709.000,00	DAU		12.00 Bulan	35.000.000,00
218.126	Penyediaan Layanan Komunikasi, Informasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Layanan komunikasi, informasi, sumber daya air dan listrik	Dinarpus	12.00 Bulan	120.172.000,00	DAU		12.00 Bulan	150.000.000,00
218.127	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Layanan kebersihan kantor	Dinarpus	12.00 Bulan	10.000.000,00	DAU		12.00 Bulan	12.500.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
218.128	Koordinasi dan Konsultasi Internal dan Eksternal	Layanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Dinarpus, Dalam Daerah, Luar Daerah	12.00 Bulan	112.048.000,00	DAU		12.00 Bulan	120.000.000,00
2.182	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan sarana prasarana bagi aparatur yang berfungsi dengan baik		100.00 %	108.668.200,00			100.00 %	145.000.000,00
218.222	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	Dinarpus	2.00 Unit/Th	15.514.200,00	DAU		2.00 Unit/Th	25.000.000,00
218.224	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	Dinarpus	15.00 Unit/Th	73.500.000,00	DAU		15.00 Unit/Th	90.000.000,00
218.249	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara rutin/berkala	Dinarpus	40.00 Unit/Th	19.654.000,00	DAU		40.00 Unit/Th	30.000.000,00
2.185	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase kapasitas sumber daya aparatur		100.00 %	45.960.900,00			100.00 %	55.000.000,00
21.851	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	Aparatur yang meningkat kualifikasi, kapasitas dan kinerjanya	Jateng, DKI, DIY, Jabar	15.00 Org	45.960.900,00	DAU		15.00 Org	55.000.000,00
2.186	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase capaian kinerja dan keuangan		100.00 %	89.073.600,00			100.00 %	100.000.000,00
21.865	Penyusunan Pelaporan Keuangan	Dokumen pelaporan keuangan	Dinarpus	19.00 Dok	28.827.100,00	DAU		19.00 Dok	35.000.000,00
21.866	Penyusunan Perencanaan Dan Evaluasi Pelaporan	Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan	Dinarpus	10.00 Dok	60.246.500,00	DAU		10.00 Dok	65.000.000,00
2.187	Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Prosentase Ketersediaan Data Dasar Pembangunan		100.00 %	10.000.000,00			100.00 %	12.500.000,00
21.871	Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Dokumen data dasar pembangunan	Dinarpus	1.00 Dok	10.000.000,00	DAU		1.00 Dok	12.500.000,00
2.18.15	Program pengelolaan, perlindungan dan penyelamatan arsip daerah	Prosentase pertumbuhan arsip yang dikelola		7.00 %	420.284.000,00			7.00 %	1.023.300.000,00
218.153	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kearsipan	Sarana dan Prasarana Kearsipan	Depot Arsip	6.00 jenis	0,00	DAU	Kebutuhan: Rp.299.000.000,-	6 jenis	300.000.000,00
2.18.15.3	Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Kearsipan	Pedoman kearsipan	Kabupaten Purworejo	1.00 Dok	217.224.000,00	DAU		1 Dok	417.300.000,00
		Sosialisasi/pembinaan kearsipan		1.00 Kali				16 UPT	
		Pelatihan teknis kearsipan		93.00 Orang				100 orang	
		Laporan monitoring & evaluasi		1.00 Dok				1.00 Dok	
2.18.15.40	Pengelolaan Depot Arsip dan Pelayanan Kearsipan	Pengelolaan depot arsip	Depot Arsip	4 jenis	101.836.000,00	DAU		8 Jenis	160.000.000,00
		Pameran khasanah arsip		2.00 Kali				2 Kali	
2.18.15.41	Pengelolaan Arsip Statis	Daftar inventaris arsip	Depot Arsip, Kabupaten Purworejo	1.00 Dok	101.224.000,00	DAU		2 Dok	146.000.000,00
		Akuisisi arsip		1.00 Tematik				1 Tematik	
		Daftar arsip inaktif		1.00 Dok				1 Dok	

Nama Perangkat Daerah : DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	TOTAL				10.543.508.876,00				10.495.153.096,00
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar								
23	Pangan				406.087.400,00				568.000.000,00
2.3.15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Rasio ketersediaan energi kkal/kap/hr		100.00 %	406.087.400,00			100.00 %	568.000.000,00
		Rasio ketersediaan protein gr/kap/hr		100.00 %				100.00 %	
		Desa Rawan / Rentan Pangan Yang Ditangani		12.00 Desa					
23.155	Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan	Nota kesepakatan mengatasi masalah Pangan di Daerah	Kab. Purworejo	1.00 Dok	24.953.800,00	DAU		1.00 Dok	25.000.000,00
23.158	Peningkatan Mutu Keamanan Pangan dan Pengujian Mutu Hasil Pertanian	Sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan produk pangan segar	Kab. Purworejo	100.00 orang	45.659.600,00	DAU		100.00 orang	55.000.000,00
		Uji residu pestisida		45.00 Sampel				45.00 Sampel	
23.159	Gerakan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)	Pelatihan pemanfaatan pekarangan	Kab. Purworejo	6.00 KWT	130.612.000,00	DAU		16.00 KWT	185.000.000,00
		Lomba cipta menu Tk. Provinsi dan Tk. Nasional		2.00 Kali				2.00 Kali	
		Data pola konsumsi pangan masyarakat (PPH)		1.00 Dok				1.00 Dok	
231.510	Gerakan Mandiri Pangan	Bantuan ternak unggas	Kab. Purworejo	6.00 KWT	130.612.000,00	DAU		6.00 KWT	173.000.000,00
		Pelatihan		6.00 KWT				6.00 KWT	
		Sosialisasi		6.00 KWT				6.00 KWT	
		analisis ketersediaan pangan		1.00 Dok				1.00 Dok	
231.530	Peningkatan Distribusi dan Cadangan Pangan	Rapat koordinasi	Kab. Purworejo	5.00 Kali	74.250.000,00	DAU		5 Kali	130.000.000,00
		Data informasi pangan		1.00 Dok				1 Dok	
		Pembinaan lumbung pangan masyarakat		16.00 Kecamatan				16 Kec	
		Cadangan pangan Pemerintah Kabupaten		5.00 ton				5.00 ton	
3	Urusan Pilihan								
31	Kelautan dan Perikanan				1.489.078.876,00				600.000.000,00
3.1.15	Program Peningkatan Produksi Perikanan	Prosentase kenaikan produksi perikanan Budidaya		3.00 %	1.449.078.876,00			3.00 %	350.000.000,00
		Prosentase kenaikan produksi perikanan tangkap		4,00%				4,00%	
31.152	Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan	pengadaan obat ikan dan pelayanan pengendalian penyakit	Kab. Purworejo	12.00 bulan	40.000.000,00	DAU		12.00 bulan	35.000.000,00
31.159	Verifikasi Penerbitan Rekomendasi Pembelian BBM	Terbitnya rekomendasi pembelian BBM	Kab. Purworejo	12.00 Bulan	20.000.000,00	DAU		12.00 Bulan	40.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
311.530	Pengawasan Mutu Produk Perikanan	Pengadaan Tes Kit Borak dan Formalin	Kab. Purworejo	1.00 Paket	15.000.000,00	DAU		1.00 Paket	15.000.000,00
		Pengawasan mutu		12.00 bulan					
311.533	Percontohan Budidaya Air Tawar (DAK)	Pengadaan sarana produksi perikanan : benih ikan, pakan ikan, obat ikan, peralatan budidaya.	Kab. Purworejo	10.00 Kel	408.652.500,00	DAK		0.00 Kel	0,00
311.534	Fasilitasi pertemuan himpunan nelayan seluruh Indonesia	Fasilitasi pertemuan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia	Kab. Purworejo	250.00 orang	20.000.000,00	DAU		3.00 Kecamatan	30.000.000,00
311.538	Pengembangan Perikanan Air Tawar	Pelatihan, bantuan benih ikan, pakan dan obat	Kab. Purworejo	6.00 kelompok	205.200.876,00	DAU			200.000.000,00
		Sarasehan dan temu usaha pelaku perikanan		90.00 orang				Kali	
		Lomba kelompok Pembudidaya Ikan dan UPR		1 kali					
311.541	Pengadaan sarana penangkapan ikan (DAK)	Jaring gillnet milenium	Kab. Purworejo	15.00 KUB	715.225.500,00	DAK		Buah	0,00
311.543	Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan	Monev dan rekomendasi	Kab. Purworejo	1.00 Dokumen	25.000.000,00	DAU		1 dokumen	30.000.000,00
311.546	Pengadaan tanah BBI	Pengadaan tanah	Desa Penungkulan, Kec. Gebang	2.00 Ha	0,00	DAU	Kebutuhan : Rp. 4.000.000.000,-	meter	0,00
3.1.16	Program Agribisnis Komoditas Unggulan Perikanan	Cakupan wilayah pengembangan TPI		7.00 TPI	40.000.000,00			7.00 TPI	250.000.000,00
		Even promosi perikanan		5.00 even				5.00 even	
		Kelompok perikanan (pembenihan dan pembersaran) yang memiliki sertifikat CBIB meningkat		10.00 kelompok				12.00 kelompok	
31.165	Promosi Produk Ikan	Lomba produk olahan ikan	Kab. Purworejo	4.00 kali	40.000.000,00	DAU		2.00 Jenis	250.000.000,00
		Gerakan memasyarakatkan makan ikan/gemarikan)		1.00 Kali				150.00 Kali	
31.165	Pembangunan Sentra Agribisnis Perikanan	sentra agribisnis perikanan	Kab. Purworejo	1 unit	0,00	DAK	Kebutuhan : Rp. 4.000.000.000,-		
33	Pertanian				8.648.342.600,00				9.327.153.096,00
331	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase cakupan layanan administrasi perkantoran		100.00 %	586.281.600,00			100.00 %	641.200.000,00
33.125	Pengelolaan Surat-menyurat dan Kearsipan	Layanan surat-menyurat dan kearsipan	DinPPKP	12.00 Bulan	29.735.400,00	DAU		12 Bulan	40.000.000,00
33.126	Penyediaan Layanan Komunikasi, Informasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Layanan komunikasi, informasi, sumber daya air dan listrik	DinPPKP	12.00 Bulan	120.213.600,00	DAU		12 Bulan	150.000.000,00
33.127	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Layanan kebersihan kantor	DinPPKP	12.00 Bulan	36.887.000,00	DAU		12 Bulan	40.000.000,00
33.128	Koordinasi dan Konsultasi Internal dan Eksternal	Layanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	DinPPKP, Dalam Daerah, Luar Daerah	12.00 Bulan	334.573.600,00	DAU		12 Bulan	350.000.000,00
33.129	Pengelolaan Keamanan Kantor	Layanan Keamanan Kantor	DinPPKP	12.00 Bulan	64.872.000,00	DAU		12 Bulan	61.200.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
332	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase peningkatan sarana dan prasarana		100.00 %	421.989.000,00			100.00 %	450.000.000,00
33.222	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	DinPPKP	28.00 Unit/Th	134.177.000,00	DAU		1.000 m ²	150.000.000,00
33.224	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	DinPPKP	137 Unit/Th	266.362.000,00	DAU		137 Unit/Th	270.000.000,00
33.248	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara rutin/berkala	DinPPKP	34 Unit/Th	21.450.000,00	DAU		34 Unit/Th	30.000.000,00
335	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur		100.00 %	17.400.000,00			100.00 %	25.000.000,00
3.355	Penilaian Angka Kredit Bagi Jabatan Fungsional	Pejabat fungsional yang dinilai angka kreditnya	DinPPKP	73.00 orang	17.400.000,00	DAU		73.00 orang	25.000.000,00
336	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100.00 %	65.805.000,00			100.00 %	85.000.000,00
3.365	Penyusunan Pelaporan Keuangan	Dokumen pelaporan keuangan	DinPPKP	19.00 Dok	24.000.000,00	DAU		19.00 Dok	30.000.000,00
3.366	Penyusunan Perencanaan Dan Evaluasi Pelaporan	Dokumen perencanaan dan evaluasi pelaporan	DinPPKP	16.00 Dok	41.805.000,00	DAU		16.00 Dok	55.000.000,00
337	Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Prosentase tersedianya data dasar pembangunan		100,00%	119.967.000,00			100.00 %	130.000.000,00
3.371	Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Dokumen data dasar pembangunan	DinPPKP	4.00 Dok	119.967.000,00	DAU		3.00 Dok	130.000.000,00
3.3.15	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian	Jumlah luasan panen komoditas pertanian (ha/tahun)		118100.00 ha	2.126.705.400,00			118125 ha	1.210.000.000,00
33.153	Pengelolaan Sumber-Sumber Air (DAK)	Pembangunan ATD	Kab. Purworejo	4.00 paket	1.060.500.000,00	DAK			0,00
		Dam Parit		1.00 paket					
33.156	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Pembangunan jalan usaha tani	Kab. Purworejo	9.00 kelompok	505.601.400,00	DAU		0.00 meter	0,00
331.513	Pelatihan Budidaya Tanaman Hortikultura	Pelatihan	Kab. Purworejo	382.00 Org	150.000.000,00	DAU	Rumah tangga miskin (RTM) : 322 Org, Program TMMD : 60 Org	910.00 Org	510.000.000,00
331.515	Promosi atas hasil Produksi Pertanian Unggul Daerah	Pameran buah, Pameran hari jadi Purworejo, Purworejo expo, festival durian	Kab. Purworejo	4.00 Kali	160.000.000,00	DAU		4 Kali	200.000.000,00
331.528	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Pangan	Pengembangan padi organik	Kab. Purworejo	6.00 ha	250.604.000,00	DAU		8 ha	500.000.000,00
		pengembangan kacang hijau		150.00 ha					
3.3.16	Program Penerapan Teknologi Pertanian	Luas penerapan teknologi intensifikasi pertanian (ha)		2300.00 ha	70.000.000,00			2800.00 ha	235.000.000,00
		Prosentase penerapan teknologi IB (%)		80.00%				80.00%	
33.166	Layanan Inseminasi Buatan	Operasional layanan inseminasi buatan	Kab. Purworejo	12.00 Bulan	20.000.000,00	DAU		12.00 Bulan	35.000.000,00
331.616	Bimbingan Penggunaan dan Pemeliharaan Alsintan	Pelatihan alsintan	Kab. Purworejo	100 orang	50.000.000,00	DAU		100 orang	100.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Monev alsintan dan rekomendasi		1.00 Dok				1.00 Dok	
331.616	Pelatihan Pengembangan Musuh Alami dan Pesticida Nabati	Kebun percontohan pestisida nabati	Kab. Purworejo	5.00 BPP	0,00	DAU	Kebutuhan : Rp. 150.000.000,-	5.00 BPP	100.000.000,00
		Pelatihan pengembangan agensia hayati dan musuh alami		60.00 Org				60.00 Org	
		Produk agensia hayati		100.00 Kg				100.00 Kg	
		Layanan pengembangan agensia hayati		16.00 Kecamatan				16.00 Kecamatan	
3.3.17	Program Pemberdayaan Penyuluh dan Peningkatan Penyuluhan Pertanian	Prosentase cakupan pelayanan Penyuluhan (WIBI)		100.00 %	3.031.250.800,00			100.00 %	735.000.000,00
		Prosentase Kenaikan Kelompok :							
		Lanjut		9.00 %				9.00 %	
		Madya		2.00 %				2.00 %	
		Utama		3.00 %				3.00 %	
331.710	Pembinaan Penyuluhan ke Pelaku Utama/Usaha	Pembinaan ke pelaku utama/ usaha dan STA	Kab. Purworejo	494.00 wilayah	285.320.400,00	DAU		Kali	200.000.000,00
		Penilaian kelas kelompok		2.000 kelompok					
		Fasilitasi KTNA		300.00 Org				Org	
331.718	Pembangunan Balai Penyuluhan (DAK)	Gedung BPP	Kec. Bagelen	1.00 unit	787.500.000,00	DAK		unit	0,00
331.719	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan (DAK)	Sarana dan prasarana	DinPPKP	16.00 paket	1.478.400.000,00	DAK		kel	0,00
331.720	Pengembangan dan Pemberdayaan Petani/ Kelompok Tani (IPDMIP-IFAD)	Sekolah lapang petani	Kab. Purworejo	20.00 sekolah lapang	455.684.500,00	DAU		20.00 sekolah lapang	500.000.000,00
		Forum Antar Petani		1.00 Kali				1.00 Kali	
		Pertemuan Bulanan		2.00 Kali				2.00 Kali	
331.721	Fasilitasi Kinerja Penyuluh Pertanian	Buku programa dan monografi penyuluhan	Kab. Purworejo	2.00 Dokumen	24.345.900,00	DAU		2.00 Dokumen	35.000.000,00
		Rekomendasi komisi penyuluhan		1.00 Dok				1.00 Dok	
3.3.18	Program Peningkatan Produksi Peternakan	Cakupan layanan pemotongan ternak pada RPH		100.00 %	301.000.000,00			100.00 %	1.940.953.096,00
		Prosentase kenaikan populasi ternak besar		1.00 %				1.00 %	
		Prosentase kenaikan populasi ternak kecil		3.00 %				3.00 %	
		Prosentase kenaikan populasi ternak unggas		5.00 %				5.00 %	
33.188	Pengembangan Ternak	Bibit ternak kambing Jawa randu	Kab. Purworejo	15.00 Kel	0,00	DAU	Kebutuhan: Rp.3.338.543.200,-	15.00 Kel	1.495.953.096,00
		Bibit ternak sapi		10.00 Kel				10.00 Kel	
331.813	Operasional UPT Puskesmas	Layanan pengobatan ternak	UPT Puskesmas	12.00 bulan	75.000.000,00	DAU		12 bulan	80.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Pengadaan obat		1.00 Paket				1.00 Paket	
331.814	Pelayanan RPH	Layanan RPH	Kab. Purworejo	12.00 Bulan	36.000.000,00	DAU		12.00 Bulan	40.000.000,00
331.815	Pembinaan dan Pemeriksaan Mutu Bahan Pangan Asal Hewan	Bimtek Petugas Pengawasan Hewan Qurban	Kab. Purworejo	16.00 Kecamatan	75.000.000,00	DAU		16.00 Kecamatan	200.000.000,00
		Pelaporan Hasil Pemeriksaan Hewan Qurban		1.00 Dok				1.00 Dok	
		Pemeriksaan/Pengujian bahan pangan asal hewan		5.00 jenis				5.00 jenis	
		Pembinaan dan Pengawasan Peredaran BPAH		12 bulan				12 bulan	
331.826	Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Peternakan	Lomba ternak	Kab. Purworejo	1.00 kali	90.000.000,00	DAU		1 kali	100.000.000,00
331.843	Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Peternakan	Monev dan rekomendasi	Kab. Purworejo	1.00 Dok	25.000.000,00	DAU		1.00 Dok	25.000.000,00
3.3.19	Program Peningkatan Produksi/produktivitas Perkebunan	Jumlah produksi cengkeh		532.08 Ton	227.000.000,00			532.08 Ton	55.000.000,00
		Jumlah produksi kelapa (ton) setara kopra		24967.14 Ton				24967.15 Ton	
		Jumlah produksi kelapa deres dalam bentuk gula (ton)		18655.94 Ton				18655.95 Ton	
		Jumlah produktivitas aren (kg/ha)		1070.527 Kg/Ha				1081.23 Kg/Ha	
		Jumlah produktivitas kakao (kg/ha)		1217.83 Kg/Ha				1230.01 Kg/Ha	
		Jumlah produktivitas karet (kg/ha)		866.71 Kg/Ha				875.37 Kg/Ha	
		Jumlah produktivitas kopi (kg/ha)		331.2153 Kg/Ha				334.53 Kg/Ha	
33.191	Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Perkebunan	Monitoring OPT	Kab. Purworejo	16 kec	40.000.000,00	DAU		16 kec	55.000.000,00
		Obat/pestisida		1 paket				1 paket	
331.937	Budidaya tanaman tembakau sesuai GAP (DBHCHT)	SL GAP Tembakau	Kab. Purworejo	5.00 Kel	187.000.000,00	DBHCHT			0,00
		Sertifikasi varietas unggulan lokal		1.00 Varietas					
331.938	Pengembangan Tanaman Perkebunan	Pelatihan Petanni	Kab. Purworejo	60 Orang	0,00	DAU	Kebutuhan Rp.188.306.000,-	60 Orang	500.000.000,00
		Bibit Kopi		3 Ha (3000 btg)				3 Ha (3000 btg)	
		Bibit Kelapa		24 Ha (2400 btg)				24 Ha (2400 btg)	
3.3.20	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perkebunan	Prosentase peningkatan kelompok tani yang menerapkan teknologi perkebunan		8.00 Kel	160.694.000,00			24.00 Kel	390.000.000,00
33.201	Sekolah Lapang Pengendalian Hama Tanaman Terpadu	SLPHT Tanaman Perkebunan (kelapa dan kopi)	Kab. Purworejo	8.00 Kel	160.694.000,00	DAU		8.00 Kel	390.000.000,00
3.3.21	Program Agribisnis Komoditas Unggulan Pertanian dan Peternakan	Produksi biofarmaka (ton/th)		4800.00 Ton	1.520.249.800,00			4815.00 Ton	3.430.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Produksi durian (ton/th)		267.00 Ton				482.00 Ton	
		Produksi jagung (ton/ Th)		20937.00 Ton				21105.00 Ton	
		Produksi Padi (ton/Th)		358458.00 Ton				358458.00 Ton	
		Prosentase kenaikan populasi ternak kambing kaligesing (%)		0.50 %				0.50 %	
33.211	Pengelolaan Tanaman Terpadu	SL-PHT	Kab. Purworejo	5.00 Kel	180.333.700,00	DAU		10 Kel	300.000.000,00
		Layanan pengendalian hama terpadu tanaman pangan		16.00 Kecamatan				16.00 Kecamatan	
		Germas		15 kelompok				15 kel	
		Pestisida		300 kg (liter)					
33.219	Penanaman Tanaman Hortikultura Unggulan	Durian	Kab. Purworejo	875.00 Buah	667.866.400,00	DAU		Buah	900.000.000,00
		Manggis		1000 batang					
		Biofarmaka		2,5 ha					
332.112	Kontes Kambing Kaligesing	Kontes kambing	Kab. Purworejo	1 kali	120.000.000,00	DAU			200.000.000,00
332.114	Bantuan Ternak Kambing Kaligesing	Pengadaan obat-obatan dan alat peternakan	Kab. Purworejo	10.00 Paket	527.049.700,00	DAU		10.00 Paket	1.950.000.000,00
		Pengadaan bibit Kambing Kaligesing		10.00 Kel				10.00 Kel	
		Sosialisasi dan pembekalan pradroping		10.00 Ekor				330.00 Ekor	
332.115	Pewilayahan Sumber Bibit Kambing Kaligesing	Pembinaan wilayah sumber bibit kambing kaligesing	Kec. Kaligesing	100 orang	25.000.000,00	DAU		200 orang	80.000.000,00

Nama Perangkat Daerah : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	TOTAL				13.754.263.300,00				9.290.280.588,00
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar								
211	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				2.460.929.600,00				2.803.003.460,00
2.11.15	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Prosentase jumlah koperasi aktif 85 %		89.00 %	285.000.000,00			89.00 %	313.500.000,00
		Prosentase jumlah koperasii aktif 85%		89.00%				89.00%	
211.151	Temu Kemitraan Koperasi	Meningkatnya kinerja koperasi	Kab. Purworejo	60 Koperasi	90.000.000,00	DAU		60 Koperasi	99.000.000,00
211.152	Penilaian Kesehatan KSP/USP/KJKS/UJKS	Terukurnya kesehatan kopersai dari 7 aspek meliputi permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, likuiditas, efisiensi, kemandirian dan pertumbuhan dan jati diri koperasi	Kab. Purworejo	150.00 Koperasi	60.000.000,00	DAU		150.00 Koperasi	66.000.000,00
211.154	Pelatihan Perkoperasian	Meningkatkan SDM pengurus/pengelolaan koperasi	Kab. Purworejo	120.00 Koperasi	135.000.000,00	DAU		120.00 Koperasi	148.500.000,00
2.11.16	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil	Prosentase peningkatan usaha mikro kecil yang dibina		20.00 %	2.175.929.600,00			20.00 %	2.489.503.460,00
211.167	Pengembangan OVOP	Desa berbasis OVOP	Kab. Purworejo	10 UMK peserta magang/90 OVOP lama/48 OVOP baru	351.384.600,00	DAU		10 UMK peserta magang/90 OVOP lama/48 OVOP baru	384.503.460,00
2.11.16.1 1	Fasilitasi inkubasi bisnis	Kapasitas UMK meningkat	Kab. Purworejo	48 tenant 780 UM, 5 kel/75 UMK, 90 UMK	1.614.545.000,00	P2KSM		48 tenant 780 UM, 5 kel/75 UMK, 90 UMK	1.875.000.000,00
2.11.16.1 2	Temu usaha permodalan dan pemasaran UMK	Pelatihan dan pameran	Kab. Purworejo	200 UMK	210.000.000,00	DBHCHT		200 UMK	230.000.000,00
3	Urusan Pilihan								
36	Perdagangan				11.293.333.700,00				6.487.277.128,00
361	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase cakupan layanan administrasi perkantoran		100.00 %	214.600.100,00			100.00 %	238.000.000,00
36.125	Pengelolaan Surat-menyurat dan Kearsipan	Layanan surat-menyurat dan kearsipan	DINKUKMP	12.00 Bulan	35.092.400,00	DAU		12.00 Bulan	40.000.000,00
36.126	Penyediaan Layanan Komunikasi, Informasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Layanan komunikasi, informasi, sumber daya air dan listrik	DINKUKMP	12.00 Bulan	34.071.600,00	DAU		12.00 Bulan	38.000.000,00
36.127	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Layanan kebersihan kantor	DINKUKMP	12.00 Bulan	7.073.600,00	DAU		12.00 Bulan	5.000.000,00
36.128	Koordinasi dan Konsultasi Internal dan Eksternal	Layanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	DINKUKMP	12.00 Bulan	97.562.500,00	DAU		12.00 Bulan	110.000.000,00
36.129	Pengelolaan Keamanan Kantor	Layanan keamanan kantor	DINKUKMP	12.00 Bulan	40.800.000,00	DAU		12.00 Bulan	45.000.000,00
362	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan sarana dan prasarana aparatur		100.00 %	129.245.200,00			100.00 %	149.258.600,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
36.222	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	DINKUKMP	2 unit/tahun	38.719.200,00	DAU		2 unit/tahun	45.000.000,00
36.224	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	DINKUKMP	31 unit/tahun	63.500.000,00	DAU		31 unit/tahun	74.258.600,00
36.228	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara rutin/berkala	DINKUKMP	42 unit/tahun	27.026.000,00	DAU		42 unit/tahun	30.000.000,00
365	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur		100.00 %	0,00			100.00 %	0,00
3.651	Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur	Aparatur yang meningkat kualifikasi, kapasitas dan kinerjanya	DINKUKMP	2.00 Org	0,00	DAU	Kebutuhan: Rp.80.000.000,-	2.00 Org	0,00
366	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase capaian kinerja dan keuangan	DINKUKMP	100.00 %	29.688.100,00			100.00 %	93.312.888,00
3.665	Penyusunan Pelaporan Keuangan	Dokumen pelaporan keuangan	DINKUKMP	8.00 Dok	10.749.400,00	DAU		8.00 Dok	42.841.500,00
3.666	Penyusunan Perencanaan Dan Evaluasi Pelaporan	Dokumen perencanaan dan evaluasi pelaporan	DINKUKMP	10 Dok	18.938.700,00	DAU		10 Dok	50.471.388,00
367	Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Prosentase tersedianya data dasar pembangunan		100.00 %	19.497.200,00			100.00 %	166.731.640,00
3.671	Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Dokumen data dasar pembangunan	DINKUKMP	10 dok	19.497.200,00	DAU		10 dok	166.731.640,00
3.6.15	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan	Prosentase pasar dalam kondisi baik		100.00 %	9.895.446.100,00			100.00 %	3.523.634.000,00
36.151	Kegiatan Operasional Pasar Daerah	Operasional pasar daerah	Kab. Purworejo	27 pasar daerah	2.577.880.100,00	DAU		27 pasar daerah	2.750.000.000,00
36.153	Operasional Pengelolaan Resi Gudang (SRG)	terlaksananya kegiatan pengelolaan resi gudang	Kab. Purworejo	1 tahun	101.224.000,00	DAU		1 tahun	130.000.000,00
361.514	Revitalisasi Pasar Pituruh (Bankeu)	Terevitalisasinya pasar pituruh	Kab. Purworejo	1 Pasar	2.500.000.000,00	BANPROV	Kebutuhan : Rp.15.000.000.000,-	1 Pasar	321.817.000,00
361.515	Revitalisasi Pasar Daerah (DAK)	Pasar daerah dalam kondisi baik	Kab. Purworejo	2 Pasar	4.716.342.000,00	DAK	Kebutuhan : Rp.5.000.000.000,-	2 Pasar	321.817.000,00
3.6.16	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Daerah	cakupan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan daerah		100.00 %	509.724.000,00			100.00 %	340.000.000,00
361.614	Pelayanan UTTP (Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya)	operasional Kemetrolgian, dokumen tera ulang alat UTTP	Kab. Purworejo	12 bulan	183.612.000,00	DAU		12 bulan	200.000.000,00
361.620	Monitoring Harga Sembako dan Pengawasan Barang/Jasa beredar	data dan informasi harga sembako dan pengawasan barang jasa beredar	Kab. Purworejo	1 dokumen	126.112.000,00	DAU		1 dokumen	140.000.000,00
361.621	Pembangunan Gedung Unit Metrologi Legal (DAK)	Gedung metrologi legal	Kab. Purworejo	1.00 Unit	0,00	DAK	Kebutuhan : Rp.3.555.000.000,-	1.00 Unit	0,00
361.622	Penyediaan Sarana dalam Mendukung Pembentukan Unit Metrologi Legal (DAK)	Peralatan kemetrolgian	Kab. Purworejo	1.00 Paket	0,00	DAK	Kebutuhan : Rp.1.052.000.000,-	1.00 Paket	0,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
361.623	Pengadaan Perlengkapan Gedung Metrologi Legal	Sarana prasarana gedung unit metrologi legal	Kab. Purworejo	1.00 Paket	200.000.000,00	DAU		1.00 Paket	0,00
3.6.17	Program Peningkatan Promosi Perdagangan	Cakupan jenis komoditas yang dipromosikan		100.00 %	495.133.000,00			100.00 %	1.976.340.000,00
36.171	Pameran Produk Unggulan Daerah	Terselenggaranya kegiatan pameran produk unggulan daerah	Kab. Purworejo	7 kali	434.186.000,00	DAU		7 kali	1.676.340.000,00
36.172	Fasilitasi Pasar Lelang Agro	memfasilitasi kegiatan pasar lelang agro	Kab. Purworejo	8 kali	60.947.000,00	DAU		8 kali	300.000.000,00

Nama Perangkat Daerah : SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	TOTAL				22.316.803.950,00				24.992.978.105,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang								
41	Administrasi Pemerintahan				22.316.803.950,00				24.992.978.105,00
411	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran		100.00 %	4.780.521.000,00			100.00 %	5.724.874.800,00
41.122	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	penyediaan layanan keamanan kantor	Setda	12.00 Bulan	1.009.784.300,00	DAU		12.00 Bulan	1.211.741.160,00
41.126	Pengelolaan Surat-menyurat dan Kearsipan	Layanan surat-menyurat dan kearsipan	Setda	12.00 Bulan	222.810.900,00	DAU		12.00 Bulan	267.373.080,00
41.127	Penyediaan Layanan Komunikasi, Informasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Layanan komunikasi, informasi, sumber daya air dan listrik	Setda	12.00 Bulan	1.009.520.600,00	DAU		12.00 Bulan	1.210.690.320,00
41.128	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Layanan kebersihan kantor	Setda	12.00 Bulan	228.642.200,00	DAU		12.00 Bulan	263.354.640,00
41.129	Koordinasi dan Konsultasi Internal dan Eksternal	Layanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Setda, Dalam Daerah, Luar Daerah, Luar Negeri	12.00 Bulan	2.309.763.000,00	DAU		12.00 Bulan	2.771.715.600,00
412	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Berfungsi Dengan Baik		100.00 %	6.444.178.800,00			100.00 %	7.110.645.960,00
4.125	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas/operasional yang diadakan	Setda	3.00 unit	1.009.460.500,00	DAU		3.00 unit	1.800.000.000,00
41.211	Penataan Parkir Sayap Barat Kompleks Setda dan Sekitar Eks Bawaslu	Tempat parkir sayap barat kompleks Setda dan sekitar eks Bawaslu	Setda	1.00 Paket	1.000.000.000,00	DAU		1.00 Paket	0,00
41.222	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	Setda	6.00 Unit/Th	956.120.000,00	DAU		6.00 Unit/Th	1.140.000.000,00
41.224	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	Setda	132.00 Unit/Th	943.700.000,00	DAU		132.00 Unit/Th	1.128.768.000,00
41.242	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat	Setda	6.00 Paket	1.268.220.000,00	DAU		6.00 Paket	1.521.864.000,00
41.247	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	Setda	247.00 Unit	868.245.500,00	DAU		247.00 Unit	1.041.894.600,00
41.249	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara rutin/berkala	Setda	487.00 Unit/Th	398.432.800,00	DAU		487.00 Unit/Th	478.119.360,00
415	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur		100.00 %	65.000.000,00			100.00 %	71.500.000,00
4.151	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	Aparatur yang meningkat kualifikasi, kapasitas dan kinerjanya	Dalam Daerah, Luar Daerah	20.00 Org	50.000.000,00	DAU		20.00 Org	55.000.000,00
4.155	Penilaian Angka Kredit Bagi Jabatan Fungsional	Pejabat fungsional yang dinilai angka kreditnya	Setda	39.00 Org	15.000.000,00	DAU		39.00 Org	16.500.000,00
416	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase Capaian Kinerja Dan Keuangan		100.00 %	193.736.000,00			100.00 %	211.090.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.165	Penyusunan Pelaporan Keuangan	Laporan keuangan setda	Setda	33.00 Dok	66.400.000,00	DAU		33.00 Dok	106.700.000,00
4.166	Penyusunan Perencanaan Dan Evaluasi Pelaporan	Dokumen perencanaan dan evaluasi pelaporan SPIP	Setda	45.00 Dok	127.336.000,00	DAU		45.00 Dok	104.390.000,00
417	Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Prosentase Ketersediaan Data Dasar Pembangunan		100.00 %	10.000.000,00			100.00 %	11.000.000,00
4.171	Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Data dasar pembangunan	Setda	2.00 Dok	10.000.000,00	DAU		2.00 Dok	11.000.000,00
4.1.15	Program Fasilitas dan Koordinasi Kehidupan Beragama	Jumlah layanan koordinasi dan fasilitas kehidupan beragama		100.00 %	1.827.172.300,00			100.00 %	2.009.889.530,00
41.152	Penghargaan Masyarakat Berprestasi	Penyerahan penghargaan bagi masyarakat berprestasi	Kabupaten Purworejo	40.00 Org	261.314.800,00	DAU		40.00 Org	287.446.280,00
41.156	Koordinasi dan Fasilitas Keagamaan	Dokumen hasil koordinasi dan fasilitas keagamaan	Dalam Daerah, Luar Daerah	7.00 Dok	1.565.857.500,00	DAU	Hibah uang di PPKD untuk: Insentif guru ngaji (Rp.5.100.000.000), BAZNAZ (Rp.383.800.000), BADKO TPQ (Rp.130.000.000), LPTQ (Rp.200.000.000), DMI (Rp.65.000.000), BWI (Rp.40.000.000), MUI (Rp.50.000.000), Tabligh Akbar PD Muhamadiyah Kab. Purworejo (Rp.158.000.000), Bantuan Masjid (Rp.274.999.700)	7.00 Dok	1.722.443.250,00
		Pendampingan haji daerah		1.00 Paket				1.00 Paket	
4.1.16	Program Pelayanan Komunikasi Publik	wahana komunikasi publik		100.00 %	157.433.000,00			100.00 %	173.176.300,00
41.164	Media Relation	Jumpa pers, press tour	Dalam Daerah, Luar Daerah	13.00 Kali	157.433.000,00	DAU		13.00 Kali	173.176.300,00
4.1.17	Program Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah	Tingkat Ketersediaan Kebijakan Daerah untuk penyelenggaraan Pemerintah Daerah		100.00 %	568.875.900,00			100.00 %	626.273.490,00
41.171	Pengkajian dan Penelaahan Produk-produk Hukum Daerah	Rekomendasi produk-produk hukum daerah untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan	Setda	10.00 Dok	84.937.800,00	DAU		10.00 Dok	93.941.580,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
41.172	Penerbitan Produk-produk Hukum Daerah	Produk-produk hukum daerah	Setda	752.00 Dok	333.938.100,00	DAU		752.00 Dok	367.331.910,00
41.176	Pengelolaan Kelembagaan	dokumen Evaluasi kelembagaan daerah	Setda	1.00 Dok	150.000.000,00	DAU		1.00 Dok	165.000.000,00
4.1.18	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan	Prosentase Penyelesaian layanan administrasi pemerintah daerah		100.00 %	6.436.608.150,00			100.00 %	7.037.921.325,00
		Tingkat kemudahan akses masyarakat terhadap informasi publik		100.00 %				100.00 %	
		Tingkat pelayanan kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah		100.00 %				100.00 %	
41.181	Pengendalian Pelaksanaan APBD dan Non APBD	Dokumen hasil pengendalian pelaksanaan pembangunan yang di biyai dari dana APBD dan Non APBD	Kabupaten Purworejo	1.00 Dok	181.421.000,00	DAU		1.00 Dok	199.563.100,00
411.818	Koordinasi Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	Dokumen koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	Kabupaten Purworejo	1.00 Dok	515.165.000,00	DAU		1.00 Dok	566.681.500,00
411.819	Penanganan Perkara Hukum Secara Litigasi dan/ atau Non Litigasi	Tertanganinya perkara hukum secara litigasi dan/atau perkara non litigasi dan bantuan hukum untuk masyarakat miskin	Kabupaten Purworejo	11.00 Perkara	349.425.000,00	DAU		11.00 Perkara	349.425.000,00
411.823	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	JDIH	Kabupaten Purworejo	1.00 JDIH	270.041.400,00	DAU		1.00 JDIH	297.045.600,00
		Dokumen HPP Daerah		40.00 Dok				40.00 Dok	
		Box LD		12.00 Box				12.00 Box	
		Jumlah peserta sosialisasi dan penyuluhan produk-produk hukum daerah		1020.00 Org				1020.00 Org	
		Jumlah peserta sosialisasi dan penyuluhan produk-produk hukum pusat		1020.00 Org				1020.00 Org	
411.836	Pelayanan Keprotokolan	Pelayanan Keprotokolan Pejabat Daerah dan Pelayanan Tamu Kedinasan	Dalam Daerah, Luar Daerah	12.00 Bulan	129.898.000,00	DAU		12.00 Bulan	142.887.800,00
		Sosialisasi aturan pelayanan keprotokolan		84.00 Org				84.00 Org	
		Himpunan Naskah Sambutan		1.00 Dok				1.00 Dok	
411.837	Fasilitasi Tamu-tamu Daerah/ Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Penyediaan kebutuhan penerimaan tamu-tamu daerah	Kabupaten Purworejo	12.00 Bulan	1.718.448.000,00	DAU		12.00 Bulan	1.887.600.000,00
		jasa tenaga kerja perseorangan		3.00 Org				3.00 Org	
411.838	Pelayanan Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Penyediaan alat kebersihan dan bahan pembersih, gas, makan minum kada dan wakada	Kabupaten Purworejo	12.00 Bulan	631.284.000,00	DAU		12.00 Bulan	689.700.000,00
		jasa tenaga kerja perseorangan		7.00 Org				7.00 Org	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
411.839	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pakaian dinas Bupati/ Wakil Bupati dan kelengkapannya	Setda	28.00 Jenis	321.448.250,00	DAU		28.00 Jenis	353.593.075,00
411.840	Pelayanan Kesehatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Medical check up kesehatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kabupaten Purworejo	12.00 Bulan	30.000.000,00	DAU		12.00 Bulan	33.000.000,00
411.861	Dokumentasi dan Peliputan Kegiatan Daerah	Press release informasi kegiatan daerah	Kabupaten Purworejo	300.00 Kali	547.784.000,00	DAU		300.00 Kali	602.562.400,00
		Foto kegiatan		300.00 Lembar				300.00 Lembar	
		Majalah Kiprah		12000.00 Eksemplar				12000.00 Eksemplar	
		Dokumen RLPPD		500.00 Buku				500.00 Buku	
		Buku Potensi Daerah		100.00 Buku				100.00 Buku	
411.866	Analisa Media Massa	Dokumen analisis Pemberitaan di Media Massa	Kabupaten Purworejo	12.00 Dok	480.816.000,00	DAU		12.00 Dok	528.897.600,00
		Advertorial di media massa		5.00 Paket				5.00 Paket	
		media luar ruang		25.00 Paket				25.00 Paket	
		Spot iklan		4.00 Kali				4.00 Kali	
		CD dokumentasi profil daerah		70.00 Keping				70.00 Keping	
4.1.18.10 4	Bimtek dan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Operasional layanan pengadaan barang jasa secara elektronik	Dalam Daerah, Luar Daerah	12.00 Bulan	133.269.500,00	DAU		12.00 Bulan	146.596.450,00
		Meningkatnya Kinerja SDM Pengelola LPSE		50.00 Org				50.00 Org	
4.1.18.10 5	Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Operasional layanan pengadaan barang/jasa melalui UKPBJ	Setda	12.00 Bulan	288.540.000,00	DAU		12.00 Bulan	317.394.000,00
		Meningkatnya Pengetahuan Pokja UKPBJ		5.00 Org				5.00 Org	
4.1.18.10 6	Pelayanan Administrasi Bidang Otonomi Daerah	Laporan pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah	Dalam Daerah, Luar Daerah	5.00 Dok	321.609.000,00	DAU		5.00 Dok	353.769.900,00
		Dokumen inventarisasi pembakuan nama rupabumi/toponimi		1.00 Dok				1.00 Dok	
		Dokumen fasilitasi permasalahan tapal batas		1.00 Dok				1.00 Dok	
		Fasilitasi pelayanan administrasi pemerintahan		12.00 Bulan				12.00 Bulan	
4.1.18.10 7	Pengelolaan Kinerja Aparatur	Tersusunnya Dokumen LKJIP Daerah, PK Daerah dan RKT Daerah	Kabupaten Purworejo	3.00 Dok	230.000.000,00	DAU		3.00 Dok	253.000.000,00
		Dokumen Hasil Koordinasi Penerapan Reformasi Birokrasi		1.00 Dok				1.00 Dok	
4.1.18.10 8	Pengelolaan Ketatalaksanaan Dan Pelayanan Publik	Dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan tatalaksana	Kabupaten Purworejo	1.00 Dok	236.010.000,00	DAU		1.00 Dok	259.611.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Dokumen hasil survey kepuasan masyarakat		1.00 Dok				1.00 Dok	
		Pembinaan dan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik		42 OPD				42 OPD	
4.1.18.109	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	Bimbingan Teknis	Kabupaten Purworejo	1.00 Kali	51.449.000,00	DAU		1.00 Kali	56.593.900,00
		Pendampingan Proses Pengadaan Barang/Jasa		12.00 Bulan				12.00 Bulan	
4.1.19	Program Koordinasi Perangkat Daerah	Prosentase Jumlah Urusan Daerah yang dikoordinasikan		100.00 %	1.833.278.800,00			100.00 %	2.016.606.700,00
		Tingkat pelayanan pembentukan kerjasama daerah		100.00 %				100.00 %	
41.192	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan	Dokumen hasil koordinasi bidang keuangan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	Kabupaten Purworejo	1.00 Dok	209.410.000,00	DAU		1.00 Dok	230.351.000,00
41.194	Koordinasi Pengadaan Barang/ Jasa	Terlaksananya koordinasi/konsultasi Pengadaan Barang/Jasa	Kabupaten Purworejo	12.00 Bulan	40.000.000,00	DAU		12.00 Bulan	44.000.000,00
41.195	Koordinasi dan Konsultasi Bidang Kehumasan	Konsultasi dan Koordinasi Bidang Kehumasan	Kabupaten Purworejo	12.00 Bulan	99.331.000,00	DAU		12.00 Bulan	109.264.100,00
41.196	Koordinasi dan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional HAM	Dokumen Laporan RANHAM Kab. Purworejo	Kabupaten Purworejo	4.00 Dok	58.439.800,00	DAU		4.00 Dok	64.283.800,00
		Data untuk penilaian Kabupaten/Kota peduli HAM		1.00 Kali				1.00 Kali	
41.197	Koordinasi Bidang Organisasi dan Aparatur	Dokumen hasil koordinasi	Kabupaten Purworejo	1.00 Dok	66.682.000,00	DAU	Hibah uang di PPKAD untuk KORPRI sebesar Rp.100.000.000	1.00 Dok	73.350.200,00
41.198	Koordinasi Peningkatan Prasarana Perekonomian Daerah	Dokumen hasil koordinasi Peningkatan Prasarana Perekonomian Daerah	Kabupaten Purworejo	1.00 Dok	116.165.000,00	DAU		1.00 Dok	127.781.500,00
41.199	Koordinasi Pengembangan Usaha Daerah	Dokumen hasil koordinasi Pengembangan Usaha Daerah	Kabupaten Purworejo	1.00 Dok	188.254.000,00	DAU		1.00 Dok	207.079.400,00
411.910	Koordinasi Pengembangan Perekonomian Rakyat	Dokumen hasil koordinasi Pengembangan Perekonomian Rakyat	Kabupaten Purworejo	1.00 Dok	274.064.000,00	DAU		1.00 Dok	301.470.400,00
411.912	Koordinasi dan Fasilitasi Sosial kemasyarakatan	Dokumen hasil koordinasi Bidang Sosial Kemasyarakatan dan Tenaga Kerja dan Fasilitasi Bidang Pendidikan, Olah raga, Kebudayaan, Pariwisata, KB, Naker, Perlindungan Anak, Kepemudaan, Sosial Kemasyarakatan, Transmigrasi	Kabupaten Purworejo	11.00 Dok	313.826.000,00	DAU		11.00 Dok	345.208.600,00
411.913	Koordinasi, Konsultasi dan Mediasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Penyusunan Kode dan data wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Purworejo	Kabupaten Purworejo	1.00 Dok	340.000.000,00	DAU		1.00 Dok	374.000.000,00
		Monev PATEN		16.00 Lokasi				16.00 Lokasi	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Rakor Camat		3.00 Kali				3.00 Kali	
		P3D		2.00 Dok				2.00 Dok	
411.916	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Dokumen hasil fasilitasi kerjasama daerah	Kabupaten Purworejo, Luar Daerah	1.00 Dok	127.107.000,00	DAU		1.00 Dok	139.817.700,00

Nama Perangkat Daerah : SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	TOTAL				24.822.970.480,00				27.660.828.793,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang								
41	Administrasi Pemerintahan				24.822.970.480,00				27.660.828.793,00
411	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran		100.00 %	1.265.737.500,00			100.00 %	1.329.024.375,00
41.126	Pengelolaan Surat-menyurat dan Kearsipan	Layanan surat-menyurat dan kearsipan	Setwan	12.00 Bulan	131.957.100,00	DAU		12.00 Bulan	138.554.955,00
41.127	Penyediaan Layanan Komunikasi, Informasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Layanan komunikasi, informasi, sumber daya air dan listrik	Setwan	12.00 Bulan	229.041.000,00	DAU		12.00 Bulan	240.493.050,00
41.128	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Layanan kebersihan kantor	Setwan	12.00 Bulan	94.491.600,00	DAU		12.00 Bulan	99.216.180,00
41.129	Koordinasi dan Konsultasi Internal dan Eksternal	Layanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Setwan, Dalam Daerah, Luar Daerah	12.00 Bulan	550.759.800,00	DAU		12.00 Bulan	578.297.790,00
41.130	Pengelolaan Keamanan Kantor	Layanan Keamanan Kantor	Setwan	12.00 Bulan	259.488.000,00	DAU		12.00 Bulan	272.462.400,00
412	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Berfungsi Dengan Baik		100.00 %	880.905.200,00			100.00 %	2.721.408.265,00
4.125	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas/operasional yang diadakan	Setwan	2.00 unit	57.461.000,00	DAU		2.00 unit	2.000.000.000,00
41.221	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala	Setwan	1.00 Unit/Th	46.489.600,00	DAU		1.00 Unit/Th	67.271.904,00
41.222	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	Setwan	1.00 Unit/Th	58.741.800,00	DAU		1.00 Unit/Th	67.271.904,00
41.224	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	Setwan	29.00 Unit/Th	501.744.000,00	DAU		29.00 Unit/Th	359.572.217,00
41.247	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	Setwan	6.00 Unit	169.188.600,00	DAU		6.00 Unit	177.648.030,00
41.249	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara rutin/berkala	Setwan	9.00 Unit/Th	47.280.200,00	DAU		9.00 Unit/Th	49.644.210,00
416	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase sistem Capaian kinerja dan Keuangan		100.00 %	44.267.500,00			100.00 %	52.469.634,00
4.165	Penyusunan Pelaporan Keuangan	Dokumen pelaporan keuangan	Setwan	7.00 Dok	21.667.000,00	DAU		7.00 Dok	16.370.670,00
4.166	Penyusunan Perencanaan Dan Evaluasi Pelaporan	Dokumen perencanaan dan evaluasi pelaporan	Setwan	5.00 Dok	22.600.500,00	DAU		5.00 Dok	36.098.964,00
4.1.20	Program Dukungan Penyelenggaraan Fungsi DPRD	Terwujudnya dukungan penyelenggaraan fungsi DPRD		100.00 %	22.632.060.280,00			100.00 %	23.557.926.519,00
41.201	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Ketetapan hasil pembahasan Raperda	Setwan	20.00 ketetapan	7.942.225.500,00	DAU		20.00 ketetapan	8.133.600.000,00
41.202	Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	Terselenggaranya hearing dialog/koordinasi	Setwan, Kab. Purworejo	16.00 Kali	4.110.908.800,00	DAU		16.00 Kali	4.316.454.240,00
41.203	Rapat -rapat alat kelengkapan dewan dan fraksi	Terselenggaranya rapat - rapat alat kelengkapan dewan	Setwan	50.00 Kali	208.893.800,00	DAU		50.00 Kali	219.338.490,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
41.206	Pelaksanaan pengawasan pembangunan	Terlaksananya pengawasan pembangunan dalam daerah	Setwan, Kab. Purworejo	12.00 Kali	70.012.000,00	DAU		12.00 Kali	73.512.600,00
41.207	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Kunjungan kerja; pendalaman tugas (workshop/diklat) anggota DPRD/setwan	Luar Daerah	6885.00 Org	8.553.656.580,00	DAU		6885.00 Org	8.981.339.409,00
412.010	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan DPRD	General chek up anggota DPRD beserta keluarganya	Setwan	180.00 Org	44.801.000,00	DAU		180.00 Org	47.041.050,00
412.011	Penerbitan buletin DPRD Kab.Purworejo	Majalah DPRD dan buku memori DPRD	Setwan	12.00 Kali	481.976.400,00	DAU		12.00 Kali	506.075.220,00
412.012	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pakaian dinas anggota DPRD (45 stel PSR, 90 stel PDH, 45 stel PSH)	Setwan	180.00 Stel	459.256.400,00	DAU		180.00 Stel	482.219.220,00
412.013	Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD	Pelayanan kerumah tanggaan Pimpinan DPRD serta jasa tenaga kerja perseorangan	Setwan	12.00 Bulan	760.329.800,00	DAU	Kebutuhan : Rp.1.143.969.800,-	12.00 Bulan	798.346.290,00

Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN GRABAG

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	TOTAL				844.085.000,00				928.493.500,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang								
41	Administrasi Pemerintahan				844.085.000,00				928.493.500,00
411	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran		100.00 %	145.727.800,00			100.00 %	160.300.580,00
41.126	Pengelolaan Surat-menyurat dan Kearsipan	Layanan surat menyurat dan kearsipan	Kecamatan Grabag	12.00 Bulan	37.166.800,00	DAU		12.00 Bulan	40.883.480,00
41.127	Penyediaan Layanan Komunikasi, Informasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Layanan komunikasi, informasi, sumberdaya air dan listrik	Kecamatan Grabag	12.00 Bulan	26.160.000,00	DAU		12.00 Bulan	28.776.000,00
41.128	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Layanan kebersihan kantor	Kecamatan Grabag	12.00 Bulan	29.824.000,00	DAU		12.00 Bulan	32.806.400,00
41.129	Koordinasi dan Konsultasi Internal dan Eksternal	Layanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Kecamatan Grabag, Dalam Daerah, Luar Daerah	12.00 Bulan	52.577.000,00	DAU		12.00 Bulan	57.834.700,00
412	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Berfungsi Dengan Baik		100.00 %	212.254.300,00			100.00 %	233.479.730,00
41.222	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	Kecamatan Grabag	1.00 Unit/Th	95.472.000,00	DAU		1.00 Unit/Th	105.019.200,00
41.224	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	Kecamatan Grabag	9.00 Unit/Th	31.368.600,00	DAU		9.00 Unit/Th	34.505.460,00
41.247	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	Kecamatan Grabag	12.00 Unit	50.004.700,00	DAU		12.00 Unit	55.005.170,00
41.249	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara rutin/berkala	Kecamatan Grabag	20.00 Unit/Th	35.409.000,00	DAU		28.00 Unit/Th	38.949.900,00
415	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur		100.00 %	2.795.500,00			100.00 %	3.075.050,00
4.157	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	Aparatur yang meningkat kualifikasi, kapasitas dan kinerjanya	Kecamatan Grabag	30.00 Org	2.795.500,00	DAU		30.00 Org	3.075.050,00
416	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100.00 %	19.755.000,00			100.00 %	21.730.500,00
4.165	Penyusunan Pelaporan Keuangan	Dokumen pelaporan keuangan	Kecamatan Grabag	14 Dok	8.000.000,00	DAU		14 Dok	8.800.000,00
4.166	Penyusunan Perencanaan Dan Evaluasi Pelaporan	Dokumen perencanaan dan evaluasi pelaporan	Kecamatan Grabag	38 Dok	11.755.000,00	DAU		38 Dok	12.930.500,00
417	Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Prosentase Tersedianyan Data Dasar Pembangunan		100.00 %	12.140.000,00			100.00 %	13.354.000,00
4.171	Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Data dasar pembangunan	Kecamatan Grabag	1.00 Dok	12.140.000,00	DAU		1.00 Dok	13.354.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.1.21	Program Koordinasi Tingkat Kecamatan	Capaian penyelesaian permasalahan bidang pemerintahan		100.00 %	375.005.400,00			100.00 %	412.505.940,00
		Capaian penyelesaian permasalahan bidang pemberdayaan masyarakat		100.00 %				100.00 %	
		Capaian penyelesaian permasalahan bidang pembangunan		100.00 %				100.00 %	
		Capaian penyelesaian permasalahan bidang tramtibum		100.00 %				100.00 %	
		Capaian penyelesaian permasalahan bidang kemasyarakatan		100.00 %				100.00 %	
41.211	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemerintahan	Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan	Kecamatan Grabag	9.00 Dok	202.818.400,00	DAU		9.00 Dok	223.100.240,00
41.212	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pembangunan	Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan	Kecamatan Grabag	4.00 Dok	47.255.000,00	DAU		4.00 Dok	51.980.500,00
41.213	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat	Kecamatan Grabag	2.00 Dok	47.000.000,00	DAU		2.00 Dok	51.700.000,00
41.214	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban umum	Kecamatan Grabag	5.00 Dok	42.000.000,00	DAU		5.00 Dok	46.200.000,00
41.215	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Kemasyarakatan	Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang kemasyarakatan	Kecamatan Grabag	4.00 Dok	35.932.000,00	DAU		4.00 Dok	39.525.200,00
4.1.22	Program Pembinaan Desa/Kelurahan	Cakupan jumlah desa / kelurahan yang terbina		100.00 %	62.971.000,00			100.00 %	69.268.100,00
41.222	Pembinaan Desa/ Kelurahan Bidang Pembangunan	Desa/kelurahan yang dibina dalam pelaksanaan pembangunan di wilayahnya	Kecamatan Grabag	32.00 Desa	55.825.000,00	DAU		32.00 Desa	61.407.500,00
4.1.22.15 8	Pembinaan desa/kelurahan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan	Desa/kelurahan yang dibina dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan	Kecamatan Grabag	32.00 Desa	7.146.000,00	DAU		32.00 Desa	7.860.600,00
4.1.23	Program Pelayanan Masyarakat	Prosentase jumlah permohonan pelayanan yang terlayani		100.00 %	13.436.000,00			100.00 %	14.779.600,00
41.231	Pelayanan Terpadu Kecamatan	Layanan PATEN	Kecamatan Grabag	12.00 Bulan	13.436.000,00	DAU		12.00 Bulan	14.779.600,00

Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN NGOMBOL

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	TOTAL				791.450.400,00				870.595.440,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang								
41	Administrasi Pemerintahan								
411	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran		100.00 %	153.169.400,00			100.00 %	168.486.340,00
41.126	Pengelolaan Surat-menyurat dan Kearsipan	Layanan surat-menyurat dan kearsipan	Kecamatan Ngombol	12.00 Bulan	30.457.800,00	DAU		12.00 Bulan	33.503.580,00
41.127	Penyediaan Layanan Komunikasi, Informasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Layanan komunikasi, informasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Ngombol	12.00 Bulan	23.547.600,00	DAU		12.00 Bulan	25.902.360,00
41.128	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Layanan kebersihan kantor	Kecamatan Ngombol	12.00 Bulan	2.450.000,00	DAU		12.00 Bulan	2.695.000,00
41.129	Koordinasi dan Konsultasi Internal dan Eksternal	Layanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Kecamatan Ngombol, Dalam Daerah, Luar Daerah	12.00 Bulan	64.278.000,00	DAU		12.00 Bulan	70.705.800,00
41.130	Pengelolaan Keamanan Kantor	Layanan Keamanan Kantor	Kecamatan Ngombol	12.00 Bulan	32.436.000,00	DAU		12.00 Bulan	35.679.600,00
412	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana dan Prasarana yang berfungsi dengan baik		100.00 %	161.404.000,00			100.00 %	177.544.400,00
41.222	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	Kecamatan Ngombol	1 Unit/Th	66.300.000,00	DAU		1 Unit/Th	72.930.000,00
41.224	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	Kecamatan Ngombol	14 Unit/Th	50.300.000,00	DAU		14 Unit/Th	55.330.000,00
41.247	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	Kecamatan Ngombol	6 unit	33.739.000,00	DAU		6 unit	37.112.900,00
41.249	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara rutin/berkala	Kecamatan Ngombol	21 Unit/Th	11.065.000,00	DAU		21 Unit/Th	12.171.500,00
416	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase sistem Capaian kinerja dan Keuangan		100.00 %	16.401.000,00			100.00 %	18.041.100,00
4.165	Penyusunan Pelaporan Keuangan	Dokumen pelaporan keuangan	Kecamatan Ngombol	14.00 Dok	8.000.000,00	DAU		14.00 Dok	8.800.000,00
4.166	Penyusunan Perencanaan Dan Evaluasi Pelaporan	Dokumen perencanaan dan evaluasi pelaporan	Kecamatan Ngombol	38.00 Dok	8.401.000,00	DAU		38.00 Dok	9.241.100,00
417	Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Prosentase tersedianya data dasar pembangunan		100.00 %	7.500.000,00			100.00 %	8.250.000,00
4.171	Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Dokumen data dasar pembangunan	Kecamatan Ngombol	1.00 Dok	7.500.000,00	DAU		1.00 Dok	8.250.000,00
4.1.21	Program Koordinasi Tingkat Kecamatan	Capaian penyelesaian permasalahan bidang pemerintahan		100.00 %	359.320.000,00			100.00 %	395.252.000,00
		Capaian penyelesaian permasalahan bidang pemberdayaan masyarakat							

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Capaian penyelesaian permasalahan bidang pembangunan							
		Capaian penyelesaian permasalahan bidang tramtibum							
		Capaian penyelesaian permasalahan bidang kemasyarakatan							
41.211	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemerintahan	Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan	Kecamatan Ngombol	7 Dok	138.671.000,00	DAU		6 Dok	152.538.100,00
41.212	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pembangunan	Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan	Kecamatan Ngombol	1 Dok	20.135.000,00	DAU		1 Dok	22.148.500,00
41.213	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat	Kecamatan Ngombol	4 Dok	87.364.000,00	DAU		4 Dok	96.100.400,00
41.214	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban umum	Kecamatan Ngombol	4 Dok	57.812.000,00	DAU		4 Dok	63.593.200,00
41.215	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Kemasyarakatan	Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang kemasyarakatan	Kecamatan Ngombol	4 Dok	55.338.000,00	DAU		4 Dok	60.871.800,00
4.1.22	Program Pembinaan Desa/Kelurahan	cakupan jumlah desa/ kelurahan yang terbina		100.00 %	85.556.000,00			100.00 %	94.111.600,00
4.1.22.15 7	Pembinaan Pelaksanaan Pembangunan Desa/Kelurahan	Desa/kelurahan yang dibina dalam pelaksanaan pembangunan di wilayahnya	Kecamatan Ngombol	57 Desa	73.277.000,00	DAU		57 Desa	80.604.700,00
4.1.22.15 8	Pembinaan desa/kelurahan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan	Desa/kelurahan yang dibina dalam penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan	Kecamatan Ngombol	57 Desa	12.279.000,00	DAU		57 Desa	13.506.900,00
4.1.23	Program Pelayanan Masyarakat	Prosentase Permohonan pelayanan yang terlayani		100.00 %	8.100.000,00			100.00 %	8.910.000,00
41.231	Pelayanan Terpadu Kecamatan	Layanan PATEN	Kecamatan Ngombol	12 Bulan	8.100.000,00	DAU		12 Bulan	8.910.000,00

Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN PURWODADI

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	TOTAL				684.490.400,00				752.939.440,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang								
41	Administrasi Pemerintahan				684.490.400,00				752.939.440,00
411	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran		100.00 %	142.983.500,00			100.00 %	157.281.850,00
4.112	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Layanan komunikasi, informasi, sumberdaya air dan listrik	Kecamatan Purwodadi	12.00 Bulan	18.847.500,00	DAU		12.00 Bulan	20.732.250,00
41.120	Koordinasi dan Konsultasi Internal dan Eksternal	Layanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Kecamatan Purwodadi, Dalam Daerah dan Luar Daerah	12.00 Bulan	70.980.000,00	DAU		12.00 Bulan	78.078.000,00
41.126	Pengelolaan Surat-menyurat dan Kearsipan	Layanan surat-menyurat dan kearsipan	Kecamatan Purwodadi	12.00 Bulan	38.995.000,00	DAU		12.00 Bulan	42.894.500,00
41.128	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Layanan kebersihan kantor	Kecamatan Purwodadi	12.00 Bulan	14.161.000,00	DAU		12.00 Bulan	15.577.100,00
412	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan sarana prasarana aparatur yang berfungsi dengan baik		100.00 %	150.912.700,00			100.00 %	166.003.970,00
41.222	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	Kecamatan Purwodadi	2.00 Unit/Th	34.476.000,00	DAU		2.00 Unit/Th	37.923.600,00
41.224	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	Kecamatan Purwodadi	9.00 Unit/Th	32.000.000,00	DAU		9.00 Unit/Th	35.200.000,00
41.247	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	Kecamatan Purwodadi	42.00 unit	70.416.700,00	DAU		42.00 unit	77.458.370,00
41.249	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara rutin/berkala	Kecamatan Purwodadi	14.00 unit	14.020.000,00	DAU		14.00 unit	15.422.000,00
416	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase sistem Capaian kinerja dan Keuangan		100.00 %	13.929.200,00			100.00 %	15.322.120,00
4.165	Penyusunan Pelaporan Keuangan	Dokumen pelaporan keuangan	Kecamatan Purwodadi	16.00 Dok	5.779.200,00	DAU		16.00 Dok	6.357.120,00
4.166	Penyusunan Perencanaan Dan Evaluasi Pelaporan	Dokumen perencanaan dan evaluasi pelaporan	Kecamatan Purwodadi	38.00 Dok	8.150.000,00	DAU		38.00 Dok	8.965.000,00
417	Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Prosentase Tersedianya Data Dasar Pembangunan		100.00 %	6.371.000,00			100.00 %	7.008.100,00
4.171	Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Dokumen data dasar pembangunan	Kecamatan Purwodadi	2.00 Dok	6.371.000,00	DAU		2.00 Dok	7.008.100,00
4.1.21	Program Koordinasi Tingkat Kecamatan	Capaian penyelesaian permasalahan bidang pemerintahan		100.00 %	298.493.500,00			100.00 %	328.342.850,00
		Capaian penyelesaian permasalahan bidang pemberdayaan masyarakat							
		Capaian penyelesaian permasalahan bidang pembangunan							

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Capaian penyelesaian permasalahan bidang tramtibum							
		Capaian penyelesaian permasalahan bidang kemasyarakatan							
41.211	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemerintahan	Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan	Kecamatan Purwodadi	6.00 Dok	101.334.000,00	DAU		6.00 Dok	111.467.400,00
41.212	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pembangunan	Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan	Kecamatan Purwodadi	4.00 Dok	30.669.500,00	DAU		4.00 Dok	33.736.450,00
41.213	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Purwodadi	6.00 Dok	76.740.000,00	DAU		6.00 Dok	84.414.000,00
41.214	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang Ketenteraman dan ketertiban umum	Kecamatan Purwodadi	4.00 Dok	50.750.000,00	DAU		4.00 Dok	55.825.000,00
41.215	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Kemasyarakatan	Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang kemasyarakatan	Kecamatan Purwodadi	5.00 Dok	39.000.000,00	DAU		5.00 Dok	42.900.000,00
4.1.22	Program Pembinaan Desa/Kelurahan	Cakupan jumlah Desa/Kelurahan yang terbina		100.00 %	64.300.500,00			100.00 %	70.730.550,00
4.1.22.15 7	Pembinaan Pelaksanaan Pembangunan Desa/Kelurahan	Desa/kelurahan yang dibina dalam pelaksanaan pembangunan di wilayahnya	Kecamatan Purwodadi	40.00 Desa	47.530.500,00	DAU		40.00 Desa	52.283.550,00
4.1.22.15 8	Pembinaan desa/kelurahan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan	Desa/kelurahan yang dibina dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan	Kecamatan Purwodadi	40.00 Desa	16.770.000,00	DAU		40.00 Desa	18.447.000,00
4.1.23	Program Pelayanan Masyarakat	Prosentase jumlah pemohon pelayanan yang terlayani		100.00 %	7.500.000,00			100.00 %	8.250.000,00
41.231	Pelayanan Terpadu Kecamatan	Layanan PATEN	Kecamatan Purwodadi	12.00 Bulan	7.500.000,00	DAU		12.00 Bulan	8.250.000,00

Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN BAGELEN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	TOTAL				613.469.400,00				674.816.340,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang								
41	Administrasi Pemerintahan				613.469.400,00				674.816.340,00
411	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase cakupan layanan administrasi perkantoran		100.00 %	129.379.900,00			100.00 %	142.317.890,00
41.126	Pengelolaan Surat-menyurat dan Kearsipan	Layanan surat-menyurat dan kearsipan	Kecamatan Bagelen	12.00 Bulan	27.187.900,00	DAU		12.00 Bulan	29.906.690,00
41.127	Penyediaan Layanan Komunikasi, Informasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Layanan komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Bagelen	12.00 Bulan	21.594.500,00	DAU		12.00 Bulan	23.753.950,00
41.128	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Layanan kebersihan kantor	Kecamatan Bagelen	12.00 Bulan	13.512.000,00	DAU		12.00 Bulan	14.863.200,00
41.129	Koordinasi dan Konsultasi Internal dan Eksternal	Layanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Kecamatan Bagelen Dalam Daerah, Luar Daerah	12.00 Bulan	56.885.500,00	DAU		12.00 Bulan	62.574.050,00
41.130	Pengelolaan Keamanan Kantor	Layanan keamanan kantor	Kecamatan Bagelen	12.00 Bulan	10.200.000,00	DAU		12.00 Bulan	11.220.000,00
412	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Berfungsi Dengan Baik		100.00 %	133.087.600,00			100.00 %	146.396.360,00
41.222	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	Kecamatan Bagelen	1.00 Unit/Th	12.729.600,00	DAU		1.00 Unit/Th	14.002.560,00
41.224	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	Kecamatan Bagelen	10.00 Unit/Th	48.850.000,00	DAU		10.00 Unit/Th	53.735.000,00
41.228	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara rutin/berkala	Kecamatan Bagelen	13.00 Unit/Th	9.017.000,00	DAU		13.00 Unit/Th	9.918.700,00
41.247	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	Kecamatan Bagelen	11.00 unit	62.491.000,00	DAU		11.00 unit	68.740.100,00
416	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase sistem Capaian kinerja dan Keuangan		100.00 %	30.402.000,00			100.00 %	33.442.200,00
4.165	Penyusunan Pelaporan Keuangan	Dokumen pelaporan keuangan	Kecamatan Bagelen	19.00 Dok	6.631.000,00	DAU		19.00 Dok	7.294.100,00
4.166	Penyusunan Perencanaan Dan Evaluasi Pelaporan	Dokumen perencanaan dan evaluasi pelaporan	Kecamatan Bagelen	7.00 Dok	23.771.000,00	DAU		7.00 Dok	26.148.100,00
417	Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Prosentase tersedianya data dasar pembangunan		100.00 %	9.090.900,00			100.00 %	9.999.990,00
4.171	Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Dokumen data dasar pembangunan	Kecamatan Bagelen	1.00 Dok	9.090.900,00	DAU		1.00 Dok	9.999.990,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.1.21	Program Koordinasi Tingkat Kecamatan	Capaian penyelesaian permasalahan bidang pemerintahan		100.00 %	281.757.000,00			100.00 %	309.932.700,00
		Capaian penyelesaian permasalahan bidang pemberdayaan masyarakat		100.00 %				100.00 %	
		Capaian penyelesaian permasalahan bidang pembangunan		100.00 %				100.00 %	
		Capaian penyelesaian permasalahan bidang tramtibum		100.00 %				100.00 %	
		Capaian penyelesaian permasalahan bidang kemasyarakatan		100.00 %				100.00 %	
41.211	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemerintahan	Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan	Kecamatan Bagelen	11.00 Dok	85.883.000,00	DAU		11.00 Dok	94.471.300,00
41.212	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pembangunan	Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan	Kecamatan Bagelen	5.00 Dok	78.547.000,00	DAU		5.00 Dok	86.401.700,00
41.213	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Bagelen	2.00 Dok	50.000.000,00	DAU		2.00 Dok	55.000.000,00
41.214	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang Ketentraman dan ketertiban umum	Kecamatan Bagelen	3.00 Dok	34.331.000,00	DAU		3.00 Dok	37.764.100,00
41.215	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Kemasyarakatan	Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang kemasyarakatan	Kecamatan Bagelen	3.00 Dok	32.996.000,00	DAU		3.00 Dok	36.295.600,00
4.1.22	Program Pembinaan Desa/Kelurahan	Cakupan Jumlah Desa/Kel. yang Terbina		100.00 %	24.197.000,00			100.00 %	26.616.700,00
41.222	Pembinaan Desa/ Kelurahan Bidang Pembangunan	Kapasitas desa/kel bidang pembangunan yang meningkat dlm 2 jenis	Kecamatan Bagelen	17.00 Desa	12.099.000,00	DAU		17.00 Desa	13.308.900,00
41.226	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kecamatan	Cakupan desa dengan penduduk miskin yang meningkat kapasitasnya	Kecamatan Bagelen	17.00 Desa	12.098.000,00	DAU		17.00 Desa	13.307.800,00
4.1.23	Program Pelayanan Masyarakat	Prosentase jumlah permohonan pelayanan yang terlayani		100.00 %	5.555.000,00			100.00 %	6.110.500,00
41.231	Pelayanan Terpadu Kecamatan	Permohonan Pelayanan Pada 11 jenis pelayanan terlayani	Kecamatan Bagelen	12 Bulan	5.555.000,00	DAU		12 Bulan	6.110.500,00

Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN KALIGESING

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	TOTAL				746.030.800,00				820.633.880,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang								
41	Administrasi Pemerintahan				746.030.800,00				820.633.880,00
411	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran		100.00 %	143.467.000,00			100.00 %	157.813.700,00
41.126	Pengelolaan Surat-menyurat dan Kearsipan	Layanan surat-menyurat dan kearsipan	Kecamatan Kaligesing	12.00 Bulan	24.260.000,00	DAU		12.00 Bulan	26.686.000,00
41.127	Penyediaan Layanan Komunikasi, Informasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Layanan komunikasi, informasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Kaligesing	12.00 Bulan	36.700.000,00	DAU		12.00 Bulan	40.370.000,00
41.128	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Layanan kebersihan kantor	Kecamatan Kaligesing	12.00 Bulan	19.012.000,00	DAU		12.00 Bulan	20.913.200,00
41.129	Koordinasi dan Konsultasi Internal dan Eksternal	Layanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Kecamatan Kaligesing, Dalam Daerah Luar Daerah	12.00 Bulan	63.495.000,00	DAU		12.00 Bulan	69.844.500,00
412	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Berfungsi Dengan Baik		100.00 %	243.696.100,00			100.00 %	268.065.710,00
4.129	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	Kecamatan Kaligesing	16.00 unit	117.464.000,00	DAU		15.00 unit	129.210.400,00
41.222	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	Kecamatan Kaligesing	1.00 Unit/Th	15.569.500,00	DAU		1.00 Unit/Th	17.126.450,00
41.224	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	Kecamatan Kaligesing	7.00 Unit/Th	34.750.000,00	DAU		7.00 Unit/Th	38.225.000,00
41.228	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara rutin/berkala	Kecamatan Kaligesing	11.00 Unit/Th	10.275.600,00	DAU		11.00 Unit/Th	11.303.160,00
41.242	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat	Kecamatan Kaligesing	1.00 unit	65.637.000,00	DAU		1.00 unit	72.200.700,00
415	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur		100.00 %	2.764.100,00			100.00 %	3.040.510,00
4.157	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	Aparatur yang meningkatkan kualifikasi, kapasitas dan kinerjanya	Kecamatan Kaligesing	1.00 Org	2.764.100,00	DAU		1.00 Org	3.040.510,00
416	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100.00 %	18.130.200,00			100.00 %	19.943.220,00
4.165	Penyusunan Pelaporan Keuangan	Dokumen pelaporan keuangan	Kecamatan Kaligesing	19.00 Dok	6.149.500,00	DAU		19.00 Dok	6.764.450,00
4.166	Penyusunan Perencanaan Dan Evaluasi Pelaporan	Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan	Kecamatan Kaligesing	9.00 Dok	11.980.700,00	DAU		9.00 Dok	13.178.770,00
417	Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Prosentase Ketersediaan Data		100.00 %	11.248.800,00			100.00 %	12.373.680,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.171	Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Dokumen data dasar pembangunan	Kecamatan Kaligesing	1.00 Dok	11.248.800,00	DAU		1.00 Dok	12.373.680,00
4.1.21	Program Koordinasi Tingkat Kecamatan	Capaian penyelesaian permasalahan bidang pemerintahan		100.00 %	275.418.800,00			100.00 %	302.960.680,00
		Capaian penyelesaian permasalahan bidang pemberdayaan masyarakat		100.00 %				100.00 %	
		Capaian penyelesaian permasalahan bidang pembangunan		100.00 %				100.00 %	
		Capaian penyelesaian permasalahan bidang tramtibum		100.00 %				100.00 %	
41.211	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemerintahan	Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan	Kecamatan Kaligesing	7.00 Dok	95.107.600,00	DAU		7.00 Dok	104.618.360,00
41.212	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pembangunan	Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan	Kecamatan Kaligesing	7.00 Dok	50.975.100,00	DAU		7.00 Dok	56.072.610,00
41.213	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Kaligesing	8.00 Dok	89.312.200,00	DAU		8.00 Dok	98.243.420,00
41.214	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang Ketentraman dan ketertiban umum	Kecamatan Kaligesing	4.00 Dok	40.023.900,00	DAU		4.00 Dok	44.026.290,00
4.1.22	Program Pembinaan Desa/Kelurahan	Cakupan jumlah Desa/Kelurahan yang terbina		100.00 %	45.969.800,00			100.00 %	50.566.780,00
4.1.22.15 7	Pembinaan Pelaksanaan Pembangunan Desa/Kelurahan	Desa/kelurahan yang dibina dalam pelaksanaan pembangunan di wilayahnya	Kecamatan Kaligesing	21 Desa	34.726.000,00	DAU		21 Desa	38.198.600,00
4.1.22.15 8	Pembinaan desa/kelurahan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan	Desa/kelurahan yang dibina dalam penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan	Kecamatan Kaligesing	21 Desa	11.243.800,00	DAU		21 Desa	12.368.180,00
4.1.23	Program Pelayanan Masyarakat	Prosentase jumlah permohonan pelayanan yang tertangani		100.00 %	5.336.000,00			100.00 %	5.869.600,00
41.231	Pelayanan Terpadu Kecamatan	Prosentase cakupan layanan administrasi perkantoran	Kecamatan Kaligesing	12 Bulan	5.336.000,00	DAU		12 Bulan	5.869.600,00

Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN PURWOREJO

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	TOTAL				17.299.566.000,00				18.794.990.940,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang								
41	Administrasi Pemerintahan				17.299.566.000,00				18.794.990.940,00
411	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran		100.00 %	157.693.800,00			100.00 %	173.463.180,00
41.126	Pengelolaan Surat-menyurat dan Kearsipan	Layanan surat menyurat dan kearsipan	Kecamatan Purworejo	12 Bulan	27.644.000,00	DAU		12 Bulan	30.408.400,00
41.127	Penyediaan Layanan Komunikasi, Informasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Layanan komunikasi, informasi, sumberdaya air dan listrik	Kecamatan Purworejo	12 Bulan	22.992.800,00	DAU		12 Bulan	25.292.080,00
41.128	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Layanan kebersihan kantor	Kecamatan Purworejo	12 Bulan	16.412.000,00	DAU		12 Bulan	18.053.200,00
41.129	Koordinasi dan Konsultasi Internal dan Eksternal	Layanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Kecamatan Purworejo, Dalam Daerah, Luar Daerah	12 Bulan	70.245.000,00	DAU		12 Bulan	77.269.500,00
41.130	Pengelolaan Keamanan Kantor	Layanan Keamanan Kantor	Kecamatan Purworejo	12 Bulan	20.400.000,00	DAU		12 Bulan	22.440.000,00
412	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan sarana prasarana aparatur yang berfungsi dengan baik		100.00 %	290.468.400,00			100.00 %	287.426.040,00
4.123	Pembangunan Gedung Kantor	Gedung kantor yang dibangun	Kecamatan Purworejo	1 unit	125.000.000,00	DAU		1 unit	137.500.000,00
41.224	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	Kecamatan Purworejo	41 unit/tahun	43.412.000,00	DAU		41 unit/tahun	47.753.200,00
41.228	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara rutin/berkala	Kecamatan Purworejo	100 unit	20.810.000,00	DAU		100 unit	22.891.000,00
41.247	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	Kecamatan Purworejo	27 unit	72.074.400,00	DAU		27 unit	79.281.840,00
	Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	Kecamatan Purworejo	4 unit/tahun	29.172.000,00	DAU		4 unit/tahun	32.089.200,00
415	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur		100.00 %	8.852.300,00	DAU		100.00 %	9.737.530,00
4.157	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	Aparatur yang meningkat kualifikasi, kapasitas dan kinerjanya	Kecamatan Purworejo	100 orang	8.852.300,00	DAU		100 orang	9.737.530,00
416	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase capaian kinerja dan keuangan		100.00 %	34.292.600,00	DAU		100.00 %	37.721.860,00
4.165	Penyusunan Pelaporan Keuangan	Dokumen pelaporan keuangan	Kecamatan Purworejo	12 Dok	15.299.800,00	DAU		12 Dok	16.829.780,00
4.166	Penyusunan Perencanaan Dan Evaluasi Pelaporan	Dokumen perencanaan dan evaluasi pelaporan	Kecamatan Purworejo	5 Dok	18.992.800,00	DAU		5 Dok	20.892.080,00
417	Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Prosentase tersedianya data dasar pembangunan		100.00 %	11.399.200,00			100.00 %	12.539.120,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.171	Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Dokumen data dasar pembangunan	Kecamatan Purworejo	2 Dok	11.399.200,00	DAU		2 Dok	12.539.120,00
4.1.21	Program Koordinasi Tingkat Kecamatan	Capaian penyelesaian permasalahan bidang pemerintahan		100.00 %	367.723.700,00			100.00 %	202.053.610,00
		Capaian penyelesaian permasalahan bidang pemberdayaan masyarakat		100.00 %				100.00 %	
		Capaian penyelesaian permasalahan bidang pembangunan		100.00 %				100.00 %	
		Capaian penyelesaian permasalahan bidang tramtibum		100.00 %				100.00 %	
		Capaian penyelesaian permasalahan bidang kemasyarakatan		100.00 %				100.00 %	
41.211	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemerintahan	Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan	Kecamatan Purworejo	2 Dok	118.395.600,00	DAU		2 Dok	130.235.160,00
41.212	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pembangunan	Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan	Kecamatan Purworejo	1 Dok	75.375.000,00	DAU		1 Dok	82.912.500,00
41.213	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Purworejo	2 Dok	96.123.700,00	DAU		2 Dok	105.736.070,00
41.214	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang Ketentraman dan ketertiban umum	Kecamatan Purworejo	3 Dok	27.795.400,00	DAU		3 Dok	30.574.940,00
41.215	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Kemasyarakatan	Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang kemasyarakatan	Kecamatan Purworejo	5 Dok	50.034.000,00	DAU		5 Dok	55.037.400,00
4.1.22	Program Pembinaan Desa/Kelurahan	Cakupan jumlah Desa/Kelurahan yang terbina		100.00 %	16.415.136.000,00			100.00 %	18.056.649.600,00
412.226	Kegiatan Kel. Baledono	Aktivitas kelurahan 12 bulan lancar	Kelurahan Baledono	12 Bulan	278.224.000,00	DAU		12 Bulan	306.046.400,00
412.262	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kelurahan Baledono	Cakupan desa dengan penduduk miskin yang meningkat kapasitasnya	Kelurahan Baledono	100.00 %	35.000.000,00	DAU		100.00 %	38.500.000,00
412.289	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Baledono	Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Baledono	1 Kelurahan	622.059.000,00	DAU		1 Kelurahan	684.264.900,00
412.290	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Baledono (DAU Tambahan)	Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Baledono	1 Kelurahan	336.723.500,00	DAU		1 Kelurahan	370.395.850,00
412.291	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Baledono (DAU Tambahan)	Masyarakat Kelurahan Yang Diberdayakan	Kelurahan Baledono	1 Kelurahan	16.217.500,00	DAU		1 Kelurahan	17.839.250,00
412.221	Kegiatan Kel. Cangkrepidul	Aktivitas kelurahan 12 bulan lancar	Kelurahan Cangkrepidul	12 Bulan	152.224.000,00	DAU		12 Bulan	167.446.400,00
412.257	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kelurahan Cangkrepidul	Cakupan desa dengan penduduk miskin yang meningkat kapasitasnya	Kelurahan Cangkrepidul	100.00 %	25.000.000,00	DAU		100.00 %	27.500.000,00
412.274	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Cangkrepidul	Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Cangkrepidul	1 Kelurahan	622.059.000,00	DAU		1 Kelurahan	684.264.900,00
412.275	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Cangkrepidul (DAU Tambahan)	Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Cangkrepidul	1 Kelurahan	338.475.000,00	DAU		1 Kelurahan	372.322.500,00
412.276	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Cangkrepidul (DAU Tambahan)	Masyarakat Kelurahan Yang Diberdayakan	Kelurahan Cangkrepidul	1 Kelurahan	14.466.000,00	DAU		1 Kelurahan	15.912.600,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
412.222	Kegiatan Kel. Cangkreplor	Aktivitas kelurahan 12 bulan lancar	Kelurahan Cangkreplor	12 Bulan	176.224.000,00	DAU		12 Bulan	193.846.400,00
412.258	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kelurahan Cangkreplor	Cakupan desa dengan penduduk miskin yang meningkat kapasitasnya	Kelurahan Cangkreplor	100.00 %	25.000.000,00	DAU		100.00 %	27.500.000,00
412.277	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Cangkreplor	Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Cangkreplor	1 Kelurahan	622.059.000,00	DAU		1 Kelurahan	684.264.900,00
412.278	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Cangkreplor (DAU Tambahan)	Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Cangkreplor	1 Kelurahan	321.172.000,00	DAU		1 Kelurahan	353.289.200,00
412.279	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Cangkreplor (DAU Tambahan)	Masyarakat Kelurahan Yang Diberdayakan	Kelurahan Cangkreplor	1 Kelurahan	31.769.000,00	DAU		1 Kelurahan	34.945.900,00
412.233	Kegiatan Kel. Doplang	Aktivitas kelurahan 12 bulan lancar	Kelurahan Doplang	12 Bulan	152.224.000,00	DAU		12 Bulan	167.446.400,00
412.269	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kelurahan Doplang	Cakupan desa dengan penduduk miskin yang meningkat kapasitasnya	Kelurahan Doplang	100.00 %	25.000.000,00	DAU		100.00 %	27.500.000,00
4.1.22.110	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Doplang	Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Doplang	1 Kelurahan	622.059.000,00	DAU		1 Kelurahan	684.264.900,00
4.1.22.111	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Doplang (DAU Tambahan)	Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Doplang	1 Kelurahan	332.941.000,00	DAU		1 Kelurahan	366.235.100,00
4.1.22.112	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Doplang (DAU Tambahan)	Masyarakat Kelurahan Yang Diberdayakan	Kelurahan Doplang	1 Kelurahan	20.000.000,00	DAU		1 Kelurahan	22.000.000,00
412.230	Kegiatan Kel. Kedungsari	Aktivitas kelurahan 12 bulan lancar	Kelurahan Kedungsari	12 Bulan	131.224.000,00	DAU		12 Bulan	144.346.400,00
412.266	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kelurahan Kedungsari	Cakupan desa dengan penduduk miskin yang meningkat kapasitasnya	Kelurahan Kedungsari	100.00 %	25.000.000,00	DAU		100.00 %	27.500.000,00
4.1.22.101	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kedungsari	Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kedungsari	1 Kelurahan	622.059.000,00	DAU		1 Kelurahan	684.264.900,00
4.1.22.102	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kedungsari (DAU Tambahan)	Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kedungsari	1 Kelurahan	328.643.500,00	DAU		1 Kelurahan	361.507.850,00
412.285	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kedungsari (DAU Tambahan)	Masyarakat Kelurahan Yang Diberdayakan	Kelurahan Kedungsari	1 Kelurahan	24.297.500,00	DAU		1 Kelurahan	26.727.250,00
412.225	Kegiatan Kel. Keseneng	Aktivitas kelurahan 12 bulan lancar	Kelurahan Keseneng	12 Bulan	113.224.000,00	DAU		12 Bulan	124.546.400,00
412.261	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kelurahan Keseneng	Cakupan desa dengan penduduk miskin yang meningkat kapasitasnya	Kelurahan Keseneng	100.00 %	25.000.000,00	DAU		100.00 %	27.500.000,00
412.286	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Keseneng	Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Keseneng	1 Kelurahan	622.059.000,00	DAU		1 Kelurahan	684.264.900,00
412.287	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Keseneng (DAU Tambahan)	Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Keseneng	1 Kelurahan	335.000.000,00	DAU		1 Kelurahan	368.500.000,00
412.288	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Keseneng (DAU Tambahan)	Masyarakat Kelurahan Yang Diberdayakan	Kelurahan Keseneng	1 Kelurahan	17.941.000,00	DAU		1 Kelurahan	19.735.100,00
412.229	Kegiatan Kel. Mranti	Aktivitas kelurahan 12 bulan lancar	Kelurahan Mranti	12 Bulan	134.224.000,00	DAU		12 Bulan	147.646.400,00
412.265	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kelurahan Mranti	Cakupan desa dengan penduduk miskin yang meningkat kapasitasnya	Kelurahan Mranti	100.00 %	25.000.000,00	DAU		100.00 %	27.500.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
412.298	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mranti	Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Mranti	1 Kelurahan	622.059.000,00	DAU		1 Kelurahan	684.264.900,00
412.299	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mranti (DAU Tambahan)	Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Mranti	1 Kelurahan	337.941.000,00	DAU		1 Kelurahan	371.735.100,00
4.1.22.100	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mranti (DAU Tambahan)	Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Mranti	1 Kelurahan	15.000.000,00	DAU		1 Kelurahan	16.500.000,00
412.227	Kegiatan Kel. Mudal	Aktivitas kelurahan 12 bulan lancar	Kelurahan Mudal	12 Bulan	92.224.000,00	DAU		12 Bulan	101.446.400,00
412.263	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kelurahan Mudal	Cakupan desa dengan penduduk miskin yang meningkat kapasitasnya	Kelurahan Mudal	100.00 %	25.000.000,00	DAU		100.00 %	27.500.000,00
412.292	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mudal	Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Mudal	1 Kelurahan	622.059.000,00	DAU		1 Kelurahan	684.264.900,00
412.293	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mudal (DAU Tambahan)	Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Mudal	1 Kelurahan	340.230.000,00	DAU		1 Kelurahan	374.253.000,00
412.294	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mudal (DAU Tambahan)	Masyarakat Kelurahan Yang Diberdayakan	Kelurahan Mudal	1 Kelurahan	12.711.000,00	DAU		1 Kelurahan	13.982.100,00
412.228	Kegiatan Kel. Paduroso	Aktivitas kelurahan 12 bulan lancar	Kelurahan Paduroso	12 Bulan	86.224.000,00	DAU		12 Bulan	94.846.400,00
412.264	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kelurahan Paduroso	Cakupan desa dengan penduduk miskin yang meningkat kapasitasnya	Kelurahan Paduroso	100.00 %	25.000.000,00	DAU		100.00 %	27.500.000,00
412.295	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Paduroso	Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Paduroso	1 Kelurahan	622.059.000,00	DAU		1 Kelurahan	684.264.900,00
412.296	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Paduroso (DAU Tambahan)	Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Paduroso	1 Kelurahan	337.645.000,00	DAU		1 Kelurahan	371.409.500,00
412.297	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Paduroso (DAU Tambahan)	Masyarakat Kelurahan Yang Diberdayakan	Kelurahan Paduroso	1 Kelurahan	15.296.000,00	DAU		1 Kelurahan	16.825.600,00
412.232	Kegiatan Kel. Pangenjurutengah	Aktivitas kelurahan 12 bulan lancar	Kelurahan Pangenjurutengah	12 Bulan	197.224.000,00	DAU		12 Bulan	216.946.400,00
412.268	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kelurahan Pangenjurutengah	Cakupan desa dengan penduduk miskin yang meningkat kapasitasnya	Kelurahan Pangenjurutengah	100.00 %	25.000.000,00	DAU		100.00 %	27.500.000,00
4.1.22.107	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pangenjurutengah	Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Pangenjurutengah	1 Kelurahan	622.059.000,00	DAU		1 Kelurahan	684.264.900,00
4.1.22.108	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pangenjurutengah (DAU Tambahan)	Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Pangenjurutengah	1 Kelurahan	296.508.000,00	DAU		1 Kelurahan	326.158.800,00
4.1.22.109	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pangenjurutengah (DAU Tambahan)	Masyarakat Kelurahan Yang Diberdayakan	Kelurahan Pangenjurutengah	1 Kelurahan	56.433.000,00	DAU		1 Kelurahan	62.076.300,00
412.224	Kegiatan Kel. Pangenrejo	Aktivitas kelurahan 12 bulan lancar	Kelurahan Pangenrejo	12 Bulan	140.224.000,00	DAU		12 Bulan	154.246.400,00
412.260	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kelurahan Pangenrejo	Cakupan desa dengan penduduk miskin yang meningkat kapasitasnya	Kelurahan Pangenrejo	100.00 %	25.000.000,00	DAU		100.00 %	27.500.000,00
412.283	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pangenrejo	Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Pangenrejo	1 Kelurahan	622.059.000,00	DAU		1 Kelurahan	684.264.900,00
412.284	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pangenrejo (DAU Tambahan)	Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Pangenrejo	1 Kelurahan	323.930.000,00	DAU		1 Kelurahan	356.323.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
412.285	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pangenrejo (DAU Tambahan)	Masyarakat Kelurahan Yang Diberdayakan	Kelurahan Pangenrejo	1 Kelurahan	29.011.000,00	DAU		1 Kelurahan	31.912.100,00
412.231	Kegiatan Kel. Purworejo	Aktivitas kelurahan 12 bulan lancar	Kelurahan Purworejo	12 Bulan	359.224.000,00	DAU		12 Bulan	395.146.400,00
412.267	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kelurahan Purworejo	Cakupan desa dengan penduduk miskin yang meningkat kapasitasnya	Kelurahan Purworejo	100.00 %	35.000.000,00	DAU		100.00 %	38.500.000,00
4.1.22.10 4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Purworejo	Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Purworejo	1 Kelurahan	622.059.000,00	DAU		1 Kelurahan	684.264.900,00
4.1.22.10 5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Purworejo (DAU Tambahan)	Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Purworejo	1 Kelurahan	277.348.400,00	DAU		1 Kelurahan	305.083.240,00
4.1.22.10 6	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Purworejo (DAU Tambahan)	Masyarakat Kelurahan Yang Diberdayakan	Kelurahan Purworejo	1 Kelurahan	75.592.600,00	DAU		1 Kelurahan	83.151.860,00
412.223	Kegiatan Kel. Sindurjan	Aktivitas kelurahan 12 bulan lancar	Kelurahan Sindurjan	12 Bulan	194.224.000,00	DAU		12 Bulan	213.646.400,00
412.259	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kelurahan Sindurjan	Cakupan desa dengan penduduk miskin yang meningkat kapasitasnya	Kelurahan Sindurjan	100.00 %	25.000.000,00	DAU		100.00 %	27.500.000,00
412.285	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sindurjan (DAU Tambahan)	Masyarakat Kelurahan Yang Diberdayakan	Kelurahan Sindurjan	1 Kelurahan	15.000.000,00	DAU		1 Kelurahan	16.500.000,00
412.280	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sindurjan	Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Sindurjan	1 Kelurahan	622.059.000,00	DAU		1 Kelurahan	684.264.900,00
412.281	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sindurjan (DAU Tambahan)	Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Sindurjan	1 Kelurahan	337.941.000,00	DAU		1 Kelurahan	371.735.100,00
412.234	Kegiatan Kel. Tambakrejo	Aktivitas kelurahan 12 bulan lancar	Kelurahan Tambakrejo	12 Bulan	188.224.000,00	DAU		12 Bulan	207.046.400,00
412.270	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kelurahan Tambakrejo	Cakupan desa dengan penduduk miskin yang meningkat kapasitasnya	Kelurahan Tambakrejo	100.00 %	25.000.000,00	DAU		100.00 %	27.500.000,00
412.270	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tambakrejo (DAU Tambahan)	Masyarakat Kelurahan Yang Diberdayakan	Kelurahan Tambakrejo	1 Kelurahan	70.000.000,00	DAU		1 Kelurahan	77.000.000,00
412.270	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tambakrejo	Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Tambakrejo	1 Kelurahan	622.059.000,00	DAU		1 Kelurahan	684.264.900,00
412.270	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tambakrejo (DAU Tambahan)	Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Tambakrejo	1 Kelurahan	282.941.000,00	DAU		1 Kelurahan	311.235.100,00
4.1.23	Program Pelayanan Masyarakat	Prosentase jumlah permohonan pelayanan yang tertangani		100.00 %	14.000.000,00			100.00 %	15.400.000,00
41.231	Pelayanan Terpadu Kecamatan	Layanan PATEN	Kecamatan Purworejo	12 Bulan	14.000.000,00	DAU		12 Bulan	15.400.000,00

Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN BANYUURIP

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	TOTAL				4.148.092.000,00				4.977.710.400,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang								
41	Administrasi Pemerintahan				4.148.092.000,00				4.977.710.400,00
411	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran		100.00 %	159.459.000,00			100.00 %	191.350.800,00
41.126	Pengelolaan Surat-menyurat dan Kearsipan	Layanan surat-menyurat dan kearsipan	Kecamatan Banyuurip	12.00 Bulan	31.042.000,00	DAU		12.00 Bulan	37.250.400,00
41.127	Penyediaan Layanan Komunikasi, Informasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Layanan komunikasi, informasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Banyuurip	12.00 Bulan	28.332.000,00	DAU		12.00 Bulan	33.998.400,00
41.128	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Layanan kebersihan kantor	Kecamatan Banyuurip	12.00 Bulan	31.429.000,00	DAU		12.00 Bulan	37.714.800,00
41.129	Koordinasi dan Konsultasi Internal dan Eksternal	Layanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Kecamatan Banyuurip, Dalam Daerah, Luar Daerah	12.00 Bulan	57.844.000,00	DAU		12.00 Bulan	69.412.800,00
41.130	Pengelolaan Keamanan Kantor	Layanan Keamanan Kantor	Kecamatan Banyuurip	12.00 Bulan	10.812.000,00	DAU		12.00 Bulan	12.974.400,00
412	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Berfungsi Dengan Baik		100.00 %	104.087.100,00			100.00 %	124.904.520,00
41.222	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	Kecamatan Banyuurip	1.00 Unit/Th	17.238.000,00	DAU		1.00 Unit/Th	20.685.600,00
41.224	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	Kecamatan Banyuurip	8.00 Unit/Th	30.500.000,00	DAU		8.00 Unit/Th	36.600.000,00
41.247	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	Kecamatan Banyuurip	8.00 unit	50.952.100,00	DAU		8.00 unit	61.142.520,00
41.249	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara rutin/berkala	Kecamatan Banyuurip	9.00 Unit/Th	5.397.000,00	DAU		9.00 Unit/Th	6.476.400,00
416	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase capaian kinerja dan keuangan		100.00 %	13.890.000,00			100.00 %	16.668.000,00
4.165	Penyusunan Pelaporan Keuangan	Dokumen pelaporan keuangan	Kecamatan Banyuurip	19.00 Dok	7.390.000,00	DAU		19.00 Dok	8.868.000,00
4.166	Penyusunan Perencanaan Dan Evaluasi Pelaporan	Dokumen perencanaan dan evaluasi pelaporan	Kecamatan Banyuurip	8.00 Dok	6.500.000,00	DAU		8.00 Dok	7.800.000,00
417	Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Prosentase ketersediaan data dasar pembangunan daerah		100.00 %	5.451.000,00			100.00 %	6.541.200,00
4.171	Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Dokumen data dasar pembangunan	Kecamatan Banyuurip	1.00 Dok	5.451.000,00	DAU		1.00 Dok	6.541.200,00
4.1.21	Program Koordinasi Tingkat Kecamatan	Capaian penyelesaian permasalahan bidang pemerintahan		100.00 %	408.883.000,00			100.00 %	490.659.600,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Capaian penyelesaian permasalahan bidang pemberdayaan masyarakat		100.00 %				100.00 %	
		Capaian penyelesaian permasalahan bidang pembangunan		100.00 %				100.00 %	
		Capaian penyelesaian permasalahan bidang tramtibum		100.00 %				100.00 %	
41.211	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemerintahan	Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan	Kecamatan Banyuurip	2.00 Dok	147.624.000,00	DAU		2.00 Dok	177.148.800,00
41.212	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pembangunan	Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan	Kecamatan Banyuurip	2.00 Dok	111.874.000,00	DAU		2.00 Dok	134.248.800,00
41.213	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Banyuurip	2.00 Dok	118.207.000,00	DAU		2.00 Dok	141.848.400,00
41.214	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang Ketentraman dan ketertiban umum	Kecamatan Banyuurip	2.00 Dok	31.178.000,00	DAU		2.00 Dok	37.413.600,00
4.1.22	Program Pembinaan Desa/Kelurahan	Cakupan jumlah Desa/Kelurahan yang terbina		100.00 %	3.453.060.000,00			100.00 %	4.143.672.000,00
412.235	Fasilitasi Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kel. Kledung Karangdalem	Sarpras dan pemberdayaan masyarakat	Kelurahan Kledung Karangdalem	13.00 Paket	73.274.400,00	DAU		13.00 Paket	87.929.280,00
412.236	Fasilitasi Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kel. Kledung Kradenan	Sarpras dan pemberdayaan masyarakat	Kelurahan Kledung Kradenan	12.00 Paket	54.200.700,00	DAU		12.00 Paket	65.040.840,00
412.237	Fasilitasi Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kel. Borokulon	Sarpras dan pemberdayaan masyarakat	Kelurahan Borokulon	9.00 Paket	57.042.200,00	DAU		9.00 Paket	68.450.640,00
412.238	Kegiatan Kel. Kledung Karangdalem	Aktivitas kelurahan 12 bulan lancar	Kelurahan Kledung Karangdalem	12.00 Bulan	120.403.000,00	DAU		12.00 Bulan	144.483.600,00
412.239	Kegiatan Kel. Kledung Kradenan	Aktivitas kelurahan 12 bulan lancar	Kelurahan Kledung Kradenan	12.00 Bulan	187.612.000,00	DAU		12.00 Bulan	225.134.400,00
412.240	Kegiatan Kel. Borokulon	Aktivitas kelurahan 12 bulan lancar	Kelurahan Borokulon	12.00 Bulan	143.224.000,00	DAU		12.00 Bulan	171.868.800,00
412.271	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kelurahan Kledung Karangdalem	Cakupan jumlah penduduk miskin yang meningkat kapasitasnya	Kelurahan Kledung Karangdalem	100.00 %	25.000.000,00	DAU		100.00 %	30.000.000,00
412.272	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kelurahan Kledung Kradenan	Cakupan jumlah penduduk miskin yang meningkat kapasitasnya	Kelurahan Kledung Kradenan	100.00 %	25.000.000,00	DAU		100.00 %	30.000.000,00
412.273	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kelurahan Boro kulon	Cakupan jumlah penduduk miskin yang meningkat kapasitasnya	Kelurahan Borokulon	100.00 %	28.308.600,00	DAU		100.00 %	33.970.320,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.1.22.119	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kledung Karangdalem	Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kledung Karangdalem	1.00 Kelurahan	550.605.600,00	DAU		1.00 Kelurahan	660.726.720,00
4.1.22.120	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kledung Karangdalem (DAU Tambahan)	Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kledung Karangdalem	1.00 Kelurahan	250.983.800,00	DAU		1.00 Kelurahan	301.180.560,00
4.1.22.121	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kledung Karangdalem (DAU Tambahan)	Masyarakat Kelurahan Yang Diberdayakan	Kelurahan Kledung Karangdalem	1.00 Kelurahan	101.957.200,00	DAU		1.00 Kelurahan	122.348.640,00
4.1.22.122	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kledung Kradenan	Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kledung Kradenan	1.00 Kelurahan	567.858.300,00	DAU		1.00 Kelurahan	681.429.960,00
4.1.22.123	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kledung Kradenan (DAU Tambahan)	Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kledung Kradenan	1.00 Kelurahan	322.093.900,00	DAU		1.00 Kelurahan	386.512.680,00
4.1.22.124	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kledung Kradenan (DAU Tambahan)	Masyarakat Kelurahan Yang Diberdayakan	Kelurahan Kledung Kradenan	1.00 Kelurahan	30.847.100,00	DAU		1.00 Kelurahan	37.016.520,00
4.1.22.125	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Boro Kulon	Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Borokulon	1.00 Kelurahan	561.708.200,00	DAU		1.00 Kelurahan	674.049.840,00
4.1.22.126	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Boro Kulon (DAU Tambahan)	Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Borokulon	1.00 Kelurahan	294.063.800,00	DAU		1.00 Kelurahan	352.876.560,00
4.1.22.127	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Boro Kulon (DAU Tambahan)	Masyarakat Kelurahan Yang Diberdayakan	Kelurahan Borokulon	1.00 Kelurahan	58.877.200,00	DAU		1.00 Kelurahan	70.652.640,00
4.1.23	Program Pelayanan Masyarakat	Prosentase jumlah permohonan pelayanan yang tertangani		100.00 %	3.261.900,00			100.00 %	3.914.280,00
41.231	Pelayanan Terpadu Kecamatan	Layanan PATEN	Kecamatan Banyuurip	12.00 Bulan	3.261.900,00	DAU		12.00 Bulan	3.914.280,00

Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN BAYAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
	TOTAL				1.804.624.300,00				1.985.086.730,00		
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang										
41	Administrasi Pemerintahan				1.804.624.300,00				1.985.086.730,00		
411	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Prosentase Cakupan Layanan Adm Perkantoran			100.00 %	160.117.000,00		100.00 %	176.128.700,00	
41.126	Pengelolaan Surat-menyurat dan Kearsipan		Layanan surat-menyurat dan kearsipan		Kecamatan Bayan	12.00 Bulan	26.433.000,00	DAU		12.00 Bulan	29.076.300,00
41.127	Penyediaan Layanan Komunikasi, Informasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Layanan komunikasi, informasi, sumber daya air dan listrik		Kecamatan Bayan	12.00 Bulan	51.297.000,00	DAU		12.00 Bulan	56.426.700,00
41.128	Pengelolaan Kebersihan Kantor		Layanan kebersihan kantor		Kecamatan Bayan	12.00 Bulan	14.412.000,00	DAU		12.00 Bulan	15.853.200,00
41.129	Koordinasi dan Konsultasi Internal dan Eksternal		Layanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi		Kecamatan Bayan, Dalam Daerah, Luar Daerah	12.00 Bulan	67.975.000,00	DAU		12.00 Bulan	74.772.500,00
412	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Prosentase Peningkatan Sarpras Aparatur			100.00 %	142.301.000,00		100.00 %	156.531.100,00	
4.129	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan		Kecamatan Bayan	8.00 unit	22.654.000,00	DAU		8.00 unit	24.919.400,00
41.222	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala		Kecamatan Bayan	1.00 Unit/Th	53.040.000,00	DAU		1.00 Unit/Th	58.344.000,00
41.224	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Pemeliharaan kendaraan dinas operasional		Kecamatan Bayan	8.00 unit	41.912.000,00	DAU		8.00 unit	46.103.200,00
41.228	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara rutin/berkala		Kecamatan Bayan	33.00 Unit/Th	24.695.000,00	DAU		13.00 Unit/Th	27.164.500,00
416	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Prosentase capaian realisasi fisik dan keuangan terkendali			100.00 %	12.000.000,00		100.00 %	13.200.000,00	
4.165	Penyusunan Pelaporan Keuangan		Dokumen pelaporan keuangan		Kecamatan Bayan	14.00 Dok	5.000.000,00	DAU		14.00 Dok	5.500.000,00
4.166	Penyusunan Perencanaan Dan Evaluasi Pelaporan		Dokumen perencanaan dan evaluasi pelaporan		Kecamatan Bayan	38.00 Dok	7.000.000,00	DAU		38.00 Dok	7.700.000,00
417	Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan		Prosentase Ketersediaan Data			100.00 %	6.500.000,00		100.00 %	7.150.000,00	
4.171	Penyusunan Data Dasar Pembangunan		Dokumen data dasar pembangunan		Kecamatan Bayan	1.00 Dok	6.500.000,00	DAU		1.00 Dok	7.150.000,00
4.1.21	Program Koordinasi Tingkat Kecamatan		Capaian penyelesaian permasalahan bidang bidang pemberdayaan masyarakat			100.00 %	336.300.500,00		100.00 %	369.930.550,00	
			Capaian penyelesaian permasalahan bidang pembangunan			100.00 %			100.00 %		

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Capaian penyelesaian permasalahan bidang pemerintahan		100.00 %				100.00 %	
		Capaian penyelesaian permasalahan bidang tramtibum		100.00 %				100.00 %	
41.211	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemerintahan	Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan	Kecamatan Bayan	11.00 Dok	132.500.000,00	DAU		10.00 Dok	145.750.000,00
41.212	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pembangunan	Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan	Kecamatan Bayan	8.00 Dok	82.200.500,00	DAU		8.00 Dok	90.420.550,00
41.213	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat	Kecamatan Bayan	7.00 Dok	97.600.000,00	DAU		7.00 Dok	107.360.000,00
41.214	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban umum	Kecamatan Bayan	3.00 Dok	24.000.000,00	DAU		3.00 Dok	26.400.000,00
4.1.22	Program Pembinaan Desa/Kelurahan	Cakupan jumlah Desa/Kelurahan yang terbina		100.00 %	1.127.000.000,00			100.00 %	1.239.700.000,00
412.242	Kegiatan Kel. Sucen Jurutengah	Aktifitas kelurahan selama 12 bulan lancar	Kelurahan Sucen Jurutengah	12.00 Bulan	127.000.000,00	DAU		12.00 Bulan	139.700.000,00
4.1.22.11 6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sucenjurutengah	Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Sucen Jurutengah	1.00 Kelurahan	578.707.000,00	DAU		1.00 Kelurahan	636.577.700,00
4.1.22.11 7	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sucenjurutengah (DAU Tambahan)	Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Sucen Jurutengah	1.00 Kelurahan	332.345.000,00	DAU		1.00 Kelurahan	365.579.500,00
4.1.22.11 8	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sucenjurutengah (DAU Tambahan)	Masyarakat Kelurahan Yang Diberdayakan	Kelurahan Sucen Jurutengah	1.00 Kelurahan	60.918.000,00	DAU		1.00 Kelurahan	67.009.800,00
4.1.22.15 5	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kelurahan Sucenjurutengah	Cakupan desa/kelurahan dengan penduduk miskin yang meningkat kapasitasnya	Kelurahan Sucen Jurutengah	100.00 %	28.030.000,00	DAU		100.00 %	30.833.000,00
4.1.23	Program Pelayanan Masyarakat	Prosentase jumlah permohonan pelayanan yang tertangani		100.00 %	20.405.800,00			100.00 %	22.446.380,00
41.231	Pelayanan Terpadu Kecamatan	Layen PATEN	Kecamatan Bayan	12.00 Bulan	20.405.800,00	DAU		12.00 Bulan	22.446.380,00

Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN KUTOARJO

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	TOTAL				7.750.779.000,00				8.525.856.900,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang								
41	Administrasi Pemerintahan				7.750.779.000,00				8.525.856.900,00
411	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran		100.00 %	142.302.400,00			100.00 %	156.532.640,00
41.126	Pengelolaan Surat-menyurat dan Kearsipan	Layanan surat-menyurat dan kearsipan	Kecamatan Kutoarjo	12.00 Bulan	22.318.000,00	DAU		12.00 Bulan	24.549.800,00
41.127	Penyediaan Layanan Komunikasi, Informasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Layanan komunikasi, informasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Kutoarjo	12.00 Bulan	26.953.400,00	DAU		12.00 Bulan	29.648.740,00
41.128	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Layanan kebersihan kantor	Kecamatan Kutoarjo	12.00 Bulan	15.167.000,00	DAU		12.00 Bulan	16.683.700,00
41.129	Koordinasi dan Konsultasi Internal dan Eksternal	Layanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Kecamatan Kutoarjo, Dalam Daerah, Luar Daerah	12.00 Bulan	67.052.000,00	DAU		12.00 Bulan	73.757.200,00
41.130	Pengelolaan Keamanan Kantor	Layanan keamanan kantor	Kecamatan Kutoarjo	12.00 Bulan	10.812.000,00	DAU		12.00 Bulan	11.893.200,00
412	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan sarana prasarana aparatur yang berfungsi dengan baik		100.00 %	271.854.100,00			100.00 %	299.039.510,00
41.222	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	Kecamatan Kutoarjo	3.00 Unit/Th	97.858.800,00	DAU		3.00 Unit/Th	107.644.680,00
41.224	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	Kecamatan Kutoarjo	10.00 Unit/Th	44.912.000,00	DAU		10.00 Unit/Th	49.403.200,00
41.247	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	Kecamatan Kutoarjo	9.00 unit	116.034.300,00	DAU		9.00 unit	127.637.730,00
41.249	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara rutin/berkala	Kecamatan Kutoarjo	23.00 Unit/Th	13.049.000,00	DAU		23.00 Unit/Th	14.353.900,00
415	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		100.00 %	8.670.000,00			100.00 %	9.537.000,00
4.151	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	Aparatur yang meningkat kualifikasi, kapasitas dan kinerjanya	Kecamatan Kutoarjo	27.00 Org	8.670.000,00	DAU		27.00 Org	9.537.000,00
416	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan		100.00 %	20.000.000,00			100.00 %	22.000.000,00
4.165	Penyusunan Pelaporan Keuangan	Dokumen pelaporan keuangan	Kecamatan Kutoarjo	19.00 Dok	10.000.000,00	DAU		19.00 Dok	11.000.000,00
4.166	Penyusunan Perencanaan Dan Evaluasi Pelaporan	Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan	Kecamatan Kutoarjo	6.00 Dok	10.000.000,00	DAU		6.00 Dok	11.000.000,00
417	Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Persentase ketersediaan data dasar pembangunan		100.00 %	15.962.700,00			100.00 %	17.558.970,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.171	Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Dokumen data dasar pembangunan	Kecamatan Kutoarjo	1.00 Dok	15.962.700,00	DAU		1.00 Dok	17.558.970,00
4.1.21	Program Koordinasi Tingkat Kecamatan	Capaian penyelesaian permasalahan bidang pemerintahan		100.00 %	373.405.000,00			100.00 %	410.745.500,00
		Capaian penyelesaian permasalahan bidang pemberdayaan masyarakat		100.00 %				100.00 %	
		Capaian penyelesaian permasalahan bidang pembangunan		100.00 %				100.00 %	
		Capaian penyelesaian permasalahan bidang tramtibum		100.00 %				100.00 %	
		Capaian penyelesaian permasalahan bidang kemasyarakatan		100.00 %				100.00 %	
41.211	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemerintahan	Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan	Kecamatan Kutoarjo	9.00 Dok	132.300.000,00	DAU		9.00 Dok	145.530.000,00
41.213	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Kutoarjo	7.00 Dok	52.900.000,00	DAU		7.00 Dok	58.190.000,00
41.212	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pembangunan	Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan	Kecamatan Kutoarjo	7.00 Dok	91.705.000,00	DAU		7.00 Dok	100.875.500,00
41.214	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang Ketenteraman dan ketertiban umum	Kecamatan Kutoarjo	9.00 Dok	31.000.000,00	DAU		9.00 Dok	34.100.000,00
41.215	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Kemasyarakatan	Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang kemasyarakatan	Kecamatan Kutoarjo	8.00 Dok	65.500.000,00	DAU		8.00 Dok	72.050.000,00
4.1.22	Program Pembinaan Desa/Kelurahan	Cakupan jumlah Desa/Kelurahan yang terbina		100.00 %	6.910.000.000,00			100.00 %	7.601.000.000,00
412.243	Fasilitasi Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kel. Kutoarjo	Sarpras & pemberdayaan Masyarakat Kel. Kutoarjo	Kelurahan Kutoarjo	100.00 %	96.363.800,00	DAU		100.00 %	106.000.180,00
412.244	Fasilitasi Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kel. Semawung Kembaran	Sarpras & pemberdayaan Masyarakat Kel. Semawung Kembaran	Kelurahan Semawung Kembaran	100.00 %	74.621.400,00	DAU		100.00 %	82.083.540,00
412.245	Fasilitasi Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kel. Semawung Daleman	Sarpras & pemberdayaan Masyarakat Kel. Semawung Daleman	Kelurahan Semawung Daleman	100.00 %	465.129.800,00	DAU		100.00 %	511.642.780,00
412.246	Fasilitasi Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kel. Katerban	Sarpras & pemberdayaan Masyarakat Kel. Katerban	Kelurahan Katerban	100.00 %	63.689.500,00	DAU		100.00 %	70.058.450,00
412.247	Fasilitasi Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kel. Bandung	Sarpras & pemberdayaan Masyarakat Kel. Bandung	Kelurahan Bandung	100.00 %	161.186.200,00	DAU		100.00 %	177.304.820,00
412.248	Fasilitasi Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kel. Bayem	Sarpras & pemberdayaan Masy. Kel. Bayem	Kelurahan Bayem	100.00 %	137.006.000,00	DAU		100.00 %	150.706.600,00
412.249	Kegiatan Kel. Kutoarjo	Aktivitas kelurahan 12 bulan lancar	Kelurahan Kutoarjo	1.00 Kelurahan	250.000.000,00	DAU		1.00 Kelurahan	275.000.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
412.250	Kegiatan Kel. Semawung Kembaran	Aktivitas kelurahan 12 bulan lancar	Kelurahan Semawung Kembaran	1.00 Kelurahan	109.000.000,00	DAU		1.00 Kelurahan	119.900.000,00
412.251	Kegiatan Kel. Semawung Daleman	Aktivitas kelurahan 12 bulan lancar	Kelurahan Semawung Daleman	1.00 Kelurahan	145.000.000,00	DAU		1.00 Kelurahan	159.500.000,00
412.252	Kegiatan Kel. Katerban	Aktivitas kelurahan 12 bulan lancar	Kelurahan Katerban	1.00 Kelurahan	163.000.000,00	DAU		1.00 Kelurahan	179.300.000,00
412.253	Kegiatan Kel. Bandung	Aktivitas kelurahan 12 bulan lancar	Kelurahan Bandung	1.00 Kelurahan	133.000.000,00	DAU		1.00 Kelurahan	146.300.000,00
412.254	Kegiatan Kel. Bayem	Aktivitas kelurahan 12 bulan lancar	Kelurahan Bayem	1.00 Kelurahan	100.000.000,00	DAU		1.00 Kelurahan	110.000.000,00
4.1.22.128	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bayem	Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Bayem	1.00 Kelurahan	485.053.000,00	DAU		1.00 Kelurahan	533.558.300,00
4.1.22.129	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bayem (DAU Tambahan)	Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Bayem	1.00 Kelurahan	314.485.655,00	DAU		1.00 Kelurahan	345.934.220,50
4.1.22.130	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bayem (DAU Tambahan)	Desa/Kel meningkat kapasitasnya di bidang pemberdayaan masyarakat	Kelurahan Bayem	1.00 Kelurahan	38.455.345,00	DAU		1.00 Kelurahan	42.300.879,50
4.1.22.131	Pengadaan Sarana dan Prasarana Bandung	Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Bandung	1.00 Kelurahan	460.872.800,00	DAU		1.00 Kelurahan	506.960.080,00
4.1.22.132	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bandung (DAU Tambahan)	Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Bandung	1.00 Kelurahan	314.095.900,00	DAU		1.00 Kelurahan	345.505.490,00
4.1.22.133	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bandung (DAU Tambahan)	Desa/Kel meningkat kapasitasnya di bidang pemberdayaan masyarakat	Kelurahan Bandung	1.00 Kelurahan	38.845.100,00	DAU		1.00 Kelurahan	42.729.610,00
4.1.22.134	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kutoarjo	Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kutoarjo	1.00 Kelurahan	525.695.200,00	DAU		1.00 Kelurahan	578.264.720,00
4.1.22.135	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kutoarjo (DAU Tambahan)	Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kutoarjo	1.00 Kelurahan	338.223.800,00	DAU		1.00 Kelurahan	372.046.180,00
4.1.22.136	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kutoarjo (DAU Tambahan)	Desa/Kel meningkat kapasitasnya di bidang pemberdayaan masyarakat	Kelurahan Kutoarjo	1.00 Kelurahan	14.717.200,00	DAU		1.00 Kelurahan	16.188.920,00
4.1.22.137	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Semawung Kembaran	Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Semawung Kembaran	1.00 Kelurahan	547.437.600,00	DAU		1.00 Kelurahan	602.181.360,00
4.1.22.138	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Semawung Kembaran (DAU Tambahan)	Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Semawung Kembaran	1.00 Kelurahan	335.341.000,00	DAU		1.00 Kelurahan	368.875.100,00
4.1.22.139	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Semawung Kembaran (DAU Tambahan)	Desa/Kel meningkat kapasitasnya di bidang pemberdayaan masyarakat	Kelurahan Semawung Kembaran	1.00 Kelurahan	17.600.000,00	DAU		1.00 Kelurahan	19.360.000,00
4.1.22.140	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Katerban	Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Katerban	1.00 Kelurahan	558.369.500,00	DAU		1.00 Kelurahan	614.206.450,00
4.1.22.141	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Katerban (DAU Tambahan)	Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Katerban	1.00 Kelurahan	337.958.400,00	DAU		1.00 Kelurahan	371.754.240,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.1.22.14 2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Semawung Daleman	Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Semawung Daleman	1.00 Kelurahan	156.929.200,00	DAU		1.00 Kelurahan	172.622.120,00
4.1.22.14 3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Semawung Daleman (DAU Tambahan)	Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Semawung Daleman	1.00 Kelurahan	312.941.000,00	DAU		1.00 Kelurahan	344.235.100,00
4.1.22.14 4	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Semawung Daleman (DAU Tambahan)	Desa/Kel meningkat kapasitasnya di bidang pemberdayaan masyarakat	Kelurahan Semawung Daleman	1.00 Kelurahan	40.000.000,00	DAU		1.00 Kelurahan	44.000.000,00
4.1.22.14 8	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kelurahan Bayem	Cakupan jumlah desa/kelurahan dengan penduduk miskin yang meningkat kapasitasnya	Kelurahan Bayem	100.00 %	25.000.000,00	DAU		100.00 %	27.500.000,00
4.1.22.14 9	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kelurahan Bandung	Cakupan jumlah desa/kelurahan dengan penduduk miskin yang meningkat kapasitasnya	Kelurahan Bandung	100.00 %	25.000.000,00	DAU		100.00 %	27.500.000,00
4.1.22.15 0	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kelurahan Kutoarjo	Cakupan jumlah desa/kelurahan dengan penduduk miskin yang meningkat kapasitasnya	Kelurahan Kutoarjo	100.00 %	35.000.000,00	DAU		100.00 %	38.500.000,00
4.1.22.15 1	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kelurahan Semawung Kembaran	Cakupan jumlah desa/kelurahan dengan penduduk miskin yang meningkat kapasitasnya	Kelurahan Semawung Kembaran	100.00 %	25.000.000,00	DAU		100.00 %	27.500.000,00
4.1.22.15 2	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kelurahan Katerban	Cakupan jumlah desa/kelurahan dengan penduduk miskin yang meningkat kapasitasnya	Kelurahan Katerban	100.00 %	25.000.000,00	DAU		100.00 %	27.500.000,00
4.1.22.15 3	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kelurahan Semawung Daleman	Cakupan jumlah desa/kelurahan dengan penduduk miskin yang meningkat kapasitasnya	Kelurahan Semawung Daleman	100.00 %	25.000.000,00	DAU		100.00 %	27.500.000,00
4.1.22.15 6	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Katerban (DAU Tambahan)	Desa/Kel meningkat kapasitasnya di bidang pemberdayaan masyarakat	Kelurahan Katerban	1.00 Kelurahan	14.982.600,00	DAU		1.00 Kelurahan	16.480.860,00
4.1.23	Program Pelayanan Masyarakat	Prosentase jumlah permohonan pelayanan yang terlayani		100.00 %	8.584.800,00			100.00 %	9.443.280,00
41.231	Pelayanan Terpadu Kecamatan	Layanan Paten	Kecamatan Kutoarjo	12.00 Bulan	8.584.800,00	DAU		12.00 Bulan	9.443.280,00

Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN BUTUH

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	TOTAL				930.098.900,00				968.108.790,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang								
41	Administrasi Pemerintahan				930.098.900,00				968.108.790,00
411	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran		100.00 %	137.016.200,00			100.00 %	150.717.820,00
41.126	Pengelolaan Surat-menyurat dan Kearsipan	Layanan surat-menyurat dan kearsipan	Kecamatan Butuh	12.00 Bulan	35.939.100,00	DAU		12.00 Bulan	39.533.010,00
41.127	Penyediaan Layanan Komunikasi, Informasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Layanan komunikasi, informasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Butuh	12.00 Bulan	20.989.300,00	DAU		12.00 Bulan	23.088.230,00
41.128	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Layanan kebersihan kantor	Kecamatan Butuh	12.00 Bulan	12.723.800,00	DAU		12.00 Bulan	13.996.180,00
41.129	Koordinasi dan Konsultasi Internal dan Eksternal	Layanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Kecamatan Butuh, Dalam Daerah, Luar Daerah	12.00 Bulan	67.364.000,00	DAU		12.00 Bulan	74.100.400,00
412	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan sarana prasarana aparatur yang berfungsi dengan baik		100.00 %	174.740.600,00			100.00 %	192.214.660,00
41.222	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	Kecamatan Butuh	1.00 Unit/Th	57.813.600,00	DAU		1.00 Unit/Th	63.594.960,00
41.224	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	Kecamatan Butuh	10.00 Unit/Th	44.912.000,00	DAU		10.00 Unit/Th	49.403.200,00
41.247	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	Kecamatan Butuh	102.00 unit	60.304.000,00	DAU		102.00 unit	66.334.400,00
41.249	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara rutin/berkala	Kecamatan Butuh	17.00 unit	11.711.000,00	DAU		17.00 unit	12.882.100,00
416	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan		100.00 %	22.533.000,00			100.00 %	24.786.300,00
4.165	Penyusunan Pelaporan Keuangan	Dokumen pelaporan keuangan	Kecamatan Butuh	14.00 Dok	8.150.000,00	DAU		14.00 Dok	8.965.000,00
4.166	Penyusunan Perencanaan Dan Evaluasi Pelaporan	Dokumen perencanaan dan evaluasi pelaporan	Kecamatan Butuh	38.00 Dok	14.383.000,00	DAU		38.00 Dok	15.821.300,00
417	Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Persentase ketersediaan data dasar pembangunan		100.00 %	10.400.000,00			100.00 %	11.440.000,00
4.171	Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Dokumen data dasar pembangunan	Kecamatan Butuh	1.00 Dok	10.400.000,00	DAU		1.00 Dok	11.440.000,00
4.1.21	Program Koordinasi Tingkat Kecamatan	Capaian penyelesaian permasalahan bidang bidang pemberdayaan masyarakat		100.00 %	500.249.600,00			100.00 %	495.274.560,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Capaian penyelesaian permasalahan bidang kemasyarakatan		100.00 %				100.00 %	
		Capaian penyelesaian permasalahan bidang pembangunan		100.00 %				100.00 %	
		Capaian penyelesaian permasalahan bidang pemerintahan		100.00 %				100.00 %	
		Capaian penyelesaian permasalahan bidang tramtibum		100.00 %				100.00 %	
41.211	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemerintahan	Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan	Kecamatan Butuh	14.00 Dok	203.887.900,00	DAU		13.00 Dok	169.276.690,00
41.212	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pembangunan	Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan	Kecamatan Butuh	6.00 Dok	57.639.100,00	DAU		6.00 Dok	63.403.010,00
41.213	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat	Kecamatan Butuh	11.00 Dok	63.891.900,00	DAU		11.00 Dok	70.281.090,00
41.214	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban umum	Kecamatan Butuh	5.00 Dok	27.485.000,00	DAU		5.00 Dok	30.233.500,00
41.215	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Kemasyarakatan	Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang kemasyarakatan	Kecamatan Butuh	5.00 Dok	147.345.700,00	DAU		5.00 Dok	162.080.270,00
4.1.22	Program Pembinaan Desa/Kelurahan	Cakupan jumlah Desa/Kelurahan yang terbina		100.00 %	73.159.500,00			100.00 %	80.475.450,00
4.1.22.15 7	Pembinaan Pelaksanaan Pembangunan Desa/Kelurahan	Cakupan jumlah Desa/Kelurahan yang terbina	Kecamatan Butuh	41.00 Desa	51.653.100,00	DAU		41.00 Desa	56.818.410,00
4.1.22.15 8	Pembinaan desa/kelurahan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan	Penanggulangan Kemiskinan Tk. Kecamatan	Kecamatan Butuh	41.00 Desa	21.506.400,00	DAU		41.00 Desa	23.657.040,00
4.1.23	Program Pelayanan Masyarakat	Prosentase jumlah permohonan pelayanan yang tertangani		100.00 %	12.000.000,00			100.00 %	13.200.000,00
41.231	Pelayanan Terpadu Kecamatan	Layanan PATEN	Kecamatan Butuh	12.00 Bulan	12.000.000,00	DAU		12.00 Bulan	13.200.000,00

Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN PITURUH

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	TOTAL				1.030.195.600,00				1.133.215.160,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang								
41	Administrasi Pemerintahan				1.030.195.600,00				1.133.215.160,00
411	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran		100.00 %	211.368.900,00			100.00 %	232.505.790,00
41.126	Pengelolaan Surat-menyurat dan Kearsipan	Layanan surat-menyurat dan kearsipan	Kecamatan Pituruh	12.00 Bulan	45.621.000,00	DAU		12.00 Bulan	50.183.100,00
41.127	Penyediaan Layanan Komunikasi, Informasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Layanan komunikasi, informasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Pituruh	12.00 Bulan	34.828.000,00	DAU		12.00 Bulan	38.310.800,00
41.128	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Layanan kebersihan kantor	Kecamatan Pituruh	12.00 Bulan	26.018.800,00	DAU		12.00 Bulan	28.620.680,00
41.129	Koordinasi dan Konsultasi Internal dan Eksternal	Layanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Kecamatan Pituruh, Dalam Daerah, Luar Daerah	12.00 Bulan	81.601.100,00	DAU		12.00 Bulan	89.761.210,00
41.130	Pengelolaan Keamanan Kantor	Layanan Keamanan Kantor	Kecamatan Pituruh	12.00 Bulan	23.300.000,00	DAU		12.00 Bulan	25.630.000,00
412	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan sarana prasarana aparatur yang berfungsi dengan baik		100.00 %	210.103.800,00			100.00 %	231.114.180,00
4.129	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	Kecamatan Pituruh	10.00 unit	84.672.800,00	DAU		10.00 unit	93.140.080,00
41.222	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	Kecamatan Pituruh	3.00 Unit/Th	79.560.000,00	DAU		3.00 Unit/Th	87.516.000,00
41.224	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	Kecamatan Pituruh	9.00 Unit/Th	32.000.000,00	DAU		9.00 Unit/Th	35.200.000,00
41.228	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara rutin/berkala	Kecamatan Pituruh	19.00 Unit/Th	13.871.000,00	DAU		19.00 Unit/Th	15.258.100,00
416	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase capaian kinerja dan keuangan		100.00 %	23.564.000,00			100.00 %	25.920.400,00
4.165	Penyusunan Pelaporan Keuangan	Dokumen pelaporan keuangan	Kecamatan Pituruh	19.00 Dok	11.032.000,00	DAU		19.00 Dok	12.135.200,00
4.166	Penyusunan Perencanaan Dan Evaluasi Pelaporan	Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan	Kecamatan Pituruh	10.00 Dok	12.532.000,00	DAU		10.00 Dok	13.785.200,00
417	Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Prosentase tersedianya data dasar pembangunan		100.00 %	7.650.000,00			100.00 %	8.415.000,00
4.171	Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Dokumen data dasar pembangunan	Kecamatan Pituruh	1.00 Dok	7.650.000,00	DAU		1.00 Dok	8.415.000,00
4.1.21	Program Koordinasi Tingkat Kecamatan	Capaian penyelesaian permasalahan bidang pemerintahan		100.00 %	436.945.500,00			100.00 %	480.640.050,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Capaian penyelesaian permasalahan bidang pemberdayaan masyarakat		100.00 %				100.00 %	
		Capaian penyelesaian permasalahan bidang pembangunan		100.00 %				100.00 %	
		Capaian penyelesaian permasalahan bidang tramtibum		100.00 %				100.00 %	
		Capaian penyelesaian permasalahan bidang kemasyarakatan		100.00 %				100.00 %	
41.211	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemerintahan	Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan	Kecamatan Pituruh	10.00 Dok	172.470.000,00	DAU		9.00 Dok	189.717.000,00
41.212	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pembangunan	Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang kemasyarakatan	Kecamatan Pituruh	4.00 Dok	56.885.000,00	DAU		4.00 Dok	62.573.500,00
41.213	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Pituruh	6.00 Dok	78.771.500,00	DAU		6.00 Dok	86.648.650,00
41.214	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang Ketenteraman dan ketertiban umum	Kecamatan Pituruh	4.00 Dok	42.432.000,00	DAU		4.00 Dok	46.675.200,00
41.215	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Kemasyarakatan	Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang kemasyarakatan	Kecamatan Pituruh	5.00 Dok	86.387.000,00	DAU		5.00 Dok	95.025.700,00
4.1.22	Program Pembinaan Desa/Kelurahan	Cakupan jumlah Desa/Kelurahan yang terbina		100.00 %	131.701.400,00			100.00 %	144.871.540,00
4.1.22.15 7	Pembinaan Pelaksanaan Pembangunan Desa/Kelurahan	Desa/kelurahan yang dibina dalam pelaksanaan pembangunan di wilayahnya	Kecamatan Pituruh	49.00 Desa	87.980.700,00	DAU		49.00 Desa	96.778.770,00
4.1.22.15 8	Pembinaan desa/kelurahan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan	Desa/kelurahan yang dibina dalam penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan	Kecamatan Pituruh	49.00 Desa	43.720.700,00	DAU		49.00 Desa	48.092.770,00
4.1.23	Program Pelayanan Masyarakat	Prosentase Permohonan pelayanan yang terlayani		100.00 %	8.862.000,00			100.00 %	9.748.200,00
41.231	Pelayanan Terpadu Kecamatan	Layanan PATEN	Kecamatan Pituruh	12.00 Bulan	8.862.000,00	DAU		12.00 Bulan	9.748.200,00

Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN KEMIRI

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	TOTAL				1.020.184.000,00				1.324.657.620,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang								
41	Administrasi Pemerintahan				1.020.184.000,00				1.324.657.620,00
411	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran		100.00 %	148.422.000,00			100.00 %	240.500.260,00
41.126	Pengelolaan Surat-menyurat dan Kearsipan	Layanan surat-menyurat dan kearsipan	Kecamatan Kemiri	1.00 Bulan	30.852.000,00	DAU		1.00 Bulan	63.799.060,00
41.127	Penyediaan Layanan Komunikasi, Informasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Layanan komunikasi, informasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Kemiri	1.00 Bulan	15.073.000,00	DAU		1.00 Bulan	25.604.800,00
41.128	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Layanan kebersihan kantor	Kecamatan Kemiri	1.00 Bulan	29.782.000,00	DAU		1.00 Bulan	37.125.400,00
41.129	Koordinasi dan Konsultasi Internal dan Eksternal	Layanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Kecamatan Kemiri	1.00 Bulan	72.715.000,00	DAU		1.00 Bulan	113.971.000,00
412	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan sarana prasarana aparatur yang berfungsi dengan baik		100.00 %	378.465.600,00			100.00 %	436.679.880,00
41.222	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	Kecamatan Kemiri	1.00 Unit/Th	71.604.000,00	DAU		1.00 Unit/Th	96.532.800,00
41.224	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	Kecamatan Kemiri	9.00 Unit/Th	32.000.000,00	DAU		9.00 Unit/Th	43.810.000,00
41.228	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara rutin/berkala	Kecamatan Kemiri	33.00 Unit/Th	25.159.000,00	DAU		33.00 Unit/Th	32.706.700,00
41.247	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	Kecamatan Kemiri	37.00 unit	249.702.600,00	DAU		37.00 unit	263.630.380,00
415	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur		100.00 %	2.822.000,00			100.00 %	4.188.600,00
4.151	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	Aparatur yang meningkat kualifikasi, kapasitas dan kinerjanya	Kecamatan Kemiri	30.00 Org	2.822.000,00	DAU		30.00 Org	4.188.600,00
416	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Presentase capaian kinerja dan keuangan		100.00 %	34.500.000,00			100.00 %	56.886.960,00
4.165	Penyusunan Pelaporan Keuangan	Dokumen pelaporan keuangan	Kecamatan Kemiri	14.00 Dok	10.875.000,00	DAU		14.00 Dok	15.238.860,00
4.166	Penyusunan Perencanaan Dan Evaluasi Pelaporan	Dokumen perencanaan dan evaluasi pelaporan	Kecamatan Kemiri	38.00 Dok	23.625.000,00	DAU		38.00 Dok	41.648.100,00
417	Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Presentase Ketersediaan Data Dasar Pembangunan		100.00 %	22.556.000,00			100.00 %	31.519.800,00
4.171	Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Dokumen data dasar pembangunan	Kecamatan Kemiri	1.00 Dok	22.556.000,00	DAU		1.00 Dok	31.519.800,00
4.1.21	Program Koordinasi Tingkat Kecamatan	Capaian penyelesaian permasalahan bidang pemerintahan		100.00 %	352.403.600,00			100.00 %	435.940.310,00
		Capaian penyelesaian permasalahan bidang pemberdayaan masyarakat		100.00 %				100.00 %	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Capaian penyelesaian permasalahan bidang pembangunan		100.00 %				100.00 %	
		Capaian penyelesaian permasalahan bidang tramtibum		100.00 %				100.00 %	
		Capaian penyelesaian permasalahan bidang kemasyarakatan		100.00 %				100.00 %	
41.211	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemerintahan	Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan	Kecamatan Kemiri	1.00 Dok	105.826.500,00	DAU		1.00 Dok	149.258.980,00
41.212	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pembangunan	Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan	Kecamatan Kemiri	1.00 Dok	52.711.500,00	DAU		1.00 Dok	50.662.040,00
41.213	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Kemiri	1.00 Dok	48.226.000,00	DAU		1.00 Dok	36.545.860,00
41.214	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang Ketentraman dan ketertiban umum	Kecamatan Kemiri	1.00 Dok	45.532.500,00	DAU		1.00 Dok	44.373.420,00
41.215	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Kemasyarakatan	Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang kemasyarakatan	Kecamatan Kemiri	1.00 Dok	100.107.100,00	DAU		1.00 Dok	155.100.010,00
4.1.22	Program Pembinaan Desa/Kelurahan	Cakupan jumlah Desa/Kelurahan yang terbina		100.00 %	47.073.000,00			100.00 %	91.970.060,00
4.1.22.15 7	Pembinaan Pelaksanaan Pembangunan Desa/Kelurahan	Desa/kelurahan yang dibina dalam pelaksanaan pembangunan di wilayahnya	Kecamatan Kemiri	40.00 Desa	30.376.000,00	DAU		40.00 Desa	65.887.640,00
4.1.22.15 8	Pembinaan desa/kelurahan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan	Desa/kelurahan yang dibina dalam penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan	Kecamatan Kemiri	40.00 Desa	16.697.000,00	DAU		40.00 Desa	26.082.420,00
4.1.23	Program Pelayanan Masyarakat	Prosentase jumlah permohonan pelayanan yang tertangani		100.00 %	33.941.800,00			100.00 %	26.971.750,00
41.231	Pelayanan Terpadu Kecamatan	Layanan PATEN	Kecamatan Kemiri	12.00 Bulan	33.941.800,00	DAU		12.00 Bulan	26.971.750,00

Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN BRUNO

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	TOTAL				887.383.000,00				976.121.300,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang								
41	Administrasi Pemerintahan				887.383.000,00				976.121.300,00
411	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran		100.00 %	210.405.200,00			100.00 %	231.445.720,00
41.126	Pengelolaan Surat-menyurat dan Kearsipan	Layanan surat-menyurat dan kearsipan	Kecamatan Bruno	12 Bulan	36.495.000,00	DAU		12 Bulan	40.144.500,00
41.127	Penyediaan Layanan Komunikasi, Informasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Layanan komunikasi, informasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Bruno	12 Bulan	24.290.000,00	DAU		12 Bulan	26.719.000,00
41.128	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Layanan kebersihan kantor	Kecamatan Bruno	12 Bulan	26.423.200,00	DAU		12 Bulan	29.065.520,00
41.129	Koordinasi dan Konsultasi Internal dan Eksternal	Layanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Kecamatan Bruno, Dalam Daerah, Luar Daerah	12 Bulan	102.185.000,00	DAU		12 Bulan	112.403.500,00
41.130	Pengelolaan Keamanan Kantor	Layanan keamanan kantor	Kecamatan Bruno	12 Bulan	21.012.000,00	DAU		12 Bulan	23.113.200,00
412	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Berfungsi Dengan Baik		100.00 %	127.590.400,00			100.00 %	140.349.440,00
41.222	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	Kecamatan Bruno	179 Unit/Th	23.735.400,00	DAU		179.00 Unit/Th	26.108.940,00
41.224	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	Kecamatan Bruno	14 unit	39.500.000,00	DAU		14.00 unit	43.450.000,00
41.247	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	Kecamatan Bruno	9.00 unit	49.510.000,00	DAU		9.00 unit	54.461.000,00
41.249	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara rutin/berkala	Kecamatan Bruno	20.00 unit	14.845.000,00	DAU		20.00 unit	16.329.500,00
415	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur		100.00 %	5.117.400,00			100.00 %	5.629.140,00
4.151	Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur	Aparatur yang meningkatkan kualifikasi, kapasitas dan kinerjanya	Kecamatan Bruno	1.00 Org	5.117.400,00	DAU		1.00 Org	5.629.140,00
416	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase Capaian Kinerja Dan Keuangan		100.00 %	13.800.000,00			100.00 %	15.180.000,00
4.165	Penyusunan Pelaporan Keuangan	Dokumen pelaporan keuangan	Kecamatan Bruno	19.00 Dok	5.000.000,00	DAU		19.00 Dok	5.500.000,00
4.166	Penyusunan Perencanaan Dan Evaluasi Pelaporan	Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan	Kecamatan Bruno	9.00 Dok	8.800.000,00	DAU		9.00 Dok	9.680.000,00
417	Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Prosentase tersedianya data dasar pembangunan		100.00 Dok	13.155.000,00			100.00 Dok	14.470.500,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.171	Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Dokumen data dasar pembangunan	Kecamatan Bruno	18.00 Dok	13.155.000,00	DAU		18.00 Dok	14.470.500,00
4.1.21	Program Koordinasi Tingkat Kecamatan	Capaian penyelesaian permasalahan bidang pemerintahan		100.00 %	402.698.000,00			100.00 %	442.967.800,00
		Capaian penyelesaian permasalahan bidang pemberdayaan masyarakat		100.00 %				100.00 %	
		Capaian penyelesaian permasalahan bidang pembangunan		100.00 %				100.00 %	
		Capaian penyelesaian permasalahan bidang tramtibum		100.00 %				100.00 %	
		Capaian penyelesaian permasalahan bidang kemasyarakatan		100.00 %				100.00 %	
41.211	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemerintahan	Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan	Kecamatan Bruno	6 Dok	150.500.000,00	DAU		17.00 Dok	165.550.000,00
41.212	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pembangunan	Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan	Kecamatan Bruno	3 Dok	39.600.000,00	DAU		100.00 %	43.560.000,00
41.213	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat	Kecamatan Bruno	3 Dok	89.699.800,00	DAU		100.00 %	98.669.780,00
41.214	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban umum	Kecamatan Bruno	3 Dok	57.500.000,00	DAU		100.00 %	63.250.000,00
41.215	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Kemasyarakatan	Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang kemasyarakatan	Kecamatan Bruno	3 Dok	65.398.200,00	DAU		100.00 %	71.938.020,00
4.1.22	Program Pembinaan Desa/Kelurahan	Cakupan jumlah desa /kelurahan yang terbina		100.00 %	90.000.000,00			100.00 %	99.000.000,00
41.222	Pembinaan Pelaksanaan Pembangunan Desa/Kelurahan	Desa/kelurahan yang dibina dalam pelaksanaan pembangunan di wilayahnya	Kecamatan Bruno	18.00 %	65.000.000,00	DAU		18.00 %	71.500.000,00
41.226	Pembinaan desa/kelurahan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan	Desa/kelurahan yang dibina dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan	Kecamatan Bruno	1.800	25.000.000,00	DAU		1.800	27.500.000,00
4.1.23	Program Pelayanan Masyarakat	Prosentase jumlah permohonan pelayanan yang tertangani		100.00 %	24.617.000,00			100.00 %	27.078.700,00
41.231	Pelayanan Terpadu Kecamatan	Layanan PATEN	Kecamatan Bruno	100.00 %	24.617.000,00	DAU		100.00 %	27.078.700,00

Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN GEBANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	TOTAL				1.823.368.100,00				2.005.704.910,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang								
41	Administrasi Pemerintahan				1.823.368.100,00				2.005.704.910,00
411	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran		100.00 %	142.061.800,00			100.00 %	156.267.980,00
41.126	Pengelolaan Surat-menyurat dan Kearsipan	Layanan surat menyurat dan kearsipan	Kecamatan Gebang	12.00 Bulan	36.460.800,00	DAU		12.00 Bulan	40.106.880,00
41.127	Penyediaan Layanan Komunikasi, Informasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Layanan komunikasi, informasi, sumberdaya air dan listrik	Kecamatan Gebang	12.00 Bulan	25.696.000,00	DAU		12.00 Bulan	28.265.600,00
41.128	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Layanan kebersihan kantor	Kecamatan Gebang	12.00 Bulan	12.712.000,00	DAU		12.00 Bulan	13.983.200,00
41.129	Koordinasi dan Konsultasi Internal dan Eksternal	Layanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Kecamatan Gebang, Dalam Daerah, Luar Daerah	12.00 Bulan	56.381.000,00	DAU		12.00 Bulan	62.019.100,00
41.130	Pengelolaan Keamanan Kantor	Layanan keamanan kantor	Kecamatan Gebang	12.00 Bulan	10.812.000,00	DAU		12.00 Bulan	11.893.200,00
412	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan sarana prasarana aparatur yang berfungsi dengan baik		100.00 %	135.400.800,00			100.00 %	148.940.880,00
4.125	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas/operasional yang diadakan	Kecamatan Gebang	2.00 unit	50.172.200,00	DAU		2.00 unit	55.189.420,00
41.222	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	Kecamatan Gebang	1.00 Unit/Th	13.260.000,00	DAU		1.00 Unit/Th	14.586.000,00
41.224	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	Kecamatan Gebang	10.00 Unit/Th	44.911.000,00	DAU		10.00 Unit/Th	49.402.100,00
41.228	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara rutin/berkala	Kecamatan Gebang	38.00 Unit/Th	12.250.000,00	DAU		38.00 Unit/Th	13.475.000,00
41.248	Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai dan Perlengkapannya	Pakaian dinas pegawai dan perlengkapannya yang diadakan	Kecamatan Gebang	21.00 Stel	14.807.600,00	DAU		21.00 Stel	16.288.360,00
415	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		100.00 %	7.465.200,00			100.00 %	8.211.720,00
4.151	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	Aparatur yang meningkat kualifikasi, kapasitas dan kinerjanya	Kecamatan Gebang	36.00 orang	7.465.200,00	DAU		36.00 orang	8.211.720,00
416	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase sistem Capaian kinerja dan Keuangan		100.00 %	16.428.400,00			100.00 %	18.071.240,00
4.165	Penyusunan Pelaporan Keuangan	Dokumen pelaporan keuangan	Kecamatan Gebang	14.00 Dok	6.644.400,00	DAU		14.00 Dok	7.308.840,00
4.166	Penyusunan Perencanaan Dan Evaluasi Pelaporan	Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan	Kecamatan Gebang	38.00 Dok	9.784.000,00	DAU		38.00 Dok	10.762.400,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
417	Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Prosentase tersedianya data dasar pembangunan		100.00 %	10.252.400,00			100.00 %	11.277.640,00
4.171	Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Dokumen data dasar pembangunan	Kecamatan Gebang	2.00 Dok	10.252.400,00	DAU		2.00 Dok	11.277.640,00
4.1.21	Program Koordinasi Tingkat Kecamatan	Capaian penyelesaian permasalahan bidang pemerintahan		100.00 %	363.397.300,00			100.00 %	399.737.030,00
		Capaian penyelesaian permasalahan bidang pemberdayaan masyarakat		100.00 %				100.00 %	
		Capaian penyelesaian permasalahan bidang pembangunan		100.00 %				100.00 %	
		Capaian penyelesaian permasalahan bidang trantibum		100.00 %				100.00 %	
41.211	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemerintahan	Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan	Kecamatan Gebang	9.00 Dok	141.503.100,00	DAU		9.00 Dok	155.653.410,00
41.212	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pembangunan	Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan	Kecamatan Gebang	6.00 Dok	81.988.300,00	DAU		6.00 Dok	90.187.130,00
41.213	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat	Kecamatan Gebang	6.00 Dok	86.433.600,00	DAU		6.00 Dok	95.076.960,00
41.214	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban umum	Kecamatan Gebang	6.00 Dok	53.472.300,00	DAU		6.00 Dok	58.819.530,00
4.1.22	Program Pembinaan Desa/Kelurahan	Cakupan jumlah desa / kelurahan yang terbina		100.00 %	1.131.224.000,00			100.00 %	1.244.346.400,00
412.255	Fasilitasi Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kel. Lugosobo	Sarpras dan pemberdayaan masyarakat	Kelurahan Lugosobo	2.00 Paket	80.000.000,00	DAU		2.00 Paket	88.000.000,00
412.256	Kegiatan Kel. Lugosobo	Aktivitas kelurahan 12 bulan lancar	Kelurahan Lugosobo	12.00 Bulan	131.224.000,00	DAU		12.00 Bulan	144.346.400,00
4.1.22.14 5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Lugosobo	Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Lugosobo	1.00 Kelurahan	542.059.000,00	DAU		1.00 Kelurahan	596.264.900,00
4.1.22.14 6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Lugosobo (DAU Tambahan)	Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Lugosobo	1.00 Kelurahan	325.818.000,00	DAU		1.00 Kelurahan	358.399.800,00
4.1.22.14 7	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Lugosobo (DAU Tambahan)	Desa/Kel meningkat kapasitasnya di bidang pemberdayaan masyarakat	Kelurahan Lugosobo	1.00 des/kel	27.123.000,00	DAU		1.00 des/kel	29.835.300,00
4.1.22.15 4	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kelurahan Lugosobo	Cakupan jumlah desa/kelurahan dengan penduduk miskin yang meningkat kapasitasnya	Kelurahan Lugosobo	100.00 %	25.000.000,00	DAU		100.00 %	27.500.000,00
4.1.23	Program Pelayanan Masyarakat	Prosentase jumlah permohonan pelayanan yang tertangani		100.00 %	17.138.200,00			100.00 %	18.852.020,00
41.231	Pelayanan Terpadu Kecamatan	Layanan PATEN	Kecamatan Gebang	12.00 Bulan	17.138.200,00	DAU		12.00 Bulan	18.852.020,00

Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN LOANO

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	TOTAL				786.374.800,00				905.641.720,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang								
4.1	Administrasi Pemerintahan				786.374.800,00				905.641.720,00
4.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan layanan administrasi perkantoran		100.00 %	184.762.700,00		100.00 %	221.715.240,00
4.1.1.26	Pengelolaan Surat-menyurat dan Kearsipan	Layanan surat-menyurat dan kearsipan	Kecamatan Loano	12 bulan	36.400.000,00	DAU		12 bulan	43.680.000,00
4.1.1.27	Penyediaan Layanan Komunikasi, Informasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Layanan komunikasi, informasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Loano	12 bulan	35.652.000,00	DAU		12 bulan	42.782.400,00
4.1.1.28	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Penyediaan Bahan Pembersih dan peralatan kebersihan	Kecamatan Loano	12 bulan	15.912.000,00	DAU		12 bulan	19.094.400,00
4.1.1.29	Koordinasi dan Konsultasi Internal dan Eksternal	Layanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Kecamatan Loano, Dalam Daerah, Luar Daerah	12 bulan	86.598.700,00	DAU		12 bulan	103.918.440,00
4.1.1.30	Pengelolaan Keamanan Kantor	Layanan keamanan kantor	Kecamatan Loano	12 bulan	10.200.000,00	DAU		12 bulan	12.240.000,00
4.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan sarana prasarana aparatur yang berfungsi dengan baik		100.00 %	141.959.000,00		100.00 %	134.942.760,00
4.1.2.5	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas/operasional yang diadakan	Kecamatan Loano	1 unit	29.506.700,00	DAU		1 unit	0,00
4.1.2.9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	Kecamatan Loano	13 unit	7.553.300,00	DAU		13 unit	9.063.960,00
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	Kecamatan Loano	3 unit/tahun	48.399.000,00	DAU		3 unit/tahun	58.078.800,00
4.1.2.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	Kecamatan Loano	10 unit/ 1tahun	42.799.000,00	DAU		10 unit/ 1tahun	51.358.800,00
4.1.2.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara rutin/berkala	Kecamatan Loano	10 unit/tahun	13.701.000,00	DAU		10 unit/tahun	16.441.200,00
4.1.6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Prosentase sistem Capaian kinerja dan Keuangan		100.00 %	19.343.000,00		100.00 %	23.211.600,00
4.1.6.5	Penyusunan Pelaporan Keuangan	Dokumen pelaporan keuangan	Kecamatan Loano	18 Dok	7.143.000,00	DAU		18 Dok	8.571.600,00
4.1.6.6	Penyusunan Perencanaan Dan Evaluasi Pelaporan	Dokumen perencanaan dan evaluasi pelaporan	Kecamatan Loano	12 Dok	12.200.000,00	DAU		12 Dok	14.640.000,00
4.1.7	Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan		Prosentase Ketersediaan Data Dasar Pembangunan		100.00 %	11.887.000,00		100.00 %	14.264.400,00
4.1.7.1	Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Dokumen data dasar pembangunan	Kecamatan Loano	2 Dok	11.887.000,00	DAU		2 Dok	14.264.400,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.1.21	Program Koordinasi Tingkat Kecamatan	Capaian penyelesaian permasalahan bidang pemerintahan		100.00 %	256.923.100,00	DAU		100.00 %	308.307.720,00
		Capaian penyelesaian permasalahan bidang pemberdayaan masyarakat		100.00 %				100.00 %	
		Capaian penyelesaian permasalahan bidang pembangunan		100.00 %				100.00 %	
		Capaian penyelesaian permasalahan bidang trantibum		100.00 %				100.00 %	
4.1.21.1	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemerintahan	Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan	Kecamatan Loano	3 Dok	61.500.000,00	DAU		3 Dok	73.800.000,00
4.1.21.2	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pembangunan	Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan	Kecamatan Loano	5 Dok	51.423.100,00	DAU		5 Dok	61.707.720,00
4.1.21.3	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Loano	8 Dok	99.000.000,00	DAU		8 Dok	118.800.000,00
4.1.21.4	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang Ketentraman dan ketertiban umum	Kecamatan Loano	5 Dok	45.000.000,00	DAU		5 Dok	54.000.000,00
4.1.22	Program Pembinaan Desa/Kelurahan	Cakupan jumlah desa / kelurahan yang terbina		100.00 %	158.500.000,00			100.00 %	190.200.000,00
4.1.22.15 7	Pembinaan Pelaksanaan Pembangunan Desa/Kelurahan	Desa/kelurahan yang dibina dalam pelaksanaan pembangunan di wilayahnya	Kecamatan Loano	21 desa	128.500.000,00	DAU		21 desa	154.200.000,00
4.1.22.15 8	Pembinaan desa/kelurahan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan	Desa/kelurahan yang dibina dalam penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan	Kecamatan Loano	21 desa	30.000.000,00	DAU		21 desa	36.000.000,00
4.1.23	Program Pelayanan Masyarakat	Prosentase jumlah permohonan pelayanan yang tertangani		100.00 %	13.000.000,00			100.00 %	13.000.000,00
4.1.23.1	Pelayanan Terpadu Kecamatan	Layanan PATEN	Kecamatan Loano	12 Bulan	13.000.000,00	DAU		12 Bulan	15.600.000,00

Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN BENER

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	TOTAL				849.116.200,00				931.867.820,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang								
41	Administrasi Pemerintahan				849.116.200,00				931.867.820,00
411	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian layanan administrasi perkantoran		100.00 %	192.940.400,00			100.00 %	212.234.440,00
41.126	Pengelolaan Surat-menyurat dan Kearsipan	Layanan surat-menyurat dan kearsipan	Kecamatan Bener	12.00 Bulan	37.758.400,00	DAU		12.00 Bulan	41.534.240,00
41.127	Penyediaan Layanan Komunikasi, Informasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Layanan komunikasi, informasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Bener	12.00 Bulan	44.676.000,00	DAU		12.00 Bulan	49.143.600,00
41.128	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Layanan kebersihan kantor	Kecamatan Bener	12.00 Bulan	14.012.000,00	DAU		12.00 Bulan	15.413.200,00
41.129	Koordinasi dan Konsultasi Internal dan Eksternal	Layanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Kecamatan Bener, Dalam Daerah, Luar Daerah	12.00 Bulan	74.870.000,00	DAU		12.00 Bulan	82.357.000,00
41.130	Pengelolaan Keamanan Kantor	Layanan keamanan kantor	Kecamatan Bener	12.00 Bulan	21.624.000,00	DAU		12.00 Bulan	23.786.400,00
412	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan sarana prasarana aparatur yang berfungsi dengan baik		100.00 %	140.395.400,00			100.00 %	154.434.940,00
4.125	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Sepeda Motor	Kecamatan Bener	1.00 unit	25.825.000,00	DAU		1.00 unit	28.407.500,00
41.222	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	Kecamatan Bener	1.00 Unit/Th	18.564.000,00	DAU		1.00 Unit/Th	20.420.400,00
41.224	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	Kecamatan Bener	12.00 Unit/Th	47.912.000,00	DAU		12.00 Unit/Th	52.703.200,00
41.247	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor	Kecamatan Bener	11.00 unit	38.559.400,00	DAU		11.00 unit	42.415.340,00
41.249	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara rutin/berkala	Kecamatan Bener	15.00 Unit/Th	9.535.000,00	DAU		15.00 Unit/Th	10.488.500,00
415	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur		100.00 %	8.000.000,00			100.00 %	8.800.000,00
4.151	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	Aparatur yang meningkat kualifikasi, kapasitas dan kinerjanya	Kecamatan Bener	20.00 Org	8.000.000,00	DAU		20.00 Org	8.800.000,00
416	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase capaian realisasi fisik keuangan terkendali		100.00 %	20.300.000,00			100.00 %	22.330.000,00
4.165	Penyusunan Pelaporan Keuangan	Dokumen pelaporan keuangan	Kecamatan Bener	18.00 Dok	9.700.000,00	DAU		18.00 Dok	10.670.000,00
4.166	Penyusunan Perencanaan Dan Evaluasi Pelaporan	Dokumen perencanaan dan evaluasi pelaporan	Kecamatan Bener	8.00 Dok	10.600.000,00	DAU		8.00 Dok	11.660.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
417	Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Prosentase Ketersediaan Data		100.00 %	12.689.600,00			100.00 %	13.958.560,00
4.171	Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Dokumen data dasar pembangunan	Kecamatan Bener	2.00 Dok	12.689.600,00	DAU		2.00 Dok	13.958.560,00
4.1.21	Program Koordinasi Tingkat Kecamatan	Capaian penyelesaian permasalahan bidang pemerintahan		100.00 %	385.193.300,00			100.00 %	423.712.630,00
		Capaian penyelesaian permasalahan bidang pemberdayaan masyarakat		100.00 %				100.00 %	
		Capaian penyelesaian permasalahan bidang pembangunan		100.00 %				100.00 %	
		Capaian penyelesaian permasalahan bidang tramtibum		100.00 %				100.00 %	
		Capaian penyelesaian permasalahan bidang kemasyarakatan		100.00 %				100.00 %	
41.211	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemerintahan	Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan	Kecamatan Bener	15.00 Dok	139.839.000,00	DAU		15.00 Dok	153.822.900,00
41.212	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pembangunan	Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan	Kecamatan Bener	5.00 Dok	24.979.600,00	DAU		5.00 Dok	27.477.560,00
41.213	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Bener	8.00 Dok	76.155.200,00	DAU		8.00 Dok	83.770.720,00
41.214	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang Ketentraman dan ketertiban umum	Kecamatan Bener	5.00 Dok	50.910.800,00	DAU		5.00 Dok	56.001.880,00
41.215	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Kemasyarakatan	Dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang kemasyarakatan	Kecamatan Bener	7.00 Dok	93.308.700,00	DAU		7.00 Dok	102.639.570,00
4.1.22	Program Pembinaan Desa/Kelurahan	Cakupan jumlah Desa/Kelurahan yang terbina		100.00 %	83.597.500,00			100.00 %	90.397.250,00
41.222	Pembinaan Desa/ Kelurahan Bidang Pembangunan	Desa/kelurahan yang dibina dalam pelaksanaan pembangunan di wilayahnya	Kecamatan Bener	28.00 Desa	67.997.500,00	DAU		28.00 Desa	74.797.250,00
4.1.22.15 8	Pembinaan desa/kelurahan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan	Desa/kelurahan yang dibina dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan	Kecamatan Bener	28.00 Desa	15.600.000,00	DAU		28.00 Desa	15.600.000,00
4.1.23	Program Pelayanan Masyarakat	Prosentase jumlah permohonan pelayanan yang tertangani		100.00 %	6.000.000,00			100.00 %	6.000.000,00
41.231	Pelayanan Terpadu Kecamatan	Layanan PATEN	Kecamatan Bener	12.00 Bulan	6.000.000,00	DAU		12.00 Bulan	6.000.000,00

Nama Perangkat Daerah : INSPEKTORAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	TOTAL				4.399.305.800,00				4.835.870.380,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang								
42	Pengawasan				4.399.305.800,00				4.835.870.380,00
421	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran		100.00 %	338.300.400,00			100.00 %	369.437.640,00
42.125	Pengelolaan Surat-menyurat dan Kearsipan	Layanan surat menyurat dan kearsipan	Inspektorat	12 Bulan	19.904.700,00	DAU		12 Bulan	21.895.170,00
42.126	Penyediaan Layanan Komunikasi, Informasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Layanan komunikasi, informasi, sumber daya air dan listrik	Inspektorat	12 Bulan	132.128.200,00	DAU		12 Bulan	145.341.020,00
42.127	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Layanan kebersihan kantor	Inspektorat	12 Bulan	14.390.600,00	DAU		12 Bulan	15.156.460,00
42.128	Koordinasi dan Konsultasi Internal dan Eksternal	Layanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Inspektorat, Dalam Daerah, Luar Daerah	12 Bulan	137.640.900,00	DAU		12 Bulan	151.404.990,00
42.129	Pengelolaan Keamanan Kantor	Layanan keamanan kantor	Inspektorat	12 Bulan	34.236.000,00	DAU		12 Bulan	35.640.000,00
422	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Berfungsi Dengan Baik		100.00 %	201.647.500,00			100.00 %	221.812.250,00
4.223	Pembangunan Gedung Kantor	Gedung Kantor	Inspektorat	1 Paket	0,00	DAU	Kebutuhan: Rp.2.652.000.000,-	0 Paket	0,00
4.225	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas/operasional yang diadakan	Inspektorat	7 unit	0,00	DAU	Kebutuhan: Rp.462.291.412,-	7 unit	0,00
4.227	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	Inspektorat	6 unit	975.000,00	DAU		6 unit	1.072.500,00
42.222	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	Inspektorat	1 Unit/Th	53.040.000,00	DAU		1 Unit/Th	58.344.000,00
42.224	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	Inspektorat	18 Unit/Th	78.000.000,00	DAU		18 Unit/Th	85.800.000,00
42.249	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemeliharaan perlengkapan kantor	Inspektorat	206 Unit/Th	69.632.500,00	DAU		209 Unit/Th	76.595.750,00
426	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase Capaian Kinerja Dan Keuangan		100.00 %	11.769.100,00			100.00 %	12.946.010,00
4.265	Penyusunan Pelaporan Keuangan	Dokumen pelaporan keuangan	Inspektorat	18.00 Dok	4.539.500,00	DAU		18 Dok	4.993.450,00
4.266	Penyusunan Perencanaan Dan Evaluasi Pelaporan	Dokumen perencanaan dan evaluasi pelaporan	Inspektorat	26.00 Dok	7.229.600,00	DAU		26 Dok	7.952.560,00
4.2.15	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Cakupan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah		100.00 %	3.847.588.800,00			100.00 %	4.231.674.480,00
		Prosentase cakupan satuan kerja yang diperiksa per tahun		80.00 %				80.00 %	
		Prosentase cakupan desa yang diperiksa/dievaluasi		80.81 %				100.00 %	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Prosentase cakupan pemeriksaan kasus yang tertangani		100.00 %				100.00 %	
		Prosentase pengembalian kerugian negara/ daerah ke kas negara/ daerah		100.00 %				100.00 %	
		Prosentase SDM Pemeriksa yang mengikuti Bimbingan Teknis		100.00 %				100.00 %	
		Tingkat ketersediaan laporan pajak- pajak pribadi dan LHKASN		100.00 %				100.00 %	
		Tingkat ketersediaan sistem dan prosedur pengawasan		100.00 %				100.00 %	
		Tingkat SDM Fungsional Pemeriks sesuai penjenjangan		100.00 %				100.00 %	
42.152	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Laporan hasil Penanganan kasus pengaduan di Lingkungan Pemerintah daerah	Kab. Purworejo	16 Laporan	134.470.000,00	DAU		16 Laporan	147.917.000,00
42.153	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Laporan Hasil Reviu LKD	Kabupaten Purworejo, Yogyakarta, Semarang, Jakarta	1 Laporan	638.505.100,00	DAU		1 Laporan	702.355.610,00
		Laporan Hasil Reviu Renja		41 laporan				41 laporan	
		Laporan Hasil Reviu RKA		82 laporan				82 laporan	
		Laporan Hasil Evaluasi SAKIP		28 laporan				28 laporan	
		Laporan Hasil Evaluasi SPIP OPD		41 laporan				41 laporan	
		Laporan Penerapan Zona Integritas		1 laporan				1 laporan	
		Laporan PMPRB		1 laporan				1 laporan	
		Laporan Self Assesment Kapabilitas APIP		1 laporan				1 laporan	
		Laporan Self Assesment Maturitas SPIP		1 laporan				1 laporan	
		Laporan Korsupgah		4 laporan				4 laporan	
		Laporan Telaah Sejawat Eksternal		1 laporan				1 laporan	
		Laporan Telaah Sejawat Internal		8 laporan				8 laporan	
		Laporan Reviu Pengelolaan Anggaran, PBJ, dan DD		4 laporan				4 laporan	
		Laporan Pengawasan BUMD		4 laporan				4 laporan	
		Laporan Hasil Reviu DAK		24 laporan				24 laporan	
		Laporan Hasil Evaluasi MR		8 laporan				8 laporan	
		Laporan Hasil Reviu LKJIP		1 laporan				1 laporan	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
42.155	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Laporan tindak lanjut hasil temuan pengawasan inspektorat	Kab. Purworejo, Insp. Prov, BPK, BPKP, Pusat	480 Laporan	457.157.900,00	DAU		480 Laporan	502.873.690,00
		Data tindak lanjut hasil temuan pengawasan BPK		2 Dokumen				2 Dokumen	
		Data tindak lanjut hasil temuan pengawasan Inspektorat provinsi		2 Dokumen				2 Dokumen	
		Data tindak lanjut hasil temuan pengawasan APIP Lain		2 Dokumen				2 Dokumen	
42.156	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Gelar Pengawasan Daerah	Kab. Purworejo, Provinsi, Kedu dan Pusat	5 Kali	248.910.600,00	DAU		5 Kali	273.801.660,00
		Koordinasi pengawasan		29 Kali				29 Kali	
42.158	Pemeriksaan khusus	Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus	Kab. Purworejo	4 jenis	86.412.000,00	DAU		4 jenis	95.053.200,00
421.510	Monitoring dan Evaluasi LHKPN dan LHKASN	Laporan monev LHKPN	Kab. Purworejo, Jakarta	1 laporan	158.200.000,00	DAU		1 laporan	174.020.000,00
		Laporan monev LHKASN		1 laporan				1 laporan	
		Laporan UPG		12 laporan				12 laporan	
421.511	Pelatihan dan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Terlaksananya Pelatihan di kantor Sendiri (PKS)	Inspektorat Kab, Provinsi, Jakarta	24 Kali	495.350.800,00	DAU		24 Kali	544.885.880,00
		Diklat teknis		65 orang/kali				65 orang/kali	
421.512	Pengelolaan jabatan fungsional	diklat Penjurangan Jabatan Fungsional	Inspektorat Kab, Provinsi, Jakarta	8 orang/kali	239.835.600,00	DAU		30 orang/kali	263.819.160,00
		Penilaian Angka Kredit		30 orang kali				20 orang/kali	
421.513	Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Perbup Kebijakan Pengawasan	Inspektorat Kab. Purworejo	1 dokumen	85.930.400,00	DAU		1 dokumen	94.523.440,00
		PKPT		1 dokumen				1 dokumen	
		PKAU		1 dokumen				1 dokumen	
		SOP		1 dokumen				1 dokumen	
		SKM		1 dokumen				1 dokumen	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
421.514	Sapu Bersih Pungutan Liar	Laporan satgas sapu bersih pungutan liar	Kab. Purworejo	12 Laporan	516.065.600,00	DAU		12 Laporan	567.672.160,00
421.515	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kab. Purworejo	1 laporan	66.560.800,00	DAU		1 laporan	73.216.880,00
421.517	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala Desa	Laporan hasil pengawasan desa	Kab. Purworejo	100 Laporan	354.521.000,00	DAU		100 Laporan	389.299.900,00
421.518	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala Satuan Kerja	Laporan hasil pengawasan satuan kerja	Kab. Purworejo	32 Laporan	365.669.000,00	DAU		32 Laporan	402.235.900,00

Nama Perangkat Daerah : **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	TOTAL				3.914.321.300,00				4.469.697.311,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang								
43	Perencanaan				3.639.321.300,00				4.369.697.311,00
431	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran		100.00 %	315.009.600,00			100.00 %	344.490.000,00
43.125	Pengelolaan Surat-menyurat dan Kearsipan	Layanan surat-menyurat dan kearsipan	Bappeda	12.00 Bulan	20.000.000,00	DAU		12.00 Bulan	22.000.000,00
43.126	Penyediaan Layanan Komunikasi, Informasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Layanan komunikasi, informasi, sumber daya air dan listrik	Bappeda	12.00 Bulan	74.892.600,00	DAU		12.00 Bulan	82.381.000,00
43.127	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Layanan kebersihan kantor	Bappeda	12.00 Bulan	28.824.000,00	DAU		12.00 Bulan	30.360.000,00
43.128	Koordinasi dan Konsultasi Internal dan Eksternal	Layanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Bappeda, Dalam Daerah, Luar Daerah	12.00 Bulan	173.881.000,00	DAU		12.00 Bulan	191.269.000,00
43.129	Pengelolaan Keamanan Kantor	Layanan keamanan kantor	Bappeda	12.00 Bulan	17.412.000,00	DAU		12.00 Bulan	18.480.000,00
432	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan sarana prasarana aparatur yang berfungsi dengan baik		100.00 %	156.440.000,00			100.00 %	237.222.800,00
43.222	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	Bappeda	1.00 Unit/Th	20.280.000,00	DAU		1.00 Unit/Th	46.000.000,00
43.224	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	Bappeda	20 Unit/Th	91.412.000,00	DAU		20 Unit/Th	142.000.000,00
		Jasa Tenaga Pengemudi / driver		12.00 Bulan				12.00 Bulan	
43.249	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara rutin/berkala	Bappeda		44.748.000,00	DAU			49.222.800,00
435	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur		100.00 %	78.310.000,00			100.00 %	338.879.768,00
4.351	Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur	Aparatur bappeda meningkat kompetensi teknis dan atau manajerial	Bappeda	10.00 Org	78.310.000,00	DAU		10.00 Org	187.000.000,00
4.354	Capacity Building Pegawai	Pegawai yang melaksanakan capacity building	-	47.00 Org	0,00	DAU		47.00 Org	151.879.768,00
436	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase Capaian Kinerja Dan Keuangan		100.00 %	75.900.000,00			100.00 %	160.254.743,00
4.365	Penyusunan Pelaporan Keuangan	Dokumen pelaporan keuangan	Bappeda	14.00 Dok	23.000.000,00	DAU		14.00 Dok	35.000.000,00
4.366	Penyusunan Perencanaan Dan Evaluasi Pelaporan	Dokumen perencanaan dan evaluasi pelaporan	Bappeda	38.00 Dok	52.900.000,00	DAU		38.00 Dok	125.254.743,00
4.3.15	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan Optimalisasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah		100.00 %	3.013.661.700,00			100.00 %	3.288.850.000,00
431.514	Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RKPD	Rekomendasi hasil Pengendalian Kebijakan RKPD	Kab. Purworejo	1.00 Dok	160.000.000,00	DAU		1.00 Dok	200.000.000,00
		Dokumen Pengendalian Pelaksanaan RKPD		1.00 Dok				1.00 Dok	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Dokumen Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun n-1		1.00 Dok				1.00 Dok	
		Dokumen data dasar pembangunan		1.00 Dok				1.00 Dok	
431.534	Penyusunan KLHS RPJMD	KLHS RPJMD	Kab. Purworejo	1.00 Dok	115.000.000,00	DAU		1.00 Dok	0,00
431.535	Workshop Perencanaan Pembangunan Daerah	Kapasitas SDM Pembangunan Perencana daerah meningkat		130.00 Org	334.000.000,00	DAU		130.00 Org	367.400.000,00
		Rancangan Renstra PD		42.00 Dok				42.00 Dok	
431.540	Fasilitasi IPDMIP	Dokumen Kebijakan IPDMIP	Kab. Purworejo	1.00 Dok	175.612.000,00	DAU		1.00 Dok	192.500.000,00
431.541	Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	Dokumen RKPD	Kab. Purworejo	1.00 Dok	1.199.049.700,00	DAU		1.00 Dok	1.318.950.000,00
		Dokumen RKPD Perubahan		1.00 Dok				1.00 Dok	
		Draft Ranwal RKPD Tahun n+2		1.00 Dok				1.00 Dok	
		Rancangan Teknokratis RPJMD		1.00 Dok				1.00 Dok	
		Dokumen Naskah Akademis RPJMD		1.00 Dok				1.00 Dok	
431.542	Penyiapan Bahan Perencanaan Bidang Kependudukan dan Pemberdayaan Masyarakat	Bahan Perencanaan Bidang Kependudukan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kab. Purworejo	1.00 Dok	180.000.000,00	DAU		1.00 Dok	198.000.000,00
431.543	Penyiapan Bahan Perencanaan Bidang Pemerintahan	Bahan Perencanaan Bidang Pemerintahan	Kab. Purworejo	1.00 Dok	60.000.000,00	DAU		1.00 Dok	66.000.000,00
431.544	Penyiapan Bahan Perencanaan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Bahan Perencanaan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Kab. Purworejo	1.00 Dok	60.000.000,00	DAU		1.00 Dok	66.000.000,00
431.545	Penyiapan Bahan Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Bahan Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Kab. Purworejo	1.00 Dok	100.000.000,00	DAU		1.00 Dok	110.000.000,00
		Koordinasi kegiatan Bidang AMPL		1.00 Kali				1.00 Kali	
431.547	Penyiapan Bahan Perencanaan Bidang Produksi	Dokumen hasil koordinasi	Kab. Purworejo	1.00 Dok	100.000.000,00	DAU		1.00 Dok	110.000.000,00
		Dokumen Hasil Survey		1.00 Dok				1.00 Dok	
431.548	Penyiapan Bahan Perencanaan Bidang Pengembangan Dunia Usaha	Bahan Perencanaan Bidang Pengembangan Dunia Usaha	Kab. Purworejo	1.00 Dok	30.000.000,00	DAU		1.00 Dok	110.000.000,00
431.549	Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Bankeu)	Kegiatan Bankeu	Kab. Purworejo	5.00 Keg	500.000.000,00	BANPROV		5.00 Keg	550.000.000,00
47	Penelitian dan Pengembangan				275.000.000,00				100.000.000,00
4.7.15	Program Penelitian dan Pengembangan	Prosentase Cakupan Penelitian dan Pengembangan		100.00 %	275.000.000,00			100.00 %	100.000.000,00
47.152	Sistem Inovasi Daerah (SIDA)	Rekomendasi hasil koordinasi	Kab. Purworejo	1.00 Dok	275.000.000,00	DAU		1.00 Dok	100.000.000,00
		Dokumen Pengembangan SIDA		1.00 Dok				1.00 Dok	
		Pemenang Krenova		3.00 Pemenang				3.00 Pemenang	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Dokumen Fasilitasi DRD		1.00 Dok				1.00 Dok	

Nama Perangkat Daerah : **BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN ASET DAERAH**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	TOTAL				10.726.941.600,00				11.263.288.680,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang								
44	Keuangan				10.726.941.600,00				11.263.288.680,00
441	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran		100 %	853.770.400,00			100 %	896.458.920,00
4.418	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Layanan kebersihan kantor	BPPKAD	12 Bulan	68.535.000,00	DAU		12 Bulan	71.961.750,00
44.125	Pengelolaan Surat-menyurat dan Kearsipan	Layanan surat-menyurat dan kearsipan	BPPKAD	12 Bulan	126.081.400,00	DAU		12 Bulan	132.385.470,00
44.126	Penyediaan Layanan Komunikasi, Informasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Layanan komunikasi, sumber daya air dan listrik	BPPKAD	12 Bulan	297.252.000,00	DAU		12 Bulan	312.114.600,00
44.128	Koordinasi dan Konsultasi Internal dan Eksternal	Layanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	BPPKAD, Dalam Daerah, Luar Daerah	12 Bulan	250.230.000,00	DAU		12 Bulan	262.741.500,00
44.129	Pengelolaan Keamanan Kantor	Layanan keamanan kantor	BPPKAD	12 Bulan	111.672.000,00	DAU		12 Bulan	117.255.600,00
442	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Berfungsi Dengan Baik		100 %	370.227.000,00			100 %	388.738.350,00
44.222	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	BPPKAD	1 Unit/tahun	25.857.000,00	DAU		1 Unit/tahun	27.149.850,00
44.224	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	BPPKAD	54 Unit/tahun	176.912.000,00	DAU		54 Unit/tahun	185.757.600,00
44.249	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara rutin/berkala	BPPKAD	278 Unit/tahun	167.458.000,00	DAU		278 Unit/tahun	175.830.900,00
44.249	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Genset	BPPKAD	1 Unit	0,00	DAU	Kebutuhan : Rp. 1.700.000.000,-	1 Unit	
445	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur		100 %	67.054.200,00			100 %	70.406.910,00
4.456	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	Aparatur yang meningkatkan kualifikasi, kapasitas dan kinerjanya	BPPKAD, Dalam Daerah, Luar Daerah	111 Orang	67.054.200,00	DAU		111 Orang	70.406.910,00
446	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase capaian kinerja dan keuangan		100 %	130.122.800,00			100 %	136.628.940,00
4.465	Penyusunan Pelaporan Keuangan	Dokumen pelaporan keuangan	BPPKAD	16 Dokumen	53.510.800,00	DAU		16 Dokumen	56.186.340,00
4.466	Penyusunan Perencanaan Dan Evaluasi Pelaporan	Dokumen perencanaan dan evaluasi pelaporan	BPPKAD	38 Dokumen	76.612.000,00	DAU		38 Dokumen	80.442.600,00
447	Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Prosentase tersedianya data dasar pembangunan		100 %	13.057.300,00			100 %	13.710.165,00
4.471	Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Data Dasar Pembangunan	BPPKAD	1 Dokumen	13.057.300,00	DAU		1 Dokumen	13.710.165,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.4.15	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan Waktu Dan Keakuratan Laporan Keuangan Daerah.		100,0%	9.292.709.900,00			100,00%	9.757.345.395,00
		Prosentase Pemantauan Penyusunan APBDes Tepat Waktu.		100,0%				100,00%	
		Prosentase Peningkatan PAD Terhadap Pendapatan Daerah.		15,1%				15,10%	
		Tingkat Capaian PAD Terhadap Target.		100,0%				100,00%	
		Tertib pengelolaan keuangan daerah		84,0%				84,00%	
		Prosentase ketetapan waktu penyusunan APBD dan APBD Perubahan		100,0%				100,00%	
		Prosentase pengelolaan aset (tanah dan gedung) yang dikelola dengan baik		100,0%				100,00%	
44.151	Penyusunan APBD	Dokumen APBD (KUA, PPAS, Nota Keuangan APBD, Perda APBD, Perbup Penjabaran APBD, KUPA, PPASP, Nota Keuangan APBDP, Perda APBDP, Perbup Penjabaran APBDP)	Kabupaten Purworejo	10 Dokumen	998.257.000,00	DAU		10 Dokumen	1.048.169.850,00
44.157	Monitoring Anggaran Pendapatan Belanja Desa	Dokumen hasil monitoring APBDesa dan rekomendasi hasil monev APBDes	Kabupaten Purworejo	1 Dokumen	25.000.000,00	DAU		1 Dokumen	26.250.000,00
44.159	Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah	Dokumen pengelolaan administrasi keuangan daerah	Kabupaten Purworejo	530 Dokumen	384.536.500,00	DAU		530 Dokumen	403.763.325,00
441.512	Pemutakhiran Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah	Simda keuangan yang terpelihara	Kabupaten Purworejo	1 unit	99.447.500,00	DAU		1 unit	104.419.875,00
441.516	Pengelolaan Administrasi Bantuan	Layanan administrasi bantuan	Kabupaten Purworejo	12 Bulan	205.770.000,00	DAU		12 Bulan	216.058.500,00
441.519	Penyusunan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LRA Semester 1 dan Prognosis, Perda Pertanggungjawaban APBD, Perbup Pertanggungjawaban APBD , dan LKPD)	Kabupaten Purworejo	4 Dokumen	416.767.900,00	DAU		4 Dokumen	437.606.295,00
441.526	Pendataan dan Pemeliharaan Data Pajak Selain PBB dan BPHTB	Database Pajak Daerah Selain PBB dan BPHTB yang mutakhir	Kabupaten Purworejo	12 bulan	411.805.500,00	DAU		12 bulan	432.395.775,00
441.531	Pelayanan PBB dan BPHTB	Layanan PBB dan BPHTB	Kabupaten Purworejo	12 Bulan	509.448.000,00	DAU		12 Bulan	534.920.400,00
441.532	Pelayanan Pajak Daerah Selain PBB dan BPHTB	Layanan Pajak daerah selain PBB dan BPHTB	Kabupaten Purworejo	12 Bulan	161.065.200,00	DAU		12 Bulan	169.118.460,00
441.541	Pengamanan Aset daerah	Aset daerah yang diamankan	Kabupaten Purworejo	200 Unit	369.615.000,00	DAU		200 Unit	388.095.750,00
441.544	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)	Kabupaten Purworejo	3 Dokumen	341.009.000,00	DAU		3 Dokumen	358.059.450,00
441.559	Penyusunan Dokumen Pendukung APBD	Dokumen pendukung APBD (SSH, ASB, Juklak APBD dan Evaluasi APBD)	Kabupaten Purworejo	4 Dokumen	399.000.000,00	DAU		4 Dokumen	418.950.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
441.561	Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen pengelolaan kas daerah	Kabupaten Purworejo	730 Dokumen	104.449.200,00	DAU		730 Dokumen	109.671.660,00
441.562	Penyusunan Laporan Keuangan PPKD	Dokumen Laporan Keuangan	Kabupaten Purworejo	2 Dokumen	124.208.500,00	DAU		2 Dokumen	130.418.925,00
441.563	Pendataan dan Pengembangan Pendapatan daerah	Dokumen pengembangan pendapatan daerah	Kabupaten Purworejo	4 Dokumen	420.423.300,00	DAU		4 Dokumen	441.444.465,00
441.564	Pengelolaan dan Pelaporan Pendapatan Daerah	Dokumen pengendalian dan pelaporan pendapatan daerah	Kabupaten Purworejo	27 Dokumen	312.400.000,00	DAU		27 Dokumen	328.020.000,00
441.565	Pemutakhiran Basis Data PBB dan BPHTB	Basis data PBB dan BPHTB yang mutakhir	Kabupaten Purworejo	4 Dokumen	907.931.600,00	DAU		4 Dokumen	953.328.180,00
441.567	Pemungutan Pajak Daerah Selain PBB dan BPHTB	Realisasi target Pajak Daerah Selain PBB dan BPHTB	Kabupaten Purworejo	100 %	299.011.000,00	DAU		100 %	313.961.550,00
441.568	Penilaian dan Optimalisasi Barang Milik Daerah	Dokumen optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD)	Kabupaten Purworejo	2 Dokumen	79.823.000,00	DAU		2 Dokumen	83.814.150,00
441.569	Penanganan Utang Piutang dan Investasi Daerah	Dokumen penatausahaan utang piutang dan investasi daerah	Kabupaten Purworejo	1 Dokumen	70.293.700,00	DAU		1 Dokumen	73.808.385,00
441.571	Pemungutan PBB dan BPHTB	Realisasi target PBB dan BPHTB	Kabupaten Purworejo	100 %	2.652.448.000,00	DAU		100 %	2.785.070.400,00

Nama Perangkat Daerah : **BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
TOTAL					4.777.051.600,00			14.161.254.580,00	
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang								
45	Kepegawaian				4.777.051.600,00			14.161.254.580,00	
451	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran		100.00 %	265.225.800,00			100.00 %	291.748.380,00
45.125	Pengelolaan Surat-menyurat dan Kearsipan	Layanan surat menyurat dan kearsipan	BKD	12.00 Bulan	27.294.100,00	DAU		12.00 Bulan	30.023.510,00
45.126	Penyediaan Layanan Komunikasi, Informasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Layanan komunikasi, informasi, sumber daya air dan listrik	BKD	12.00 Bulan	88.444.000,00	DAU		12.00 Bulan	97.288.400,00
45.127	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Layanan kebersihan kantor	BKD	12.00 Bulan	40.087.200,00	DAU		12.00 Bulan	44.095.920,00
45.128	Koordinasi dan Konsultasi Internal dan Eksternal	Layanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	BKD, Dalam Daerah, Luar Daerah	12.00 Bulan	109.400.500,00	DAU		12.00 Bulan	120.340.550,00
452	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan sarana prasarana aparatur yang berfungsi dengan baik		100.00 %	120.120.800,00			100.00 %	8.334.971.100,00
4.523	Pembangunan Gedung Kantor	Gedung kantor yang dibangun	BKD	1.00 unit	0,00	DAU	Kebutuhan : Rp.8.000.000.000,-	1.00 unit	8.000.000.000,00
45.222	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	BKD	2.00 Unit/Th	45.481.800,00	DAU	Kebutuhan : Rp.252.868.200,-	2.00 Unit/Th	252.868.200,00
45.224	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	BKD	10.00 Unit/Th	40.500.000,00	DAU		10.00 Unit/Th	44.550.000,00
45.230	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara rutin/berkala	BKD	43.00 Unit/Th	34.139.000,00	DAU		43.00 Unit/Th	37.552.900,00
456	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase capaian kinerja dan keuangan		100.00 %	65.250.000,00			100.00 %	71.775.000,00
4.565	Penyusunan Pelaporan Keuangan	Dokumen pelaporan keuangan	BKD	14.00 Dok	27.250.000,00	DAU		14.00 Dok	29.975.000,00
4.566	Penyusunan Perencanaan Dan Evaluasi Pelaporan	Dokumen perencanaan dan evaluasi pelaporan	BKD	38.00 Dok	38.000.000,00	DAU		38.00 Dok	41.800.000,00
457	Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Prosentase tersedianya data dasar pembangunan		100.00 %	5.259.000,00			100.00 %	5.784.900,00
4.571	Penyusunan Data Dasar Pembangunan	Dokumen data dasar pembangunan	BKD	1.00 Dok	5.259.000,00	DAU		1.00 Dok	5.784.900,00
4.5.15	Program Manajemen Kepegawaian Daerah	Prosentase jabatan pimpinan tinggi, administrasi dan fungsional yang telah memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan		95.50 %	4.321.196.000,00			95.50 %	5.456.975.200,00
		Prosentase Ketersediaan Jumlah Pegawai Sesuai Formasi		92.00 %				92.00 %	
		Prosentase pegawai yang telah lulus diklat prajabatan		100.00 %				100.00 %	
		Prosentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian		100.00 %				100.00 %	
		Tingkat Disiplin Pegawai		99.30 %				99.30 %	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
45.154	Penataan jabatan	Formasi jabatan terisi sesuai syarat jabatan	Kabupaten Purworejo, Luar Daerah	6.00 Kali	500.000.000,00	DAU	Kebutuhan : Rp.1.126.842.000,- Anggaran hanya cukup untuk melaksanakan: Formasi jabatan terisi sesuai syarat jabatan dan Seleksi terbuka.	6.00 Kali	550.000.000,00
		Seleksi terbuka		1.00 Kali				1.00 Kali	
		Data informasi dan rekomendasi tentang kompetensi pegawai		1.00 Dok				1.00 Dok	
45.154	Diklat Prajabatan	Kompetensi CPNS meningkat	Kabupaten Purworejo, Luar Daerah	22.00 Org	0,00	DAU	Kebutuhan : Rp. 70.000.000,-	22.00 Org	70.000.000,00
451.511	Peningkatan kompetensi teknis/fungsional aparatur	Kompetensi teknis / fungsional PNS meningkat	Kabupaten Purworejo, Luar Daerah	200.00 Org	500.000.000,00	DAU		200.00 Org	550.000.000,00
		Peta kebutuhan Pelatihan dan evaluasi pasca diklat		3.00 Dok				3.00 Dok	
451.528	Pembinaan disiplin PNS	Layanan penanganan kasus kepegawaian , ijin perceraian, laporan perkawinan, JKK, JKM, ijin kades	Kabupaten Purworejo, Luar Daerah	53.00 Org	65.584.000,00	DAU	Kebutuhan : Rp. 362.833.300,-. Dengan anggaran yang ada, target output Fasilitasi uji kesehatan pegawai yang sakit dan Penghargaan bagi PNS berprestasi tidak dapat tercapai.	53.00 Org	362.833.300,00
		Layanan administrasi usulan penghargaan satyaencana karya satya		200.00 usulan				200.00 usulan	
		Fasilitasi uji kesehatan pegawai yang sakit		6.00 Org				6.00 Org	
		Penghargaan bagi PNS berprestasi		6.00 Org				6.00 Org	
451.534	Pengembangan SIMPEG	Pelatihan, pengadaan, instalasi aplikasi/sarana prasarana/jaringan SIMPEG	Kabupaten Purworejo, Luar Daerah	1.00 Paket	0,00	DAU	Kebutuhan : Rp. 100.253.000,-	1.00 Paket	100.253.000,00
451.562	Pengembangan kompetensi manajerial	Kompetensi manajerial pejabat meningkat	Kabupaten Purworejo, Luar Daerah	62.00 Org	2.075.000.000,00	DAU		62.00 Org	2.282.500.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
451.564	Pengadaan pegawai sesuai formasi	Formasi dan peta pegawai	Kabupaten Purworejo, Luar Daerah	2.00 Dok	905.000.000,00	DAU		2.00 Dok	995.500.000,00
		Surat Izin Belajar, Surat Keterangan Penggunaan Gelar dan SK Tugas Belajar		3.00 Dok				3.00 Dok	
		Layanan ujian kedinasan		4.00 Kali				4.00 Kali	
		Data tenaga honorer		1.00 Dok				1.00 Dok	
		Layanan administrasi Pengangkatan ASN dan Pengambilan Sumpah/Janji ASN		2.00 Kali				2.00 Kali	
		Pengadaan Pegawai		500.00 Org				500.00 Org	
		Layanan penetapan NIP dan SK bagi ASN		500.00 Org				500.00 Org	
451.565	Pengolahan data base kepegawaian	Nominatif, DUK, rekapitulasi PNS	Kabupaten Purworejo, Luar Daerah	3.00 Dok	100.612.000,00	DAU		3.00 Dok	110.673.200,00
		Data SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian) yang up to date		1.00 Database				1.00 Database	
451.566	Pemindahan dan pemberhentian pegawai	SK Pensiun	Kabupaten Purworejo, Luar Daerah	569.00 Dok	100.000.000,00	DAU	Kebutuhan : Rp. 277.224.700,-. Dengan anggaran yang ada, target output Pembekalan pensiun tidak dapat tercapai.	569.00 Dok	277.224.700,00
		Surat Persetujuan / Penolakan Mutasi / SK Mutasi / SPMT		240.00 Dok				240.00 Dok	
		Pembekalan pensiun		4.00 Kali				4.00 Kali	
451.567	Penanganan administrasi kepegawaian	PNS yang naik pangkat	Kabupaten Purworejo, Luar Daerah	750.00 PNS	75.000.000,00	DAU	Kebutuhan : Rp. 157.991.000,-. Dengan anggaran yang ada, target output Sosialisasi kepegawaian tidak dapat tercapai.	750.00 PNS	157.991.000,00
		Rakor evaluasi kenaikan pangkat dan penerimaan SK kenaikan pangkat		2.00 Kali				2.00 Kali	
		Karpeg/KPE, Karis, Karsu dan Kartu Taspen		750.00 Dok				750.00 Dok	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Layanan administrasi Penilaian Prestasi Kerja, KGB, Inpassing Gaji Pejabat dan Cuti/Ijin PNS		284.00 Org				284.00 Org	
		Sosialisasi kepegawaian		2.00 Kali				2.00 Kali	

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2020 bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja Tahun 2020 yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir Tahun 2020.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 disajikan dalam Tabel 6.1. sebagai berikut ini.

Tabel 6.1
Target Indikator Kinerja Utama (IKU)
Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Kinerja Tahun 2020
1	2	3	4
1	Meningkatnya semangat kehidupan beragama	Cakupan layanan koordinasi dan fasilitasi kehidupan beragama	100%
2	Meningkatnya partisipasi publik dalam upaya perbaikan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan	Cakupan layanan komunikasi publik	100%
3	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Persentase cakupan peningkatan daya saing tenaga kerja	100%
4	Meningkatnya usaha agribisnis dalam pengelolaan potensi pertanian	Subsistem agroinput dan agro onfarm	100%
		Subsistem agroprosesing dan agromarketing	75%
5	Berkembangnya dan meningkatnya daya jual potensi wisata	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	20.00%
6	Meningkatnya kuantitas dan kualitas koperasi dan UMK (Usaha Mikro dan Kecil)	Persentase Pertumbuhan koperasi (baru, aktif, sehat)	84,5%
7	Meningkatnya nilai investasi	Pertumbuhan nilai investasi	2%
8	Meningkatnya produktivitas sektor perdagangan	Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	6,92%
9	Terwujudnya interkoneksi antar pusat kegiatan dan produksi di kabupaten	Persentase interkoneksi antar pusat kegiatan dan produksi di kabupaten	100%
10	Meningkatnya cakupan air minum, sanitasi & rumah layak huni bagi masyarakat	Persentase cakupan air minum	100%
		Cakupan akses sanitasi layak	100%
		Rasio permukiman layak huni	79.96%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Kinerja Tahun 2020
1	2	3	4
11	Meningkatnya kesesuaian arahan penggunaan lahan	Persentase peningkatan kesesuaian arahan penggunaan lahan	90.00%
12	Meningkatnya pelayanan irigasi	Persentase kinerja layanan irigasi	71,50%
13	Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup daerah	Indek Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	68,5
14	Meningkatnya pembinaan dan perlindungan asset budaya	Cakupan perlindungan asset budaya	38%
15	Meningkatnya prestasi seni dan budaya daerah	Pertumbuhan prestasi seni dan budaya daerah	10%
16	Meningkatnya prestasi Pemuda dan olahraga	Pertumbuhan prestasi pemuda dan olahraga	10%
17	Meningkatnya Aksesibilitas pendidikan	Angka harapan lama sekolah	14.1
18	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Kematian Ibu	70/ 100.000KH
		Angka Kematian Balita	10,5 / 1.000 KH
		Angka Kematian Bayi	11 / 1.000 KH
		Prevalensi Gizi Buruk	0.05%
19	Meningkatnya kapasitas pengelolaan keuangan dan asset daerah	Opini Hasil Audit BPK	WTP
20	Terwujudnya perencanaan yang akuntabel dan tepat waktu	Perencanaan pembangunan daerah yang akuntabel dan tepat waktu	97%
21	Meningkatnya kapasitas pembinaan dan pengawasan internal pemerintahan	Tingkat maturitas SPIP Kabupaten Purworejo	3
22	Meningkatnya kompetensi aparatur	Persentase aparat yang memiliki kapasitas sesuai standard	95,5%
23	Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih efektif	Cakupan layanan perumusan kebijakan daerah	100%
24	Meningkatnya keterbukaan informasi dan komunikasi publik yang berbasis Teknologi Informasi.	Cakupan layanan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah	100%
25	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase kepemilikan akta kelahiran bagi bayi yang lahir pada tahun berjalan	90.00%
26	Terkendalinya pertumbuhan penduduk	Angka pertumbuhan penduduk	0.35
27	Meningkatnya status desa	Persentase desa cepat berkembang	66.31%

Sumber: Keputusan Bupati Purworejo No. 160.18/614/2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir Tahun 2020 disajikan dalam Tabel 6.2.

Tabel. 6.2

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pemerintahan Kabupaten Purworejo Tahun 2020

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Target Capaian Kinerja Tahun 2020
1	2	3	4
A	Aspek Kesejahteraan Masyarakat		
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah	Persentase Pertumbuhan Ekonomi	6,64 %
2	Meningkatnya kualitas pembangunan manusia	Indeks Pembangunan Manusia	73.17
3	Menurunnya tingkat kemiskinan dan kesenjangan antar kelompok pendapatan	Persentase Penduduk Miskin	8%
		Gini Ratio	0,3
4	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	3.6
5	Menurunnya kesenjangan antar wilayah	Indeks Williamson	0,350
6	Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin	Persentase cakupan pelayanan dasar dan akses terhadap ekonomi produktif masyarakat kurang mampu	100%
7	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Persentase cakupan peningkatan daya saing tenaga kerja	100%
8	Meningkatnya produksi dan produktivitas sektor pertanian dalam arti luas	Pertumbuhan PDRB sektor pertanian	4,84%
9	Meningkatnya ketersediaan, distribusi dan konsumsi serta keamanan pangan daerah	Skor Pola Pangan harapan	85.90%
10	Meningkatnya usaha agribisnis dalam pengelolaan potensi pertanian	Subsistem agroinput dan agroonfarm	100%
		Nilai Tukar Petani (NTP)	105,87
		Subsistem agroprosesing dan agromarketing	75%
11	Berkembangnya dan meningkatnya daya jual potensi wisata	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	20%
12	Berkembangnya industri kecil dan menengah	Pertumbuhan PDRB sektor industry	6,29%
13	Meningkatnya kuantitas dan kualitas koperasi dan UMK (Usaha Mikro dan Kecil)	Persentase Pertumbuhan koperasi (baru, aktif, sehat)	84,5%
		Persentase pertumbuhan UMK	5%
14	Meningkatnya nilai investasi	Pertumbuhan nilai investasi	2%
15	Meningkatnya produktivitas sektor	Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	6,92%

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Target Capaian Kinerja Tahun 2020
1	2	3	4
	perdagangan		
16	Meningkatnya status desa	Persentase desa cepat berkembang	66.31%
		Persentase desa berkembang	27.29%
		Persentase desa kurang berkembang	6.40%
17	Cakupan layanan pembangunan kawasan perdesaan	Persentase kawasan perdesaan yang tertangani	100%
B	Aspek Pelayanan Umum		
1	Meningkatnya semangat kehidupan beragama	Cakupan layanan koordinasi dan fasilitasi kehidupan beragama	100%
2	Meningkatnya partisipasi publik dalam upaya perbaikan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan	Cakupan layanan komunikasi publik	100%
3	Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	68,5
4	Meningkatnya partisipasi pelaku budaya daerah	Cakupan pelaku budaya dalam even budaya daerah	10%
5	Meningkatnya pembinaan dan perlindungan asset budaya	Cakupan Pembinaan asset budaya	100%
		Cakupan perlindungan asset budaya	38%
6	Meningkatnya prestasi seni dan budaya daerah	Pertumbuhan prestasi seni dan budaya daerah	10.00%
7	Meningkatnya prestasi Pemuda dan olahraga	Pertumbuhan prestasi pemuda dan olahraga	10%
8	Meningkatnya ketersediaan wahana peningkatan prestasi seni budaya	Tersentralnya tempat pembinaan seni budaya di Art center	100%
9	Meningkatnya ketersediaan wahana peningkatan prestasi pemuda dan olahraga	Tersentralnya tempat pembinaan pemuda dan olahraga di Heroes Park Argoputro dan Sport center WR Supratman	100%
10	Meningkatnya Aksesibilitas pendidikan	Rata-rata lama sekolah	7.1
		Angka harapan lama sekolah	14.1
11	Terwujudnya Satuan pendidikan berbasis e-learning	Cakupan wilayah penerapan e-learning di tingkat SD	100%
		Cakupan wilayah penerapan e-learning di tingkat SMP	100%
12	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	74.4
		Angka Kematian Ibu	70 / 100.000 KH
		Angka Kematian Balita	10,5 / 1.000 KH
		Angka Kematian Bayi	11/ 1.000 KH
		Prevalensi Gizi Buruk	0.05%

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Target Capaian Kinerja Tahun 2020
1	2	3	4
		Eliminasi malaria	
		- API	<1
		- Kasus indogenius	20%
13	Meningkatnya kapasitas pengelolaan keuangan dan asset daerah	Opini Hasil Audit BPK	WTP
14	Terwujudnya perencanaan yang akuntabel dan tepat waktu	Perencanaan pembangunan daerah yang akuntabel dan tepat waktu	97
15	Meningkatnya kapasitas pembinaan dan pengawasan internal pemerintahan	Tingkat maturitas SPIP Kabupaten Purworejo	3
16	Penguatan Sistim Inovasi Daerah (SIDa)	Persentase penguatan SIDA	100%
17	Meningkatnya kompetensi aparatur	Persentase aparat yang memiliki kapasitas sesuai standard	95.50%
18	Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih efektif	Cakupan layanan perumusan kebijakan daerah.	100%
		Persentase BUMD sehat	100%
		Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	95%
		Persentase penerapan SOP Pelayanan Publik dan perangkat daerah	100%
		Cakupan pelayanan perangkat daerah	100%
		Cakupan koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	100%
19	Optimalisasi fungsi camat dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa	Persentase penyelesaian permasalahan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan	100%
20	Terselenggaranya dukungan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD	Persentase terwujudnya pelaksanaan fungsi DPRD yang tepat waktu	100%
21	Meningkatnya keterbukaan informasi dan komunikasi publik yang berbasis Teknologi Informasi.	Persentase Perangkat Daerah memiliki website yang interaktif	100%
		Cakupan layanan cybercity	100%
		Cakupan layanan Sistem Informasi Desa	100%
		Cakupan layanan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah	100%
22	Meningkatnya keamanan informasi pemerintah daerah	Cakupan layanan pengamanan informasi persandian	100%
23	Meningkatnya kepemilikan	Persentase kepemilikan	96.90%

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Target Capaian Kinerja Tahun 2020
1	2	3	4
	dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Kartu Keluarga	
		Persentase kepemilikan KTP-elektronik	96%
		Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	70%
		Persentase kepemilikan akta kelahiran bagi bayi yang lahir pada tahun berjalan	90.00%
		Persentase penduduk yang memiliki akte kelahiran bagi penduduk usia 0-18 tahun	90.00%
		Persentase kepemilikan akte kematian	70%
		Persentase kepemilikan akta perkawinan non muslim	100%
24	Meningkatnya layanan penanganan masalah pertanahan	Persentase penanganan permasalahan pertanahan	100%
25	Terkendalinya pertumbuhan penduduk	Angka pertumbuhan penduduk	0.35
		Cakupan keluarga yang mendapat layanan UPPKS	2,70%
		Cakupan keluarga yang mendapat layanan Tri Bina	62,44%
26	Meningkatnya pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Cakupan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	100%
27	Optimalnya pelayanan penanggulangan bencana dan kebakaran di daerah	Cakupan pelayanan penanggulangan bencana	100%
		Cakupan Pelayanan Kebakaran Kabupaten	34.20%
28	Meningkatnya layanan tramtibumlinmas	Cakupan Pelayanan Pemeliharaan Ketertiban umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat	100%
29	Meningkatnya kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak dan pemenuhan hak anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93.3
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	69,00
		Cakupan layanan pemenuhan hak anak (indikator pemenuhan hak anak)	80%
30	Meningkatnya minat baca masyarakat	Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan	2,76%
31	Meningkatnya tertib kearsipan daerah	Persentase tertib kearsipan lembaga pemerintah daerah	86%
32	Meningkatnya layanan	Tingkat ketersediaan data	100%

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Target Capaian Kinerja Tahun 2020
1	2	3	4
	ketersediaan statistik sektoral dan daerah yang akurat	statistik sektoral dan daerah yang akurat	
33	Meningkatnya layanan informasi dan fasilitasi penyelenggaraan transmigrasi	Cakupan layanan informasi dan fasilitasi penyelenggaraan transmigrasi	100%
34	Meningkatnya fasilitasi serta layanan data dan informasi urusan ESDM	Cakupan layanan informasi dan fasilitasi ESDM	100%
35	Meningkatnya dukungan kinerja perangkat daerah	Cakupan dukungan terhadap kinerja perangkat daerah	100%
C	Aspek Daya Saing Daerah		
1	Terwujudnya interkoneksi antar pusat kegiatan dan produksi di kabupaten	Persentase interkoneksi antar pusat kegiatan dan produksi di kabupaten	100%
2	Meningkatnya cakupan air minum, sanitasi dan rumah layak huni bagi masyarakat	Persentase cakupan air minum	100%
		Cakupan akses sanitasi layak	100%
		Persentase pengangkutan sampah	70.00%
		Persentase Luas titik genangan yang tertangani	52.45%
		Rasio permukiman layak huni	79.96%
3	Meningkatnya kesesuaian arahan penggunaan lahan	Persentase peningkatan kesesuaian arahan penggunaan lahan	90.00%
4	Meningkatnya pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh, perkotaan Purworejo-Kutoarjo dan border city.	Persentase pengembangan kawasan cepat tumbuh, perkotaan Purworejo-Kutoarjo dan border city	52,5%
5	Meningkatnya cakupan layanan transportasi yang efektif dan efisien	Tingkat kelancaran, keamanan, dan keselamatan transportasi	92%
6	Meningkatnya pelayanan irigasi	Persentase kinerja layanan irigasi	71,50%

Sumber: RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021

BAB VII PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purworejo Tahun 2020 ini telah disusun dengan memfokuskan prioritas program dan kegiatan Tahun 2020 sesuai dengan tema pembangunan **“Pemantapan Infrastruktur dan Pertumbuhan Ekonomi dalam rangka Mendukung Romansa Purworejo 2020”** dan berpedoman pada arah kebijakan pembangunan daerah tahun keempat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purworejo Tahun 2020 tergantung pada konsistensi penjabarannya dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2020 dan peran aktif dari Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk melaksanakan pembangunan sesuai rencana yang telah ditargetkan. Pemerintah Kabupaten Purworejo telah berkomitmen untuk mengimplementasikan perencanaan dan penganggaran yang terpadu melalui integrasi *e-planning* dan *e-budgeting* serta menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Harapannya agar target indikator kinerja kegiatan, program, sasaran, dan tujuan dapat tercapai sehingga Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati Purworejo dapat terwujud.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purworejo Tahun 2020 selanjutnya dijadikan sebagai pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Kabupaten Purworejo Tahun 2020 dan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2020 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2020. Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara tersebut disampaikan Bupati Purworejo kepada DPRD Purworejo

untuk dibahas sebagai landasan penyusunan Rancangan APBD (RAPBD) Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2020.

Perencanaan pembangunan di daerah merupakan awal dari keseluruhan tahapan pembangunan daerah. Memulai pembangunan dengan perencanaan pembangunan yang baik menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Diharapkan dengan tersusunnya RKPD Tahun 2020, maka seluruh tahapan baik penganggaran, pelaksanaan maupun pertanggungjawaban dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

BUPATI PURWOREJO,



BAGUS BASTIAN



**Pemerintah
Kabupaten Purworejo**